



**PEMERINTAH KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)  
TAHUN ANGGARAN 2018**



**TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**LAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018**

**TAHUN 2019**



## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

---

### KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wata'ala Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat, hidayah dan inayahNya; shalawat dan salam semoga tercurah atas Rasulullah, keluarga dan sahabatnya serta pengikut-pengikutnya hingga hari kiamat.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Pemerintah merupakan pelaksanaan dari amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada Pasal 69 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD.

Amanat dari kedua peraturan tersebut di atas menyatakan Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan "progress report" pelaksanaan tugas atau laporan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran. LPPD Tahun 2018 merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara yuridis formal telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018. Disamping itu dengan adanya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna baik secara penyajian maupun substansi materi yang disajikan. Untuk itu berbagai kritik saran yang ada sebagai masukan bagi pemerintah daerah untuk lebih menyempurnakan laporan ini pada khususnya dan pada akhirnya bagi kemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati kami mohon semua pihak dapat memberikan kritik, saran dan pandangan serta masukan yang konstruktif guna perbaikan atau peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah pada tahun-tahun mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tenggarong,     Maret 2019  
**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si**

# DAFTAR ISI

	<b>HAL</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. DASAR HUKUM	1
B. GAMBARAN UMUM DAERAH	2
1. Kondisi Geografis Daerah	2
C. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS	3
D. KONDISI EKONOMI	4
a) Potensi Unggulan Daerah	4
b) Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	6
<b>BAB II     RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)</b>	<b>14</b>
A. VISI DAN MISI	14
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH	16
C. PRIORITAS DAERAH	29
<b>BAB III    URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN               PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>36</b>
I. URUSAN KONKUREN	36
a. Ringkasan Urusan Wajib Pelayanan Dasar	36
1. Urusan Pendidikan	37
2. Urusan Kesehatan	48
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	90
4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	96
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	107
6. Urusan Sosial	111
b. Ringkasan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	119
7. Urusan Ketenagakerjaan	119
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	129
9. Urusan Pangan	136
10. Urusan Pertanahan	144
11. Urusan Lingkungan Hidup	151



12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	163
13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	170
14. Urusan Perhubungan	176
15. Urusan Komunikasi dan Informatika	182
16. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	193
17. Urusan Penanaman Modal	201
18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga	207
19. Urusan Perpustakaan	211
c. Ringkasan Urusan Pilihan	218
1. Urusan Kelautan dan Perikanan	218
2. Urusan Pertanian	228
3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	242
4. Urusan Pariwisata	252
5. Urusan Perindustrian	256
II. RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, INSPEKTORAT DAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA).	266
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	266
2. Badan Kepegawaian Pendidikan & Pengembangan SDA	277
3. BAPENDA	282
4. BALITBANGDA	290
5. Inspektorat Kabupaten	293
6. Sekretariat Daerah	302
7. Sekretariat DPRD	315
8. Sekretariat Kopri	319
III. RINGKASAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	332
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	379
IV. INDIKATOR KINERJA KUNCI	328
<b>BAB IV REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2018</b>	<b>329</b>
4.1 TEMA PEMBANGUNAN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018	329
4.2 TUJUAN DAN SASARAN	330
4.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	335

<b>BAB V</b>	<b>TUGAS PEMBANTUAN</b>	<b>363</b>
	A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA	364
	1. Dasar Hukum	364
	2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	364
	3. Program dan Kegiatan	365
	4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	365
	5. Sumber dan Jumlah Anggaran	365
	6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan	365
	7. Permasalahan dan Solusi	366
	B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN	366
<b>BAB VI</b>	<b>TUGAS UMUM PEMERINTAHAN</b>	<b>367</b>
	A. KERJA SAMA ANTAR DAERAH	367
	B. KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA	368
	C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH	373
	D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH	375
	E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	378
	F. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	381
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>409</b>

# BAB I

# BAB I

## PENDAHULUAN

Literatur sejarah menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juli 1863 Kerajaan Kutai Kertanegara mulai menjadi daerah Swapraja sebagai bagian dari Kerajaan Hindia Belanda. Sementara pada masa penjajahan Jepang tahun 1942 daerah Swapraja Kutai Kertanegara mendapat pengaturan tersendiri dan mempunyai kedudukan istimewa.

Pada tahun 1945 berhasil diduduki kembali oleh Belanda dan pada tahun 1947 Kalimantan Timur dibentuk menjadi Federasi dengan status Satuan Kertanegara yang berdiri sendiri dan terdiri atas daerah-daerah Kesultanan Kutai, Bulungan, Sambaliung, Gunung Tabur, dan Pasir dengan sebutan Swapraja. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 1949 masuk dalam wilayah Republik Indonesia Serikat (RIS) dan pada tanggal 10 April 1950 Federasi Kalimantan Timur masuk dalam Republik Indonesia (yang beribukota di Yogyakarta).

Kemudian pada tanggal 7 Januari 1953 berdasarkan Undang-Undang Darurat nomor 3 tahun 1953 maka daerah Swapraja Kutai Kertanegara diubah menjadi Daerah Istimewa Kutai yang merupakan daerah otonom atau daerah istimewa tingkat Kabupaten. Sementara pada tahun 1959 status daerah istimewa tersebut dihapus melalui Undang-Undang nomor 27 tahun 1959 dan dibagi menjadi Daerah Swatantra yang meliputi : Kotapraja Balikpapan, Kotapraja Samarinda dan Daerah Tingkat II Kutai.

### A. DASAR HUKUM

---

Dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 23 Maret 2002.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

## B. GAMBARAN UMUM DAERAH

### 1. Kondisi Geografis Daerah

Secara geografis, Kabupaten Kutai Kartanegara terletak antara 115°26'28" Bujur Timur sampai dengan 117°36'43" Bujur Timur dan 1°28'21" Lintang Utara sampai dengan 1°08'06" Lintang Selatan. Berdasarkan UU nomor 20 Tahun 2012, Kabupaten Kutai Kartanegara adalah salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Timur.

Luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 27.263,10 km<sup>2</sup> dan luas perairan yaitu ± 4.097 km<sup>2</sup>. Wilayah administrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 18 kecamatan dan 237 desa/kelurahan yang terdiri dari 44 kelurahan, 185 desa definitif dan 8 desa persiapan. Berikut ini ditampilkan tabel pembagian luas wilayah per kecamatan dan jumlah desa/kelurahan dan gambar peta Kabupaten Kutai Kartanegara.

**Tabel 1.1**

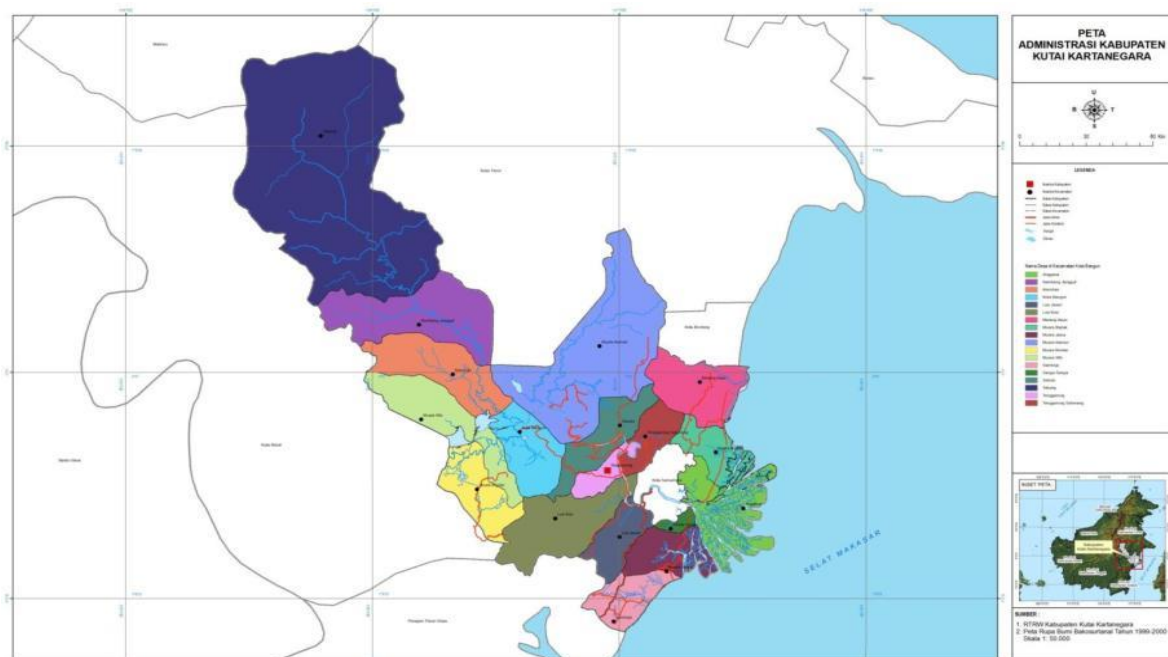
Luas wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa / Kelurahan di Kab. Kutai Kartanegara

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Desa
		Km <sup>2</sup>	Persen	
1.	Samboja	1045,9	3,51	23
2.	Muara Jawa	754,5	2,53	8
3.	Sanga-sanga	233,4	0,78	5
4.	Loa Janan	644,2	2,16	8
5.	Loa Kulu	1405,7	4,71	15
6.	Muara Muntai	928,6	3,11	13
7.	Muara Wis	1108,2	3,71	7
8.	Kota Bangun	1143,7	3,83	21
9.	Tenggarong	398,1	1,33	14
10.	Sebulu	859,5	2,88	14
11.	Tenggarong Seberang	437,0	1,46	18
12.	Anggana	1798,8	6,03	8
13.	Muara Badak	939,1	3,15	13
14.	Marang Kayu	1165,7	3,91	11
15.	Muara Kaman	3410,1	11,43	20
16.	Kenohan	1302,2	4,36	9
17.	Kembang Janggut	1923,9	6,45	11
18.	Tabang	7764,5	34,64	19
<b>Kabupaten Kutai Kartanegara</b>		<b>27.263,10</b>	<b>100,00</b>	<b>237</b>

Batas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara secara administrasi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Malinau.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur dan Selat Makasar.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat.

Di antara 18 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, kecamatan Tabang dan Muara Kaman memiliki wilayah yang paling luas, masing-masing 34,64 persen dan 11,43 persen dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan yang wilayah paling kecil adalah kecamatan Sanga-sanga dan Tenggarong masing-masing 0,78 persen dan 1,33 persen dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

**Gambar : Peta Administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara**

Sumber: Peta RT RW Kabupaten Kutai Kartanegara

Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dilihat dari fisiografinya dapat dikelompokkan kedalam 9 satuan fisiografi yaitu daerah wara pasang surut (tidal swamp), daerah dataran alluvial (alluvial plain), daerah jalur kelokan sungai (meander belt), daerah rawa (swamp), daerah lembah alluvial (alluvial valley), daerah teras (terrain), daerah dataran (plain), daerah perbukitan (hill) dan daerah pegunungan (mountain).

Jenis tanah yang terdapat didaerah ini digolongkan kedalam tanah yang bereaksi asam. Jenis-jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Soil Taxonomi USDA tergolong ke dalam jenis tanah : *Ultisol*, *Entisol*, *Histosol*, *Incepticol* dan *Mollisol* atau bila menurut lembaga penelitian di Bogor terdiri dari jenis tanah : *Podsolik*, *Andosol*, *Renzina* dan *Alluvial*.

Topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar bergelombang dan berbukit dengan kemiringan landai sampai curam. Daerah kemiringan datar sampai landai dengan ketinggian antara 7-25 m dpl terdapat di beberapa bagian yaitu pada kawasan pantai dan sebagian besar Daerah Aliran Sungai Mahakam. Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dibedakan menjadi 6 kelas wilayah ketinggian.

Iklim di Kabupaten Kutai Kartanegara dipengaruhi oleh letak geografinya yakni iklim hutan tropika dengan suhu udara rata-rata 26<sup>0</sup> C, dimana perbedaan antara suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai 5<sup>0</sup> – 7<sup>0</sup> C. Jumlah curah hujan wilayah ini berkisar 2.000-4.000 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 130-150 hari/tahun. Curah hujan terendah yaitu dari 0 – 2.000 mm/tahun tersebar di wilayah pantai dan semakin meningkat ke wilayah pedalaman atau kearah barat.

### C. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Berdasarkan data daftar agregat kependudukan Kabupaten semester II 2018 penduduk Kutai Kartanegara tahun 2018 adalah **677.755** jiwa yang terdiri atas **352.226** laki-laki dan **325.529**



perempuan. Hampir sepanjang tahun, jumlah penduduk di Kutai Kartanegara selalu mengalami peningkatan.

**Tabel 1.2**  
Jumlah Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2018\*

No.	Kecamatan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	MUARA MUNTAI	8.912	8.339	17.251
2	LOA KULU	25.983	23.923	49.906
3	LOA JANAN	33.104	30.527	63.631
4	ANGGANA	15.364	14.247	29.611
5	MUARA BADAQ	22.342	20.787	43.129
6	TENGGARONG	52.376	49.935	102.311
7	SEBULU	20.338	18.446	38.784
8	KOTA BANGUN	17.646	16.404	34.050
9	KENOHAN	5.488	4.990	10.478
10	KEMBANG JANGGUT	11.544	10.466	22.010
11	MUARA KAMAN	19.904	17.801	37.705
12	TABANG	5.551	5.029	10.580
13	SAMBOJA	31.899	28.976	60.875
14	MUARA JAWA	20.356	18.664	39.020
15	SANGA-SANGA	9.986	9.504	19.490
16	TENGGARONG SEBERANG	34.004	31.553	65.557
17	MARANG KAYU	12.982	11.928	24.910
18	MUARA WIS	4.447	4.010	8.457
<b>TOTAL</b>		<b>352.226</b>	<b>325.529</b>	<b>677.755</b>

*Sumber Data : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Kartanegara*

Pada tahun 2018 sebagian besar penduduk Kutai Kartanegara berada di ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Kecamatan Tenggarong (15,10%). Selanjutnya berada di Kecamatan Loa Janan (9,39%), Kecamatan Tenggarong Seberang (9,67%) dan di Kecamatan Samboja (8,98%). Selebihnya tersebar di empat belas kecamatan lainnya. Pola persebaran ini dari beberapa tahun tidak banyak berubah. Sedangkan Kecamatan dengan persentase jumlah penduduk terkecil adalah Muara Wis sebesar 1,25% .

Dari hasil tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk Kutai Kartanegara masih bertumpu di Kecamatan Tenggarong yakni sebesar 15,34 persen. Hal ini dikarenakan Kecamatan Tenggarong merupakan ibu kota kabupaten yang tentunya menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian, sehingga penduduk lebih cenderung untuk bertempat tinggal di kecamatan tersebut.

## D. KONDISI EKONOMI

### a. Potensi Unggulan Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara terletak di Provinsi Kalimantan Timur, dan memiliki potensi sumber daya alam yang beragam. Beragamnya sumber daya alam yang tersedia sangat menjanjikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu dengan

mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki diharapkan dapat menjadi peluang investasi bagi Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **1. Lapangan usaha Pertanian**

Potensi sumber daya pertanian di Kabupaten Kartanegara cukup beranekaragam terdiri dari tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan dll. Kabupaten Kutai Kartanegara terus menggalakan gerakan tanam jagung dengan memperluas lahan tanaman jagung diwilayahnya. Oleh karena itu pemerintah daerah mencanangkan program revolusi jagung yang merupakan integrasi seluruh sumber daya berbasis pada komoditas jagung yang dapat menggerakkan ekonomi kerakyatan. Kegiatan revolusi jagung di Kutai Kartanegara diawali dari Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak. Kedepan Muara Badak diharapkan menjadi kawasan sentra jagung. Dimana telah dikembangkan lahan untuk tanam jagung adalah sebesar 3.694 Ha. Akhir 2018, jagung yang tertanam hampir mencapai 700 Ha di Kutai Kartanegara. Selain Muara Badak, revolusi jagung juga dilaksanakan di Kecamatan Tenggarong Seberang sebesar 200 Ha, Samboja sebesar 500 Ha dan Marangkayu sebesar 200Ha.

Sementara jenis buah-buahan juga telah dibudidayakan baik secara tradisional maupun dengan teknologi terbatas, misalnya nanas, buah naga, pisang, rambutan, dan lain-lain. Selanjutnya di sub katagori perkebunan, komoditas kelapa sawit dikembangkan dengan pola usaha perkebunan rakyat dan perkebunan besar yang dikelola oleh perusahaan swasta di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebar di 18 kecamatan. Komoditas kelapa sawit menjadi primadona sebagai komoditas ekspor dalam bentuk CPO maupun CPKO sebagai bahan baku minyak goreng dll. Komoditas Kakao dan karet juga menjadi komoditas ekspor unggulan bagi Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun kebanyakan komoditas ini masih dikelola secara tradisional.

Jenis-jenis ternak yang menjadi komoditas unggulan antara lain sapi potong, kambing, ayam ras pedaging dan petelur, serta kerbau kalang. Potensi peternakan di Kabupaten Kutai Kartanegara sangat tinggi. Mengingat sampai saat ini untuk pemenuhan daging ternak maupun unggas bagi masyarakat Kalimantan Timur masih didatangkan dari luar daerah seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Jawa Timur dan Bali, sehingga potensi peternakan sangat menjanjikan dikembangkan di Kukar. Sementara pada subkatagori perikanan, komoditas andalan dengan nilai ekonomi yang cukup tinggi dan sudah dikembangkan dan dibudidayakan oleh masyarakat Kutai Kartanegara antara lain udang windu, kepiting, ikan patin, ikan betutu, serta berbagai macam jenis ikan tawar lainnya.

### **2. Kategori Industri Pengolahan**

Kegiatan industri pengolahan di Kutai Kartanegara berkembang sangat pesat, hal ini ditandai dengan bermunculannya industri besar di wilayah ini. Industri makanan minuman, industri galangan kapal, industri perkayuan, Industri CPO juga mulai marak seiring dengan meningkatnya produksi kelapa sawit di wilayah ini.

### **3. Kategori Pertambangan**

Kabupaten Kutai Kartanegara sangat kaya dengan sumber daya alam, khususnya minyak mentah, gas alam serta batubara. Katagori Pertambangan merupakan katagori yang menjadi penggerak perekonomian di kabupaten ini. Namun hal ini perlu perhatian khusus dalam menjaga kestabilan perekonomian dalam jangka panjang, karena sumber daya pertambangan merupakan sumber daya yang dapat habis, jika tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan tambang perlu dilakukan dengan benar, yang memperhitungkan eksistensi dan keseimbangan katagori ekonomi lainnya dan kelestarian alam yang ada.

#### 4. Kategori Pariwisata

Kabupaten Kutai Kartanegara selain terkenal dengan daerah yang kaya dengan sumber daya alam, juga memiliki beragam daya tarik wisata yang unik dan menarik baik itu daya tarik wisata alam, budaya, maupun buatan. Jenis daya tarik wisata yang paling banyak dimiliki Kutai Kartanegara adalah daya tarik wisata budaya. Kekayaan budaya Kutai Kartanegara memang tidak terhingga nilainya. Selain sebagai tempat berdiri dan berkembangnya kerajaan Hindu tertua di Indonesia, Kutai Kartanegara juga merupakan tempat tinggal berbagai suku yang memiliki budaya yang unik.

Daya tarik wisata alam yang paling banyak dimiliki Kutai Kartanegara adalah air terjun, sedangkan daya tarik wisata budaya yang paling banyak adalah benda-benda cagar budaya yang terdapat pada museum-museum di Kabupaten Kutai Kartanegara. Potensi daya tarik wisata budaya lainnya yang juga banyak dimiliki adalah kesenian-kesenian tradisional maupun kontemporer yang memperkaya kebudayaan Kutai Kartanegara, selain itu upacara-upacara adat, dan even-even lokal, maupun internasional.

Daya tarik wisata buatan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara juga tidak kalah menariknya dengan daya tarik wisata alam dan budaya. Walaupun jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dua jenis daya tarik wisata lainnya, daya tarik wisata buatan di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah banyak diketahui oleh wisatawan nusantara, khususnya yang berasal dari Kalimantan Timur dan daerah lain di Indonesia. Daya tarik wisata buatan yang sudah banyak dikenal adalah Taman Rekreasi Pulau Kumala, Jembatan Repo-Repo, Planetarium, Waduk Panji Sukarame, Taman Pedestrian Tepian Mahakam dan Taman Wisata Ladaya.

#### b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB (Tiga Tahun Terakhir)

##### Besaran PDRB Menurut Kategori Tahun 2018\*

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sebagai indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu baik yang dihitung atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah dari nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu yang dikelompokkan dalam beberapa kategori dan sub kategori sebagaimana yang tertuang dalam *System Of National Accounts* (SNA 2008). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan jumlah produksi dikalikan harga produsen yang berlaku pada setiap periode pencatatan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan jumlah produksi dikalikan harga produsen pada tahun dasar (Tahun 2010).

Pada tahun 2018 harga batu bara acuan (HBA) kembali mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada Agustus 2018 saja, HBA tercatat pada level USD 107,83 per metrik ton, meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar USD 104,65 per metrik ton. Sehingga semakin memasuki pengujung tahun biasanya akan semakin naik. Sebagai wilayah yang mengandalkan komoditas ekspor primer, kinerja perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara sangat dipengaruhi oleh komoditas migas dan batubara. Keadaan tersebut secara langsung memberikan dampak terhadap perekonomian pada tahun 2018. PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara atas dasar harga berlaku Pada tahun 2018 sebesar Rp 167,01 triliun, dan apabila komoditas Migas dikeluarkan (PDRB Tanpa Migas) sebesar Rp 116,03 triliun. Selanjutnya perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, dimana besaran PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dengan migas pada tahun 2018 sebesar Rp 120,49 triliun, adapun Tanpa Migas PDRB sebesar Rp 77,90 triliun.

**Tabel 1.3**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Dalam Tiga Tahun Terakhir 2016-2018\*\* (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2016 <sup>r)</sup>	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16.781.700,1	19.202.328,9	21.848.958,9
	a. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	10.890.078,6	12.792.687,6	14.519.529,1
	b. Kehutanan dan Penebangan Kayu	1.930.084,6	1.879.626,3	2.275.674,7
	c. Perikanan	3.961.536,9	4.530.015,0	5.053.755,2
2	Pertambangan dan Penggalian	82.395.699,9	97.052.499,1	110.567.417,4
	a. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	41.841.100,0	45.130.503,6	50.980.861,0
	b. Pertambangan Batubara dan Lignit	37.048.267,5	47.914.851,9	54.988.508,5
	c. Pertambangan Bijih Logam	227.421,0	246.249,8	305.552,4
	d. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	3.278.911,4	3.760.893,8	4.292.495,5
3	Industri Pengolahan	5.201.226,5	6.132.060,1	7.107.240,8
4	Pengadaan Listrik dan Gas	51.657,3	66.671,7	56.694,3
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	42.020,8	47.135,6	53.084,1
6	Konstruksi	10.207.440,4	11.120.171,7	10.859.536,7
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.676.949,5	5.282.409,4	5.882.319,4
8	Transportasi dan Pergudangan	1.302.853,6	1.424.549,0	1.555.878,9
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	350.871,1	408.119,4	442.521,7
	a. Penyediaan Akomodasi	57.805,4	63.625,1	65.663,3
	b. Penyediaan Makan Minum	293.065,7	344.494,2	376.858,4
10	Informasi dan Komunikasi	874.655,1	968.156,7	1.100.612,6
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	406.960,3	433.835,5	545.265,0
12	Real Estate	708.038,3	790.614,1	905.905,8
13	Jasa Perusahaan	42.065,9	45.666,5	52.139,0
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.338.292,2	2.413.001,1	2.994.936,7
15	Jasa Pendidikan	1.436.503,8	1.711.725,0	1.832.989,4
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	803.479,3	916.349,9	871.905,4

No	Lapangan Usaha	2016 <sup>r)</sup>	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	Jasa lainnya	268.728,7	321.665,7	340.509,5
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>127.889.142,8</b>	<b>148.336.959,5</b>	<b>167.017.915,7</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>86.048.042,8</b>	<b>103.206.455,9</b>	<b>116.037.054,7</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

Catatan: <sup>r)</sup> angka revisi <sup>\*</sup> angka sementara <sup>\*\*</sup> angka sangat sementara

Besaran PDRB ADHB menurut kategori, pada tahun 2018 dimana kategori Pertambangan dan Penggalian merupakan katagori yang memberi andil terbesar Rp 110,56 triliun, dengan sumbangan sub kategori Minyak, Gas dan Panas Bumi sebesar Rp 50,98 triliun. Selanjutnya kategori Pertanian sebesar Rp 21,84 triliun, Konstruksi sebesar 10,85 triliun, Industri Pengolahan sebesar 7,10 triliun, Perdagangan besar dan eceran sebesar 5,88 triliun, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib sebesar 2,94 triliun serta Jasa Pendidikan sebesar 1,83 triliun, Transportasi dan Pergudangan sebesar 1,55 triliun. Sedangkan nilai tambah bruto (NTB) yang dihasilkan katagori lainnya masih di bawah Rp 1 triliun.

**Tabel 1.4**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010  
Tahun 2016-2018\*\* (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2016 <sup>r)</sup>	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.935.702,6	11.539.660,2	12.298.452,3
	a. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	6.472.296,2	6.983.480,4	7.541.689,0
	b. Kehutanan dan Penebangan Kayu	1.427.387,8	1.312.130,6	1.332.421,8
	c. Perikanan	3.036.018,5	3.244.049,2	3.424.341,5
B	Pertambangan dan Penggalian	86.259.982,7	86.272.313,5	86.917.060,1
	a. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	44.447.376,1	42.822.322,7	42.589.918,5
	b. Pertambangan Batubara dan Lignit	38.991.282,6	40.554.224,3	41.400.358,7
	c. Pertambangan Bijih Logam	167.339,1	157.905,8	156.448,7
	d. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	2.653.984,9	2.737.860,7	2.770.334,1
C	Industri Pengolahan	3.755.514,4	3.914.894,1	4.081.926,0
D	Pengadaan Listrik dan Gas	50.445,9	57.296,9	56.116,9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	35.847,2	38.877,3	37.528,7
F	Konstruksi	6.280.685,6	6.519.138,1	6.733.265,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran;	3.459.209,7	3.657.007,5	3.669.549,2

No	Lapangan Usaha	2016 <sup>r)</sup>	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Reparasi Mobil dan Sepeda Motor			
H	Transportasi dan Pergudangan	967.151,3	1.027.750,5	1.053.042,0
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	239.407,5	268.665,0	271.902,3
	a. Penyediaan Akomodasi	38.784,9	39.858,2	41.031,2
	b. Penyediaan Makan Minum	200.622,6	228.806,7	230.871,1
J	Informasi dan Komunikasi	752.887,4	820.843,0	913.377,1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	303.751,7	315.893,0	317.136,0
L	Real Estate	533.226,7	539.475,1	548.942,3
M,N	Jasa Perusahaan	30.201,2	30.972,8	32.335,9
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.620.682,9	1.595.801,7	1.639.524,1
P	Jasa Pendidikan	958.583,4	1.073.298,7	1.040.930,2
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	617.472,9	675.843,5	659.910,3
R,S,T,U	Jasa lainnya	201.870,7	222.977,2	221.668,0
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>117.070.579,5</b>	<b>118.663.242,4</b>	<b>120.495.451,0</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>72.623.203,4</b>	<b>75.840.919,7</b>	<b>77.905.532,5</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

Catatan: <sup>r)</sup> angka revisi <sup>\*)</sup> angka sementara <sup>\*\*)</sup> angka sangat sementara

### c. Pertumbuhan Ekonomi Kutai Kartanegara Menurut Kategori Tahun 2018

Pertumbuhan ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan nilai tambah atau pertambahan total nilai tambah (PDRB) dalam periode waktu tertentu, misalkan satu tahun, satu semester atau satu triwulan. Perekonomian suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan jika balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, pengertian pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang sering digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan di suatu wilayah. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kutai Kartanegara pada tahun 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2017 yaitu menjadi sebesar.

Selanjutnya pada kategori lainnya, seperti pertanian, konstruksi industri pengolahan masih mengalami pertumbuhan, hal ini terlihat dari meningkatnya produksi kelapa sawit serta industri pengolahan kelapa sawit (CPO) cukup berperan dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi. Kinerja ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2017 ini menunjukkan trend negatif. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2017 dengan migas sebesar negatif 4,16 persen, sementara PDRB Tanpa Migas sebesar negatif 3,17 persen,



dan apabila migas dan batu bara dikeluarkan dari perhitungan maka pertumbuhan ekonomi menjadi positif sebesar 2,16 persen.

**Tabel 1.5**  
Indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kab. Kutai Kartanegara

INDIKATOR MAKRO DAERAH	2015	2016	2017*	2018**
<i>Laju Pertumbuhan Ekonomi</i>	-7.08	-1.71	2.16	1,54
<i>Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas</i>	-9.97	-2.28	5.39	2,72
<i>Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas &amp; Batubara</i>	4.76	2.01	4.16	3,45
<i>PDRB ADHB (juta rupiah)</i>	127,897,432	127.889.142,8	148.336.959,5	167.017.915,7
<i>PDRB ADHB Tanpa Migas</i>	82,377,335	86.048.042,8	103.206.455,9	116.037.054,7
<i>PDRB ADHB Tanpa Migas &amp; Batubara</i>	44,651,191	48.999.775,3	55.291.604,0	61.048.546,3
<i>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</i>	71.78	72.19	73.35	
<i>Gini Rasio</i>	0.290	0.270	0.260	
<i>Indeks Williamson dengan migas</i>	0.85	0.85	0.83	
<i>Indeks Williamson tanpa migas</i>	0.36	0.33	0.28	

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

Ket :

Indeks williamson :

< 0.35 ketimpangan rendah

0.35 < x < 0.50 ketimpangan sedang

> 0.50 ketimpangan tinggi

#### d. Struktur Ekonomi

Beragamnya kegiatan perekonomian dapat memberikan warna pada struktur perekonomian di suatu wilayah. Distribusi persentase PDRB secara Katagorial menunjukkan peranan masing-masing Katagori dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu Katagori, semakin besar pula pengaruh Katagori tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah.

Katagori pertambangan memiliki kontribusi sebesar 66,20 persen terhadap perekonomian di Kutai Kartanegara. Dengan rincian Sub kategori migas sebesar 30,52 persen dan sub kategori batubara sebesar 32,92 persen. Pertambangan minyak dan gas bumi merupakan penyumbang terbesar dalam struktur perekonomian di Kutai Kartanegara. Demikian pula, jika pertambangan minyak dan gas diabaikan, pertambangan batubara yang menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian di wilayah ini. Hal ini perlu diwaspadai dalam menjaga kestabilan pembangunan di Kutai Kartanegara dalam jangka panjang. Sumber daya pertambangan merupakan sumber daya yang dapat habis jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu pengelolaan tambang juga perlu dilakukan dengan benar, yaitu dengan memperhitungkan eksistensi dan

keseimbangan pengembangan Katagori ekonomi lainnya serta kelestarian alam yang ada.

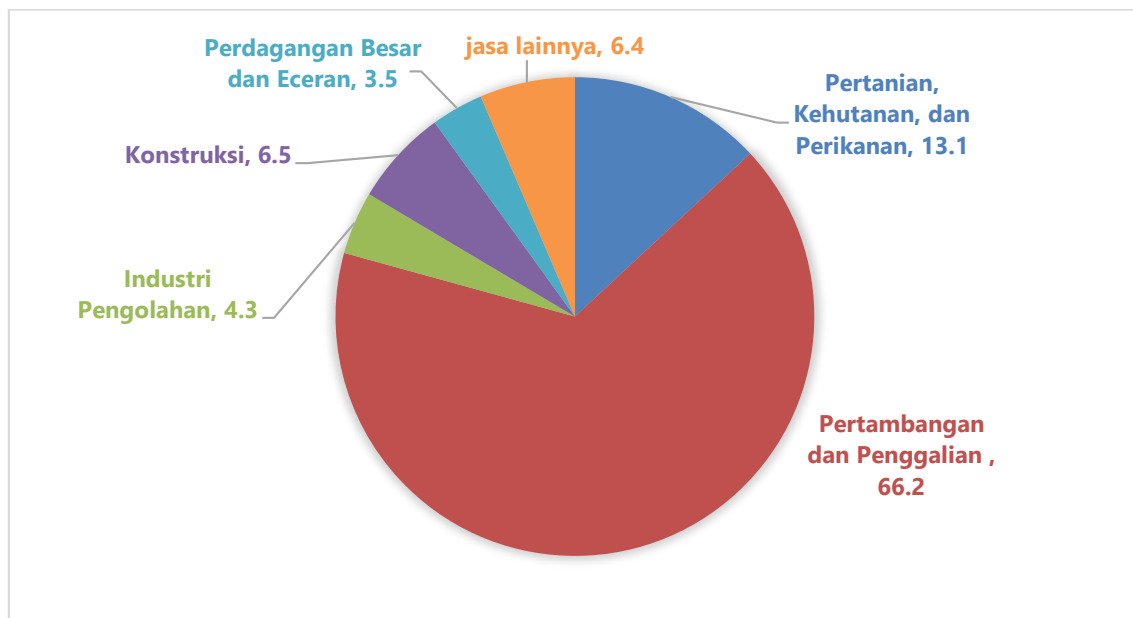
**Tabel 1.6**  
Distribusi PDRB Dengan Migas Tahun 2016-2018\*\* (%)

No	Uraian	2016 <sup>r)</sup>	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,12	12,95	13,08
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	8,52	8,62	8,69
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	1,51	1,27	1,36
	3 Perikanan	3,10	3,05	3,03
B	Pertambangan dan Penggalian	64,43	65,43	66,20
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	32,72	30,42	30,52
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	28,97	32,30	32,92
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,18	0,17	0,18
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	2,56	2,54	2,57
C	Industri Pengolahan	4,07	4,13	4,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	7,98	7,50	6,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,66	3,56	3,52
H	Transportasi dan Pergudangan	1,02	0,96	0,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,27	0,28	0,26
	1 Penyediaan Akomodasi	0,05	0,04	0,04
	2 Penyediaan Makan Minum	0,23	0,23	0,23
J	Informasi dan Komunikasi	0,68	0,65	0,66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,55	0,53	0,54
L	Real Estate	0,03	0,03	0,03
M,N	Jasa Perusahaan	1,83	1,63	1,79
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,12	1,15	1,10
P	Jasa Pendidikan	0,63	0,62	0,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,21	0,22	0,20
R,S,T, U	Jasa lainnya	0,55	0,53	0,54
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>67,28</b>	<b>69,58</b>	<b>69,48</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

Ket : \*\*2018 data sangat sementara

**Grafik**  
**Struktur Ekonomi Kutai Kartanegara Dengan Migas Tahun 2018 (persen)**



#### e. PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita

Indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita atau *Percapita Income*. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Oleh karena pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar (*transfer out*) serta pendapatan faktor produksi dan transfer masuk (*transfer in*) yang merupakan komponen penghitungan pendapatan regional, belum dapat dihitung maka dalam penghitungan pendapatan per kapita menggunakan PDRB perkapita. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto per penduduk dalam satu tahun secara nominal. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 berguna untuk mengetahui nilai tambah nyata serta pertumbuhannya.

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator yang diturunkan dari angka PDRB. Angka tersebut di dapat dengan cara membagi angka PDRB suatu tahun dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang ada di di daerah itu. PDRB Perkapita yang menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk bukanlah alat untuk mengukur kesejahteraan karena nilai PDRB tersebut belum tentu dimiliki oleh penduduk wilayah tersebut.

Nilai PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2018 sebesar 246,48 juta rupiah lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2017 yakni sebesar 148,32 juta rupiah. Jika komponen migas dikeluarkan dari penghitungan PDRB, maka besarnya PDRB perkapita atas dasar harga berlaku sebesar 171,21 juta rupiah lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 101,42 juta rupiah.

Peningkatan PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku belum menggambarkan peningkatan secara riil, karena masih adanya pengaruh kenaikan harga dan tingkat inflasi

yang terjadi pada suatu wilayah. PDRB Perkapita atas dasar harga konstan mampu memberi gambaran secara riil serta mampu menunjukkan perubahan tingkat kesejahteraan penduduk.

# BAB II

## BAB II

# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

**R**PJM Daerah adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari Visi, Misi, dan Program dari Kepala Daerah terpilih. Dalam penyusunan RPJM Daerah berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, yang di dalamnya memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Program Lintas SKPD, dan Program Kewilayahan disertai dengan Rencana-rencana Kerja dalam Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam RPJM Daerah juga ditekankan arti pentingnya upaya dalam menerjemahkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang mampu merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan maupun ketidakberhasilan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Belajar dari pengalaman keberhasilan (*Success Story*) dan proses pembelajaran (*Lessons Learned*) pada pelaksanaan pembangunan Gerbang Raja periode 2011 – 2015, maka setelah melalui proses Pilkada langsung pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian mencanangkan kembali program pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dalam konsep "Gerbang Raja Jilid II" (*Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera*) yang kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat pemandu, pengarah dan pedoman dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sekaligus juga dijadikan dasar dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada saat akhir masa jabatan.

## A. VISI DAN MISI

---

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2016–2021 adalah:

***"Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan"***

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:

**MAJU** : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan menuju pada semakin efektifnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan



- pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang responsif, merata, berkualitas, dan berbasis kemajuan teknologi.
- MANDIRI** : Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kemampuan dalam mendayagunakan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki (ekonomi, sosial, budaya, sumberdaya alam dan energi) berbasis kearifan lokal dan menurunnnya disparitas pembangunan antar wilayah serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.
- SEJAHTERA** : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat didukung pemenuhan hak pelayanan dasar masyarakat yang meliputi tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang tinggi, pemenuhan derajat kesehatan masyarakat, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran rendah. Selain itu sejahtera juga diarahkan untuk kondisi masyarakat yang bermartabat, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, serta memiliki kehidupan dalam suasana yang aman dan damai.
- BERKEADILAN** : Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang adil dan merata, tanpa diskriminasi baik antar individu maupun golongan yang berdasarkan keadilan gender serta perlindungan anak.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016- 2021, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah;
5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah;
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.

Keterkaitan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1**

Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Visi	Pokok-pokok Visi	Misi
<b>Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang</b>	<b>Maju</b>	Misi 1: Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat

Visi	Pokok-pokok Visi	Misi
<b>Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan</b>	<b>Mandiri</b>	Misi 3: Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah
		Misi 4: Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah
		Misi 5: Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah
		Misi 6: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
	<b>Sejahtera</b>	Misi 2: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten
	<b>Berkeadilan</b>	Misi 7: Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak

## B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang terencana dan terukur yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun mulai 2016 sampai dengan 2021.

Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di RKPD. Penetapan arah kebijakan pembangunan mengindikasikan bahwa pembangunan di tahun

berkenaan diprioritaskan pada isu atau aspek tertentu untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan

Strategi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2016–2021 diarahkan pada 7 (tujuh) Misi dari Visi GERBANG RAJA (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera), yang menjadi pedoman dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan Visi Gerbang Raja, agenda prioritas pembangunan menitikberatkan pada: 1) Reformasi Birokrasi; 2) Daya Saing Sumberdaya Manusia; 3) Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah; 4) Transformasi Struktur Ekonomi Daerah; 5) Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik; 6) Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan; dan 7) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### 1. Reformasi Birokrasi;

Reformasi Birokrasi, difokuskan dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah.

1.1. Sasaran Meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah.

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

##### a. Revitalisasi Pelaksanaan Fungsi Manajemen Pemerintahan

Arah Kebijakan

- 1) Mapping distribusi pegawai;
- 2) Penerapan Analisis Jabatan dan Penghitungan kebutuhan ideal pegawai
- 3) Penerapan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Penyusunan Kelas Jabatan (Evaluasi Jabatan), dan Penyusunan Pola Karier Pegawai
- 4) Penerapan Standar Kompetensi Jabatan Administrator, Penerapan SOP, dan Updating SOTK
- 5) Peningkatan kinerja SDM jabatan fungsional, dan Analisis kebutuhan diklat berdasarkan Grand Design pengembangan aparatur.
- 6) Pemantapan tunjangan kinerja, implementasi standar pelayanan minimal; dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh pegawai.
- 7) Penguatan koordinasi kebijakan antar SKPD
- 8) Penguatan kewenangan kecamatan dalam pelayanan dan peran pembangunan kewilayahan
- 9) Penguatan kapasitas eksekutif dan legislatif
- 10) Penguatan penelitian dan pengembangan bagi proses pembangunan terpadu antar sektor antar wilayah
- 11) Pemanfaatan data dan informasi, serta analisis statistik daerah dalam memperkuat perencanaan, prioritas penganggaran, dan evaluasi pembangunan
- 12) Pengembangan sistem perencanaan terpadu berbasis IT
- 13) Peningkatan kapasitas SDM perencana di tiap perangkat daerah
- 14) Peningkatan partisipasi dan peran masyarakat dalam pembangunan daerah
- 15) Penerapan standarisasi keamanan informasi daerah yang bersifat rahasia negara
- 16) Penerapan pengelolaan arsip secara baik di seluruh perangkat daerah
- 17) Pengembangan pemerataan penduduk di semua wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
- 18) Penerapan tertib administrasi pertanahan
- 19) Pengembangan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat RT

- 20) Penguatan peran kelompok masyarakat di tingkat desa dalam menyukseskan pengendalian penduduk dan program KB
  - 21) Pengembangan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan daerah
  - 22) Pembangunan baseline data dari tingkat kecamatan sampai kabupaten untuk perencanaan, penganggaran, monitoring evaluasi dan pelaporan, dan LKJiP.
  - 23) Pengukuran IKM di semua SKPD Pelayanan
- b. Fasilitasi dan Pendampingan Pelaksanaan Dana Desa, dengan arah kebijakan:
- 1) Peningkatan kompetensi aparat pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa serta penyusunan dokumen pengelolaan dana desa sejak perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban
  - 2) Pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban melalui buku panduan pengelolaan dana desa serta peningkatan keterampilan aparat desa dalam penyusunan dokumen perencanaan desa, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, serta memberikan pemahaman dan keterampilan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa agar pelaksanaan alokasi dana desa terarah dan terpadu dengan prioritas pembangunan daerah.
- 1.2. Sasaran Optimalnya Akuntabilitas dan Pengawasan Daerah  
 Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum, dengan arah kebijakan:
- a. Peningkatan kualitas SDM aparatur agar tertib aturan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah serta penambahan tenaga personil pengawas internal pemerintah daerah
  - b. Peningkatan dan penerapan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah, dan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
  - c. Penerapan SAP berbasis Akrua di seluruh perangkat daerah secara online
  - d. Penguatan SDM pengelola keuangan daerah
  - e. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah melalui pendampingan terarah di setiap perangkat daerah
- 1.3. Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat  
 Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah Penguatan Pelayanan Kependudukan di Tingkat Kewilayahan, dengan arah kebijakan:
- a. Pelayanan "jemput bola" e-KTP secara periodik untuk wilayah terpencil
  - b. Sosialisasi dan pendataan berkala
  - c. Pemberdayaan pemerintah desa terkait tertib administrasi kependudukan masyarakat
- 1.4. Sasaran Optimalnya Pengendalian Penduduk dan Pelayanan Keluarga Berencana  
 Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah Peningkatan KB Keluarga, dengan arah kebijakan:
- a. Pengembangan KB Keluarga melalui jejaring asektor KB sampai dengan desa
  - b. Pendataan Pasangan Usia Subur (PUS)
  - c. Membangun pemahaman masyarakat akan arti penting program KB bagi kesejahteraan keluarga

- 1.5. Sasaran Optimalnya Kerjasama Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha Untuk Menjaga Keamanan, Ketertiban, dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana  
 Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah Peningkatan Sinergitas Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha, dengan arah kebijakan:
  - a. Peningkatan koordinasi antar stakeholder sampai dengan tingkat desa
  - b. Pengadaan sarana prasana komunikasi terpadu
  - c. Penguatan kapasitas keamanan lingkungan berbasis masyarakat
  - d. Penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana di tiap kecamatan

## 2. Daya Saing Sumberdaya Manusia;

Daya Saing Sumberdaya Manusia, difokuskan dalam rangka mencapai tujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, sehat, berpendidikan, terampil, berakhlak dan berperilaku mulia; serta menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

### 2.1. Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, dengan arah kebijakan:
  - a. Pembangunan Sekolah baru
  - b. Pemenuhan target rehabilitasi sekolah, pengadaan mebeluair, penataan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
- 2) Peningkatan Kualitas dan Manajemen Sekolah, dengan arah kebijakan
  - a. Pemantapan kurikulum sesuai dengan tingkat satuan pendidikan, penguatan Tim pengembang kurikulum, penguatan KKG, MGMP berbasis teknologi informasi
  - b. Peningkatan kualitas guru kepala sekolah, pengawas sekolah, PTK PAUDNI
  - c. Pemantapan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal lintas SKPD
  - d. Penguatan manajemen berbasis sekolah (MBS) menggunakan Balanced Scorecard

### 2.2. Sasaran Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah Inovasi Pelayanan Perpustakaan, dengan arah kebijakan:

- a. Pengembangan Rumah Baca tiap Desa/Kelurahan sesuai dengan potensi wilayah.
- b. Pembangunan Taman Bacaan (Taman Pintar).
- c. Optimalisasi pelayanan Perpustakaan Keliling.
- d. Pengembangan Perpustakaan Digital

### 2.3. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Perluasan cakupan promosi dan pelibatan masyarakat dalam perluasan layanan kesehatan dan pencegahan penyakit; dengan arah kebijakan:
  - a. Optimalisasi peran desa siaga untuk melakukan percepatan layanan kesehatan dilakukan terutama untuk mengupayakan tercapainya wilayah-wilayah yang selama ini kurang terjangkau layanan kesehatan yang diberikan baik oleh Puskesmas maupun Pustu.
  - b. Penerapan program promosi kesehatan melalui keterlibatan masyarakat guna meningkatkan upaya preventif agar menjadikan hidup lebih sehat dan bersih.

- 2) Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dengan memperhatikan keterjangkauan kawasan permukiman dan perkembangan kesehatan masyarakat; dengan arah kebijakan:
    - a. Pengembangan sistem transportasi desa untuk memudahkan akses menuju pusat layanan kesehatan
    - b. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan pada rumah sakit, puskesmas, pustu, dan posyandu. Peralatan standar minimum harus disediakan sampai di tingkat puskesmas guna melayani ibu, bayi dan balita.
    - c. Peningkatan ketersediaan obat-obatan agar dapat mengantisipasi kebutuhan kuratif maupun preventif masyarakat.
    - d. Peningkatan ketersediaan peralatan kesehatan pada RSUD kecamatan Kota Bangun yang masih minim fasilitasnya.
  - 3) Peningkatan kualitas dan kompetensi nakes guna memenuhi kebutuhan lapangan; dengan arah kebijakan:
    - a. Peningkatan kebutuhan nakes dan pendistribusian secara proporsional sesuai dengan kebutuhan wilayah dan distribusi permukiman.
    - b. Peningkatan kompetensi dukun sebagai mitra bidan, terutama bagi dukungan dalam proses persalinan serta paska melahirkan. Peningkatan kompetensi ini disinergikan dengan program kemitraan bidan dan dukun guna mengurangi resiko kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir.
  - 4) Optimalisasi penerapan SPM kesehatan dengan arah kebijakan:
    - a. Meningkatkan akses ibu hamil kepada layanan puskesmas.
    - b. Pengembangan basis data dan informasi ibu hamil berbasis desa.
    - c. Peningkatan layanan Puskesmas pada daerah permukiman terpencil atau jauh dari pusat pengembangan.
    - d. Peningkatan peran Posyandu sebagai bagian dari penerapan sistem peringatan dini kesehatan serta mensinergikan berbagai layanan program kesehatan lainnya dalam bentuk rumah sehat desa.
  - 5) Peningkatan tata kelola layanan kesehatan melalui penerapan standar pelayanan dan keterlibatan masyarakat; dengan arah kebijakan:
    - a. Penerapan standar norma dan standar pelayanan. Penerapan standar agar tata kelola layanan kesehatan memenuhi harapan penerima manfaat.
    - b. Penerapan mekanisme penanganan keluhan masyarakat agar terbangunnya kualitas layanan kesehatan yang lebih baik. Mekanisme penanganan keluhan merupakan satu hal penting yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai kualitas layanan sekaligus. Penerapan mekanisme penanganan keluhan perlu dilakukan pada semua unit layanan kesehatan, baik itu rumah sakit, puskesmas maupun puskesmas pembantu.
    - c. Penerapan standar pelayanan publik guna mewujudkan tekad sebagai pelayan publik dalam memberi layanan terbaik yang secara terus menerus diperbaiki (continuous improvement).
    - d. Mengembangkan mekanisme kontrol masyarakat dalam manajemen Puskesmas.
- 2.4. Meningkatnya daya saing tenaga kerja serta kesempatan dan perluasan kesempatan kerja
- Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:
- 1) Fasilitasi ketrampilan dan penempatan kerja, dengan arah kebijakan:
    - a. Peningkatan kompetensi angkatan kerja potensial.
    - b. Penempatan Angkatan Kerja.



- c. Penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang berbasis potensi kecamatan
  - 2) Fasilitasi Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan
- 2.5. Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Pemuda Dan Olahraga  
 Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:
- 1) Meningkatkan pembinaan kepemudaan, dengan arah kebijakan:
    - a. Pembinaan kepemudaan melalui sekolah dan kelompok masyarakat
    - b. Pemberdayaan karang taruna di tiap desa
  - 2) Meningkatkan dukungan kegiatan pemuda dan olahraga, dengan arah kebijakan:
    - a. Pemberian bantuan sarana dan prasarana olahraga
    - b. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan olahraga di masing-masing wilayah kecamatan
    - c. Optimalisasi Insentif Berbasis Prestasi bagi atlet
    - d. Fasilitasi kegiatan olahraga melalui even-even lokal, regional, nasional, dan bahkan internasional
- 2.6. Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Menuju Desa Berketahanan Sosial.  
 Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:
- 1) Pengembangan Desa Berketahanan Sosial, dengan arah kebijakan:
    - a. Pengembangan Desain dan Pelaksanaan Pilot Proyek Desa Berketahanan Sosial
    - b. Replikasi Pembangunan Desa Berketahanan Sosial
  - 2) Gerakan Desa Membangun, dengan arah kebijakan:
    - a. Pemantapan pembinaan keluarga miskin
    - b. Pemantapan validitas pendataan kemiskinan
    - c. Pemantapan sinergitas kebijakan pengentasan kemiskinan yang ada di tiap SKPD terkait
    - d. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan di desa
- 2.7. Meningkatkan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial  
 Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah melalui Pengembangan Desa Berketahanan Sosial, dengan arah kebijakan:
- a. Pemantapan peran perusahaan dan masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial
  - b. Pemantapan sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial
  - c. Pemantapan penyelenggaraan standar pelayanan kesejahteraan sosial
- 2.8. Meningkatkan Keterpaduan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Antar Sektor Antar Wilayah.  
 Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah melalui Meningkatkan koordinasi pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan arah kebijakan:
- a) Sinkronisasi program lintas SKPD di daerah dengan fungsionalisasi TKPKD
  - b) Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
  - c) Optimalisasi APBD yang Pro Job, Pro Poor, Pro Growth, dan Pro Environment.
3. Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah;  
 Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah, difokuskan dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan kerjasama pembangunan daerah
- 3.1. Sasaran Meningkatkan Daya Saing Investasi Daerah

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Insentif dan Disinsentif bagi Investasi, dengan arah kebijakan:
  - a. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan mempercepat peningkatan penanaman modal
  - b. Penerapan regulasi terkait kebijakan membuka kemudahan investasi daerah
- 2) Meningkatkan Kerjasama dengan Pihak Ketiga, dengan arah kebijakan:
  - a. Pengembangan potensi unggulan yang layak dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui metode Public Private Partnerships (PPP)
  - b. Pengembangan kawasan potensial seperti pariwisata terpadu, sentra pertanian, industri, dan perdagangan
  - c. Promosi potensi unggulan daerah secara periodik baik skala lokal, regional, nasional, dan bahkan internasional

### 3.2. Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas perencanaan pendapatan daerah (PAD), dengan arah kebijakan:
  - a. Penyediaan data dan informasi potensi pendapatan daerah
  - b. Penerapan/implementasi Grand Strategi/Roadmap Pendapatan Asli Daerah
- 2) Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah berbasis IT, dengan arah kebijakan:
  - a. Pengembangan sistem PAD online untuk semua layanan PAD
  - b. Penyediaan sarana prasarana pendukung pungutan PAD yang merata di Seluruh Kecamatan
  - c. Peningkatan SDM aparatur pemungut PAD
  - d. Pemberian insentif bagi aparatur khususnya pemungut PAD di daerah terpencil
- 3) Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, dengan arah kebijakan:
  - a. Pemetaan potensi baru bagi Pendapatan Asli Daerah
  - b. Kerjasama antar daerah yang berkaitan dengan upaya peningkatan sumber PAD

### 3.3. Sasaran Meningkatnya Kerjasama Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pembangunan Daerah

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Membuka Ruang Komunikasi antara Pemerintah dengan Dunia Usaha, dengan arah kebijakan:
  - a. Pembentukan Forum CSR
  - b. Pelaksanaan komunikasi melalui "Gala Dinner" atau Silaturahmi berkala dengan pelaku usaha
- 2) Memfasilitasi Pelaku Usaha dalam Gerakan Pembangunan Kutai Kartanegara, dengan arah kebijakan:
  - a. Pembangunan sistem aplikasi CSR
  - b. Pelibatan pelaku usaha dalam usulan pembangunan melalui musrenbang
  - c. Pendataan program kegiatan CSR dari pelaku usaha
  - d. Memfasilitasi data informasi kondisi daerah untuk dipergunakan oleh pelaku usaha melalui CSR

#### 4. Transformasi Struktur Ekonomi Daerah;

##### 4.1. Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola, dan Pertumbuhan Sektor Pertanian dalam Arti Luas

Dalam rangka mencapai sasaran peningkatan produktivitas, tata kelola dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas, strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

##### 1) Optimalisasi pengembangan irigasi pertanian dan peningkatan luasan lahan produktif yang beririgasi.

Arah Kebijakan yang akan dicapai:

- a. Pengelolaan sumber daya air untuk irigasi pertanian yang dapat melayani lahan sepanjang tahun melalui pembangunan waduk, jaringan irigasi, jalan usahatani
- b. Pembangunan sistim irigasi untuk lahan-lahan baru dan perawatan sistim irigasi yang telah ada secara kontinyu.
- c. Penetapan rasio pembukaan lahan pertanian/tambang dengan luasan hutan di suatu wilayah untuk menjaga keseimbangan ciri khas Kalimantan Timur sebagai daerah hutan hujan tropis basah.

##### 2) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif ke non-pertanian tanaman pangan.

Arah Kebijakan yang akan dicapai:

- a. Pengembangan database status lahan pertanian produktif yang dapat diakses oleh instansi terkait atau publik.
- b. Penyusunan dan pengawalan aturan (Peraturan Daerah di tingkat kabupaten) tentang mitigasi alih fungsi lahan pertanian pangan produktif ke non-pertanian.
- c. Pemanfaatan lahan eks areal pertambangan dan perkebunan yang tidak produktif untuk lahan pengembangan agro (pertanian pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan).

##### 3) Perbaikan image infrastruktur pertanian (ketersediaan sarana prasarana pertanian hulu, tengah dan hilir), utamanya pasar.

Arah Kebijakan yang akan dicapai:

- a. Mendukung perbaikan dan revitalisasi infrastruktur pertanian (ketersediaan sarana prasarana pertanian hulu, tengah dan hilir) seperti alat mesin pertanian (traktor, thresher, transplanter, reaper), pergudangan, sarana transportasi dan logistik produk pertanian, pasar tani/terminal agribisnis, dll
- b. Mengembangkan sistem pemasaran sehingga dapat mendorong peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan bagi tenaga kerja di sektor pertanian

##### 4) Pembukaan lahan/usaha pertanian tanaman pangan yang baru dan peningkatan produktivitas pertanian.

Arah Kebijakan yang akan dicapai:

- a. Membuka lahan pertanian baru (untuk usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dengan target 10.000 ha dalam kurun waktu 5 tahun
- b. Membangun demplot-demplot sebagai model pengembangan usaha pertanian produktif
- c. Meningkatkan akses layanan permodalan usaha bagi pelaku usaha pertanian
- d. Meningkatkan SDM penyuluh dan revitalisasi kelembagaan penyuluhan (Balai Penyuluhan Pertanian)
- e. Menguatkan kapasitas dan manajemen kelembagaan usaha petani (koperasi pertanian)

- f. Memperkuat kapasitas kelembagaan usaha ekonomi desa (BUMDES) untuk mendukung usaha pertanian
  - g. Memperkuat kapasitas kelembagaan usaha ekonomi daerah (BUMD) untuk mendukung usaha pertanian dalam skala regional
- 5) Peningkatan efisiensi peralatan pasca panen hasil pertanian tanaman pangan.  
Arah Kebijakan yang akan dicapai:
- a. Mengadakan mesin pasca panen untuk meningkatkan efisiensi panen dan peningkatan nilai tambah produk (huller/rice milling unit dan peralatan pendukung)
  - b. Menyediakan fasilitas perawatan mesin-mesin pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.
  - c. Mendampingi usaha pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.
- 6) Peningkatan efektivitas distribusi pupuk bersubsidi untuk tanaman pangan.  
Arah Kebijakan yang akan dicapai :
- a. Menyediakan informasi akurat tentang kebutuhan pupuk bersubsidi sebagai bahan pertimbangan untuk PT Pupuk Indonesia dalam merencanakan pengaturan pupuk bersubsidi.
  - b. Menyediakan alat transportasi yang memadai dan pergudangan pupuk pada beberapa titik strategis yang berdekatan dengan kawasan sentra produksi pertanian
- 7) Pengembangan dan promosi komoditas unggulan daerah dan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur (penyuluh lapangan).  
Arah Kebijakan yang akan dicapai:
- a. Membentuk satgas penanganan produksi, kualitas dan pengolahan produk
  - b. Menetapkan komoditas unggulan dapat menjadi dasar kebijakan dalam menyusun program-program pengembangan pertanian
  - c. Mengembangkan model komoditas unggulan strategis yang dirancang dari hulu sampai hilir sesuai dengan potensi wilayah, melibatkan banyak petani, memanfaatkan lahan marginal dan komoditas yang mempunyai multifungsi yaitu jagung yang dapat dijadikan bahan makanan, pakan ternak dan perikanan, komoditas ekspor serta potensial untuk bahan bioenergi), model dapat dikembangkan oleh BUMD atau kemitraan dengan korporasi swasta.
  - d. Meningkatkan kapasitas suplai bahan baku dalam jumlah yang sesuai dengan kapasitas produksi untuk menarik investor dibidang pasca panen atau pengolahan hasil pertanian akan terjaminnya
  - e. Mengembangkan sistem pool komoditas pertanian untuk tingkat kabupaten
  - f. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM aparatur (penyuluh lapangan)
  - g. Merevitalisasi kelembagaan penyuluhan pertanian
  - h. Meningkatkan kualitas dan kuantitas poktan dan gapoktan
- 8) Peningkatan optimalisasi industri pasca panen tanaman pangan (*Rice Processing Unit/RPU*)  
Arah Kebijakan yang akan dicapai:
- a. Merevitalisasi RMU yang lebih modern dan efisien
  - b. Meningkatkan kinerja manajemen melalui perencanaan berorientasi pasar.
  - c. Memenuhi bahan baku jenis premium sesuai kapasitas minimal baik dari sekitar RPU maupun dari luar daerah.
  - d. Mengembangkan jaringan usaha kemitraan dan pemasaran produk
- 9) Jaminan ketersediaan lahan produksi pertanian dan bahan baku untuk menarik investor.  
Arah Kebijakan yang akan dicapai:

- a. Mengembangkan infrastruktur industri pendukung, baik sebagai program jangka pendek adalah menjalin kerjasama dengan daerah lain yang telah lengkap
  - b. Meningkatkan keterampilan pelaku UMKM berbasis pertanian/agro, penyediaan inovasi dan teknik produksi
  - c. Meningkatkan akses modal pada pelaku UMKM
  - d. Membentuk satuan tugas untuk melakukan pendampingan pada pelaku UMKM dengan program-program yang sesuai dengan yang diperlukan
- 10) Pengembangan bahan pangan sumber karbohidrat  
Arah Kebijakan yang akan dicapai:
- a. Mengembangkan program pengembangan pangan alternatif non-beras yang sesuai/cocok bagi masyarakat Kabupaten Kukar
  - b. Mengembangkan lahan pekarangan dan lahan marjinal untuk produksi bahan pangan alternatif yaitu sagu, singkong, umbi-umbian, shorgum, ubi jalar, dan umbi-umbian.
  - c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM aparatur (penyuluh lapangan)
  - d. Mengembangkan usaha ekonomi keluarga dan industri rumah tangga berbasis pertanian
  - e. Mengembangkan pasar untuk bahan baku pangan non-beras
  - f. Mengembangkan edukasi untuk merubah pandangan bahwa produksi sumber karbohidrat bukan hanya sebagai sumber pangan lokal tetapi berorientasi ekspor baik untuk keperluan dalam propinsi maupun antar propinsi
- 11) Pengembangan ketersediaan sumber pangan non-beras dan edukasi pola konsumsi masyarakat  
Arah Kebijakan yang akan dicapai:
- a. Mengembangkan industri pasca panen produk pangan non-beras sehingga dapat menghasilkan bahan baku sumber pangan non-beras yang tahan lama seperti layaknya beras
  - b. Mengembangkan pasar untuk bahan baku pangan non-beras
  - c. Menyusun regulasi pengembangan produk sumber karbohidrat non-beras dan edukasi pola konsumsi pada masyarakat
  - d. Mengembangkan model edukasi pada masyarakat tentang pola konsumsi alternatif bahan pangan non-beras.
  - e. Mengembangkan model edukasi pola makan berbasis pangan lokal pada anak-anak sekolah melalui program makanan tambahan anak sekolah
- 12) Optimalisasi pengembangan bahan pangan berbasis sumberdaya peternakan (ternak besar dan ternak kecil); dengan arah kebijakan:
- a. Mengembangkan breeding center ternak (sapi, kerbau dan unggas unggulan);
  - b. Menintroduksi teknologi budidaya ternak;
  - c. Mengintensifkan pelayanan kesehatan ternak
  - d. Meningkatkan populasi ternak unggulan (sapi, kerbau dan unggas) dengan pendanaan pemerintah dan CSR,
  - e. Mengembangkan SDM peternakan (penyuluhan, pendampingan, magang, dll)
  - f. Memfasilitasi pengelolaan kandang kelompok, kelompok pengolahan pupuk organik (rumah kompos dan peralatan).

#### 4.2. Meningkatnya Potensi dan Daya Dukung Pariwisata Daerah serta Kunjungan Wisata di Kutai Kartanegara

untuk mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah melalui :

- 1) Pengembangan Branding untuk memperkuat Kutai Kartanegara sebagai Daerah Tujuan Wisata

Arah Kebijakan:

- a. Menyelenggarakan festival Erau melalui branding yang secara komprehensif mempromosikan Pariwisata Kutai Kartanegara yang berbasis sejarah dan budaya secara keseluruhan.
- b. Penyusunan perencanaan pembangunan pariwisata secara komprehensif
- c. Pengembangan branding kuliner utama pendukung pariwisata Kutai Kartanegara

- 2) Pengembangan Kebijakan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang komprehensif

Arah Kebijakan dengan membuat perencanaan yang disusun secara komprehensif dan dapat diimplementasikan. Dukungan kebijakan haruslah pada kebijakan tertinggi pada skala Kabupaten yakni Peraturan Daerah.

- 3) Pengembangan Pasar Baru dan Revitalisasi Pasar Eksisting

Kunjungan wisatawan ke obyek wisata (ODTW) ataupun ke destinasi wisata belum dikelola dengan baik. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara yang kecenderungan kunjungannya terlihat dalam tabel sebelumnya membuktikan adanya potensi besar untuk menghadirkan lebih besar lagi. Meskipun harus diakui kunjungan wisatawan yang paling besar adalah yang berasal dari penduduk setempat yang bisa jadi telah mengalami kejenuhan. Oleh karenanya perlu dipertimbangkan pengelolaan pasar wisatawan nusantara dari segmen lain yang belum optimal dilakukan, misalnya berbagai segmen lain yang masih dapat dikelola baik wisatawan mancanegara maupun nusantara.

- a. Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara.
- b. Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara

- 4) Penyediaan Fasilitas dan Sarana OTDW secara Komprehensif

Arah Kebijakan:

- a. Pengembangan prasarana bagi dukungan OTDW terpilih
- b. Memberi insentif bagi sektor swasta untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata

- 5) Penyiapan Pelaku Usaha Pariwisata Lokal dan Masyarakat sebagai Tuan Rumah Destinasi

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan kompetensi usaha bagi pelaku usaha kepariwisataan
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata
- c. Peningkatan kapasitas penyedia jasa pariwisata

- 6) Optimalisasi Peningkatan Nilai Tambah Usaha Jasa dan Produksi Kreatif Pendukung Pariwisata

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan kapasitas dan peran pusat komunitas kreatif
- b. Pengembangan pasar dan pemasaran usaha ekonomi kreatif
- c. Promosi melalui event-event di daerah secara reguler untuk mempromosikan ekonomi kreatif.

- 4.3. Meningkatnya Pengembangan Seni dan Budaya Lokal Dalam Rangka Mendukung Destinasi Wisata dan Kelestarian Tradisi Kehidupan Masyarakat

Arah Kebijakan:

- a. Pengembangan fasilitas pertunjukan seni budaya sebagai wadah apresiasi masyarakat.
- b. Peningkatan kapasitas dan performa pelaku seni budaya di daerah.
- c. Peningkatan performa Pusat-Pusat Kebudayaan untuk mendorong revitalisasi seni budaya Kutai Kartanegara.

- 4.4. Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan Berbasis Industri Kreatif dan Potensi Daerah  
 Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:
- 1) Penguatan Kelembagaan Koperasi dan UKM, dengan arah kebijakan:
    - a. Pendataan, pembinaan, dan fasilitasi kegiatan Koperasi dan UKM setiap tahun
    - b. Peningkatan SDM pengurus koperasi dan UKM aktif
  - 2) Fasilitasi Ekspansi Pasar, dengan arah kebijakan:
    - a. Promosi produk unggulan UKM
    - b. Pengembangan kerjasama dengan pihak bank dan dunia usaha sebagai market partnership
    - c. Pengembangan core business baru dan potensial yang terpadu dengan sektor pertanian dan pariwisata
    - d. Pengembangan pusat informasi produk unggulan daerah berbasis IT
    - e. Penyediaan sarana dan prasarana bagi UKM di kawasan potensial seperti kawasan pariwisata, pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya.
- 4.5. Meningkatnya Akses, Tata Niaga, dan Infrastruktur Perdagangan Antar Wilayah dan Antar Daerah.  
 Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:
- 1) Revitalisasi Pasar Daerah, dengan arah kebijakan:
    - a. Pembangunan dan rehabilitasi pasar daerah
    - b. Penyediaan sarana dan prasarana outlet perdagangan
    - c. Penguatan sistem pengelolaan pasar yang terintegrasi dengan pusat atau sentra produk unggulan
  - 2) Pengembangan Kerjasama Perdagangan Antar Daerah, dengan arah kebijakan:
    - a. Penyusunan kajian, kebijakan, dan regulasi kerjasama perdagangan antar daerah
    - b. Mapping potensi produk unggulan daerah untuk kegiatan perdagangan lintas daerah
    - c. Pengendalian, pengawasan, dan monitoring kegiatan keluar masuk produk di sektor perdagangan
- 4.6. Meningkatnya Pengembangan Industri Pengolahan Pangan, Peternakan, Perikanan, Pengolahan Pakan, dan Potensi Daerah yang Berdaya Saing  
 Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:
- 1) Pengembangan Agroindustri, dengan arah kebijakan:
    - a. Pengembangan industri pengolah sebagai support system di sektor pertanian dalam arti luas
    - b. Pengembangan industri pasca panen produksi pertanian
  - 2) Fasilitasi Pengembangan Industri Dalam dan Luar Negeri, dengan arah kebijakan:
    - a. Dukungan kebijakan bagi pengembangan industri potensial yang akan menyerap tenaga kerja skala besar
    - b. Fasilitasi kegiatan industri dengan informasi ketersediaan bahan baku dan pelaku usaha masyarakat
5. Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik;  
 Pembangunan dan Pemerataan infrastruktur Pelayanan Publik, difokuskan dalam rangka mencapai tujuan untuk Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah.
- 5.1. Meningkatnya Interkoneksi Antar Wilayah  
 Arah Kebijakan:

- a. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan;
  - b. Interkoneksi jalan tembus desa
- 5.2. Meningkatnya Aksesibilitas Antar Wilayah Serta Kualitas Pelayanan Perhubungan  
 Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah melalui Revitalisasi Layanan Transportasi Publik; dengan arah kebijakan:
- a. Pengembangan jasa layanan transportasi kota yang menghubungkan ke sentra pertanian, kawasan khusus, destinasi pariwisata, dan outlet perdagangan.
  - b. Pengembangan layanan transportasi yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
  - c. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan khususnya yang berkaitan dengan transportasi publik.
- 5.3. Terwujudnya koneksitas jaringan komunikasi, internet, dan pengembangan kawasan smart city  
 Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:
- 1) Peningkatan Konektivitas Jaringan Telekomunikasi  
 Arah kebijakan:
    - a. Memperluas jaringan internet yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
    - b. Pengembangan dan pembangunan tower pintar
  - 2) Pengembangan sistem informasi terintegrasi; dengan arah kebijakan:
    - a. Pembangunan aplikasi informasi terintegrasi.
    - b. Pengembangan layanan berbasis online
- 5.4. Meningkatnya Layanan Kebutuhan Dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan Dan Perdesaan.  
 Arah Kebijakan :
- a. Pembangunan dan peningkatan ketersediaan air bersih;
  - b. Peningkatan pengelolaan persampahan yang dapat melayani seluruh penduduk;
  - c. Pembangunan dan peningkatan pengelolaan limbah rumah tangga;
  - d. Peningkatan pengelolaan drainase
6. Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan;  
 Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan, difokuskan dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 6.1. Meningkatnya Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Serta Pengendalian Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.  
 Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:
- 1) Pengembangan Penataan Ruang yang Berkelanjutan dan Berdampak pada Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam; dengan arah kebijakan:
    - a. Penetapan kawasan khusus
    - b. Penetapan kawasan strategis kabupaten
    - c. Penataan kawasan kumuh
  - 2) Revitalisasi Sungai; dengan arah kebijakan:
    - a. Pengendalian dan konservasi sungai.
    - b. Pemanfaatan DAS
    - c. Konservasi flora dan fauna
  - 3) Pemulihan Lingkungan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam termasuk Kegiatan Arah Kebijakan:



- a. Konservasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang;
  - b. Pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup
  - c. Pengembangan Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam
  - d. Pengembangan dan Peningkatan Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 4) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup; dengan arah kebijakan melalui Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok sadar lingkungan b) Membangun kerjasama antara masyarakat dengan dunia usaha
  - 5) Pengembangan Nilai Tambah Sumber Daya Alam sebagai potensi Unggulan Baru  
Arah Kebijakan:
    - a. Pengembangan nilai tambah sumber daya alam;
    - b. Pengembangan produk unggulan baru
- 6.2. Meningkatnya Ketersediaan Sumber Energi Baru dan Terbarukan  
Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah melalui Pengembangan jaringan listrik ke seluruh Kabupaten Kutai Kartengara, dengan arah kebijakan:
- a. Pembangunan jaringan listrik baru bagi wilayah yang belum terjangkau listrik.
  - b. Pembangunan sarana dan prasarana kelistrikan.
  - c. Pengembangan sumber energi alternatif berbasis potensi lokal
7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, difokuskan dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatnya peran serta perempuan di segala bidang pembangunan dan perlindungan anak
- 7.1. Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan, Kualitas Kesetaraan Gender, dan Perlindungan Perempuan Dan Anak  
Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah dengan
- 1) Meningkatkan kesempatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, dengan arah kebijakan:
    - a. Pembinaan kelompok-kelompok perempuan
    - b. Optimalisasi kesempatan usaha produktif bagi perempuan berbasis kelompok
    - c. Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dan pelecehan
    - d. Peningkatan arus komunikasi kelompok perempuan melalui forum kelompok perempuan
    - e. Dukungan kebijakan terkait gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah
  - 2) Meningkatkan perlindungan anak, dengan arah kebijakan:
    - a. Optimalisasi tim terpadu terkait perlindungan anak
    - b. Pemantauan dan pengawasan kegiatan dimasyarakat yang berpotensi terjadi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak

## C. PRIORITAS DAERAH

---

Dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan, maka kebijakan umum menjadi pedoman bagi penetapan program pembangunan daerah. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Kebijakan umum memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah.

Di dalam semangat Gerbang Raja II, diuraikan serangkaian agenda prioritas dan program unggulan yang disebut dengan HARUS (Hak Rakyat Untuk Sejahtera). Agenda prioritas pembangunan Gerbang Raja II menitikberatkan pada:

1) Reformasi Birokrasi;

Reformasi birokrasi merupakan prioritas Gerbang Raja 2015-2021 yang ditandai dengan perolehan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK untuk pengelolaan keuangan daerah, panji-panji keberhasilan pembangunan dan penilaian LPPD dengan target peringkat 10 besar nasional.

Percepatan pembangunan melalui agenda prioritas dilakukan dengan:

1. Bebaya Etam Kuatkan Kinerja Aparatur Sipil, perubahan mindset dan culturset aparatur dengan konsep "KERJA ADALAH IBADAH" yang diawali dengan niat, sikap dan perilaku yang baik dengan "Memanusiakan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja" sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan pegawai. Dengan Spirit "Kantor adalah Sajaddah, Kerja adalah Ibadah";
2. Desentralisasi Kecamatan dengan memperkuat fungsi Pemerintah Kecamatan melalui pengalokasian dana per kecamatan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas wilayah sesuai dengan prioritas pembangunan (seiring dengan Nawa Cita "Membangun Indonesia dari Pinggiran");
3. Satu RT Satu Laptop, memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada seluruh Rukun Tetangga (RT) untuk mempercepat proses pelayanan kepada warga mendukung fungsi desa/kelurahan kecamatan;
4. M'PeKAT Keroan Kampong, gerakan yang mengembalikan semangat Musyawarah dan Gotong Royong, dalam menentukan arah pembangunan desa/kelurahan serta kecamatan dengan menekankan pada peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan dengan spirit "Datanglah Kepada Rakyat dan Rencanakan Bersama Rakyat";
5. Integrasi Sistem e-Government. Memperkuat akuntabilitas dan transparansi dengan meningkatkan pelayanan berbasis teknologi informasi melalui keterpaduan sistem pendataan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan berbasis On-Line;
6. Reformasi Belanja Daerah. Melaksanakan reformasi belanja daerah untuk mencegah kebocoran dan pemborosan anggaran serta melakukan pengurangan overhead cost (biaya rutin) dan mengalokasikan lebih banyak untuk pelayanan publik;
7. Audit Kinerja atas program-program yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD.

2) Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah;

Skema pembiayaan pembangunan yang dirancang kedepan adalah memperkuat potensi PAD dan meningkatkan peran serta dunia usaha dalam penyediaan sarana dan prasarana sektor publik yang dilakukan melalui prinsip win- win-win, yakni menguntungkan bagi Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat.

Percepatan pembangunan melalui agenda prioritas dilakukan dengan:

1. Pengembangan sistem PAD Cerdas, yakni sebuah terobosan dalam mengoptimalkan potensi PAD dengan pelayanan yang mudah, transparan dan terintegrasi berdasarkan kewenangan pada jenjang pemerintahan (Kabupaten, Kecamatan hingga Desa/Kelurahan) berbasis Teknologi Informasi.
2. Kerjasama Investasi dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur daerah terutama untuk pelayanan dasar, transportasi, pengelolaan lingkungan, telekomunikasi dan informatika, olah raga dan kesenian, fasilitas perkotaan serta pariwisata;

3. Kerjasama Pengelolaan Aset Daerah dengan menyediakan ruang kepada swasta untuk mengelola aset daerah secara sinergi.
  4. Penguatan CSR (Coorporate Social Responsibility) dalam proses pembangunan daerah
- 3) Transformasi Struktur Ekonomi Daerah;
- Melalui semangat transformasi dari *unrenewable resources* menjadi *renewable resources*, Kutai Kartanegara dihadapkan pada kondisi struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor ekstraktif (Pertambangan dan Penggalian). Dalam konteks perwujudan pembangunan berkelanjutan potensi pertanian dan pariwisata memiliki potensi yang kuat sebagai *leading sector* perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara.

Seiring dengan hal tersebut, pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif membangun daerah untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi, dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah dan koperasi.

Produktivitas sektor pertanian dalam arti luas, dengan indikator sasaran Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB cukup tinggi. Kedepan penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi daerah berdasarkan pada kekhasan daerah (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah) termasuk pariwisata menjadi pijakan pembangunan di Kutai Kartanegara.

Percepatan pembangunan melalui agenda prioritas dilakukan dengan:

1. Politik Anggaran Sektor Pertanian; dialokasikan dana minimal 10% dalam mendukung "5 PILAR PEMBANGUNAN PERTANIAN" yaitu : (1) Optimalisasi sumber daya lahan dan air; (2) Pemandirian proses produksi dan infrastruktur, (3) Jaringan dan Kelembagaan Petani; (4) Pembudayaan pola konsumsi pangan lokal; (5) Inovasi teknologi, alat dan mesin pertanian.
2. Revolusi Jagung; merupakan upaya konkrit untuk menempatkan kembali pembangunan pertanian (Tanaman Pangan). Revolusi Jagung menggambarkan proses pembangunan dari hulu (produksi) sampai hilir (konsumsi), meliputi:
  - a. Revolusi Sistem Produksi; melalui mekanisasi pertanian mulai dari pengolahan tanah, panen Jagung dengan mekanisasi, dipipil langsung dimasukan ke Alat Angkut Agropolitan. Penyediaan Benih/Bibit Unggul, dan Pupuk; benih merupakan sarana utama melalui penyediaan benih bersertifikasi. Pengendalian Penyakit. untuk mempertahankan potensi produksi yang ingin dicapai dari gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT) serta meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam pengendalian OPT, tanpa pestisida sehingga munculnya OPT dapat diatasi dengan cepat.
  - b. Revolusi Sistem Distribusi; melalui memperlancar pemasaran dengan jaminan harga dasar melalui BUMDes atau kemitraan dengan lembaga lain (melakukan pembinaan dan koordinasi dengan pengusaha pedagang pengumpul, pedagang besar dalam mempertahankan tingkat harga yang layak untuk petani).
  - c. Menyediakan permodalan para petani melalui kelompok tani dapat memanfaatkan dana permodalan petani dengan mengajukan rencana kebutuhan biaya usaha tani melalui rencana kebutuhan kelompok.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur irigasi (termasuk waduk dan embung bekas tambang), jalan usaha tani, dan pelabuhan perikanan, melalui:

- a. Membangun jaringan irigasi untuk mengairi lahan sawah seluas 30.000 ha.
  - b. Pembukaan lahan pertanian baru seluas 10.000 ha.
  - c. Jumlah pelabuhan perikanan tahun 2021 ditargetkan sebanyak 3 pelabuhan perikanan untuk wilayah hulu, tengah dan pesisir.
  - d. Membangun Balai Benih Ikan di wilayah hulu dan pesisir.
  - e. Mengoptimalkan Balai Penyuluh Pertanian. <sup>[1]</sup><sub>SEP</sub>
4. Mekanisasi dan modernisasi teknologi pertanian dalam swasembada pangan;
  5. Mendorong pembangunan industri pengolahan pangan, peternakan, perikanan dan industri pengolahan pakan yang berdaya saing;
  6. Mendorong peningkatan produksi dan konsumsi protein berasal dari telur, ikan dan daging;
  7. Membangun demplot peningkatan produksi pertanian rakyat disetiap kecamatan dan budidaya tanaman lokal;
  8. Gerakan Penanaman 70.000 tanaman lokal dalam rangka pelestarian dengan memanfaatkan lahan desa dan sepanjang bahu jalan atau lahan lainnya;
  9. Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
  10. Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); penguatan seluruh BUMD secara bersama- sama agar dapat saling menunjang untuk mencetak laba dan dapat berkinerja lebih tinggi;
  11. Mengembangkan usaha ekonomi keluarga dan industri rumah tangga;
  12. Penguatan kelembagaan koperasi untuk kesejahteraan rakyat (pengembangan ekonomi perdesaan berbasis kelompok dan kewirausahaan);
  13. Jonok N'gan KUKAR; adalah program pengembangan pariwisata yang berbasis potensi alam, sejarah dan budaya yang melekat dihati serta didukung oleh semangat pengembangan ekonomi kreatif menuju industri pariwisata, melalui:
    - a. Membangun Pusat Rekreasi Alam, Sejarah dan Budaya dalam satu kawasan (Pengembangan Waduk Panji Sukarame dan Museum Kayu);
    - b. Memperkuat destinasi Wisata Pulau Kumala;
    - c. Revitalisasi Museum Mulawarman;
    - d. Penguatan Desa Budaya;
    - e. Membangun dan mengembangkan destinasi wisata berbasis Ekowisata;
    - f. Menghidupkan kembali Lembaga Seni dan Budaya Kutai Kartanegara.
  14. Pengembangan industri potensial daerah berbasis keterkaitan dan keterpaduan potensi antar wilayah (Integrated Territorial Development);
  15. Mendukung agenda Nawa Cita prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri yang mendukung pengembangan agribisnis dan agroindustri;

- 4) Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik;  
 Infrastruktur dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, juga mengatasi kesenjangan antar wilayah. Kondisi jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara beragam dari kondisi jalan baik hingga rusak berat. Dalam kondisi baik 61,95% (1.575,94 km), dalam kondisi sedang 13,67% (347,89 km), dalam kondisi rusak 5,86% (149,09 km) dan sisanya jalan dalam kondisi rusak berat 18,52% (471,1 km). Selain itu, infrastruktur irigasi dan jalan usaha tani untuk menunjang ekonomi pertanian sebagian mengalami kerusakan.

Percepatan pembangunan melalui agenda prioritas dilakukan dengan:

1. Menuntaskan interkoneksi infrastruktur jalan wilayah hulu (Tabang, Kota Bangun, Muara Wis dan Muara Muntai);
2. Pembangunan dan peningkatan jalan kolektor di seluruh wilayah Kutai Kartanegara sepanjang 1.000 Km;
3. Pemeliharaan jalan dan jembatan;
4. Pembangunan bandar udara dan smart city;

5. Pengembangan "PAM-SiMAS" (Pengelolaan Air Minum Inisiasi Masyarakat) untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas air minum pada warga masyarakat yang kurang terlayani di wilayah pedesaan dan daerah terpencil (pengelolaan air minum yang berbasis pada masyarakat) sehingga diharapkan pelayanan air minum dapat terpenuhi untuk mencapai pemenuhan kebutuhan dasar penyediaan air minum;
  6. Interkoneksitas Jalan Tembus Desa adalah pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan jalan tembus desa dan antar desa.
  7. Pengembangan "Tower Pintar" merupakan alternatif interkoneksitas jaringan telekomunikasi off- line dan on-line keseluruhan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan teknologi murah dan hemat energi, dengan target Kutai Kartanegara tanpa blank spot;
- 5) Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan;
- Sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan salah satu modal utama untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah. Telah dipahami bersama bahwa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik merupakan pendukung kesinambungan pembangunan saat ini dan pembangunan di masa yang akan datang.

Kedepan Pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah mendayagunakan sumber daya alam bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta keserasian penataan ruang dalam upaya terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Percepatan pembangunan melalui agenda prioritas dilakukan dengan:

1. Pengembangan "Bank Sampah" di setiap Desa/Kelurahan, dalam rangka pengelolaan sampah (organik/non organik) dan daur ulang sampah di wilayah desa/kelurahan hingga kecamatan;
2. Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (tersedia dan teraksesnya informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berupa data spasial, nilai, dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas);
3. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam (pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan sumber daya alam dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan);
4. Penyediaan energi listrik baru terbarukan (mikro hidro, solar sel, bio massa dan bio gas, pemanfaatan limbah sawit) pada wilayah- wilayah yang belum terjangkau aliran listrik;
5. Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup (meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan);
6. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup (meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup);
7. Membangun sistem pengelolaan sumber daya alam termasuk pertanian secara efisien dengan menekankan sistem siklikal dalam proses produksi (limbah suatu produksi akan menjadi bahan baku atau sumber energi untuk produksi lainnya);
8. Mendukung Nawa Cita Membangun tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan.

- 6) Daya Saing Sumberdaya Manusia; dan  
Sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten yakni SDM yang sehat, berpendidikan, berketerampilan, berakhlak dan berperilaku mulia.

Pendidikan adalah investasi jangka panjang dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hanya dengan pendidikan yang baik akan menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Pararel dengan pembangunan kesehatan, secara integral pembangunan bidang kesehatan merupakan syarat utama setiap orang dalam beraktifitas. Pembangunan kesehatan tidak saja diarahkan pada perbaikan mutu kesehatan saja, tetapi juga kesehatan dalam arti luas yang juga meliputi kesehatan lingkungan.

Percepatan pembangunan melalui agenda prioritas dilakukan dengan:

1. Penyediaan satu guru satu rumah;
2. Mengalokasikan dana perbaikan kualitas fasilitas pendidikan (SD, SMP dan Pesantren) Rp. 100 juta per sekolah;
3. Memberikan tambahan tunjangan profesi guru di daerah terpencil minimal Rp. 2 juta per bulan;
4. Pengembangan KUKAR CERDAS berupa pemberian beasiswa bagi siswa yang berprestasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi;
5. Penyediaan komputer dan peralatan bantu pengajaran bagi sekolah dasar dan menengah serta pesantren;
6. Perintisan dan pengembangan mobilisasi sarjana pendidikan yang baru lulus untuk mengabdikan di daerah miskin dan terpencil;
7. Mendukung program Indonesia pintar melalui wajib belajar 12 tahun bebas pungutan;
8. Pengembangan "Kampung Pintar", yakni desa yang terbebas dari warganya yang tidak bersekolah di usia sekolah, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan yang representatif bagi perkembangan anak (penyediaan buku dengan menyediakan "Perpustakaan Kampung", layanan akses internet, lembaga bimbingan belajar dan keterampilan);
9. "Gerakan Etam Mengaji" (GEMA), dengan mengedepankan Pendidikan Keagamaan yang bukan hanya menjadi tanggung jawab Orang Tua dan Pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat;
10. Mengembangkan puskesmas dan puskesmas pembantu yang modern di setiap kecamatan;
11. Pembangunan klinik dan rumah sehat desa (revitalisasi posyandu);
12. Mengalokasikan anggaran 3% untuk penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi dan Balita (AKB) serta penyakit menular dan kronis;
13. Upaya perbaikan cakupan kelahiran yang ditangani tenaga medis serta perbaikan asupan gizi.
14. Peningkatan status gizi dan promosi kesehatan;
15. Meningkatkan peran PKK, Puskemas pembantu, dan Posyandu;
16. Memberikan tambahan tunjangan penghasilan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil dan pedalaman;
17. Mendukung program Kartu Indonesia Sehat melalui pelayanan kesehatan;
18. Gerakan hidup sehat, melarang merokok di tempat kantor dan tempat tertentu;
19. Gerakan makan makanan sehat dan bergizi;
20. Melanjutkan Program "KUKAR SEHAT";
21. "Nebas Tapak Kemiskinan", yaitu langkah penanggulangan kemiskinan di dalam Album Kemiskinan yang akan memuat jumlah penduduk miskin, profil kemiskinan dan penyebab kemiskinan, melalui:
  - a. Bedah Rumah;

- b. Gratis biaya pemeriksaan kesehatan bagi ibu dalam masa kehamilan sampai dengan persalinan bagi warga miskin Kutai Kartanegara di Rumah Sakit dan Puskesmas;
  - c. Bantuan Modal Usaha Kemandirian bagi fakir miskin;
  - d. Pemberian Santunan Warga Tidak Mampu yang termasuk dalam kategori usia tidak produktif;
  - e. Pemberian modal bagi Petani dan Nelayan sebesar Rp. 100 juta per kelompok tani/nelayan (sarana untuk membantu masyarakat tani dan nelayan miskin yang membutuhkan modal usaha);
22. "Bena Kampong Etam" atau Program Desa Berketahanan Sosial merupakan model pengembangan pemberdayaan kelembagaan dan pranata sosial ekonomi pedesaan dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap kepedulian social dan pembangunan wilayah pedesaan;
  23. Pembentukan Lembaga Keuangan Tani dan Nelayan di 18 kecamatan;
  24. Pengembangan Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri (Klik- WPM), bertujuan menumbuhkan jiwa kewirausahaan (enterpreneurship) bagi generasi muda menjadi generasi mandiri sehingga bukan menjadi generasi pencari kerja tetapi merupakan generasi pencipta lapangan kerja, sehingga menjadi pilihan hidup pemuda dan mempunyai multiplier effects bagi masyarakat;
  25. Memberikan dukungan pada agenda strategis Nawa Cita, yaitu pemenuhan hak dasar rakyat.
- 7) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Di era modern saat ini perempuan telah banyak memberikan kontribusi dan inspirasi dalam proses kemajuan peradaban dunia, hal ini tentunya menjadi bagian penting dari proses pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana keberadaan perempuan menjadi aset yang harus dilindungi, dikembangkan dan dioptimalkan sebagai bagian dari pemangku kepentingan dari proses pembangunan daerah yang lebih membumi, yang dapat dimulai dari partisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembangunan baik dibidang politik, ekonomi dan sosial.

Disamping itu, Perlindungan Anak juga memiliki peran strategis dalam rangka pembentukan karakter manusia di masa akan datang. Untuk itu perlu upaya menjamin dan melindungi serta pemenuhan hak-hak agar dapat hidup layak, tumbuh, berkembang, berprestasi dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Percepatan pembangunan melalui agenda prioritas dilakukan dengan:

1. Gerakan "Perempuan Membangun", merupakan gerakan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah, seperti penguatan Kelompok Usaha Bersama Perempuan (KUBP) di setiap desa/kelurahan, yang dimotori oleh perempuan-perempuan aktif dan kreatif;
2. Membangun pusat rehabilitasi narkoba dan traumatik untuk perempuan dan anak;
3. Pengarusutamaan Anak Untuk Sejahtera (PUAS) yang mengutamakan perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak kedalam setiap kegiatan pembangunan dalam rangka melanjutkan program "Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA)" dan program "Kabupaten Layak Anak";
4. Menempatkan posisi perempuan pada jabatan strategis di pemerintahan sesuai dengan kompetensinya;
5. Meningkatkan kualitas kesetaraan gender dan partisipasi politik perempuan;
6. Menyediakan fasilitas pendukung dalam menjamin perlindungan perempuan dan anak serta bagi masyarakat berkebutuhan khusus di area publik.

# BAB III



## BAB III

# URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Indikasi rencana program dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcome) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

### A. URUSAN KONKUREN

#### a. Ringkasan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan konkuren ialah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kota/kabupaten, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi patokan pelaksana otonomi daerah.

**Tabel 3.1**  
Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Bersifat Wajib

NO	URUSAN	PD PENGANGGUNG JAWAB		JUMLAH PROGRAM
<b>A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>				
1	PENDIDIKAN	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10
2	KESEHATAN	2	Dinas Kesehatan	47
		3	RSUD AM Parikesit	
		4	RSUD Abadi	
		5	RSUD Dayaku Raja	
3	PU & PENATAAN RUANG	6	Dinas Pekerjaan Umum	87
4	PERUMAHAN DAN KWSN PEMUKIMAN	7	Dinas Perumahan & Kwsn Pemukiman	7
		8	BPBD	

NO	URUSAN	PD PENGANGGUNG JAWAB		JUMLAH PROGRAM
5	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	9	Satpol PP	22
6	SOSIAL	10	Dinas Sosial	14
<b>B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>				
7	KETENAGAKERJAAN	11	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	7
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	9
9	PANGAN	13	Dinas Ketahanan Pangan	5
10	PERTANAHAN	14	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	5
11	LINGKUNGAN HIDUP	15	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	12
12	ADMINDUK DAN CATATAN SIPIL	16	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	6
13	PEMBERDAYAAN MASY. DAN DESA	17	Dinas Pemberdayaan Masy. dan Desa	7
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	18	Dinas Pengendalian Pdd dan KB	8
15	PERHUBUNGAN	19	Dinas Perhubungan	8
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	20	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	5
17	KOPERASI, UKM	21	Dinas Koperasi dan UKM	5
18	PENANAMAN MODAL	22	Dinas PMPTSP	8
19	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	23	Dinas kepemudaan dan OR	13
20	STATISTIK		Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	0
21	PERSANDIAN		Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	0
22	KEBUDAYAAN		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3
23	PERPUSTAKAAN	24	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1
24	KEARSIPAN		Dinas Arsip dan Perpustakaan	4
<b>JUMLAH TOTAL PROGRAM</b>				<b>293</b>

## 1. URUSAN PENDIDIKAN

### DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

#### 1. Program dan Kegiatan

Dalam hal pencapaian program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018 dengan Realisasi Kinerja sebesar 72,75%, Secara keseluruhan pencapaian renja dan renstra masih ada yang belum memenuhi target dan pencapaian kegiatan akan ditingkatkan lagi pada tahun 2019 mendatang. Secara keseluruhan ditunjukkan pada table berikut :

**Tabel.3.2**  
Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018

No.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>81.078.754.592,00</b>	<b>79.727.776.219,00</b>	<b>98,33</b>	<b>1.350.978.373,00</b>
1.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	780.000.000,00	638.929.436,00	81,91	141.070.564,00
1.2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	50.000.000,00	8.767.800,00	17,54	41.232.200,00
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	21.280.000,00	21.000.000,00	98,68	280.000,00
1.4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.272.325.800,00	1.049.885.600,00	82,52	222.440.200,00
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000.000,00	296.109.000,00	98,70	3.891.000,00
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	400.000.000,00	394.255.000,00	98,56	5.745.000,00
1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
1.8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100.000.000,00	62.280.000,00	62,28	37.720.000,00
1.9	Penyediaan bahan logistik kantor	100.000.000,00	10.000.000,00	10,00	90.000.000,00
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	250.000.000,00	201.449.500,00	80,58	48.550.500,00
1.11	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	74.275.148.792,00	73.986.543.395,00	99,61	288.605.397,00
1.12	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	150.000.000,00	34.500.000,00	23,00	115.500.000,00
1.13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	500.000.000,00	312.273.142,00	62,45	187.726.858,00
1.14	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Muara Kaman	150.000.000,00	149.137.850,00	99,43	862.150,00
1.15	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Muara Badak	150.000.000,00	134.752.100,00	89,83	15.247.900,00
1.16	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Kota Bangun	150.000.000,00	149.999.400,00	100,00	600,00
1.17	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Marang Kayu	150.000.000,00	142.158.300,00	94,77	7.841.700,00
1.18	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Muara Wis	165.000.000,00	155.700.000,00	94,36	9.300.000,00
1.19	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan	170.000.000,00	158.305.100,00	93,12	11.694.900,00

No.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	Kependidikan Kecamatan Muara Muntai				
1.20	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Kenohan	180.000.000,00	167.699.400,00	93,17	12.300.600,00
1.21	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Kembang Janggut	190.000.000,00	119.010.600,00	62,64	70.989.400,00
1.21	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Tenggarong	150.000.000,00	144.063.512,00	96,04	5.936.488,00
1.22	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Tabang	200.000.000,00	190.860.000,00	95,43	9.140.000,00
1.23	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Tenggarong Seberang	150.000.000,00	149.257.400,00	99,50	742.600,00
1.24	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Anggana	150.000.000,00	144.710.030,00	96,47	5.289.970,00
1.25	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Loa Kulu	150.000.000,00	148.687.630,00	99,13	1.312.370,00
1.26	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Sanga Sanga	150.000.000,00	143.866.014,00	95,91	6.133.986,00
1.27	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Loa Janan	150.000.000,00	148.955.660,00	99,30	1.044.340,00
1.28	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Samboja	150.000.000,00	149.967.500,00	99,98	32.500,00
1.29	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Sebulu	150.000.000,00	140.652.850,00	93,77	9.347.150,00
1.30	Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Muara Jawa	150.000.000,00	149.000.000,00	99,33	1.000.000,00
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>2.635.920.000,00</b>	<b>519.485.227,00</b>	<b>19,71</b>	<b>2.116.434.773,00</b>
2.1	Pengadaan peralatan gedung kantor	150.000.000,00	146.619.998,00	97,75	3.380.002,00
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	333.200.000,00	59.870.000,00	17,97	273.330.000,00
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	335.000.000,00	197.440.229,00	58,94	137.559.771,00

No.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	167.720.000,00	115.555.000,00	68,90	52.165.000,00
2.5	Pembangunan Prasarana Gedung Kantor	850.000.000,00	0,00	0,00	850.000.000,00
2.6	Pengadaan Sarana Gedung Kantor	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00
2.7	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	450.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00
2.8	Rehabilitasi Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kependidikan Kecamatan Loa Janan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>375.694.924,00</b>	<b>83,49</b>	<b>74.305.076,00</b>
3.1	Pelatihan Pengadministrasian, pengelolaan dan analisis kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Review Perda No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan penyusunan Perbub	150.000.000,00	85.064.174,00	56,71	64.935.826,00
3.3	Pelatihan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Pelatihan Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat jabatan Fungsional Tertentu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	75.000.000,00	69.250.000,00	92,33	5.750.000,00
3.6	Evaluasi dan Pembinaan Kepegawaian aparatur sipil negara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00
3.7	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Pengelolaan Kenaikan pangkat jabatan Fungsional Umum dan Khusus serta penilaian Angka Kredit (PAK) Guru PAUD/PNFI,SD dan SMP.	150.000.000,00	146.380.750,00	97,59	3.619.250,00
<b>4</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>9.759.898.747,55</b>	<b>8.524.993.297,00</b>	<b>87,35</b>	<b>1.234.905.450,55</b>
4.1	Penyusunan Laporan Keuangan	100.000.000,00	98.563.600,00	98,56	1.436.400,00
4.2	Penataan Aset Dinas	200.000.000,00	195.146.600,00	97,57	4.853.400,00
4.3	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Money	200.000.000,00	160.829.500,00	80,41	39.170.500,00

No.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
4.4	Review dan Persiapan LK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00	0,00
4.5	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga	9.034.898.747,55	7.845.453.597,00	86,83	1.189.445.150,55
<b>5</b>	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>1.984.073.937,00</b>	<b>909.113.400,00</b>	<b>45,82</b>	<b>1.074.960.537,00</b>
5.1	Bimtek Implementasi Kurikulum 2013 PAUD	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
5.2	Pekan Olahraga dan Seni PAUD (PORSENI PAUD)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Bimtek dan Monitoring Evaluasi BOP	212.000.000,00	211.738.000,00	99,88	262.000,00
5.4	Pembinaan Bunda PAUD se Kabupaten Kutai Kartanegara	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
5.5	Pendampingan proses Penegerian TK	50.000.000,00	41.475.600,00	82,95	8.524.400,00
5.6	Monitoring, Evaluasi dan Visitasi Ijin Pendirian dan Ijin Operasional Lembaga	70.000.000,00	61.899.800,00	88,43	8.100.200,00
5.7	Rehabilitasi Gedung TK	37.232.666,00	0,00	0,00	37.232.666,00
5.8	Pengadaan Meubelair TK Mawar	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00
5.9	Pembangunan Taman Kanak-kanak (TK)	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00
5.10	Pembangunan Toilet Kelompok Bermain Al-Humairoh	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
5.11	Pengadaan Alat Edukasi PAUD	381.041.271,00	0,00	0,00	381.041.271,00
5.12	Pembangunan Toilet TK	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5.13	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD	559.800.000,00	519.000.000,00	92,71	40.800.000,00
5.14	Dana Pendampingan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00
5.15	Pendampingan akreditasi Lembaga PAUD dan PNFI	0,00	0,00	0,00	0,00
5.16	Pembangunan Pagar TK	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00
<b>6</b>	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	<b>128.138.942.962,00</b>	<b>74.852.749.809,00</b>	<b>58,42</b>	<b>53.286.193.153,00</b>
6.1	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	100.000.000,00	99.997.800,00	100,00	2.200,00
6.2	Survey dan Pembuatan Sertifikat Lahan SMP	110.000.000,00	50.826.720,00	46,21	59.173.280,00
6.3	Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas SMP	42.088.178.762,00	18.184.824.904,00	43,21	23.903.353.858,00

No.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
6.4	Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP	400.000.000,00	397.294.500,00	99,32	2.705.500,00
6.5	Penguatan Peningkatan Mutu Manajemen SMP	135.000.000,00	0,00	0,00	135.000.000,00
6.6	Fasilitasi Pengembangan Sekolah model dan sekolah rujukan SMP	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	Pembangunan Pagar SD	3.595.000.000,00	3.162.036.000,00	87,96	432.964.000,00
6.8	Pembangunan Pagar SMP	1.195.000.000,00	1.086.793.075,00	90,95	108.206.925,00
6.9	Rehabilitasi Ruang Kelas SD	838.000.000,00	560.353.500,00	66,87	277.646.500,00
6.10	Pengadaan Sarana Sekolah Dasar	57.000.000,00	50.280.000,00	88,21	6.720.000,00
6.11	Pembebasan Lahan SD	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
6.12	Pembangunan Musholla SMPN 2 Muara Muntai	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00
6.13	Pengadaan Sarana Sekolah	60.000.000,00	59.862.600,00	99,77	137.400,00
6.14	Pengadaan Perlengkapan Perpustakaan SD	58.999.200,00	55.636.700,00	94,30	3.362.500,00
6.15	Pembangunan Perpustakaan SD	265.000.000,00	262.245.000,00	98,96	2.755.000,00
6.16	Pembangunan Ruang UKS SDN	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
6.17	Pembangunan Toilet Murid dan Guru SD	150.000.000,00	148.849.000,00	99,23	1.151.000,00
6.18	Pembuatan Sertifikat Lahan Sekolah SD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.19	Pembangunan Halaman Parkir SDN	70.000.000,00	69.437.000,00	99,20	563.000,00
6.20	Pelatihan Komputer untuk siswa	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00
6.21	Pengadaan Meubelair Siswa SD	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
6.22	Pembebasan Lahan SMP	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
6.23	Pembangunan Toilet SDN	70.000.000,00	69.537.000,00	99,34	463.000,00
6.24	Rehabilitasi Gedung/Ruang Pertemuan SMP	425.000.000,00	0,00	0,00	425.000.000,00
6.25	Pembangunan Halaman Sekolah / Plataran Sekolah SD	1.998.765.000,00	1.710.621.000,00	85,58	288.144.000,00
6.26	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	300.000.000,00	298.435.200,00	99,48	1.564.800,00
6.27	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten	59.748.000.000,00	33.509.985.200,00	56,09	26.238.014.800,00
6.28	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD	150.000.000,00	131.125.600,00	87,42	18.874.400,00

No.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
6.29	Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI Tahun Pelajaran 2017/2018	350.000.000,00	347.964.500,00	99,42	2.035.500,00
6.30	Penguatan Implementasi Pelaksanaan Kurikulum 2013 SD	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00
6.31	Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik Tingkat SD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.32	Olimpiade Sains Nasional (OSN) Siswa SMP	325.000.000,00	274.875.000,00	84,58	50.125.000,00
6.33	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Siswa SMP	450.000.000,00	441.228.000,00	98,05	8.772.000,00
6.34	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Siswa SMP	210.000.000,00	154.300.000,00	73,48	55.700.000,00
6.35	Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berbasis Online SMP	185.000.000,00	179.840.000,00	97,21	5.160.000,00
6.36	Sosialisasi Pengembangan dan Pembangunan Karakter Siswa SMP	275.000.000,00	100.275.000,00	36,46	174.725.000,00
6.37	Semenisasi/Paving Blok halaman sekolah dan pelataran sekolah SD	1.715.000.000,00	1.634.959.000,00	95,33	80.041.000,00
6.38	Semenisasi/Paving Blok halaman sekolah dan pelataran sekolah SMP	225.000.000,00	42.507.150,00	18,89	182.492.850,00
6.39	Dana Alokasi Khusus (DAK) SD	7.965.000.000,00	7.963.595.360,00	99,98	1.404.640,00
6.40	Dana Alokasi Khusus (DAK) SMP	2.270.000.000,00	2.254.687.450,00	99,33	15.312.550,00
6.41	Dana Umum Dana Alokasi Khusus (DAK) SD	600.000.000,00	597.879.600,00	99,65	2.120.400,00
6.42	Dana Umum Dana Alokasi Khusus (DAK) SMP	325.000.000,00	223.880.500,00	68,89	101.119.500,00
6.43	Pembangunan Ruang Kelas SMP/MTs	150.000.000,00	146.611.550,00	97,74	3.388.450,00
6.44	Pembangunan ruang kelas baru SD	200.000.000,00	198.285.000,00	99,14	1.715.000,00
6.45	Pengadaan Alat DrumBand SMP	250.000.000,00	185.840.900,00	74,34	64.159.100,00
6.46	Monitoring, evaluasi dan Bimbingan Teknis Kegiatan Akreditasi SMP	0,00	0,00	0,00	0,00
6.47	Rehab 3 Ruang Kelas pada SDN 017 Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara (Bankeu)	200.000.000,00	197.880.000,00	98,94	2.120.000,00
<b>7</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	<b>2.345.000.000,00</b>	<b>1.845.223.000,00</b>	<b>78,69</b>	<b>499.777.000,00</b>
7.1	Bimtek Tutor Life Skill Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Paket A dan Ujian	200.000.000,00	82.158.000,00	41,08	117.842.000,00



No.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	Nasional Paket B				
7.3	Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Paket C	175.000.000,00	94.465.000,00	53,98	80.535.000,00
7.4	Penuntasan Pendidikan Keaksaraan Fungsional di 18 Kecamatan	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00
7.5	Pengadaan Komputer PC untuk SKB Kota Bangun, SKB Tenggarong dan SKB Muara Jawa	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	Pengadaan Jaringan Internet untuk 3 SKB	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	Pengadaan Meubelair Sanggar Kegiatan Belajar	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8	Dana Alokasi Khusus (DAK) SKB	1.570.000.000,00	1.568.601.000,00	99,91	1.399.000,00
7.9	Dana Umum Dana Alokasi Khusus (DAK) SKB	100.000.000,00	99.999.000,00	100,00	1.000,00
<b>8</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>625.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.000.000,00</b>
8.1	Seleksi dan Diklat Penyiapan Calon Kepala Sekolah Dasar	275.000.000,00	0,00	0,00	275.000.000,00
8.2	Pelatihan Guru Inklusi	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00
8.3	Pelatihan dan Penguatan Asesor Akreditasi SD/MI, SMP/Mts	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	Pelatihan Emotional Spiritual Quotient (ESQ) Bagi Kepala Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	Reguler Training Penggunaan Buku Cambridge University Press Bagi Guru Bahasa Inggris	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6	Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris melalui "English Competition for School and Students"	0,00	0,00	0,00	0,00
8.7	Pelatihan dan Kursus singkat Pengajaran dan Penggunaan Buku Pengantar Bahasa Inggris Bagi Guru	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	<b>2.328.220.000,00</b>	<b>1.487.381.600,00</b>	<b>63,88</b>	<b>840.838.400,00</b>
9.1	Pendampingan dan Monitoring Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS dan BOSNAS)	515.000.000,00	445.633.200,00	86,53	69.366.800,00
9.2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembangunan Pendidikan	346.420.000,00	103.220.000,00	29,80	243.200.000,00
9.3	Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Dasar	50.000.000,00	42.900.000,00	85,80	7.100.000,00

No.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
9.4	Validasi dan Penetapan Sekolah Penerima Bantuan	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
9.5	Pelatihan Operator sekolah terkait dengan pemanfaatan Sistem Informasi Pendidikan Kutai Kartanegara ( SIPENDEKAR )	270.000.000,00	62.274.000,00	23,06	207.726.000,00
9.6	Monitoring dan Evaluasi sistem Jaringan	130.000.000,00	119.592.500,00	91,99	10.407.500,00
9.7	Monitoring dan Evaluasi Penerapan buku Cambrige University Press	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	0,00
9.8	Verifikasi guru penerima tunjangan tambahan penghasilan guru daerah terpencil	250.000.000,00	151.421.600,00	60,57	98.578.400,00
9.9	Pameran Pendidikan	150.000.000,00	129.688.500,00	86,46	20.311.500,00
9.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan	106.800.000,00	28.845.600,00	27,01	77.954.400,00
9.11	Advokasi Bidang Pendidikan	100.000.000,00	98.635.000,00	98,64	1.365.000,00
9.12	Dana Pendampingan Kegiatan Fasilitasi Pokok Hutang Pihak Ketiga	60.000.000,00	55.171.200,00	91,95	4.828.800,00
<b>10</b>	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	<b>5.200.388.801,00</b>	<b>2.714.670.765,00</b>	<b>52,20</b>	<b>2.485.718.036,00</b>
10.1	Pelestarian dan aktualisasi Adat Budaya Daerah	2.996.715.501,00	2.522.448.475,00	84,17	474.267.026,00
10.2	Ekspedisi situs cagar budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Pembebasan Lahan Situs	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00
10.4	Fasilitasi Pengembangan Pelestarian Kebudayaan Keraton	2.083.673.300,00	192.222.290,00	9,23	1.891.451.010,00
<b>11</b>	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000.000,00</b>
11.1	Pengelolaan Museum Kayu dan Museum Muara Kaman	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00
11.2	Pengelolaan Cagar Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000.000,00</b>
12.1	Pergelaran Kesenian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Penyusunan Kurikulum Muatan lokal Bahasa Kutai	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>234.996.199.039,55</b>	<b>170.957.088.241,00</b>	<b>72,75</b>	<b>64.039.110.798,55</b>

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

- a) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018:

**Tabel.3.3**  
IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Target Akhir RPJMD (2021)
1	Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan serta pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan	1. Angka melek huruf (%)	99,89	99,89
		2. Rata-rata lama sekolah	9,12	9,12
		3. APK SD/MI	100	100
		4. APK SLTP/MTs	94,50	94,50
		5. APM SD/MI	99,67	99,67
		6. APM SLTP/MTs	92,25	92,25
		7. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	80	80
		8. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	22	22
		9. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	95,10	95,10

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun 2018.

Pencapaian IKU Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh table berikut ini :

**Tabel 3.4**  
Pencapaian IKU Dinas Pendidikan Tahun 2018

No	Indikator	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2018)
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	Angka melek huruf (%)	99.93	99.94	99,94	100	100

No	Indikator	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2018)
			Target	Realisasi	% Realisasi	
2	Rata-rata lama sekolah	8.50	8,98	8,97	99,88	9,12
3	APK SD/MI	99.85	100	105,83	105,83	100
4	APK SLTP/MTs	93.90	93.90	99,80	94,08	96,50
5	APM SD/MI	99.86	99.96	99,86	99,89	99,71
6	APM SLTP/MTs	93.91	99.92	94,14	94,17	92,75
7	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	53	78	53,00	67,94	84
8	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	16	20	14,00	70	26
9	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	94.87	95,00	94,12	99,07	98

Dari 9 Indikator Kinerja sasaran yang merupakan Indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2018, 1 Indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk sejumlah target IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, beberapa indikator pencapaiannya belum mencapai 100% pada tahun 2018, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, focus, dan terarah, dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat 7 indikator menunjukkan capaian sangat tinggi, 1 indikator menunjukkan capaian rendah dan 1 indikator sangat rendah.

### 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2018 berjumlah 6.405 orang PNS yang terdiri dari 58 Pejabat Struktural dan 559 Fungsional.

### 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.173.585.137.678,86,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 938.610.838.639,31,- dengan realisasi keuangan Rp. 765.987.783.520,00 (81,61%) dan Belanja Langsung Rp. 234.996.199.039,55 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 170.957.088.241,- atau 72,75 %.

### 5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah

tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah terdiri dari ; Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara cukup representatif yang terletak di Jalan Lais Kelurahan Timbau Tenggarong dalam kondisi baik. Kendaraan terdiri dari Kendaraan Roda Dua dan Kendaraan Roda Empat. Sarana Komputer meliputi Komputer dan Laptop. Telekomunikasi dan Informasi, Peralatan Mesin Generator dalam keadaan baik.

## 6. Permasalahan dan Solusi

- a) Dalam tiga tahun mendatang, pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Kutai Kartanegara dihadapkan pada berbagai tantangan serius, terutama dalam upaya meningkatkan kinerja yang mencakup (1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan; (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; (3) penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik; dan (4) peningkatan pembiayaan.
- b) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 terkait kualitas SDM pengelola keuangan dan pelaksana teknis kegiatan sehingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukan upaya peningkatan kualitas SDM dan koordinasi lebih intensif.
- c) Program Kegiatan yang seharusnya dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni, tetapi dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P).

## 2. URUSAN KESEHATAN

### DINAS KESEHATAN

#### 1. Program dan Kegiatan

Dalam hal pencapaian program dan kegiatan tahun anggaran 2018 Dinas Kesehatan telah memasukan sebanyak 23 jumlah program di Tahun 2018 dengan presentase capaian kinerja keuangan sebesar 72,22%, Secara keseluruhan pencapaian renja dan renstra masih ada yang belum memenuhi target dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran dan capaian target program dan kegiatan akan ditingkatkan lagi pada tahun 2019 mendatang secara keseluruhan sebagai berikut :

**Tabel.3.5**  
Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2018

No.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi Keuangan	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%
A.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
1	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000	5000000	1.230.000	24,60
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	500.000.000	500.000.000	440.875.816	88,18
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	300.000.000	300.000.000	89.154.320	29,72
4	Penyediaan jasa	225.000.000	225.000.000	67.382.039	29,95

No.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi Keuangan	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%
	pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.000.000.000	2.000.000.000	1.075.408.875	53,77
6	Penyediaan alat tulis kantor	200.000.000	200.000.000	199.572.000	99,79
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60.000.000	60.000.000	29.502.000	49,17
8	Penyediaan peralatan rumah tangga	150.000.000	150.000.000	0	0
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30.000.000	30.000.000	29.532.000	98,44
10	Penyediaan makanan dan minuman	250.000.000	250.000.000	155.234.500	62,09
11	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	30.079.000.000	27.479.000.000	24.791.921.627	90,22
12	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dan penjilidan	175.000.000	175.000.000	60.891.150	34,79
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	1.100.000.000	1.600.000.000	879.392.838	54,96
B.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.146.298.003	746.298.003	247.326.800	33,14
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	508.913.271	508.913.271	0	0
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	400.000.000	300.000.000	200.481.500	66,83
4	Penyediaan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik*)	122.235.000	122.235.000	121.006.664	99
5	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				
C.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				
1	Pengadaan/Rekrutmen Tenaga Kontrak UPTD dan Dinas Kesehatan	60.000.000	60.000.000	0	0
D.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1	Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan	75.000.000	75.000.000	38.270.600	51,03
2	Monitoring Evaluasi	200.000.000	200.000.000	64.069.400	32,03

No.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi Keuangan	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%
	Pemantauan Kepegawaian				
E.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				
1	Fasilitasi pelaksanaan Akutansi dan perbendaharaan pada Puskesmas PPK BLUD	900.000.000	1.900.000.000	780.023.073	41,05
2	Fasilitasi Pertemuan dan Pendampingan E Planning	500.000.000	500.000.000	230.308.805	46,06
3	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	0	46.220.914.153	45.467.312.746	98,37
E.	<b>Program Obat dan Pembekalan Kesehatan</b>				
1	Pembinaan Pelayanan Kefarmasian	150.000.000	150.000.000	41.884.400	27,92
2	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Distribusi Obat dan E Logistik	260.784.000	260.784.000	223.915.000	85,86
3	Operasional UPT Dinas Kesehatan Gudang Farmasi Kabupaten	250.000.000	250.000.000	50.573.500	20,23
4	Operasional UPTD Elektromedik Daerah Kabupaten	400.000.000	400.000.000	168.225,392	42,06
5	Pengadaan Perbekalan Kesehatan	300.000.000	300.000.000	96.096.652	32,03
6	Pengadaan Obat	4.000.000.000	4.000.000.000	764.663.586	19,12
7	Fasilitasi Peningkatan Mutu Pengguna Obat	100.000.000	100.000.000	10.545.600	10,55
F.	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>				
1	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas bunga jadi	404.119.000	404.119.000	274.847.955	68,01
2	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas prangat	291.443.000	291.443.000	272.500.900	93,50
3	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas badak baru	270.464.000	270.464.000	242.129.459	89,52
4	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas rimba ayu	311.283.000	311.283.000	287.471.312	92,35
5	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas jonggon jaya	284.362.000	284.362.000	283.637.866	99,75
6	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas muara badak	365.064.000	365.064.000	249.927.822	68,46
7	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas loa	240.455.000	240.455.000	231.261.262	96,18

No.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi Keuangan	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%
	duri				
8	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas rapak mahang	282.151.000	282.151.000	277.153.711	98,23
9	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas sanga-sanga	285.364.000	285.364.000	239.514.212	83,93
10	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas muara kaman	422.961.000	422.961.000	252.899.489	59,79
11	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas marang kayu	308.418.000	308.418.000	289.733.300	93,94
12	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas kahala	425.195.000	425.195.000	419.559.850	98,67
13	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas ritan	345.325.000	345.325.000	<b>307.760.961</b>	89,12
14	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas muara wis	360.048.000	360.048.000	320.944.000	89,14
15	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas sungai meriam	432.312.000	432.312.000	377.664.159	87,76
16	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas loa kulu	479.566.000	479.566.000	327.141.210	68,22
17	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas muara muntai	373.510.000	373.510.000	336.717.443	90,15
18	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas mangkurawang	321.088.000	321.088.000	300.640.950	93,63
19	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas batuah	184.066.000	184.066.000	165.164.500	89,73
20	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas tabang	319.669.000	319.669.000	279.689.847	87,49
21	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas muara jawa	456.454.000	456.454.000	327.066.585	71,65
22	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas teluk dalam	386.650.000	386.650.000	277.418.080	71,75
23	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas loa ipuh	309.800.000	309.800.000	285.019.602	92,00
24	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas handil baru	368.877.000	368.877.000	331.366.974	89,83
25	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas kota bangun	383.511.000	383.511.000	324.053.300	84,50



No.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi Keuangan	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%
26	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas seperi 3	228.344.000	228.344.000	198.087.125	86,75
27	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas loa janan	266.672.000	266.672.000	219.385.958	82,27
28	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas sebulu 2	215.872.000	215.872.000	146.613.209	67,92
29	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas samboja	335.247.000	335.247.000	313.269.372	93,44
30	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas kembang janggut	450.313.000	450.313.000	310.823.000	69,02
31	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas sei merdeka	298.275.000	298.275.000	277.395.996	93,00
32	Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas sebulu 1	420.711.000	420.711.000	247.422.621	58,81
33	Peningkatan Upaya Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Jaringannya	450.000.000	450.000.000	165.203.350	36,71
34	Peningkatan pelayanan Kesehatan Khusus	337.404.000	337.404.000	122.005.000	36,16
35	Peningkatan Kompetensi Teknis Tenaga Kesehatan	250.000.000	250.000.000	56.346.400	22,54
36	Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama	250.000.000	250.000.000	83.972.851	33,59
37	Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Swasta/ Klinik/Institusi	200.000.000	200.000.000	71.183.900	35,59
38	Fasilitasi Kesehatan Jiwa	150.000.000	150.000.000	81.544.000	54,36
39	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Puskesmas	236.790.000	236.790.000	102.573.400	43,32
40	Bantuan Operasional Kesehatan puskesmas bunga jadi	544.464.894	544.464.894	449.709.300	82,60
41	Bantuan Operasional Kesehatan puskesmas prangat	543.528.860	543.528.860	496.977.000	91,44
42	Bantuan Operasional Kesehatan puskesmas badak baru	498.950.777	498.950.777	412.854.499	82,74
43	Bantuan Operasional Kesehatan puskesmas rimba ayu	701.213.259	701.213.259	436.467.700	62,24
44	Bantuan Operasional Kesehatan puskesmas jonggon jaya	599.784.260	599.784.260	599.759.260	100
45	Bantuan Operasional	633.826.706	633.826.706	518.955.475	81,88

No.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi Keuangan	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%
	Kesehatan puskesmas muara badak				
46	Bantuan Operasional Kesehatan puskesmas loa duri	571.585,554	571.585,554	541.683.400	94,77
47	Bantuan Operasional Kesehatan puskesmas rapak mahang	597.532.484	597.532.484	597.097.484	99,93
48	Bantuan Operasional Kesehatan puskesmas sanga-sanga	578.553.672	578.553.672	505.772.900	87,42
49	Bantuan Operasional Kesehatan puskesmas muara kaman	612.833.813	612.833.813	525.168.600	85,70
50	Bantuan Operasional Kesehatan puskesmas marang kayu	530.138.790	530.138.790	490.793.355	92,58
51	Bantuan Operasional Kesehatan puskesmas kahala	647.216.647	647.216.647	647.167.800	99,99
52	Bantuan Operasional Kesehatan puskesmas ritan	500.028.825	500.028.825	324.468.225	64,89
53	Bantuan Operasional Kesehatan puskesmas muara wis	604.255.765	604.255.765	544.008.800	90,03
54	Bantuan Operasional Kesehatan puskesmas sungai meriam	744.085.731	744.085.731	536.609.000	72,12
55	Bantuan Operasional Kesehatan puskesmas loa kulu	736.482.908	736.482.908	723.373.300	98,22
56	Bantuan Operasional Kesehatan puskesmas muara muntai	751.585.731	751.585.731	679.636.500	90,43
57	Bantuan Operasional Kesehatan puskesmas mangkurawang	611.660.083	611.660.083	607.715.700	99,36
58	Bantuan Operasional Kesehatan puskesmas batuah	454.269.871	454.269.871	413.537.562	91,03
59	Bantuan Operasional Kesehatan puskesmas tabang	542.014.612	542.014.612	450.314.612	83,08
60	Bantuan Operasional Kesehatan puskesmas muara jawa	605.674.331	605.674.331	585.167.900	96,61
61	Bantuan Operasional Kesehatan puskesmas teluk dalam	684.936.707	684.936.707	616.508.900	90,01
62	Bantuan Operasional Kesehatan puskesmas loa ipuh	515.035.967	515.035.967	515.025.900	100
63	Bantuan Operasional	529.702.589	529.702.589	513.209.068	96,89

No.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi Keuangan	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%
	Kesehatan puskesmas handil baru				
64	Bantuan Operasional Kesehatan puskesmas kota bangun	705.731.096	705.731.096	614.607.800	87,09
65	Bantuan Operasional Kesehatan puskesmas separi 3	537.837.295	537.837.295	473.610.100	88,06
66	Bantuan Operasional Kesehatan puskesmas loa janan	560.993.425	560.993.425	531.246.024	94,70
67	Bantuan Operasional Kesehatan puskesmas sebulu 2	452.531.472	452.531.472	365.670.700	80,84
68	Bantuan Operasional Kesehatan puskesmas samboja	554.025.307	554.025.307	553.845.000	99,97
69	Bantuan Operasional Kesehatan puskesmas kembang janggut	633.929.530	633.929.530	513.780.100	81,05
70	Bantuan Operasional Kesehatan puskesmas sei merdeka	511.262.801	511.262.801	474.180.300	92,75
71	Bantuan Operasional Kesehatan puskesmas sebulu 1	670.809.108	670.809.108	477.272.600	71,15
72	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Upaya Kesehatan Masyarakat Kabupaten (DAK Non Fisik *)	933.204.000	933.204.000	877.218.994	94,00
73	Operasional fasilitasi badan Narkotika Kabupaten (BNK)	1.000.000.000	1.000.000.000	649.791.825	64,98
74	Operasional Fasilitasi palang Merah Indonesia (PMI)	1.000.000.000	1.000.000.000	73.690.800	7,37
G	<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>				
1	Sosialisasi Keamanan pangan atau Makanan	100.000.000	100.000.000	60.292.600	60,29
2	Pemeriksaan dan Pemusnahan obat-obatan dan makanan yang mengandung bahan berbahaya	50.000.000	50.000.000	10.449.400	20,90
H	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat</b>				
1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	150.000.000	150.000.000	105.943.000	70,63
2	Monitoring dan Evaluasi program promosi	150.000.000	150.000.000	90.992.500	60,66

No.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi Keuangan	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%
	Kesehatan				
3	Fasilitasi Peringatan Hari-Hari Tertentu Kesehatan	150.000.000	150.000.000	67.862.000	45,24
I	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>				
1	Pencegahan dan Penanggulangan anemia gizi, Kekurangan Vit A dan Gangguan akibat kekurangan yodium (Ibu Hamil KEK)	200.000.000	200.000.000	51.763.100	25,88
2	Pengadaan Buku KIA dan GPA	145.000.000	145.000.000	85.464.900	58,94
3	Fasilitasi Percepatan Program ASI Eksklusif	200.000.000	200.000.000	13.544.700	6,77
4	Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk/KEP	300.000.000	300.000.000	108.554.059	36,18
5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	100.000.000	100.000.000	0	0
6	Peningkatan kapasitas tata Laksana Gizi Buruk pd Anak	300.000.000	300.000.000	0	0
7	Peningkatan kapasitas Petugas dalam pemantauan Pertumbuhan pd Balita	300.000.000	300.000.000	0	0
J	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>				
1	Fasilitasi penyehatan Lingkungan	175.000.000	175.000.000	132.744.731	75,85
2	Pemeriksaan Colinesterase Darah Petani dan pekerja	75.000.000	75.000.000	10.201.600	13,60
3	Peningkatan Kapasitas Petugas Sanitasi	108.000.000	108.000.000	41.218.500	38,17
K.	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>				
1	Penanggulangan penyakit menular	150.000.000	150.000.000	64.692.000	43,13
2	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi program Imunisasi	200.000.000	200.000.000	22.929.740	11,46
3	Pemberian Imunisasi Bagi Jemaah Haji	100.000.000	100.000.000	88.577.800	88,58
L.	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>				
1	Fasilitasi sertifikasi/perijinan tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan dan fasilitas peninjang pelayanan Kesehatan	291.270.000	291.270.000	88.146.000	30,26
2	Fasilitasi akreditasi Puskesmas	530.000.000	530.000.000	203.358.319	38,37
3	Fasilitas Surveyance Dinkes	269.000.000	269.000.000	207.635.467	77,19

No.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi Keuangan	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%
	ISO dan Puskesmas ISO				
4	Fasilitasi Implementasi Regulasi Bidang Kesehatan	100.000.000	100.000.000	33.779.011	33,78
5	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	1.250.000.000	1.250.000.000	1.074.976.922	86,00
M.	<b>Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya</b>				
1	Pembangunan Puskesmas	11.000.000.000	10.931.658.400	10.667.813.825	97,59
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Pus/Berat Puskesmas Pembantu	538.130.000	538.130.000	255.575.700	47,49
3	Rehabilitasi Total Puskesmas	33.600.000.000	31.400.000.000	13.026.991.917	41,49
4	Renovasi Puskesmas	8.500.000.000.	8.301.832.000	6.202.215.950	74,71
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas	400.000.000	0	0	0
6	Perluasan Puskesmas	2.600.000.000	1.400.000.000	114.484.850	8,18
7	Perencanaan Pembangunan / Rehab / renovasi dan perluasan Puskesmas	400.000.000	400.000.000	102.571.500	25,64
8	Perencanaan pembangunan / Rehab / Renovasi dan Perluasan Puskesmas Pembantu	200.000.000	200.000.000	0	0
9	Pavingisasi dan Pemagaran Puskesmas	300.000.000	300.000.000	19.296.500	6,43
10	Pavingisasi dan pemagaran Puskesmas pembantu	15.000.000	15.000.000	0	0
11	Pembanguna Puskesmas Pembantu	3.393.426.000	618.402.550	491.095.200	79,41
12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan sarana dan prasarana kesehatan	150.000.000	150.000.000	108.287.517	72,19
13	Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas	800.000.000	800.000.000	0	0
14	Pengadaan Generator / Pembangkit Listrik Puskesmas dan Puskesmas pembantu	690.000.000	690.000.000	8.786.250	1,27
15	Penyediaan Sewa Gedung / kantor Puskesmas	400.000.000	700.000.000	263.410.500	37,63
16	Pembangunan Rumah Dinas paramedis Puskesmas	6.478.000.000	578.000.000	216.648.200	37,48
17	Pengadaan Alat Kesehatan	12.500.000.000	4.400.000.000	4.334.503.808	98,51
18	Pengadaan meubelair	3.500.000.000	3.500.000.000	3.230.040.865	92,229
19	Pemasangan Listrik dan	300.000.000	300.000.000	8.365.000	2,79

No.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi Keuangan	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%
	penambahan daya Listrik Puskesmas dan Puskesmas Pembantu				
20	Perbaikan / Pemeliharaan Sarana Prasarana Puskesmas	464.935.000	2.464.935.000	0	0
21	Pembuatan Sertifikasi tanah Puskesmas / Puskesmas Pembantu	300.000.000	300.000.000	0	0
22	Pembangunan Puskesmas Dana Alokasi Khusus (DAK / Fisik)	5.976.416.000	5.976.416.000	5.505.543.000	92,12
23	Pengadaan peralatan pendukung Imunisasi (Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik)	472.564.000	472.564.000	466.750.658	98,77
24	Pendamping dana Alokasi Khusus (DAK)	270.000.000	270.000.000	237.633.500	88,01
25	Pemeliharaan Rutin / berkala Puskesmas pembantu	600.000.000	600.000.000	250.778.000	41,80
26	Pavingisasi dan pagar beton Puskban Jembayan RT. 002 Ds jembayan Kec. Loa Kulu	100.000.000	100.000.000	0	0
27	Pembangunan Puskesmas (Lanjutan)	4.000.000.000	4.000.000.000	2.708.964.850	67,72
N	<b>Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</b>				
1	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	800.000.000	8.704.123.000	4.771.414.168	54,82
O.	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia</b>				
1	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	100.000.000	100.000.000	58.964.300	58,96
P.	<b>Program Pengendalian Penyakit dan Surveilans</b>				
1	Surveilan aktif petugas Kabupaten ke RSUD, BPS	50.000.000	50.000.000	6.580.700	13,16
2	Fasilitasi Surveylance dan Penyelidikan Epidemiologi	350.000.000	350.000.000	102.522.921	29,29
Q.	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak Menular</b>				
1	Penanggulangan penyakit tidak menular	250.000.000	250.000.000	123.050.699	49,22
R	<b>Program penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dan bencana/wabah</b>				
1	Fasilitasi penanggulangan	150.000.000	150.000.000	53.777.800	35,85

No.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi Keuangan	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%
	Wabah KLB				
2	Fasilitasi Penanggulangan bencana	150.000.000	150.000.000	21.590.000	14,39
S	<b>Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi</b>				
1	Kunjungan Dokter spesialis kandungan secara berkala	200.000.000	200.000.000	57.119.700	28,56
2	Jaminan persalinan (DAK Non Fisik) *)	7.184.671.000	7.184.671.000	3.460.922.750	48,17
T	<b>Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak</b>				
1	Peningkatan Kesehatan Anak dan Remaja	450.000.000	450.000.000	173.868.000	38,64
U.	<b>Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan</b>				
1	Fasilitasi Kehumasan bidang kesehatan	100.000.000	100.000.000	44.075.600	44,08
2	Fasilitasi Pengembangan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	100.000.000	100.000.000	30.321.000	30,32
3	Fasilitasi peningkatan Kualitas Informasi Kesehatan	150.000.000	150.000.000	88.299.900	58,87
4	Fasilitasi Pengelolaan Wibesite Puskesmas	150.000.000	150.000.000	31.111.900	20,74
5	Pemeliharaan peralatan pendukung sistim informasi kesehatan di dsinkes Kabupaten, puskesmas dan jaringannya	114.760.000	114.760.000	37.359.400	32,55
JUMLAH		<b>192.689.690.274</b>	<b>227.673.194.377,50</b>	<b>164.435.669.145</b>	<b>72,22</b>

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dari pelaksanaan kegiatan tahun 2018 pada SKPD Dinas Kesehatan dan Puskesmas dapat dihimpun pencapaian-pencapaian dibawah ini :

**Tabel.3.6**

Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2018

NO.	INDIKATOR SPM	SASARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	Pelayanan Kesehatan Ibu	18,110	13,327	73,59 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	17,287	12,563	72,67 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	15,182	11,759	77,45 %

NO.	INDIKATOR SPM	SASARAN	REALISASI	PERSENTASE
4	Pelayanan Kesehatan Balita	74,900	38,967	52,03 %
5	Pelayanan Kesehatan Pada Pendidikan Dasar	29,900	28,566	95,5 %
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	523,093	100,051	19,1 %
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	37,109	16,208	43,68 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	182,976	50,777	27,8 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	51,546	20,328	39,4 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa	464	464	100 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB	1286	1220	94,87 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko terinfeksi HIV	18,997	13,224	69,6 %

B. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2018

- 1) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 85,89 % atau sebanyak 3.111 kasus komplikasi pada tingkat puskesmas dari 3.622 ibu dengan kasus komplikasi kebidanan.
- 2) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 77,79 % atau 13.448 ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan dari sasaran ibu bersalin sebanyak 17.287 ibu bersalin .
- 3) Cakupan desa/kelurahan UCI yaitu tingkat pencapaian 100 % atau 237 desa/kelurahan yang telah mencapai UCI dibanding/dari 237 desa/kelurahan yang ada di Kab Kutai Kartanegara .
- 4) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sebesar 100 % atau 73 balita gizi buruk yang mendapat perawatan dari 73 balita gizi buruk yang ditemukan .
- 5) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC sebesar
- 6) 94,8 % atau 1220 penderita baru TBC yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 thn dari 1286 penderita TBC dalam kurun waktu yang sama.
- 7) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sebesar 100 % atau 794 penderita DBD yang ditangani dari 794 penderita DBD yang ditemukan.
- 8) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sebesar 100 % atau sebanyak 123.991 kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1 dari 123.991 Jiwa masyarakat miskin.
- 9) Cakupan kunjungan bayi sebesar 82,51% atau 12,526 bayi yang berkunjung dan memperoleh pelayanan, dari 15.182 bayi baru lahir.

**3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.**

Jumlah Pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 957 orang PNS, 5 orang PTT, 7 orang NS, 236 THL dan 785 orang TKK. Dengan rincian Jabatan Struktural dan Fungsional terdiri dari Jabatan Struktural berjumlah 79 orang\* dari 89 jabatan structural, dan Jabatan Fungsional berjumlah 648 orang.



#### 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 sebesar Rp. 319.464.976.731,74 (Tiga ratus sembilan belas milyar empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah tujuh puluh empat sen) terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung Rp. 91.791.782.354,24
- Belanja Langsung Rp. 227.673.194.377,50
  - Belanja Pegawai Rp. 5.756.840.325,00
  - Belanja Barang dan Jasa Rp. 136.090.581.931,00
  - Belanja Modal Rp. 85.825.772.121,50

Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kab Kutai Kartanegara tahun 2018 sebesar Rp. 255.286.237.303,11 (Dua ratus lima puluh lima milyar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga rupiah sebelas sen) terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung Rp. 90.850.568.158,11
- Belanja Langsung Rp. 255.286.237.303,11
  - Belanja Pegawai Rp. 4.513.073.700,00
  - Belanja Barang dan Jasa Rp. 103.812.585.744,00
  - Belanja Modal Rp. 56.110.009.701,00

Adapun pelaksana urusan desentralisasi ini Dinas Kesehatan dibantu oleh UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), UPTD Gudang Farmasi dan UPTD Elektromedik.

#### 5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam penyusunan dokumen perencanaan wajib adanya konsistensi program pada Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun kesesuaian program pada dokumen perencanaan di OPD Dinas Kesehatan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel.3.7**  
Keseuaian Jumlah Program Dinas Kesehatan Tahun 2018

PROGRAM	JUMLAH PROGRAM			
	RENSTRA	RENJA	Sesuai	Selisih
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	1	1	0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	1	1	0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	1	1	0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	1	1	0
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1	1	1	0
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1	1	1	0
Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	1	1	1	0
Program obat dan perbekalan Kesehatan	1	1	1	0

PROGRAM	JUMLAH PROGRAM			
	RENSTRA	RENJA	Sesuai	Selisih
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1	1	1	0
Program Pengawasan Obat dan makanan	1	1	1	0
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	1	1	0
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1	1	1	0
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1	1	1	0
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	1	1	1	0
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	1	1	1	0
Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	1	1	1	0
Program Pengendalian Penyakit dan Surveilans	1	1	1	0
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	1	1	1	0
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1	1	1	0
Program pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular	1	1	1	0
Program Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana/Wabah	1	1	1	0
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	1	-	-
Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	1	1	-	-
<b>JUMLAH PROGRAM</b>	23	23	21	0

#### 6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Sarana dan Prasarana Kesehatan yang dimiliki Dinas Kesehatan dan Jaringannya sebagai berikut :

- A. Dinas Kesehatan : 1 Unit
- B. UPTD Gudang Farmasi : 1 Unit
- C. UPTD Elektromed dan Laboratorium Kesehatan 1 Unit
- D. UPTD Puskesmas : 32 Unit
  - 1. Puskesmas Biasa : 6 Unit
  - 2. Puskesmas Rawat Inap : 26 Unit
- E. Puskesmas Pembantu : 181 unit
- F. Kendaraan Operasional :
  - 1. Roda Empat
    - a. Ambulance : 48 unit
    - b. Mobil Operasional : 52 unit
      - Operasional Dinkes : 16 Unit
      - Operasional Puskesmas : 27 Unit
  - 2. Roda Dua : 495 unit
  - 3. Pusling Air : - unit

## 7. Permasalahan dan Solusi

### A. Permasalahan

Permasalahan di bidang Kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 adalah masih kurang optimalnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, hal ini mengakibatkan belum tercapainya target Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan, diantaranya adalah relatif masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Bayi (AKB) dan Balita (AKABA), masih rendahnya kualitas sanitasi, masih ditemukan kasus balita dengan gizi buruk, masih kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan terutama tenaga medis (dokter), serta pelayanan kesehatan kepada usia pendidikan dasar yang masih rendah. Selain itu kurangnya pengawasan dalam memprioritaskan penyediaan dana untuk kegiatan yang mempunyai daya ungkit terhadap pencapaian SPM menjadi penyebab beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana.

### B. Solusi

Solusi yang dapat diberikan yaitu dengan meningkatkan jumlah dan jenis tenaga, sarana medis dan penunjangnya; sarana nonmedis, sarana transportasi dan ambulan, listrik; perencanaan dan penganggaran; System Informasi kesehatan (SIMPUS), Jejaring System Rujukan dan leadership, harus dapat dipenuhi untuk mendapatkan hasil pembangunan kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna. Selain itu juga perlu diimbangi dengan penguatan dalam proses monitoring dan evaluasi melalui supervisi terpadu yang sudah terbentuk dan terpolo dengan baik.

Guna meningkatkan motivasi petugas kesehatan yang ada maka pola "Reward and Punishment" bagi petugas tenaga Kesehatan, baik di Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas.

## RSUD AM. PARIKESIT

### 1. Program dan Kegiatan

**Tabel 3.8**  
Pencapaian Program dan Kegiatan Tahun 2018

No.	Uraian Program dan Kegiatan	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
1.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	12 bulan	100 %
2.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan	100 %
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	696 orang/bulan	696 orang/bulan	100 %
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			
1.	Fasilitas Penyelesaian Kewajiban kepada pihak ketiga	4 kegiatan	4 kegiatan	100 %
<b>VI</b>	<b>Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata</b>			
1.	Pembuatan Parit dan Turap Keliling Rumah Sakit	1 paket	0,25 paket	25 %

No.	Uraian Program dan Kegiatan	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
2.	Pengadaan Alat Kesehatan dan Kendaraan Khusus (DAK)	7 paket	7 paket	100 %
3.	Dana Pendampingan DAK 2018	7 paket	7 paket	100 %

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

RSUD Aji Muhammad Parikesit melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

**Tabel 3.9**  
Capaian Standar Pelayanan Minimal RSUD Aji Muhammad Parikesit Tahun 2018

NO	JENIS LAYANAN	INDIKATOR	STANDAR MINIMAL	HASIL 2017	2018	
					REALISASI	KET
1	INSTALASI RAWAT DARURAT	1. Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100 %	100 %	100 %	Tercapai
		2. Jam buka pelayanan gawat darurat	24 jam	24 jam	24 jam	Tercapai
		3. Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat BLS/PPGD/GELS/ALS	100 %	100 %	100 %	Tercapai
		4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 Tim	Koordinasi dengan tim k3	1 Tim	Tercapai
		5. Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang	3.25 menit	4,64 menit	Tercapai
		6. Kepuasan pelanggan pada Gawat Darurat	≥ 70 %	75,73 %	77,36 %	Tercapai
		7. Kematian pasien kematian < 24 jam di Gawat Darurat	≤ 2 per 1000 (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	1,6633	0,0014	Tercapai
		8. Tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka	100 %	100 %	100 %	Tercapai
2	INSTALASI RAWAT JALAN	1. Pemberi pelayanan di klinik spesialis	100 %	99,79 %	100 %	Tercapai
		2. Ketersediaan pelayanan rawat jalan	Min. Peny. Dalam, Kes. Anak, Obsgyn dan Bedah	Tercapai	100 %	Tercapai
		3. Jam buka pelayanan sesuai ketentuan	100 %	94,91 %	93 %	Belum tercapai
		4. Waktu tunggu di rawat	≤ 60 menit	108 menit	98,58	Belum

NO	JENIS LAYANAN	INDIKATOR	STANDAR MINIMAL	HASIL 2017	2018	
					REALISASI	KET
		jalan			menit	tercapai
		5. Kepuasan pelanggan di rawat jalan	≥ 90 %	83,08 %	80,38 %	Belum tercapai
		6. a. Penegakan Diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥ 60 %	25,41 %	76 %	Tercapai
		b. Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan TB di RS	≥ 60 %	100 %	100 %	Tercapai
3	INSTALASI RAWAT INAP	1. Pemberi pelayanan rawat inap	100%	100 %	100 %	Tercapai
		2. Dokter penanggung jawab pasien (DPJP) rawat inap	100 %	100 %	100 %	Tercapai
		3. Ketersediaan pelayanan rawat inap	Min. Peny. Dalam, Kes. Anak, Obsgyn dan Bedah	100 %	100 %	Tercapai
		4. Jam visite dokter spesialis	100 %	50,70 %	56,90 %	Belum tercapai
		5. Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1.5 %	0%	0 %	Tercapai
		6. Angka kejadian infeksi nosocomial	≤ 1.5 %	7,20 %	6,24 %	Belum tercapai
		7. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%	99,94 %	100 %	Tercapai
		8. Kematian pasien > 48 jam	NDR ≤ 25 / 1000 (0.025)	15,67 %	1,53 %	Tercapai
		9. Kejadian pulang paksa	≤ 5 %	3,9 %	3,14 %	Tercapai
		10. Kepuasan pasien rawat inap	≥ 90 %	84,08 %	83,49 %	Belum tercapai
		11. a. Penegakan Diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	60 %	81,9 %	65 %	Tercapai
		b. Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan TB di RS	60 %	100 %	100 %	Tercapai
4	INSTALASI BEDAH SENTRAL	1. Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	1 hari	1 hari	Tercapai
		2. Kejadian kematian di meja operasi	≤ 1 %	0%	0	Tercapai

NO	JENIS LAYANAN	INDIKATOR	STANDAR MINIMAL	HASIL 2017	2018	
					REALISASI	KET
		3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	≤ 100 %	0%	100 %	Tercapai
		4. Tidak adanya kejadian operasi salah orang	≤ 100%	0%	100 %	Tercapai
		5. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	≤ 100%	0%	100 %	Tercapai
		6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	≤ 100%	0%	100 %	Tercapai
		7. Komplikasi anestesi karena over dosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan endotracheal tube	≤ 6 %	0%	0 %	Tecapai
5	PELAYANAN PERSALINAN DAN PERINATOLOGI	1. Kejadian kematian ibu karena persalinan	Perdarahan ≤ 1%	0 %	1,17 %	Tercapai
			Pre-eklampsia ≤ 30 %	0 %	0 %	Tercapai
			Sepsis ≤ 0.2 %	0 %	0 %	Tercapai
		2. Pemberi pelayanan persalinan normal (dr. Sp. OG, dr. Umum, bidan)	100 %	100 %	100 %	Tercapai
		3. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit (Tim PONEX)	Tersedia	Tersedia	100 %	Tercapai
		4. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	100%	100 % (Sp.Og)	98% (Sp.Og)	Belum Tercapai
				100 % (Sp.An)	97% (Sp.An)	
				80,53 % (Sp.A)	84% (Sp.A)	
		5. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100%	97,47 %	95%	Belum tercapai
		6. Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20%	45,33 %	41,48%	Belum tercapai
		7. Keluarga Berencana a. Keluarga Berencana b. Konseling KB Manta c. Gakin KB Pembiayaan 100%	100 %	100 %	100 %	Tercapai
		8. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	82,33 %	89,87 %	Tercapai
6	INSTALASI RAWAT INTENSIF	1. Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %	0,50%	0 %	Tercapai
		2. Pemberi pelayanan unit	100 %	96,37 %	100 %	Tercapai

NO	JENIS LAYANAN	INDIKATOR	STANDAR MINIMAL	HASIL 2017	2018	
					REALISASI	KET
		intensif	(Dokter)			
			100 % (Perawat)	31,10 %	31 %	Belum Tercapai
7	INSTALASI RADIOLOGI	1. Waktu tunggu hasil pelayanan thoraks foto	≤ 3 Jam	34,18 menit	89,87 menit	Tercapai
		2. Pelaksana ekspertise hasil pemeriksaan	100%	22,10 % (IGD)	48%	Belum tercapai
				62,5 % (IRJA)	92%	
				41,89 % (IRNA)	86%	
		3. Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	≤ 2 %	1,03 %	0.85%	Tercapai
4. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	85,69 %	82.97	Tercapai		
8	INSTALASI LABORATORIUM	1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140 menit (manual)	100,25 menit	106,68 menit	Tercapai
		2. Pelaksana ekspertise hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100 %	100 %	Tercapai
		3. Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil	100 %	100 %	100 %	Tercapai
		4. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	83.84 %	85,66 %	Tercapai
9	INSTALASI REHABILITASI MEDIK	1. Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan	≤ 50 %	16.50 %	0 %	Tercapai
		2. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan	100 %	100 %	100 %	Tercapai
		3. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	88.41 %	88,41 %	Tercapai
10	INSTALASI FARMASI	1. a. Waktu tunggu pelayanan obat jadi	≤ 30 menit	20.27 menit	16,75 menit	Tercapai
		b. Waktu tunggu pelayanan obat racikan	≤ 60 menit	37,08 menit	32,64 menit	Tercapai
		2. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100 %	100 %	100%	Tercapai
		3. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	79,91 %	81,07 %	Tercapai
		4. Penulisan resep sesuai formularium	100 %	98 %	99 %	Belum tercapai
11	INSTALASI GIZI	1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %	86,25 %	96 %	Tercapai
		2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≥ 20 %	18,17 %	12,14 %	Tercapai
		3. Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet	100 %	91,42 %	100 %	Belum tercapai

NO	JENIS LAYANAN	INDIKATOR	STANDAR MINIMAL	HASIL 2017	2018	
					REALISASI	KET
12	TRANSFUSI DARAH	1. Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfuse	100 %	Rumah sakit belum memiliki Unit Bank Darah	Rumah sakit belum memiliki Unit Bank Darah	Data tidak tersedia
		2. Kejadian reaksi transfusi	≤ 0,01 %	Rumah sakit belum memiliki Unit Bank Darah	Rumah sakit belum memiliki Unit Bank Darah	Data tidak tersedia
13	PELAYANAN GAKIN	1. Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 %	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia
14	INSTALASI REKAM MEDIK	1. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100 %	85,19 %	87.62%	Belum tercapai
		2. Kelengkapan <i>informed concept</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas	100 %	75,16 %	45.52%	Belum tercapai
		3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	Rerata ≤ 10 menit	7,3 menit	10 menit	Tercapai
		4. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	-	29 menit	Belum tercapai
15	UNIT KESEHATAN LINGKUNGAN (PENGELOLAAN LIMBAH)	1. Baku mutu limbah cair a. BOD < 30 mg/l	30 mg/l	78.50 mg/l	14.35 mg/l	Tercapai
		b. COD < 80 mg/l	80 mg/l	120.48 mg/l	48.33 mg/l	Tercapai
		c. TSS < 30 mg/l	30 mg/l	13.2 mg/l	13.02 mg/l	Tercapai
		d. PH 6-9	PH 6 – 9	7.253	7.64	Tercapai
		2. Pengelolaan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan	100 %	100 %	100%	Tercapai
16	ADMINISTRASI / MANAJEMEN	1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi	100 %	100 %	100%	Tercapai
		2. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100 %	100 %	100%	Tercapai
		3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100 %	100 %	100%	Tercapai



NO	JENIS LAYANAN	INDIKATOR	STANDAR MINIMAL	HASIL 2017	2018	
					REALISASI	KET
		4. Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala	100 %	100%	100%	Tercapai
		5. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun	≥ 60%	45%	21.34%	Belum tercapai
		6. <i>Cost recovery</i>	≥ 40%	56.80%	67.78%	Tercapai
		7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	100%	Tercapai
		8. Kecepatan waktu pemberian informasi	≤ 2 jam	-	-	Data tidak tersedia
		9. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100 %	100 %	100%	Tercapai
17	UNIT AMBULANCE	1. Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah	24 jam	24 jam	24 jam	Tercapai
		2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/mobil jenazah di RS	100%	100%	100%	Tercapai
		3. Respon time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan (sesuai kebutuhan berlaku)	≤ 45 menit	15 menit	12 menit	Tercapai
18	UNIT PEMULASARAAN JENAZAH	1. Waktu tanggap (respons time) pelayanan pemulasaran jenazah	≤ 2 jam	10.08 menit	12 menit	Tercapai
19	INSTALASI PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT	1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≥ 80 %	71.58 %	89.49%	Tercapai
		2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100 % (Alkes)	44,06 %	90,84 %	Belum Tercapai
			100 % (Non Alkes)	80,06 %	71,03 %	
		3. Peralatan laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100 %	100 %	98,86 %	Belum Tercapai
20	INSTALASI LAUNDRY	1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100 %	100 %	100 %	Tercapai
		2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100 %	99,50 %	100 %	Tercapai
21	KOMITE PENCEGAHAN	Ada anggota Tim Pencegahan	75 %	58,75 %	52 %	Belum Tercapai

NO	JENIS LAYANAN	INDIKATOR	STANDAR MINIMAL	HASIL 2017	2018	
					REALISASI	KET
	DAN PENGENDALIAN INFEKSI	Penanggulangan Infeksi				
		Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen	75 %	89,50 %	100 %	Tercapai
		Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI ( <i>Health Care Associated Infection</i> ) di RS (min 1 parameter)	75 %	100 %	100 %	Tercapai

### 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

RSUD Aji Muhammad Parikesit memiliki pegawai sebanyak 1203 orang, meliputi 302 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 629 orang Non Pegawai Negeri Sipil (THL), 272 orang Outsourcing.

### 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat anggaran sebesar Rp. 55.842.656.359,- dan terealisasi sebesar Rp. 48.061.148.453,- atau 88,81%.

**Tabel 3.10**

Uraian Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)  
RSUD AM Parikesit Tahun 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	
			(Rp)	%
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>37.681.255.860</b>	<b>34.346.189.638</b>	<b>91,15</b>
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	234.606.000	119.629.000	50,99
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7.872.600.000	7.174.640.000	91,13
3	Penyediaan jasa Administrasi Teknis Perkantoran	29.574.049.860	27.051.920.638	91,47
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>1.725.327.319</b>	<b>1.725.327.319</b>	<b>100</b>
4	Fasilitas Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga	1.725.327.319	1.725.327.319	100
<b>III</b>	<b>Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata</b>	<b>16.436.073.180</b>	<b>11.989.631.496</b>	<b>72,95</b>
5	Pembuatan Tarip dan Turap Keliling Rumah Sakit	2.451.165.180	48.565.000	1,98
6	Pengadaan Alat Kesehatan dan Kendaraan Khusus (DAK)	13.885.000.000	11.883.497.471	85,59
7	Dana Pendampingan DAK	99.908.000	57.569.025	57,62
<b>Jumlah</b>		<b>55.842.656.359</b>	<b>48.061.148.453</b>	<b>88,81</b>

### 5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan di RSUD Aji Muhammad Parikesit pada tahun 2018 sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif, atau sebagai peran arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai sebagai tolak ukur keberhasilan proses

pembangunan. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarah kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.

## 6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Sarana dan prasarana RSUD Aji Muhammad Parikesit saat ini, secara umum sudah sesuai standar, akan tetapi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan pelayanan yang paripurna bagi masyarakat, RSUD Aji Muhammad Parikesit selalu membenahi sarana dan prasarana yang ada serta melengkapi dengan sarana dan prasarana yang terbaru dan lebih canggih.

### 1. Bangunan dan Gedung

RSUD Aji Muhammad Parikesit memiliki luas bangunan 27.749,44 M<sup>2</sup> diatas lahan seluas 7 (tujuh) Ha yang terdiri dari 8 (delapan) gedung utama dan gedung pendukung yang penamaannya terdiri dari:

#### a. Gedung Merak

- 1) Lantai 1 : Poliklinik Rawat Jalan, Ruang Tindakan (Bedah Minor), Loker Pendaftaran, Kasir Rawat Jalan, Nurse Station, Apotek IRJA, Pojok Menyusui, Kantin, dan Fotokopi.
- 2) Lantai 2 : Poliklinik Rawat Jalan, Nurse Station, Laboratorium IRJA, Ruang KSM Paru dan KSM Kulit dan Kelamin, dan Ruang Administrasi IRJA.
- 3) Lantai 3 : Auditorium dan Instalasi Rekam Medik.

#### b. Gedung Garuda digunakan sebagai tempat administrasi perkantoran dan struktural.

#### c. Gedung Elang

- 1) Lantai 1 : UGD, depo obat UGD, Kasir UGD, Informasi, Pendaftaran UGD, Unit Admisi Rawat Inap dan Pengaduan Pelanggan, Ruang Administrasi Instalasi Rawat Darurat, Instalasi CSSD, HCU, dan Mini Market.
- 2) Lantai 2 : Maternitas, KSM Obgyn, KSM Anak, KSM THT, KSM Mata, Perinatologi, Rawat Gabung, PICU NICU, Ruang Bayi, dan Ruang Dokter IRNA.
- 3) Lantai 3 : Instalasi Bedah Sentral, Administrasi IRIN, Ruang Rapat Medik, KSM Anestesi, KSM Bedah, ICU ICCU, KSM Penyakit Dalam.

#### d. Gedung Rajawali

- 1) Lantai 1 : Kasir Rawat Inap, Ruang Administrasi Rawat Inap, Radiologi
- 2) Lantai 2 : Casemix, Laboratorium
- 3) Lantai 3 : Apotek Rawat Inap, Endoskopi, Hemodialisa.

#### e. Gedung Punai

- 1) Lantai 1 : Instalasi Rehabilitasi Medik, General Check Up, Parikesit Mother Care
- 2) Lantai 2 : Ruang Perawatan Kelas Utama, Ruang Kelas 1 dan 2, dan Komite Keperawatan
- 3) Lantai 3 : Ruang Perawatan Kelas 3, Ruang Perawatan Anak kelas 1, 2 dan 3

#### f. Gedung Enggang

- 1) Lantai 1 : VVIP dan VIP.
  - 2) Lantai 2 : Ruang Administrasi Instalasi Rawat Inap, Kelas I dan Kelas 2
  - 3) Lantai 3 : Kelas 2 dan kelas 3.
- g. Gedung H yang terdiri dari Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, dan Gudang Umum Rumah Tangga.
- h. Gedung I yang terdiri dari Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, Unit Kesehatan Lingkungan, Genset, dan Insenerator.

## 2. Tempat Tidur

RSUD Aji Muhammad Parikesit memiliki kapasitas tempat tidur sebanyak 373 tempat tidur (TT) yang tersebar di 19 (sembilan belas) jenis perawatan.

## 7. Permasalahan dan Solusi

### 1. Permasalahan

- ✓ Adanya program dan kegiatan APBD yang tidak bisa dilaksanakan, hal ini dikarenakan akibat defisit anggaran yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- ✓ Masih adanya beberapa indikator SPM yang belum tercapai.
- ✓ Pengembangan SIM RS tidak bisa dilakukan serentak, hal ini disebabkan kompleksnya satuan kerja yang terkait dalam sistem.
- ✓ Kualitas gedung dan sarana penunjang yang kurang baik sehingga memerlukan biaya pemeliharaan yang besar.

### 2. Solusi

- ✓ Peninjauan kembali besar target pencapaian dengan kondisi yang dilaksanakan.
- ✓ Pengembangan SIM RS secara bertahap.
- ✓ Diupayakan untuk menjadwalkan pemeliharaan secara rutin agar kualitas gedung dan sarana penunjang tidak sempat rusak parah sehingga tidak memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi, dan untuk pembangunan selanjutnya agar melibatkan konsultan konstruksi yang merencanakan dan mengawasi pembangunan gedung tersebut.

## 8. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

### 1. Pelayanan Unggulan

Pelayanan unggulan yang ada di RSUD Aji Muhammad Parikesit antara lain :

- a) Pelayanan Parikesit Mother Care
- b) Pelayanan Hemodialisa
- c) Pelayanan One Stop Service
- d) Pelayanan Pengaduan Pelanggan
- e) Wisma Transit
- f) Pelayanan Laundry

### 2. Prestasi

- a) Lulus Akreditasi Paripurna versi KARS 2012
- b) Meraih Peghargaan Pelayanan Publik terbaik dengan predikat "Pelayanan

- Prima" dari 72 RSUD Kota/Kabupaten se-Indonesia.
- c) Meraih Penghargaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 2 tahun berturut-turut dari KPK dan Omsbudman RI.
  - d) Stand Terbaik Pertama Kategori Pelayanan Publik dalam EXPO ERAU 2018.
  - e) Juara Pertama kategori Gunung Emas dalam Kaizen Festival Nasional yang diselenggarakan di Bali Tahun 2018.
  - f) Meraih Penghargaan Champion of WOW Public Service Excellence Award dari MarkPlus.Inc

## RSUD ABADI SAMBOJA

### 1. Program dan Kegiatan

RSUD ABADI Samboja pada tahun 2018 melaksanakan 9 (sembilan) program dengan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan, yang capaiannya tertuang dalam laporan monitoring dan evaluasi (e-Monev) sebagaimana pada lampiran I.

RSUD ABADI Samboja dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut telah menetapkan beberapa indikator kinerja, baik kinerja keuangan maupun kinerja pelayanan, Adapun capaian kinerja yang terdapat dalam Renstra dan Rencana Strategis Bisnis RSUD ABADI Samboja tahun 2018.

Indikator Kinerja Utama yang terdapat di dalam Renstra RSUD ABADI Samboja tahun 2018, target dan realisasinya dapat di lihat sebagaimana pada tabel berikut

**Tabel 3.11**

Target dan Capaian Kinerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET DAN REALISASI		
			2018		
			T	C	%
1	Tersedianya SDM yang sesuai dengan standar	Terpenuhinya Jumlah Dokter Spesialis	15	18 Dokter Sp	120
2	Tersedianya peralatan yang sesuai standar	Terpenuhinya Alat Kesehatan sesuai standar	80%	70%	87.5
3	Meningkatnya sarana dan prasarana yang terstandarisasi	Jumlah lama hari rawat / Lengt Of Stay (LOS)	3 hari	3 hari	100
		Jumlah pemanfaatan Tempat Tidur (BOR)	70 %	56,61	80,87
4	Terwujudnya sistem organisasi dan manajemen rumah sakit berdasarkan prinsip	Pencapaian Keselamatan Pasien (Patient Safety)	100 %	100%	100

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET DAN REALISASI		
			2018		
			T	C	%
	<i>good governance</i>	Rumah Sakit Umum Daerah yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS)	Paripurna	Paripurna	100
5	Terwujudnya sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel	Rumah Sakit Umum Daerah yang melaksanakan Sistem Manajemen Mutu (ISO : 9000 : 2008)	Sertifikat ISO 9001;2015	Sertifikat ISO 9001;2015	100
6	Terwujudnya manajemen logistik yang efektif dan efisien	Ketersediaan Obat Generik	90 %	87%	96,67
7	Terwujudnya Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang terintegrasi antar unit	Cakupan Penyuluhan Kesehatan di RS (Individu dan Kelompok)	Individu 60 % kelompok 2 X seminggu	Individu 60 % kelompok 2 X seminggu	100
8	Tersajikannya produk unggulan RS sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Tingkat Kepatuhan terhadap SOP	100 %	100%	100
9	Terwujudnya pelayanan yang bermutu dan berorientasi kepada keselamatan pasien	Tingkat kepuasan Pasien	85	78,86	92,77
		Jumlah komplain	0	14	
		Kejadian Mal Praktek	0	0	
		Cakupan Pelayanan (Penemuan dan penanganan) HIV AIDS, TB Paru, dan Malaria	HIV AIDS = 0, TB. Paru=0, Malaria=0	HIV AIDS = 11, TB. Paru=700, Malaria=20	
		Menurunnya Angka Kematian Ibu & Angka Kematian Bayi di Rumah Sakit	< 16/10000 Kelahiran	16/10000 Kelahiran 0	

Berdasarkan Tabel di atas, ditinjau dari capaian kinerja masing-masing sasaran strategis tahun 2018, RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti secara umum telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Analisis capaian kinerja sasaran RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2018 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tersedianya SDM yang sesuai dengan standar  
Sasaran ini diukur dengan menggunakan 1(satu) Indikator Kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Terpenuhinya Jumlah Dokter Spesialis dengan target sebanyak 15 orang dokter spesialis dan Realisasi 18 orang dokter spesialis, dilaksanakan melalui usulan pengangkatan dan penempatan dokter spesialis oleh BKD Kutai Kartanegara pada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti, selain itu rekrutmen sendiri sebagai dokter tenaga harian lepas (tenaga dokter kontrak/honor). Selain pemenuhan Jumlah Dokter Spesialis dilaksanakan juga Pemenuhan Tenaga Medis, Paramedis/Keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya.
- 2) Tersedianya peralatan yang sesuai dengan standar  
Indikator Kinerja Terpenuhinya Alat Kesehatan sesuai standar sebesar 87,5 % pada tahun 2018, target tersebut dicapai melalui pengadaan Alat – alat kesehatan kedokteran Umum, Kedokteran Bedah dan Gawat Darurat dan Peralatan penunjang Medis lainnya. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan Pengadaan alat Kedokteran Umum, Kedokteran Bedah, kedokteran gigi dan Peralatan penunjang Medis lainnya yang bersumber dari BLUD, APBD Kabupaten Kutai Kartanegara dan DAK Fisik Bidang Kesehatan Sub Bidang Kesehatan Rujukan berupa alat kedokteran bedah (kamar Operasi).
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandarisasi  
Sasaran ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) Indikator Kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Jumlah lama Hari rawat/lengt of Stay (LOS) sebesar 3 hari dan Target Indikator Kinerja Jumlah pemanfaatan Tempat Tidur (BOR) sebesar 56,61% dan realisasi pada tahun 2018 telah mencapai 80,87%. Target tersebut dicapai dengan pemenuhan sarana dan Prasarana pelayanan berupa SDM yang profesional Khususnya Dokter Spesialis dan melengkapi sarana pelayanan ruang rawat Inap, Pengembangan Gedung Rumah sakit berupa pembangunan Gedung IGD, Gizi dan IPSRS.
- 4) Terwujudnya sistem Organisasi dan manajemen rumah sakit berdasarkan prinsip good governance.  
Sasaran ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) Indikator Kinerja sebagai berikut : Indikator Kinerja Pencapaian Keselamatan Pasien (Patient Safety) sebesar 100 % dan Target Indikator Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dengan tingkat capaian Akreditasi standar akreditasi Baru KARS 2012 yaitu “paripurna”. Target tersebut dicapai dengan melaksanakan Pelatihan dan mengikuti bimbingan teknis serta sosialisasi Patient safety secara terus-menerus dan melaksanakan study banding ke Rumah Sakit yang telah mendapatkan akreditasi secara penuh dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) .
- 5) Terwujudnya sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel  
Indikator Kinerja melaksanakan Sistem Manajemen Mutu (ISO : 9001 : 2015 adalah dicapainya kembali Sertifikat ISO :9001 : 2015 dari World Quality Assurance (WQA) melalui kerja keras mempertahankan mutu layanan berstandard internasional sejak Tahun 2009 hingga sekarang dimana setiap tahunnya dilaksanakan Audit Eksternal dari pihak WQA dan Hasilnya pihak RSUD Aji batara Agung Dewa Sakti dapat mempertahankan sertifikat yang telah di raih.

- 6) Terwujudnya manajemen Logistik yang efektif dan efisien  
Indikator Kinerja Ketersediaan Obat Generik sebesar 96,67 %, hal ini dapat dicapai dengan Pengadaan Obat - obatan secara terus menerus sesuai dengan tingkat ketersediaan dan kebutuhan berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan dan Formularium RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yang telah di bahas di Forum Komite Medik dengan menggunakan anggaran pendapatan fungsional Badan layanan Umum daerah (BLUD) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti.
- 7) Terwujudnya SIM yang terintegrasi antar unit  
Indikator Kinerja Cakupan Penyuluhan Kesehatan di RS (Individu dan Kelompok) sebesar Individu 60%, kelompok 2 X seminggu. Target tersebut dicapai dengan pemberian penyuluhan dan pemberian Informasi masalah kesehatan yang dilaksanakan melalui unit rawat jalan/poliklinik dan unit penunjang diantaranya Instalasi Gizi RSUD AJI Batara Agung Dewa sakti berupa pemerian informasi perorangan dan kelompok melalui lisan dan tulisan.
- 8) Tersajikannya produk unggulan RS sesuai dengan kebutuhan masyarakat  
Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan terhadap Standard Operating Procedure (SOP) sebesar 100%. Target tersebut dicapai dengan memberikan sosialisasi terhadap SOP yang baru disusun maupun direvisi selain itu dilaksanakan evaluasi dan pengawasan secara intensif pada unit – unit pemberi pelayanan langsung dan di manajemen.
- 9) Terwujudnya pelayanan yang bermutu dan berorientasi kepada keselamatan pasien  
Target Indikator Kinerja pada Tingkat Kepuasan Pasien sebesar 78,86%, Jumlah Komplain = 0, Kejadian Malpraktek = 0, Cakupan Pelayanan (Penemuan dan penanganan) HIV AIDS, TB Paru, dan Malaria HIV AIDS = 11, TB. Paru=70, Malaria=20 dan Menurunnya Angka Kematian Ibu & Angka Kematian Bayi di Rumah Sakit sebesar 0 kelahiran. Target tersebut dapat dicapai dengan pelaksanaan survei Kepuasan pelanggan secara berkala, pemberian pemahaman terhadap pelaksanaan SOP, peningkatan layanan penyakit yang berkaitan dengan program global

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Target dan Realisasi Indikator Pembangunan)

Indikator kinerja RSUD ABADI dilakukan dengan menilai tingkat kesehatan RSUD ABADI berdasarkan total skor dari penjumlahan indikator tiap aspek kinerja. Predikat tingkat kesehatan RSUD ABADI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/ PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang. Capaian Tingkat Kesehatan Capainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.12**

Tingkat kesehatan RSUD ABADI Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018

No	Uraian	Bobot	Skor
1	Kinerja Keuangan	30	22,00
2	Kinerja Pelayanan	35	19,00
3	Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat bagi Masyarakat	35	31,39
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>72,39</b>

Dari table tersebut diatas dapat dilihat Penilaian Kinerja Tingkat Kesehatan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2018 oleh Dewan Pengawas BLUD RSUD ABADI tergolong A (sehat) dengan skor tingkat kesehatan sebesar 72,39 (tujuh puluh dua



koma tiga puluh sembilan). Capaian masing-masing indikator baik keuangan maupun pelayanan dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 3.13**  
Capaian Indikator Kinerja Keuangan dan Pelayanan RSUD ABADI Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2018

No	Sub Aspek/Indikator	Target	Bobot	Hasil Perhitungan	Skor	% Capaian
A.	<b>ASPEK KEUANGAN</b>					
1.	<b>Rasio Keuangan</b>					
a.	Rasio Kas ( <i>Cash Ratio</i> )	240 sd 300	2	0,97%	0.50	25,00%
b.	Rasio Lancar ( <i>Current Ratio</i> )	>600	2,5	149,97%	0.50	20.00%
c.	Periode Penagihan Piutang ( <i>Collection Period</i> )	<30 hari	2	100	0,25	12,50%
d.	Perputaran Aset Tetap ( <i>Fixed Asset Turnover</i> )	>20	2	19.25%	1.50	75.00%
e.	Imbalan Atas Aset Tetap ( <i>Return on Fixed Asset</i> )	>6	2	14,07%	2.00	100.00%
f.	Imballan Ekutas ( <i>Return on Equity</i> )	>8	2	74,35%	2.00	100.00%
g.	Perputaran Persediaan ( <i>Inventory Turnover</i> )	30 s.d 35 hari	2	17	1.00	50.00%
h.	Rasio Pendapatan BLUD terhadap Biaya Operasional	>65	2,5	49,68%	1.75	70.00%
i.	Rasio Subsidi Biaya Pasien	10 s.d. 15	2	7,71%	1.50	75.00%
	<b>Jumlah</b>		<b>19</b>		<b>11,00</b>	<b>57,89%</b>
2.	<b>Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD</b>					
a.	Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif	31 Des	2	Ada	2.00	100.00%
b.	Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan	Ada	2	Ada	2.00	100.00%
c.	Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Layanan BLUD	Ada	2	Ada	2.00	100.00%
d.	Tarif Layanan	Ada	1	Ada	1.00	100.00%
e.	Sistem Akuntansi	Ada	1	Ada	1.00	100.00%
f.	Persetujuan Rekening	Ada	0,5	Ada	0.50	100.00%
g.	SOP Pengelolaan Kas	Ada	0,5	Ada	0.50	100.00%
h.	SOP Pengelolaan Piutang	Ada	0,5	Ada	0.50	100.00%
i.	SOP Pengelolaan Utang	Ada	0,5	Ada	0,50	100,0%
j.	SOP Pengadaan Barang dan Jasa	Ada	0,5	Ada	0,50	100,0%
k.	SOP Pengelolaan Barang Inventaris	Ada	0,5	Ada	0,50	100,0%
	<b>Jumlah</b>		<b>11</b>		<b>11.00</b>	<b>100.00%</b>
	JUMLAH SKOR ASPEK KEUANGAN (1+2)		<b>30</b>		<b>22.00</b>	<b>73.33%</b>
B	<b>ASPEK LAYANAN</b>					
1	<b>Layanan</b>					
a.	<b>Pertumbuhan Produktivitas</b>					
	1) Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan	>1,10	3	0.98	2,00	66,67%
	2) Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat	>1,10	2,5	1,01	2,00	80.00%

No	Sub Aspek/Indikator	Target	Bobot	Hasil Perhitungan	Skor	% Capaian
	3) Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap	>1,10	2,5	0.90	1,00	40.00%
	4) Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi	>1,10	2,5	0.87	0.50	60.00%
	5) Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium	>1,10	2,5	1.05	2,00	60.00%
	6) Pertumbuhan Operasi	>1,10	2,5	0.91	1.00	0.00%
	7) Pertumbuhan Rehabilitasi Medik	>1,10	2,5	0.43	0.00	40.00%
	<b>Jumlah</b>		<b>18</b>		<b>8.50</b>	<b>47.22%</b>
<b>b.</b>	<b>Efektivitas Pelayanan</b>					
	1) Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan	>80	2	2,01%	0.00	0.00%
	2) Pengembalian Rekam Medik	>80	2	12,70%	2.00	100.00%
	3) Angka Pembatalan Operasi	<1	2	0.00	2.00	100.00%
	4) Angka Kegagalan Hasil Radiologi	<1	2	4,50%	0,50	100.00%
	5) Penulisan Resep Sesuai Formularium	>90	2	99,51%	2.00	100.00%
	6) Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium	<1	2	0.000077	2.00	100.00%
	7) <i>Bed Occupancy Rate</i> (BOR)	70 s.d. 80	2	56,61%	1.00	50.00%
	<b>Jumlah</b>		<b>14</b>		<b>7.50</b>	<b>53,57%</b>
<b>c.</b>	<b>Pertumbuhan Pembelajaran</b>					
	1) Rata-rata Jam Pelatihan/Karyawan	>0,80	1,5	0,90	1.50	100.00%
	2) Program <i>Reward and Punishment</i>	Ada, dilaksanakan	1,5	Ada, dilaksanakan	1.50	100.00%
	<b>Jumlah</b>		<b>3</b>		<b>3.00</b>	100.00%
	<b>JUMLAH SKOR LAYANAN (a+b+c)</b>		<b>35</b>		<b>19.00</b>	<b>54,29%</b>
2	<b>Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat</b>					
<b>a.</b>	<b>Mutu Pelayanan</b>					
	1) <i>Emergency Response Time Rate</i>	<8 menit	2	3 Menit	2.00	100.00%
	2) Waktu Tunggu Rawat Jalan	<30 menit	2	120 menit	0.50	25.00%
	3) <i>Length of Stay</i>	6 s.d 9	2	3	2.00	100.00%
	4) Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi	< 30 menit	2	7,5 menit	2,00	100.00%
	5) Waktu Tunggu Sebelum Operasi	< 2 hari	2	1 hari	2.00	100.00%
	6) Waktu Tunggu Hasil Laboratorium	< 2 jam	2	2 Jam	2.00	100.00%
	7) Waktu Tunggu Hasil Radiologi	< 3 jam	2	1 Jam	2.00	100.00%
	<b>Jumlah</b>		<b>14</b>		<b>12.50</b>	<b>89.29%</b>
<b>b.</b>	<b>Mutu Klinik</b>					
	1) Angka Kematian di Gawat Darurat	< 2,5	2	0.17%	2.00	100.00%
	2) Angka Kematian/Kebutaan >48 Jam	<25	2	0.68%	2.00	100.00%
	3) <i>Pos Operating Death Rate</i>	<2	2	0%	2.00	100.00%
	4) Angka Infeksi Nosokomial	<1,5	4	0%-60%	3.50	93.75%

No	Sub Aspek/Indikator	Target	Bobot	Hasil Perhitungan	Skor	% Capaian
	5) Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit	<1	2	0.00%	2.00	100.00%
	<b>Jumlah</b>		<b>12</b>		<b>11.50</b>	<b>95.83%</b>
c.	<b>Kepedulian Kepada Masyarakat</b>					
	1) Pembinaan Kepada Puskesmas dan Saranan Kesehatan Lain	Ada, dilaksanakan	1	Ada program dilaksanakan semua	1.00	100.00%
	2) Penyuluhan Kesehatan	Ada, dilaksanakan	1	Ada program, dilaksanakan semua	1.00	100.00%
	3) Rasio Tempat Tidur Kelas III	>30	2	65.57%	2.00	100.00%
	<b>Jumlah</b>		<b>4</b>		<b>4.00</b>	<b>100.00%</b>
d.	<b>Kepuasan Pelanggan</b>					
	1) Penangan Pengaduan/Komplain	>70	1	100.00%	1.00	100.00%
	2) Kepuasan Pelanggan	Proposional	1	78,89%	0.79	82.00%
	<b>Jumlah</b>		<b>2</b>		<b>1.79</b>	<b>89,50%</b>
e.	Kepedulian Terhadap Lingkungan					
	1) Kenersihan Lingkungan (Program RS Bersih)	>7500	2	41-79,99	1.00	50.00%
	2) Proper Lingkungan	Kuning	1	Biru	0.60	60.00%
	<b>Jumlah</b>		<b>3</b>		<b>1.60</b>	<b>53.33%</b>
	JUMLAH SKOR MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT (a+b+c+d+e)		<b>35</b>		<b>31.39</b>	<b>89.69%</b>
	JUMLAH SKOR ASEPEK PELAYANAN (1+2)		<b>70</b>		<b>50.39</b>	<b>71.99%</b>
			<b>100</b>		<b>72.39</b>	<b>72.39%</b>

Dari tabel tersebut diatas maka dapat dijelaskan secara umum capaian skor rasio keuangan secara keseluruhan indicator belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 11.00 dari bobot 19, atau mencapai sebesar 57,89%. Indicator yang belum mencapai skor maksimal adalah rasio kas, rasio lancar, periode penagihan piutang, perputaran asset tetap, perputaran persediaan, rasio pendapatan BLUD terhadap biaya Operasional dan Rasio Subsidi Biaya Pasien.

Capaian skor aspek kepatuhan pengelolaan keuangan BLUD RSUD secara keseluruhan indicator sudah optimal yaitu 11 dari bobot 11 atau mencapai sebesar 100%. Capaian yang masih belum menunjukkan hasil belum optimal agar menjadi agenda penting pejabat pengelola BLUD untuk melakukan upaya evaluasi dan rencana tindak lanjut pada periode yang akan datang.

Capaian Aspek pelayanan dari sub aspek pertumbuhan produktifitas, secara keseluruhan 7 (tujuh) indicator yang ditetapkan yaitu Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan, Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat, Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap, pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi, Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium, Pertumbuhan Operasi, Pertumbuhan Rehabilitasi Medik belum optimal yaitu 8.50 dari bobot 18, atau hanya mencapai sebesar 47.22%, aspek efektifitas pelayanan sebagian besar belum optimal yaitu 7.50 dari bobot 14, atau mencapai sebesar 53,57%. Indicator yang belum mencapai skor maksimal adalah Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan,

pengembalian rekam medic, Angka Kegagalan Hasil Radiologi dan Bed Occupancy Rate (BOR), sedangkan Aspek Pertumbuhan dan pembelajaran dari 2 (dua) indikator sudah mencapai target yaitu 3 dari bobot 3 atau 100%. Capaian yang masih belum menunjukkan hasil yang optimal agar menjadi perhatian yang serius bagi pejabat pengelola BLUD atau manajemen RSUD ABADI untuk melakukan langkah-langkah evaluasi dalam mendorong peningkatan kinerja pelayanan atau menjaga kestabilannya.

Selain aspek pelayanan, kinerja pelayanan juga dievaluasi berdasarkan aspek kinerja mutu layanan dan manfaat bagi masyarakat. Secara umum indikator mutu layanan dan manfaat bagi masyarakat pada tahun 2018 mencapai nilai 31.39 dari bobot 35 yang ditetapkan atau mencapai 89.69 %. Indikator yang belum mencapai target adalah waktu tunggu rawat jalan baru mencapai 25% dari target, Kebersihan Lingkungan (Program RS Bersih) baru mencapai 50% dari target, proper lingkungan baru mencapai 60% dan kepuasan pelanggan baru mencapai 79%. Keempat indikator tersebut perlu mendapat perhatian dengan menjaganya tidak semakin menurun bahkan diupayakan mendorong peningkatannya. RS dalam hal kinerja dari sub aspek manfaat bagi masyarakat telah mengimplementasikan pula rumah singgah bagi pasien yang membutuhkan waktu tunggu sedangkan tempat tinggal atau domisili pasien jauh dari RS. Hal ini tentu akan mendorong peningkatan kepuasan pelanggan atas pelayanan RS.

Target dan realisasi Standar Pelayanan Minimal RSUD ABADI Samboja berdasarkan peraturan Bupati nomor 20 tahun 2018 telah ditetapkan 22 jenis pelayanan yang wajib disediakan oleh rumah sakit beserta indikator mutu dan standarnya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi data dapat disimpulkan bahwa RSUD ABADI Samboja telah melaksanakan 22 pelayanan yang terdiri atas 240 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dari 240 indikator SPM yang dievaluasi, 184 indikator telah memenuhi standar atau 77%, 56 indikator belum memenuhi standar. Tingkat pencapaian mutu pelayanan RSUD ABADI tahun 2018 terhadap standar.

### 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

RSUD ABADI Samboja memiliki pegawai sebanyak 393 orang yang terdiri dari tenaga PNS sebanyak 88 orang dan THL 305 orang, adapun rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 3.14**

Jumlah pegawai RSUD ABADI Samboja berdasarkan Jenis Tenaga, kualifikasi Pendidikan, dan jabatan, tahun 2018

NO.	JENIS TENAGA	PNS			THL	BLUD	JUMLAH
		Struktural	Non Struktural	Fungsional			
1	Dokter						
	Spesialis	2	0	12	1	0	15
	S2	0	0	1	0	0	1
	Umum	2	0	2	11	0	15
	Sekolah	0	0	4	0	0	4
2	Dokter Gigi						
	Gigi Spesialis	1	0	2	0	0	3
	S2	1	0	0	0	0	1

NO.	JENIS TENAGA	PNS			THL	BLUD	JUMLAH
		Struktural	Non Struktural	Fungsional			
	Umum	0	0	0	0	0	0
	Sekolah	0	0	1	0	0	1
<b>2</b>	Apoteker	0	0	2	5	0	7
<b>3</b>	Sarjana Kesehatan Masyarakat						
	S2 (Magister)	1	0	0	0	0	1
	S1 Kesmas	3	2	0	3	0	8
<b>4</b>	Paramedis Perawat						
	Profesi Keperawatan (Ners)	0	2	2	17	0	21
	Sarjana Keperawatan	0	0	0	1	0	1
	D IV Anestesi	1	0	0	0	0	1
	D IV Kebidanan	0	0	3	0	0	3
	D III Keperawatan	1	3	9	106	0	119
	D III Kebidanan	0	0	7	26	0	33
	D III Keperawatan Gigi	0	0	1	2	0	3
	D III Anestesi	0	0	0	0	0	0
	SPR/SPK	0	1	0	1	0	2
	Perawat (Pend. S1)	0	0	1	0	0	1
<b>5</b>	Paramedis Non Perawat						
	S1 Farmasi	0	0	0	2	0	2
	D III Farmasi	0	0	1	6	0	7
	SMF	0	0	1	1	0	2
	D IV Analisis Kesehatan	0	0	1	0	0	1
	D III Analisis Kesehatan	0	0	2	10	0	12
	SMAK	0	0	0	0	0	0
	S1 Gizi	0	0	1	2	0	3
	D III Gizi	0	0	1	0	0	1
	D III Fisioterapi	0	0	1	1	0	2
	D III Rekam Medik	0	0	0	1	0	1
	S1 Psikologi	0	0	0	0	0	0
	D III Kesehatan Lingkungan (AKL)	0	0	0	2	0	2
	S1 Fisikawan Medik	0	0	0	0	0	0
	D III Radiologi (ATRO/APRO)	0	1	1	4	0	6
	D III Teknik Elektro Medik (ATEM)	0	0	0	0	0	0
	APK	0	0	0	0	0	0
	Lain-lain / D I / D II	0	0	0	0	0	0
	SMAK (Pend. D3)	0	0	1	0	0	1
<b>6</b>	Tenaga Non Medis						
	S2 (Magister)	2	0	0	0	0	2
	S1 (Sarjana)	0	5	0	35	0	40
	D III (Sarjana Muda)	0	2	0	5	0	7
	SPPH	0	0	0	0	0	0
	SMA	0	1	0	52	2	55
	SMP	0	0	0	2	1	3
	SD	0	0	0	2	0	2
	Lain-lain / D I / D II	0	0	0	4	0	4
<b>JUMLAH TOTAL PEGAWAI</b>		<b>14</b>	<b>17</b>	<b>57</b>	<b>302</b>	<b>3</b>	<b>393</b>

NO.	JENIS TENAGA	PNS			THL	BLUD	JUMLAH
		Struktural	Non Struktural	Fungsional			
		88					

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa jumlah PNS RSUD ABADI Samboja sebanyak 88 Pegawai dan tenaga harian lepas (THL) sebanyak 305 pegawai, dari jumlah PNS yang ada yang menduduki jabatan struktural sebanyak 14 pegawai, non struktural sebanyak 17 pegawai, dan fungsional sebanyak 57 pegawai.

#### 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

RSUD ABADI Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan program dan kegiatan mendapat anggaran dari APBD Kutai Kartanegara sebesar Rp. 48.125.620.986,84,- terealisasi sebesar Rp. 46.239.740.213,00 atau 96.08% dan dari pendapatan fungsional RSUD ABADI Samboja sebesar Rp. 32.573.105.595,00 terealisasi sebesar Rp. 27.323.148.270,00 atau 84,00%. Jadi Alokasi anggaran RSUD ABADI Samboja tahun 2018 sebesar Rp. 80.698.726.581,84 terealisasi sebesar Rp. 73.562.888.491,00 atau 91,16.

#### 5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atau disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berupa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD ABADI Samboja tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.15**

Pelaksanaan program RKPD kedalam APBD RSUD ABADI Samboja Tahun 2018

No	RKPD	APBD	Sesuai	Selisih
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	-
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√	-
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	√	-
5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	√	-
6	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	√	-
7	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah	√	-

No	RKPD	APBD	Sesuai	Selisih
	sakit paru-paru/ rumah sakit mata	sakit paru-paru/ rumah sakit mata		
8	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	√	-
9	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		-	1
10	Program Peningkatan Pelayanan Medis, Paramedis dan Non Medis	Peningkatan Mutu pelayanan kesehatan BLUD	√	-

Dari tabel tersebut diatas bahwa tidak ada kesesuaian antara RKPD dengan APBD, yang mana jumlah rencana program dalam RKPD pada tahun 2018 sebanyak 10 (sepuluh) program, telah dilaksanakan 9 (sembilan) program atau 90% oleh RSUD ABADI Samboja dalam program APBD, ada 1 (satu) program yang tidak masuk dalam program APBD adalah Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

Jumlah pelaksanaan kegiatan RSUD ABADI Samboja dalam RKPD sebagaimana terdapat dalam peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 29 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018 sebanyak 100 (Seratus) kegiatan, namun jumlah pelaksanaan kegiatan dalam APBD sebanyak 33 (dua puluh dua) kegiatan, kesesuaian pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Daerah dengan pelaksanaan kegiatan APBD RSUD ABADI Samboja hanya 33 (dua puluh dua) kegiatan dari 100 (seratus) kegiatan dalam RKPD, sehingga terjadi selisih ketidaksesuaian sebanyak 67 (enam puluh tujuh) kegiatan.

#### 6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Dalam menjalankan tugasnya tersebut RSUD ABADI didukung dengan sarana dan prasarana antara lain lahan yang dimiliki RSUD ABADI adalah 100.000 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 7.200 m<sup>2</sup>, fasilitas air PDAM/Sumur bor, fasilitas listrik PLN 435 KVA, Generator 2x435 KVA (2 unit), pengolahan limbah padat dan limbah cair masing-masing 2 unit. Jumlah tempat tidur terpasang sebanyak 82 tempat tidur dengan persentase sebagai berikut:

**Tabel 3.16**

Persentase Jumlah Tempat Tidur Terpasang Menurut Jenis RSUD ABADI Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018

NO	JENIS KAMAR	JUMLAH	%
1	VIP	8	9,76
2	Kelas I	8	9,76
3	Kelas II dan Kebidanan	23	28,05
4	Kelas III	37	45,12
5	Isolasi	1	1,22

NO	JENIS KAMAR	JUMLAH	%
6	Intensif	5	6,10
<b>Total</b>		<b>82</b>	<b>100,00</b>

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa Persentase tempat tidur RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tertinggi adalah kelas III sebanyak 45,12% hal ini sudah memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 56 tahun 2015 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit sebagaimana terdapat pada lampiran peraturan tersebut jumlah TT perawatan kelas III (RS Pemerintah) sebanyak 30% dari jumlah TT.

Peralatan-peralatan kedokteran dan sarana penunjang lainnya masih banyak yang harus ditingkatkan jika dibandingkan dengan standar Rumah Sakit Kelas C, pada tahun 2012 telah dilaksanakan pengadaan alat-alat kedokteran bedah, kebidanan, ICU, Laboratorium, laundry dan lain-lain yang meliputi pengadaan alat kesehatan laparaskopi, USG 3 Dimensi, alat laboratorium dan peralatan laundry (mesin cuci laundry dan pengering) begitu juga tahun-tahun berikutnya telah dilaksanakan pengadaan alat-alat kedokteran umum. pada tahun 2016 telah dilaksanakan pembangunan gedung rawat inap, Kamar Operasi Sentral dan pengadaan alat-alat kedokteran Radiologi, Kamar Operasi, Gawat Darurat, Gigi dan fisioterapi, dan pada tahun 2018 telah dilaksanakan pengembangan gedung rawat inap tahap I dan pengadaan alat kedokteran bedah. dan pada tahun 2018 juga telah diadakan peralatan kedokteran bedah, peralatan kedokteran gigi dan peralatan kedokteran lainnya serta pembangunan gedung IGD, GIZI dan IPSRS yang dibiayai dari dana DAK dan pendapatan fungsional RSUD ABADI (BLUD)

## 7. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan di RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja

### 1) Permasalahan umum :

Permasalahan umum yang berimplikasi terhadap program dan kegiatan Pelayanan Kesehatan antara lain :

- a) Perubahan RKA / DPA sehingga berpengaruh terhadap realisasi kegiatan serta penyerapan anggaran.
- b) Adanya Rasionalisasi Anggaran

### 2) Permasalahan teknis :

Dalam upaya peningkatan pelayanan Kesehatan masih terhambat adanya permasalahan yang bersifat teknis baik yang berifat internal maupun eksternal antara lain :

- a) Masih adanya proses realisasi anggaran yang selalu di akhir tahun disebabkan oleh adanya anggaran perubahan yang sangat besar.
- b) Penerbitan SPD yang selalu terlambat dari yang direncanakan sehingga proses pencairan menumpuk di akhir tahun anggaran.
- c) Beralihnya sistem jaminan kesehatan dari Jamkesda ke BPJS yang memengaruhi pendapatan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti.

### Solusi

Agar kegiatan Pelayanan Kesehatan pada RSUD ABADI Samboja tetap berjalan dengan baik dan sesuai harapan, tentunya perlu adanya penanganan dan tindakan yang konkrit baik bersifat umum maupun teknis dalam upaya mengatasi



permasalahan tersebut diatas antara SKPD RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti mengambil beberapa langkah-langkah :

- 1) Menyusun Rencana Kerja Anggaran berbasis kinerja organisasi.
- 2) Menetapkan output dan realisasi anggaran yang terukur dan terkendali.
- 3) Menyusun anggaran kas sesuai kebutuhan riil dilapangan.
- 4) Menjaga akuntabilitas dan profesionalisme aparatur.
- 5) Sesegera mungkin mengambil sikap atas kejadian-kejadian yang berpotensi menghambat realisasi belanja dan pendapatan.

## RSUD DAYAKU RAJA KOTA BANGUN

### 1. Program dan Kegiatan

**Tabel 3.17**  
Realisasi Anggaran RSUD Dayaku Raja Tahun 2018

No	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	TARGET KINERJA		REALISASI	
				(Rp)	%
1	2	3		4	5
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>75 %</b>		<b>21.468.810.328,-</b>	<b>91,82</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	4	Rekening	340.578.148,-	97,31
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional	12	Unit	15.420.900,-	90,71
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	23	Orang	149.350.000,-	99,57
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12	Gedung	1.974.485,675,-	99,66
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	64	Jenis	296.447.500,-	98,83
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	10.000	Kotak	162.325.000,-	54,11
7	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	1	Paket	16.653.113.279,-	91,12
8	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	1, 19200,150	Ls,Lembar,Buku	348,105.560,-	99,46
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah dan keluar daerah	3	Paket	161.744.501,-	76,77
10	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban	12	Gedung	1.291.185.675,-	99,97 99,54
11	Fasilitasi Kehumasan Rumah Sakit	3	Jenis	76.024.000,-	50,68
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>			<b>901.541.000,-</b>	<b>51,05</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/oprasional	14	Unit	499.545.000,-	88,24
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	12	Gedung	401.996.000,-	33,50

No	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	TARGET KINERJA		REALISASI	
				(Rp)	%
1	2	3		4	5
III	<b>Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			<b>3.010.864.091</b>	<b>80,29</b>
1	Pelatihan Fungsional Disetiap Unit	200	Orang	243.316.875,-	54,07
2	Pelatihan Managerial dan softskill disetiap unit	200	Orang	286.524.861,-	63,67
3	Kerjasama Penempatan Dokter Spesialis/Residen	7	Dokter	2.481.022.355,-	87,05
IV	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			<b>739.036.939,-</b>	<b>75,57</b>
1	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga			739.036.939,-	75,57
V	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>			<b>4.850.808.550,-</b>	<b>69,30</b>
1	Pengadaan Obat (obat- obatan dan BHP Medis)	1	Paket	4.850.808.550,-	69,30
VI	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>			<b>279.250.000,-</b>	<b>69,81</b>
1	Pelayanan Rujukan Pasien	1	Paket	279.250.000,-	69,81
VII	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>			<b>748.823.475,-</b>	<b>93,60</b>
1	Pemeriksaan Kualitas Lingkungan	1	Baku Mutu	59.242.600,-	59,24
2	Pemusnahan Limbah B3	15186	Kg	689.580.875,-	98,51
VIII	<b>Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata</b>			<b>9.707.341.069,-</b>	<b>90,21</b>
1	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	1	Paket	96.835.800,-	96,84
2	Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit	2	Paket	1.989.401.675,-	99,75
3	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK 2018)	4	Paket	3.670.528.212,-	75,41

No	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	TARGET KINERJA		REALISASI	
				(Rp)	%
1	2	3		4	5
4	Pengadaan Darah	1	Paket	365.016.331,-	73,00
5	Dana Pendampingan DAK 2018	16	Orang	173.346.651,-	57,78
6	Rehabilitasi Ringan/ Sedang Gudang TPS Limbah B3 Rumah Sakit	1	Bangunan	194.431.700,-	97,22
7.	Rehabilitasi Ringan/ Sedang Ruang Daput Rumah Sakit	1	Bangunan	98.708.100,-	98,71
8.	Pemeliharaan Peralatan	1	Paket	2.711.775.100,-	90,39
9.	Perencanaan Pembangunan Sarana Penunjang	1	Paket	407.297.500,-	95,83
IX	<b>Program Pemeliharaan Sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata</b>			<b>1.424.019.215,-</b>	<b>89,40</b>
1	Pemeliharaan Sarana	9	Paket	727.731.000,-	94,67
2	Pemeliharaan Prasarana			696.288.215,-	84,50
<b>J U M L A H</b>				<b>43.130.494.667,-</b>	<b>85,53</b>

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

### 1. Pelayanan Gawat Darurat

Ada 8 indikator mutu pelayanan gawat darurat dengan pencapaian 7 indikator 87,50%, indikator yang tidak tercapai adalah kematian pasien < 24 jam, permasalahannya pasien yang datang sudah dalam keadaan kritis.

### 2. Pelayanan Rawat Jalan

Ada 10 indikator mutu pelayanan rawat jalan dengan pencapaian 9 indikator 85,71%, indikator yang tidak tercapai adalah dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis masih ada yang digantikan oleh dokter umum, dikarenakan ada poliklinik hanya memiliki 1 orang dokter residen, apabila ada pergantian akan digantikan oleh dokter umum.

### 3. Pelayanan Rawat Inap

Ada 14 indikator mutu pelayanan rawat inap dengan pencapaian 13 indikator 91,76%, indikator yang tidak tercapai adalah kejadian pulang paksa, pasien merasa sehat/sembuh, memilih pengobatan yang lebih dekat dari rumah, karena tidak ada penunggu, tidak mau dilakukan tindakan/operasi.

### 4. Pelayanan Bedah Sentral

Ada 11 indikator mutu pelayanan rawat bedah sentral dengan pencapaian 10 indikator 85,71%, indikator yang tidak tercapai adalah waktu tunggu operasi

- elektif, dikarenakan jumlah kamar operasi yang kurang.
5. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi  
Ada 10 indikator mutu pelayanan persalinan dan perinatologi dengan pencapaian 9 indikator 87,50%, indikator yang tidak tercapai adalah pertolongan persalinan melalui section caesaria, tinggi diakibatkan karna RSUD Dayaku Raja Kota Bangun sebagai rumah sakit rujukan terdekat dari hulu mahakam, pasien yang datang dengan kondisi yang sudah jelek, sehingga perlu dilakukan operasi.
  6. Pelayanan Intensif  
Ada 7 indikator mutu pelayanan intensif dengan pencapaian 6 indikator 80 %, indikator yang tidak tercapai adalah pemberi pelayanan unit intensif untuk dokter sudah sesuai namun untuk perawat masih ada perawat dengan pendidikan DIII tanpa sertifikat ICU, karna berbenturan dengan peraturan perawat dengan status honor tidak biasa dikirim untuk mengikuti pelatihan.
  7. Pelayanan Radiologi  
Ada 7 indikator mutu pelayanan radiologi dengan pencapaian 7 indikator 100%, seluruh indikator terpenuhi.
  8. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik  
Ada 10 indikator mutu pelayanan laboratorium patologi klinik dengan pencapaian 10 indikator 100%, seluruh indikator terpenuhi.
  9. Pelayanan Rehabilitasi Medik  
Ada 5 indikator mutu pelayanan rehabilitasi medik dengan pencapaian 5 indikator 100%, seluruh indikator terpenuhi.
  10. Pelayanan Farmasi  
Ada 7 indikator mutu pelayanan farmasi dengan pencapaian 7 indikator 100%, seluruh indikator terpenuhi.
  11. Pelayanan Gizi  
Ada 6 indikator mutu pelayanan gizi dengan pencapaian 6 indikator 100%.
  12. Pelayanan Tranfusi Darah  
Ada 5 indikator mutu pelayanan tranfusi darah dengan pencapaian 4 indikator 80%, indikator yang tidak tercapai adalah kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi, dikarenakan stok bank darah yang masih terbatas di PMI, sehingga pemberian trasfusi diberikan 2 kantong sehari.
  13. Pelayanan Masyarakat Miskin  
Ada 5 indikator mutu pelayanan masyarakat miskin dengan pencapaian 5 indikator 100%.
  14. Pelayanan Rekam Medik  
Ada 6 indikator mutu pelayanan rekam medik dengan pencapaian 5 indikator 80,5%, indikator yang tidak tercapai adalah kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan.
  15. Pelayanan Pengelolaan Limbah  
Ada 5 indikator mutu pelayanan pengelolaan limbah dengan pencapaian 5 indikator 100%.
  16. Pelayanan Aministrasi dan Manajemen  
Ada 16 indikator mutu pelayanan aministrasi dan manajemen dengan pencapaian 1 indikator 88,89%, indikator yang tidak tercapai adalah karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun, dengan target >60%

dikarenakan keterbatasan anggaran.

17. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah

Ada 7 indikator mutu pelayanan ambulans dan kereta jenazah dengan pencapaian 7 indikator 100%.

18. Pelayanan Pemulasan Jenazah

Ada 7 indikator mutu pelayanan pemulasan jenazah dengan pencapaian 7 indikator 100%.

19. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

Ada 6 indikator mutu pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit dengan pencapaian 4 indikator 66,67%, kecepatan menanggapi kerusakan, dikarenakan menunggu suku cadang alat khusus untuk alat-alat medis.

20. Pelayanan Laundry

Ada 7 indikator mutu pelayanan laundry dengan pencapaian 6 indikator 85%, indikator yang tidak tercapai adalah ketepatan pemberian linen untuk ruang rawat inap, dikarenakan sarana pengelolaan linen yang masih terbatas dan jumlah linen yang kurang.

21. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

Ada 6 indikator mutu pelayanan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) dengan pencapaian 6 indikator 100%.

**3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

RSUD Dayaku Raja Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki pegawai sebanyak 367 orang, meliputi 24 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 343 orang Non Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Harian Lepas).

**4. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Pada tahun 2018 Total Anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara ( APBD ) Rp. 60.403.404.765.95 yang meliputi anggaran Biaya Tidak Langsung, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal, dengan realisasi atau serapan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

- a) Belanja Tak Langsung Rp. 3.247.137.223,73,-
- b) Belanja Langsung Rp. 51.451.115.513,00-

**5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Untuk menciptakan masyarakat Kutai Kartanegara sehat sejahtera secara berkeadilan akan di arahkan pada 3 fokus strategi :

- 1) Pengembangan beberapa pusat meliputi infeksi, alergi, kanker dan luka bakar termasuk pembangunan private wing.
- 2) Pengembangan pelayanan kesehatan paripurna professional berstandar internasional meliputi upaya pelayanan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif termasuk didalamnya penguatan manajemen dan pengembangan mutu berkelanjutan.
- 3) Memperluas jejaring dan kolaborasi dengan perguruan tinggi, insustri/swasta, masyarakat serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya.

## 6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Sarana dan prasarana RSUD Dayaku Raja saat ini, secara umum sudah sesuai standar, akan tetapi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan pelayanan yang prima bagi konsumen maka RSUD Dayaku Raja Kota Bangun mengadakan pembangunan gedung, membenahi sarana dan prasarana yang ada, serta melengkapinya dengan sarana dan prasarana yang lebih canggih.

## 7. Permasalahan dan Solusi

Dengan jumlah pasien semakin banyak seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, hal ini menyebabkan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas juga semakin besar. Selain itu beberapa program dan kegiatan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang telah direncanakan, ternyata banyak menemui kendala dan hambatan serta permasalahan yang dihadapi oleh RSUD Dayaku Raja Kota Bangun.

Berdasarkan kesepakatan Manajemen RSUD Dayaku Raja Kota Bangun menetapkan fokus pada 4 area perubahan yaitu :

1. Area Perubahan Sumber Daya Manusia
2. Area Perubahan Akuntabilitas
3. Area Perubahan Pengawasan
4. Area Perubahan Pelayanan

Adapun permasalahan yang timbul pada area perubahan Sumber Daya Manusia Aparatur adalah :

- a) Pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN sebagai salah satu faktor yang menjadi pilar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
- b) Pengangkatan Pejabat Struktural belum mengacu pada Kompetensi dan Prasyarat lainnya yang semestinya dilakukan.
- c) Sistem Manajemen Kinerja Pegawai yang belum maksimal dilaksanakan dan diterapkan.
- d) Tingkat Kesejahteraan Aparatur dan Pegawai yang rendah.
- e) Mutasi Internal Pegawai dan Distribusi Pegawai yang belum memenuhi kebutuhan Unit Kerja yang ada.
- f) Pola Pengembangan Karier Pegawai masih belum diterapkan secara benar.
- g) Hasil Pendidikan dan Pelatihan serta Bimtek yang diikuti Pejabat atau Aparatur, yang belum dimanfaatkan dengan optimal.

Permasalahan yang dihadapi pada area perubahan Akuntabilitas adalah :

- a. Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan di beberapa Instalasi / Unit dan Bagian / Bidang yang terkait.
- b. Masih adanya anggapan bahwa pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah tidak maksimal dan berbelit belit.
- c. Sistem absensi atau kehadiran yang belum dijadikan rujukan untuk memberikan reward atau punishment.

Permasalahan yang dihadapi pada area perubahan Pengawasan adalah :

- a. Lemahnya Sistem Pengawasan Internal Rumah Sakit Sendiri.

- b. Belum adanya pegawai khusus yang bergerak di Bidang Pengawasan.
- c. Belum adanya Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Pengawasan
- d. Sarana dan Prasarana Pengawasan belum tersedia sesuai kebutuhan

Permasalahan yang dihadapi pada area perubahan Pelayanan adalah :

- a. Masih adanya keluhan masyarakat tentang Kurang Kualitas Pelayanan Rumah Sakit di Instalasi Rawat Darurat ( IRD ), Instalasi Rawat Inap ( IRNA ), Instalasi Rawat Jalan ( IRJA ), Instalasi Bedah Sentral ( IBS ), Instalasi Ambulance (Baik Umum dan Jenazah) dan lain-lain.
- b. Masih adanya keluhan Kunjungan / Visite Pasien oleh Dokter Spesialis / Dokter Umum / Dokter Gigi terlambat.
- c. Pelayanan Perawat / Bidan dan Petugas Kesehatan lainnya di rumah sakit ini yang kurang memuaskan / kurang ramah.
- d. Banyaknya Calon Pasien yang antri untuk mendapatkan Kamar Rawat Inap.

Adapun masalah yang menjadi keluhan masyarakat adalah :

- a. Adanya keluhan bahwa pasien di IRD dilayani lambat oleh petugas jaganya.
- b. Adanya keluhan bahwa pasien atau keluarganya dibuat berbelit belit untuk menyelesaikan urusan pendaftaran pasien, obat, dan administrasi.
- c. Suasana pelayanan di IRD kurang nyaman untuk pasien atau keluarganya.

### **3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM (DPU)**

#### **1. Program dan Kegiatan**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam Tahun Anggaran 2018, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat pagu Anggaran Rp. 401.687.736.768,99 ( Empat Ratus Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah Koma Sembilan Puluh Sembilan Sen ). Dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018, dapat diuraikan capaian kinerja SPM/ IKU adalah sebagai berikut :

- Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik.

Jumlah total panjang jalan kabupaten pada tahun 2018, adalah sepanjang 2.193.02 Kilo Meter, dengan perincian sebagai berikut : kondisi jalan dalam keadaan baik, sepanjang 1.876,44 KM dan kondisi jalan dalam keadaan rusak berat, sepanjang 316,86 KM ( tabel panjang jalan kabupaten ).

- Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik.

Panjang saluran dan Luasan irigasi existing Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah sebagai berikut : Luas Irigasi 23.154,16 Ha, dengan kondisi Luas Irigasi dalam kondisi baik 16.905.92 Ha ( tabel luas irigasi kabupaten kutai kartanegara ).

Dalam pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2017, maka dapat digambarkan dalam tabel tersebut dibawah ini Realisasi Capaian Kinerja.

**Tabel 3.18**  
**Anggaran Belanja Dan Realisasi Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2018**

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.446.412.500,00	3.060.139.364,00	88,75
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	879.361.833,00	726.214.900,00	82,58
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	187.369.367.693,88	175.899.538.882,10	93,88
4	Program pembangunan jalan dan jembatan	29.450.000.000,00	19.526.740.511,00	66,30
5	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	500.000.000,00	457.663.700,00	91,53
6	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	2.600.000.000,00	1.400.306.725,00	53,86
7	Program Peningkatan Sistem jaringan Irigasi Pertanian	6.368.000.000,00	5.793.134.975,00	90,97
8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	1.500.000.000,00	1.149.906.000,00	76,66
9	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	65.229.594.742,11	57.237.662.761,00	76,66
10	Program Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara	91.350.000.000,00	76.635.505.300,00	83,89
11	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	12.195.000.000,00	9.181.449.925,00	75,29
12	Program Pembangunan Sarana dan prasarana Kepariwisataaan	800.000.000,00	13.489.575,00	1,69
<b>Jumlah Total</b>		<b>401.687.736.768,99</b>	<b>351.081.752.618,10</b>	<b>87,40</b>

## 2. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan

Dalam hal pencapaian program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018, secara keseluruhan pencapaian renja dan renstra masih ada yang belum maksimal, dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang gagal lelang dan kegiatan yang diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari, anggaran dan capaian target program dan kegiatan akan ditingkatkan lagi pada tahun 2019 mendatang, secara keseluruhan prosentase capaian Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 88,79 % ) ;
  - 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, target 14 rekening, capaian kinerja 1 rekening, ( 11,01 % )
  - 2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, target 8 unit, capaian kinerja 8 unit ( 13,25 % )
  - 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan, target kinerja 55 orang, capaian kinerja 55 orang ( 89,70 % ).
  - 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor, target kinerja 12 bulan, capaian kinerja 12 bulan ( 78,21 % )



- 5) Penyediaan alat tulis kantor, target kinerja 66 jenis, capaian kinerja 66 jenis ( 99,02 % )
  - 6) Penyediaan makanan dan minuman, target kinerja 2906 porsi, capaian kinerja 2906 ( 85,35 % )
  - 7) Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran, target kinerja 107 orang, capaian kinerja 107 orang ( 96,34 % )
  - 8) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, target kinerja 181.669 lembar, capaian kinerja 181.669 lembar ( 94,75 % )
  - 9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah, target kinerja 360 orang kali, capaian kinerja 360 orang kali ( 84,92 % )
  - 10) peningkatan jaringan internet dinas pekerjaan umum, target kinerja 1 kegiatan, capaian kinerja 1 kegiatan ( 96,67 % )
  - 11) Publikasi dan Penyiaran, target kinerja 1 kegiatan, capaian kinerja 1 kegiatan ( 82,03 % )
  - 12) Pengadaan personal computer (PC), printer dan scanner dinas, target kinerja 6 jenis, capaian kinerja 6 jenis ( 95,50 % )
  - 13) Sewa Tempat Penyimpanan Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Arsip, target kinerja 2 gedung, capaian kinerja 2 gedung ( 100 % ).
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (82,58%) ;
- 1) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, target kinerja 8 unit, capaian kinerja 8 unit ( 99,69 % ).
  - 2) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, target kinerja 51 unit, capaian kinerja 51 unit ( 91,42 % )
  - 3) Pendampingan Jasa Advokasi, target kinerja 4 kegiatan, capaian kinerja 1 kegiatan ( 15,95 % )
  - 4) inventarisasi aset barang milik daerah, target kinerja, 18 kecamatan, capaian kinerja 6 kecamatan ( 71,88 % ).
  - 5) Pengadaan papan informasi elektronik dinas, 1 kegiatan, capaian kinerja 1 kegiatan ( 96,84 % )
  - 6) Pengadaan Alat Survei Permukaan Jalan, target kinerja 1 unit, capaian kinerja 1 unit ( 86,56 % ).
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ( 93,88 % ):
- 1) Fasilitasi penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga, target kinerja 311 kegiatan, capaian kinerja 311 kegiatan ( 93,88 % )
- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan ( 66,30 % ) :
- 1) Pembuatan Badan Jalan Desa Tunjungan Menuju Desa Sabintulung, target kinerja 0, capaian kinerja 0 ( 0 % )
  - 2) Penanganan Keliran 1 dan 2, target kinerja 2 jembatan, capaian kinerja 2 jembatan ( 31,31 % )
  - 3) Pembangunan Badan Jalan Desa Liang Buaya menuju Desa Sedulang, target kinerja 0, capaian kinerja 0 ( 0 % )
  - 4) Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Kelurahan Teluk Dalam Kec. Muara Jawa, target kinerja 1 Km, capaian kinerja 1 Km ( 62,37 % )

- 5) Pembangunan Jembatan Kecamatan Marang Kayu, target kinerja 1 jembatan, capaian kinerja 1 jembatan ( 66,99 % )
- 6) Pembangunan Jembatan Muallaf Kelurahan Loa Ipuh Tenggara, target kinerja 1 jembatan, capaian kinerja 1 jembatan ( 79,39 % )
- 7) Pembangunan Badan Jalan Usaha Tani Gunung Uang di Kecamatan Tenggara, target kinerja 0, capaian kinerja 0 (0%)
- 8) Peningkatan Jalan Di Kecamatan Tenggara, target kinerja 300 m, capaian kinerja 300 m ( 92,20 % )
- 9) Peningkatan Jalan Rimba Ayu - Kedang Murung (Bankeu), target kinerja 500 m, capaian kinerja 500 ( 75,31 % )
- 10) Pembangunan Jembatan Tangkon di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu, target kinerja 1 unit jembatan, capaian kinerja 1 unit jembatan ( 89,49 % )
  - Program Pembangunan Saluran Drainase / gorong - gorong ( 91,53 % ) ;
- 1) Rehabilitasi Gorong-gorong jalan Poros Marang Kayu - Muara Badak, target kinerja 20 m, capaian kinerja 20 m ( 91,53 % )
  - Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah ( 1,87 % ) ;
- 1) Pengadaan lahan untuk Bangunan BPU Desa Tanjung Batu, target kinerja 1.492 M<sup>2</sup>, capaian kinerja 1.492 M<sup>2</sup>( 79,44 % )
- 2) Pengadaan Lahan Pembangunan Central Bisnis Distrik, target kinerja 8.000 M<sup>2</sup>, capaian kinerja 8.000 M<sup>2</sup> ( 97,25 % )
- 3) Pengadaan Lahan di Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan, target kinerja 2.000 M<sup>2</sup>, capaian kinerja 2.000 M<sup>2</sup> ( 0 % ).
- 4) Pengadaan Lahan Jalan Ahmad Dahlan Menuju Jalan Pasar Mangkurawang, 2.000 M<sup>2</sup>, capaian kinerja 2.000 M<sup>2</sup> ( 0 % )
  - Program Pembangunan Sarana dan prasarana Kepariwisata ( 1,69 % )
- 1) Pembangunan Taman Replika dan Pusat Budaya Waduk Panji Sukarame Tenggara, target kinerja 1 bangunan, capaian kinerja 0 ( 1,69 % ).
  - Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan ( 53,86 % ) ;
- 1) OP Bidang Bina Marga, target kinerja 1.000 M, capaian kinerja 1.000 M ( 94,09 % )
- 2) OP Bidang Teknis, target kinerja 1 kegiatan, capaian kinerja 1 kegiatan ( 34,65 % )
- 3) OP Bidang Cipta Karya, target kinerja 1 kegiatan, capaian kinerja 1 kegiatan ( 11,58 % )
- 4) OP Bidang Sumber Daya Air, target kinerja 4 kegiatan, capaian kinerja 4 kegiatan ( 14,64 % )
- 5) Core Tim Dinas Pekerjaan Umum, target kinerja 1.500 m, capaian kinerja 1.500 m ( 90,08 % ).
  - Program Peningkatan Sistem Jaringan Irigasi Pertanian ( 90,97 % ) ;
- 1) Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Manunggal Jaya SP. II Kec. Tenggara Seberang (DAK), target kinerja 1.000 m, capaian kinerja 1.000 m ( 90,39 % )
- 2) Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Kejawi Kecamatan Tenggara (DAK), target

- kinerja 500 m, capaian kinerja 500 m ( 92,29 % )
- 3) Peningkatan Sistem Jaringan Irigasi Pertanian di Kecamatan Kota Bangun), target kinerja 1 dokumen, capaian kinerja 1 dokumen ( 87,16 % )
  - 4) Peningkatan Sistem Jaringan Irigasi Pertanian di Kecamatan Loa Kulu), target kinerja 1 dokumen, capaian kinerja 1 dokumen ( 93,22 % )
  - 5) Peningkatan Sistem Jaringan Irigasi Pertanian di Kecamatan Tenggarong Seberang, target kinerja capaian kinerja), target kinerja 1 dokumen, capaian kinerja 1 dokumen ( 92,57 % ).
- Program Pengelolaan Sumber Daya Air ( 76,66 % ) ;
- 1) Operasional dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa Kabupaten Kutai Kartanegara (Bankeu), target kinerja 66.592 M, capaian kinerja ( 76,66 % ).
- Program Peningkatan Jalan dan Jembatan ( 87,75 % ) ;
- 1) Peningkatan Jalan Di Kecamatan Marang Kayu, target kinerja 100 m, capaian kinerja 100 m ( 98,81 % )
  - 2) Peningkatan Jalan Di Kecamatan Sebulu, target kinerja, 300 m, capaian kinerja 300 m ( 71,64 % )
  - 3) Peningkatan Jalan Di Kecamatan Tenggarong Seberang, target kinerja 350 m, capaian kinerja 350 m (93,62 %)
  - 4) Penanganan Ruas Jalan Sebelimbingan - Tuana Tuha Kec. Kota Bangun, target kinerja 1.000 , capaian kinerja 1.000 ( 99,94 % )
  - 5) Peningkatan Jalan Darussalam Handil 6 Kelurahan Muara Jawa Tengah, target kinerja 800 m, capaian kinerja 800 m ( 95,99 % )
  - 6) Peningkatan Jalan Sukarelawan Handil 9 Kelurahan Muara Jawa Ilir, target kinerja 800 m, capaian kinerja 800 m ( 98,84 )
  - 7) Lanjutan Peningkatan Jalan Sebembang menuju Melintang (TMMD), target kinerja 1.200 m, capaian kinerja 1.200 m ( 89,98 % )
  - 8) Peningkatan Jalan Sukamaju Desa Bukit Biru Tenggarong, target kinerja 800 m, capaian kinerja 800 m ( 94,04 % )
  - 9) Peningkatan Jalan Gunung Beniris Tenggarong, target kinerja 0 m, capaian kinerja 0 m ( 0,57 % )
  - 10) Peningkatan Jalan Desa Bukit Pariaman, target kinerja 2.000 m, capaian kinerja 2.000 m ( 87,50 % )
  - 11) Peningkatan Jalan Desa Anggana, target kinerja 600 m, capaian kinerja 600 m ( 82,11 % )
  - 12) Pemeliharaan Wilayah I, target kinerja 1 UPT, capaian kinerja 1 UPT ( 31,28% )
  - 13) Pemeliharaan Wilayah II, target kinerja 1 UPT, capaian kinerja 1 UPT ( 63,35% )
  - 14) Pemeliharaan Wilayah III, target kinerja 1 UPT, capaian kinerja 1 UPT ( 50,26% )
  - 15) Pemeliharaan Wilayah IV, target kinerja 1 UPT, capaian kinerja 1 UPT ( 40,05 )
  - 16) Pemeliharaan Wilayah V, target kinerja 1 UPT, capaian kinerja 1 UPT ( 26,30% )
  - 17) Lanjutan Peningkatan Jalan Loleng - Muara Kaman Ilir (DAK), target kinerja 5.830 m, capaian kinerja 7.103 m ( 95,01 % )
  - 18) Lanjutan Peningkatan Jalan Ulaq Nanga - Jahuq (DAK), target kinerja 740 m, capaian kinerja 476 m (97,90 %)
  - 19) Peningkatan Jalan Buak (Desa Kembang Janggut Ilir/ Terusan Jaya), target kinerja 1.780 m , capaian kinerja 1.780 m ( 98,01 % )

- 20) Peningkatan Jalan Ngadang Menuju Sanggulan Kecamatan Sebulu, target kinerja 2.000 m, capaian kinerja 3.500 m ( 98,01 % )
  - 21) Peningkatan Jalan Jambing Triyu 2, target kinerja 350 m, capaian kinerja 370 m ( 96,59 % )
  - 22) Peningkatan Jalan di Kecamatan Loa Kulu, target kinerja 300 m, capaian kinerja 173 m ( 71,34 % )
  - 23) Peningkatan Jalan di Kecamatan Muara Kaman, target kinerja 925 m, capaian kinerja 925 m ( 97,22 % )
  - 24) Peningkatan Ruas Jalan Kec. Muara Wis - Kec. Kota Bangun, target kinerja 850 m, capaian kinerja 4.010 m ( 66,81 % )
- Program Pembangunan / Peningkatan Bangunan Negara ( 83,89 % ) ;
- 1) Pembangunan / Peningkatan Bangunan Negara di Kecamatan Muara Kaman, target kinerja 1 bangunan, capaian kinerja 1 bangunan ( 86,39 % )
  - 2) Pembangunan Sekolah Polisi Negara, target kinerja 1 kompleks bangunan , capaian kinerja 1 kompleks bangunan ( 88,41 % )
  - 3) Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Kota Bangun 3 Kec. Kota Bangun, target kinerja 1 bangunan, capaian kinerja 1 bangunan ( 33,04 % )
  - 4) Pembangunan Pasar Kuala Samboja, target kinerja 1 bangunan, capaian kinerja 0 bangunan ( 7,75 % )
  - 5) Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kec. Loa Janan (Sektor Tahura) , target kinerja 1 bangunan, capaian kinerja 0 bangunan ( 0 % )

### **3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara per Desember 2018 berjumlah 398 orang ASN yang terdiri dari 31 Pejabat Struktural dan 367 Non Struktural.

Untuk jumlah jabatan struktural pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk UPT sebanyak 33 jabatan per Desember 2018, jabatan yang terisi berjumlah 30 jabatan, 2 jabatan kosong belum terisi dan 1 jabatan kosong karena naik dari Ess. III/b ke Ess. III/ a dan 1 jabatan mengundurkan diri dan sampai sekarang belum terisi dan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terdapat Jabatan Fungsional.

### **4. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Pada tahun 2018 Total Anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara ( APBD ) Rp. 433.509.962.247,23 yang meliputi anggaran Biaya Tidak Langsung, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal, dengan realisasi atau serapan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

- c) Belanja Tak Langsung Rp. 31.822.225.478,24
- d) Belanja Langsung Rp. 401.687.736.768,99

### **5. Permasalahan dan Solusi**

- a. Permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018, sebagai berikut :
  - 1) Masih rendahnya tingkat koordinasi di lingkungan SKPD dan Lintas SKPD.

- 2) Kegiatan yang batal lelang.
  - 3) Uang Persediaan yang diberikan masih kurang.
  - 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di semua bidang.
- b. Dari permasalahan tersebut di atas, dapat kami sampaikan solusi sebagai berikut :
- 1) Memberikan pemahaman akan pentingnya koordinasi di lingkungan SKPD terlebih lagi lintas sektor.
  - 2) Kegiatan Pembangunan Jangan dianggarkan di akhir tahun, terkecuali pada kegiatan yang bersifat Perencanaan.
  - 3) Perlu adanya regulasi dan perhitungan kembali terkait penyediaan uang persediaan.
  - 4) Perlu adanya alokasi dana untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

#### 6. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Isu-isu Strategis kedepan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

Pembangunan Infrastruktur Jalan Penghubung Antar Kecamatan serta Jembatan. yang menghubungkan antara Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Muara Wis dan Kecamatan Muara Muntai.

#### 4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

##### DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

##### 1. Program dan Kegiatan

Pencapaian kinerja dari masing-masing program dan kegiatan sesuai dengan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara selama Tahun Anggaran 2018, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.19**

Capaian Realisasi Program Dinas Perkim Tahun 2018

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>128.58</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	264 Rekening Air, Listrik, Speedy dan TV Kabel	264 Rekening Air, Listrik, Speedy dan TV Kabel	100.00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	225 Unit	126 Unit	56.00
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	87 Orang/Bulan	87 Orang/Bulan	100.00
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bln	12 Bln	100.00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1820 Box, Pak, Lusin, Unit, Buah,	1820 Box, Pak, Lusin, Unit, Buah,	100.00

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN (%)
		Kotak, Roll	Kotak, Roll	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000 Eksemplar/Unit	7.800 Eksemplar/Unit	78.00
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	7900 Kotak/Kaleng/Dus	6517 Kotak/Kaleng/Dus	82.49
8	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	553150 Org/Bulan	553150 Org/Bulan	100.00
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.115 Blok, Rim, Lembar	11.115 Blok, Rim, Lembar	100.00
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	15 Kali	82 Kali	546.67
11	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	816 Orang	816 Orang	100.00
12	Penyediaan Perlengkapan Hari-Hari Tertentu	24 Buah	26 Buah	108.33
13	Pengelolaan Website	1 Paket	1 Paket	100.00
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>128.00</b>
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	225 Unit	225 Unit	100.00
15	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	50 Unit/Buah/Kali/Paket	78 Unit/Buah/Kali/Paket	156.00
3	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			<b>100.00</b>
16	Rekonsiliasi Data ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	20 Dokumen	20 Dokumen	100.00
4	<b>Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			<b>100.00</b>
17	Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00
18	Bekias	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00
19	Inventarisasi Aset (Barang Milik Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00
20	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	176 Kegiatan	176 Kegiatan	100.00
5	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>			<b>80.88</b>
21	FS TPA Tenggarong Seberang	1 Dokumen	0	0.00
22	FS TPA Samboja	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00
23	Penimbunan Sampah dengan Tanah Urug TPA Bekotok	1000 M3 tanah	1144 M3 tanah	114.40

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN (%)
24	Pengadaan dan Perbaikan Bak Dump Truck Sampah	3 Unit Pengadaan dan 7 Unit Perbaikan	2 Unit Pengadaan dan 7 Unit Perbaikan	90.00
25	Review DED TPA Kecamatan Muara Badak	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00
6	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>			<b>107.50</b>
26	Perencanaan Taman Lansia Eks. Pasar Tangga Arung	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00
27	Pemangkasan dan Penebangan Pohon Rawan Tumbang Dalam Kota Tenggara	80 Pohon	92 Pohon	115.00
7	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>			<b>110.76</b>
28	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Layanan Di Desa Rapak Lambur Kec. Tenggara (DAK Reguler)	5000 Meter	6579 Meter	131.58
29	Fasilitasi / Pendampingan DAK Reguler Bidang Air Minum	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00
30	Pembuatan Prasarana Sanitasi (Regular)	1 Unit IPAL Komunal dan 16 Unit Tangki Septik Komunal	1 Unit IPAL Komunal dan 16 Unit Tangki Septik Komunal	100.00
31	Fasilitasi / Pendampingan DAK Regular Bidang Sanitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00
32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK Penugasan)	8000 Meter	10879 Meter	135.99
33	Fasilitasi / Pendampingan DAK Penugasan Bidang Air Minum	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00
34	Pembuatan Prasarana Sanitasi (Penugasan)	8 Unit	8 Unit	100.00
35	Fasilitasi / Pendampingan DAK Penugasan Bidang Sanitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00
36	Pembangunan Reservoir dan Penunjang Distribusi Air Minum Pada IPA Badak 100 Kec. Muara Badak	1 Unit	1 Unit	100.00
37	Fasilitasi / Pendampingan Kegiatan PAMSIMAS Regional III (4 Desa)	4 Unit	4 Unit	100.00
38	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Layanan Menuju ke Jalan Long Apari Kelurahan Maluhu Kec. Tenggara	5000 M	3765 M	75.30
39	Pengadaan Jaringan Pipa Air GG. Veteran Handil 4	120 M	180 M	150.00
40	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Layanan Menuju ke Perumahan Korem 091 ASN Kecamatan Tenggara Seberang	800 M	2521 M	315.13
41	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Layanan Menuju Desa Suka Maju Kecamatan Tenggara Seberang	3600 M	1600 M	44.44
42	Lanjutan Pengadaan Tandon air minum Desa Bukit Jering	150 Unit	78 Unit	52.00



NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN (%)
43	Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibukota Kecamatan (IKK) di Kecamatan Tabang	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00
44	Perencanaan Instalasi Pengelolaan Air Asin menjadi Air Siap Minum (SWRO) di Desa Sepatin Kecamatan Anggana	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00
45	Perencanaan Instalasi Pengelolaan Air Asin menjadi Air Siap Minum (SWRO) di Desa Tani Baru Kecamatan Anggana	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00
46	Perencanaan Jaringan Pipa Air Bersih di Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00
8	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>			<b>97.47</b>
47	Pembuatan Septicktank Komunal (5-10 KK) Desa Manunggal Daya Kec. Sebulu (Bankeu)	1 Unit	1 Unit	100.00
48	Bantuan Pembuatan Septiktank Berstandar di Kec. Loa Kulu (Bankeu)	16 Unit	16 Unit	100.00
49	Pembuatan Drainase Jl. Setia Raya RT. 52 Kel. Loa Ipuh	500 M	424 M	84.80
50	Peningkatan Kualitas Permukiman Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan (KOTAKU)	30 Unit	60 Unit	200.00
51	Penyusunan Dokumen Perencanaan Relokasi Penduduk Terkena Dampak Pembangunan Bendungan Kec. Marangkayu	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00
9	<b>Program Peningkatan Jalan dan Jembatan</b>			<b>7.00</b>
52	Peningkatan Jalan dan Jembatan Permukiman Kecamatan Tenggarong	<b>500 M</b>	<b>70 M</b>	<b>14.00</b>
53	Identifikasi dan Inventarisasi Sarana Jalan Lingkungan	<b>8 Kecamatan</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Dari tabel diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa di Tahun Anggaran 2018, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan 9 (Sembilan) program dan 53 (lima puluh tiga) kegiatan. Yang terdiri dari 4 (empat) program generik/rutin dengan jumlah kegiatan sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan dan 5 (lima) program non generik/teknis dengan jumlah kegiatan sebanyak 33 kegiatan, dari 33 kegiatan teknis tersebut ada 2 kegiatan yang tidak dilaksanakan. Dari 9 program dan 53 kegiatan tersebut ada beberapa kegiatan yang target capaiannya tidak terpenuhi, dan ada juga yang target capaiannya bahkan melebihi dari target kinerja sehingga jika dihitung rata-rata capaian fisik pogram kegiatan tersebut sebesar 95,58%.

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

**Tabel 3.20**  
Sasaran IKU Dinas Perkim Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN (%)
1	2	3
<b>Meningkatnya keterpaduan pengentasan kemiskinan antar sektor antar wilayah</b>	Cakupan Rumah Layak Huni	90,91%



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN (%)
Meningkatnya layanan kebutuhan dasar perumahan dan kawasan permukiman	Cakupan Lingkungan Permukiman Kumuh	0,006%
	Cakupan Layanan Air minum Rumah Tangga	84,89%

Dari tabel capaian Indikator Kinerja Utama diatas dapat dilihat bahwa untuk cakupan rumah layak huni mengalami peningkatan sebesar 0,73% dibandingkan dengan capaian Tahun 2017 yaitu sebesar 90,18% dan pada Tahun 2018 meningkat menjadi 90,91%. Hal ini dipengaruhi adanya Program Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Kotaku.

Untuk cakupan layanan air minum rumah tangga, juga mengalami peningkatan sebesar 1,18% dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 83,70% dan pada Tahun 2018 meningkat menjadi 84,88% . Hal ini dipengaruhi oleh adanya Program kegiatan yang berasal dari Pamsimas, DAK dan CSR.

Untuk cakupan lingkungan permukiman kumuh dari segi penanganan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 2,8 ha menjadi 15,1 hektar hal ini dipengaruhi oleh program kegiatan KOTAKU.

### 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) per Desember 2018 berjumlah 242 orang ASN yang terdiri dari 20 Pejabat Struktural dan 222 Non Struktural sedangkan Tenaga Harian Lepas berjumlah 154 orang.

### 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2018 Total Anggaran belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara ( APBD ) Rp. 65.004.585.343 yang meliputi anggaran Biaya Tidak Langsung, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal, dengan realisasi atau serapan Tahun Anggaran 2018 adalah Rp 59.219.087.831,31 atau sebesar 91,10%.

### 5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Untuk meningkatkan kinerja Aparatur khususnya di bidang – bidang diperlukan Sarana dan Prasarana yang cukup memadai, demi terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun sarana dan prasarana yang digunakan sampai dengan posisi bulan Desember 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel.3.21**  
Sarana dan Prasarana Dinas Perkim Tahun 2018

No	Nama Barang / Merk	Jumlah (Unit/Buah)	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak	
1	<u>Kendaraan Roda 4 :</u>				
	Mini Bus	12	10	2	Operasional
	Mobil Tinja	1	1	-	Pengangkutan
	Mobil WC	2	2	-	Tinja
	Dumk Truck	9	3	6	Pengangkutan
	Mobil Penyiram Tanaman	2	1	1	Sampah
	Pick Up	1	-	1	Operasional
	Pick Up (Double Cabin)	3	3	-	Operasional
	Excavator	2	1	1	
	Tractor	2	2	-	
2	Sepeda Motor Roda Dua	82	82	-	Operasional
3	Kendaraan Bermotor Khusus Lain Lain (Viar)	18	14	4	Pengangkutan Sampah
	(Gerobak Sampah/Gerobak Tarik)	33	16	17	
4	P.C	148	124	24	Operasional
5	Notebook/Laptop	79	79		Operasional
6	Printer	174	145	29	Operasional
7	Mesin Pencacah Sampah Organik Dan Non Organik	6	6		Mengurangi Sampah organik
8	Proyektor/Infocus (Benq/Nec)	4	4		Operasional
9	Mesin Ganset (Silend/180 Kva)	3	3		Operasional
10	Mesin Pemetong Rumput	61	61		Perawatan Taman
11	Kapal Motor (Cess & Kapal Very Kayu)	4	4		Operasional
12	Mesin Foto Copy (Canon)	6	4	2	Operasional
13	Handy Talky (Radio Mobile)	79	79		
14	GPS	5			
15	Hand Sprayer (Solo) / Tanaka	16			Operasional
16	Digital Multimeler	25	25		

## 6. Permasalahan dan Solusi

### ✓ Permasalahan

Permasalahan dan kondisi pembangunan prasarana dan sarana bidang perumahan dan permukiman terdiri dari permasalahan umum serta permasalahan spesifik untuk setiap sektor bidang (pembinaan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, penyehatan lingkungan, kebersihan, pertamanan dan pemakaman, teknis). Adapun permasalahan umum dalam pembangunan sarana dan prasarana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah :

1. Belum terpenuhinya lingkungan permukiman yang memadai;
2. Rendahnya penataan perumahan permukiman;
3. Belum optimalnya pelayanan air bersih bagi masyarakat;
4. Masih minimnya penyediaan dan pengelolaan air limbah domestik;
5. Belum optimalnya penyediaan TPA dan Penanganan Sampah Rumah Tangga;
6. Pembebasan lahan;
7. Belum terpenuhinya ruang terbuka hijau (RTH) publik.

### ✓ Solusi

Diharapkan kedepannya permasalahan seperti yang telah disebutkan diatas, perlahan namun pasti bisa tertangani. Tentunya hal tersebut tidak akan bisa terwujud tanpa adanya dukungan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh OPD terkait maupun Pemerintah Daerah harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

## DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

### 1. Program dan Kegiatan

Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dan menggambarkan mengenai sesuatu yang ingin dicapai, yang ditentukan berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi internal dan eksternal, serta upaya-upaya yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja SKPD yang harus dilaksanakan secara konsisten. Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan serangkaian kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 10 Program dengan 62 Kegiatan Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target renja 100% dan capaian renja 97,88%, dengan kegiatan :
  - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik dengan target renja 14 Rekening dan capaian renja 14 Rekening (100%).
  - 2) Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor dengan target renja 30 unit dan capaian renja 30 buah (100%).
  - 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan target renja 36 Unit dan capaian renja 36 Unit (100%).

- 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan target renja 33 Aparatur/Orang dan capaian renja 28 Orang (84,85%).
  - 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan target renja 3.045 Item dan capaian renja 4045 item (100%).
  - 6) Penyediaan Makanan Dan Minuman dengan target renja 3.000 Kotakan dan capaian renja 3000 kotak (100%).
  - 7) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Dalam daerah Dan ke Luar Daerah dengan target renja 50 Orang dan capaian renja 50 Orang (100%).
  - 8) Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran dengan target renja 225 Orang dan capaian renja 225 Orang (100%).
  - 9) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan target renja 2.765 Lembar dan capaian renja 3000 item (92,17%).
  - 10) Perlindungan/Asuransi Satgas Penanggulangan Bencana dengan target renja 360 Orang dan capaian renja 225 Orang (62.5%).
- b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
- 1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan target renja 50 Unit dan capaian renja 45 unit (90%).
  - 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan target renja 30 Unit dan capaian renja 65 unit (50%).
  - 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan target renja 3 Unit dan capaian renja 15 unit (20%).
  - 4) Rehabilitas sedang/berat gedung kantor dengan target renja 1 Paket dan capaian renja 1 Paket (100%).
  - 5) Pengelolaan Website BPBD dengan target renja 1 Paket dan capaian renja 1 unit (100%).
  - 6) Semenisasi halaman gedung kantor BPBD dan Pos UPTB di Kecamatan dengan target renja 1 Paket dan capaian renja 1 Paket (100%).
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 1) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu dengan target renja 325 Stell dan capaian renja 185 stel (56,93%).
  - 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya dengan target renja 325 Stell dan capaian renja 200 stel (61,54%).
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 1) Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur dengan target renja 10 Orang dan capaian renja 3 orang (30%).
  - 2) Pembinaan Jasmani Dan Rohani Bagi Aparatur dengan target renja 100 Orang dan capaian renja 100 orang (100%).
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
- 1) Penyusunan Laporan Keuangan dengan target renja 15 Dokumen dan capaian renja 16 Laporan (100%).
  - 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Laporan Kinerja dengan target renja 4 Dokumen dan capaian renja 6 Dokumen (100%).
  - 3) Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan SKPD dengan target renja 1 Dokumen dan capaian renja 1 Dokumen (100%).

- 4) Fasilitasi Pendampingan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD dengan target renja 1 Dokumen dan capaian renja 16 Laporan (100%).
- f. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
    - 1) Verifikasi Dan Pendataan Pasca Bencana dengan target renja 75 Unit/Rumah dan capaian renja 75 kejadian (100%).
    - 2) Monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan belanja bantuan social tidak terencana dengan target renja 70 Paket dan capaian renja 50 kejadian (71,43%).
    - 3) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dengan target renja 61 Unit/Rumah dan capaian renja 100 % (61%).
  - g. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
    - 1) Pemenuhan Sarana Damkar dengan target renja 40 Buah dan capaian renja 34 Unit (85%).
    - 2) Sekolah Siaga Bencana dengan target renja 4 Sekolah dan capaian renja 1 Sekolah (25%).
  - h. Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
    - 1) Fasilitasi Persiapan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dengan target renja 3 desa dan capaian renja 2 desa (66,67%).
    - 2) Pelatihan Siaga Bencana desa/kelurahan dengan target renja 450 orang dan capaian renja 40 orang (88%).
  - i. Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
    - 1) Tanggap Darurat Bencana Kebakaran dengan target renja 80 Kejadian dan capaian renja 79 kejadian (98,75%).
    - 2) Tanggap Darurat Bencana Alam/non alam dengan target renja 80 kejadian dan capaian renja 79 Kejadian (98,75%).
    - 3) Pengerahan peralatan/logistik dan pemenuhan kebutuhan dasar dengan target renja 1265 unit, lembar, paket dan capaian renja 1265 unit, lembar, paket (100%).

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Sasaran : Optimalnya Kerjasama Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha untuk menjaga Keamanan, Ketertiban dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

**Table 3.22**

Pengukuran Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi 2018	% Pencapaian	Kesimpulan
<b>Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana</b>	Pelatihan Siaga Bencana Desa/Kelurahan	40 Orang	50 Orang	80 %	adanya rencana program dan kegiatan kedepan untuk memenuhi sasaran yang ada
	Sekolah Siaga Bencana	1 Sekolah	1 Sekolah	100 %	Data menunjukkan bahwa kegiatan berjalan secara maksimal

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi 2018	% Pencapaian	Kesimpulan
<b>Meningkatnya Penanganan Keadaan Darurat Secara Cepat Dan Tepat</b>	Cakupan Veifikasi Dan Pendataan bencana	75 Kejadian	75 Kejadian	100 %	Data menunjukkan bahwa kegiatan berjalan secara maksimal
<b>Meningkatnya efektifitas penanganan kedaruratan bencana</b>	Cakupan tanggap darurat bencana kebakaran	100 %	100 %	100 %	adanya rencana program dan kegiatan kedepan untuk memenuhi sasaran yang ada
	Cakupan tanggap darurat bencana Alam/Non Alam	100 %	100 %	100 %	adanya rencana program dan kegiatan kedepan untuk memenuhi sasaran yang ada
<b>Ketersediaan kebutuhan masyarakat pada saat terjadi bencana</b>	Jumlah paket bantuan logistik dan kebutuhan dasar	220 Paket	1715 paket	12,83 %	Data menunjukkan bahwa penyaluran logistik berjalan sesuai dengan kebutuhan yang disalurkan di tempat terjadi bencana
<b>Terbentuknya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan</b>	Cakupan Masyarakat Peduli Api (MPA)	150 Orang	150 Orang	100 %	Kegiatan DBH-DR
	Jumlah rambu-rambu dan papan peringatan	91 unit	28 Unit	30,77 %	Kegiatan DBH-DR
	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian	239 unit/buah/roll/set	120 unit/buah/roll/set	50,20 %	Kegiatan DBH-DR

### 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Semenjak Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2017 disahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk kembali, namun secara personil terutama para pejabat strukturalnya baru dilantik pada tanggal 2 Februari 2012, yang sampai sekarang dijadikan hari lahirnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPBD per Desember 2018 berjumlah 98 orang ASN yang terdiri dari 17 Pejabat Struktural dan 81 Non Struktural sedangkan Tenaga Harian Lepas berjumlah 225 orang.

### 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Didalam penyusunan Alokasi Dan Realisasi Anggaran yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara berasal dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp 20.175.840.792,- atau Total Anggaran Rp 14.316.321.735,- dengan Realisasi Fisik 70,95%.

## 5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang berupa peralatan penanggulangan bencana. Secara keseluruhan dalam kondisi baik.

## 6. Permasalahan dan Solusi

### a. Permasalahan

- 1) Masih banyak Kecamatan/Kota yang belum terkoordinasi dalam penanggulangan bencana daerah sehingga dirasakan masih belum optimal.
- 2) Masih terbatasnya Sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana sehingga dengan besarnya wilayah yang terkena bencana alam belum tertangani secara optimal.
- 3) Kurangnya pemahaman masyarakat dalam bahaya kebakaran.
- 4) Peran masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- 5) Tidak terpenuhinya perbaikan sarana dan prasarana umum.
- 6) Kurangnya pendistribusian logistik dan peralatan korban bencana/kecelakaan

### b. Solusi

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan Provinsi/ Kecamatan/ Kota dalam penanggulangan bencana daerah
- 2) Peningkatan sumber daya manusia dalam upaya peningkatan kemampuan pada penanggulangan bencana.
- 3) Dilakukannya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pencegahan bahaya kebakaran.
- 4) Diberikan wawasan tentang penanggulangan bencana
- 5) Sarana dan prasarana yang memadai dalam upaya penanggulangan bencana
- 6) Pendistribusian logistik dan peralatan secara tepat dan benar keada korban bencana/kecelakaan

## 7. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Pada Tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 ini telah terbentuk Pelayanan Pos Pemadam kebakaran pada 7 Kecamatan yaitu pada Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Marang Kayu, Kecamatan Anggana, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Samboja Dan Kecamatan Kota Bangun yang telah berfungsi sejak 1 Januari 2013, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hingga Tahun ini akan terus melaksanakan pembangunan Pos-pos Pemadam Kebakaran di tiap-tiap kecamatan tentunya dengan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan secara bertahap dan juga personil /anggota yang telah disiapkan dan terlatih, sehingga bisa melayani masyarakat dikecamatan dengan baik sesuai yang diharapkan semua pihak.

**5. URUSAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**1. Program dan Kegiatan**

Pencapaian kinerja dari masing-masing program dan kegiatan sesuai dengan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara selama Tahun Anggaran 2018.

**Tabel.3.23**  
 Realisasi Capaian Kinerja Program Satpol PP Tahun 2018

NO.	Uraian (Program dan Kegiatan)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
	a. Penyediaan jasa surat-menyurat	2.500 lembar materai	2.500 lembar materai	100%
	b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 rekening telepon	2 rekening telepon	100%
	c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	75 unit	75 unit	100%
	d. penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	100%
	e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	145 unit	145 unit	100%
	f. Penyediaan alat tulis kantor	1 paket	1 paket	100%
	g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3 paket	3 paket	100%
	h. Penyediaan makanan dan minuman	5.000 porsi	5.000 porsi	100%
	i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	2 paket	2 paket	100%
	j. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	274 orang	274 orang	100%
	k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	500 exemplar	500 exemplar	100%
	l. Penyediaan bahan logistik kantor	13 jenis	13 jenis	100%
2.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			
	a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Paket	1 Paket	100%
	b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	75 unit	75 unit	100%
3.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			



NO.	Uraian (Program dan Kegiatan)		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
	a.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	100%
	b.	Penyusunan RENJA, LAKIP, LPPD Satpol PP	3 dokumen	3 dokumen	100%
	c.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	2 dokumen	100%
	d.	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga	1 PAKET	1 PAKET	100%

Dari tabel diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa di Tahun Anggaran 2018, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara hanya melaksanakan 3 (tiga) Program dan 18 (delapan belas) Kegiatan saja. Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah Program dan Kegiatan rutin, sedangkan Program dan Kegiatan yang bersifat teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Capaian kinerja secara fisik, semua Program dan Kegiatan adalah 100%.

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Realisasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja dengan jenis pelayanan dasar Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban dan Perlindungan adalah sebagai berikut :

**Tabel.3.24**  
SPM Satpol PP Tahun 2018

Mutu Pelayanan Dasar	Parameter	Capaian 2018	Keterangan
<b>a. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/ atau Jasa</b>	a. Jumlah penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;	242 Perda	
	b. Jumlah patroli siaga ketentraman dan ketertiban;	1184 kali	
<b>b. Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia</b>	a. Jumlah personel pelayanan ketentraman dan ketertiban;	112 orang	
	b. Personel pelayanan ketentraman dan ketertiban yang bersertifikat;	0	
	c. Jumlah kebutuhan personel pelayanan ketentraman dan ketertiban.	112 orang	
<b>c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar</b>	Program/kegiatan terkait pemenuhan	0	Terbatasnya anggaran OPD, sehingga tidak bisa

Mutu Pelayanan Dasar	Parameter	Capaian 2018	Keterangan
	terhadap pelayanan ketentraman dan ketertiban		mengakomodir khusus program/kegiatan terkait pemenuhan terhadap pelayanan ketentraman dan ketertiban, sehingga pelayanan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran.

### 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Personil yang ada saat ini sampai dengan 31 Desember 2018 adalah 439 (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan) orang pada Satuan Polisi Pamong Praja berjumlah personil terdiri dari :

- Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) : 169 orang
- Bantuan Tenaga Pol.PP (BanPol.PP) : 270 orang
- Jumlah 439 orang**

### 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2018 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan satu urusan wajib, yakni Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat. Dengan urusan wajib tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 18 (delapan belas) kegiatan yang terakomodir dalam 3 (tiga) program.

Didalam penyusunan Alokasi Dan Realisasi Anggaran yang digunakan oleh Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara berasal dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp 7,042,901,142 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 6,948,296,026 dengan presentase Realisasi anggaran sebesar 98,66%. Dengan gambaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran persentase perbandingan antara alokasi dan realisasi anggaran adalah 98,60%. Persentase perbandingan antara alokasi dan realisasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah 98,99% sedangkan Persentase perbandingan antara alokasi dan realisasi anggaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah 99,98%.

### 5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Sehubungan dengan bertambahnya penduduk dan berkembangnya pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka ruang lingkup kinerja Satuan Polisi Pamong

Praja sebagai ujung tombak penegakan dan pengamanan kebijakan Pemerintah Daerah, diuntut lebih aktif dan Profesional. Sehingga untuk mendukung kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.

Berkaitan hal tersebut diatas, sarana (kendaraan dinas) yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja sudah mencukupi meskipun untuk menunjang kinerja Anggotanya dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi serta dalam pelayanan kepada masyarakat. Baik itu dalam melaksanakan patroli dengan menggunakan kendaraan roda empat maupun roda dua. Meskipun ada beberapa kendaraan roda empat yang mengalami kerusakan, sehingga Petugas Satuan Polisi Pamong Praja harus bergantian menggunakan Kendaraan roda empat yang masih layak dipakai.

Sistem pengawasan dan pengendalian di wilayah-wilayah rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum bisa dipantau melalui layar CCTV yang dipusatkan pada Kantor SatPol.PP dan dijaga oleh operator dari Anggota SatPol.PP. Kamera CCTV tersebut dipasang disudut-sudut jalan pada tempat-tempat hiburan umum maupun jalan yang dianggap rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Permasalahan mengenai sarana dan prasarana yang belum terpenuhi hanyalah bangunan beserta peralatan kerja kantor yang masih tidak memadai dan kurang representatif, membuat kinerja Staf Administrasi Satuan Polisi Pamong Praja masih belum bisa dimaksimalkan.

## 6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang sebagian besar dihadapi oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dari Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi yang bersangkutan.
- b. Keterbatasan anggaran yang tersedia, menyebabkan program dan kegiatan teknis di masing-masing Bidang tidak bisa dilaksanakan sehingga hanya program dan kegiatan rutin saja yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selama tahun 2018.
- c. Keterbatasan gedung kantor, baik luas kantor yang tidak sesuai untuk menampung jumlah staf bekerja sehingga kondisi gedung yang kurang memadai serta sarana dan prasarana kerja belum mendukung dengan baik untuk Anggota di lapangan maupun staf kantor secara tidak langsung menghambat efektivitas dan efisiensi kinerja seluruh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
- d. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, khususnya pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketentraman dan Ketertiban umum belum bisa diterjemahkan serta diimplementasikan secara maksimal karena belum ada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur secara resmi mengenai standar teknis.

Solusi yang diberikan guna mengatasi masalah yang dihadapi :

- a. Mengadakan Bimbingan secara intern melalui atasan langsung di setiap Sub Bagian dan Seksi untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan dan keterampilan bawahannya dengan tujuan bisa memaksimalkan capaian kinerja yang diharapkan khususnya dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketentraman, ketertiban dan keindahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Dengan keterbatasan anggaran, maka sangat perlu untuk menentukan kegiatan

- SATPOL PP yang lebih mengarah kepada tupoksi SATPOL PP yaitu penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan perda.
- c. Mengusulkan program dan kegiatan prioritas dari masing-masing Bidang dan Sub Bagian yang bisa mendukung memaksimalkan tugas, pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja serta bisa membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
  - d. Mengusulkan penambahan gedung kantor baru serta sarana dan prasarana baru yang bisa mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Seluruh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
  - e. Mengadakan sosialisasi melalui media sosial (facebook dan instagram) kepada masyarakat tentang layanan pengaduan masyarakat secara online dengan tujuan bisa memaksimalkan tugas, pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
  - f. Dalam mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaannya.

## 7. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Tahun 2018 adalah tahun kedua perubahan tipologi Satuan Polisi Pamong Praja dari tipe B menjadi tipe A, yang sebelumnya hanya memiliki 4 Kasi dan 1 (satu) Sub Bagian berubah terdiri atas 1 (satu) Sekretariat yang membawahi 3 Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing membawahi 2 (dua) Seksi, menjadikan beban kerja Satuan Polisi Pamong Praja bertambah lebih banyak. Namun disayangkan perubahan tipologi ini tidak didukung dengan anggaran serta sarana prasarana (gedung dan peralatan kantor) yang memadai. Hal ini diakibatkan situasi ekonomi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang defisit sehingga memaksa Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugasnya dengan keterbatasan anggaran serta sarana dan prasarana.

Kondisi gedung kantor yang masih kurang memadai, menjadi faktor penghambat yang belum bisa mengakomodir seluruh Kesekretariatan, Bidang dan Sub Bagian Bagian/Seksi yang baru terbentuk. Selain itu hal penting lainnya adalah permasalahan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia yang memahami dan memiliki skill terhadap tugas, pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

## 6. URUSAN SOSIAL DINAS SOSIAL

### 1. Program dan Kegiatan

Program nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk bidang sosial terdapat 5 program nasional yang meliputi : Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial; dan Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial. Dari 5 program nasional tersebut hanya 5 program nasional (100%) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. Pencapaian 5 program nasional tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
  - 1) Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Psikososial di Rumah Perlindungan dan Trauma Centre  
Kegiatan ini dimaksud untuk memberikan pelayanan rehabilitasi

psikososial bagi korban tindak kekerasan, perlakuan salah dan berkonflik dengan hukum. Sasaran kegiatan ini adalah anak dan perempuan. Khusus anak fokusnya tidak hanya pada korban tetapi juga pada pelaku. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa anak belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri, sehingga jika dia melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan kesusilaan maka sebenarnya dia merupakan korban dari sistem sosial yang tidak berjalan dengan semestinya. Dengan memperhatikan kecenderungan kasus pada tahun 2017 maka diperkirakan tahun 2018 akan ada 40 kasus yang ditangani. Namun sampai dengan akhir tahun 2018 jumlah kasus yang ditangani sejumlah 44 kasus.

- b. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya
  - 1) Kegiatan Pemutakhiran Data Wanita Rawan Sosial Ekenomi (WRSE)  
Komponen ini adalah perempuan yang karena faktor kemiskinannya, keterbelakangan dan kebodohnya mengalami gangguan fungsional dalam kehidupan sosial dan atau ekonominya sehingga yang bersangkutan mengalami kesulitan untuk menjalankan peranan sosialnya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memutakhirkan data WRSE diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat diperoleh angka pasti mengenai jumlah WRSE sehingga dapat segera diprogramkan upaya penanganannya. Dari kegiatan ini ditahun 2018 diperoleh data bahwa terdapat 4875 Orang. Kedepanya strategi yang dapat direkomendasikan untuk mengentaskan WRSE dari kemiskinan diantaranya akses ke pendidikan formal, pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas, bantuan dana untuk penghidupan dan anak-anak WRSE, membuka akses pada keuangan mikro, pendampingan spiritual/psikologis, memperkuat jaringan pendukung WRSE dan pelibatan WRSE dalam perencanaan maupun program pengentasan kemiskinan.
- c. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
  - 1) Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak  
Sasaran kegiatan ini adalah lembaga kesejahteraan sosial atau sarana sosial yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Pekerjaan yang dilakukan berupa pembinaan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial melalui sistem panti. Sasarannya adalah 15 lembaga kesejahteraan sosial yang dapat terealisasi semuanya (100%). Dari sejumlah LKSA tersebut terdata 726 anak yang menjadi binaan. Di akhir tahun 2018 terdapat 3 LKSA baru yang terdaftar di Dinas Sosial sehingga target sasaran tahun 2019 bertambah menjadi 18 LKSA.
- d. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
  - 1) Kegiatan Penunjang Operasional Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH)  
Kegiatan ini merupakan sharing dana Pemerintah Kabupaten terhadap program pemerintah pusat yang berlangsung di Kabupaten Kutai Kartanegara. Peluncuran Program Keluarga Harapan (PKH) oleh pemerintah pusat dimaksudkan sebagai upaya percepatan dalam memutus mata rantai kemiskinan. Pemerintah pusat menyediakan anggaran untuk santunan bagi rumah tangga penerima manfaat program, honorarium dan operasional petugas pendamping. Melalui kegiatan ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan kontribusi untuk menunjang operasional kegiatan di sekretariat Program Keluarga Harapan (PKH), perluasan jangkauan sosialisasi pelaksanaan program, dan bantuan biaya lain yang diperbolehkan sesuai aturan yang berlaku. Bantuan biaya

ini diberikan untuk kebutuhan selama 12 bulan untuk tahun 2018 bagi para pendamping PKH Kabupaten Kutai Kartanegara. Hingga saat ini terdapat 99 orang Pendamping, 1 Orang asisten pendamping, 3 orang Operator dan 1 orang Koordinator Kabupaten.

2) Kegiatan Pendampingan Program Beras Sejahtera (Rastra)

Kegiatan ini merupakan upaya dari pemerintah daerah untuk membantu terlaksananya Program Rastra dari Pemerintah Pusat dapat berjalan di Kabupaten, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan Keluarga Penerima manfaat memperoleh Beras Sejahtera setiap bulanya, kegiatan ini berupa pemberian Subsidi Ongkos Angkut Beras dari Titik Distribusi (BULOG) Samarinda ke Titik Bagi (Kecamatan dan Desa) di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan ini juga berfungsi untuk memonitor penyaluran dan ketepatan pelaksanaan program. Baik ketepatan waktu, jumlah, sasaran dan biaya tebus beras serta penyaluran biaya tebus kembali ke BULOG. Dalam pelaksanaannya Program ini beralih menjadi Program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) di bulan Oktober 2018 yaitu perubahan sitem penyaluran Beras Rastra ke masyarakat yang tadinya berbentuk beras menjadi sejumlah uang melalui rekening bank yang dapat di tukarkan dengan beras dan telur di warung warung yang ditunjuk.

3) Kegiatan Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

Kegiatan ini ditujukan bagi korban bencana untuk memberikan jaminan hidup bagi mereka akibat bencana yang dialami dan diberikan selama masa tanggap darurat. Prosesnya adalah pada saat bencana terjadi para korban ini dievakuasi ketempat-tempat yang aman kemudian barulah diberikan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Penanganan korban bencana dikabupaten kutai kartanegara tidak dilakukan sendiri oleh Dinas Sosial melainkan dilakukan secara terkoordinasi dibawah kendali Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sampai dengan akhir tahun 2018 jumlah korban bencana yang berhasil diberikan bantuan selama masa tanggap darurat sejumlah 65.050 jiwa yang tersebar di 18 kecamatan.

e. Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Sosial

1). Pameran Pembangunan Peringatan Peristiwa Merah Putih dan Pameran Lainnya

Sasaran kegiatan ini adalah warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara pengunjung kegiatan Pameran Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Sanga sanga setiap akhir Januari. Kegiatan ini berupaya memberi edukasi dan pemahaman terhadap masyarakat terkait Program Program pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Kegiatan ini pada tahun 2018 hanya dapat dilaksanakan di Kecamatan sanga sanga karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Kedepannya harapannya penyuluhan tentang program Dinas Sosial diharapkan dapat dilaksanakan kepada seluruh desa maupun kelurahan di wilayah Kabupaten Kutai kartanegara mengingat banyalnya potensi munculnya permasalahan permasalahan sosial di masyarakat.

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Sosial merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan teknis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara. Capaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial sepanjang kurun waktu 2018 dapat digambarkan melalui capaian target kinerja beberapa indikator. Gambaran umum capaian indikator kinerja kunci pelaksana urusan wajib Bidang Sosial sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/313/OTDA tanggal 24 Januari 2011 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.25**  
Capaian Indikator Kinerja Kunci Pelaksana Urusan Wajib Bidang Sosial  
Tahun 2018

Urusan	No. IKK	IKK	Capaian Kinerja	
			2017	2018
<b>Wajib Sosial</b>	68	Sarana sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	15 buah	18 buah
	69	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	100%	100%
	70	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	93,72 %	97,16 %

Berdasarkan Lampiran III.3 Format Indikator Kinerja Kunci Pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Sosial Kabupaten, terdapat 3 indikator kunci yang meliputi :

- a. IKK Nomor 68 : Sarana sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi dengan rumus penghitungan menunjukkan jumlah ketersediaan sarana sosial tersebut. Pada tahun 2018 terdapat 18 sarana sosial yang terdiri dari Panti Asuhan dan Panti Rehabilitasi. Panti rehabilitasi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Panti Rehabilitasi Korban Penyalahguna Narkoba yang berada di Kecamatan Tenggarong Seberang. Pelayanan sosial yang diberikan dikhususkan kepada para korban penyalahguna narkoba dengan pendekatan spiritual. Panti yang sekaligus merupakan pondok pesantren ini memberikan pelayanan rehabilitasi kepada para korban penyalahgunaan narkoba dengan dibimbing oleh para ustadz. Dalam hal ini peran Dinas Sosial adalah memberikan bantuan permakanan dan bimbingan teknis terkait manajerial Panti. Kedepanya bantuan yang yang diharapkan adalah pemenuhan kebutuhan dalam memperoleh Akreditasi sebagai Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Hal ini diharapkan mampu menjadikan Lembaga Lembaga tersebut mampu memberikan pelayanan optimal bagi kliennya.
- b. IKK Nomor 69 : Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut

usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial. Indikator ini lebih fokus pada pemberian jaminan sosial bagi penyandang cacat dan lanjut usia. Capaian IKK Nomor 69 pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 100%. Angka ini diukur melalui jumlah Penyandang Disabilitas dan Lansia yang memperoleh bantuan melalui program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial. Selain itu untuk penyandang cacat berat dan lanjut usia yang tidak potensial mendapatkan pelayanan dalam bentuk Asistensi Sosial bagi Orang Dengan Kecacatan Berat dan Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia tidak Potensial oleh Kementerian Sosial. Pelayanan ini dilaksanakan dengan memberikan bantuan uang tunai kepada masing-masing penerima melalui rekening bank setiap bulan.

- c. IKK Nomor 70 : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima bantuan sosial, dengan rumus penghitungan Jumlah PMKS yang diberi bantuan dibagi Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan dikalikan 100%. Pada tahun 2018 capaiannya 97.13% angka ini diperoleh dari jumlah Penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) pengganti Program Rastra dan Jumlah Korban Bencana Alam yang memperoleh bantuan dari Dinas Sosial dalam masa tanggap Darurat Bencana. Target yang seharusnya dicapai dalam indikator ini adalah 100% setiap tahunnya. Pada tahun 2017 dan 2018 capaian kinerja indikator ini tidak mampu mencapai target dikarenakan adanya Migrasi Pola Penyaluran Program PKH yang tadinya menggunakan sistem tunai menuju ke sistem Non Tunai. Dalam pelaksanaannya perpindahan sistem tersebut tidak berjalan mulus. Terdapat beberapa KPM di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum menerima bantuan karena kesalahan teknis dalam sistem perbankan. Hal ini kemudian dilakukan upaya penelusuran oleh Dinas Sosial langsung ke Kementerian sebagai pemilik Program dan BRI Pusat di Jakarta sebagai lembaga penyalur. Dalam proses tersebut akhirnya dapat terselesaikan masalah masalah dalam penyaluran bantuan tetapi belum semuanya tuntas karena masih terdapat beberapa KPM yang belum bisa menerima bantuan tersebut sehingga capaian indikator ini belum memenuhi target.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberian bantuan sosial bersifat jaminan dan perlindungan Sosial serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS. Hal ini di maksudkan untuk mengurangi beban kebutuhan hidup sehari hari mereka, bantuan PKH difungsikan untuk meringankan beban biaya pendidikan, jaminan hidup lansia dan penyandang disabilitas. BPNT difungsikan untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan makanan pokok dan bantuan korban bencana diharapkan mampu menjamin keberlangsungan hidup korban selama masa tanggap darurat. Selanjutnya bantuan sosial seharusnya diarahkan untuk peningkatan perekonomian agar secara perlahan mampu beranjak dari garis kemiskinan.

Gambaran umum capaian indikator kinerja sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial berdasar Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut :



Tabel 3.26

Capaian Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Tahun 2018

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan		Indikator	2017	2018	
1	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial:					
	a.	Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/ Kota	1	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	93,72	97,16
	b.	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota	2	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	-	-
2	Penyediaan sarana dan prasarana sosial:					
	a.	Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten/kota	3	Presentase (%) panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	100	100
	b.	Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota	4	Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	100	100
3	Penanggulangan korban Bencana:					

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Indikator	2017	2018
	a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota	5 Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat korban bencana	100	100
	b. Evakuasi korban bencana skala Kabupaten/kota	6 Presentase (%) skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100
<b>4</b>	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial:			
	- Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota	7 Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa Indikator SPM Bidang Sosial meliputi 4 jenis pelayanan dasar dengan 7 indikator. Bila dicermati terdapat kesesuaian antara indikator kinerja kunci berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/313/OTDA tanggal 24 Januari 2011 dengan Indikator SPM Bidang Sosial, sehingga angka capaiannya pun juga tidak jauh berbeda. Untuk tahun 2019 SPM bidang sosial mengalami perubahan sesuai dengan Permensos Nomor 90 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada SPM bidang Sosial yang arah pelayanan adalah pemenuhan kebutuhan PMKS terlantar diluar panti dan Korban Bencana Alam.

### 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial pada tahun 2018 didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 75 orang PNS. Dari jumlah tersebut 55 orang PNS secara langsung melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, sedangkan 20 orang PNS lainnya melaksanakan fungsi penunjang dibidang kesekretariatan.

Dinas Sosial sampai dengan akhir tahun 2018 belum memiliki pejabat Fungsional Tertentu, meskipun demikian kebutuhan untuk Pejabat Fungsional Tertentu yaitu Pekerja Sosial. Jabatan Struktural yang ada di Dinas Sosial terdiri dari Esselon II

sejumlah 1 orang, Esselon III sebanyak 4 orang terdiri dari 1 orang Sekretaris dan 3 orang Kepala Bidang, serta Esselon IV sejumlah 13 orang. Jabatan yang masih kosong diantaranya 1 orang Kepala bidang karena Pensiun dan 3 Orang Kepala Seksi karena Pensiun dan Mengundurkan diri.

#### **4. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran yang disediakan untuk Dinas Sosial Tahun 2018 sebesar Rp. 10.456.317.438,00 sampai dengan akhir Desember 2018 berhasil terserap sebesar Rp. 8.716.566.733,00 (83,36%). Sisa anggaran yang tidak terserap tersebut berasal dari selisih penawaran dengan nilai kontrak, selisih antara realisasi dan target fisik yang harus dibayar.

#### **5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)**

Sarana dan Prasarana merupakan fasilitas penunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi. Sarana dan prasarana ini dapat dikelompokkan setidaknya dalam kelompok mesin terdiri dari kendaraan, peralatan kerja dan pendingin ruangan sedangkan yang bukan mesin meliputi tanah dan bangunan kantor, perlengkapan kantor dan peralatan bukan mesin lainnya. Semua peralatan tersebut saat ini tersedia dalam jumlah yang cukup dan kondisi yang baik sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Terkecuali untuk satu hal dalam pelayanan rehabilitasi medis dan sosial untuk penyandang penyakit sosial dan gelandangan psikotik, masih diperlukan adanya 1 (satu) unit mobil operasional untuk mengamankan dan merujuk ke lembaga rehabilitasi di samarinda.

#### **6. Permasalahan dan Solusi**

Secara umum pelaksanaan urusan wajib sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tidak menemui permasalahan, hal ini dibuktikan dengan rata-rata realisasi fisik dan keuangan setiap tahun yang berada pada angka diatas 90%. Namun demikian secara teknis pelaksanaan urusan wajib sosial, masih ditemukan beberapa kendala sebagai berikut :

- a. Kurangnya sumber daya manusia aparatur yang memiliki kualifikasi pendidikan dibidang ilmu kesejahteraan sosial ataupun profesi pekerjaan sosial. Hal ini menyebabkan adanya kesulitan dalam mengikuti perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial dan kebutuhan perkembangan tehnik pelayanan kesejahteraan sosial. Untuk mengatasi masalah ini telah dilakukan pengajuan kebutuhan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kualifikasi pendidikan sesuai kebutuhan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Pelaksanaan Program Bedah Rumah bagi Penduduk Miskin sangat membutuhkan kemampuan dalam menghitung kebutuhan bahan material secara baik dan benar. Secara khusus kemampuan teknis ini tidak dimiliki oleh aparatur Dinas Sosial akan tetapi program tersebut harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- c. Terjadinya defisit anggaran belanja daerah yang menyebabkan rasionalisasi anggaran belanja pada tahun 2017, sempat dirasakan sebagai sebuah gangguan dalam rencana pencapaian target kinerja pada tahun tersebut. Hal ini terbukti dengan tidak dapat tercapainya target kinerja berapa kegiatan. Ketika anggaran suatu kegiatan mengalami defisit maka solusi yang ditempuh

adalah mengurangi jumlah target penerima pelayanan atau mengurangi biaya penunjang kegiatan, sehingga diharapkan rencana target kinerja dapat tercapai.

Untuk mengatasi masalah ini solusi yang ditempuh adalah dengan cara :

- a. Membentuk tim perencana yang salah satu tugasnya adalah untuk merencanakan kebutuhan material secara baik dan dengan spesifikasi teknis yang layak. Anggota tim yang bertugas mengerjakan pekerjaan ini berasal dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Menyampaikan usulan kepada Bupati Kutai Kartanegara agar memberikan peran yang lebih besar kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah bagi Penduduk Miskin.

## 7. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Menyadari atas berbagai kelemahan dan kekurangan yang dimiliki Dinas Sosial dalam melaksanakan urusan wajib sosial, setidaknya beberapa hal berikut ini dapat memotivasi aparatur Dinas Sosial untuk berkinerja lebih baik lagi. Beberapa hal yang merupakan prestasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penghargaan berupa "Panji Kesejahteraan Sosial Award" dari Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur sebagai Kabupaten yang telah berhasil melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial dengan baik, yang diberikan bertepatan dengan peringatan ulang tahun Propinsi Kalimantan Timur.
2. Perhargaan berupa "Panji Keberhasilan dalam Bidang Penanganan Kemiskinan Tahun 2018 dari Bupati Kutai Kartanegara yang diberikan bertepatan dengan peringatan apel gabungan korpri di halaman Kantor Bupati Kutai Kartanegara.
3. Perhargaan berupa "Piagam Predikat Kepatuhan terhadap atas 2 Prodak Standar Pelayanan Publik dengan Tingkat Kepatuhan Tinggi, Kategori Zona Hijau" Tahun 2018 dari Bupati Kutai Kartanegara.

## B. RINGKASAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

### 7. URUSAN KETENAGAKERJAAN

#### DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

##### 1. Program dan Kegiatan

Urusan Program Nasional yang melekat di kementerian yang harus dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara ada 4 (empat) Program Nasional, yang terbagi 3 program nasional pada urusan wajib ketenagakerjaan dan 1 program nasional pada program pilihan ketransmigrasian, sebagai berikut :

- Urusan Wajib Ketenagakerjaan
  - 1) Program Peningkatan Kualitas Produktifitas Tenaga Kerja
  - 2) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
  - 3) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
- Urusan Pilihan Ketransmigrasian
  - 1) Program Pengembangan Wilayah Ketransmigrasian
  - 2) Program lainnya yang termasuk dalam urusan wajib ketenagakerjaan.

Untuk mendukung kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai

Kartanegara secara optimal, maka berbagai kegiatan yang belum tertampung dalam program pokok ketrasmigrasian dan ketenagakerjaan akan diupayakan untuk memperoleh tambahan dari program lain (sebagai tugas penunjang).

Pada tahun anggaran 2018 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh alokasi dana belanja sebesar Rp. 11.380.865.174.853,80 terdiri dari :

- a) Belanja tidak langsung (belanja pegawai) adalah sebesar Rp. 8.634.995.853,80
- b) Belanja langsung (belanja pegawai dan belanja barang dan jasa) adalah sebesar Rp. 2.745.869.321,00

Alokasi dana belanja langsung sebesar Rp. 2.745.869.321,00 adalah untuk melaksanakan, antara lain :

1. Tugas penunjang yang terdiri dari 3 program
2. Tugas pokok urusan wajib sebanyak 2 program
3. Urusan pilihan ketrasmigrasian 1 program

Dari program tersebut telah terealisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 2.159.746.138,00 atau sebesar 78,65 % dengan pencapaian fisik kegiatan sebesar 79,64 %

#### 2.1. Program Wajib Ketenagakerjaan

##### 1. Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan keterampilan, keahlian kompetensi tenaga kerja dan produktifitas sedangkan peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan kerja dan pengembangan ditempat kerja sebagai satu kesatuan sistem pengembangan sumber daya manusia.

Kegiatan pada program ini adalah :

- Kegiatan pelatihan keahlian/keterampilan tenaga kerja berbasis kompetensi

##### 2. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Tujuan program ini adalah untuk menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis melalui peningkatan pelaksanaan fungsi dan peranan sarana hubungan industrial bagi pelaku proses barang dan jasa.

Kegiatan pada program ini adalah :

1. Kegiatan pengupahan data hidup layak (KHL) dan penetapan upah minimum sektor kabupaten (UMK dan UMSK).
2. Kegiatan deteksi dini perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja.

#### 2.2. Program Pilihan Ketrasmigrasian

##### 1. Program Pengembangan Kawasan/Desa/Kimtrans

Program ini menitikberatkan pada penyelesaian berbagai permasalahan paska pengembangan wilayah transmigrasi.

##### 2. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Tujuan program ini adalah untuk pengembangan eks pertumbuhan transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu diantaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, kegiatan program ini adalah :

1. Kegiatan penyusunan rencana kawasan desa/kimtrans (RKT)

2. Kegiatan penyelesaian permasalahan untuk permukiman transmigrasi
- 2.3. Program lainnya yang termasuk dalam urusan wajib ketenagakerjaan
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
    1. Penyediaan Surat Menyurat,
    2. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
    3. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional;
    4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
    5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
    6. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
    7. Penyediaan Makanan dan minuman;
    8. Penyediaan jasa administrasi perkantoran;
    9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan;
    10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Luar Daerah;
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; ;
  - c. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan;
    1. Inventarisasi BMD
    2. Kegiatan penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga
  - d. Program Pengembangan Kawasan /Desa/ Kimtrans, dengan kegiatan;
    1. Kegiatan penyusunan rencana kawasan desa/kimtrans
    2. Identifikasi potensi penyelesaian permasalahan unit permukiman transmigrasi
  - e. Program peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, dengan kegiatan;
    1. Kegiatan pelatihan keahlian/ketrampilan tenaga kerja berbasis kompetensi
  - f. Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dengan kegiatan;
    1. Kegiatan Pengumpulan data kebutuhan hidup layak (KHL) dan penetapan upah minimum sector kabupaten (UMK dan UMSK);
    2. Kegiatan deteksi dini perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja;

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dibidang ketenagakerjaan pada tahun 2018, dari jumlah penduduk 752.091 jiwa terdapat angkatan kerja (AK) saat ini sebesar 340.338 dengan penduduk usia kerja/DUK (15-16 tahun) sebanyak 540.658 jiwa. Dengan melihat jumlah tersebut maka tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) saat ini menunjukkan angka 62,95 %, jika dilihat dari sisi pengangguran terbaru di tahun 2018 menunjukkan angka 19.475 jiwa, angka ini mengalami penurunan dan dari tahun sebelumnya 20.302 jiwa.

Jumlah pencari kerja terdaftar pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja hingga tahun 2018 adalah sebanyak 18.592 orang yang berhasil ditempatkan sebanyak 10.940 orang sehingga masih terdapat pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan sebesar 6.534 orang.

Disisi lain penyelesaian permasalahan kasus perselisihan hubungan industrial (PHI) yang didaftarkan pada tahun 2018 ini sebanyak 107 dan mampu diselesaikan

dengan penjanjian hubungan industrial bersama sebanyak 94 kasus.

**Tabel 3.27**  
Capaian Indikator Makro Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian  
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Makro	Satuan	Tahun		Keterangan
			2017	2018	
	<b>Ketenagakerjaan</b>				
1.	Penduduk 15 tahun keatas (PUK)	jiwa	524.180	540.658	
2.	Angkatan Kerja	Orang	377.624	340.338	
3.	Kesempatan Kerja	%	94,62	94.28	
4.	Jumlah Pengangguran	Orang	20.302	19.473	
5.	PHK	Kasus	123	107	
6.	Jumlah Tenaga Kerja PHK	Orang	1.168	767	
7.	Rata rata Kebutuhan Hidup Layak	Rupiah	2.331.363,00	2.515.663,50	
8.	Pencari Kerja	Orang	13.638	18.592	
	<b>Ketransmigrasian</b>				
9.	Transmigrasi Baru	Orang	0	0	
10.	Transmigrasi Swakarsa	Orang	24.492	24.492	Normalisasi

**3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

**Tabel.3.28**  
Jumlah Pegawai ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2018

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI					JABATAN STRUKTURAL				JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	
		PNS GOLONGAN					ESSELON					
		IV	III	II	I	THL	JML	II	III	IV		NON ESSELON
1	S3											
2	S2	5					5		1	4		
3	S1	4	26			15	45	0	3	9	12	6
4	DIPLOMA		4	1			5			1	4	
5	SLTA		16	36		14	66				52	
6	SLTP					1	1					
7	SD					2	1					

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI				JABATAN STRUKTURAL				JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU		
		PNS GOLONGAN				THL	JML	ESSELON			NON ESSELON	
		IV	III	II	I			II	III			IV
<b>JUMLAH PEGAWAI</b>		9	46	37	0	31		0	4	14	68	6
<b>JUMLAH PNS</b>		<b>92</b>						<b>92</b>				

#### 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2018 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh Pagu Anggaran (APBD-P) adalah sebesar Rp. 11.380.865.174,80,- yang meliputi anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 8.634.995.853,80,- Dan belanja langsung sebesar RP. 2.745.869.321,00,- meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dengan realisasi anggaran tahun 2018 adalah sebesar Rp. 10.488.098.954,-

#### 5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

**Tabel 3.29**  
Kesesuaian RPJMD dengan Program/Kegiatan

Ko de	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Dana		Kesesuaian	
		Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Ya	Tidak
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya pelayanan publik</b>	<b>Meningkatnya pelayanan publik</b>			<b>1.100.945.200,00</b>	<b>1.100.945.200,00</b>		
1.	Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah meterai dan perangko yang disediakan	Jumlah meterai dan perangko yang disediakan	212 lbr	212 lbr	1.000.000,00	1.000.000,00	√	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayar	Jumlah Rekening yang dibayar	12 bln/rekening	12 bln/rekening	149.983.680,00	149.983.680,00	√	
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Oprasional	Jumlah Jasa KIR dan Pajak Kendaraan Dinas	Jumlah Jasa KIR dan Pajak Kendaraan Dinas	33 unit	33 unit	22.400.000,00	22.400.000,00	√	
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya kebutuhan dasar oprasional unit kerja SKPD dalam mendukung Tupoksi	Terpenuhinya kebutuhan dasar oprasional unit kerja SKPD dalam mendukung Tupoksi	167 org/bln	167 org/bln	146.716.000,00	146.716.000,00	√	



Ko de	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Dana		Kesesuaian	
		Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Ya	Tidak
5.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peraklatan Kerja Kantor	Jumlah Peraklatan Kerja Kantor	173 unit/pkt	173 unit/pkt	3.000.000,00	3.000.000,00	√	
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jumlah ATK yang disediakan	62 jenis	62 jenis	70.000.000,00	70.000.000,00	√	
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	43 buah/pkt/rol	43 buah/pkt/rol	5.000.000,00	5.000.000,00	√	
8.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor	Jumlah peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor	14 jenis	14 jenis	8.000.000,00	8.000.000,00	√	
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Aparatur dan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Aparatur dan Tamu	515 ktk/porsi/dos	515 ktk/porsi/dos	14.650.000,00	14.650.000,00	√	
10.	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Non PNS	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Non PNS	31 orang	31 orang	344.795.520,00	344.795.520,00	√	
11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	18 jenis brg cetakan	18 jenis brg cetakan	35.400.000,00	35.400.000,00	√	
12.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar dan Dalam Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	513 orang	513 orang	300.000.000,00	300.000.000,00	√	
	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kerapian, kebersihan dan keselamatan Pegawai</b>	<b>Meningkatnya kerapian, kebersihan dan keselamatan Pegawai</b>			<b>288.350.000,70</b>	<b>288.350.000,00</b>		

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Dana		Kesesuaian	
		Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Ya	Tidak
13	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan	Jumlah kendaraan	29 unit	29 unit	288.350.000,00	288.350.000,00	√	
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD dalam mendukung tupoksi</b>	<b>Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD dalam mendukung tupoksi</b>			<b>478.863.850,00</b>	<b>478.863.850,00</b>		
14	Inventarisasi BMD	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja pada OPD	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja pada OPD	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	√	
15	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada pihak ketiga	Jumlah fasilitasi penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga	Jumlah fasilitasi penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga	1 rekana	1 rekana	428.863.850,00	428.863.850,00	√	
	<b>Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas</b>	<b>Cakupan pencaker yang dilatih berbasis kompetensi di 9 KLU</b>	<b>Cakupan pencaker yang dilatih berbasis kompetensi di 9 KLU</b>			<b>421.710.271,00</b>	<b>421.710.271,00</b>		
16	Kegiatan pelatihan keahlian/keterampilan tenaga kerja berbasis kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi	99 orang	99 orang	421.710.271,00	421.710.271,00	√	

Ko de	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Dana		Kesesuaian	
		Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Ya	Tidak
	<b>Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</b>	<b>Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama</b>	<b>Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama</b>			<b>106.000.000,00</b>	<b>106.000.000,00</b>		
17	Pengumpulan data kebutuhan hidup layak (KHL) dan penetapan upah minimum sector kabupaten (UMK dan UMSK)	Survey 7 pasar 18 kecamatan	Survey 7 pasar 18 kecamatan	4dokumen	4 dokumen	76.000.000,00	76.000.000,00	√	
18	Kegiatan Deteksi Dini Perselisihan Hubungan Industrial dan mogok kerja	Jumlah dokumen kerawanan Hi di perusahaan	Jumlah dokumen kerawanan Hi di perusahaan	50 laporan	50 laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	√	
	<b>Program Pengembangan kawasan/ desa/kimtrans</b>	<b>Jumlah kawasan/ desa /kimtrans yang ditata dibangun</b>	<b>Jumlah kawasan /desa /kimtrans yang ditata dibangun</b>			<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>		
19	Kegiatan Penyusunan Rencana Kawasan Desa/Kimtras (RKT)	Jumlah kajian/pencanaan pengembangan kawasan transmigrasi menjadi kimtrans/desa mandiri	Jumlah kajian/pencanaan pengembangan kawasan transmigrasi menjadi kimtrans/desa mandiri	1 kawasan	1 kawasan	300.000.000,00	300.000.000,00	√	

Ko de	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Dana		Kesuksesan	
		Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Ya	Tidak
20	Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Untuk Permukiman Transmigrasi	Jumlah masalah yang diselesaikan	Jumlah masalah yang diselesaikan	1 kasus/masalah	1 kasus/masalah	50.000.000,00	50.000.000,00	√	
						2.745.869.321,00	2.745.869.321,00		

## 6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Sampai dengan tahun 2018 Prasarana Kantor telah dibangun hanya kekurangan sarana kerja berupa kekurangan meubelair, AC, Komputer PC dan Printer, Rumah Genset, Turap sebelah barat dan pekerjaan taman, Penambahan tempat parkir dengan membangun/ memperluas pasangan paving dan pembuatan kanopy.

## 7. Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2018 pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 18.592 orang yang berhasil ditempatkan adalah sebanyak 12.238 orang (65,82 %) dan sisanya sebanyak 6.534 orang merupakan tenaga kerja yang belum mendapat pekerjaan /menganggur, hal ini disebabkan karena :

1. Adanya Perusahaan yang sudah melakukan penempatan tenaga kerja tetapi tidak menyampaikan laporan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Dari sisi pemerintahan, Organisasi Perangkat Daerah yang mendapat kontrak kerja dari kontraktor tidak menyampaikan penempatan tenaga kerja/karyawan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
3. Masih terbatasnya peluang kerja atau kesempatan kerja yang tersedia, sehingga belum mampu mengimbangi jumlah angkatan kerja di Kutai Kartanegara.

Disisi lain masih rendahnya kualitas SDM tenaga kerja lokal yang mengakibatkan sulitnya bersaing mengisi sejumlah lowongan pekerjaan yang tersedia disektor formal, pemerintah maupun swasta yang banyak menggunakan teknologi tinggi dalam operasi kerjanya. Hal ini berarti terbatasnya tenaga kerja lokal yang mampu bersaing dengan SDM tenaga kerja dari luar (baik dalam negeri maupun dalam negeri). Solusi yang diambil adalah meningkatkan cakupan Tenaga Kerja yang dilatih melalui program peningkatan kesempatan dan produktifitas tenaga kerja lokal dan program peningkatan kesempatan kerja .

Angka pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara meningkat. Alternatif pemecahan masalah yaitu memberikan keterampilan kepada para tenaga kerja produktif yang masih belum mendapatkan pekerjaan dan harapan mereka bisa membuka lapangan pekerjaan baru (UKM) melalui program perluasan kesempatan

kerja dengan kegiatan :

- Pelatihan keahlian/keterampilan tenaga kerja berbasis kompetensi
- Pelatihan produktif tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja

Jumlah pendatang dan pecahan Kepala Keluarga (KK) yang bermukim di 47 desa eks permukiman transmigrasi sebanyak 6.112 KK.

Alternatif pemecahan masalah, dengan luasan sisa HPL transmigrasi sebesar 41.398 ha masih memungkinkan untuk dikembangkan menjadi kawasan ekonomi baru dengan pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan. Dengan penempatan transmigrasi dan penduduk setempat sebanyak 15.300 KK, dengan kegiatan :

- a) Penyusunan Rencana Kawasan Desa/Kimtrans (RKT)
- b) Penyusunan Rencana Tata Ruang SP ( satuan permukiman)
- c) Penyusunan Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP)
- d) Pengurusan /Penjelasan sertifikat lahan usaha transmigrasi.
- e) Rancang kapling.

## 8. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Pada Tahun 2018 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat penghargaan dari Gubernur Kalimantan Timur berupa Piagam Penghargaan Terbaik II Bidang Ketenagakerjaan.

Isu strategis kedepan yang dihadapi oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah masalah pengangguran dan terdapat pecahan kepala keluarga Transmigran Swakarsa Mandiri Gerbang Raja), sebagai berikut :

- A. Isu-isu strategis bidang Ketenagakerjaan :
  1. Tenaga kerja yang belum ditempatkan belum memperoleh pekerjaan sebanyak 6.534 orang.
  2. Penyelesaian permasalahan kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang didaftar pada Tahun 2018 sebanyak 107 kasus dan mampu diselesaikan perselisihan secara Bipartit 30 kasus, melalui perselisihan secara mediasi 13 kasus dan perselisihan melalui anjuran 64 kasus, walaupun sudah 100 % dapat difasilitasi oleh Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja namun masih ada perselisihan yang timbul akibat masih banyaknya perusahaan yang tidak mendaftarkan peraturan perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama.
- B. Isu-isu strategis di bidang Ketransmigrasian :
  1. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kutai Kartanegara masih banyak tergantung dengan pasokan dari daerah lain.
  2. Pembangunan di pedesaan relatif kurang berkembang yang diakibatkan masih minimnya infrastruktur (Jalan, Jembatan, sarana prasarana).
  3. Telah banyak pecahan Kepala Keluarga + 24.450 Jiwa (Transmigrasi swakarsa Mandiri Gerbangraja) yang menempati lahan HPL Transmigrasi
  4. Belum tercipta fungsi kota di kawasan pedesaan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
  5. Dari sisi kewilayahan, angka kemiskinan terbesar terkonsentrasi di wilayah pedesaan.
  6. Seperti dilansir Badan Pusat Statistik (2013), daerah pedesaan memiliki indeks kedalaman kemiskinan lebih tinggi daripada perkotaan. Penyebab tingginya angka kemiskinan di pedesaan adalah tingginya jumlah

penduduk di pedesaan yang bekerja disektor informal-pertanian.

## 8. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEEMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A)

### 1. Program dan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara melalui beberapa program kegiatan yaitu:

**Tabel.3.30**

Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018

No	Program dan Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi Keuangan		TERTIMBANG		SISA ANGGARAN
			(Rp)	%	FISIK %	KEU %	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>756.332.650</b>	<b>714.987.812</b>	<b>94,53</b>	<b>30,71</b>	<b>24,30</b>	<b>41.344.838</b>
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12.000.000	11.977.440	99,81	0,41	0,41	22.560
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.550.000	8.261.000	96,62	0,29	0,28	289.000
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	130.576.800	127.676.800	97,78	4,44	4,34	2.900.000
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.000.000	10.000.000	100,00	0,34	0,34	-
5	Penyediaan alat tulis kantor	75.000.000	74.835.000	99,78	2,55	2,54	165.000
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.336.000	4.632.000	73,11	0,22	0,16	1.704.000
7	Penyediaan bahan logistik kantor	5.000.000	5.000.000	100,00	0,17	0,17	-
8	Penyediaan makanan dan minuman	25.000.000	23.700.000	94,80	0,85	0,81	1.300.000
9	Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	218.306.880	217.464.400	99,61	7,42	7,39	842.480
10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.562.970	5.562.970	100,00	0,19	0,19	-
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	260.000.000	225.878.202	86,88	13,84	7,68	34.121.798

No	Program dan Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi Keuangan		TERTIMBANG		SISA ANGGARAN
			(Rp)	%	FISIK %	KEU %	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Fasilitasi Memperingati Hari-hari Besar tertentu (Pameran)	-	-		-	-	-
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>98.628.550</b>	<b>98.162.275</b>	<b>99,53</b>	<b>3,35</b>	<b>3,34</b>	<b>466.275</b>
13	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	57.051.200	56.884.925	99,71	1,94	1,93	166.275
14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	41.577.350	41.277.350	99,28	1,41	1,40	300.000
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>262.651.700</b>	<b>262.451.700</b>	<b>99,92</b>	<b>8,93</b>	<b>8,92</b>	<b>200.000</b>
15	Penyusunan Dokumen Rencana Laporan Keuangan dan Kinerja	14.538.800	14.338.800	98,62	0,49	0,49	200.000
16	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga	248.112.900	248.112.900	100,00	8,43	8,43	-
	<b>Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>300.000.000</b>	<b>275.733.527</b>	<b>91,91</b>	<b>10,20</b>	<b>9,37</b>	<b>24.266.473</b>
17	Fasilitasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	100.000.000	75.768.927	75,77	3,40	2,57	24.231.073
18	Rapat Koordinasi PP dan PA	200.000.000	199.964.600	99,98	6,80	6,80	35.400
	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>1.060.000.000</b>	<b>983.509.302</b>	<b>92,78</b>	<b>36,02</b>	<b>33,42</b>	<b>76.490.698</b>
19	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	275.000.000	262.619.152	95,50	9,35	8,92	12.380.848
20	Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan ( Jabatan	50.000.000	50.000.000	100,00	1,70	1,70	-

No	Program dan Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi Keuangan		TERTIMBANG		SISA ANGGARAN
			(Rp)	%	FISIK %	KEU %	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Politik dan Jabatan Publik)						
21	Penguatan Pokja PUG	175.000.000	171.897.750	98,23	5,95	5,84	3.102.250
22	Penyusunan Data Terpilah Gender	110.000.000	109.532.500	99,58	3,74	3,72	467.500
23	Fasilitasi Forum anak (Pengarutamaan Hak anak)	50.000.000	50.000.000	100,00	1,70	1,70	-
24	Pembinaan Desa Gender	150.000.000	111.602.800	74,40	5,10	3,79	38.397.200
25	Fasilitasi Hari Besar Anak	50.000.000	46.128.800	92,26	1,70	1,57	3.871.200
26	Penguatan Kelembagaan PUG dengan Perguruan Tinggi Pusat studi Gender dan Organisasi Masyarakat	200.000.000	181.728.300	90,86	6,80	6,18	18.271.700
	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	<b>65.000.000</b>	<b>38.350.000</b>	<b>59,00</b>	<b>1,18</b>	<b>1,30</b>	<b>26.650.000</b>
27	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	65.000.000	38.350.000	59,00	1,18	1,30	26.650.000
	<b>Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</b>	<b>100.000.000</b>	<b>64.147.600</b>	<b>64,15</b>	<b>3,40</b>	<b>1,66</b>	<b>35.852.400</b>
28	Pembinaan Organisasi Perempuan	100.000.000	48.747.100	48,75	3,40	1,66	51.252.900
	<b>Program Pemenuhan Hak-Hak Anak</b>	<b>185.000.000</b>	<b>116.533.200</b>	<b>62,99</b>	<b>4,50</b>	<b>3,96</b>	<b>68.466.800</b>
29	Sosialisasi masalah sosial anak	60.000.000	18.420.600	30,70	1,02	0,63	41.579.400
30	Fasilitasi Penanganan masalah kekerasan terhadap anak	75.000.000	49.252.600	65,67	1,78	1,67	25.747.400
31	Fasilitasi Forum ABK	50.000.000	48.860.000	97,72	1,70	1,66	1.140.000
	<b>Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan</b>	<b>115.000.000</b>	<b>112.530.000</b>	<b>97,85</b>	<b>3,91</b>	<b>3,82</b>	<b>2.470.000</b>



No	Program dan Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi Keuangan		TERTIMBANG		SISA ANGGARAN
			(Rp)	%	FISIK %	KEU %	
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Kelompok Usaha Bersama Perempuan (KUBP)	115.000.000	112.530.000	97,85	3,91	3,82	2.470.000
		<b>2.942.612.900</b>	<b>2.666.405.416</b>	<b>90,61</b>	<b>102,19</b>	<b>90,09</b>	<b>276.207.484</b>

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Standar Pelayanan Minimal Bidang Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 dengan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yaitu jenis 5 pelayanan yaitu :

1. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, dengan Indikator sebagai berikut :
  - a. Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh Petugas Terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu
  - b. Cakupan ketersediaan petugas di Unit Pelayanan Terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindak lanjuti pengaduan / laporan masyarakat.
2. Pelayanan kesehatan bagi anak dan perempuan korban kekerasan, dengan indikator :
  - a. Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas mampu tatalaksanaan dan PPT/PKT di Rumah Sakit
  - b. Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
  - c. Cakupan RSUD Vertical / RSUD /RS Swasta / RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan.
  - d. Cakupan Tenaga Kesehatan Terlatih tentang tata laksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Puskesmas.
  - e. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di rumah sakit.
3. Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan, dengan indikator:
  - a. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.
  - b. Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih.

- c. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayan terpadu.
  - d. Cakupan petugas bimbingan rohani terlatih dalam melakukan bimbingan rohani.
4. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikator :
    - a. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
    - b. Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian,
    - c. Cakupan ketersediaan unit pelayanan perempuan dan anak ( UPPA ) di Polda dan Polres.
    - d. Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA,
    - e. cakupan ketersediaan Polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitive gender.
    - f. Cakupan ketersediaan Jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
    - g. Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menangani perkara kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
    - h. Cakupan Perempuan dan Anak kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum.
    - i. Cakupan ketersediaan Petugas Pendamping Hukum atau Advokad yang mempunyai kemampuan Pendampingan pada saksi dan atau korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
  5. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan dengan indikator :
    - a. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
    - b. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
    - c. Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial.

Target SPM yang telah ditentukan oleh kementerian PP & PA sebesar 100% sampai dengan tahun 2016 pelayanan terpadu bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan yang dilaksanakan oleh Dinas PP dan PA sampai dengan tahun 2017 dengan jenis pelayanan sebagai berikut :

- a. Jenis Pelayanan I. tahun 2016 sebesar 29,42 %
- b. Jenis Pelayanan ke 2. Tahun 2016 sebesar 33,4%
- c. Jenis Pelayanan ke 3 tidak ada Realisasi dikarenakan jenis Pelayanan ini yang melaksanakan adalah dinas sosial
- d. Jenis Pelayanan ke 4. Tahun 2016 dengan cakupan dengan cakupan diantaranya :
  - ✓ Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebesar 100%

- ✓ Cakupan Penyelesaian Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kepolisian sebesar 100%,
- ✓ Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan dan anak sebesar 30,9%,
- ✓ Cakupan ketersediaan pendamping hukum dan advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saat kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 9,5%.

### **3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Jumlah Pegawai dilingkungan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara adalah berjumlah 62 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Berjumlah 62 Orang dan Tenaga Tidak Tetap Daerah berjumlah 20 Orang.

### **4. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Dalam rangka Pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2018, serta Alokasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan dukungan dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.942.612.900,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.666.405.416,- atau presentase sebesar 90,61%.

### **5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)**

Penerapan pelaksanaan program, kebijakan dan sasaran sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategik tahun 2017 diatas tidak akan berjalan dengan baik bila tidak didukung dengan faktor-faktor tertentu. Faktor pendukung pelaksanaan kegiatan ini seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, tingkat kepedulian masyarakat, alokasi anggaran yang tepat, pelaksanaan dilapangan, kondisi sarana dan prasarana yang memadai dan faktor-faktor lainnya yang dapat mendukung proses penerapan perencanaan pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Belum terpenuhinya sarana dan prasarana diantaranya adalah :

- a. Ruang untuk menyimpan barang rusak berat belum dimiliki.
- b. Ruang untuk menyimpan alat tulis kantor/persediaan belum ada.
- c. Ruang khusus menyimpan berkas/dokumen/dokumen pertanggungjawaban belum ada.
- d. Ruang rapat masih berstatus ruang rapat bersama dengan Dinas Ketahanan Pangan.
- e. Pendingin kantor berasal dari pendingin sentral yang dikelola oleh BPKAD, saat ini pendingin tidak berjalan optimal, sehingga ada beberapa ruangan yang terasa tidak nyaman.
- f. Masih kekurangan sumber daya manusia yang memiliki keahlian psikologi untuk membantu korban kekerasan yang perlu penanganan secara psikologi.

## 6. Permasalahan dan Solusi

Sebagaimana telah diuraikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan program yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada. Namun dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut masih dirasakan adanya kendala dan permasalahan, sebagai berikut :

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada, baik itu kelengkapan bekerja dan kenyamanan ruangan
2. Masih maraknya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
3. Surat penyediaan dana (SPD) terbit terlambat sehingga PPTK tidak berani merencanakan waktu pelaksanaan kegiatan.
4. Belum adanya tempat/rumah yang layak buat menampung sementara terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Pagu anggaran yang kecil sehingga belum bisa dilakukan kegiatan-kegiatan yang memerlukan dana yang besar untuk bisa mengurangi kekerasan ataupun penanganan kekerasan sampai tingkat desa.

Pada pelaksanaannya dilapangan, solusi yang diambil Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

1. Dengan mengalokasikan dana yang tepat untuk program dan kegiatan
2. Perlunya sarana dan prasarana untuk petugas lapangan guna menunjang program dan kegiatan baik program Kabupaten maupun program secara nasional yang merata dari wilayah kecamatan hingga ke desa-desa.
3. Memperbanyak kegiatan sosialisasi tentang Undang-Undang RI Nomor 33/2014 dan perubahan atas RUU RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di satuan Pendidikan SD/SMP/MTSN/SMA/SMK serta memperbanyak penyebaran pamflet, Visualisasi melalui media massa, TV, Radio, koran serta baleho dan penyebaran poster di Kecamatan

## 7. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

1. Pada tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat yaitu Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2018 Kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
2. Pada tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat yaitu Penghargaan APE (Anugerah Parahita Ekapraya) Tahun 2018 Kategori Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

## 9. URUSAN PANGAN

### DINAS KETAHANAN PANGAN

#### 1. Program dan Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan urusan wajib pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik.
  - b. Indikator ini menghasilkan capaian kinerja ini adalah 100,00% yang bermakna baik, dimana target rekening telepon dan internet dari target 2 rekening dapat di realisasikan sebanyak 2 rekening selama 12 bulan.
  - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
  - d. Capaian kinerja dari indikator Jasa Administrasi Keuangan SKPD dapat dilaksanakan secara penuh dimana sebanyak 12 orang selama 12 bulan telah membantu dalam administrasi keuangan SKPD sehingga berkategori 100% yang bermakna baik sekali.
  - e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
  - f. Capaian kinerja indikator Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dilaksanakan secara penuh yaitu target dan sasaran telah terealisasi sesuai dengan target sebanyak 4 jenis servis peralatan kerja sehingga berkategori 100% yang bermakna baik sekali.
  - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
  - h. Capaian kinerja indikator Alat Tulis Kantor dapat dilaksanakan secara penuh yaitu target dan sasaran telah terealisasi dengan baik sehingga berkategori 100% yang bermakna baik sekali. Target alat tulis kantor sebanyak 30 (tiga puluh) jenis untuk keperluan selama 12 bulan telah terealisasi sehingga aktivitas kerja berjalan dengan baik dan lancar.
  - i. Penyediaan Makanan dan Minuman
  - j. Capaian kinerja pada indikator makanan dan minuman rapat yang dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara, mencapai kinerja 100% yang bermakna baik sekali, target pada indikator telah sesuai realisasi dari target sebanyak 480 porsi (kotak) terealisasi seluruhnya.
  - k. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - l. Capaian kinerja Barang Cetak dan Penggandaan Dokumen dapat dilaksanakan secara penuh yaitu target dan sasaran telah terealisasi dengan baik sehingga berkategori 100% yang bermakna baik sekali. Sebanyak 6 jenis cetakan telah terlaksanakan.
  - m. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi di Dalam Daerah dan Luar Daerah  
Capaian kinerja indikator Perjalanan Dinas Mengikuti Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah dapat dilaksanakan secara penuh yaitu dalam 1 (satu) paket perjalanan telah terlaksana seluruhnya sehingga target dan sasaran telah terealisasi dengan baik sehingga berkategori 100% yang bermakna baik sekali.
  - n. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
  - o. Capaian kinerja pada indikator ini adalah 100% yang bermakna baik sekali,

target pada indikator telah realisasi seluruhnya yaitu sebanyak 35 orang telah dibayarkan honorinya .

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
  - a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Operasional  
 Capaian kinerja indikator Pemeliharaan Mobil Jabatan/Operasional dapat dilaksanakan secara penuh dari target sebanyak 2 unit (Mobil Kepala Dinas dan Sekretaris) selama 12 bulan telah terealisasi 2 unit selama 12 bulan, maka target dan sasaran telah terealisasi dengan baik sehingga berkategori 100% yang bermakna baik sekali.
3. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian dan Perkebunan)
  - a. Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah.  
 Capaian kinerja Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah dapat dilaksanakan secara penuh yaitu target dan sasaran telah terealisasi dengan baik. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Integrasi Pembangunan Ketahanan Pangan telah dilaksanakan 2 kali Rapat Koordinasi Dinas Ketahanan Pangan, 2 kali Rapat Kelompok Kerja Teknis Dinas Ketahanan Pangan 2 kali, Rapat Kelompok Kerja Ahli Dinas Ketahanan Pangan 2 kali dan Rapat Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan 2 kali, sesuai target 8 (delapan) pertemuan (Rapat Koordinasi) sehingga berkategori 100% yang bermakna baik sekali.
  - b. Survey Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi  
 Capaian kinerja indikator Keragaman Konsumsi Pangan Masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan Survei Pola Pangan Harapan (PPH) yang diawali dengan pembekalan petugas survei, pelaksanaan survei sebanyak 540 responden (kepala keluarga) secara penuh yaitu target dan sasaran telah terealisasi dengan baik. Sebanyak 1 (satu) Dokumen laporan hasil survei pola pangan harapan terbuat yang berisi tentang kondisi pola konsumsi pola pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga berkategori 100% yang bermakna baik sekali untuk bahan perencanaan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
  - c. Penyusunan Neraca Bahan Makanan  
 Capaian Kinerja Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan (PPH) Ketersediaan dapat dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan. Target dan sasaran telah terealisasi dengan baik. Sebanyak 1 (Satu) Dokumen Neraca Bahan Makanan telah disusun, berisi tentang Penyediaan pangan Dalam Negeri, Pemakaian Pangan dalam Negeri dan Ketersediaan Pangan Perkapita. Telah disusun sesuai target 100% yang bermakna baik sekali untuk bahan perencanaan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
  - d. Pelatihan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)  
 Capaian kinerja Pelatihan Kawasan Rumah Pangan Lestari dapat meningkatkan pengetahuan para kelompok wanita tani sehingga secara penuh dengan melakukan pelatihan kepada 80 peserta kelompok wanita tani yang dilaksanakan pada 2 Kecamatan dan terlaksana 100% sehingga bermakna baik sekali.

- e. Pengembangan Promosi Konsumsi Pangan B2SA Berbasis Sumber Daya Lokal.  
Capaian kinerja Pengembangan promosi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dapat dilaksanakan secara penuh yaitu melalui pembinaan kepada Kelompok Wanita Tani dengan keikutsertaan dan pendampingan Lomba Cipta Menu di Provinsi Kalimantan Timur dan Hari Pangan Sedunia di Provinsi Kalimantan Selatan sehingga berkategori 100% yang bermakna baik sekali.
- f. Pengembangan Pangan Lokal.  
Capaian Kinerja Pengembangan Pangan Lokal dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditentukan yaitu pengolahan pangan lokal pelatihan 40 orang peserta Kelompok Wanita Tani yang ada di 2 Desa dan 2 Kecamatan yang terlaksana 100 % sehingga bermakna baik sekali.
- g. Pengujian Pangan Segar  
Capaian kinerja Pengujian Pangan Segar dapat dilaksanakan secara penuh yaitu target Pengujian Pangan Segar dengan pengambilan 63 jenis sample dan pengadaan alat test kit berupa Rafid Test Kit (alat uji cepat) yang dilaksanakan 5 Kecamatan tersebut sehingga berkategori 100% yang bermakna baik sekali.
- h. Pengembangan Media Informasi Keamanan Pangan  
Capaian kinerja Pengembangan Media Informasi Keamanan Pangan dapat dilaksanakan secara penuh dengan sosialisasi melalui media diantaranya iklan layanan masyarakat yang dilaksanakan 50 kali dalam 5 bulan dan Pemasangan spanduk keamanan pangan di 7 (tujuh) Kecamatan masing-masing sekali, pembuatan leaflet keamanan pangan 2 judul sebanyak 1000 lembar dan terlaksana 100% sehingga bermakna baik sekali.

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Hasil Pengukuran capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 antara target dan realisasi. Semua target kinerja dapat terealisasi dengan baik. Capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 3.31**  
Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018

No	Sararan Stategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2017	Tahun 2018		
				Target	Realisasi	%
1	Dipertahankannya Ketersediaan Pangan Utama	Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kpt/Th)	118,87	131,35	135,05	103,32
		Ketersediaan Pangan Utama (Skor PPH Ketersediaan)	91,30	94,27	88,41	96,06
2	Dipertahankannya Ketersediaan Konsumsi Keamanan Pangan Segar	Konsumsi Pangan Berbasis Pola Pangan Harapan	90,00	92,20	89,20	97,06



No	Sararan Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2017	Tahun 2018		
				Target	Realisasi	%
		Penanganan Keamanan Pangan Segar	86,24	85,00	87,30	103,93

Pengukuran kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang pada tabel di atas. Pada akhir Tahun 2018 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan yaitu Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat dengan indikator sebagai berikut :

a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

Capaian indikator kinerja Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan di masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara ditargetkan sebesar 94,27. Sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai sebesar 84,26 atau sebesar 91,55% dari target yang ditentukan.

Tidak tercapai target PPH tersebut di atas dikarenakan adanya perubahan standar nasional (justification) angka kecukupan energi (AKE) dari 2200 kkal/kap/hari menjadi 2400 kkal/kap/hari berdasarkan Widya Karya Pangan dan Gizi Nusantara (WKPGN) Tahun 2012. Capaian skor PPH ketersediaan 80,72 jika di konversikan kedalam AKE 2200 kkal/kap/hari maka akan diperoleh skor PPH ketersediaan sebesar 88,41 atau mencapai 93,78 dari target yang telah ditentukan.

Tidak tercapainya target kinerja dikarenakan ketersediaan data untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan kurang mencukupi, hal ini karena dukungan dana untuk pengumpulan data pada tahun ini tidak tersedia.

Ada beberapa kegiatan pendukung dalam capaian skor PPH yang dilakukan pada tahun ini adalah sebagai berikut;

1) Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah

Dewan Ketahanan Pangan Daerah adalah wadah koordinasi antar instansi terkait dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara, terdiri dari kegiatan rapat rapat dengan agenda utama rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. Melalui koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas yang baik akan terwujud ketahanan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan.

2) Penyusunan Neraca Bahan Makanan

Capaian kinerja ketersediaan pangan diukur dengan indikator ketersediaan, dokumen laporan tentang informasi tingkat ketersediaan bahan makanan di suatu wilayah/daerah secara menyeluruh yang digambarkan melalui Neraca Bahan Makanan (NBM).

Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah tabel yang memberikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan/pengadaan dan penggunaan/pemanfaatan pangan di suatu wilayah/daerah yang menyajikan jumlah pangan yang tersedia untuk konsumsi penduduk per kapita dalam kg/thn atau gr/hr serta dalam bentuk zat gizi tertentu yaitu kalori (kkal/hari), protein (gram/hari) dan (lemak/hari).



Penyusunan NBM tahun 2018 dilakukan oleh tim penyusun NBM Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan tugas pokok meliputi: pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta laporan NBM tahun 2017 (angka tetap/atap) dan NBM tahun 2018 (angka sementara/asem), sebagaimana terlampir.

Dari analisa data didapat bahwa skor Pola Pangan Harapan ketersediaan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017 skor mencapai sebesar 91,30%, dan skor Tahun 2018 sebesar 88,41%. Penurunan angka PPH tersebut di atas dikarenakan adanya perubahan standar nasional (justification) angka kecukupan energi (AKE) dari 2200 kkal/kap/hari menjadi 2400 kkal/kap/hari berdasarkan Widya Karya Pangan dan Gizi Nusantara (WKPGN) Tahun 2012.

b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pada tahun 2017 capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 90,00.

Untuk meningkatkan skor PPH di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka melalui kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Pengembangan Promosi Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Sumber Daya Lokal.

Untuk mengetahui pola konsumsi yang baik berdasarkan kaidah Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) diperlukan pengukuran atau pendataan survei (recall 2 x 24 jam) aktivitas konsumsi pangan masyarakat, dalam kondisi sumber daya (waktu, personil dana, dll) yang cukup maka pengukuran dapat dilakukan dengan sensus, namun dengan keterbatasan sumber daya maka pengukuran dapat dilakukan dengan metode survey yang dikenal dengan Survei Pola Pangan Harapan

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.

2) Pengembangan Pangan Lokal.

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pangan Lokal adalah untuk memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang diindikasikan dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Kegiatan Pengembangan Pangan Lokal, selain ditujukan untuk meningkatkan skor PPH dan menurunkan konsumsi beras, juga meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan, mendorong pengembangan usaha pangan skala UMKM sumber karbohidrat non beras non terigu berbasis sumber daya dan kearifan lokal, serta berperan positif dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja sesuai potensi daerah.

Ada beberapa kegiatan yang tidak dilakukan seperti Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk tetap mengirimkan wakil pada Lomba Cipta Menu

Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Tingkat Provinsi telah dikirim peserta yang berasal dari Kecamatan Loa Kulu dan pada lomba tersebut berhasil merebut juara harapan satu.

### 3) Pelatihan KRPL

Salah satu justifikasi penting dari pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah bahwa Ketahanan Pangan Nasional harus dimulai dari ketahanan pangan ditingkat rumah tangga. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dari program KRPL terhadap pola pengeluaran pangan rumah tangga, pola konsumsi pangan, tingkat konsumsi dan kecukupan energi protein serta pola pangan harapan.

Kegiatan Pelatihan KRPL adalah bertujuan :

- ✓ Menambah pengetahuan masyarakat dalam hal ini keluarga, kelompok wanita yang bertujuan memenuhi kebutuhan konsumsi pangan disekitar tempat tinggal
- ✓ Meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral untuk konsumsi keluarga.
- ✓ Meningkatkan kesadaran, peran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan Bergizi, Beragam, Seimbang dan Aman.
- ✓ Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ibu beserta keluarga.

Keberhasilan program KRPL akan sangat ditentukan oleh potensi sumber daya lahan pekarangan, kapasitas sumber daya manusia petani sebagai pengelola lahan pekarangan, teknologi spesifik, lokasi lahan pekarangan dan kelembagaan pengelola KRPL dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan.

Pelaksanaan Pelatihan KRPL ini dilakukan di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Samboja dan Kecamatan Muara Kaman dengan masing-masing kecamatan mengadakan pelatihan berjumlah 40 orang peserta, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dari hasil pelatihan KRPL ada beberapa hal pokok untuk menjaga program ini dapat berjalan dan bisa diaplikasikan ditempat lain;

- a. Adanya keyakinan diantara tokoh masyarakat petani, tokoh desa (kepala desa, PKK), pengurus kelompok tani (gapoktan).
- b. Adanya reorientasi program KRPL
- c. Dukungan dana yang memadai
- d. Perlu penggerak atau motivasi
- e. Peran dan koordinasi tim pembina atau tim teknis yang harus dioptimalisasikan.

### 4) Survei Pola Pangan Harapan (PPH).

Pelaksanaan survey PPH Tahun 2017 dilakukan oleh petugas pelaksana yang telah dibekali pengetahuan dan keterampilan tentang survei dan analisis PPH, dengan hasil kegiatan survei dapat disimpulkan:

- ✓ Meningkatkannya diversifikasi bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat sehingga dapat meningkatkan skor pola pangan harapan (PPH)

- ✓ Peningkatan diversifikasi secara langsung dapat memicu perbaikan gizi masyarakat yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Capaian kinerja indikator Keragaman Konsumsi Pangan Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan Survei Pola Pangan Harapan (PPH). Dari hasil survey didapat bahwa skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai sebesar 90,00, dari target Tahun 2017 sebesar 91,90 atau tercapai sebesar 97,93%.

Penurunan angka PPH tersebut diatas dikarenakan adanya perubahan standar nasional (justification) angka kecukupan energi (AKE) dari 2000 kkal/kap/hari menjadi 2150 kkal/kap/hari berdasarkan Widya Karya Pangan dan Gizi Nusantara (WKPGN) Tahun 2012. Capaian skor PPH konsumsi 90,00 jika di konversikan kedalam AKE 2000 kkal/kap/hari maka akan diperoleh skor PPH konsumsi sebesar 92,20.

c. Tingkat Keamanan Pangan segar

Keamanan Pangan merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ketahanan pangan. Keamanan pangan telah banyak menjadi keprihatinan masyarakat dunia karena dampaknya terhadap kesehatan publik, dan bukan hanya itu masalah keamanan pangan jika dikombinasikan dengan masalah gizi berdampak pada terhambatnya perkembangan sumber daya manusia dalam jangka panjang. Oleh karena itu penanganan masalah keamanan pangan harus dilakukan dan dimulai dari hal-hal yang paling dasar. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat tentang keamanan pangan menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan keamanan pangan di masyarakat

Indikator Kinerja Utama (IKU) Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat dengan indicator Persentase Keamanan Pangan Segar didukung dengan kegiatan:

1) Pengujian Pangan Segar

Kegiatan Pengujian Pangan Segar merupakan kegiatan yang diarahkan dalam upaya meningkatkan mutu pangan segar dan tersedianya pangan segar yang aman dikonsumsi oleh masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan mengambil sampel pangan segar yang diuji dengan uji Rapid Test Kit (uji cepat).

Dari hasil uji sampel pangan segar dilakukan melalui Penggunaan Rapid Test Kit (Pesticide Rapid Test Kit) sebanyak 63 sampel pangan segar, dari hasil uji terdapat 54 sampel pangan segar hasilnya negatif (86,24%) aman dikonsumsi dan 9 sampel pangan segar hasilnya positif (13,76%) tidak layak untuk dikonsumsi, sehingga dapat disimpulkan bahwa keamanan pangan segar di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya jenis pangan segar yang diambil sampel untuk diuji mencapai 86,24% keamanannya dengan capaian kinerja sebesar 102,67%.

2) Pengembangan Media Informasi Keamanan Pangan

Keamanan Pangan merupakan isu strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah menyadari jaminan keamanan pangan yang baik akan menentukan derajat kesehatan masyarakat yang merupakan unsur penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Media informasi yang sangat berperan dalam hal peningkatan keamanan pangan masyarakat, sehingga perlu pengembangan sistem informasi yang berintegritas yang mampu

mengolah sumber data yang valid dan representatif sehingga dapat dijadikan dasar bagi masyarakat dalam hal konsumsi pangan yang aman.

### **3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara didukung Pegawai Negeri Sipil (PNS) sampai dengan 31 Desember 2018 berjumlah 88 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Struktural berjumlah 53 orang sedangkan untuk Tenaga Harian Lepas Daerah (THL-D) berjumlah 33 orang. Pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan Kutai Kartanegara pada akhir Desember 2016 sudah tidak memiliki Jabatan Fungsional lagi seiring dengan perubahan Nama OPD Pada awal tahun 2017.

### **4. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Pada Tahun Anggaran 2018 Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat Alokasi Anggaran Rp. 7.080.833.972,00 (Tujuh Milyar Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 6.645.786.449,00 (Enam Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) Atau mencapai 94,82% dengan silpa anggaran Rp. 473.521.651,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).

### **5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Proses Perencanaan Pembangunan dilaksanakan melalui mekanisme RPJMD, RKPD, Renja OPD dan RKA SKPD.

Program yang dilaksanakan dalam RKA dan DPA OPD Tahun 2018 sebanyak 4 Program, dan semuanya sesuai dengan program yang ada di Renja OPD dan RKPD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

### **6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)**

Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh OPD Dinas Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sudah cukup lengkap dan memadai.

### **7. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Tidak tercapai target Score PPH Ketersediaan sebesar 94,27 dan tercapai 88,41 (91,55) dikarenakan adanya perubahan standar nasional (justification) angka kecukupan energi (AKE) dari 2200 kkal/kap/hari menjadi 2400 kkal/kap/hari berdasarkan Widya Karya Pangan dan Gizi Nusantara (WKPGN) Tahun 2012. Capaian skor PPH ketersediaan 80,72 jika di konversikan kedalam AKE 2200 kkal/kap/hari maka akan diperoleh skor PPH ketersediaan sebesar 88,41 sehingga capaian kinerjanya sebesar 93,78%
- 2) Tidak tercapainya Score PPH Konsumsi dari target yang telah ditetapkan sebesar 90,00 dan hanya tercapai 89,20 dengan capaian kinerja 99,11% dikarenakan adanya perubahan standar nasional (justification) angka

kecukupan energi (AKE) dari 2000 kkal/kap/hari menjadi 2150 kkal/kap/hari berdasarkan Widya Karya Pangan dan Gizi Nusantara (WKPGN) Tahun 2012. Capaian skor PPH konsumsi 89,20 jika di konversikan kedalam AKE 2000 kkal/kap/hari maka akan diperoleh skor PPH konsumsi sebesar 92,20 dengan capaian kinerja sebesar 96,75%.

## 8. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Pada tahun 2018 mendapat penghargaan terbaik II berupa Panji Keberhasilan Pembangunan dibidang Ketahanan Pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka ulang tahun Provinsi Kalimantan Timur ke 61.

## 10. URUSAN PERTANAHAN

### DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

#### 1. Program dan Kegiatan

Pencapaian Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018 menggambarkan indikator kinerja sesuai tugas Fungsi perangkat daerah.

Pada tahun 2018 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara menjalankan 7 (Tujuh) Program dan 15 (Lima Belas) Kegiatan, adapun pencapaian program dan kegiatan tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

**Tabel.3.32**

Capaian Realisasi Program Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2018

No	Program/Kegiatan	Rencana/ Target	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Kinerja (%)
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
1.	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Rekening	60 Rekening	100 %
2.	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	66 OB	66 OB	100 %
3.	Penyedia Alat Tulis Kantor	1 Paket	1 Paket	100 %
4.	Penyedia Makanan dan Minuman	100 Kotak	100 Kotak	100 %
5.	Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	660 OB	660 OB	100 %
6.	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	1 paket	100 %
7.	Rapat-rapat koordinasikan dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah	12 kali	12 kali	100 %
2.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

No	Program/Kegiatan	Rencana/ Target	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Kinerja (%)
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Unit	1 Unit	100 %
3.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
1.	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak ketiga	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %
4.	<b>Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
1.	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Penguasaan Tanah di Kecamatan dan Kelurahan/desa	546 SKPT	750 SKPT	100 %
2.	Fasilitasi Sertifikasi Lahan Perumahan	100 Sertifikat	60 Sertifikat	60 %
3.	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Daerah Kab.Kutai Kartanegara	67 Sertifikat	57 Sertifikat	85.07%
5.	<b>Program Penataan Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.	Pembebasan Lahan Institut Seni Budaya Indonesia (Bantuan Keuangan Provinsi)	28 Ha	1,1 Ha	3.92 %
6.	<b>Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan	10 Kasus	21 Kasus	100%
7.	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.	Persetujuan Substansi dan Kelengkapan Pendukung Revisi RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sampai dengan 2018 berada pada urusan Penataan Ruang. Standar Pelayanan Minimal Sesuai dengan Permenpan PU Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun yang menjadi indikator SPM sebagai berikut:

**Tabel 3.33**  
Indikator dan cara hitung berdasarkan Permenpan PU

Urusan	SPM	Indikator	Realisasi
Penataan Ruang	Informasi Penataan Ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital	-
	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	87.17 % (Kondisi awal 2016)

Jika melihat pada capaian berdasarkan indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU), target dan capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang selama 5 Tahun kedepan (2017-2021) adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target Tahun Ke-					Capaian	
	1	2	3	4	5	n-1	1
Cakupan tertib administrasi penguasaan tanah	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Luas Lahan Bersertifikat	100 %	100%	100%	100%	100%	8.7%	9.17 %
Persentase Penyelesaian Kasus Pertanahan	100 %	100%	100%	100%	100%	69,3 %	87.5 %
Persentase Kecamatan yang telah memiliki RDTR	22%	22%	18%	18%	20%	0 (belum ada)	-
Persentase kecamatan yang memanfaatkan RDTR	22%	22%	18%	18%	20%	0 (belum ada)	0
Persentase Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau terhadap luas perkotaan	20%	20%	30%	30%	-	41.31 %	53.22 %

### 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang maka terdapat tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Tenaga Pendukung

Non ASN. Penjelasan mengenai formasi pegawai di lingkungan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dijelaskan dalam table-tabel di bawah ini :

**Tabel 3.34**

Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kukar Tahun 2018

No	Pegawai	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Aparatur Sipil Negara	78	58,65
2.	Tenaga Harian Lepas (THL)	55	41,36
	Jumlah	133	100

Dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 78 orang yang ada di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara, terdapat 39,74% yang berstatus golongan II, 52.56 % golongan III, dan 8.97% golongan IV. Sesuai dengan Perbub Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, maka pengisian formasi Jabatan Struktural terdiri dari Esselon II,III, dan IV yaitu sebanyak 18 orang.

#### 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dari total Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 4.399.322.942.854,37, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabuapten Kutai Kartanegara mendapatkan alokasi anggaran kurang lebih 0.35 % dari total pagu APBD Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebesar Rp 15.653.177.782,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Dari total pagu APBD tersebut realisasi anggaran sampai tahun anggaran 2018 sebesar Rp 10.446.464.266,00 yaitu sekitar 67.04% dari Keseluruhan Pagu Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

#### 5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

dan Prasarana merupakan salah satu penunjang utama dalam upaya meningkatkan kinerja sebuah organisasi. Sarana dan Prasarana ini digunakan antara lain :

- Menunjang kegiatan ketatausahaan/administrasi perkantoran;
- Menunjang peningkatan kualitas SDM Aparat;
- Menunjang kegiatan Rapat/ Konsultasi/ Fasilitasi/ Sosialisasi.

Seiring dengan perkembangan IPTEK dan modernisasi zaman, maka penambahan, penggantian, dan penyesuaian sarana dan prasarana tetap saja diperlukan demi menunjang pelaksanaan tugas OPD. Sarana dan Prasarana kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sampai dengan 2018 terbilang sangat minim. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru sarana dan prasarana yang dimiliki tidak sebanding dengan jumlah pegawai dan kebutuhan riil yang ada. Banyak beberapa peralatan dan perlengkapan kerja yang digunakan saat ini masih berstatus milik pribadi atau pinjam pakai.

Dari inventarisasi yang dilakukan oleh Tim Inventarisasi Barang pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, banyak beberapa barang yang berstatus masih dalam penelusuran. Barang-barang tersebut adalah mutasi dari Bagian Perangkat



Daerah sebelum Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang ini terbentuk.

## 6. Permasalahan dan Solusi

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Pertanahan dan Penataan Ruang tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan, baik permasalahan internal maupun eksternal. Untuk menjadi Organisasi Perangkat Daerah yang baik tentunya segala permasalahan yang ada tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tantangan yang sering terjadi salah satunya terkait dengan perencanaan yaitu dengan dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan Pemerintah Daerah. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara harus dengan sigap mencermati berbagai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui berbagai program dan kegiatan.

Jika dianalisis permasalahan internal ataupun eksternal yang dihadapi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dapat digunakan pendekatan SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats). Dalam analisis SWOT, lingkungan internal meliputi Strength (kekuatan) dan Weakness (kelemahan). Sedangkan Opportunity (peluang), dan Threats (ancaman) berada di lingkungan eksternal. Adapun masing-masing kondisi lingkungan dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Lingkungan Internal

#### a. Strength (Kekuatan)

- ✓ Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja perangkat Daerah pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- ✓ Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penetapan Harga Ganti Rugi Tanaman Dan Atau Benda-Benda Lain Yang Berkaitan Dengan Tanah Atau Kerugian Yang Dapat Dinilai Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- ✓ Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara Di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 – 2033;
- ✓ 133 (seratus Tiga Puluh Tiga) Karyawan (ASN dan THL) yang berada Di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.
- ✓ Rencana Strategis (Renstra) Perubahan 2016-2021 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara;
- ✓ Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018;
- ✓ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2018.

#### b. Weakness (Kelemahan)

- ✓ Kualitas, Produktivitas dan Loyalitas SDM terhadap tugas dan fungsinya masih terbilang rendah;
  - ✓ Lemahnya Pengendalian Internal SKPD salah satunya belum dilakukannya evaluasi secara periodik tentang pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang bagi secara umum organisasi maupun secara personal Sumber Daya manusia
  - ✓ Hambatan komunikasi internal dalam organisasi baik secara vertikal maupun horizontal organisasi, yang mampu menghambat pencapaian tujuan perangkat daerah dalam hal ini Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
  - ✓ Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pekerjaan baik peralatan administrasi maupun peralatan teknis lapangan;
  - ✓ Belum tersedianya system informasi pendukung pertanahan dan penataan ruang yang memadai
2. Lingkungan Eksternal
- a. Opportunity (Peluang)
- ✓ Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pertanahan dan Penataan Ruang;
  - ✓ Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - ✓ Adanya kerjasama Pemkab dengan instansi vertikal dan dengan daerah lain (kabupaten/kota) yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - ✓ Keberadaan Perguruan Tinggi, Lembaga Peneletian, Lembaga Swadaya Masyarakat serta lembaga/Instansi lain di luar Pemda yang terkait dengan Pertanahan dan Penatan Ruang;
  - ✓ Keterbukaan informasi public (media untuk menyampaikan keluhan masyarakat).
- ✓ Threats (Ancaman)
- ✓ Belum adanya Rencana Detail Tata Ruang pada Kabupaten Kutai Kartanegara sampai tahun 2018;
  - ✓ Masih rendahnya Status Sertifikasi Lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - ✓ Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap substansi rencana tata ruang dan pertanahan;
  - ✓ Belum terwujudnya pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang;
  - ✓ Masih banyak alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian;
  - ✓ Luas dan aksesibilitas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - ✓ Belum terpolanya jaringan infrastruktur dalam pengembangan wilayah.

Dari beberapa ancaman atau permasalahan yang ada tersebut, beberapa solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut :

1. Mengupayakan sumber penerimaan anggaran program/kegiatan selain dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, salah satunya melalui dana APBN (DAK) maupun bantuan Keuangan Provinsi;
2. Menambah kemampuan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan/pendidikan terkait dengan peningkatan kemampuan dibidang Pertanahan dan Penataan Ruang baik dengan pembiayaan mandiri maupun melalui kegiatan pendidikan

- dan pelatihan;
3. Melakukan upaya peningkatan Pengendalian Internal, melalui evaluasi dan monitoring berjenjang terhadap pelaksanaan struktur organisasi;
  4. Mengupayakan penyebaran dan perluasan informasi mengenai Penataan Ruang dan Pertanahan kepada Masyarakat;
  5. Meningkatkan Kerjasama dan komunikasi yang baik dengan instansi horizontal maupun vertikal terkait dengan peningkatan sertifikasi atas aset tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
  6. Bekerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

## 11. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

### 1. Program dan Kegiatan

Pencapaian Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan. Capaian Kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2018 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Capaian kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya.

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara membuat rencana kerja beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat.

Dalam tahun anggaran 2018 capaian program dan kegiatan (Realisasi Kinerja/Fisik/Output) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**Tabel.3.35**

Capaian Program/Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018

No	Program / Kegiatan	Indikator Keluaran	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
<b>I</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			80,14 %
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	100 %	51,5 %
2	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	76,65 %
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	57,80 %	33,45 %
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya jasa teknis keuangan	99,61 %	99,66 %
5	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100 %	99,03 %
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Lampu,Baterai besar/kecil, senter dan lampu emergency	100 %	99,72 %
7	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan kualitas penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	78,84 %	78,82 %
8	Penyediaan Bahan Logistik	Meningkatnya kebersihan	100 %	50 %

No	Program / Kegiatan	Indikator Keluaran	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
	Kantor	kantor		
9	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat, pegawai dan tamu	91,56 %	85,11 %
10	Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	Terlaksananya Jasa Teknis Perkantoran	100 %	96,18 %
11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100 %	62,74 %
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Tercapainya koordinasi dan konsultasi Program dan Kegiatan DLHK	100 %	69,22 %
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			99,81 %
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya hasil pemeliharaan	100 %	99,81 %
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			0 %
1	Pendidikan Pelatihan Formal Analisis Laboratorium dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tidak dilaksanakan, pada APBD-P anggaran untuk menambah kegiatan lain	0 %	0 %
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			99,87 %
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Meningkatnya Tata Pemerintahan yang baik, demokratis, jujur, bertanggung jawab, dan akuntabel	100 %	100 %
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja serta Monev	Tersedianya dokumen (Renstra, Renja, LKJiP, LPPD dan Monev OPD)	100 %	99,65 %
<b>V</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>			92,06 %
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengurangan dan Pengendalian Beban Pencemaran dari Limbah Cair dan Sampah (DAK 2018)	Tersedianya sarana pengelolaan bank sampah berupa : 1. Bangunan Bank Sampah; 2. Alat Pencacah Sampah Organik 3. Alat Pencacah Plastik 4. Alat Pemilah Plastik	100 %	91,83 %

No	Program / Kegiatan	Indikator Keluaran	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
		5. Komposter 6. Mesin Press Hidrolis 7. Timbangan 8. Papan Informasi tambahan		
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengurangan dan Pengendalian Beban Pencemaran dari Limbah Cair dan Sampah (Pendamping)	Terlaksananya pendampingan keg. Sarana dan prasarana pengurangan dan pengendalian beban pencemaran dari limbah cair dan sampah	100 %	97,26 %
3	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Sampah Produsen/Industri	Ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan TPS, TPST dan TPA	99,25 %	98,16 %
4	Workshop Pengelolaan Bank Sampah	Terwujudnya pemahaman tentang LH kepada masyarakat, mahasiswa dan pelajar	95,11 %	95,11 %
5	Pembinaan Pengurangan Sampah	Terbentuknya Bank Sampah	84 %	77,81 %
<b>VI</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>			86,66 %
1	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper)	Terlaksananya kegiatan properda dan propernas bagi perusahaan tambang batubara/migas/sawit/industri dan jasa/HTI	100 %	99,97 %
2	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Terpenuhinya standar ISO 17025	100 %	99,72 %
3	Fasilitasi Penilaian Sekolah Adiwiyata	Terwujudnya pemahaman tentang lingkungan hidup serta sekolah yang berwawasan lingkungan	100 %	99,81 %
4	Inventarisasi Usaha/Kegiatan Skala Menengah Kebawah Penghasil Limbah B3	Database penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) skala menengah kebawah	100 %	68,74 %
5	Evaluasi dan Pembinaan dalam Pengelolaan Limbah B3 pada Kegiatan/Usaha (Amdal, UKL-UPL dan SPPL) di Kab. Kutai Kartanegara	Terkendalinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3)	100 %	74,38 %
6	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	87,47 %
7	Pengumpulan Bahan	Ketaatan pelaku usaha	76,16 %	69,09 %

No	Program / Kegiatan	Indikator Keluaran	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
	Keterangan (PULBAKET) Penerapan Sanksi Administratif	terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai rekomendasi dan ijin lingkungan		
8	Pemantauan Kualitas Udara, Air Permukaan dan Tanah	Pengambilan sampel air sungai di Kecamatan	100 %	97,29 %
9	Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai rekomendasi dan ijin lingkungan	100 %	100 %
<b>VII</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>			7,64 %
1	Pembuatan Embung Sumur Resapan Air	Terlaksananya kegiatan pembuatan embung sumur resapan air	9,75 %	7,64 %
<b>VIII</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</b>			99,92 %
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Kalpataru)	Terlaksananya pembinaan dan penilaian dalam upaya penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup	100 %	99,92 %
<b>IX</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>			30,78 %
1	Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dapat diselesaikan	90,32 %	90,05 %
2	Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten	Terlaksananya penyusunan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah dan dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Kab.Kukar	16,33 %	9,86 %
3	Publikasi Event Melalui Media Cetak dan Online	Terpublikasikannya Event Daerah Melalui Media cetak dan Online	98,35 %	49,80 %
<b>X</b>	<b>Program Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>			49,50 %
1	Penguatan Perencanaan Program Lingkungan Antar Daerah, Provinsi dan Pusat	Peningkatan perencanaan dan laporan serta terlaksananya pengawasan dan evaluasi program DLHK Kab.Kukar	99,86 %	49,50 %
<b>XI</b>	<b>Program Perlindungan</b>			79,53 %

No	Program / Kegiatan	Indikator Keluaran	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
	<b>dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan</b>			
1	Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan Ekosistem Perairan Darat, Pesisir dan Laut	Optimalisasi pengendalian kerusakan lingkungan hidup	68,11 %	68,11 %
2	Penilaian Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Pada Program Kampung Iklim	Jumlah desa yang melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	98,45 %	96,65 %
<b>XII</b>	<b>Program Rehabilitasi Lahan Kritis</b>			10,88 %
1	Pemeliharaan DAS atas IPPKH an. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Tercapainya Rehabilitasi Lahan Kritis	0 %	0 %
2	Penanaman Rehab DAS	Terlaksananya rehabilitasi DAS	13,02 %	10,11 %
3	Penanaman di Kawasan Magrove	Terlaksananya penanaman di kawasan mangrove	15,26 %	11,03

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Perubahan Dinas dan RPJMD Perubahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Pada tahun 2018 target Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :

Indeks Pencemaran Air (IPA)	Indeks Pencemaran Udara (IPU)	Indeks Tutupan Lahan (ITH)
56,25	90,96	59,99

Hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

Indeks Pencemaran Air (IPA)	Indeks Pencemaran Udara (IPU)	Indeks Tutupan Lahan (ITH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2018
81.43	69.51	59.95	69.26



Ukuran capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yaitu Indeks Pencemaran Air, Indeks Pencemaran Udara dan Indeks Tutupan Lahan, pada tahun 2018 tercapai 69.26. Rincian ketiga indeks tersebut menggunakan parameter :

1. Indeks Pencemaran Air (IPA)

Indeks Pencemaran Air (IPA) sebesar 81.43; dengan 5 Parameter yaitu (1) TSS, (2) DO, (3) COD, (4) BOD, (5) P. Sampling air sungai sebanyak 15 sungai dari 10 Kecamatan dengan jumlah lokasi titik sampling 20 titik.

2. Indeks Pencemaran Udara (IPU)

Indeks Pencemaran Udara sebesar 69.51; dengan 2 Parameter yaitu (1) NO<sub>2</sub> dan (2) SO<sub>2</sub>. Sampling Udara di 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Tenggarong, Jumlah Lokasi titik sampling ada 4 titik di Kecamatan Tenggarong yang berlokasi pada :

- a) Transportasi (Penyebrangan Pulau Kumala Jl. Akhmad Muksin Tenggarong);
- b) Industri Pabrik Tahu (Jl. Mangkuraja Tenggarong);
- c) Pemukiman dan Perumahan Mangga 2 (Jl. Akhmad Dahlan Tenggarong);
- d) Perkantoran (Kantor Bupati Kab.Kukar Jl. Wolter Monginsidi Tenggarong). pada Transportasi, Industri, Perumahan dan Perkantoran.

3. Indeks Tutupan Lahan

Indeks Tutupan Lahan 59.95, menggunakan data tahun 2017 ada 7 jenis tutupan hutan yaitu :

1. Hutan Lahan Kering Primer
2. Hutan Lahan Kering Sekunder
3. Hutan Mangrove Primer
4. Hutan Mangrove Sekunder
5. Hutan Rawa Primer
6. Hutan Rawa Sekunder
7. Hutan Tanaman

### **3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat tahun 2018 sebanyak 91 orang.

Dengan kondisi sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut golongan I sebanyak 1 orang, golongan II sebanyak 36 orang, golongan III sebanyak 43 orang, dan golongan IV sebanyak 11 orang, sedangkan THL sebanyak 73 orang (Total PNS + THL sebanyak 164 orang).

Pejabat yang menduduki eselon terdiri dari eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 4 orang, dan eselon IV sebanyak 16 orang (Total eselon sebanyak 21 orang).

### **4. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Dengan alokasi pagu dana setelah perubahan sebesar Rp. 7.923.158.764,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan persentase realisasi keuangan mencapai Rp. 3.827.588.280 atau 48,31%.

## 5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan perhatian yang serius terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini didasari dengan kesadaran bahwa kualitas lingkungan yang buruk mempengaruhi mutu generasi sekarang maupun yang akan datang. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan SKPD penyelenggara urusan lingkungan hidup. Tahun Anggaran 2018 dalam rangka penyelenggaraan urusan lingkungan hidup ada 12 program yang terdiri dari 41 kegiatan; yang direncanakan melalui dokumen RPJMD, RENSTRA, RENJA, RKPD, RKA/RKAP dan DPA/DPPA.

**Tabel.3.36**

Kesesuaian Program/Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja Renja	Kesesuaian	
	Renja	RKA		Ya	Tidak
<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air &amp; Listrik</b>	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	√	
<b>Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor</b>	Tersedianya sarana peralatan perlengkapan kantor (jenis)	Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	√	
<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</b>	Tersedianya pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas/Operasional (kendaraan)	Tersedianya pemeliharaan Rutin / Berkala Dinas/Operasional	100 %	√	
<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b>	Tersedianya Jasa Teknis Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	100 %		√
<b>Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor</b>	Tersedianya perlengkapan alat tulis kantor (52 jenis)	Tersedianya alat tulis kantor	100 %	√	
<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	Tersedianya komponen instalasi listrik (jenis lampu dan battery)	Tersedianya kebutuhan alat listrik dan elektronik	100 %	√	
<b>Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan</b>	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran	100 %	√	
<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	Meningkatnya kebersihan kantor	Tersedianya kebutuhan alat listrik dan elektronik	100 %	√	
<b>Penyediaan Makanan Dan Minuman</b>	Tersedianya Makanan dan Minuman pegawai rapat dan tamu (rapat)	Tersedianya makanan dan minuman rapat, pegawai dan tamu	100 %	√	
<b>Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran</b>		Tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran		√	
<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	100 %	√	
<b>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Dan Luar Daerah</b>	Tercapainya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan (kali rapat)	Tercapainya konsultasi dan koordinasi program dan kegiatan DLHK	100 %	√	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kesuksesan	
				Ya	Tidak
	Renja	RKA	Renja		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	Jumlah jenis perbaikan / pemeliharaan (jenis)	Terlaksananya hasil pemeliharaan	100 %	√	
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					
<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal Analisis Laboratorium dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	Meningkatannya kapasitas sumber daya aparatur dan kualitas pengawasan di bidang	Tersedianya profil, daftar urutan pegawai, kendali kenaikan pangkat, dan kendali kenaikan gaji berkala PNS DLHK	100 %	√	
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
<b>Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran</b>	Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan internal dan eksternal DLHK (laporan)	Meningkatnya Tata Pemerintahan yang baik, demokratis, jujur, bertanggung jawab, dan akuntabel	100 %	√	
<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja serta Monev</b>	Tersedianya dokumen (Renstra, Renja, LKjIP, LPPD dan Monev OPD)	Tersedianya dokumen (Renstra, Renja, LKjIP, LPPD dan Monev OPD)	100 %	√	
<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>					
<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengurangan dan Pengendalian Beban Pencemaran dari Limbah Cair dan Sampah (DAK 2018)</b>		Tersedianya sarana pengelolaan bank sampah		√	
<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengurangan dan Pengendalian Beban Pencemaran dari Limbah Cair dan Sampah (Pendamping)</b>		Terlaksananya pendampingan kegiatan sarana dan prasarana pengurangan dan pengendalian beban pencemaran dan limbah cair dan sampah		√	
<b>Monitoring dan Evaluasi Penanganan Sampah Produsen/Industri di Kabupaten Kutai Kartanegara</b>		Menjaga agar kebijakan yang sedang di implementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran		√	
<b>Workshop Pengelolaan Bank</b>	Terciptanya bank sampah disetiap desa/kelurahan dari	Terwujudnya pemahaman tentang lingkungan hidup	100 %	√	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kesuksesan	
	Renja	RKA		Ya	Tidak
			Renja		
<b>Sampah</b>	18 kecamatan	kepada masyarakat, mahasiswa dan pelajar			
<b>Pembinaan Pengurangan Sampah</b>		Menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran			√
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>					
<b>Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper)</b>	Meningkatnya kualitas dan pengelolaan lingkungan hidup Perusahaan wajib Proper Lokal, Properda dan Propernas 70 Pelaku usaha	Terlaksananya Kegiatan Properda dan Propernas Bagi Perusahaan Tambang Batubara/Migas/Sawit/Industri/HTI	100 %	√	
<b>Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup</b>	Ketersediaan alat sarana dan prasarana kegiatan lab 1 paket	Terpenuhinya standar ISO 17025	100 %	√	
<b>Fasilitasi Penilaian Sekolah Adiwiyata</b>	Terlaksananya koordinasi sekolah sehat (jumlah Sekolah yang ikut adiwiyata)	Terwujudnya pemahaman tentang lingkungan hidup serta sekolah yang berwawasan lingkungan	100 %	√	
<b>Inventarisasi Usaha/Kegiatan Skala Menengah Kebawah Penghasil Limbah B3</b>	Teratasinya masalah pengelolaan lingkungan dan terkendalinya limbah domestik dan limbah B3 120 pelaku usaha	Database penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) skala menengah kebawah	100 %	√	
<b>Evaluasi dan Pembinaan dalam Pengelolaan Limbah B3 pada Kegiatan/Usaha (Amdal, UKL-UPL dan SPPL) di Kabupaten Kutai Kartanegara</b>	Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan ekonomio yang tidak berwawasan lingkungan	Terkendalinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3)	100 %	√	
<b>Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup</b>	Ijin lingkungan 190 Ijin	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	√	
<b>Pengumpulan Bahan Keterangan (PULBAKET) Penerapan Sanksi Administratif</b>	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat atas pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup	Ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai rekomendasi dan ijin lingkungan	100 %	√	
<b>Pemantauan Kualitas Udara, Air Permukaan dan Tanah</b>		Terkendalinya Pencemaran sungai		√	
<b>Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan</b>		Ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan rekomendasi		√	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja Renja	Kesuksesan	
	Renja	RKA		Ya	Tidak
		dan ijin lingkungan			
<b>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</b>					
<b>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Kalpataru)</b>	Terlaksananya jumlah peserta calon penerima penghargaan kalpataru	Terlaksananya pembinaan dan penilaian dalam upaya penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup	100 %	√	
<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>					
<b>Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup</b>	Jumlah Pengaduan yang Ditangani	Jumlah Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dapat diselesaikan	260 Penanganan Pengaduan	√	
<b>Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten</b>	Memberikan informasi dan gambaran secara obyektif tentang data permasalahan	Terlaksananya penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah dan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Kutai Kartanegara		√	
<b>Publikasi dan Event Daerah Melalui Media Cetak dan Online</b>		Terpublikasikannya Event Daerah Melalui Media cetak dan Online		√	
<b>Program Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>					
<b>Penguatan Perencanaan Program Lingkungan Antar Daerah, Provinsi dan Pusat</b>	Jumlah peserta Saka Kalpataru, Aparatur PPLH, Aparatur DLHK, dan Fasilitasi Perencanaan Program	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen laporan	500 peserta, 116 aparatur BLHD, 6 dokumen perencanaan, 3 laporan	√	
<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan</b>					
<b>Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan Ekosistem Perairan Darat, Pesisir dan Laut</b>	Peningkatan kualitas mutu sumber daya alam dan lingkungan hidup	Optimalisasi pengendalian kerusakan lingkungan hidup	100 %	√	
<b>Penilaian Terhadap Pelaksanaan Kegiatan</b>	Bertambahnya prosentase tutupan vegetasi 1	Jumlah desa yang melaksanakan upaya	100 %	√	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kesuksesan	
				Ya	Tidak
	Renja	RKA	Renja		
<b>Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim pada Program Kampung Iklim</b>	Penghargaan	adaptasi dan mitigasi perubahan iklim			
<b>Program Rehab Lahan Kritis</b>					
<b>Pemeliharaan DAS atas IPPKH an. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara</b>	Jumlah Kawasan yang Direhabilitasi/Reboisasi 23 Ha	Tercapainya Rehabilitasi Lahan Kritis	100 %	√	
<b>Penanaman Rehab DAS</b>		Terlaksananya Rehabilitasi DAS			√
<b>Penanaman di Kawasan Mangrove</b>		Terkasananya penanaman di kawasan mangrove			√
<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan</b>					
<b>Pembuatan Embung Sumur Resapan Air</b>		Jumlah kegiatan pembuatan embung sumur resapan air			√

## 6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan DLHK masih sangat kurang khususnya kendaraan lapangan yang dimiliki hanya mobil laboratorium yang digunakan pada saat melakukan pengawasan; sementara 4 (empat) bidang teknis lain sangat membutuhkan kendaraan lapangan tetapi sampai tahun 2018 belum tersedianya kendaraan dimaksud. Jika pada saat yang bersamaan melakukan tugas pengawasan, menangani kasus, kegiatan verifikasi lapangan dll. maka sangat mengalami hambatan sehingga permasalahan yang diatasi juga menjadi tertunda.

Kendala lain adalah peralatan dan perlengkapan lapangan seperti APD (Alat Pengaman Diri) yang tidak dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat mempengaruhi hasil kerja yang akan diperoleh.

## 7. Permasalahan dan Solusi

- a. Informasi Pemerintah Pusat terlambat disampaikan kepada Pemerintah Daerah terkait ketentuan penyusunan RPPLH sehingga terkendala untuk dilaksanakan dan harus menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku, sementara pagu kegiatan telah dianggarkan.
- b. Adanya pagu anggaran Kegiatan DBH-DR dari Pemerintah Pusat yang baru dimasukkan pada Anggaran perubahan mendekati akhir tahun, sehingga sangat berpengaruh terhadap waktu yang tersedia untuk melakukan kegiatan paket lelang dan kegiatan lain-lainnya.
- c. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi serta kerjasama dengan pihak ketiga maupun pelaksana teknis kegiatan, agar kelengkapan administrasi pembayaran yang diajukan ke Bagian Keuangan segera dipenuhi karena seringkali berdampak pada terlambatnya penerbitan SPM hingga

penundaan yang memakan waktu cukup lama.

## 8. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Hal lain yang dapat dilaporkan, bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, telah melaksanakan pembinaan terhadap beberapa Sekolah dan mendapat Penghargaan Adiwiyata Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun Sekolah yang mendapat penghargaan ada 17 (Tujuh Belas) sekolah yang terdiri :

- SD/IT/Madrasah Ibtidaiyah : 13 sekolah
  - SMP/Madrasah Tsanawiyah : 4 sekolah
  - SMA/Madrasah Aliyah : 1 sekolah
1. Sekolah yang menerima penghargaan Adiwiyata Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 adalah :

NO	Nama	Kecamatan	Nilai
1	SD Negeri 010	Tenggarong	59,5
2	SD Negeri 025	Tenggarong	59,25
3	SD Negeri 011	Tenggarong	57,25
4	SD Negeri 014	Tenggarong	56,0
5	SD Negeri 013	Tenggarong	59,5
6	SD Negeri 007	Tenggarong Seberang	56,75
7	SD Negeri 020	Tenggarong Seberang	56,5
8	SMP Negeri 02	Tenggarong Seberang	58
9	SD Negeri 008	Loa Janan	56,75
10	SD Negeri 024	Loa Janan	58,0
11	SD Negeri 012	Loa Janan	57,0
12	SD Negeri 027	Loa Janan	56,75
13	SMP Negeri 4	Loa Janan	58,75
14	SMP Negeri 6	Loa Janan	57,75
15	SD Negeri 028	Kota Bangun	58,5
16	SMP Negeri 1	Kota Bangun	57,75
17	SD islam Terpadu Al Ihsan	Muara Kaman	58,5

2. Sekolah yang menerima penghargaan Adiwiyata Nasional Tahun 2018 adalah MAN 2 Kutai kartanegara, penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Program Adiwiyata Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 terdapat 13 (tiga belas) perusahaan telah berpartisipasi dalam bentuk pembinaan dan pemeberian bantuan sarana prasarana. Ke-13 (tiga belas) perusahaan yang telah berpartisipasi dalam program Adiwiyata Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 adalah :

- 1) PT. Trisensa Mineral Utama di Kecamatan Loa Janan
- 2) PT. Alamjaya Bara Pratama di Kecamatan Loa Kulu
- 3) PT. Anugerah Bara Kaltim di Kecamatan Loa Janan

- 4) PT. PAMA Persada Nusantara di Kecamatan Loa Janan
- 5) PT. PAMA Persada Nusantara Distrik Baya di Kecamatan Tenggarong Seberang
- 6) PT. Khotai Makmur Insan Abadi di Kecamatan Tenggarong Seberang
- 7) PT. Jembayan Muara Bara di Kecamatan Tenggarong Seberang
- 8) PT. RPP Contractor Indonesia di Kecamatan Loa Janan
- 9) PT. Nusa Perdana Indah di Kecamatan Loa Janan
- 10) PT. Bhumiku Jaya Abadi di Kecamatan Tenggarong Seberang
- 11) United Tractors di Kecamatan Tenggarong Seberang
- 12) PT. Tanito Harum di Kecamatan Tenggarong
- 13) PT. Bukit Baiduri Energi di Kecamatan Loa Janan

Pada tahun ini juga akan diberikan penghargaan sebagai apresiasi terhadap jasanya selaku kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Loa Janan yang telah secara aktif melakukan pembinaan dan mendorong sekolah untuk ikut dalam program Adiwiyata.

## 12. URUSAN ADMINDUK DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

### 1. Program dan Kegiatan

Pencapaian kinerja dari masing-masing program dan kegiatan sesuai dengan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara selama Tahun Anggaran 2018, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.37**

Capaian Program/Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program dan Kegiatan		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
1	Jumlah jasa surat menyurat	400 lembar Materai	400 lembar Materai	100
2	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	348 Rekening	348 Rekening	100
3	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	10 unit kendaraan	10 unit kendaraan	100
4	Jumlah jasa administrasi keuangan	252 OB (18 orang)	252 OB (18 orang)	100
5	Jumlah alat tulis kantor	15 Jenis	15 Jenis	100
6	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.800 eksemplar	10.800 eksemplar	100
7	Jumlah makanan dan minuman	1.008 Kotak	1.008 Kotak	100
8	Jumlah jasa administrasi Perkantoran	468 OB (39 orang)	468 OB (39 orang)	100
9	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	6 jenis	6 jenis	100



Program dan Kegiatan		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	105 orang	105 orang	100
11	Jumlah Jasa Perumahan	2 UPTD	2 UPTD	100
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	56 Unit	56 Unit	100
2	Pengadaan Mebeleur	10 Unit	10 Unit	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	10 kendaraan	10 kendaraan	100
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monitoring dan Evaluasi	7 Dokumen + 1 Dokumen Hasil Survey IKM	7 Dokumen + 1 Dokumen Hasil Survey IKM	100
<b>Program dan Kegiatan</b>		<b>Target Kinerja</b>	<b>Realisasi Kinerja</b>	<b>%</b>
<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>				
1	Operasional Pelayanan KTP Elektronik	35.000 KTP-el	35.000 KTP-el	100
2	Operasional Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	10.000 Kartu Identitas Anak	10.000 Kartu Identitas Anak	100
3	Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran se Kab. Kutai Kartanegara	20.000 Berkas	20.000 Berkas	100
4	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Kec.Kembang Janggut	1.000 Kutipan Akta Kelahiran	673 Kutipan Akta Kelahiran	67,30
5	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Kec. Kota Bangun	1.000 Kutipan Akta Kelahiran	1.299 Kutipan Akta Kelahiran	100
6	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Kec. Muara Badak	1.000 Kutipan Akta Kelahiran	1.000 Kutipan Akta Kelahiran	100
7	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Kec. Muara Jawa	1.000 Kutipan Akta Kelahiran	1.200 Kutipan Akta Kelahiran	100
8	Pelayanan Administrasi Pencatatan Akta Kelahiran	1.000 Kutipan Akta Kelahiran (5 Kec)	1.000 Kutipan Akta Kelahiran (5 Kec)	100
9	Pelayanan Administrasi Pencatatan Akta Kematian	150 Kutipan Akta Kematian (3 Kec)	66 Kutipan Akta Kematian (3 Kec)	44
10	Pelayanan Administrasi Pencatatan Akta Perkawinan	150 Akta Perkawinan Non Muslim (3 Kec)	10 Akta Perkawinan Non Muslim (3 Kec)	6,67
11	Satu Rukun Tetangga (RT) Satu Laptop se Kabupaten Kutai Kartanegara	100 Laptop, 100 Software, 100 Printer	100 Laptop, 100 Software, 100 Printer	100

Program dan Kegiatan		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
12	Bimbingan Teknis Aplikasi Teknis Kependudukan Rukun Tetangga (RT) se Kab. Kutai Kartanegara	100 peserta	100 peserta	100
13	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK non fisik)	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	100
<b>Program Keserasian Kebijakan Kependudukan</b>				
1	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	1 buku Profil	1 buku Profil	100
2	Pengembangan Sistem Pelayanan Mandiri	1 Dokumen Desain	1 Dokumen Desain	100
3	Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen Peraturan Daerah	1 Dokumen Peraturan Daerah	100
4	Penyajian Informasi Kependudukan	6 Jenis Informasi (18 Kecamatan)	6 Jenis Informasi (18 Kecamatan)	100
5	Pemeliharaan Jaringan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu	18 Kecamatan	18 Kecamatan	100

Dari tabel diatas, masing-masing Program memiliki persentase perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja adalah sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran persentase perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja adalah 100%. Persentase perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah 100% begitu pula Persentase perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah 100%.

Program Penataan Administrasi Kependudukan persentase perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja adalah 86% sedangkan Persentase perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja Program Keserasian Kebijakan Kependudukan adalah 100%.

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah ditetapkan sejak awal penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dapat dijelaskan dengan 1 (satu) Sasaran Strategis dan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

- 1) Rasio Penduduk ber KTP elektronik persatuan penduduk, Rasio Penduduk ber KTP elektronik persatuan penduduk, pada tahun awal Renstra telah mencapai mencapai 86,18%, realisasi tahun 2017 adalah sebesar 89,77% sedangkan untuk realisasi tahun 2018 adalah sebesar 95,95% atau meningkat sebesar 6,18%
- 2) Berdasarkan hasil capaian kinerja IKU kegiatan ini sebaiknya dilakukan percepatan kepemilikan KTP-el dengan cara melihat data lokasi-lokasi di kecamatan mana saja yang capaiannya masih rendah untuk dilakukan

pelayanan langsung (jemput bola) perekaman dan memprioritaskan pencetakan KTP-el pada lokasi tersebut, untuk percepatan pencetakan KTP-el sebaiknya menambah alat cetak/printer KTP-el baru agar dapat mempercepat proses pencetakan KTP-el.

- 3) Rasio Pasangan Non Muslim ber Akta Nikah, untuk tahun 2018 adalah sebanyak 4.251 Akta Perkawinan yang telah diterbitkan, apabila dibandingkan dengan tahun 2017 yang penerbitan Kutipan Akta Perkawinannya mencapai 3.815 dokumen, apabila dipersentasekan mengalami peningkatan capaian sebesar 11,43%, sampai akhir tahun 2018 Kutipan Akta Perkawinan yang telah diterbitkan adalah sebanyak 95.330 dokumen Kutipan Akta Perkawinan, untuk persentasenya kami menganggap 100 % dalam penerbitan Akta Perkawinan, karena tidak adanya data pembanding jumlah orang yang menikah dalam setiap tahunnya, hal ini dikarenakan tidak adanya data Perkawinan Penduduk Non Muslim secara keseluruhan, untuk itu disetiap tahunnya kami selalu melakukan kegiatan pelayanan langsung penerbitan Kutipan Akta Perkawinan di beberapa kecamatan.
- 4) Berdasarkan hasil capaian kinerja IKU kegiatan ini sebaiknya dilakukan pelayanan langsung (jemput bola) berdasarkan data dimana banyak terdapat penduduk non muslim.
- 5) Persentase Penerbitan Akta Kematian, untuk tahun 2018 adalah sebanyak 7.842 Akta Kematian yang telah diterbitkan, apabila dibandingkan dengan tahun 2017 penerbitan Akta Kematian adalah sebanyak 1.328 lembar, maka dapat dipersentasekan mengalami peningkatan sebesar 591%, untuk persentase penerbitan keseluruhan kami menganggap 100 % dalam penerbitan Akta kematian, karena tidak ada data pembandingnya dalam setiap tahunnya, hal ini dikarenakan tidak adanya data laporan kematian penduduk secara keseluruhan.
- 6) Berdasarkan hasil capaian kinerja IKU kegiatan ini sebaiknya dilakukan pelayanan langsung (jemput bola) berdasarkan data dimana banyak terdapat penduduk yang telah meninggal dunia, adapun untuk mengetahui data kematian penduduk sebaiknya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan kantor Kecamatan.
- 7) Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran, pada awal tahun Renstra telah mencapai 88,41%, realisasi tahun 2017 adalah sebesar 612.677 atau 90,80%, untuk realisasi tahun 2018 adalah sebesar 619.301 atau 91,38% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 kepemilikan Akta Kelahiran terjadi kenaikan sebesar 6,634 atau 0,58%. Untuk diketahui data yang ada didalam database dimana setiap orang/penduduk yang memiliki nomor registrasi atau nomor Kutipan Akta Kelahiran tercatat didalam database sebesar 51,04%, sedangkan 40,34% Kutipan Akta Kelahiran belum tercatat / terinput kedalam database kepemilikan akta kelahiran.
- 8) Berdasarkan hasil capaian kinerja IKU kegiatan tiap tahunnya mengalami peningkatan capaian kinerja, Maka kegiatan pelayanan langsung (Jemput Bola), harus tetap dilaksanakan dengan penambahan pagu dana kegiatan yang mendukung disamping berupaya terus melakukan inovasi pelayanan dibidang pencatatan sipil khususnya pelayanan akta kelahiran.
- 9) Cakupan RT memiliki laptop, pada awal tahun Renstra telah mencapai 8,7% atau sebanyak 267 RT, untuk capaian tahun 2017 telah terealisasi sebanyak 280 RT, sedangkan untuk tahun 2018 terealisasi sebanyak 100 RT atau apabila dijumlahkan telah mencapai 647 RT dengan persentase sebesar 21,16%, untuk rencana ditahun 2019 kami menargetkan 577 RT atau mencapai 40,03%, sedangkan proyeksi tahun 2020 ditargetkan

sebanyak 1.000 RT atau 72,73% dan tahun 2021 adalah sebanyak 834 RT, sehingga pada akhir tahun Renstra dapat terealisasi sesuai dengan yang telah direncanakan yaitu 3.058 RT.

- 10) Berdasarkan hasil capaian kinerja kegiatan ini sebaiknya ditahun yang akan datang agar dapat dilakukan perubahan pada harga dan spesifikasi teknis laptop yang diadakan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukannya sehingga dapat menambah kuantitas tanpa mengurangi kualitas laptop yang diadakan dengan menyesuaikan dengan kondisi keuangan saat ini, agar target yang ingin dicapai dapat terlaksana secara maksimal disetiap tahunnya.
- 11) Cakupan RT yang menguasai Aplikasi Teknis Kependudukan, merupakan indikator kinerja yang baru bisa dilaksanakan pada Tahun 2017, yang terealisasi sebanyak 364 RT untuk kecamatan Tenggarong, sedangkan untuk tahun 2018 terealisasi sebanyak 183 RT untuk kecamatan Sanga-Sanga, apabila dipersentasekan realisasi kinerja kegiatan ini telah mencapai 17,89%, selanjutnya kegiatan ini akan dilaksanakan pada tahun 2019 dengan target kinerja 677 RT dan direncanakan tahun 2020 dengan target kinerja sebanyak 1.000 RT, sedangkan untuk tahun 2021 diproyeksikan sebanyak 834 RT, adapun jumlah keseluruhan target yang harus dicapai hingga akhir tahun Renstra adalah sebesar 3.058 RT.
- 12) Sebaiknya kegiatan ini diadakan dan dianggarkan pada anggaran kas diawal tahun atau ditriwulan pertama sehingga banyak waktu tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini, sehingga RT yang dilakukan Bimtek dapat berjalan maksimal tanpa harus menunda ditahun selanjutnya.
- 13) Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan ditingkat RT berbasis SIAK, merupakan indikator kinerja yang dari awal tahun Renstra tidak pernah dilaksanakan, begitu juga ditahun 2018 tidak direalisasikan walaupun anggarannya telah tersedia, hal ini dikarenakan setelah dilakukan bimbingan teknis RT yang ada di kecamatan Tenggarong ternyata hampir keseluruhan ketua RT sudah memiliki jaringan internet dirumahnya masing-masing maupun yang melalui jaringan telephone selular (smartphone), oleh sebab setelah dilakukan evaluasi maka kegiatan ini tidak akan dilaksanakan lagi demikian juga untuk ditahun-tahun selanjutnya, mengingat kegiatan ini telah dianggarkan maka untuk realisasi kinerja kegiatan ini adalah sebesar 0% dari yang ditargetkan 100 %, selanjutnya kegiatan ini akan disesuaikan lagi pada Review Renstra Tahun 2019, demikian juga dengan Indikator Kinerja Program dan Kegiatannya akan disesuaikan lagi.
- 14) Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan, merupakan indikator kinerja yang telah dilaksanakan setiap tahun, untuk capaian tahun 2018 telah terealisasi 100%, dengan jumlah kegiatan pada APBD Tahun 2018 sebanyak 6 kegiatan, kegiatan ini juga didukung dari Dana Alokasi Khusus, sehingga layanan informasi dapat terealisasi 100%, sedangkan untuk tahun 2019 telah dianggarkan sesuai dengan target yang ditetapkan, untuk proyeksi tahun 2020 tetap ditargetkan sesuai indikator kinerja yang dilakukan perubahan agar capaian kinerja kegiatan dapat terukur dengan baik.

### 3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

**Tabel 3.38**  
Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2018

URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)
BELANJA	17.794.133.670,55	15.496.820.515,00	87,09
BELANJA OPERASI	15.251.713.056,55	13.087.656.265,00	85,81
- Belanja Pegawai	9.280.528.976,55	7.934.487.863,00	85,80
- Belanja Barang dan Jasa	5.971.184.080,00	5.153.168.402,00	86,30
BELANJA MODAL	2.542.420.614,00	2.409.164.250,00	94,76
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.354.556.714,00	2.275.058.250,00	96,62
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	187.863.900,00	134.106.000,00	71,38

Dari tabel diatas, masing-masing Program memiliki persentase perbandingan antara alokasi dan realisasi anggaran adalah sebagai berikut : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran persentase perbandingan antara alokasi dan realisasi anggaran adalah 96,33%. Persentase perbandingan antara alokasi dan realisasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah 87,90% sedangkan Persentase perbandingan antara alokasi dan realisasi anggaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah 97,78%.

Program Penataan Administrasi Kependudukan persentase perbandingan antara alokasi dan realisasi anggaran adalah 88,71%. Persentase perbandingan antara alokasi dan realisasi anggaran Program Keserasian Kebijakan Kependudukan adalah 67,48%

### 4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi sementara kesesuaian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 yang telah dilakukan bersama dengan BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat kami jelaskan kesesuaian perencanaan pembangunan daerah berdasarkan program dan kegiatan yang telah dituangkan didalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018, sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan jumlah kegiatan sebanyak 14 kegiatan, dimana dari 14 kegiatan tersebut hanya terealisasi sebanyak 11 kegiatan, 3 kegiatan tidak terealisasi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang dianggap penting atau prioritas untuk dilaksanakan yang diutamakan untuk diberikan anggaran dan dimasukkan kedalam KUA PPAS Tahun 2018, selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terakomodir akan dilakukan penyesuaian terhadap dokumen awal perencanaan (RENSTRA) dan akan diagendakan kedalam revisi Renstra.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan jumlah kegiatan sebanyak 4 kegiatan, dimana dari 4 kegiatan tersebut hanya terealisasi sebanyak 3 kegiatan, 1 kegiatan tidak terealisasi. Selanjutnya

untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terakomodir akan dilakukan penyesuaian terhadap dokumen awal perencanaan (RENSTRA) dan akan diagendakan kedalam revisi Renstra.

- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 kegiatan, dimana dari 2 kegiatan tersebut tidak ada yang terealisasi, hal ini dikarenakan kegiatan ini dianggap tidak mendesak untuk dilaksanakan dan dapat ditunda pelaksanaannya sampai adanya anggaran yang tersedia ditahun-tahun selanjutnya, sehingga kegiatan ini akan dilakukan penyesuaian terhadap dokumen awal perencanaan (RENSTRA) dan akan diagendakan kedalam revisi Renstra.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 kegiatan, dimana dari 2 kegiatan tersebut tidak ada yang terealisasi, hal ini dikarenakan kegiatan ini dianggap tidak mendesak untuk dilaksanakan dan dapat ditunda pelaksanaannya sampai adanya anggaran yang tersedia ditahun-tahun selanjutnya, sehingga kegiatan ini akan dilakukan penyesuaian terhadap dokumen awal perencanaan (RENSTRA) dan akan diagendakan kedalam revisi Renstra.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan jumlah kegiatan sebanyak 4 kegiatan, dimana dari 4 kegiatan tersebut hanya 1 kegiatan yang terealisasi yakni Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monitoring dan Evaluasi. Selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terakomodir akan dilakukan penyesuaian terhadap dokumen awal perencanaan (RENSTRA) dan akan diagendakan kedalam revisi Renstra.
- 6) Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan jumlah kegiatan sebanyak 20 kegiatan, dimana dari 20 kegiatan tersebut hanya terealisasi sebanyak 13 kegiatan. Selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terakomodir akan dilakukan penyesuaian terhadap dokumen awal perencanaan (RENSTRA) dan akan diagendakan kedalam revisi Renstra.
- 7) Program Keserasian Kebijakan Kependudukan, dengan jumlah kegiatan sebanyak 8 kegiatan, dimana dari 8 kegiatan tersebut 5 kegiatan terakomodir 3 tidak. Hal ini dikarenakan kegiatan-kegiatan yang dianggap penting atau prioritas untuk dilaksanakan yang diutamakan untuk diberikan anggaran dan dimasukkan kedalam KUA PPAS Tahun 2018, selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terakomodir akan dilakukan penyesuaian terhadap dokumen awal perencanaan (RENSTRA) dan akan diagendakan kedalam revisi Renstra.

#### **5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)**

Sarana berupa gedung kantor yang digunakan adalah Kantor Bersama beberapa SKPD, sementara untuk sarana dan prasarana lain dirasa mencukupi. Namun demikian ada beberapa hal yang sangat mendapat perhatian :

1. Perlu adanya peningkatan kinerja aparatur berupa pelatihan-pelatihan.
2. Perlu penambahan ruang penyimpanan arsip dan berkas Akta Pencatatan Sipil.

3. Perlu ruang untuk gudang penyimpanan barang.
4. Penutupan ruang terbuka di dalam kantor dan pembongkaran kolam air mancur sehingga dapat digunakan untuk pelayanan.

## 6. Permasalahan dan Solusi

Kurangnya Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada pengolahan Data Base sehingga bergantung kepada staf tenaga honorer. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut perlunya diadakan pelatihan kepada aparatur yang menangani hal tersebut. Atau bisa juga dengan merekrut Aparatur Sipil Negara yang memahami dan mengerti tentang pengolahan data base, misal dari Pusdatinkom, yang memiliki ijazah Sarjana Komputer dan yang menguasai jaringan.

## 7. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

- a. Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik Tahun 2018.
- b. Pada Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara telah menggunakan Sistem Antrian Elektronik dalam hal pelayanan publik.

## 13. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP2KB)

### 1. Program dan Kegiatan

Secara keseluruhan capaian kinerja berdasarkan hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas PPKB tahun 2018 yang sudah tercapai dapat diuraikan sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 3.39**  
Pencapaian Program dan Kegiatan Tahun 2018

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>94,93 Persen</b>	<b>100%</b>
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 rekening	100%
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas	125 unit	100%
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Aparatur	15 orang	100%
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	-	100%
5	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah penyediaan	35 jenis	100%



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		ATK		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	709 exemplar (Koran dan majalah)	100%
6	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	35 alat kebersihan dan bahan pembersih	100%
7	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makan minum	12 bulan	100%
8	Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	Jumlah tenaga Honorer	58 THL	100%
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan Penggandaan	8481 lembar	100%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah Aparatur	103 orang	100%
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kantor</b>	<b>97,08 persen</b>	<b>100%</b>
11	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	2 unit	100%
12	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Ruang Yang Direhab	20 m <sup>2</sup>	100%
13	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Oprasional	35 unit kendaraan dinas	100%
14	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor	300 m <sup>2</sup>	100%
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tingkat capaian akuntabilitas kinerja</b>	<b>70 persen</b>	<b>100%</b>
15	Penyusunan dokumen rencana laporan kinerja keuangan dan kinerja	Jumlah dokumen	7 dokumen	100%
16	Inventarisasi BMD	Jumlah Aset		
17	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga			
<b>IV</b>	<b>Program Keluarga Berencana</b>	<b>Angka pemakaian kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun</b>	<b>72,01 persen</b>	<b>100%</b>
		<b>Cakupan pelayanan KB baru</b>	<b>15,12 persen</b>	
18	Alokasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK)	Jumlah Balai Penyuluh yang mendapat BOKB	9 balai	100%
19	Peningkatan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana (DAK)	Jumlah Gedung yang dibangun	100 persen	100%
20	Rapat koordinasi PKB/PLKB	Jumlah peserta	150 orang	60%
21	Grand desain Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah kegiatan	75 persen	0%



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
V	<b>Program Pembinaan Kesertaan ber-KB Jalur Pemerintah</b>	<b>Presentase akseptor KB dari keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 yang mendapatkan pelayanan ber-KB</b>	<b>8,6 persen</b>	<b>100%</b>
		<b>Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Berkeluarga Berencana (KB)</b>	<b>58,35 persen</b>	
22	Pelayanan KB Gratis bagi keluarga miskin	Jumlah Peserta	<b>100 persen</b>	<b>100%</b>
VI	<b>Program Advokasi, Pergerakan dan Informasi</b>	<b>Kegiatan advokasi, pergerakan dan informasi</b>	<b>18 kegiatan</b>	<b>100%</b>
23	Pendataan Keluarga	Jumlah Kepala Keluarga	5500 kepala keluarga	100%
VII	<b>Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</b>	<b>Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri</b>	<b>40,30 persen</b>	<b>100%</b>
		<b>Cakupan keluarga anggota BKB yang ber-KB</b>	<b>85,18 persen</b>	
		<b>Cakupan keluarga anggota BKR yang ber-KB</b>	<b>90,59 persen</b>	
		<b>Cakupan keluarga anggota BKL yang ber-KB</b>	<b>85,18 persen</b>	
24	Peningkatan keterampilan kader dan anggota kelompok UPPKS	Jumlah Kader	15 kader	100%

Sesuai dengan pengukuran capaian kinerja suatu instansi pemerintah maka perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan serta penyerapan anggaran yang telah dilaksanakan agar diketahui sampai sejauh mana capaian program dan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan anggaran yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pendampingan Dana Alokasi Khusus atau DAK

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka menjabarkan dan sekaligus mengimplementasikan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak terlepas dari sasaran strategis RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka disusunlah tujuan dan sasaran strategis yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas PPKB Kabupaten Kutai

Kartanegara.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PPKB adalah Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio KB Aktif dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.40**

Target Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016–2021

NO	TAHUN	TARGET (%)		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN	
		PERTUMBUHAN PENDUDUK ALAMI	RASIO KB AKTIF	PERTUMBUHAN PENDUDUK ALAMI	RASIO KB AKTIF
1	2016	2,40	73,88	-	-
2	2017	2,32	72,71	-	-
3	2018	2,28	73,29	1.800.000.000	1.950.000.000
4	2019	2,24	74,40	1.900.000.000	2.050.000.000
5	2020	2,20	74,90	1.900.000.000	2.050.000.000
6	2021	2,16	75,40	1.950.000.000	2.100.000.000
TOTAL				<b>7.550.000.000</b>	<b>8.150.000.000</b>

### 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif pada Dinas PPKB terhitung sejak bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 sebanyak 105 orang, sebagaimana tabel dibawah ini

**Tabel 3.41**

Sumber Daya Aparatur Dinas PPKB berdasarkan ruang / golongan Tahun 2017

No	Pangkat / Golongan		Jumlah (Org)
1	Pembina Utama Muda	IV/c	-
2	Pembina Tk.1	IV/b	1
3	Pembina	IV/a	14
4	Penata Tk.I	III/d	11
5	Penata	III/c	9
6	Penata Muda Tk.I	III/b	15
7	Penata Muda	III/a	-
8	Pengatur Tk. I	II/d	2
9	Pengatur	II/c	11
10	Pengatur Muda Tk.I	II/b	3
11	Pengatur Muda	II/a	1
Jumlah			<b>67</b>

#### 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2018 Anggaran SKPD sebesar Rp 8.748.696.895,00.- dimana dana tersebut di alokasi untuk menunjang Belanja Program dan Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pagu Anggaran dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp 2.846.006.895.000,00.- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp7.354.891.297,00.- dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 5.902.690.000,00.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 4.782.050.663,00.- Dapat dilihat total belanja SKPD pada tahun 2018 sebesar Rp 8.748.696.895,00.- atau realisasi keuangan sebesar 84,07%

#### 5. Permasalahan dan Solusi

Dalam menganalisa suatu permasalahan dalam sistem kinerja SKPD maka dapat dilihat dari hasil atau capaian kinerja selama satu tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya. Capaian analisis kinerja pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Adapun capaian analisis kinerja dan rekapitulasi pelaksanaan rencana kerja yang belum terlaksana sepenuhnya atau belum mencapai target bisa dilihat pada tahun 2018 dengan indikator yang ingin dicapai sesuai dengan sasaran renstra SKPD pada tahun tersebut sebanyak 7 indikator sasaran dengan pagu program kegiatan yang direncanakan sebesar Rp.8.748.696.895,00,-

Pada tahun 2018 dari rencana pada renja dibanding realisasi ada beberapa yang tidak memenuhi target yang terdiri :

- Program Keluarga Berencana dengan indikator rata-rata jumlah anak per keluarga terrealisasi sebesar 100% dengan penunjang kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) yaitu bantuan operasional kb dak 2018 yang mana realisasi kinerja dari program ini sebesar 100 %. Sementara kegiatan yang belum bisa secara optimal dilaksanakan adalah kegiatan Rapat KoordinasiPKB/PLKB dengan capaian 60%. Dan kegiatan yang belum bisa dilaksanakan pada tahun lalu 2018 adalah kegiatan Grand Design Dinas PPKB capaian 0% dengan kendala keterbatasan waktu pelaksanaannya.

Dari analisis kinerja dan capaian diatas tersebut, masih ada beberapa yang belum memenuhi target bahkan ada kegiatan yang belum terlaksana pada tahun lalu 2018, maka diharapkan pada rencana kerj di tahun 2019 ini SKPD DP2KB mampu menemukan solusi yang tepat guna pada sasaran dan target kinerja yang didukung penuh oleh pemerintah dalam anggaran pagu program kegiatannya. Demikian juga dalam Pemerintah menetapkan program dan kegiatan Penyelenggaraan Pengendalian Kuantitas Penduduk berkaitan dengan :

- a. perencanaan kependudukan;
- b. penyediaan parameter kependudukan;
- c. analisis dampak kependudukan;
- d. kerjasama pendidikan kependudukan; dan
- e. penanganan isu-isu kependudukan di daerah provinsi, kabupaten dan kota. Dengan cara memberikan pembinaan dan pemenuhan pelayanan penduduk melalui advokasi, KIE, serta penyediaan prasarana.

Penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk dilakukan untuk melembagakan dan membudayakan NKKBS dilakukan melalui Penyelenggaraan Keluarga Berencana. Pemerintah menetapkan Kebijakan Nasional Pembangunan Keluarga diarahkan untuk:

- a. Melembagakan dan membudayakan NKKBS;
- b. Memberdayakan 8 fungsi keluarga;
- c. Memandirikan keluarga;
- d. Memberdayakan kearifan lokal;
- e. Meningkatkan kualitas seluruh siklus hidup;
- f. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; dan
- g. Memberdayakan peran serta masyarakat.

## 6. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

MASALAH DAN ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH					
NO.	MASALAH	AKAR MASALAH	ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH	Program	Kegiatan
1	Kurang maksimalnya kinerja PLKB	Jarak tempuh yang jauh (akses dari Desa ke Desa Jauh dan Sulit) *jalur darat dan jalur sungai	sarana transportasi air dan darat	Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana transportasi air dan darat
		Koordinasi dan Komunikasi Kurang (Kurang aktif)	Media komunikasi dan informasi	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Perlengkapan SDM Aparatur
			Karena dana operasional terbatas		
2	Mebutuhkan Supervisi di Setiap Kecamatan	Kurangnya koordinasi dan informasi contoh: Ketersediaan dan Pembagian ALOKON untuk memenuhi permintaan masyarakat	Memfasilitasi Supervisi disetiap Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengawasan dan Evaluasi pada setiap Kecamatan
3	Parameter Kependudukan	Peremajaan data lama dan baru, penyesuaian dengan indikator Permendagri 2017	Melakukan Studi Kasus	Pengendalian Penduduk	Pendatan Keluarga
	Pendataan Kependudukan Penyediaan Data Mikro Keluarga disetiap Desa	Pengolahan Data	Melakukan Studi Banding  Pelatihan Kompetensi untuk SDM	Advokasi, Pergerakan dan Informasi	Penyediaan Data dan Informasi  Koordinasi Program KKB-PK

MASALAH DAN ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH					
NO.	MASALAH	AKAR MASALAH	ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH	Program	Kegiatan
			Aparatur		
4	Menerapkan dan Melaksanakan NKKBS	Peningkatan Faskes	Memenuhi faskes dengan permintaan masyarakat sesuai standarisasi pelayanan kesehatan masyarakat	Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Pengembangan ketahanan keluarga bagi generasi muda
		Pembinaan Keluarga, Agama, Sosial, Kesehatan dan Pendidikan	Membentuk dan Membina Wadah atau Kelempok Bina Keluarga		Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelompok Catur Bina
		1. bapak dan Ibu			
		2. bapak dan anak			
		3. ibu dan anak			
4. anak saja					
5	Tindak Lanjut Kampung KB	Belum ada suport PEMDA KUKAR dalam memfasilitasi lintas POKJA untuk menindaklanjuti permasalahan	Kelanjutan Kampung KB bisa direncanakan dan dilaksanakan serta dijalankan bersama dengan lintas POKJA tentunya dengan Suport dari PEMDA KUKAR	Advokasi, Pergerakan dan Informasi	Pengembangan Kampung KB

#### 14. URUSAN PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN

##### 1. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 menggunakan Alokasi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp 27.431.648.764,37 (Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah Koma Tiga Puluh Tujuh sen), dengan Realisasi sebesar Rp 26.398.896.409,00 (Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah), dengan realisasi keuangan 96,24 % dengan Sisa Anggaran sebesar Rp 1.032.752.355,37 (Satu Milyar Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah Koma Tiga Puluh Tujuh sen).

Tabel 3.42

Pencapaian program dan kegiatan (Realisasi fisik atau output)

No	Program dan Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
				(Rp)	%
1	2		3	4	5
A.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG :</b>				
	1.	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan</b>	11.752.076.945,37	11.488.568.764,00	97,76
B.	<b>BELANJA LANGSUNG :</b>				
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:</b>				
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	651.104.640,00	493.266.870,00	75,76
	2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	116.383.495,00	114.883.196,00	98,71
	3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	259.742.974,00	207.702.000,00	79,96
	4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	161.156.435,00	158.636.000,00	98,44
	5.	Penyediaan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	2.634.740.160,00	2.481.631.920,00	94,19
	6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000,00	13.360.000,00	17,81
	7.	Penyediaan Makanan dan Minuman	73.268.294,00	73.235.500,00	99,96
	8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	73.720.079,00	69.277.850,00	93,97
	9.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	250.000.000,00	249.379.318,00	99,75
2.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :</b>				
	1.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	20.000.000,00	15.298.500,00	76,49
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	354.432.060,00	353.702.040,00	99,79
3.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan:</b>				
	1.	Inventarisasi BMD	50.000.000,00	49.972.800,00	99,95
	2	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	8.110.023.682,00	8.067.917.810,00	99,48
4.	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ :</b>				
	1.	Peningkatan/Rehabilitasi Pemeliharaan Dermaga	200.000.000,00	-	-
	2.	Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	95.801.000,00	96
	3.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Angkutan Jalan	150.000.000,00	149.769.900,00	99,85
5.	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>				
	1.	Rokornis Dinas Perhubungan Se-Kalimantan Timur	250.000.000,00	249.962.541,00	99,99
	2	Pelaksanaan Pengawasan	100.000.000,00	99.750.600,00	99,75

No	Program dan Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
				(Rp)	%
1	2		3	4	5
		Keselamatan Pelayaran Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan			
6	<b>Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>				
	1.	Pengadaan Material PKB, Parkir Kendaraan Bermotor dan Retribusi Tambat Kapal	300.000.000,00	285.563.500,00	95,19
	2.	Pengadaan alat Uji Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	97.980.300,00	97,98
7	<b>Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas</b>				
	1.	Pengaturan dan Penataan Arus Lalu Lintas dan Parkir dalam rangka Hari-hari Besar, Pekan Daerah dan Hari-hari Tertentu lainnya Kab. Kukar	100.000.000,00	99.422.800,00	99,42
	2.	Pengecatan Marka Jalan dan Pengadaan serta Pemasangan Paaku Jalan	150.000.000,00	148.584.400,00	99,06
	3.	DED Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Umum Muara Badak	1.200.000.000,00	1.167.457.000, 00	97,29
	4.	Pembersihan aliran Sungai di Kecamatan Muara Kaman	200.000.000,00	167.771.800,00	83,89
		<b>Jumlah</b>	<b>27.431.648.764,</b>	<b>26.398.896.40</b>	<b>96,2</b>
			<b>37</b>	<b>9,00</b>	<b>4</b>

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan, kelancaran pelayanan angkutan jalan dan sungai secara terpadu maka Dinas Perhubungan mengupayakan dalam hal sebagai berikut :

- Angkutan jalan terdiri dari :
  1. Jaringan pelayanan angkutan jalan dengan menjaga ketersediaan angkutan umum yang melayani perkotaan dan pedesaan, dengan jaringan trayek yang menghubungkan daerah perkotaan dan pedesaan dalam Kabupaten Kutai kartanegara.
  2. Jaringan prasarana angkutan jalan mengupayakan tersedianya halte pada jalur trayek angkutan umum serta tersedianya terminal angkutan penumpang.
  3. Fasilitas perlengkapan jalan dalam hal ini selalu menjaga ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu, marka, dan guardrill dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten Kutai Kartanegara.
  4. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor berupaya meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor terhadap kendaraan wajib uji.

5. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk ini Dinas selalu mengupayakan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya di bidang terminal, pengujian kendaraan bermotor, bidang MRL, evaluasi andalalin, dan pengelolaan parkir.
  6. Keselamatan dalam hal ini juga terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek perkotaan dan pedesaan dalam Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan :
1. Jaringan pelayanan angkutan sungai dan danau, selalu menjaga ketersediaan kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.
  2. Jaringan prasarana angkutan sungai dan danau, menyediakan pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi dalam wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.
  3. Keselamatan, ini selalu menjaga standar keselamatan bagi kapal sungai dengan ukuran dibawah 7 GT dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
  4. Sumber Daya Manusia (SDM), selalu menjaga SDM yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau dengan ukuran dibawah 7 GT untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.
- Angkutan Laut :
1. Jaringan pelayanan angkutan laut, berupaya menjaga ketersediaan kapal laut yang beroperasi pada lintas atau yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternative angkutan jalan.
  2. Jaringan prasarana angkutan laut, tersedianya dermaga pada setiap ibu kota kecamatan dalam Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternative angkutan jalan.
  3. Keselamatan, selalu menjaga standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
  4. Sumber Daya Manusia (SDM), selalu menjaga ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT.

Sejalan dengan angkutan di wilayah kecamatan, pedesaan, dalam rangka pengembangan jaringan pelayanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dilakukan pembinaan dan pendaftaran atau registrasi terhadap angkutan sungai dan danau tersebut. Untuk kelancaran dan berkesinambungannya angkutan.

Diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah ada angkutan sungai yang menghubungkan antara kecamatan ke Kota Samarinda atau sebaliknya dengan trayek sebagai berikut :



1. Samarinda – Tenggarong;
2. Samarinda – Sebulu;
3. Samarinda – Muara Kaman;
4. Samarinda – Kota Bangun;
5. Samarinda – Muara Wis;
6. Samarinda – Muara Muntai;
7. Samarinda – Kembang Janggut;
8. Samarinda – Tabang;

Dan diwilayah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara juga dibangun beberapa dermaga untuk mendukung kelancaran mobilitas orang dan barang pada angkutan lokal tersebut adalah :

1. Dermaga Handil II Muara Jawa;
2. Dermaga Aji Imbut Kecamatan Tenggarong Seberang;
3. Dermaga Sungai Meriam Kecamatan Anggana;
4. Dermaga Kota Bangun Kecamatan Kota Bangun;
5. Dermaga Muara Muntai Kecamatan Muara Muntai;
6. Dermaga Muara Kaman Kecamatan Muara Kaman;
7. Dermaga Kembang Janggut di Kecamatan Kembang Janggut;
8. Dermaga Kahala di Kecamatan Kahala;
9. Dermaga Tuana Tuha di Kecamatan Kahala;
10. Dermaga Sebulu Seberang di Kecamatan Sebulu;
11. Dermaga Kecamatan Tabang.

### 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki aparatur sebanyak 138 (Seratus Tiga Puluh Delapan) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun 2018, dan memiliki pengalaman kerja yang cukup lama, serta dengan berbagai tingkat pendidikannya.

### 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No.	Uraian	Anggaran			
		Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Tidak Langsung	11.752.076.945,37	11488.568.764,00	263.508.181,37	97,76
2.	Belanja langsung	15.679.571.819,00	14.910.327.645,00	769.244.174,00	95,09
	<b>J u m l a h</b>	<b>27.431.648.764,37</b>	<b>26.398.896.409,00</b>	<b>1.032.752.355,37</b>	<b>96,24</b>

### 5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

**Tabel 3.43**

Sarana dan prasarana Dinas Perhubungan tahun 2018

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Meja Kerja	49 unit	baik

No.	Uraian	Jumlah		Keterangan
1	2	3		4
2.	Kursi Kerja	117	unit	baik
3.	Kursi Ruang Rapat	21	unit	baik
4.	Kursi Tamu	1	set	baik
5.	Mesin Poto Copy	4	unit	baik
6.	Komputer FC	29	unit	baik
7.	Laptop (Notebook)	16	unit	baik
8.	Printer	32	unit	baik
9.	Televisi	3	unit	baik
10.	Lrmari Arsip	25	unit	baik
11.	Piling Kabinet	25	unit	baik
12.	AC Standing	6	unit	Baik
13.	Mesin Tik	7	unit	baik
13.	AC 1 Pk	15	unit	baik
14.	AC ½ Pk	3	unit	baik
15.	Kipas Angin embun	2	unit	baik
16.	UPS / Stabilizer	6	unit	baik
17.	Projection Sreet	1	unit	baik
19.	Mesin absensi	10	unit	baik
20.	Sepeda Motor CB150R	15	unit	baik
21.	Sepeda Motor (Vario & Beat)	17	unit	baik
22.	Pick-Up	4	unit	baik
23.	Mobil Dinas (Mobil Penumpang)	5	unit	baik
24.	Mobil Derek	2	unit	baik
25.	Peralatan Uji Kendaraan Bermotor, masing-masing	1	set	baik

## 6. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan :
  - a. Menurunnya jumlah kendaraan angkutan penumpang umum dari 79 unit menjadi 45 unit, turun 56 % sampai dengan tahun 2018;
  - b. Rendahnya tingkat pelayanan (waktu tunggu tinggi dan lamanya waktu perjalanan);
  - c. Tidak sebandingnya kemampuan personil dibanding dengan permasalahan serta beban tugas yang ada.
2. Solusi :
  - a. Seharusnya ada peremajaan bagi kendaraan angkutan umum disemua lini trayek, dan diberikannya jaminan atau kemudahan dalam kepemilikan kendaraan bermotor khususnya yang melayani angkutan umum, khusus mengisi trayek-trayek yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.
  - b. Untuk mengatasi tingginya waktu tunggu, lamanya perjalanan angkutan umum seharusnya angkutan umum beroperasi dari terminal keberangkatan langsung pintu ke pintu, tidak dari terminal ke terminal, setelah penumpang habis diturunkan baru kembali keterminal tujuan trayek bersangkutan.
  - c. Peningkatan Sumber Daya Manusia harus ditingkatkan dengan

berbagai diklat teknis, pembekalan lebih banyak lagi di bidang perhubungan, dan jabatan yang masih lowong harus diisi untuk memperlancar tugas yang ada.

## 15. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN

### 1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Kutai Kartanegara telah ditetapkan dalam APBD tahun 2018. Berikut adalah capaian program dan kegiatan kinerja Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2018.

**Tabel. 3.45**  
Capaian Program dan Kegiatan (Realisasi Kinerja/Fisik/Output)

No	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase (%)
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>		<b>95,03</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai	Lembar	600	588	98,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan air dan listrik	Bulan	12	12	100,00
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas	Unit	28	25	89,29
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah administrasi keuangan	Orang	51	51	100,00
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis kebersihan kantor	Tahun	1	1	100,00
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	Jenis	5	2	40,00
7	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	Kotak	6.000	3.300	55,00
8	Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	Jumlah bulan adm teknis perkantoran	Orang	64	63	98,44
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	Lembar	50.000	23.000	46,00
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi	Kali	30	17	56,67
11	Penyediaan Bandwith	MBps	MBps	140	140	100,00

No	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahun 2018	Capaian Kinerja Tahun 2018	Persentase (%)
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>		<b>73,88</b>
12	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan kantor	Jenis	5	4	80,00
13	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	Unit	26	16	61,54
14	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang terpelihara	Bulan	12	12	100,00
15	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Jaringan ICT	Jumlah SKPD yang terpelihara dengan jaringan ICT	SKPD	81	77	95,06
16	Pemeliharaan dan Peningkatan SST dan Mecanical Electrical	Jumlah kecamatan yang terpelihara	tower	22	22	100,00
17	Sewa Disaster Recovery center (DRC)	Jumlah TeraByte (TB)	TeraByte (TB)	15	1	6,67
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>		<b>100,00</b>
18	Penyusunan Renja, Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Monev	Jumlah dokumen	Dokumen	3	3	100,00
19	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga		Kegiatan	8	8	100,00
	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Cakupan Layanan Sistem Informasi yang terintegrasi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>		<b>100,00</b>
20	Pengembangan Smart City	Jumlah Dokumen	Aparatur OPD	55	55	100,00

Dari tabel diatas maka dapat dilihat Capaian Kinerja pada Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sebesar 95,03%, Kegiatan :
  - a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Sebesar 98,00%
  - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar 100%
  - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional sebesar 89,29%
  - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan sebesar 100%
  - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor sebesar 100%

- f. Penyediaan alat tulis kantor sebesar 40%
  - g. Penyediaan makanan dan minuman sebesar 55%
  - h. Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran sebesar 98,44%
  - i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar 46%
  - j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah sebesar 56,67%
  - k. Penyediaan Bandwith sebesar 100%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 73,88%, Kegiatan :
    - a. Pengadaan peralatan gedung kantor sebesar 80%
    - b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebesar 61,54%
    - c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor sebesar 100%
    - d. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Jaringan ICT sebesar 95,06%
    - e. Pemeliharaan dan Peningkatan SST dan Mecnical Electrical sebesar 100%
    - f. Sewa Disaster Recovery center (DRC) sebesar 6,67%
  3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar 100%, Kegiatan :
    - a. Penyusunan Renja, Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Monev sebesar 100%
    - b. Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga sebesar 100%
  4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa sebesar 100%, Kegiatan :
    - a. Pengembangan Smart City sebesar 100%

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Data Existing	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kesimpulan
			s/d 2017	2018	2018		
Terwujudnya Smart City	Cakupan koneksi internet	Cakupan Layanan E-Government	58 OPD	100%	58 OPD	100%	Semua OPD sudah menerapkan Layanan E-Government baik berupa aplikasi maupun website, contoh aplikasi yang umum di gunakan, SIMDA Keuangan, E-Monev, Aplikasi Informasi Gaji dsb
		Cakupan wilayah yang terlayani Jaringan Telekomunikasi Seluler	18 Kecamatan (167 Kel/Desa)	100%	18 Kecamatan (167 Kel/Desa)	0%	Secara Umum jaringan telekomunikasi Seluler sudah terjangkau 18 Kecamatan (167 Kel/Desa) dan Desa yang masih BlankSpot ada 70 desa menurut data 2016, Sejak terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka kewenangan Telekomunikasi tidak lagi berada di Kabupaten (Diskominfo)

Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Data Existing	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kesimpulan
			s/d 2017	2018	2018		
		Cakupan Layanan Internet Ke Sekolah-sekolah	0	100%	0	0%	Data tidak ada, Secara umum data layanan yang dimiliki per wilayahan (Kec/Kel/Desa)
		Tingkat Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang Dan Jasa	58 OPD	100%	33 OPD	57%	Masih banyak OPD yang beranggapan RUP hanya di umumkan untuk paket pengadaan lelang saja, padahal seharusnya semua jenis lelang
		Rasio Wartel / Warnet terhadap Penduduk	0	100%	0	0%	Tidak ada data dikarenakan yang membidangi sudah tidak ada lagi
		Cakupan Layanan Pos dan Telekomunikasi	18 Kecamatan	100%	0	0%	Untuk data Layanan Pos data diambil dari data SIPD tahun 2017, kewenangan Pos bukan lagi kewenangan Diskominfo
		Cakupan Layanan Internet di Kecamatan/Desa/Kelurahan	18 Kecamatan (167 Kel/Desa)	100%	18 Kecamatan (167 Kel/Desa)	0%	Secara Umum jaringan internet sudah terjangkau di 18 Kecamatan (167 Kel/Desa), hanya ada beberapa desa yang masih belum terjangkau atau blankspot, menurut data tahun 2016 masih ada 70 desa yang masih blankspot
		Jumlah Aplikasi Teknologi Informasi Layanan SKPD	69 Aplikasi	100%	75 Aplikasi	100%	Semua OPD sudah melaksanakan Aplikasi Teknologi Informasi Layanan baik berupa aplikasi yang umum maupun yang khusus contoh aplikasi yang umum SIMDA Keuangan, E-Monev, Aplikasi Informasi Gaji dsb
		Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM	50 KIM	100%	0	0%	Tidak adanya anggaran yang menyebabkan tidak adanya kegiatan di tahun 2018
		Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional	15 informasi Nasional	100%	24 Informasi Nasional	100%	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional dapat dilakukan dengan Media Internet dan Media Sosial sehingga Pelaksanaan bisa berjalan optimal
		Cakupan Data Statistik Daerah	3 Buku	100%	0	0%	Tidak adanya anggaran yang menyebabkan tidak adanya kegiatan di tahun 2018

### 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Kartanegara per Desember 2018 berjumlah 86 orang ASN yang terdiri dari 25 Pejabat Struktural dan 61 Non Struktural, serta tidak terdapat Jabatan Fungsional.

### 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi			Total Realisasi	%
			Belanja Pegawai	Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.091.079.914	554.783.175	6.221.531.493	609.733.685	7.386.048.353	81,25

Dari table diatas maka dapat dilihat Alokasi Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2018 sebesar Rp. 9.091.079.914 dengan Capaian Realisasi Sebesar Rp. 7.386.048.353 (81,25%) dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sebesar 85,96%, Kegiatan :
  - a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Sebesar 98%
  - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar 62,55%
  - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional sebesar 88,89%
  - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan sebesar 97,52%
  - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor sebesar 33,33%
  - f. Penyediaan alat tulis kantor sebesar 49,18%
  - g. Penyediaan makanan dan minuman sebesar 55,28%
  - h. Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran sebesar 97,66%
  - i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar 45,78%
  - j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah sebesar 55,82%
  - k. Penyediaan Bandwith sebesar 94,38%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 41,50%, Kegiatan :
  - a. Pengadaan peralatan gedung kantor sebesar 75,17%
  - b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebesar 62,22%
  - c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor sebesar 56,10%
  - d. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Jaringan ICT sebesar 95,24%
  - e. Pemeliharaan dan Peningkatan SST dan Mecanical Electrical sebesar 99,88%
  - f. Sewa Disaster Recovery center (DRC) sebesar 0,20%
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar 99,95%, Kegiatan :
  - a. Penyusunan Renja, Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Monev

sebesar 96,54%

b. Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga sebesar 100%

4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa sebesar 85,47%, Kegiatan :

a. Pengembangan Smart City sebesar 85,47%

#### 5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Program / Kegiatan	Perencanaan Anggaran (Renja) Tahun 2018		Alokasi Anggaran Tahun 2018		Kesesuaian	Tingkat Kesesuaian (%)
	K	Rp.	K	Rp.		
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>4.540.756.654</b>		<b>.885.756.654</b>		<b>85,58</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600	3.000.000	600	3.000.000	YA	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	675.000.000	12	675.000.000	YA	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	28	10.000.000	28	10.000.000	YA	100,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	51	441.444.975	51	441.444.975	YA	100,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	25	30.000.000	1 Tahun	30.000.000	YA	100,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	35	90.000.000	5	90.000.000	YA	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000	30.000.000	50.000	30.000.000	YA	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.714	75.000.000	-	-	TIDAK	-
Penyediaan Makanan dan Minuman	6.000	35.000.000	6.000	35.000.000	YA	100,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	30	195.180.000	30	195.180.000	YA	100,00
Penyediaan Jasa Adm Teknis dan Perkantoran	12	1.130.870.436	64 Orang	1.130.870.436	YA	100,00
Penyediaan Bandwith	200	1.825.261.243	140	1.245.261.243	YA	68,22
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>3.305.000.000</b>		<b>1.775.000.000</b>		<b>53,71</b>
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12	300.000.000	-	-	TIDAK	-
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5	30.000.000	5	610.000.000	YA	2.033,33
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	3	10.000.000	-	-		-



Program / Kegiatan	Perencanaan Anggaran (Renja) Tahun 2018		Alokasi Anggaran Tahun 2018		Kesesuaian	Tingkat Kesesuaian (%)
	K	Rp.	K	Rp.		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	26	100.000.000	26	100.000.000	YA	100,00
Pemeliharaan Alat-Alat Studio, TV dan radio	1	100.000.000	-	-	TIDAK	-
Sewa Disaster Recovery center (DRC)	20	2.500.000.000	15	900.000.000	YA	36,00
Pemeliharaan Rutin berkala peralatan Jaringan ICT	100	150.000.000	81	150.000.000	YA	100,00
Pemeliharaan dan Peningkatan SST dan Mechanical Elektrikal	18	100.000.000	22 Tower	-	TIDAK	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12	15.000.000	12	15.000.000	YA	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		<b>200.000.000</b>		-		-
Pelatihan, Kursus dan Bimtek PNS/PPPK	20	200.000.000	-	-	TIDAK	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		<b>246.188.800</b>		<b>3.000.323.260</b>		<b>1.218,71</b>
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir	4	150.000.000	-	-	TIDAK	-
Pengelolaan Adm Perpajakan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika	12	50.000.000	-	-	TIDAK	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Monev	1	46.188.800	3	46.188.800	YA	100,00
Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga	-	-	8	2.954.134.460	TIDAK	-
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		<b>28.470.000.000</b>		<b>300.000.000</b>		<b>1,05</b>
Implementasi dan Pengembangan e-Government	50	500.000.000	-	-	TIDAK	-
Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan dan Layanan Publik	50	300.000.000	-	-	TIDAK	-
Penetration Testing (Pentes) Aplikasi dan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	2	150.000.000	-	-	TIDAK	-

Program / Kegiatan	Perencanaan Anggaran (Renja) Tahun 2018		Alokasi Anggaran Tahun 2018		Kesesuaian	Tingkat Kesesuaian (%)
	K	Rp.	K	Rp.		
Pengelolaan Pusat Komunitas Kreatif (PUSKOMKREF)	30	500.000.000	-	-	TIDAK	-
Integrasi Data Layanan	12	750.000.000	-	-	TIDAK	-
Optimalisasi Pengelolaan Data dan Pengembangan Aplikasi LPSE	3	350.000.000	-	-	TIDAK	-
Sosialisasi dan Bimtek Layanan Publik	100	500.000.000	-	-	TIDAK	-
Pengembangan Smart City	1	300.000.000	55 Aparatur	300.000.000	YA	100,00
Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Sekolah	100	9.560.000.000	-	-	TIDAK	-
Peningkatan Kapasitas Jaringan Wireless	77	1.000.000.000	-	-	TIDAK	-
Pengembangan Jaringan Kelurahan	6	2.400.000.000	-	-	TIDAK	-
Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Free Hotspot	10	1.360.000.000	-	-	TIDAK	-
Optimalisasi Jaringan SKPD	10	200.000.000	-	-	TIDAK	-
Pemeliharaan dan Peningkatan Perangkat Video Convergence	20	200.000.000	-	-	TIDAK	-
Pengecatan Tower	22	150.000.000	-	-	TIDAK	-
Pengadaan Genset	4	1.000.000.000	-	-	TIDAK	-
Pengelolaan dan Peningkatan Infra Struktur Data Center/NOC	1	250.000.000	-	-	TIDAK	-
Peningkatan Standarisasi LPSE dan ISO 9001 : 2008	100	600.000.000	-	-	TIDAK	-
Sosialisasi dan Bimtek Layanan LPSE	101	300.000.000	-	-	TIDAK	-
Audit ISO 9001 : 2008 LPSE	100	200.000.000	-	-	TIDAK	-
Sertifikasi ISO 27001 (Keamanan Informasi)	1	50.000.000	-	-	TIDAK	-
Inventarisasi Jumlah Warnet / Game Online di Wilayah Kutai Kartanegara	1	50.000.000	-	-	TIDAK	-
Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Tentang Content Internet dan pembatasan waktu bagi anak sekolah di Warnet / Game Online atau usaha sejenis	100	150.000.000	-	-	TIDAK	-

Program / Kegiatan	Perencanaan Anggaran (Renja) Tahun 2018		Alokasi Anggaran Tahun 2018		Kesesuaian	Tingkat Kesesuaian (%)
	K	Rp.	K	Rp.		
Identifikasi dan Inventarisasi Jenis Layanan Seluler di Wilayah Blankspot	1	150.000.000	-	-	TIDAK	-
Sosialisasi Pos Pedesaan	100	350.000.000	-	-	TIDAK	-
Pembangunan Jaringan Desa	4	100.000.000	-	-	TIDAK	-
Implementasi PPID Kab. Kutai Kartanegara (semula Program Media Massa)	17	250.000.000	-	-	TIDAK	-
Sosialisasi dan Advokasi Peraturan Perundang-undangan Kominfo (semula Program Media Massa)	100	2.300.000.000	-	-	TIDAK	-
Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP)	23	1.500.000.000	-	-	TIDAK	-
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika		<b>1.400.000.000</b>		-		-
Implementasi dan Pengembangan IGOS	10	300.000.000	-	-	TIDAK	-
Sosialisasi Sistem Layanan Informasi	10	150.000.000	-	-	TIDAK	-
Implementasi Penggunaan Aplikasi	5	150.000.000	-	-	TIDAK	-
Pelatihan SDM ( Software, Hardware, dan Network Security)	100	800.000.000	-	-	TIDAK	-
Program Penguatan Kelembagaan Komunikasi		<b>400.000.000</b>		-		-
Bimtek Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Kutai Kartanegara	25	250.000.000	-	-	TIDAK	-
Pelaksanaan Pekan Informasi Nasional (PIN)	25	150.000.000	-	-	TIDAK	-
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah		<b>9.546.000.000</b>		-		-
Penguatan Pertunjukan Rakyat sebagai Media Diseminasi Informasi	100	600.000.000	-	-	TIDAK	-
Pembuatan Naskah Akademik dan Perda LPPL RPK	10	150.000.000	-	-	TIDAK	-

Program / Kegiatan	Perencanaan Anggaran (Renja) Tahun 2018		Alokasi Anggaran Tahun 2018		Kesesuaian	Tingkat Kesesuaian (%)
	K	Rp.	K	Rp.		
Pembinaan dan Pengawasan Radio / TV Kabel	1	450.000.000	-	-	TIDAK	-
Pengelolaan News Room Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara	100	4.173.000.000	-	-	TIDAK	-
Penerbitan Buletin Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara	4	400.000.000	-	-	TIDAK	-
Pengelolaan Program Siaran Informasi Daerah Radio RPK	5	150.000.000	-	-	TIDAK	-
Penunjang Pengelolaan Siaran Radio RPK	520	150.000.000	-	-	TIDAK	-
Penyebarluasan Produk Hukum Pusat dan Daerah	2.000	148.000.000	-	-	TIDAK	-
Peringatan Hari-hari Besar	48	75.000.000	-	-	TIDAK	-
Peliputan Publikasi dan Dokumentasi	720	300.000.000	-	-	TIDAK	-
Penayangan Dialog Interaktif Program Pembangunan Bupati Kutai Kartanegara	7	250.000.000	-	-	TIDAK	-
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Mobil Mustika	200	250.000.000	-	-	TIDAK	-
Pengelolaan Hosting dan Domain Website Kutai Kartanegara.go.id	5	250.000.000	-	-	TIDAK	-
Pembuatan Video Profile Kabupaten Kutai Kartanegara	100	1.100.000.000	-	-	TIDAK	-
Pengelolaan Website Dinas Komunikasi dan Informatika. kutaikartanegarakab.go.id	48	75.000.000	-	-	TIDAK	-
Pengelolaan Website Domain Kutai Kartanegarakab.go.id	50	75.000.000	-	-	TIDAK	-
Peningkatan Expose Multi Media	772	350.000.000	-	-	TIDAK	-
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Mobil Pustaka	500	200.000.000	-	-	TIDAK	-

Program / Kegiatan	Perencanaan Anggaran (Renja) Tahun 2018		Alokasi Anggaran Tahun 2018		Kesesuaian	Tingkat Kesesuaian (%)
	K	Rp.	K	Rp.		
Pengelolaan Hosting, Domain, dan Portal Kabupaten	384	200.000.000	-	-	TIDAK	-
Pembuatan Video Profile Kabupaten Kutai Kartanegara	192	200.000.000	-	-	TIDAK	-
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Sektoral	-	-	-	-		-
Pengumpulan data dan statistik sektoral	-	-	-	-	TIDAK	-
Penyusunan data dan statistik sektoral	-	-	-	-	TIDAK	-
Penyusunan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	-	-	TIDAK	-
Penyusunan Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	-	-	TIDAK	-
Survey Indikator Sosial Ekonomi Daerah	-	-	-	-	TIDAK	-
Analisis Indikator Sosial Ekonomi Daerah	-	-	-	-	TIDAK	-
Monitoring dan Evaluasi Indikator Sosial Ekonomi Daerah	-	-	-	-	TIDAK	-
Kerjasama Indikator Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Kab. Kutai Kartanegara	-	-	-	-	TIDAK	-

## 6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Cukup memadai dalam seluruh kegiatan operasional selama ini.

## 7. Permasalahan dan Solusi

- a. Dalam pelaksanaan pembangunan dibidang Komunikasi dan Informatika, pada prinsipnya tidak ada hal-hal yang berarti, namun terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018, sebagai berikut :
  - 1) Kurangnya Pemahaman Aparatur terhadap peraturan yang ada.
  - 2) Terbatasnya persediaan dana yang diberikan, akibat dari rasionalisasi anggaran.
  - 3) Rendahnya dana uang persediaan.

- b. Dari permasalahan tersebut di atas dapat kami sampaikan solusi sebagai berikut :
- 1) Perlu adanya sosialisasi peraturan terhadap aparatur melalui penyuluhan dari OPD teknis yang terkait.
  - 2) Perlu adanya regulasi dan perhitungan kembali terkait penyediaan uang persediaan.

## 16. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

### 1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018. Adapun pelaksanaan dan capaian program kegiatan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 3.44**

Capaian Realisasi Program/Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
2	3	4	5	6
Urusan Wajib				
Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah lembar yang surat menyurat kantor telah disediakan	195 Lembar	195 Lembar	100,00
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman	500 Porsi	500 Porsi	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa rekening komunikasi, sumber daya air dan listrik	48 Rekening	36 Rekening	75,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional yang telah selesai diurus	34 Unit	24 Unit	70,59
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Jumlah paket rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	210 OH	210 OH	100,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah orang jasa administrasi keuangan	336 Orang	229 Orang	68,15
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah jasa administrasi perkantoran	528 Orang	494 Orang	93,56

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
2	3	4	5	6
<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	Tersedianya alat tulis kantor	1 Paket	1 Paket	100,00
<b>Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan</b>	Jumlah jenis/lembar/buku barang cetakan dan penggandaan	124.020 Lembar	92.810 Lembar	74,83
<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor</b>	jumlah jenis komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	100,00
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur			
<b>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</b>	tersedianya perlengkapan gedung kantor	5 Jenis	2 Jenis	40,00
<b>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</b>	tersedianya peralatan gedung kantor	5 Jenis	5 Jenis	100,00
<b>Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor</b>	Terpeliharanya Gedung Kantor	2.200 m2	1.100 m2	50,00
<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang telah dapat pemeliharaan rutin/ berkala	340 Jenis	340 Jenis	100,00
<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor</b>	jumlah jenis perlengkapan Gedung kantor yang telah dapat pemeliharaan rutin/berkala	20 Jenis	20 Jenis	100,00
<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung kantor</b>	jumlah unit peralatan Gedung kantor yang telah dapat pemeliharaan rutin/berkala	3 Paket	3 Paket	100,00
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				
<b>Publikasi Kinerja Pembangunan Pertindagkop pada/event Pembangunan Daerah</b>	jumlah event publikasi	3 Event	3 Event	100,00
<b>Pendampingan Gender</b>	jumlah kegiatan	3 Kegiatan	0	0
<b>Penyusunan Dokumen Renstra</b>	jumlah dokumen Renstra yang telah disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil</b>	1. Jumlah kemitraan koperasi dengan bank 2. Cakupan bina			

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
2	3	4	5	6
Menengah	UMKM			
Pengembangan UKM Center	1 Unit UKM Center Uk. 6 x 7 M standar	1 Unit	1 Unit	100,00
Pelatihan Peningkatan Usaha Kecil (UMKM)	Jumlah Pelaku Usaha Kecil (UMKM) terlatih	50 Orang	50 Orang	100,00
Bantuan Modal Untuk Koperasi Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Usaha Koperasi	1 Koperasi	0 Koperasi	0
Pelatihan Pengurus Koperasi	Jumlah Pengurus Koperasi Terlatih	30 Orang	30 Orang	100,00

#### 1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 10 Kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp. 1.514.265.000,- setelah Perubahan menjadi sebesar Rp. 1.478.884.200,- Pelaksanaan fisik kegiatan secara keseluruhan mencapai rata-rata 88,21% dengan nilai kinerja Sangat Baik Sedangkan untuk penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.266.924.263,- atau sekitar 85,67 % dengan nilai kinerja Sangat Baik.

#### 1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Tahun 2018 mengalami perubahan Anggaran dari total anggaran sebesar Rp. 323.067.908,- menjadi sebesar Rp. 348.719.708,- digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengadaan perlengkapan, peralatan gedung kantor, serta kendaraan dinas/ operasional. Pelaksanaan fisik kegiatan secara keseluruhan mencapai rata-rata 73,33 % dengan nilai kinerja Baik. Sedangkan untuk penyerapan anggaran sebesar Rp. 292.423.100,- atau 83,86 % dengan nilai kinerja Baik.

#### 1.3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mengakomodir 3 kegiatan, dengan alokasi anggaran Rp. 201.129.000,- ,namun karena adanya hal tertentu hanya 2 kegiatan yang dilaksanakan. Pelaksanaan fisik kegiatan yang dilaksanakan tersebut rata - rata 100% dengan nilai kinerja Memuaskan. Sedangkan untuk penyerapan anggaran sebesar 97,24% dengan nilai kinerja Sangat Baik.

#### 1.4 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah terdiri 4 kegiatan yang keseluruhannya merupakan kegiatan Musrenbang dengan total namun karena suatu hal hanya 3 kegiatan yang terlaksana, anggaran keseluruhan sebesar Rp. 256.243.907,- dengan serapan Rp. 211.232.000,- atau 82,43 % dengan nilai kinerja Baik. Pelaksanaan fisik kegiatan tersebut rata - rata 100% dengan nilai kinerja Memuaskan.



## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tidak mempunyai standar pelayanan minimal. Untuk mewujudkan visi, misi serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam pencapaian sasaran Strategis.

## 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Pegawai merupakan unsur pelaksana program dan kegiatan yang dilaksanakan satuan PD. Kekuatan pegawai akan sangat berpengaruh terhadap kinerja dan pencapaian tujuan organisasi.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan akhir Desember tahun 2018 memiliki pegawai sebanyak 83 orang.

## 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Adapun Rincian alokasi dan realisasi anggaran dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentasi (%)
2	4	5	6
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.478.884.200</b>	<b>1.266.924.263</b>	<b>85,67</b>
Penyediaan jasa surat menyurat	1.200.000,-	1.200.000,-	100,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	120.360.000,-	92.772.098,-	77,08
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	12.150.000,-	10.114.900,-	83,25
Penyediaan jasa administrasi keuangan	237.356.100,-	215.657.200,-	90,86
Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000,-	49.000.000,-	98,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	102.663.100,-	101.025.000,-	98,40
Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000	14.862.500,-	99,08
Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	513.539.520,-	450.352.808,-	87,70
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.000.000,-	39.379.500,-	78,76
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah	376.615.480,-	292.560.257,-	77,68
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>348.719.708</b>	<b>292.423.100</b>	<b>83,86</b>
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	51.201.900,-	49.688.800,-	97,04
Pengadaan peralatan gedung kantor	94.694.221,-	68.671.000,-	75,52

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
2	4	5	6
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	57.332.387,-	57.212.000,-	99,79
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	129.991.200,-	101.401.300,-	78,01
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	8.000.000,-	7.950.000,-	99,38
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	7.500.000,-	7.500.000,-	100,00
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>201.129.000</b>	<b>97.789.900</b>	<b>48,62</b>
Publikasi kinerja pembangunan koperasi dan UKM pada/ event pembangunan daerah	109.729.000,-	57.734.900,-	52,62
Penyusunan dokumen renstra	76.400.000,-	40.055.000	52,43
Pendampingan Gender	15.000.000,-	0	0
<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	<b>256.243.907</b>	<b>211.232.000</b>	<b>82,43</b>
Pengembangan UKM center kec. Ma. badk	151.682.000,-	139.382.000,-	91,89
Pelatihan peningkatan usaha kecil (UMKM)	25.000.000,-	25.000.000,-	100,00
Bantuan Modal untuk koperasi kelurahan	29.561.907	0	0
Pelatihan pengurus koperasi	50.000.000,-	46.850.000,-	93,70

#### 5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Sarana dan Prasarana merupakan bagian pendukung dalam kinerja PD untuk melaksanakan Kegiatan. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara tertera pada Tabel berikut :

NO	SARANA KERJA	JUMLAH	KETERANGAN
I	<b>Tanah</b>	<b>1</b>	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Baik
II	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>623</b>	
1	Portable Generating Set	1	Baik
2	Stationary Generating Set	1	Baik
3	Staion Wagon	1	Baik
4	Kendaraan Dinas Esselon	3	Baik
5	Pick Up	1	Baik
6	Sepeda Motor	33	Baik
7	Gerobak Dorong	10	Baik
8	Mesin Ketik Manual Portable	1	Baik
9	Mesin Ketik Manual Standar	1	Baik
10	Mesin Ketik Lain-lain	6	Baik
11	Mesin Penghitung Uang	1	Baik

NO	SARANA KERJA	JUMLAH	KETERANGAN
12	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	1	Baik
13	Lemari Besi	15	Baik
14	Rak Besi/Metal	4	Baik
15	Filling Besi/Metal	23	Baik
16	Filling Kayu	2	Baik
17	Band Kas	2	Baik
18	Lemari Kaca	21	Baik
19	Lemari Makan	1	Baik
20	Lemari kayu	2	Baik
21	Papan Visuil	2	Baik
22	Alat Penghancur Kertas	14	Baik
23	Papan Nama Instansi	1	Baik
24	White Board	1	Baik
25	Mesin Absensi	1	Baik
26	Lemari Kayu	14	Baik
27	Meja Rapat	19	Baik
28	Kursi Rapat	30	Baik
29	Kursi Putar	15	Baik
30	Bangku Tunggu	2	Baik
31	Tikar	29	Baik
32	Tenda	8	Baik
33	Meja Biro	32	Baik
34	Sofa	5	Baik
35	Mesin Penghisap Debu	1	Baik
36	Lemari Es	5	Baik
37	AC Unit	17	Baik
38	AC Split	18	Baik
39	Camera Film	2	Baik
40	Dispenser	2	Baik
41	Handy Cam	4	Baik
42	Gorden	30	Baik
43	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	6	Baik
44	Tabung Pemadam Kebakaran (APAR)	1	Baik
45	P.C Unit	22	Baik
46	Lap Top	17	Baik
47	Note Book	28	Baik
48	Hard Disk	2	Baik
49	Printer	48	Baik
50	Scanner	6	Baik
51	Peralatan Jaringan Lain-lain	4	Baik
52	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
53	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	2	Baik
54	Lemari Buku untuk Perpustakaan	5	Baik
55	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2	Baik
56	Audio Monitor Active	2	Baik
57	Microphone/Wireless Mic	2	Baik
58	Microphone floor stand	1	Baik
59	Professional Sound System	23	Baik
60	Camera Electronic	5	Baik
61	CCTV	3	Baik
62	Slide Projector	4	Baik
63	Mixer PVC	2	Baik
64	Loudspeaker	2	Baik
65	Handy Talkie	1	Baik
66	Facsimile	1	Baik
67	Apple / iPad Mini	4	Baik
68	Wireless Amplifier	2	Baik

NO	SARANA KERJA	JUMLAH	KETERANGAN
69	Pemancar Radio	1	Baik
70	Meja Reseption	1	Baik
71	Wireless	1	Baik
72	Personal Komputer Lain-lain	1	Baik
73	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	10	Baik
74	Switcher Manual	1	Baik
III	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>3</b>	Baik
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Baik
IV	<b>Jalan, Instalasi dan Jaringan</b>	<b>2</b>	Baik
1	Jaringan Distribusi Tegangan Di atas 20 KVA	1	Baik
2	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	Baik
V	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>2</b>	Baik
1	Buku Umum Lain-lain	2	Baik

## 6. Permasalahan dan Solusi

- a. Permasalahan pokok yang dihadapi pelaku UMKM adalah : Kompetensi pelaku usaha; Permodalan; Manajemen; Pemasaran; dan Teknologi.
- Masalah–masalah ini kemudian menjadi obyek pembinaan yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara khususnya pada seksi pemberdayaan dan pengembangan UMKM sesuai dengan tupoksinya;
  - Dalam pelaksanaansudah dapat dilihat kegiatan–kegiatan yang dilakukan untuk secara bertahap mengatasi permasalahan pokok UMKM, mengenai kewirausahaan, akses permodalan, pembukuan sederhana, pemasaran offline dan online, sedang penguasaan teknologi masih belum tersentuh;
  - Pelaksanaan kegiatan – kegiatan dimaksud dilakukan melalui pembiayaan APBD namun karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah maka pada tahun 2018 hanya ada 3 kegiatan yang merupakan kegiatan kecamatan ditempatkan pada Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara;
  - Diupayakan pula beberapa kegiatan yang dilakukan pembiayaan non APBD, melalui CSR/TJSP Perusahaan, kendalanya adalah bahwa program nasional maupun program daerah belum sinkron dengan program CSR/TJSP perusahaan.
- b. Pencapaian target :
1. UKM Naik Kelas (IKU)
 

Pencapaian target ukm naik kelas tahun ini dan juga tahun berikutnya kendala yang dihadapi adalah :

    - Pelaku yang sudah mendapat binaan tidak melaporkan perkembangan usahanya;
    - Pembina khususnya Dinas Koperasi dan UKM belum mampu melakukan monitoring terhadap para pelaku usaha disebabkan :
      - ✓ Keterbatasan SDM khususnya untuk petugas lapangan;
      - ✓ Wilayah Kab. Kukar yang cukup luas tentunya memerlukan biaya

yang cukup besar untuk mendukung kegiatan ini.

Untuk mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Menyiapkan SDM, Pendamping UMK yang bertugas membina UMK diwilayah kerjanya sehingga pelaku usaha ini benar-benar dapat naik kelas sesuai dengan indikator yang ditargetkan;
  - b. Pembinaan yang tidak dapat dilakukan melalui kegiatan diharapkan dapat dicover oleh dana generik.
2. Indikator Kinerja Program
- Demikian pula dengan indikator kinerja program, pencapaiannya dapat dilakukan :
- a. Melakukan kegiatan yang sifatnya menjemput bola, melakukan pendataan langsung karena awal dari perencanaan adalah adanya data, apabila tidak adanya kegiatan khusus untuk itu maka diharapkan penggunaan dana generik untuk wilayah – wilayah prioritas;
  - b. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan pembinaan UKM baik dengan instansi pemerintah maupun melalui CSR/TJSP perusahaan.
- c. Permasalahan Pembangunan Koperasi
1. Iklim yang mendukung pertumbuhan koperasi belum selaras dengan kehendak anggota koperasi, seperti kebijakan pemerintah yang belum jelas dan efektif untuk koperasi, sistem prasarana, pelayanan, pendidikan, dan penyuluhan.
  2. Banyaknya badan usaha lain yang bergerak pada bidang usaha yang sama dengan koperasi.
  3. Kurangnya fasilitas-fasilitas yang dapat menarik perhatian masyarakat dan masih banyaknya masyarakat yang tidak mempercayai koperasi.
  4. Pembinaan hubungan antara ala tperlengkapan koperasi, khususnya antara pengurus dan manajer, yang masih perlu ditingkatkan. Hal ini antara lain mengingat perlunya koordinasi yang mantab dan pembagian tugas serta tanggung jawab yang jelas. Harus dihindarkan apabila ada pengurus yang mengambil wewenang manajer melaksanakan tugas operasional.
  5. Kebijaksanaan dan program kerja koperasi masih cenderung timbul sebagai prakarsa pemerintah. Program-program yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhana nggota masih ada yang belum sepenuhnya dipadukan dengan program-program yang timbul dari prakarsa pemerintah. Keputusan koperasi yang mandiri masih belum dapat berkembang.
- Saran :
1. Pemerintah perlu memberikan perhatian kepada koperasi yang memang kesulitan dalam masalah permodalan. Dengan pemberian modal koperasi dapat memperluas usahanya sehingga dapat bertahan dan bias berkembang. Selain pemerintah, masyarakat merupakan pihak yang tak

kalah pentingnya, dimana mereka yang memiliki dana lebih dapat menyimpan uang mereka di koperasi yang nantinya dapat digunakan untuk modal koperasi.

2. Pemerintah harus bias mengawasi jalannya kegiatan koperasi sehingga bila koperasi mengalami kesulitan, koperasi bias mendapat bantuan dari pemerintah, misalnya saja membantu penyaluran dana untuk koperasi. Akan tetapi pemerintah juga jangan terlalu mencampuri kehidupan koperasi terutama hal-hal yang bersifat menghambat pertumbuhan koperasi. Pemerintah hendaknya membuat kebijakan-kebijakan yang dapat membantu perkembangan koperasi.

## 7. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 050.3/K.16/2019 tahun 2018 dalam rangka hari ulang tahun provinsi Kalimantan Timur ke – 62 Dinas Koperasi dan UKM mendapatkan panji, trofi serta piagam keberhasilan pembangunan dalam bidang Koperasi dan UMKM (SK terlampir).

## 17. URUSAN PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

### 1. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan pengukuran capaian kinerja suatu instansi pemerintah maka perlu adanya penilaian terhadap program dan kegiatan serta penyerapan anggaran yang telah dilaksanakan agar diketahui sampai sejauh mana capaian program dan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan anggaran yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018. Adapun pelaksanaan dan capaian program kegiatan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		SISA DANA
			(Rp)	%	( 3-4 ) Rp
1	2	3	4	5	6
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.465.944.080</b>	<b>1.340.601.462</b>	<b>91,44</b>	<b>125.342.618</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.950.000	1.950.000	100	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000	16.198.600	32,39	33.801.400
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	25.000.000	16.314.100	65,25	8.685.900
4	Penyediaan Administrasi Keuangan	215.571.600	205.001.600	95,09	10.570.000
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	48.000.000	38.938.800	81,12	9.061.200
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	76.234.824	73.046.075	95,81	3.188.749

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		SISA DANA
			(Rp)	%	( 3-4 ) Rp
1	2	3	4	5	6
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	15.000.000	15.000.000	100	-
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	10.000.000	100	-
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	85.000.000	84.988.500	99,98	11.500
10	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	549.187.656	490.744.088	89,35	58.443.568
11	Penyesediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.000.000	63.719.700	98,03	1.280.300
12	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	325.000.000	324.699.999	99,90	300.001
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>200.000.000</b>	<b>157.983.000</b>	<b>78,99</b>	<b>42.017.000</b>
13	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	160.000.000	120.892.200	75,55	39.107.800
14	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	40.000.000	37.090.800	92,72	2.909.200
III	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>50.000.000</b>	<b>43.240.800</b>	<b>86,48</b>	<b>6.759.200</b>
15	Penyusunan Kompetensi ASN Intern OPD	50.000.000	43.240.800	86,48	6.759.200
IV	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>635.529.000</b>	<b>628.698.100</b>	<b>98,92</b>	<b>6.830.900</b>
16	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev	180.000.000	172.719.100	95,96	7.280.900
17	Inventarisasi BMD	50.000.000	50.000.000	100	-
18	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	405.529.000	405.529.000	100	-
V	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>225.000.000</b>	<b>195.415.875</b>	<b>86,85</b>	<b>29.584.125</b>
19	Pameran Promosi Dalam Daerah, Dalam Negeri, Luar Negeri dan Forum Bisnis	225.000.000	195.415.875	86,85	29.584.125
VI	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>125.000.000</b>	<b>91.049.200</b>	<b>72,83</b>	<b>33.950.800</b>
20	Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	125.000.000	91.049.200	72,83	33.950.800
VII	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengembangan Sistem Pelayanan</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>591.877.319</b>	<b>47,35</b>	<b>658.122.681</b>
21	Fasilitasi Pelayanan Perijinan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	325.000.000	215.854.400	66,41	109.145.600
22	Monitoring Pendampingan Penerapan SIL di Kec. se Kab. Kukar serta Update Aplikasi SIL ke Kementerian Kominfo RI	575.000.000	303.822.919	52,83	271.177.081
23	Fasilitasi Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu	350.000.000	72.200.000	20,62	277.800.000

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SISA DANA
			(Rp)	%	( 3-4 ) Rp
1	2	3	4	5	6
VIII	<b>Program Perencanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Pelayanan Perizinan</b>	<b>250.000.000</b>	<b>120.442.476</b>	<b>48,17</b>	<b>129.557.524</b>
24	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	50.000.000	49.985.000	99,97	15.000
25	Advokasi di Bidang Perizinan	200.000.000	70.457.476	35,22	129.542.524
<b>JUMLAH</b>		<b>4.201.473.080</b>	<b>3.168.858.232</b>	<b>75,42</b>	<b>1.032.614.848</b>

Dari table diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 12 Kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp. 1.461.944.080,00 setelah Perubahan menjadi sebesar Rp. 1.465.944.080,00 Pelaksanaan fisik kegiatan secara keseluruhan mencapai rata-rata 100 % dengan nilai kinerja Memuaskan. Sedangkan untuk penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.340.601.462,00 atau sekitar 91,44 % dengan nilai kinerja Memuaskan.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Tahun 2018 mengalami pemangkasan Anggaran dari total anggaran sebesar sebesar Rp. 200.000.000,- digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, dan pengadaan perlengkapan gedung kantor. Pelaksanaan fisik kegiatan secara keseluruhan mencapai rata-rata 88,09 % dengan nilai kinerja Sangat Baik. Sedangkan untuk penyerapan anggaran sebesar Rp. 157.983.000,- atau 78,99 % dengan nilai kinerja Baik.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pada Tahun Anggaran 2018 anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Program ini terdapat hanya 1 kegiatan yaitu Penyusunan Kompetensi ASN intern OPD dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 43.240.800,- atau 86,48 % dengan nilai kinerja Sangat Baik.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 2 Kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp. 230.000.000,- mengalami penambahan sebesar Rp. 405.529.000,- total menjadi Rp. 635.529.000,- dengan kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga. Untuk penyerapan anggaran 98,92% sebesar Rp. 628.698.100,-.
- 5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi hanya 1 kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 225.000.000,-. Untuk penyerapan anggaran sebesar Rp. 195.415.875,- atau 86,85 % dengan nilai Sangat Baik.
- 6) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi hanya 1 kegiatan, anggaran yang dikelola sebesar Rp. 125.000.000,-. Sedangkan untuk penyerapan anggaran sebesar Rp. 91.049.200,- atau 72,83% dengan nilai Baik.
- 7) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengembangan Sistem Pelayanan terdapat 3 kegiatan, anggaran yang dikelola sebesar Rp. 750.000.000,- dapat penambahan pada kegiatan Monitoring



pendampingan penerapan SIL di Kec. se Kab. Kukar serta update Aplikasi SIL ke Kementrian Kominfo RI sebesar Rp. 500.000.000,-, menjadi Rp. 1.250.000.000,-. Sedangkan untuk penyerapan anggaran sebesar Rp. 591.877.319,- atau 47,35 % dengan nilai Kurang.

- 8) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengembangan Sistem Pelayanan terdapat 2 kegiatan anggaran yang dikelola sebesar Rp. 250.000.000,-. Sedangkan untuk penyerapan anggaran sebesar Rp. 120.442.476,- atau 48,17 % dengan nilai Kurang.

## 2. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2018 berjumlah 98 orang PNS yang terdiri dari 19 Pejabat Struktural dan 71 Fungsional, Sedangkan THL berjumlah 47 orang.

## 3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Berdasarkan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendapatkan alokasi anggaran semula sebesar Rp. 13.403.188.519,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.201.715.439,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.241.944.080,00. Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 mengalami penambahan anggaran pada belanja langsung sebesar Rp. 959.529.000,00 menjadi Rp. 4.201.473.080,00.

Sedangkan Realisasi keuangan dapat diuraikan sebagai berikut untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.731.789.008,00 (94,89%) dan realisasi untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 3.168.858.232,00 (75,42%).

## 4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah dapat kami gambarkan pada tabel 2.17 sebagai berikut :

**Tabel. 3.46**

Kesesuaian Antara Bidang Urusan dan Program/Kegiatan

Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu		Kesesuaian	
	2		3		4	5
	Renja	RKA	Renja	RKA	Ya	Tidak
Usuran Wajib						
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
Penyediaan jasa surat menyurat	400 lbr	400 lbr	1.950.000,00	1.950.000,00	Ya	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48 rek	48 rek	50.000.000,00	50.000.000,00	Ya	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu		Kesesuaian	
	2		3		4	5
	Renja	RKA	Renja	RKA	Ya	Tidak
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	46 unit	46 unit	25.000.000,00	25.000.000,00	Ya	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	22 o/b	22 o/b	215.571.600,00	215.571.600,00	Ya	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6 jenis	6 jenis	48.000.000,00	48.000.000,00	Ya	
Penyediaan ATK	46 jenis	46 jenis	76.234.824,00	76.234.824,00	Ya	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	2750 eks	2750 eks	11.000.000,00	15.000.000,00		Tidak
Penyediaan bahan logistik kantor	25 jenis	25 jenis	10.000.000,00	10.000.000,00	Ya	
Penyediaan makanan dan minuman	2300 ktk	2300 ktk	85.000.000,00	85.000.000,00	Ya	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 o/h	60 o/h	325.000.000,00	325.000.000,00	Ya	
Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	51 o/b	51 o/b	549.187.656,00	549.187.656,00	Ya	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22 jenis	22 jenis	65.000.000,00	65.000.000,00	Ya	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	42 unit	42 unit	160.000.000,00	160.000.000,00	Ya	
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	30 unit	30 unit	40.000.000,00	40.000.000,00	Ya	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
Penyusunan Kompetensi ASN Intern OPD	1 dok	1 dok	50.000.000,00	50.000.000,00	Ya	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta monev	10 dok	10 dok	180.000.000,00	180.000.000,00	Ya	
Inventarisasi BMD		1 dok	-	50.000.000,-		Tidak
Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga		4 paket	-	405.529.000,-		Tidak

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu		Kesesuaian	
	2		3		4	5
	Renja	RKA	Renja	RKA	Ya	Tidak
<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>						
<b>Pameran Promosi dalam daerah, dalam negeri, luar negeri dan forum bisnis</b>	2 event	2 event	225.000.000,00	225.000.000,00	Ya	
<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>						
<b>Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	50 perus	50 perus	125.000.000,00	125.000.000,00	Ya	
<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengembangan Sistem Pelayanan</b>						
<b>Fasilitasi pelayanan perizinan dan peningkatan kualitas pelayanan</b>	100 ijin	100 ijin	250.000.000,00	250.000.000,00	Ya	
<b>Monitoring Pendampingan Penerapan Sistem Integrasi Layanan (SIL) di Kec. se Kab. Kukar serta Update Aplikasi SIL ke Kementerian Kominfo RI</b>	18 Kec.	18 Kec.	75.000.000,-	575.000.000,-		Tidak
<b>Fasilitasi Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	1200 Rekom	1200 Rekom	350.000.000,-	350.000.000,-	Ya	
<b>Program Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian Pelayanan Perizinan</b>						
<b>Survey Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	1 dok	1 dok	50.000.000,00	50.000.000,00	Ya	
<b>Advokasi di Bidang Perizinan</b>	1 paket	1 paket	200.000.000,00	200.000.000,00	Ya	
			<b>3.241.944.080,00</b>	<b>4.201.473.080,00</b>		

#### 5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Untuk sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu cukup untuk pelaksanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah serta dalam kondisi baik.

#### 6. Permasalahan dan Solusi

- a) Belum optimalnya fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk permasalahan ini disarankan agar dapat mengacu

pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP pada Pasal 11 ayat 1,2,3,4 dan pasal 34.

- b) Masih rendahnya kesadaran pihak perusahaan untuk memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara periodik kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini menyebabkan rendahnya data realisasi investasi.
- c) Kegiatan Promosi belum dapat memberikan hasil yang signifikan karena masih kurangnya data potensi/peluang investasi yang siap untuk ditawarkan/dijual kepada calon investor. Untuk masalah ini, pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus meningkatkan koordinasi antar dinas teknis terkait dalam rangka penyusunan data potensi investasi yang siap untuk ditawarkan/dijual kepada calon investor.

## 7. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Pada tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara diberikan penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima" dengan label A.

## 18. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

### 1. Program dan Kegiatan

Tahun 2018 ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh dana murni sebesar Rp. 52.553.299.483,39 terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 10.026.153.963,39
2. Belanja Langsung sebesar Rp. 43.388.915.520,00

Selisih APBD Murni Tahun 2017 dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 23.934.107.674,51 atau mengalami penambahan Anggaran 18,49 %. Pengalokasian anggaran Belanja Langsung berdasarkan program yang diadaptasi sesuai Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut;

**Tabel 3.47**

Alokasi Anggaran Pada Masing–Masing Program Tahun 2018

No.	Program	Jumlah (Rp.)	Alokasi Dana (%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.407.012.650,00	19,4
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.495.200.000,00	3,7
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.542.842.250,00	1,7

No.	Program	Jumlah (Rp.)	Alokasi Dana (%)
4.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	2.164.159.650,00	1,7
5.	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	185.000.000,00	7,7
6.	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	130.000.000,00	1
7.	Program Pengembangan kebijakan dan manajemen Olahraga	150.000.000,00	51,2
8.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	23.355.983.050,00	14,8
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	4.13.016.950,00	
10	Program Peningkatan sarana dan Prasana Kepemudaan	135.000.000,00	
11	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.500.000.000,00	
12	Program Pemeliharaan dan Prasarana Olahraga	1.192.700.970,00	

Dari tabel diatas terlihat bahwa Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga memperoleh pengalokasian anggaran yang paling besar yakni 51,2% sedangkan terkecil Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,5%.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018, menggunakan sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

## 2. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai dilingkungan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara adalah jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan rincian sebagai berikut, Klasifikasi menurut status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil 100 orang, Honor THL 90 orang, jadi Jumlah secara keseluruhan adalah 190 orang

## 3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

komposisi anggaran dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan Prioritas Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Pendanaan APBD Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Kutai Kartanegara dan membelanjakan anggaran daerah tahun 2018 tersebut sebesar Rp 43.388.915.520 dan terealisasi sebesar Rp 37.578.999.862,- atau sebesar 95,62%,

#### 4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Rencana kerja merupakan penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja serta targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategik tahun 2018. Dalam proses penerapan perencanaan pembangunan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Bidang Kepemudaan :
  - ✓ Sosialisasi kepada masyarakat tentang banyaknya kalangan generasi muda yang terjerumus pada penggunaan obat-obat terlarang.
  - ✓ Peningkatan kemampuan dan daya saing pemuda dalam rangka berkompetisi di lapangan pekerjaan dan menumbuhkan kembangkan jiwa wirausaha pemuda melalui pelatihan – pelatihan.
  - ✓ Pembinaan para pemuda guna meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air di kalangan generasi muda
  - ✓ Pengoptimalkan organisasi kepemudaan agar berfungsi sebagaimana yang diharapkan sehingga dapat lebih mandiri dan kreatif
- b) Bidang Keolahragaan :
  - ✓ Menggali potensi keolahragaan di kecamatan yang belum terbina dengan baik.
  - ✓ Pemberdayaan dan Pembinaan olahraga prestasi bagi atlit lokal.
  - ✓ Meningkatkan minat masyarakat terhadap pelestarian olahraga tradisonal.
  - ✓ Membuat aktivitas olahraga kebugaran fisik menjadi aktifitas keseharian masyarakat.
  - ✓ Pengembangan dan pembinaan olahraga yang belum tersentuh IPTEK.
  - ✓ Pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang optimal.

#### 5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Penerapan pelaksanaan program, kebijakan dan sasaran sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategik tahun 2015 diatas tidak akan berjalan dengan baik bila tidak didukung dengan faktor-faktor tertentu. Faktor pendukung pelaksanaan kegiatan ini seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, tingkat kepedulian masyarakat, alokasi anggaran yang tepat, pelaksanaan dilapangan, kondisi sarana dan prasarana yang memadai dan faktor-faktor lainnya yang dapat mendukung proses penerapan perencanaan pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kurang cukupnya sarana dan prasarana untuk kegiatan pemuda dan olahraga saat ini, selain dilakukan di lingkungan Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga sendiri atau di balai remaja. Sedangkan untuk kegiatan olahraga selain dilaksanakan dilingkungan Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga juga pada lapangan-lapangan olahraga yang tersebar diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurut data Dinas Kepemudaan dan Olahraga, hingga tahun

2018 jumlah lapangan olahraga yang tersedia kurang lebih sejumlah 1.031 lapangan olahraga, yang tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara.

## 6. Permasalahan dan Solusi

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan program yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada. Namun dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut masih dirasakan adanya permasalahan, sebagai berikut :

1. Untuk program dan kegiatan pembinaan generasi muda, seperti pesantren kilat, pelatihan kepemimpinan OSIS, peserta pertukaran pemuda antar propinsi, Diklat Paskibraka, dan pemilihan pemuda pelopor, belum menyebar keseluruhan kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dikarenakan minimnya dana yang tersedia.
2. Untuk peserta lomba olahraga Usia Dini yang diselenggarakan setiap tahun baik di tingkat propinsi maupun secara nasional, masih diikuti oleh siswa Sekolah Dasar / MI di kecamatan-kecamatan terdekat, dikarenakan belum tersedianya dana untuk mensosialisasikan kegiatan tersebut hingga ke desa-desa.
3. Beberapa event olahraga pelajar dalam rangka menseleksi / mencari bibit olahragawan yang berprestasi, hanya diikuti oleh pelajar SLTP dan SLTA terdekat, dikarenakan disamping kurangnya sosialisasi juga kegiatan tersebut waktu penyelenggaraannya kurang tepat (bukan pada liburan sekolah). Hal ini disebabkan pencairan dana kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Pada pelaksanaannya dilapangan, solusi yang diambil Dinas Pemuda dan Olahraga pada permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

1. Dengan mengalokasikan dana yang tepat untuk program dan kegiatan pembinaan generasi muda, perlunya intensifikasi dan sosialisasi yang kontinyu pada masyarakat pemuda seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Perlunya alokasi dana tambahan untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan lomba tingkat propinsi maupun secara nasional yang merata dari wilayah kecamatan hingga ke desa-desa.
3. Pencairan dana kegiatan yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan Beberapa event olahraga pelajar dalam rangka menseleksi / mencari bibit olahragawan yang berprestasi.

**19. URUSAN PERPUSTAKAAN  
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN  
1. Program dan Kegiatan**

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Dari alokasi dana sebesar Rp.1.007.025.916,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 969.042.884,- atau 96,23% dengan capaian kegiatan berupa :
1. Penyediaan jasa surat menyurat, nilai capaian indikator kinerja adalah:
    - ✓ Nilai capaian indikator input yaitu:  
Target dana sebesar Rp. 1.543.000,-  
Dana dengan realisasi sebesar Rp.541.000,- (99,63 %)
    - ✓ Nilai capaian kinerja output yaitu:  
Target kinerja penyediaan materai sebanyak 106 lembar  
Jumlah Realisasi materai sebanyak 106 lembar (100%)
    - ✓ Nilai Capaian Kinerja outcome yaitu :  
Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat (100%)
  2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, nilai capaian indikator kinerja adalah :
    - ✓ Nilai capaian indikator input yaitu:  
Target dana sebesar Rp. 220.000.000,-  
Dana dengan realisasi sebesar Rp.195.657.819,- atau 88,94%
    - ✓ Nilai capaian kinerja output yaitu:  
Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan/3 rekening (100%)
    - ✓ Nilai Capaian Kinerja outcome yaitu :  
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (100%)
  3. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, nilai capaian indikator kinerja adalah :
    - ✓ Nilai capaian indikator input yaitu:  
Target dana sebesar Rp. 7.000.000,-  
Dana dengan realisasi sebesar Rp.6.500.000,- atau 92,86 %
    - ✓ Nilai capaian kinerja output yaitu:  
Jumlah penyediaan jasa perijinan kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan sebanyak 7 unit (100%)
    - ✓ Nilai Capaian Kinerja outcome yaitu :  
Terlaksananya penyediaan jasa perijinan kendaraan dinas/operasional (100%)
  4. Penyediaan jasa administrasi keuangan, nilai capaian indikator kinerja adalah:
    - ✓ Nilai capaian indikator input yaitu:
    - ✓ Target dana sebesar Rp. 170.000.000,-
    - ✓ Dana dengan realisasi sebesar Rp.156.958.200,- atau 92,33 %
    - ✓ Nilai capaian kinerja output yaitu:
    - ✓ Target penyediaan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan/23 orang
    - ✓ Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan selama 10 bulan/21 orang (92,33%)



- ✓ Nilai Capaian Kinerja outcome yaitu :
  - ✓ Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan (91,30%)
5. Penyediaan alat tulis kantor, nilai capaian indikator kinerja adalah :
- ✓ Nilai capaian indikator input yaitu:
  - ✓ Target dana sebesar Rp. 87.276.865,-
  - ✓ Dana dengan realisasi sebesar Rp.87.276.000,- atau 100 %
  - ✓ Nilai capaian kinerja output yaitu:
  - ✓ Jumlah penyediaan alat tulis kantor sebanyak 56 jenis (100%)
  - ✓ Nilai Capaian Kinerja outcome yaitu :
  - ✓ Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor (100%)
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, nilai capaian indikator kinerja adalah :
- ✓ Nilai capaian indikator input yaitu:  
Target dana sebesar Rp. 49.637.400,-  
Dana dengan realisasi sebesar Rp.49.552.400,- atau 93,83 %
  - ✓ Nilai capaian kinerja output yaitu:  
Target penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 12 Jenis  
Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 12 jenis (100%)
  - ✓ Nilai Capaian Kinerja outcome yaitu :  
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan (100%)
7. Penyediaan bahan logistik kantor, nilai capaian indikator kinerja adalah :
- ✓ Nilai capaian indikator input yaitu:  
Target dana sebesar Rp. 1.000.000,-  
Dana dengan realisasi sebesar Rp.994.000,- atau 99,40%
  - ✓ Nilai capaian kinerja output yaitu:  
Jumlah penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih sebanyak 5 jenis (100%)
  - ✓ Nilai Capaian Kinerja outcome yaitu :  
Terlaksananya penyediaan bahan logistic kantor (100%)
8. Penyediaan makanan dan minuman, nilai capaian indikator kinerja adalah:
- ✓ Nilai capaian indikator input yaitu:  
Target dana sebesar Rp. 5.000.000,-  
Dana dengan realisasi sebesar Rp.5.000.000,- atau 100%
  - ✓ Nilai capaian kinerja output yaitu:  
Target penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu sebanyak 43 porsi/kotak/duz  
Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu sebanyak 43 porsi/kotak/duz (100%)
  - ✓ Nilai Capaian Kinerja outcome yaitu :  
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman (100%)
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah nilai capaian indikator kinerja adalah :
- ✓ Nilai capaian indikator input yaitu:
  - ✓ Target dana sebesar Rp. 75.000.00,-

- ✓ Dana dengan realisasi sebesar Rp.74.999.625,- atau 100 %
  - ✓ Nilai capaian kinerja output yaitu:
  - ✓ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sebanyak 37 orang/hari kali selama 12 bulan (100%)
  - ✓ Nilai Capaian Kinerja outcome yaitu :
  - ✓ Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (100%)
10. Penyediaan jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran, nilai capaian indikator kinerja adalah :
- ✓ Nilai capaian indikator input yaitu:  
Target dana sebesar Rp. 391.568.640,-  
Dana dengan realisasi sebesar Rp.391.563.840,- atau 100 %
  - ✓ Nilai capaian kinerja output yaitu:  
Jumlah penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS sebanyak 37 orang selama 12 bulan (100%)
  - ✓ Nilai Capaian Kinerja outcome yaitu :  
Terlaksananya penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS (100%)
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dari alokasi dana sebesar Rp.93.150.000 kegiatan berupa
1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, nilai capaian indikator kinerja adalah :
- ✓ Nilai capaian indikator input yaitu:  
Target dana sebesar Rp. 93.150.000,-  
Dana dengan realisasi sebesar Rp. 93.142.000,- atau 99.99%
  - ✓ Nilai capaian kinerja output yaitu:  
Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara sebanyak 14 unit selama 12 bulan (100%)
  - ✓ Nilai Capaian Kinerja outcome yaitu :  
Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan (100%)
- c) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dari alokasi dana sebesar Rp.1.990.854.184,- dapat direalisasikan sebesar Rp.1.990.733.384,-- atau 99,99 % dengan capaian kegiatan berupa :
1. Penyusunan Laporan Keuangan, nilai capaian indikator kinerja adalah :
- ✓ Nilai capaian indikator input yaitu:  
Target dana sebesar Rp. 42.048.800,-  
Dana dengan realisasi sebesar Rp.42.048.000,- atau 100 %
  - ✓ Nilai capaian kinerja output yaitu:  
Jumlah dokumen Laporan Keuangan sebanyak 5 dokumen (100%)
  - ✓ Nilai Capaian Kinerja outcome yaitu :  
Terlaksananya dokumen Laporan Keuangan (100%)
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev, nilai capaian indikator kinerja adalah :
- ✓ Nilai capaian indikator input yaitu:  
Target dana sebesar Rp. 57.500.000,-  
Dana dengan realisasi sebesar Rp.57.380.000,- atau 99,79 %
  - ✓ Nilai capaian kinerja output yaitu:  
Jumlah dokumen Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev sebanyak 7 dokumen (100%)

- ✓ Nilai Capaian Kinerja outcome yaitu :  
Terlaksananya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev (100%)
- 3. Fasilitasi Penyelesaian Kepada Pihak Ketiga, nilai capaian indikator kinerja adalah:
  - ✓ Nilai capaian indikator input yaitu:  
Target dana sebesar Rp. 1.891.305.384,-  
Dana dengan realisasi sebesar Rp.1.891.305.384,- atau 100%
  - ✓ Nilai capaian kinerja output yaitu:  
Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Kepada Pihak Ketiga sebanyak 1 Paket (100%)
  - ✓ Nilai Capaian Kinerja outcome yaitu :  
Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Kepada Pihak Ketiga (100%)
- d) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, dari alokasi dana sebesar Rp.180.000.000,-- dapat direalisasikan sebesar Rp.0,-- atau 0 % dengan capaian kegiatan berupa :
  1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Digital Desa/Kelurahan, nilai capaian indikator kinerja adalah :
    - ✓ Nilai capaian indikator input yaitu:  
Target dana sebesar Rp. 180.000.000,-  
Dana dengan realisasi sebesar Rp.0,- atau 0%
    - ✓ Nilai capaian kinerja output yaitu:  
Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Digital Desa/Kelurahan sebanyak 0 Unit (0%)
    - ✓ Nilai Capaian Kinerja outcome yaitu :  
Terlaksananya Layanan perpustakaan keliling (0%)

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 11 ayat (2) Badan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Kearsipan dan Perpustakaan.

### A. Urusan Kearsipan

Karena terbatasnya anggaran pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sehingga kegiatan pembinaan dan pengelolaan kearsipan tidak teralokasikan, namun Dinas Kearsipan mampu melakukan kegiatan pembinaan pengelolaan kearsipan berupa :

1. Sosialisasi Unit Kearsipan
2. Sosialisasi SDM Kearsipan
3. Sosialisasi Tata Kelola Kearsipan
4. Sosialisasi Pengawasan Kearsipan
5. Sosialisasi Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA)
6. Sosialisasi Unit Pengelola Pencipta Arsip (UPPA)

### B. Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Capaian	
1.	Ketersediaan dan Pelayanan Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Perpustakaan Digital	1	Unit	0	Unit

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi serta sebagai upaya untuk menjawab tantangan zaman maka perlu adanya perpustakaan digital untuk masyarakat. Melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Desa Tuana Tuha Kecamatan Kenohan mengusulkan perpustakaan digital sebagai upaya pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan desa. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mengakomodir usulan Desa Tuana Tuha Kecamatan Kenohan kedalam RKA/DPA SKPD Tahun Anggaran 2018. Namun karena adanya keterlambatan dalam penerbitan SPD sehingga estimasi waktu kegiatan pengadaan dan distribusi barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dikhawatirkan tidak mencukupi waktu, maka kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Digital ini tidak dapat terealisasi, target Indikator Kinerja Utama (IKU) tidak tercapai.

Dalam upaya pembinaan perpustakaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah melaksanakan pembinaan dan pendampingan pengelolaan Perpustakaan kepada perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa/kelurahan.

Dalam hal upaya pengembangan minat dan budaya baca masyarakat, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah melakukan kerjasama dengan beberapa PAUD dan Sekolah untuk melakukan jam kunjung ke perpustakaan serta meningkatkan layanan pembaca melalui pekan literasi di Taman Pintar, lomba bercerita tingkat SD/MI, Pendampingan peserta lomba dan lain – lain.

### 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Badan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 138 personil yang terdiri dari 99 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 37 orang Tenaga Harian Lepas (THL).

### 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN (%)
			ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>Belanja Langsung</b>		<b>3.271.030.100</b>	<b>3.052.918.268</b>	<b>93,33</b>
	1. Pelayanan administrasi perkantoran	1.1. Penyediaan jasa surat menyurat	543.000	541.000	99,63
		1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	220.000.000	195.657.819	88,94

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN (%)
			ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1.3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	7.000.000	6.500.000	92,86
		1.4. Penyediaan jasa administrai keuangan	170.000.000	156.958.200	92,33
		1.5. Penyediaan alat tulis kantor	87.276.865	87.276.000	100
		1.6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	49.552.400	49.552.400	99,83
		1.7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.000.000	994.000	99,40
		1.8. Penyediaan Makanan dan minuman	5.000.000	5.000.000	100
		1.9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	75.000.000	74.999.625	100
		1.10. Penyediaan jasa Administrasi Teknik Perkantoran	391.568.640	391.568.640	100
		Sub Total	<b>93.150.000</b>	<b>93.142.000</b>	<b>99,99</b>
	2.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	93.150.00	93.142.000	99,99
		Sub Total	<b>1.796.634.020</b>	<b>144.235.150</b>	<b>8,03</b>
	3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.1. Penyusunan Laporan Keuangan	42.048.800	42.048.000	100
		1.2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev	57.500.000	57.380.000	99,79
		1.3. Fasilitasi Penyelesaian kepada Pihak Ketiga	1.891.305.384	1.891.305.384	100
		Sub total	<b>1.891.305.384</b>	<b>1.891.305.384</b>	<b>100</b>
	4.Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	4.1. Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan digital Desa/Kelurahan	180.000.000	0	0
		Sub total	<b>180.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Terdapat 4 program dan 15 Kegiatan yang memiliki Kesesuaian antara Renja dan RKA/DPA adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
  5. Penyediaan alat tulis kantor
  6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  7. Penyediaan makanan dan minuman
  8. Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran
  9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
1. Penyusunan Laporan Keuangan
  2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Serta Monev
  3. Fasilitasi Penyelesaian Kepada Pihak Ketiga
- d. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;
1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Digital Desa/Kelurahan

## **6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)**

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) baik urusan kearsipan maupun perpustakaan masih belum memadai. Sebagai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) sampai saat ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan belum memiliki sarana dan prasarana penyimpanan dokumen arsip yang standar baik Depot, rak maupun lemari arsip. Sedangkan dari segi sarana dan prasarana perpustakaan yang digunakan untuk melayani masyarakat masih belum memiliki meubelair perpustakaan untuk melengkapi gedung perpustakaan yang baru, serta koleksi perpustakaan yang ada masih belum lengkap.

## **7. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dibidang kearsipan sebagai Lembaga Kearsipan Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat ini belum memiliki Depot Arsip, Depot Arsip merupakan sarana terpenting dalam penyimpanan dan penyelamatan arsip sehingga solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini hanyalah pembangunan Depot Arsip.

Sedangkan permasalahan dibidang perpustakaan adalah masih terbatasnya sarana untuk melaksanakan kegiatan peningkatan minat baca melalui perpustakaan keliling yang dapat menjangkau pada daerah pedesaan. Sehingga perlu di tingkatkan untuk sarana perpustakaan keliling yang berupa mobil maupun kapal sehingga dapat menjangkau pada 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

## B. RINGKASAN URUSAN PILIHAN

Selanjutnya, daftar program-program pembangunan daerah periode Tahun 2016-2021 dalam urusan kewenangan konkuren provinsi yang termasuk dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.48**

kewenangan konkuren provinsi yang termasuk dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut

NO	URUSAN	PD PENGANGGUNG JAWAB		JUMLAH PROGRAM
<b>B. URUSAN PILIHAN</b>				
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	Dinas Kelautan dan Perikanan	8
2	PERTANIAN	2	Dinas Pertanian dan Peternakan	21
		3	Dinas Perkebunan	
3	ENERGI DAN SDM	4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8
4	PARIWISATA	5	Dinas Pariwisata	7
5	PERINDUSTRIAN	6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2
6	PERDAGANGAN	7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7
<b>JUMLAH TOTAL PROGRAM</b>				<b>53</b>

### B.1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

#### 1. Program dan Kegiatan

Pencapaian kinerja dari masing-masing program dan kegiatan sesuai dengan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara selama Tahun Anggaran 2018, adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
			FISIK	%
1	2	3	4	5
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 rekening/ 12 bulan	4 rekening/ 12 bulan	100%
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	85 Kendaraan	60 Kendaraan	72%
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	35 Orang/ 12 Bulan	35 Orang/ 12 bulan	100%
4	Penyediaan alat tulis kantor	50 Jenis ATK	50 Jenis ATK	100%
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	235 buah	235 buah	100%

NO	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
			FISIK	%
1	2	3	4	5
6	Penyediaan makanan dan minuman	1520 Kotak Makanan, 300 Dus Minuman	641 Kotak Makanan + Snack, 220 Dus Minumna	47%
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150 Aparatur	150 Aparatur	100%
8	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	79 Orang/ 12 Bulan (948 Orang)	67 Orang/ Bulan	85%
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10 Jenis Cetakan, 295.160 foto copy	62.999 lembar fotocopy	21%
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			
10	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas	2 unit	1 unit	50%
11	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	9 Jenis	9 Jenis	100%
12	Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas	4 jenis	4 jenis	100%
13	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan	1 Unit	1 Unit	100%
14	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	3000 M2	3000 M2	100%
15	Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	8 Unit	8 Unit	100%
16	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	8 Unit	8 Unit	100%
17	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	35 Unit	32 Unit	91%
18	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	240 M2	240 M2	100%
III	<b>Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>			
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Monev	9 dokumen	9 dokumen	100%
20	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
IV	<b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>			
21	Pembuatan Turap Bibir Kolam Kelompok Budidaya Ikan Air Tawar "Santan Mekar" Dusun Handil Mico, Desa Santan Tengah, Kec.Marangkayu (Bankeu Provinsi)	1 Lokasi	1 Lokasi (48 M turap bibir kolam)	100%
22	Pengembangan Budidaya Ikan Dalam Keramba	28 buah keramba, 44500 ekor benih ikan, 3300 kg pakan	20 buah keramba, 44500 ekor benih ikan, 3300 kg pakan	98%
23	Pengembangan Budidaya Ikan Dalam Tambak	400000 ekor benur, 800 batang pipa PVC & 1150 Kg Bibit Kepiting soka	400000 ekor benur, 800 batang pipa PVC & 1150 Kg Bibit Kepiting soka	100%
24	Pengembangan Budidaya Ikan Dalam Kolam	150000 ekor, 3000 Kg Pakan Ikan	Identifikasi, Verifikasi, Penetapan calon Penerima	15%
25	Intensifikasi Budidaya Rumput Laut	4500 kg benih rumput laut	4500 kg benih rumput laut	100%
26	Pengembangan Budidaya Ikan Dalam Kolam Terpal	16 kolam terpal, 2080 kg pakan, 32000 ekor benih	16 kolam terpal, 2080 kg pakan, 32000 ekor benih	100%



NO	URAIAN KEGIATAN	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
			FISIK	%
1	2	3	4	5
27	Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	1 unit mesin pakan, 5 unit mesin pompa air, 6200 kg pakan	Pakan Ikan 6200 Kg, Insuk Ikan Lele (Jenis CP) 100 Kg	50%
28	Operasional Balai Benih Ikan	430 Kg pakan Ikan Starter, 2500 Kg pakan Tenggelam, 1500 Kg pakan timbul, 1 paket bahan sarana dan prasarana pembenihan, 1 paket alat sarana dan prasarana pembenihan	430 Kg pakan Ikan Starter, 2500 Kg pakan Tenggelam, 1500 Kg pakan timbul	90%
29	Peresmian Tempat Pelelangan Ikan Perairan darat Kecamatan Kota Bangun	1 Unit	tahapan persiapan pelaksanaan	15%
<b>V</b>	<b>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b>			
31	Pengadaan Mesin Dompeng Chang Fa 24 PK untuk Kelompok Usaha Bersama "Sirui Menre" Desa Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak (BanKeu Provinsi)	9 Unit	9 Unit	100%
32	Pengadaan Perahu dan Mesin Ketinting Nelayan Desa Kutai Lama, Kec. Anggana (BanKeu Provinsi)	7 Unit	7 Unit	100%
33	Pengadaan Alat Penangkapan Ikan	10 Unit Mesin Genset, 3105 Unit Alat Penangkap Ikan	10 Unit Mesin Genset, 1060 Unit Alat Penangkap Ikan	55%
34	Pengadaan Armada Penangkapan Ikan	125 ketinting, 38 mesin kapal, 64 perahu nelayan, 3 kapal, 190 cool box	61 ketinting, 37 mesin kapal, 64 perahu nelayan, 3 kapal, 190 cool box	50%
35	Pembangunan Jembatan Tambat (Jetty)	2 unit jembatan tambat	1 unit jembatan tambat	50%
36	Kelompok Nelayan Pengadaan Mesin Speed 15 PK (8 Unit) Handil Terusan			
37	Pengadaan Bantuan Mesin Ketinting Kelompok Nelayan Desa Handil Terusan, Kec. Anggana (BANKEU)	15 Unit	14 Unit	95%
<b>VI</b>	<b>Program Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Kelautan dan Perikanan</b>			
38	Penyediaan Saprokan Desa Mandiri Pangan Kelautan dan Perikanan	8 unit	6 unit	75%
<b>VII</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Kelautaan dan Perikanan</b>			
39	Pelatihan Pembuatan Pakan dan Pembenihan Ikan	40 Orang	40 Orang	100%
				84.27%

Dari tabel diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa di Tahun Anggaran 2018, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara hanya melaksanakan 7 (tujuh) Program dan 39 (tiga puluh sembilan) Kegiatan saja. Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah Program dan Kegiatan rutin, sedangkan Program dan Kegiatan yang bersifat teknis yang berkaitan dengan tekhnis bidang Kelautan dan Perikanan Capaian kinerja secara fisik, semua Program dan Kegiatan adalah 100%.

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Realisasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Dinas Kelautan dan Perikanan dengan jenis pelayanan dasar Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban dan Perlindungan adalah sebagai berikut :

Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Cakupan Periode Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100%
<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	Jumlah Rekening Air, Listrik dan Telepon Terbayarkan.	4 Rekening	4 rekening/ 12 bulan	100%
<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	Jumlah Perpanjangan Ijin KIR dan STNK Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional.	85 Kendaraan	60 Kendaraan	72%
<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	Jumlah Ketersediaan Tenaga Administrasi Keuangan	35 Orang	35 Orang/ 12 bulan	100%
<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor	50 Jenis ATK	50 Jenis ATK	100%
<b>Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor</b>	Jumlah Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	235 Buah	235 buah	100%
<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	Jumlah Ketersediaan Kotak Makanan dan Dus Minuman	1520 Kotak Makanan, 300 Dus Minuman	641 Kotak Makanan + Snack, 220 Dus Minuman	47%
<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah</b>	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	150 Aparatur	150 Aparatur	100%
<b>Penyediaan Jasa Tekhnis Perkantoran</b>	Jumlah Unit Gedung Kantor Terpelihara	79 Orang	67 Orang/ Bulan	85%
<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional Berfungsi Baik.	10 Jenis Cetakan	62.999 lembar fotocopy	21%
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
<b>Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas</b>	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan	2 Unit	1 unit	50%
<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	Jumlah Unit Perlengkapan Gedung Kantor	9 Jenis	9 Jenis	100%
<b>Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas</b>	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan	4 Jenis	4 jenis	100%
<b>Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan</b>	Jumlah Unit Rumah Jabatan Terpelihara	1 Unit	1 Unit	100%
<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	Luasan Gedung Kantor Terpelihara	3000 M2	3000 M2	100%
<b>Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan</b>	Jumlah Unit Mobil Jabatan Terpelihara	8 Unit	8 Unit	100%
<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	Jumlah Kendaraan Roda 4 Terpelihara, Jumlah Kendaraan Roda 2 Terpelihara	8 Unit	8 Unit	100%

Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Unit Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara	35 Unit	32 Unit	91%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Unit Pelaratan Gedung Kantor Terpelihara	240 M2	240 M2	100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Ketersediaan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Monev	Jumlah Dokumen Perencanaan	9 Dokumen	9 dokumen	100%
Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga	Jumlah Kegiatan Pihak Ketiga Terbayarkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1. Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap :			
	- Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Per. Umum			
	- Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Perairan Laut			
	2. Cakupan Tempat Pelelangan Ikan			
	3. Rasio Ketersediaan Armada Modern			
Pengadaan Kapal dan Mesin Kelompok Nelayan "Semoga Jaya" RT. 19 Desa Muara Pantuan Kec. Anggana	Jumlah Mesin Kapal Penangkapan Ikan	23 Unit	23 unit	100%
Pengadaan Mesin Dompok Chang Fa 24 PK untuk kelompok Usaha Bersama "Sirui Menre" Desa Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak (Bantuan Keuangan Provinsi)	Jumlah Mesin Kapal Penangkapan Ikan	9 Unit	9 Unit	100%
Pengadaan Perahu dan Mesin Ketinting Kelompok Nelayan Desa Kutai Lama, Kec. Anggana (Bantuan Keuangan Provinsi)	Jumlah Kapal + Mesin Kapal Penangkapan Ikan	7 Unit	7 Unit	100%
Pengadaan Alat Penangkapan Ikan	Jumlah Alat Penangkapan Ikan	10 Unit Mesin Genset, 3105 Unit Alat Penangkap Ikan	10 Unit Mesin Genset, 1060 Unit Alat Penangkap Ikan	55%
Pengadaan Armada Penangkapan Ikan	Jumlah Perahu Penangkapan Ikan	125 Unit Ketinting, 28 Unit Mesin Kapal, 64 Unit Perahu Nelayan, 3 Unit Kapal, 40 Unit Cool Box	61 ketinting, 37 mesin kapal, 64 perahu nelayan, 3 kapal, 190 cool box	50%

Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>Pembangunan Jembatan Tambat (Jetty)</b>	Jumlah Unit Jembatan Tambat (Jety)	2 Unit Jembatan Tambat	1 unit jembatan tambat	50%
<b>Kelompok Nelayan Pengadaan Mesin Speed 15 PK (8 Unit) Handil Terusan</b>	Jumlah Mesin Kapal Penangkapan Ikan	15 Unit	0	0%
<b>Pengadaan Bantuan Mesin Ketinting Kelompok Nelayan Desa Handil Terusan, Kec. Anggana (Bankeu)</b>	Jumlah Mesin Ketinting untuk kelompok Nelayan	15 Unit	14 Unit	95%
<b>Program Pengembangan Perikanan Budidaya</b>	4. Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya :			
	- Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya Keramba (Ton/Tahun)			
	- Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya Tambak (Ton/Tahun)			
	- Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya Kolam (Ton/Tahun)			
	- Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya Kolam Terpal (Ton/Tahun)			
	- Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya Laut (Ton/Tahun)			
	5. Pertumbuhan Produksi Benih (Ekor/Tahun)			
<b>Pembuatan Turap Bibir Kolam Kelompok Budidaya Ikan Air Tawar "Santan Mekar", Dusun Handil Mico, Desa Santan Tengah, Kec. Marang Kayu (Bantuan Keuangan Provinsi)</b>	Jumlah Lokasi Kolam	1 Lokasi	1 Lokasi (48 M turap bibir kolam)	100%
<b>Pengembangan Budidaya Ikan Dalam Keramba</b>	Jumlah Keramba	28 Buah Keramba, 44500 Ekor Benih Ikan dan 3300 Kg Pakan	20 buah keramba, 44500 ekor benih ikan, 3300 kg pakan	98%
<b>Pengembangan Budidaya Ikan Dalam Tambak</b>	Jumlah Benur Ikan	400000 Ekor Benur, 800 Batang Pipa PVC dan 1150 Kg Bibit Kepiting Soka	400000 ekor benur, 800 batang pipa PVC & 1150 Kg Bibit Kepiting soka	100%
<b>Pengembangan Budidaya Ikan Dalam Kolam</b>	Benih Ikan	150000 Ekor, 3000 Kg Pakan Ikan	Identifikasi, Verifikasi, Penetapan calon Penerima	15%
<b>Intensifikasi Budidaya Rumput Laut</b>	Jumlah Benih Rumput Laut	4500 Kg Benih Rumput Laut	4500 kg benih rumput laut	100%
<b>Pengembangan Budidaya Ikan di Kolam Terpal</b>	Jumlah Benih Ikan	16 Kolam Terpal, 2080 KG Pakan, 32000 Ekor Benih	16 kolam terpal, 2080 kg pakan, 32000 ekor benih	100%

Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)</b>	Jumlah Unit Mesin Pakan	1 Unit Mesin Pakan, 6 Unit Mesin Pompa Air, 6200 Kg Pakan	Pakan Ikan 6200 Kg, Insuk Ikan Lele (Jenis CP) 100 Kg	50%
<b>Operasi Balai Benih Ikan</b>	Jumlah Pakan Ikan	430 Kg Pakan Ikan Starter, 2500 Kg Pakan Ikan Tenggelam, 1500 Kg Pakan Ikan Timbul, 1 Paket Bahan Sarana dan Prasarana Pembenihan, 1 Paket Alat Sarana dan Prasarana Pembenihan	430 Kg pakan Ikan Starter, 2500 Kg pakan Tenggelam, 1500 Kg pakan timbul	90%
<b>Peresmian Tempat pelelangan ikan perairan darat Kecamatan Kota Bangun</b>	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan ( TPI ) yang diresmikan	1 Unit	tahapan persiapan pelaksanaan	15%
<b>Program Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Kelautan dan Perikanan</b>				
<b>Penyediaan Saprokan Desa Mandiri Pangan Kelautan dan Perikanan</b>	Jumlah Pembudidaya Kecil Terfasilitasi .	8 Unit	6 unit	75%
<b>Program pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan</b>				
<b>Pelatihan Pembuatan Pakan dan Pembenihan Ikan</b>	Jumlah Peserta Pelatihan	40 Orang	40 Orang	100%

### 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Personil yang ada saat ini sampai dengan 31 Desember 2018 adalah 115 (Seratus Lima Belas) orang pada Dinas Kelautan dan Perikanan berjumlah personil terdiri dari :

• Pegawai Negeri Sipil ( PNS )	:	115 orang
• Tenaga Penyuluh	:	4 orang
• Tenaga Honorer	:	66 orang
Jumlah		185 orang

### 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan satu urusan pilihan , yakni Urusan Produksi dan Konsumsi Perikanan. Dengan urusan pilihan tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan yang terakomodir dalam 7 (tujuh) program.

Adapun rincian alokasi dan realisasi anggaran per kegiatan dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Keuangan	
		Rp	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	280,000,000.00	158,585,386.00	56.64%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	30,000,000.00	20,749,100.00	69.16%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	265,660,250.00	254,985,050.00	95.98%
Penyediaan jasa administrasi keuangan	95,650,955.00	94,630,800.00	98.93%
Penyediaan alat tulis kantor	10,000,000.00	9,987,505.00	99.88%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60,000,000.00	33,018,000.00	55.03%
Penyediaan makanan dan minuman	250,000,000.00	249,001,593.00	99.60%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	829,305,120.00	706,761,760.00	85.22%
Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	72,659,360.00	42,168,450.00	58.04%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	51,855,475.00	19,840,975.00	38.26%
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	50,000,000.00	49,679,650.00	99.36%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100,000,000.00	99,428,050.00	99.43%
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	23,144,525.00	23,142,525.00	99.99%
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	200,000,000.00	192,288,050.00	96.14%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	90,000,000.00	71,110,898.00	79.01%
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	100,000,000.00	86,462,800.00	86.46%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100,000,000.00	53,772,000.00	53.77%
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	25,000,000.00	23,230,700.00	92.92%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,000,000.00	95,660,000.00	95.66%
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Monev	2,102,392,500.00	2,099,876,000.00	99.88%
Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga			
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	50,000,000.00	49,870,000.00	99.74%
Pembuatan Turap Bibir Kolam Kelompok Budidaya Ikan Air Tawar "Santan Mekar", Dusun Handil Mico, Desa Santan Tengah, Kec. Marang Kayu (Bantuan Keuangan Provinsi)	333,820,000.00	264,951,000.00	79.37%
Pengembangan Budidaya Ikan Dalam Keramba	165,000,000.00	163,999,500.00	99.39%
Pengembangan Budidaya Ikan Dalam Tambak	269,410,907.00	144,586,500.00	53.67%
Pengembangan Budidaya Ikan Dalam Kolam	40,000,000.00	35,589,400.00	88.97%
Intensifikasi Budidaya Rumput Laut	205,410,907.00	162,949,200.00	79.33%
Pengembangan Budidaya Ikan di Kolam Terpal	450,000,000.00	206,059,000.00	45.79%

Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Keuangan	
		Rp	%
Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	150,000,000.00	111,921,700.00	74.61%
Operasi Balai Benih Ikan	150,000,000.00	18,822,700.00	12.55%
Peresmian Tempat pelelangan ikan perairan darat Kecamatan Kota Bangun			
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	200,000,000.00	199,397,300.00	99.70%
Pengadaan Kapal dan Mesin Kelompok Nelayan "Semoga Jaya" RT. 19 Desa Muara Pantuan Kec. Anggana	100,000,000.00	99,701,000.00	99.70%
Pengadaan Mesin Dompeng Chang Fa 24 PK untuk kelompokUsaha Bersama "Sirui Menre" Desa Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak (Bantuan Keuangan Provinsi)	150,000,000.00	149,299,500.00	99.53%
Pengadaan Perahu dan Mesin Ketinting Kelompok Nelayan Desa Kutai Lama, Kec. Anggana (Bantuan Keuangan Provinsi)	937,054,000.00	385,700,025.00	41.16%
Pengadaan Alat Penangkapan Ikan	1,720,230,000.00	799,881,000.00	46.50%
Pengadaan Armada Penangkapan Ikan	199,000,000.00	92,046,400.00	46.25%
Pembangunan Jembatan Tambat (Jetty)	0.00	0.00	0.00%
Kelompok Nelayan Pengadaan Mesin Speed 15 PK (8 Unit) Handil Terusan	184,000,000.00	170,497,500.00	92.66%
Pengadaan Bantuan Mesin Ketinting Kelompok Nelayan Desa Handil Terusan, Kec. Anggana (Bankeu)			
Program Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	50,000,000.00	43,667,400.00	87.33%
Penyediaan Saprokan Desa Mandiri Pangan Kelautan dan Perikanan			
Program pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan	59,041,271.00	37,653,800.00	63.78%
<b>Pelatihan Pembuatan Pakan dan Pembenihan Ikan</b>	<b>10,248,635,270.00</b>	<b>7,520,972,217.00</b>	<b>73.39%</b>

#### 5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Sehubungan dengan bertambahnya penduduk dan berkembangnya pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka ruang lingkup kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai Perangkat Daerah yang bertugas menjaga ketersediaan Ikan dan Sumber daya hayati baik yang ada di Perairan Umum dan laut, di tuntut lebih aktif dan Profesional. Sehingga untuk mendukung kinerja Asn di Perangkat Daerah dan lapangan maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.

Berkaitan hal tersebut diatas, sarana (kendaraan dinas) yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan sudah mencukupi meskipun untuk menunjang kinerja Anggotanya dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi serta dalam pelayanan kepada masyarakat. Baik itu dalam melaksanakan proses administrasi dan sebagainya masih sangat kurang atau terbilang perangkat lama. Permasalahan mengenai sarana dan prasarana yang belum terpenuhi hanyalah peralatan kerja kantor yang masih tidak memadai dan kurang refresentatif, membuat kinerja Staf Administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan masih belum bisa dimaksimalkan.

## 6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang sebagian besar dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

- a) Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi yang bersangkutan.
- b) Keterbatasan anggaran yang tersedia, menyebabkan program dan kegiatan teknis di masing-masing Bidang tidak bisa dilaksanakan sehingga hanya program dan kegiatan rutin saja yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan selama tahun 2018.

Solusi yang diberikan guna mengatasi masalah yang dihadapi :

- a) Mengadakan Bimbingan secara intern melalui atasan langsung di setiap Sub Bagian dan Seksi untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan dan keterampilan bawahannya dengan tujuan bisa memaksimalkan capaian kinerja yang diharapkan khususnya dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketentraman, ketertiban dan keindahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b) Dengan keterbatasan anggaran, maka sangat perlu untuk menentukan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan yang lebih mengarah kepada tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan.
- c) Mengusulkan program dan kegiatan prioritas dari masing-masing Bidang dan Sub Bagian yang bisa mendukung memaksimalkan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan serta bisa membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## 7. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Di Tahun 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan mendapat 6 kegiatan dari pusat dan 1 dari CSR, diantaranya :

1. Bansapras Budidaya.
2. Bioflok.
3. Mina Padi .
4. Bantuan Pemerintah Asuransi Nelayan
5. Tempat Pelelangan Ikan ( TPI ) Perikanan Darat Kec. Kota Bangun.
6. Konverter BBM ke BBG ( Mesin Ketinting Lengkap dengan Converter )

Sedangkan 1 kegiatan dari CSR PT.MHU kec.Loa Kulu berupa :

1. Bansapras Budidaya



**B.2. URUSAN PERTANIAN**  
**DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**  
**1. Program dan Kegiatan**

Dalam upaya mewujudkan Pencapaian Kegiatan dan Program Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara 2018 telah menyusun dan mengimplementasikan program – program antara lain :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 4) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
- 5) Program Peningkatan Produksi Pertanian
- 6) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- 7) Program Revolusi Jagung
- 8) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 sebanyak 8 (Delapan) program dan 40 (Empat Puluh) kegiatan. Adapun realisasi anggaran yang dapat diserap dalam pembiayaan kegiatan sebesar Rp14.285.951.336,- dari jumlah anggaran sebesar Rp.17.427.200.483,- atau 81,98 %

Adanya penyerapan anggaran yang kurang maksimal dikarenakan ketersediaan dana dan sisa kontrak dari pengadaan barang dan jasa.

Adapun realisasi Program dan Kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagaimana berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
 Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.7.850.000,- terealisasi Rp.3.498.000,- dengan persentase antara anggaran yang tersedia dengan realisasi sebesar (44,56%) dengan realisasi fisik 80 % dan sisa dana sebesar Rp.4.352.000,-.
  - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik  
 Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.693.240.000,- terealisasi Rp.441.550.002,- dengan persentase anantara anggaran yang tersedia dengan realisasi sebesar (63,69%) dengan realisasi fisik 100 % dan sisa dana sebesar Rp.251.739.998,-.
  - c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional  
 Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.10.000.000,- terealisasi Rp.46.304.700,- (46,30%) dengan realisasi fisik 100 % dan sisa dana sebesar Rp.53.695.300,- .
  - d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  
 Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.465.458.000,- ter realisasi Rp.399.081.000,- (85,74%) dengan realisasi fisik 90 % dan sisa dana sebesar Rp.53.695.998,-.
  - e) Penyediaan Jasa Perbaikan Alat Kerja  
 Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.32.700.000,- terealisasi Rp.32.667.500,- (99,90%) dengan realisasi fisik 100 %, dan sisa dana sebesar RP. 32.500,-.

- f) Penyediaan Alat Tulis Kantor  
Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.200.000.000,- terealisasi Rp.19198.254.625,- (99,13%) dengan realisasi fisik 100 %, dan sisa dana sebesar RP. 1.745.375,-.
  - g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.45.000.000,- terealisasi Rp.44.909.000,- (99,80%) dengan realisasi fisik 100 % dan sisa dana sebesar Rp.91.000,-.
  - h) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.82.000.000,- terealisasi Rp.71.000.000,- (86,71%) dengan realisasi fisik 89 % dan sisa dana sebesar Rp.10.90.000,-.
  - i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  
Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.91.858.180,- terealisasi Rp.48.250.000,- (58,34%) dengan realisasi fisik 100 % dan sisa dana sebesar Rp.46.21925,-.
  - j) Penyediaan Bahan Logistik Kantor  
Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.82.700.000,- terealisasi Rp.48.250.000,- (58,34%) dengan realisasi fisik 100 % dan sisa dana sebesar Rp.34.450.000,-.
  - k) Penyediaan Makanan dan Minuman  
Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.40.000.000,- terealisasi Rp.34.650.000,- (86,63%) dengan realisasi fisik 100 % dan sisa dana sebesar Rp.5.350.000,- .
  - l) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah  
Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.250.000.000,- terealisasi Rp.248.340.220,- (99,34%) dengan realisasi fisik 100 % dan sisa dana sebesar Rp.1.659.780,- .
  - m) Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran  
Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.2.402.305.680,- terealisasi Rp.2.183.865.320,- (90,91%) dengan realisasi fisik 100 % dan sisa dana sebesar Rp.218.440.350,- .
  - n) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  
Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.95.000.000,- terealisasi Rp.86.079.750,- (90,61 %) dengan realisasi fisik 100 % dan sisa dana sebesar Rp.8.920.250,- .
  - o) Operasional UPTD Penyuluh Pertanian dan Peternakan Kecamatan  
Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.550.000.0000,- terealisasi Rp.549.835.000,- (99,97%) dengan realisasi fisik 100 % dan sisa dana sebesar Rp165.000,- .
  - p) sedangkan target dari kegiatan ini adalah 580 OH dan terealisasi sebanyak 580 OH.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor  
Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.30.000.0000,- terealisasi Rp.29.720.000,- (99,07 %) dengan realisasi fisik 100 % dan sisa dana sebesar Rp.280.000,-.
  - b) Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan  
Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.75.000.000,- terealisasi Rp.70.296.054,- (93,73 %) dengan realisasi fisik 100.% dan sisa dana sebesar Rp.4.703.946,-.

- c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional  
Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.219.250.000,- terealisasi Rp.214.296.975,- (97,74 %) dengan realisasi fisik 100.% dan sisa dana sebesar Rp.4.953.025,-.
  - d) Pembangunan Gedung Kantor (DAK)  
Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.500.000.000,- terealisasi Rp.34.968.000,- (6,99 %) dengan realisasi fisik 0.% dan sisa dana sebesar Rp.465.032.000,- yang dilaksanakan dari kegiatan ini hanya perencanaan sedangkan untuk fisiknya tidak terlaksana.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- a) Inventarisasi Barang Milik Daerah.  
Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.50.000.0000,- terealisasi Rp.47.080.000,- (94,16 %) dengan realisasi fisik 100 % dan sisa dana sebesar Rp.2.920.000,-.
  - b) Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga  
Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.4.131.813.277,- terealisasi Rp.4.151.552.200,- (99,34 %) dengan realisasi fisik 100.% dan sisa dana sebesar Rp.27.341.077,-.
4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
- a) Pengadaan Sarana dan Prasarana teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna  
Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 576.395.200,- ter realisasi Rp. 400.610.600,- (69,50%) dengan realisasi fisik 100 dan sisa dana sebesar Rp.175.784.600,-.
  - b) Penyediaan dan Alat Mesin Pertanian (Bankeu Provinsi)  
Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp. 350.000.000,- ter realisasi Rp. 323.320.315,- (92,38%) dengan realisasi fisik 100 dan sisa dana sebesar Rp.26.679.685,-.
5. Program Peningkatan Produksi Pertanian
- a) Penyediaan Pupuk dan Pestisida  
Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.55.000.000,- terealisasi Rp.0,- (0%) dengan realisasi fisik 100 % dan sisa dana sebesar Rp.55.000.000,- .
  - b) Pengendalian OPT Pada Daerah Endemis dan Masyarakat PHT  
Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.120.208.480,- terealisasi Rp.109.516.000,- (91,11%) dengan realisasi fisik 100 % dan sisa dana sebesar Rp.10.692.480,- .
  - c) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev  
Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.125.844.000,- terealisasi Rp.124.784.000,- (99,16%) dengan realisasi fisik 100 % dan sisa dana sebesar Rp.1.062.000,-.
  - d) Pengembangan budi daya Tanaman Sayuran, Tanaaman Hias, dan Biofarmaka (Bankeu)  
Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.200.000.000,-

- terrealisasi Rp.192.018.500,- (96,01%) dengan realisasi fisik 100 % dan sisa dana sebesar Rp.7.981.500,-.
- e) Pengembangan Budidaya Tanaman Buah-buahan unggul  
Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.200.000.000,- terrealisasi Rp.194.450.000,- (97,23%) dengan realisasi fisik 100 % dan sisa dana sebesar Rp.5.550.000,-.
  - f) Pendampingan Produksi Tanaman Sayur dan Obat APBN 2018  
Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.100.000.000,- terrealisasi Rp.9.266.000,- (99,27%) dengan realisasi fisik 100 % dan sisa dana sebesar Rp.734.000,-.
  - g) Identifikasi Pengembangan Padi Sawah  
Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.300.000.000,- terrealisasi Rp.297.200.000,- (99,07%) dengan realisasi fisik 100 % dan sisa dana sebesar Rp.2.800.000,-.
6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
    - a) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak  
Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.270.000.000,- terrealisasi Rp.0,- (0%) dengan realisasi fisik 0 % dan sisa dana sebesar Rp.270.000.000,-.
    - b) Pengembangan Ternak Ruminansia  
Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.1.647.820,666,- terrealisasi Rp.1.011.683.000,- (61,40%) dengan realisasi fisik 89 % dan sisa dana sebesar Rp.636.137.666,-.
    - c) Pendampingan Program UPSUS dan SIWAB  
Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.250.000.000,- terrealisasi Rp.176.191.000,- (70,48%) dengan realisasi fisik 89 % dan sisa dana sebesar Rp.73.809.000,-.
    - d) Pengembangan Ternak Ruminansia (Bankeu Provinsi)  
Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.450.000.000,- terrealisasi Rp.434.746.250,- (96,61%) dengan realisasi fisik 100 % dan sisa dana sebesar Rp.15.253.750,-.
  7. Program Revolusi Jagung  
Pengembangan dan Penerapan Teknologi Budidaya Jagung  
Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.1.300.00.000,- terrealisasi Rp.1.279.764.200,- (98,44 %) dengan realisasi fisik 100 % dan sisa dana sebesar Rp.20.235.800,-.
  8. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
    - a) Pembuatan / Peningkatan Prasarana Irigasi Pertanian Tesier / JITUT  
Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.189.659.000,- terrealisasi Rp.0,- (0%) dengan realisasi fisik 0 % dan sisa dana sebesar Rp.189.659.000,-.
    - b) Peningkatan / Pembuatan Jalan Usaha Pertanian (JUT)  
Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.261.698.000,- terrealisasi Rp.0,- (0%) dengan realisasi fisik 0 % dan sisa dana sebesar Rp.261.698.000,-.

- c) Pencetakan Sawah  
Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.150.000.000,- terealisasi Rp.0,- (0%) dengan realisasi fisik 0 % dan sisa dana sebesar Rp.150.000.000,-.
- d) Pengembangan Sumber-Sumber Air (DAK)  
Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.624.000.000,- terealisasi Rp.623.966.100,- (99,99) dengan realisasi fisik 100 % dan sisa dana sebesar Rp.33.900,-.
- e) Pembinaan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Pertanian (Pendampingan Kegiatan DAK/APBN Prasarana dan Sarana Pertanian)  
Dari pagu dana yang tersedia dalam kegiatan ini sebesar Rp.112.400.000,- terealisasi Rp.83.047.800,- (73,89%) dengan realisasi fisik 92 % dan sisa dana sebesar Rp.29.352.200,-.

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Ton)	Realisasi (Ton)	Keterangan
<b>A</b>	Meningkatnya kontribusi PDRB sub sektor Pertanian.	Pertumbuhan/kontribusi PDRB sub sektor Pertanian			Target RPJMD dan Renstra
<b>1</b>		Padi Sawah	223.404	160.626	Tidak Tercapai
<b>2</b>		Padi Ladang	16.321	17.356	Tercapai
<b>3</b>		Jagung	5.688	12.20867	Tercapai
<b>4</b>		Kedelai	476	67	TidakTercapai
<b>5</b>		Ubi Kayu	35.176	28.885	Tidak Tercapai
<b>6</b>		Kacang Tanah	662	421	Tidak Tercapai
<b>B.</b>	Meningkatnya Pertumbuhan Populasi sektor Peternakan.	Pertumbuhan Populasi sektor Peternakan	Target Ekor	Realisasi Ekor	Keterangan
<b>1</b>	Sapi potong		39.085	24.714	Tidak Tercapai
<b>2</b>	Kerbau		4.278	2.365	Tidak Tercapai
<b>3</b>	Kambing		9.760	10.271	Tercapai
<b>4</b>	Babi		5.548	3.662	Tidak Tercapai
<b>5</b>	Ayam Buras		1.483.055	879.310	Tidak Tercapai
<b>6</b>	Ayam Ras Petelur		375.623	218.195	Tidak Tercapai
<b>7</b>	Ayam Ras Pedaging		18.522.849	3.803.920	Tidak Tercapai

Analisa dari Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja antara Target dan Realisasi kinerja Tahun 2018 diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

Indikator kinerja peningkatan produksi Pertanian dan Pertumbuhan Populasi ternak sesuai dengan data realisasi kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2018 terdapat 2 (dua) Kondisi tercapai yaitu Produksi Padi Ladang dengan target 16.321 Ton dengan capaian realisasi 17.356 Ton, Produksi Jagung dimana target 5.688 ton dengan capaian realisasi 12.208 Ton dan Populasi Kambing target 9.760 ekor dengan capaian realisasi 10.271 ekor.

Dari Realisasi tahun 2018 maka dapat dilakukan upaya upaya untuk mencapai hasil sasaran yang di implementasikan dalam Program kerja tahun berikutnya. Upaya upaya Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dengan mengupayakan :

1. Pengalokasian Program dan kegiatan ditahun berikutnya melalui sarana dan

- Prasarana pertanian, Pengadaan Benih/Bibit Pertanian dan Peternakan untuk peningkatan produksi hasil Pertanian dan Peternakan.
2. Pengembangan komoditas yang difokuskan pada suatu lokasi atau wilayah secara terpadu sesuai dengan rencana tata ruang daerah;
  3. Pembangunan Pertanian dan Peternakan dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat (petani, koperasi dan swasta) dan pemerintah kabupaten dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah;
  4. Pembangunan Pertanian dan Peternakan diarahkan untuk menumbuhkembangkan ekonomi pedesaan yang mandiri.
  5. mengembangkan agribisnis yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan.
  6. Melakukan Koordinasi lintas Sektoral
  7. Melaksanakan bimbingan dan pendampingan ke kelompok penerima bantuan
  8. Upaya dalam pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan hama dan penyakit.

### **3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris yang membawahi 3 (Tiga) Sub Bagian, 4 (Empat) Bidang, 12 (Dua Belas) Seksi, 18 (Delapan Belas) UPT Penyuluhan Pertanian dan Peternakan Kecamatan, 1 (Satu) UPT Balai Benih Hortikultura, 1 (Satu) UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, 1 (Satu) UPT Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan Tenggarong, 1 (satu) Kepala UPT Pembibitan Sapi Potong Ma. Kaman Desa Lebaho ulaq, dan 1 (satu) UPT Pusat Kesehatan Hewan Samboja.

Sampai dengan 31 Desember 2018 keadaan pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari : PNS sebanyak 530 orang yang tersebar untuk pegawai Dinas Kabupaten Penyuluh dan UPT Kecamatan. Tenaga pendukung non PNS berjumlah 200 Orang.

### **5. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Pengalokasian anggaran ke Dinas Pertanian dan Peternakan tahun 2018 adalah sebesar Rp.17.427.200.483,- (Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) dan hingga akhir bulan Desember 2018 dapat terealisasi sebesar Rp.14.285.951.336 (Empat Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah) atau 81,98. %.

Realisasi anggaran tersebut sesuai dengan rencana pembiayaan program kegiatan yang telah disusun dan dialokasikan baik di Kabupaten maupun yang tersebar pada 18 kecamatan, yang terdiri dari 8 (Delapan) program dan 40 (Empat puluh) kegiatan.

### **5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)**

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pertanian dan Peternakan untuk mendukung kegiatan kedinasan baik yang bersifat teknis maupun nonteknis terdiri

dari :

1. Tanah  
Tanah yang dimiliki Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari 51 unit meliputi tanah untuk gedung dan bangunan serta tanah untuk kebun Dinas.
2. Peralatan dan mesin  
Peralatan dan mesin dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan kedinasan baik yang ada di Dinas Kabupaten maupun yang ada di UPTD serta Dimasyarakat.
3. Gedung dan Bangunan  
Gedung dan Bangunan yang dimiliki Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari Gedung dan Bangunan untuk Kantor Dinas Kabupaten, UPTD serta Bangunan lainnya yang ada di masyarakat.
4. Jalan dan Jaringan  
Jalan dan Jaringan Irigasi yang pernah dibangun oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura tersebar di beberapa Kecamatan sebagai sarana untuk transportasi masyarakat menuju lahan persawahan serta sebagai sarana untuk melakukan pengairan terhadap sawah petani.
5. Aset Tetap Lainnya  
Aset Tetap Lainnya ini merupakan aset diluar empat aset sebelumnya seperti Sapi dimanfaatkan kotorannya sebagai bahan baku pembuatan Kompos, Buku-Buku serta yang lainnya.

## 6. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan  
Adapun permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Pertanian dan Peternakan pada Tahun 2018 terbagi dari :
  - a. Permasalahan umum :  
Permasalahan umum yang berimplikasi terhadap kegiatan usaha tani bidang pertanian tanaman pangan dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani antara lain :
    1. Ketersediaan anggaran yang bersumber dari APBD tidak bertepatan waktunya dengan kegiatan dilapangan.
    2. Kondisi infrastruktur yang belum memadai terutama akses jalan usahatani dan sarana jalan pedesaan (sentra produksi).
    3. Ketersediaan lembaga finansial dan fasilitas program dalam pelayanan pendanaan usahatani yang masih terbatas.
    4. Terjadinya perubahan lingkungan usaha tani yang kurang mendukung proses produksi yang disebabkan adanya kegiatan usaha non pertanian (kegiatan pertambangan dan perkebunan).
    5. Terjadinya rasionalisasi anggaran dimana menyebabkan adanya perubahan RKA / DPA sehingga berpengaruh terhadap realisasi kegiatan serta penyerapan anggaran.
  - b. Permasalahan teknis :  
Dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi pertanian tanaman pangan masih terhambat adanya permasalahan yang bersifat teknis baik yang bersifat internal maupun eksternal antara lain :

1. Kondisi Iklim yang tidak menentu, sehingga dapat menyebabkan terjadinya banjir maupun kekeringan dalam waktu yang cukup panjang serta menyebabkan meledaknya serangan hama dan penyakit yang dapat menyebabkan terjadinya puso atau penundaan masa tanam sehingga menyebabkan terjadinya penurunan produksi.
  2. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke usaha non pertanian sehingga berakibat turunnya luas panen dan produksi.
  3. Ketersediaan Sarana Produksi yang relative terbatas ditingkat petani.
  4. Terjadinya perubahan kondisi lingkungan menjadi kurang sehat, sebagai akibat dari pencemaran pembukaan lahan tambang dan perkebunan kelapa sawit, sehingga hal ini dapat menyebabkan menurunnya Kualitas tanah yang dapat menyebabkan menurunnya produktivitas tanaman.
  5. Adanya alih fungsi (transisi) tenaga kerja petani ke sektor non pertanian (sektor jasa, pertambangan dan perkebunan) karena dipandang lebih pasti dan menjanjikan.
2. Solusi
- Agar kegiatan pertanian tanaman pangan tetap berjalan dengan baik dan sesuai harapan, tentunya perlu adanya penanganan dan tindakan yang konkrit baik bersifat umum maupun teknis dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut diatas antara lain :
- a) Mengintensifkan bimbingan dan pembinaan terhadap petani.
  - b) Melaksanakan koordinasi lintas sektoral guna penanganan masalah degradasi lahan pertanian.
  - c) Melaksanakan bimbingan dan pendampingan ke kelompok tani dalam upaya mengakses sarana produksi (pupuk).
  - d) Memantapkan modernisasi pertanian.
  - e) Melakukan Perluasan areal lahan pertanian produktif sebagai pengganti alih fungsi lahan oleh tambang batubara dan kelapa sawit.
  - f) Pencegahan Penanggulangan dan Pemberantasan hama dan penyakit lingkup Pertanian dan Peternakan
  - g) Melakukan pelatihan manajemen kesehatan.

## 7. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Adapun hal lain yang perlu dilaporkan adalah :

1. Piagam Penghargaan kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Terbaik 1 Bidang Pembangunan Hortikultura dari gubernur Kalimantan Timur dalam rangka HUT ke 62 Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 9 Januari 2019.
2. Piagam Penghargaan kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Terbaik II Bidang Pembangunan Tanaman Pangan dari gubernur Kalimantan Timur dalam rangka HUT ke 62 Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 9 Januari 2019.



## DINAS PERKEBUNAN

### 1. Program dan Kegiatan

Dalam hal pencapaian program dan kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2018 dengan rincian realisasi kinerja fisik sebesar 90,48% dan realisasi keuangan sebesar 70,08%,. dimana ada 8 program dan 21 kegiatan yang dilaksanakan dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selengkapnya terlampir dalam laporan ini.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja program dan kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, masih ada kegiatan dan program yang belum mencapai 100% dikarenakan beberapa faktor. Keseluruhan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

#### a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% dan Capaian program 99,02%.

Kegiatan program ini terdiri dari 8 kegiatan yaitu :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik realisasi 100%.
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Realisasi 100%.
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan realisasi 100%.
4. Penyediaan alat tulis kantor realisasi 100%.
5. Penyediaan makanan dan minuman Realisasi 86,50%, walaupun realisasi tidak sesuai dengan target akan tetapi seluruh rapat yang dilaksanakan dinas sudah terakomodir dan dibayarkan.
6. Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran realisasi 100%.
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan realisasi 100%.
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah realisasi 100%.

#### b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Target Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% dan Capaian program 100%.

Kegiatan program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor realisasi 100%.
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional realisasi 100%.

#### c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Target Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% dan Capaian Program 100%.

Kegiatan program ini terdiri dari 3 kegiatan yaitu :

1. Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta monev realisasi 100%.
2. Inventarisasi barang milik daerah realisasi 100%.
3. Fasilitasi penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga realisasi 100%

#### d) Program Perluasan Komoditas Perkebunan.

Target Program Program Perluasan Komoditas Perkebunan 100% dan Capaian Program 45,53%, ini dikarenakan ada 1 Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan 1 kegiatan tidak mencapai 100%

Kegiatan program ini terdiri dari 4 kegiatan yaitu :

1. Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat realisasi 0%. Kegiatan ini tidak dapat

dilaksanakan dikarenakan :

- Adanya rencana efisiensi anggaran di Dinas Perkebunan Kab. Kutai Kartanegara khususnya pada anggaran kegiatan Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat dimana dana anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk penyelesaian kewajiban kepada penyedia barang/jasa pihak ketiga pada kegiatan pengembangan kelapa sawit rakyat tahun 2017 yang akan dilakukan pada saat perubahan.
  - Terbatasnya waktu yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan kegiatan tersebut karena mengingat kepastian Surat Penyediaan Dana (SPD) yang baru terbit pada pertengahan bulan oktober 2018.
2. Pengembangan Tanaman Karet Rakyat realisasi 100%.
  3. Pengembangan Tanaman Lada Rakyat (organic) realisasi 100%
  4. Pembebasan Lahan Untuk Penyaluran Bibit Untuk UPT. Dinas Perkebunan Kecamatan Kembang Janggut ( Bankeu ) realisasi 90 %, dikarenakan ada 1 (satu) tahapan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan yaitu pembuatan sertifikat tanah yang memerlukan waktu yang lumayan lama dikarenakan DPA Perubahan kegiatan tersebut keluar dibulan oktober dan Surat Penyediaan Dana (SPD) kegiatan keluar pada minggu kedua Desember 2018 .
- e) Program Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan.  
Target Program Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan 100% dan Capaian program 100%.  
Kegiatan program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
1. Identifikasi dan Pengendalian Hama, Penyakit dan Gulma Realisasi 100%.
- f) Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan.  
Target Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan 100% dan Capaian program 100%.  
Kegiatan program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perkebunan Besar Swasta (PBS) Realisasi 100%.
- g) Program peningkatan penerapan teknologi perkebunan  
Target Program Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan 100% dan Capaian Program 100%.  
Kegiatan program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
1. Inventarisasi Pengawasan, Pemeliharaan dan Mutasi Alsintan Perkebunan Yang Diperbantukan Realisasi 100%.
- h) Program peningkatan produksi Perkebunan  
Target Program Peningkatan Produksi Perkebunan 100% dan Capaian Program 100%.  
Kegiatan program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
1. Pembinaan dan pengawasan pupuk bersubsidi Realisasi 100%.

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat pasal 11 ayat (4) dan pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005

tentang perubahan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan Pelayanan dasar, baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pilihan dimana penilaian Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

➤ Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan.

Berdasarkan dari 8 sasaran dan 8 indikator kinerja masing-masing sasaran yang akan dicapai ada 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan yaitu :

1. Jumlah Luas Areal Perkebunan
2. Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan
3. Jumlah Produktivitas Komoditi Perkebunan

**Tabel 3.53**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Realisasi 2018
<b>Jumlah Luas Areal Perkebunan</b>	<b>253.089 Ha</b>	<b>297.969 Ha</b>	<b>255.029 Ha</b>
1) Kebun Rakyat	60.257 Ha	61.639 Ha	59.509 Ha
2) Perusahaan Besar Swasta (PBS)	192.832 Ha	236.330 Ha	195.520 Ha
<b>Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan</b>	<b>2.710.937 Ton</b>	<b>1.989.893 Ton</b>	<b>2.260.664 Ton</b>
1) Kelapa Sawit			
- Kebun Rakyat	232.719,75Ton	375.000 Ton	299.200,36
- Perusahaan Besar Swasta (PBS)	2.449.304,60 Ton	1.588.388 Ton	1.929.851,06
2) Karet	16.129,76Ton	12.500 Ton	19.737,88
3) Lada	3.587,33 Ton	5.050 Ton	3.984,20
4) Kopi	24,56 Ton	125 Ton	5,76
5) Kelapa Dalam	7.413,32 Ton	8300 Ton	6.809,97
6) Kakao	44,94 Ton	130 Ton	30,02

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2017	Target Capaian Kinerja 2018	Realisasi 2018
7) Aren	180.65 Ton	400 Ton	278,37
<b>Jumlah Produktivitas Komoditi Perkebunan</b>			
1) Kelapa Sawit	15.571,40	19.300	18.189,19
2) Karet	2.304,27	1.530	2.452,67
3) Lada	1.004,48	1.310	1.135,15
4) Kopi	273,46	375	306,36
5) Kelapa Dalam	1.222,69	1.130	1.125,78
6) Kakao	847,96	1.220	577,37
7) Aren	1.272,18	1.020	1.733,86

### 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

#### a. Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Per Desember 2018 adalah sebanyak 196 orang.

#### b. Kualifikasi Pendidikan

- SD : 5 orang
  - SLTP : 2 orang
  - SLTA : 102 orang
  - D1 : 1 orang
  - D2 : 1 orang
  - D3 : 3 orang
  - S1 : 65 orang
  - S2 : 17 orang
  - S3 : -
- Jumlah : 196 orang

#### c. Pangkat Dan Golongan

- Golongan I : 4 orang
  - Golongan II : 99 orang
  - Golongan III : 79 orang
  - Golongan IV : 14 orang
- Jumlah : 196 orang

#### d. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Pejabat Struktural : 57 orang
- Pejabat Fungsional : 3 orang

### 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja urusan pilihan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka pada Tahun Anggaran 2018 telah dialokasikan dana APBD sebesar Rp. 4.429.943.200 dan APBD-P bertambah menjadi Rp. 6.550.710.200 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.590.712.558 atau 70,08%.

Secara keseluruhan semua kegiatan anggarannya terecap dan terealisasi akan tetapi masih ada 1 (satu) kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Terbatasnya waktu yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan kegiatan karena kepastian Surat Penyediaan Dana (SPD) yang baru terbit pada pertengahan bulan oktober 2018 yaitu Kegiatan Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat dan 2 (dua) kegiatan yang tidak mencapai 100% yaitu Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Penyaluran Bibit Untuk UPT. Dinas Perkebunan Kecamatan Kembang Janggut ( Bankeu ) realisasi 90 %, dikarenakan ada 1 (satu) tahapan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan yaitu pembuatan sertifikat tanah yang memerlukan waktu yang lumayan lama dikarenakan DPA Perubahan kegiatan tersebut keluar dibulan oktober dan Surat Penyediaan Dana (SPD) kegiatan keluar pada minggu kedua Desember 2018. serta kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Realisasi 86,50%, walaupun target tidak seratus persen akan tetapi kegiatan rapat yang dilaksanakan oleh OPD sudah terakomodir semua.

## 5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam hal Perencanaan Pembangunan Dinas Perkebunan mempunyai beberapa program dan kegiatan. Di renja 2018 Dinas Perkebunan mempunyai 14 program dan 102 kegiatan.

Dari beberapa program dan kegiatan tersebut ada 8 program yang sesuai antara Renja dengan RKA dan 6 program Renja yang tidak ada di RKA serta ada 21 Kegiatan yang sesuai antara Renja dengan RKA dan 81 kegiatan renja yang tidak terakomodir di RKA dikarenakan keterbatasan anggaran.

Akan tetapi Target Capaian Kinerja dan Dana Antara Renja dan RKA tidak sesuai, hal ini dikarenakan pada saat penyusunan RKA anggaran yang didapat tidak sesuai dengan yang ada di Renja, sehingga ada beberapa Program dan Kegiatan yang tidak terakomodir serta pagu dana kegiatan tidak sesuai dengan target di Renja.

## 6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Secara umum sarana dan prasana yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan Kab. Kutai Kartanegara, cukup memadai dalam seluruh kegiatan operasional selama ini. Namun dipandang perlu untuk menambah sarana dan prasarana pendukung lainnya untuk memperbaiki tingkat pelayanan ke masyarakat dan akuntabilitas publik. Terutama sarana dan prasarana operasional pendukung di UPT Dinas Perkebunan sangat minim dan perlu ada penambahan.

## 7. Permasalahan dan Solusi

### ➤ Permasalahan :

1. Realisasi luas areal perkebunan rakyat tahun 2018 mengalami penurunan dibanding realisasi luas areal perkebunan rakyat tahun 2017, disebabkan adanya alih fungsi lahan untuk usaha perkebunan, khususnya lahan komoditi kelapa dalam, lada dan kakao.
2. Realisasi produksi untuk komoditi perkebunan rakyat seperti Kopi, Kelapa Dalam, dan Kakao tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 diakibatkan :
  - ✓ Kurangnya sarana dan prasarana irigasi untuk budidaya kelapa dalam di

Kecamatan Samboja dan Muara Jawa sebagai daerah sentral kelapa dalam.

- ✓ Masih kurangnya minat petani terhadap budidaya tanaman kopi dan kakao, di akibatkan kondisi iklim yang tidak mendukung, karena mudah memicu serangan penyakit tanaman ada kedua komoditi tersebut.

3. Masih Adanya Tumpang Tindih Lahan kebun.
4. Kurangnya tenaga penyuluh lapangan
5. Masih banyak ditemukannya kebun petani yang mengalami kekeringan.
6. Masih beredarnya bibit palsu/tidak bersertifikat di masyarakat.

➤ Solusi

1. Perlu adanya regulasi untuk penetapan kawasan perkebunan khususnya komoditi perkebunan unggulan seperti Kelapa dalam, Lada dan Kakao.
2. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Cq. Dinas PU agar mengakomodir usulan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membangun pintu-pintu air utama di areal perkebunan kelapa dalam di Kecamatan Samboja dan Muara Jawa.
3. Perlu adanya penambahan tenaga PPL sub sektor perkebunan agar petani-petani dapat didampingi lebih intensif terkait budidaya kopi dan kakao, khususnya upaya bersama mengatasi serangan OPT.
4. Harus ada komunikasi antar skpd yang membidangi masalah lahan.
5. Pembuatan Embung, Sumber pompa dan penampungan air lainnya di areal kebun masyarakat.
6. Perlu adanya penambahan tenaga penyuluh lapangan.
7. Perlu adanya peran serta pemerintah daerah dalam hal peningkatan harga jual tanaman kebun lainnya.

## 8. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

➤ Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara :

1. Pengembangan kelapa sawit untuk mendukung sejuta hektar kelapa sawit, serta terwujudnya Program Kaltim Green di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pengembangan perkebunan yang berbasis masyarakat dalam hal program pengentasan kemiskinan dan kesetaraan gender.
3. Pengembangan perkebunan yang inovatif dan kreatif serta berkelanjutan.
4. Peningkatan Produksi dan Produktivitas kebun rakyat serta di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Terlindunginya perkebunan dari ancaman pengurangan luasan lahan.
6. Pencapaian target realisasi kebun plasma dan luasan lahan hijau melalui kemitraan usaha kerakyatan.
7. Meningkatnya harga jual produksi perkebunan rakyat.

### **B.3. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

#### **1. Program dan Kegiatan**

Laporan Kinerja dapat dilihat dari dua hal; yaitu pencapaian (i) kinerja output dan (ii) kinerja keuangannya. Yang dimaksud dengan kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

Dalam hal pencapaian program dan kegiatan tahun anggaran 2018 dengan rincian realisasi kinerja sebesar 99,95 % dapat dilihat dibawah ini :

1. Ada 22 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dengan Program Utama dengan rincian sebagai berikut :
  - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan melalui 10 kegiatan.
  - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang diimplementasikan ke dalam 1 kegiatan.
  - c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui 5 kegiatan.
  - d) Program Pemeliharaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan yang dilaksanakan melalui 1 kegiatan.
  - e) Program pembinaan dan pengembangan Bidang Ketenagalistrikan melalui 0 kegiatan.
  - f) Program Pembinaan dan pengembangan Panas Bumi yang dilaksanakan melalui 1 kegiatan.
  - g) Program Pemeliharaan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan yang dilaksanakan melalui 3 kegiatan.
  - h) Program Pemanfaatan Sumber Air Bawah Tanah yang dilaksanakan melalui 1 kegiatan
2. Dari sisi keuangan, share/proporsi 22 kegiatan dengan Tingkat pencapaian program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab.Kutai Kartanegara berdasarkan realisasi capaian sebesar 97,80 %, dengan rincian sebagai berikut :
  - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran capaian program 92,34 %
  - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur capaian program 52,48 %
  - c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan capaian program 98,86 %.
  - d) Program Pengembangan energi baru terbarukan capaian program 94,79 %.
  - e) Program pembinaan dan pengembangan Bidang Ketenagalistrikan capaian program 0 %.
  - f) Program Pembinaan dan Pengembangan Panas Bumi capaian program 97,06%
  - g) Program Pemeliharaan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan capaian program 98,69 %.
  - h) Program Pemanfaatan Sumber Air Bawah Tanah capaian program 100%.



Secara keseluruhan pencapaian renja dan renstra masih ada yang belum memenuhi target dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran dan capaian target program dan kegiatan akan ditingkatkan lagi pada tahun 2019 mendatang secara keseluruhan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan target renja 100% dan capaian renja 92,34%, dengan kegiatan :
  - a) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional, target renja 27 unit capaian renja 27 unit (85,19%)
  - b) Penyediaan jasa administrasi keuangan, target renja 12 bulan capaian renja 12 bulan (100%)
  - c) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, target renja 29 unit, capaian renja 24 unit (53,49%).
  - d) Penyediaan alat tulis Kantor, target renja 48 jenis capaian renja 48 jenis (99,08%)
  - e) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, target renja 9 unit, capaian renja 9 (98,92%)
  - f) Penyediaan bahan logistik kantor, target renja 10 Jenis, capaian renja 10 jenis (98,49%)
  - g) Penyediaan makanan dan minuman, target renja 1.400 porsi, capaian renja 1.400 porsi (73,87%)
  - h) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah, target renja 1 Tahun capaian renja 1 Tahun (95,78%)
  - i) Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran, target renja 12 bulan capaian renja 12 bulan (90,36%)
  - j) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, target renja 8 jenis, capaian renja 8 jenis (86,49%).
2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur, dengan target renja 100% dan capaian renja 52,48%, dengan kegiatan :
  - a) Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional, target renja 10 unit capaian renja 10 unit (52,48%)
3. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan, dengan target renja 100% dan capaian renja 98,86%, dengan kegiatan :
  - a) Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun, target renja 1 Laporan, capaian renja 1 Laporan, (100%)
  - b) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev , target renja 6 Dokumen, capaian renja 6 Dokumen (72,17%).
  - c) Penyusunan Buku Profil SKPD, target renja 1 buku profil, capaian renja 1 buku profil (99,83%).
  - d) Inventarisasi Aset Perangkat Daerah, target renja 1 Laporan, capaian renja 1 Laporan (81,51%).
  - e) Fasilitasi kewajiban kepada pihak ke tiga, target renja 3 kegiatan, capaian renja 3 kegiatan (100%).
4. Program Pengembangan energi baru terbarukan, dengan target renja 100% dan capaian renja 94,79%, dengan kegiatan :
  - a) Penyusunan Kajian Pengembangan Energi alternatif, target renja 1 Dokumen, capaian renja 1 Dokumen (94,79%)



5. Program Pembinaan dan Pengembangan Panas Bumi, dengan target Renja 100% dan capaian Renja 97,06 %, dengan kegiatan :
  - a) Survey dan Identifikasi Panas Bumi, dan penyusunan Dokumen Perencanaan/Kajian Pengembangan Energi Baru Terbarukan Panas Bumi target renja 30 titik, capaian renja 30 titik (97,06%).
6. Program Pemeliharaan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan, dengan target renja 100% dan capaian renja 98,69%, dengan kegiatan :
  - a) Pemeliharaan PJU, target renja 3969 unit, capaian renja 3969 unit (88,98%)
  - b) Pengadaan Material LPJU, target renja 1 paket, capaian renja 1 paket (85,69%).
  - c) Pembayaran rekening PJU, target renja 12 Bulan, capaian 12 bulan (99,78%)
7. Program Pemanfaatan Sumber Air Bawah Tanah, dengan target renja 100% dan capaian renja 100%, dengan kegiatan :
  - a) Identifikasi Potensi Air Tanah, target renja 10 titik, capaian renja 10 titik (100%)

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Indikator kerja yang diuraikan sebagaimana dalam tabel adalah ukuran kuantitatif ataupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dari antara indikator kinerja tersebut dipilih beberapa indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara, yang didasarkan atas ruang lingkup tugas pokok dan fungsi dinas, sebagai berikut :

**Tabel 3.49**  
Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET 2017	TARGET RESTRA		PENJELASAN
			2018	2021	
<b>Persentase Rumah Tangga/KK Yang memanfaatkan Energi Baru Terbarukan</b>	%	2.7%	3.3%	5%	Untuk mengukur berapa jumlah Rumah Tangga/KK yang telah memanfaatkan Energi alternatif
<b>Pemanfaatan Langsung Potensi Panas Bumi</b>	Izin	20%	40%	100% (15 berizin)	Untuk mengetahui berapa yang memanfaatkan potensi panas bumi;
<b>Penyediaan Air Bersih dari Air Tanah</b>	Titik	20%	20%	20%	Untuk mengetahui jumlah penyediaan Air bersih dari Air Tanah (Sumur Bor)

Pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 berdasarkan Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.50**  
Target Kinerja Sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Penguatan kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional di sektor energi dan sumberdaya mineral.	Meningkatnya kapasitas pada Dinas Pertambangan dan Energi dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik.	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	C	B	B	B	B	B	B
2	Menggali Potensi Pemanfaatan Panas Bumi yang berkesinambungan dan Bertanggung jawab dengan berwawasan lingkungan hidup serta mengetahui potensi data dan informasi migas	2.1 Terwujudnya Produktivitas dalam rangka menggali potensi pemanfaatan panas bumi secara optimal dengan berwawasan lingkungan 2.2 Meningkatkan penyediaan data dan informasi tentang pendistribusian Harga Eceran Tertinggi BBM tertentu & LPG, serta data Lifting Migas	2.1 Persentase Pemanfaatan Panas Bumi  Jumlah data penyediaan pendistribusian Nilai Eceran Tertinggi BBM Tertentu & LPG	n/a	-	20%	40%	60%	80%	100% (15 Berizin)
3	Terwujudnya penyediaan air bersih dari air tanah bagi daerah sulit air yang berwawasan keseimbangan lingkungan dan tersedianya data hasil tambang di Kabupaten Kutai Kartanegara	2.1. Meningkatkan penyediaan air bersih dari air tanah bagi daerah sulit air. 2.2. Meningkatkan penyediaan data dan informasi Pertambangan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;	Cakupan Penyediaan Air Bersih melalui Pengeboran Air Tanah	n/a	-	20%	20%	20%	20%	20%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Menyediakan pasokan energi pedesaan dari penganekaragaman sumberdaya Energi Baru Terbarukan.	4.1 Meningkatnya Rumah Tangga yang menggunakan Energi baru dan terbarukan; 4.2 Meningkatnya Rasio Elektrifikasi	% Rumah Tangga yang menggunakan Energi Baru Terbarukan  Persentase Rumah Tangga Berlistrik	2.2%  68%	2.4%  70%	2.7%  73%	3.3%  77%	3.8%  81%	4.4%  86%	5%  90%

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, untuk sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hanya memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan usaha pemanfaatan langsung panas bumi, untuk itu dalam pengimplementasiannya telah dilakukan kegiatan Survey dan Identifikasi Panas Bumi berdasarkan Anggaran Perubahan tahun 2018. Untuk capaian kinerja indikator Persentase Pemanfaatan Panas Bumi belum ada dikarenakan untuk tahun 2018 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral hanya melakukan kegiatan survey dan Identifikasi Panas Bumi, sedangkan untuk pemberian izin perusahaan pemanfaatan langsung panas bumi belum ada masyarakat yang mengurus izinya dikarenakan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang ini masih dalam tahap penyelesaian, sehingga target yang 20% untuk tahun 2018 ini belum dapat tercapai.

Adapun Hasil dari pelaksanaan Kegiatan Survey dan Identifikasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan/Kajian Energi Baru Terbaharukan Panas Bumi tahun 2018 dengan jumlah target dan realisasinya ada 4 Kecamatan yaitu kecamatan Marangkayu, Samboja, Sangasanga, Muara Jawa, dengan 5 titik Desa/Kelurahan, Sedangkan untuk titik lokasi penyusunan dokumen perencanaan/kajian panas bumi dari hasil survei dan identifikasi berada di Kelurahan Dondang dan Kelurahan Tama Pole Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dari pelaksanaan kegiatan survey dan identifikasi dan penyusunan dokumen perencanaan/kajian energi baru terbaharukan panas bumi berdasarkan realisasi keuangan tertimbang sebesar 97.06%,

### 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini perlu diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan. Melihat kenyataan seperti saat ini, perlu peningkatan sumber daya manusia khususnya Pegawai Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara melalui kursus-kursus, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, tugas belajar dan lain-lain. Sehingga permasalahan maupun tantangan yang ada dapat diatasi serta mampu mengembangkan memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam khususnya di bidang energi dan Panas Bumi yang berwawasan dalam bidangnya.

Adapun jumlah keseluruhan sumber daya manusia pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember Tahun 2018 adalah berjumlah 105 orang dengan perincian Pejabat Struktural 15 orang, Staf 59 orang, THL 31 orang. Dan jumlah PNS dilingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 sebanyak 74 orang.

#### 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dalam penyusunan LPPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral diperlukan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.51**  
Data Pengelolaan Keuangan OPD Tahun Anggaran 2018 (Per Kegiatan)

NO	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	APBD 2018			
		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa	Persen (%)
	<b>URUSAN PILIHAN ESDM</b>				
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1,321,110,120.00</b>	<b>1,219,925,459.00</b>	<b>101,184,661.00</b>	<b>92.34</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	40,000,000.00	34,075,350.00	5,924,650.00	85.19
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	284,188,800.00	284,176,800.00	12,000.00	100
3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	43,000,000.00	23,000,000.00	20,000,000.00	53.49
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	60,000,000.00	59,447,000.00	553,000.00	99.08
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69,085,000.00	68,340,000.00	745,000.00	98.92
6	Penyediaan bahan logistik kantor	5,456,640.00	5,374,000.00	82,640.00	98.49
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	57,500,000.00	42,474,750.00	15,025,250.00	73.87
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	316,000,000.00	302,680,399.00	13,319,601.00	90.36
9	Penyediaan Jasa administrasi Teknis Perkantoran	380,719,680.00	344,002,160.00	36,717,520.00	90.36
10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	65,160,000.00	56,355,000.00	8,805,000.00	86.49
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>52,482,916.00</b>	<b>47,517,084.00</b>	<b>52.48</b>
1	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	100,000,000.00	52,482,916.00	47,517,084.00	52.48
III	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>3,544,930,300.00</b>	<b>3,504,394,200.00</b>	<b>40,536,100.00</b>	<b>98.86</b>
1	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	50,000,000.00	49,999,100.00	900.00	100
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev	100,000,000.00	72,170,000.00	27,830,000.00	72.17
3	Penyusunan Buku Profile SKPD	30,000,000.00	29,947,800.00	52,200.00	99.83

NO	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	APBD 2018			
		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa	Persen (%)
4	Inventarisasi Aset Perangkat Daerah	68,415,800.00	55,762,800.00	12,653,000.00	81.51
5	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga	3,296,514,500.00	3,296,514,500.00	0	100
IV	<b>Program Pemanfaatan Sumber Air Bawah Tanah</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
1	Identifikasi Potensi Air Tanah	50,000,000.00	50,000,000.00	0	100
V	<b>Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>75,834,700.00</b>	<b>4,165,300.00</b>	<b>94.79</b>
1	Penyusunan Kajian Pengembangan Energi Alternatif	80,000,000.00	75,834,700.00	4,165,300.00	94.79
VI	<b>Program Pembinaan dan pengembangan Panas Bumi</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>97,055,840.00</b>	<b>2,944,160.00</b>	<b>97.06</b>
1	Survey dan Identifikasi Panas Bumi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan/Kajian Pengembangan Energi Baru Terbarukan Panas Bumi	100,000,000.00	97,055,840.00	2,944,160.00	97.06
VI	<b>Program Pemeliharaan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan</b>	<b>9,244,785,962.00</b>	<b>9,123,768,878.00</b>	<b>121,017,084.00</b>	<b>98.69</b>
1	Pemeliharaan PJU	500,000,000.00	444,884,000.00	55,116,000.00	88.98
2	Pengadaan Material LPJU	334,000,000.00	286,210,600.00	47,789,400.00	85.69
3	Pembayaran Rekening LPJU	8,410,785,962.00	8,392,674,278.00	18,111,684.00	99.78
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>14,440,826,382.00</b>	<b>14,123,461,993.00</b>	<b>317,364,389.00</b>	<b>97.80</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Tahun Anggaran 2018 berupa capaian keuangan sudah mencapai 97,80 %. Berdasarkan standar penilaian kinerja terhadap realisasi anggaran dari kegiatan diatas dapat dinilai dengan penilaian sebagai berikut :

1. Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai 98% - 100% dan dikategorikan berhasil/tercapai namun ada beberapa yang perlu ditingkatkan. Kegiatan yang telah direncanakan pada umumnya dapat merealisasikan anggaran dengan baik.
2. Belum semua Program dan Kegiatan dapat dilaksanakan diantaranya :
  - a) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan kegiatan yang belum dapat direalisasikan adalah Verifikasi Permohonan Listrik Murah/Gratis PLN.
  - b) Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan kegiatan yang belum dapat direalisasikan adalah Pembangunan PLTS Komunal, Survey dan Identifikasi EBT.
  - c) Program Pembinaan dan pengembangan Panas Bumi kegiatan yang belum dapat direalisasikan adalah Sosialisasi Pemanfaatan Panas Bumi.

- d) Program Pemeliharaan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan kegiatan yang belum dapat direalisasikan adalah Penyusunan Dokumen Perencanaan LPJU.
  - e) Program Pemanfaatan Sumber Air Bawah Tanah yang belum dapat direalisasikan adalah Pembangunan Sumur Bor.
3. Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang baru terbentuk untuk program dan kegiatan yang ada di RKA atau DPA agar supaya anggarannya tidak di rasionalisasi dan dimasukkan di anggaran Perubahan karena biar kegiatan bisa berjalan tepat waktu sehingga akan di dapatkan data yang valid.

Solusi yang dapat diberikan untuk menyelesaikan permasalahan yang belum tercapai realisasi anggaran, antara lain :

1. Melakukan dan mengusulkan kembali di Tahun berikutnya.
2. Usulan yang diarahkan baik dimasukkan kedalam anggaran APBD atau bisa pula diajukan melalui anggaran Benkeu, DAK, APBD Propinsi maupun APBN.
3. Segera melakukan perbaikan, penataan terhadap dokumen perencanaan akibat adanya perubahan nomenklatur OPD.

#### **5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Penyesuaian evaluasi dari Renja dan Renstra disesuaikan dengan data RKA, dimana di RKA dan DPA ada 7 Program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan, Program Pembinaan dan Pengembangan Panas Bumi dan Program Pemeliharaan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan, dan Program Pemanfaatan Sumber Air Bawah Tanah sedangkan untuk program yang ada di renja ada 12 program jadi ada selisih 5 program yaitu : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Penyediaan Data & Informasi BBM Tertentu & LPG, Program Pengembangan Data/Informasi Pertambangan dan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, tetapi kalau dilihat dari RKPD untuk program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tidak ada selisih karena RKPD jumlahnya 7 Program, oleh karena itu untuk kesesuaian perencanaan pembangunan Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menggunakan program yang ada di RKPD

#### **6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)**

Secara umum sarana dan prasana yang dimiliki oleh OPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara, cukup memadai dalam seluruh kegiatan operasional selama ini. Namun dipandang perlu untuk menambah sarana dan prasarana pendukung lainnya untuk memperbaiki tingkat pelayanan ke masyarakat dan akuntabilitas publik.

Sarana dan prasarana yang dikelola Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan buku induk inventarisasi Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fasilitas penunjang diantaranya Gedung terdiri dari Gudang, Mushola, dan Ruang Rapat. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam keadaan baik.

## 7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi kedepan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain:

- a) Potensi energi dan sumber daya mineral yang cukup tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.
- b) Belum tersedianya data dan informasi mengenai potensi pemanfaatan panas bumi, air tanah, serta lingkungan.
- c) Adanya potensi panas bumi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal.
- d) Potensi air tanah yang ada belum dimanfaatkan secara optimal untuk penyediaan air bersih pada daerah sulit mendapatkan air bersih.
- e) Adanya permintaan masyarakat yang tinggal di daerah sulit air bersih untuk dibangun sumur bor, tetapi belum semuanya dapat dipenuhi.
- f) Masih rendahnya rasio elektrifikasi dan atau persentase rumah tangga yang mendapatkan aliran listrik PLN.
- g) Potensi energi baru terbarukan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber energi listrik.
- h) Belum tersedianya data dan informasi mengenai prognosa, lifting migas, serta data BBM tertentu, LPG bersubsidi di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- i) Belum optimalnya pengelolaan LPJU dan banyaknya daerah-daerah yang belum menikmati lampu penerangan jalan.
- j) Belum adanya Kajian Teknis /Dokumen Perencanaan kelayakan pemanfaatan potensi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi di Kab. Kutai Kartanegara.
- k) Belum semua daerah teridentifikasi dan berpotensi Pengambilan Air bawah tanah (Sumur Bor).
- l) Belum adanya Kajian Teknis /Dokumen Perencanaan kelayakan pemanfaatan potensi penggunaan Energi Baru Terbarukan.
- m) Besarnya biaya pembangunan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan.
- n) Tidak adanya kewenangan Kabupaten/Kota urusan Ketenagalistrikan

Dari permasalahan tersebut di atas, dapat kami sampaikan solusi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kapasitas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik.
- 2) Terwujudnya Produktivitas dalam rangka menggali potensi pemanfaatan panas bumi secara optimal dengan berwawasan lingkungan.
- 3) Meningkatkan penyediaan data dan informasi tentang pendistribusian Harga Eceran Tertinggi BBM tertentu & LPG, serta data Lifting Migas
- 4) Meningkatkan penyediaan air bersih dari air tanah bagi daerah sulit air.
- 5) Meningkatkan penyediaan data dan informasi Pertambangan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
- 6) Meningkatkan Rumah Tangga yang menggunakan Energi baru dan terbarukan
- 7) Membuat study / dokumen kajian tentang potensi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi di Kabupaten Kutai Kartanegara
- 8) Mendorong Pemerintah Pusat segera menyusun PP Pemanfaatan Langsung Panas Bumi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
- 9) Melakukan survey dan mengidentifikasi Potensi Pemanfaatan Air Bawah Tanah bagi daerah yang sulit Air.
- 10) Membuat study / dokumen perencanaan tentang potensi Energi Baru Terbarukan di Kabupaten Kutai Kartanegara
- 11) Mengkoordinasikan dan mengusulkan ke Pemerintahan Propinsi, Pusat dan atau pihak-pihak lain terkait Pembangunan dan Pengembangan EBT
- 12) Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Daerah yang belum terjangkau Listrik



PLN

## 8. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Isu–isu strategis menjadi dasar penetapan kebijakan strategis pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral adalah sebagai berikut :

1. Isu Strategis Bidang Energi
  - a. Bahwa adanya Potensi Energi Baru terbarukan di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup besar namun pemanfaatannya belum optimal dapat dilihat dari :
  - b. Masih rendahnya rasio elektrifikasi dan atau persentase rumah tangga yang mendapatkan aliran listrik PLN dimana Rumah Tangga yang terlistriki baru sebesar 73,75 % dapat dilihat pada tabel 2.11

**Tabel 3.51**

Potensi Energi Baru Terbarukan di Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Kecamatan	Sumber Potensi Energi Baru Terbarukan	Lokasi
1	Tabang	Matahari, Air (4 Titik), Angin Bio Ethanol	Umaq Bekuay, Sido Mulyo, Muara Ritan dan Buluq Sen
2	Kembang Janggut	Matahari, Bio Gas (11 Titik), Bio Ethanol	Genting Tanah, Loa Sakoh Hambau, Kb Janggut, Pulau Pinang, Kelekat, Long Beleh Haloq, Long Beleh Modang, Bukit Layang, Muai, Perdana, Kedang Murung, Liang Ulu, Sebelimbingan
3	Kenohan	Matahari	Kenohan
4	Muara Wis	Matahari, Air, Angin (3 Titik), Bio Gas (7 Titik)	Lebak Cilong dan Muara Wis, Lebak Cilong, Lebak Mantan, Muara Wis, Sebemban, Melintang, Enggelam, Muara Enggelam
5	Kota Bangun	Matahari, Air, Angin (4 Titik), Bio Gas (11 Titik)	Kt Bangun III, Kt Bangun 1,2,3 dan Sumber Sari, Kota Bangun 1, 2, 3 Wono sari, Kedang Ipil, Benua Baru, Sedulang, Sukabumi, Sarinadi, Sumber Sari, Kt Bangun Ulu, Loleng, Liang, Kt Bangun Ilir, Pela, Muhuran
6	Muara Muntai	Matahari, Air (1 Titik), Angin (2 Titik), Bio Gas (4 Titik) Bio Ethanol (1 Lokasi)	Prian, Muara Muntai Ulu, Muara Leka, Kayu Batu, Jantur Selatan
7	Muara Kaman	Matahari	
8	Loa Kulu	Matahari	
9	Sebulu	Matahari	
10	Marang Kayu	Matahari, Air (2 Titik), Angin (1 Titik), Bio Gas (2 Titik)	Santan Ulu, Semangko, Kersik, Sambera Baru dan Semangko
11	Tenggarong Sbr	Matahari	
12	Muara Badak	Matahari	
13	Anggana	Matahari	
14	Tenggarong	Matahari	



No.	Kecamatan	Sumber Potensi Energi	Lokasi
15	Sanga Sanga	Matahari, Air (3 Titik)	Sanga-Sanga Dalam dan Sanga2 Muara
16	Muara Jawa	Matahari, Bio Gas	Muara Jawa Tengah
17	Loa Janan	Matahari	

#### B.4. URUSAN PARIWISATA DINAS PARIWISATA

##### 1. Program dan Kegiatan

Pencapaian Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.52**  
Pencapaian Program dan Kegiatan

URAIAN		ANGGARAN	REALISASI	%
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>13.228.645.703,31</b>	<b>11.929.154.544,00</b>	<b>90,18</b>
Belanja Pegawai		13.228.645.703,31	11.929.154.544,00	90,18
<b>BELANJA LANGSUNG</b>		<b>10.571.195.571,00</b>	<b>10.125.133.871,00</b>	<b>95,78</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>3.002.506.500,00</b>	<b>2.866.329.705,00</b>	<b>95,46</b>
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.044.200.000,00	929.573.248,00	89,02
2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	25.000.000,00	17.875.000,00	71,50
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	17.400.000,00	11.248.000,00	64,64
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	215.289.600,00	215.289.600,00	100,00
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
6	Penyediaan alat tulis kantor	73.900.000,00	73.860.000,00	99,95
7	Penyediaan makanan dan minuman	147.700.000,00	147.413.200,00	99,81
8	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	943.198.080,00	936.567.840,00	99,30
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	344.618.800,00	343.944.500,00	99,80
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke dalam daerah dan ke luar daerah	131.200.020,00	130.558.317,00	99,51
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>192.000.000,00</b>	<b>191.867.580,00</b>	<b>99,93</b>
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	42.000.000,00	41.878.800,00	99,71
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	150.000.000,00	149.988.780,00	99,99
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>485.994.000,00</b>	<b>485.993.400,00</b>	<b>100,00</b>
1	Inventarisasi Barng Milik Daerah	50.000.000,00	49.999.400,00	100,00
2	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada pihak ketiga	435.994.000,00	435.994.000,00	100,00
<b>Program pengembangan pemasaran pariwisata</b>		<b>4.453.179.450,00</b>	<b>4.298.645.411,00</b>	<b>96,53</b>
1	Pelaksanaan Promosi Pariwisata	205.000.000,00	198.988.941,00	97,07
2	Fasilitasi Wisata Mice	0,00	0,00	0,00
3	Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	54.050.000,00	43.326.800,00	80,16
4	Pengembangan statistik kepariwisataan	20.950.000,00	20.450.000,00	97,61
5	Analisis pasar pariwisata	25.000.000,00	24.994.696,00	99,98
6	Fasilitasi Event Budaya	3.207.879.450,00	3.207.869.674,00	100,00
7	Pembinaan ekonomi kreatif berbasis media,	25.000.000,00	24.998.800,00	100,00

URAIAN		ANGGARAN	REALISASI	%
	desain dan iptek			
8	Fasilitasi event pentas seni dan komunitas	915.300.000,00	778.016.500,00	85,00
<b>Program pengembangan destinasi pariwisata</b>		<b>2.208.110.621,00</b>	<b>2.126.967.175,00</b>	<b>96,33</b>
1	Pelatihan pelaku usaha jasa pariwisata	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
2	Pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha sarana pariwisata	40.000.000,00	39.650.000,00	99,13
3	Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja usaha sarana pariwisata	0,00	0,00	0,00
4	Fasilitasi forum asosiasi kepariwisataan daerah	25.000.000,00	21.758.200,00	87,03
5	Pembinaan desa wisata	25.000.000,00	22.696.900,00	90,79
6	Peningkatan sarana dan prasarana di pulau kumala	286.700.000,00	284.788.300,00	99,33
7	Tim terpadu pengembangan kepariwisataan daerah	0,00	0,00	0,00
8	Pengelolaan obyek wisata	225.000.000,00	200.013.200,00	88,89
9	Pengelolaan pulau kumala	1.213.635.575,00	1.167.067.975,00	96,16
10	Penilaian aset pulau kumala	150.000.000,00	149.027.300,00	99,35
11	Penyusunan DED Pembangunan Fasilitas Penunjang dan Wahana Wisata di Pulau Kumala	217.775.046,00	216.965.300,00	99,63
<b>Program pengembangan Kemitraan</b>		<b>229.405.000,00</b>	<b>155.330.600,00</b>	<b>67,71</b>
1	Sosialisasi, Pembentukan dan pembinaan POKDARWIS	229.405.000,00	155.330.600,00	67,71
<b>JUMLAH</b>		<b>23.799.841.274,31</b>	<b>22.054.288.415,00</b>	<b>92,67</b>

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu urusan Pilihan (pariwisata) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan.

Dalam hal pelaksanaan urusan pilihan di bidang pariwisata, dengan Indikator kinerja utama Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan serta meningkatkan angka kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD sebagaimana data pada Tabel berikut.

**Tabel 3.53**  
Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Jumlah Kontribusi PAD  
dari Sektor Pariwisata Tahun 2018

NO	Indikator Kinerja Utama	2018		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.795.245 Orang	1.720.217 Orang	95.82 %
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD *)	Rp. 3.703.321.050,-	Rp. 2.977.117.800,-	80.39 %

\*) Retribusi daerah sektor Pariwisata yang khusus dikelola oleh Dinas Pariwisata

### 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara terletak di jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Bupati Gedung B Lantai 3 Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dengan total jumlah Pegawai 148 orang terdiri dari 106 Pria dan 42 Wanita, dengan jumlah pejabat structural berjumlah 21 Orang.

### 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 sebesar Rp. 23.799.841.274,- pada saat Anggaran Perubahan dan dengan Realisasi sebesar Rp. 22.054.288.415,- dengan persentase capaian keuangan sebesar 92,67%.

### 5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Secara umum sarana dan prasarana yang digunakan di lingkungan Dinas Pariwisata dapat mendukung pelaksanaan kegiatan yang dijalankan baik yang berada di lingkungan kantor maupun yang berada di unit-unit operasional daya tarik wisata yang dikelola oleh Dinas. Namun demikian, terdapat beberapa kondisi yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut agar penyelenggaraan tugas-tugas di bidang pariwisata dapat berjalan dengan baik dan lancar, yakni sebagai berikut:

- a) Sarana dan prasarana kantor di Gedung B lantai III, memerlukan perbaikan di beberapa titik, dengan uraian sebagai berikut:
  - 1) Terdapat genangan air saat hujan di sekitar toilet yang dapat mengakibatkan kerusakan benda-benda termasuk dokumen yang berada di ruang sekitarnya.
  - 2) Pendingin ruangan di beberapa ruang tidak berfungsi lagi sehingga untuk kenyamanan dalam bekerja, penyediaan AC split dan kipas angin menjadi alternatif yang dipilih, dengan konsekuensi akan menambah beban pemakaian listrik di lingkungan kantor Gedung B.
  - 3) Di beberapa titik terdapat atap plafon yang bocor yang menyebabkan kerusakan fisik pada plafon dan pemandangan yang kurang indah karena adanya wadah yang diletakkan di lantai untuk menampung tetesan air dari plafon yang bocor serta berpotensi mengganggu kenyamanan karyawan saat bekerja.
  - 4) Beberapa unit komputer mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan sehingga mengurangi fasilitas bekerja bagi karyawan
- b) Sarana dan prasarana umum di lokasi daya tarik wisata dapat digambarkan sebagai berikut:
  - 1) Fasilitas toilet masih kurang, dan kondisi toilet yang ada memerlukan perbaikan
  - 2) Beberapa bangunan pertemuan/gazebo memerlukan rehabilitasi agar dapat digunakan secara layak oleh pengunjung
  - 3) Fasilitas bergerak pengangkut sampah di dalam wilayah daya tarik wisata

- belum tersedia
- 4) Akses infrastruktur ke lokasi daya tarik wisata memerlukan pelebaran atau perbaikan jalan untuk memudahkan pengunjung
  - 5) Kegiatan pemeliharaan kebersihan sangat terbatas dengan ketersediaan dana, sementara sebagai obyek kunjungan wisata, kondisi yang bersih dan rapih menjadi prasyarat untuk menyambut dan memberikan kenyamanan pengunjung
  - 6) Perbaikan beberapa wahana di lokasi daya tarik wisata tidak dapat dilakukan secara optimal karena keterbatasan dana
  - 7) Beberapa tahun terakhir belum ada penambahan atau pengembangan wahana di lokasi daya tarik wisata, sehingga lonjakan pengunjung belum tinggi
  - 8) Fasilitas free wifi belum tersedia di lokasi daya tarik wisata, sementara saat ini fasilitas ini sangat digandrungi oleh kaum muda yang merupakan kelompok yang paling potensial untuk melakukan kunjungan wisata
  - 9) Fasilitas unit informasi pariwisata berikut brosur-brosur tentang daya tarik wisata di Kutai Kartanegara belum tersedia di seluruh daya tarik wisata, baik yang dikelola oleh Dinas Pariwisata maupun pihak ketiga karena terbatasnya dana

## 6. Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraan tugas di bidang Pariwisata terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi meski beberapa diantaranya dapat diatasi dengan baik. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Fasilitasi event seni budaya oleh pihak ketiga masih terbatas. Hal ini disebabkan pihak sponsor event lebih menyukai kegiatan yang bercorak kekinian atau bersifat kontemporer karena dipandang lebih memiliki nilai jual bagi pengunjung

Terhadap permasalahan ini, Dinas Pariwisata bekerjasama dengan Event Organizer (EO) dalam pembiayaan penyelenggaraan festival, dimana untuk win win solution, partisipasi dana yang nilainya kecil menjadi dana awal bagi EO untuk menggaet sponsor lain dan dengan pola sewa misalnya dengan vendor (peserta festival) baik kuliner. Dengan penyelenggaraan festival tersebut, maka pelaku seni memiliki panggung untuk melakukan apresiasi seni.

- b) Sadar wisata masyarakat masih kurang, sehingga makin bertambah beban pemeliharaan kebersihan lingkungan dari petugas daya tarik wisata yang dikelola Dinas.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan menyediakan tempat sampah di beberapa lokasi serta tulisan tentang larangan membuang sampah bukan pada tempatnya.

- c) Target capaian retribusi daerah dari daya tarik wisata (DTW) yang dikelola Dinas pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.977.117.800,- atau 80.39 % dapat tercapai, disebabkan karena belum adanya fasilitas/atraksi wisata yang baru di dalam Daya Tarik Wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata untuk menarik minat pengunjung lebih banyak serta yang berdaya saing di DTW – DTW lainnya.

Upaya yang dilakukan terhadap permasalahan ini adalah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait tentang penetapan Peraturan Daerah yang menaungi kenaikan tarif retribusi tersebut, serta mempersiapkan kegiatan dengan komunitas untuk meramaikan daya tarik wisata yang dikelola dinas di luar Pulau Kumala, serta meningkatkan promosinya melalui media sosial.

## 7. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dalam upaya meningkatkan daya tarik wisata sekaligus mengenalkan budaya daerah kepada masyarakat luas, pada tahun 2018 Dinas Pariwisata telah berinisiatif dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut.

Melaksanakan kegiatan fasilitasi Event Pentas Seni dan Komunitas sebagai berikut :

- 1) Kalender Event Pariwisata Tahun 2018, ada beberapa kegiatan/Event yang dibantu pelaksanaannya berupa Pemberian dana Transportasi dan Akomodasi kepada Kelompok Seni/Paguyuban yang mengisi acara Hiburan di Objek Wisata dan acara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 2) Festival Kutai Benua Tuha ( Erau Sabintulung) di Stadion Gunung Club Desa Sabintulung Kec. Muara Kaman, tanggal 21 – 28 April 2018.
- 3) Festival Kota Raja VII (FKR) dan Tenggarong dalam rangka hari jadi ke-236 Tahun Kota Tenggarong, tanggal 29 September 2018.
- 4) Acara Penabalan Putra Mahkota menjadi Sultan XXI Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Tenggarong, tanggal 15 – 16 Desember 2018

## B.5. URUSAN PERINDUSTRIAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1. Program dan Kegiatan

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase (%)
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				
	Penyusunan Rencana Strategis	jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00
	Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Aset yang telah diinventarisasi	250 Unit	0,00	0,00
	Fasilitasi penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga	Jumlah penyelesaian kewajiban pihak ketiga	18 rek kegiatan	18 rek kegiatan	100,00
<b>2</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah lembar yang jasa surat menyurat kantor telah disediakan	750 lembar	1.350 lembar	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang telah tersedia	54 jenis	54 jenis	100
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makanan dan minuman	porosi	2500 porsi	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya perlengkapan gedung kantor	20 rekening	20 rekening	100
	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Jumlah paket rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kali	152 kali	100

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentasi (%)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional yang telah selesai diurus	57 unit	31 unit	54,39
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah orang jasa administrasi keuangan	25 orang	25 orang	100
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah jasa administrasi perkantoran	183 orang	183 orang	100
	Sertifikasi sertifikat tanah	Jumlah tanah yang akan diberi sertifikat	1 sertifikat	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah gedung yang jasa kebersihan kantor telah disediakan	2 gedung	2 gedung	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	86 jenis	86 jenis	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis/lembar/buku barang cetak dan penggandaan	88349 blok	88349 blok	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	18 jenis	18 jenis	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang telah tersedia	2160 eksemplar	2160 eksemplar	100
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang telah dapat pemeliharaan rutin/ berkala	29 kendaraan	28 kendaraan	96,55
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang telah dapat pemeliharaan rutin/ berkala	4 jenis	4 jenis	100
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	28 unit	28 unit	100
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan gedung kantor	36 unit	36 unit	100
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	2 unit	2 unit	100
	Rehabilitasi sedang/berat rumah Gedung kantor	Jumlah luasan yang direhab	2 unit	2 unit	100
<b>4</b>	<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>				
	Pengawasan alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	Jumlah alat UTTP	1000 alaUTTP	0,00	0,00
	Tera ulang alat UTTP	Jumlah alat UTTP yang di tera	1000 alat UTTP	1000 alat UTTP	100
	Pengadaan sarana meterologi legal (DAK)	Jumlah sarana meterologi legal	113 unit	113 unit	100
	Pendampingan kegiatan pengadaan sarana meterologi legal	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</b>				
	Peningkatan ekspor dan peningkatan investasi daerah	Jumlah event	2 rakor	2 rakor	100

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentasi (%)
	(PEPIDA)				
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>				
	Pembangunan pasar desa	Jumlah pasar desa	2 unit	2 unit	100
	Review DED pasar Mangkurawang	Jumlah dokumen	1 dokumen	0,00	100,00
	Pembinaan pedagang kreatif lapangan	Jumlah lokasi pembinaan	4 Kec	2 Kec	50,00
	Operasi pasar murah barang kebutuhan pokok	Jumlah titik pelaksanaan	12 Desa	8 Desa	66,67
	Pengadaan aplikasi Smart Info Harga	Jumlah aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	100,00
	Pengembangan pasar Desa Kresik (DAK)	Jumlah pasar desa	1 unit	1 unit	100,00
	Pengembangan pasar Desa Badak Baru (DAK)	Jumlah pasar desa	1 unit	1 unit	100,00
	Pendampingan kegiatan pengembangan pasar Desa Badak Baru	Jumlah pendampingan	1 lokasi	1 lokasi	100,00
	Pendampingan kegiatan pengembangan pasar Desa Kresik	Jumlah pendampingan	1 lokasi	1 lokasi	100,00
	Perencanaan pembangunan pasar Desa Batuah	Jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00
	Perencanaan pembangunan pasar Desa Sebulu Ulu	Jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00
	Perencanaan pembangunan pasar Desa Batu-batu	Jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00
	Perencanaan pembangunan pasar Kecamatan Muara Kaman	Jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00
	Perencanaan pembangunan pasar Desa Kota Bangun	Jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00
<b>7</b>	<b>Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan</b>				
	Optimalisasi Pengawasan UP Pasar	Jumlah UPP yang diawasi	4 Kecamatan	4 Kecamatan	100,00
<b>8</b>	<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>				
	Identifikasi kemitraan sentra IKM/KUB dengan ODTW	Jumlah kemitraan sentra IKM/KUB dengan ODTW	6 Kecamatan	6 Kecamatan	100,00
	Pengadaan alat penggiling buah nipah dan penggunaannya	Jumlah alat	1 paket	0,00	0,00
	Penerbitan sertifikasi halal dan sertifikasi balai POM untuk industri rumah tangga	Jumlah sertifikasi	5 sertifikasi	4 sertifikasi	80,00
	Partisipasi promosi produk industri dalam dan luar negeri	Jumlah event	4 event	4 event	100,00
	Bimtek pengolahan jagung	Jumlah orang	20 orang	20 orang	100,00
	Pengadaan peralatan menjahit	Jumlah alat	5 unit	0,00	0,00
	Pengawasan standarisasi dan penggunaan bahan tambahan IKM	Jumlah IKM	100 IKM	96 IKM	96,00
	Pelatihan pembuatan kue	Jumlah orang	10 orang	0,00	0,00
	Pelatihan teknis pengemasan dan kewirausahaan IKM	Jumlah orang	15 orang	15 orang	100,00

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase (%)
	Monev bantuan peralatan produksi IKM	Jumlah dokumen	1 dokumen	0,00	0,00
	Pelatihan membuat bagi kader PKK	Jumlah orang	10 orang	10 orang	100,00
	Pendampingan Dekranasda	Jumlah pendampingan	1 kali	1 kali	00,00
	Fasilitasi Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT)	Jumlah PIRT dan sertifikasi halal	20 PIRT dan sertifikasi halal	4 PIRT dan sertifikasi halal	20,00
	Pembangunan UKM center	Jumlah UKM center	1 unit	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b>				
	Pengadaan mesin pres dan kemasan untuk IKM	Jumlah alat	6 unit	0,00	0,00
	Pelatihan penjahitan dan pengadaan mesin jahit	Jumlah orang	10 orang	0,00	0,00
	Mesin penggiling tepung singkong	Jumlah alat	1 unit	0,00	0,00
	Pengadaan alat pengemasan plastik	Jumlah alat	1 unit	0,00	0,00
	Konvensi gugus kendali mutu tingkat Kabupaten dan Provinsi	Jumlah gugus	1 gugus	0,00	0,00
	Bantuan KUB kembar	Jumlah alat	1 unit	0,00	0,00
	Kelompok usaha pembuat Kue	Jumlah alat	1 unit	0,000	0,00

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

**Tabel 3.55**

Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Indikator sasaran	Target Tahun 2017	Capaian Kinerja 2018	
			Target	Realisasi
1.	Pertumbuhan ekspor bersih non migas dan batu bara	12 %	2 %	2 %
2.	Prosentasi kontribusi PAD sektor perindustrian	5,94 %	5,94 %	4,5 %

Pembahasan pertumbuhan ekspor bersih non migas dan batu bara untuk target 2019 sebesar 12% dan tahun 2018 sebesar 2%, Dikarenakan :

- Data yang diminta dari OPD terkait:
  - ✓ Dinas Kehutanan terkait data plywood , wood in chip
  - ✓ Dinas ESDM terkait data batu bara, minyak
  - ✓ Data di proses dalam bentuk global
- Adanya peraturan Menteri Perdagangan No. 29 Tahun 2017, mewajibkan menyampaikan pelaporan secara online melalui SIPT (Sistem Informasi Perizinan Terpadu)/manifest domestik antar pulau
- Data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UMKM Provinsi Kaltim ada diberikan, dan sepertinya global dalam artian datanya untuk 10 kabupaten/kota (tidak dirinci kabupaten/kota)
- Kabupaten Kutai Kartanegara tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan SKA (Surat Keterangan Asal) barang, karena Kab. Kukar tidak mempunyai pelabuhan untuk kegiatan ekspor dan impor. Sehingga Dinas



Perindustrian dan Perdagangan sulit untuk menyajikan data

Pembahasan Prosentasi kontribusi PAD sektor perindustrian pada tahun 2018 s/d 2021 tidak ada penambahan, karena:

1. Berdasarkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak Bappeda dan Dispenda bahwa pajak untuk olahan industri rumah tangga masuknya tergabung pada pajak konsumsi (restoran, UKM, kuliner, olahan pangan) sehingga tidak bias dipilah satu persatu.
2. Untuk penjelasan tersebut (1) telah sesuai dengan RPJMD revisi tahun 2018 sampai dengan 2021
3. informasi tentang pajak industri yang terpisah hanya pada izin pendirian pabrikasi industri

### 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Pegawai merupakan unsur pelaksana program dan kegiatan yang dilaksanakan satuan SKPD. Kekuatan pegawai akan sangat berpengaruh terhadap kinerja dan pencapaian tujuan organisasi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan akhir Desember tahun 2018 memiliki pegawai sebanyak 131 orang.

### 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentasi (%)
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>17.850.000,00</b>	<b>9,92</b>
	Penyusunan Rencana Strategis	150.000.000,00	149.477.600,00	99,65
	Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	39.242.750,00	27.092.000,00	69,04
	Fasilitasi penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga	624.806.200,00	624.806.200,00	100,00
<b>2</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>3.513.003.944,06</b>	<b>3.147.750.697,00</b>	<b>89,60</b>
	Penyediaan Jasa surat menyurat	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130.495.755,00	129.038.100,00	98,88
	Penyediaan Makanan dan Minuman	100.000.000,00	96.044.500,00	96,04
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000,00	434.544.791,00	72,42
	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	425.631.300,00	419.151.723,00	98,48
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	24.000.000,00	21.786.000,00	90,78
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	264.156.000,00	264.156.000,00	100,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	2.872.485.120,00	2.866.202.880,00	99,78
	Sertifikasi sertifikat tanah	40.000.000,00	18.179.700,00	45,45
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100.000.000,00	99.999.900,00	100,00

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentasi (%)
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	54.002.125,00	47.494.960,00	87,95
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	170.000.000,00	167.674.600,00	98,63
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	17.300.000,00	14.073.600,00	81,35
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	165.000.000,00	164.938.000,00	99,96
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>908.835.361,74</b>	<b>181.662.625,00</b>	<b>19,99</b>
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	275.765.600,00	208.503.310,00	75,61
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	94.146.125,00	90.169.525,00	95,78
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	87.811.900,00	87.025.600,00	99,10
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	256.007.500,00	246.413.100,00	96,25
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	256.007.500,00	246.413.100,00	96,25
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	190.000.000,00	179.617.900,00	94,54
<b>4</b>	<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>	<b>345.000.000,00</b>	<b>211.203.000,00</b>	<b>61,22</b>
	Tera/Tera Ulang Alat UTTP	100.000.000,00	76.918.600,00	76,92
	Pengawasan alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	100.000.000,00	0,00	0,00
	Pengadaan sarana meterologi legal (DAK)	1.500.000.000,00	1.120.053.027,50	74,67
	Pendampingan kegiatan pengadaan sarana meterologi legal	88.625.950,00	78.825.328,00	88,94
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>44.130.877,00</b>	<b>58,84</b>
	Peningkatan ekspor dan peningkatan investasi daerah (PEPIDA)	50.000.000,00	35.361.596,00	70,72
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>	<b>3.726.538.500,00</b>	<b>3.167.668.900,00</b>	<b>85,00</b>
	Pembangunan pasar Desa	280.000.000,00	242.593.100,00	86,64
	Review DED Pasar Mangkurawang	00,00	00,00	00,00
	Pembinaan pedagang kreatif lapangan	75.000.000,00	40.016.000,00	53,35
	Operasi pasar murah barang kebutuhan pokok	250.000.000,00	149.202.500,00	59,68
	Pengadaan aplikasi smart info harga	200.000.000,00	131.432.800,00	65,72
	Pengembangan pasar Desa Kresik (DAK)	1.209.000.000,00	1.072.820.000,00	88,74
	Pengembangan pasar Desa Badak Baru (DAK)	1.209.000.000,00	1.012.250.200,00	83,73
	Pendampingan kegiatan Pengembangan pasar Desa Badak Baru	100.000.000,00	40.102.200,00	40,10
	Pendampingan kegiatan Pengembangan pasar Desa Kresik	100.000.000,00	76.309.650,00	76,31
	Perencanaan pembnagunan pasar Desa Batuah	84.353.059,00	65.689.400,00	77,87
	Perencanaan pembnagunan pasar Desa Sebulu Ulu	88.463.759,00	75.939.400,00	85,84
	Perencanaan pembnagunan pasar Desa	92.352.259,00	86.439.400,00	93,60

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentasi (%)
	Batu-Batu			
	Perencanaan pembangunan pasar Kecamatan Muara Kaman	92.352.259,00	81.189.400,00	87,91
	Perencanaan pembnagunan pasar Desa Kota Bangun	91.463.459,00	81.169.400,00	88,75
<b>7</b>	<b>Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan</b>	<b>202.069.400,00</b>	<b>63.705.000,00</b>	<b>31,53</b>
	Optimalisasi Pengawasan UP Pasar	250.000.000,00	200.915.300,00	80,37
<b>8</b>	<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>255.326.500,00</b>	<b>72,95</b>
	Identifikasi kemitraan sentra IKM/KUB dengan ODTW	75.000.000,00	68.174.600,00	90,90
	Pengadaan alat penggiling buah nipah dan penggunaannya	30.000.000,00	00,00	0,00
	Penerbitan sertifikasi halal dan sertifikasi balai POM untuk industri rumah tangga	22.707.700,00	18.655.600,00	82,16
	Partisipasi promosi produk industri dalam dan luar negeri	150.000.000,00	139.964.000,00	93,31
	Bimtek pengolahan jagung	175.000.000,00	89.237.750,00	50,99
	Pengadaan peralatan menjahit	10.000.000,00	0,00	0,00
	Pengawasan standarisasi dan penggunaan bahan tambahan IKM	75.000.000,00	72.815.000,00	97,09
	Pelatihan pembuatan kue	40.000.000,00	00,00	00,00
	Pelatihan tehknis pengemasan dan kewirausahaan IKM	70.000.000,00	66.072.400,00	94,39
	Monev bantuan peralatan produksi IKM	75.000.000,00	00,00	00,00
	Pelatihan membuat bagi kader PKK	39.561.907,00	39.159.900,00	98,98
	Pendampingan dekranasda	100.000.000,00	23.952.800,00	23,95
	Fasilitasi produksi industri rumah tangga (PIRT) dan halal	100.000.000,00	50.316.600,00	50,32
	Pembangunan UKM Center	541.548.600,00	00,00	00,00
<b>9</b>	<b>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>60.170.000,00</b>	<b>63,34</b>
	Pengadaan mesin pres dan kemasan untuk IKM	80.000.000,00	00,00	00,00
	Pelatihan penjahitan dan pengadaan mesin jahit	55.849.000,00	00,00	00,00
	Mesin penggiling tepung singkong	66.000.000,00	0,00	0,00
	Pengadaan alat pengemasan plastik	40.000.000,00	0,00	0,00
	Konvensi gugus kendali mutu tingkat Kabupaten dan Provinsi	50.000.000,00	00,00	00,00
	Bantuan KUB kembar	20.000.000,00	0,00	0,00
	Kelompok usaha pembuatan kue	30.000.000,00	0,00	0,00

#### 5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Sarana dan Prasarana merupakan bagian pendukung dalam kinerja SKPD untuk melaksanakan Kegiatan. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kondisi baik.

## 6. Permasalahan dan Solusi

### *Permasalahan dan Solusi di Bidang Industri*

Pembangunan Industri terutama industri kecil dan menengah dalam pembangunan struktur ekonomi negara-negara sedang berkembang sangat penting dan hal ini telah dibuktikan bahwa peranan industri kecil menengah mampu menjadi tiang penggerak perekonomian akibat badai krisis yang menimpa negeri ini. Barangkali yang perlu menjadi catatan dan perhatian semua pihak adalah daya tahan beberapa industri unggulan yang menjadi tiang penyangga ekonomi mengalami kemunduran akibat ketidak mapuan menghadapi persaingan yang semakin tinggi dalam pasar global. Oleh karenanya upaya pembinaan dan pengembangan terhadap industri terus dilakukan. Pemberdayaan industri di Kabupaten Kutai Kartanegara juga mengembang misi bagi pembinaan dan pengembangan industri dari tahun ke tahun telah mampu memberikan nilai tambah positif terhadap pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan melalui upaya-upaya peningkatan usaha industri, sehingga dampaknya tentu berujung pada efek pengganda yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan pengusaha/pengrajin khususnya dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara umumnya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dengan berbagai kegiatan yang di dukung oleh berbeagai program telah dioptimalkan, namun dengan adanya berbagai faktor pembatas maka dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri masih terdapat beberapa permasalahan, sehingga pembiaan dan pengembangan industri tersebut belum bisa mencapai sasaran yang optimal, antara lain disebabkan oleh :

#### ➤ Faktor Intern

1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai bagi aparat pembina
2. Terbatasnya tenaga ahli/instruktur yang memadai sehingga berdampak pada ketergantungan terhadap sumber daya manusia daerah lain yang menyebabkan pembengkakan biaya yang dikeluarkan
3. Tidak tersedianya tenaga pendamping atau konsultasi lapangan yang qualified serta kompeten yang mengerti kebutuhan industri kecil menengah serta menguasai masalah spesifik/bahan baku, teknologi tepat guna, proses produkdi peningkatan efesiensi dan produktivitas, penyiapan proposal kredit perbankan, penyiapan pengusaha industri kecil dan menengah untuk bersaing secara global
4. Terbatasnya tenaga desainer di bidang produksi dalam membuat design baru yang inovatif dan mampu membantu meningkatkan kemampuan pengusaha membuat design sendiri
5. Belum mampu sebagian besar industri kecil menggunakan teknologi maju, sehingga menyebabkan efesiensi industri kecil relatif rendah.

#### ➤ Faktor Ekstern

1. Infrastruktur terutama sarana transportasi darat untuk angkutan barang baik dari pasokan bahan baku maupun pemasaran hasil produksi masih terbatas, sehingga untuk pengembangan usaha masih sulit karna biaya produksi dan transportasi yang dikeluarkan secara ekonomis kurang efisien
2. Semakin selektifnya tuntutan konsumen terhadap mutu dan keamanan produk, sementara industri kecil dan menengah kurang memperhatikan aspek pengendalian mutu, sanitasi dan higienis perusahaan

3. Skill yang dimiliki oleh sumber daya manusia industri kecil masih rendah sehingga belum mampu bersaing
4. Dukungan permodalan dari perbankan yang menetapkan suku bunga umum antara 16 – 18 % serta berbagai persyaratan yang rumit, sehingga industri kecil menengah kurang minat untuk memanfaatkan jasa kredit perbankan.

➤ Upaya Yang Dilakukan (Solusi)

Dalam rangka pengembangan industri di Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (PIKM) di Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan solusi yang terkait berbagai kegiatan yang ditunjang dari dana APBD (Desentralisasi), antara lain :

1. Agar pembina dan pengembangan industri kecil menengah dapat berjalan secara optimal maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, terutama untuk kecamatan dan desa
2. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah perlu dibarengi dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia bagi aparat pembinaan terutama untuk tenaga instruktur/pembina di lapangan
3. Agar pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah dapat tersebar keseluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terutama daerah pedalaman, maka diperlukan upaya-upaya dari Pemerintah untuk membuka isolasi daerah dengan pembangunan infra struktur berupa jalan darat yang memadai yang dapat menghubungkan antar daerah kota dengan kecamatan dan desa, sehingga pemasukan bahan baku serta pemasaran hasil produksi industri kecil menengah dari pedesaan lebih efisien dengan harga yang bersaing.
4. Guna pengembangan usaha industri kecil menengah memerlukan permodalan dengan suku bunga rendah, oleh karena itu agar lembaga keuangan (baik Bank maupun Non Bank) memberikan kemudahan dalam penyaluran kredit dengan suku bunga rendah
5. Agar dalam pembinaan dan pengembangan industri. kecil menengah, lebih menitik beratkan pada pendekatan komoditi unggulan daerah yang berpeluang untuk ekspor sehingga mampu bersaing dipasar bebas secara kompetitif
6. Penyebaran informasi peluang usaha dan pemasaran produk industri menengah untuk lebih ditingkatkan baik secara peran serta media, pameran dan pembuatan leaflet/brosur.

Dalam hal ini upaya pembinaan dan pengembangan terhadap ibdstri telah dilakukan, khususnya pemberdayaan dan pembinaan industri di Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana berdasarkan kondisi nyata di lapangan dari tahun ke tahun telah mampu memberikan nilai tambah positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya diharapkan mampu melakukan pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui peningkatan usaha industri, sehingga dampaknya diharapkan dapat berujung pada efek pengganda yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan pengusaha/pengrajin pada khususnya dan masyarakat Kutai Kartanegara umumnya.

***Permasalahan dan Solusi di Bidang Perdagangan***

- Permasalahan
  1. Informasi harga yang terbatas
  2. Terjadi fluktuasi harga
  3. Jalur distribusi yang belum terintegrasi antara pusat dan daerah
  4. Belum ada peraturan mengenai lalu lintas barang antar pulau
  5. Belum ada UU yang mengatur peran pemerintah bila terjadi gejala harga/stok yang terbatas
  6. Perlindungan konsumen, masih banyak barang-barang yang beredar tidak sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, seperti SNI, kadaluarsa dan barang dalam keadaan tertutup (BDKT)
  7. Peralatan UTTP masih ada yang belum memenuhi ketentuan
  8. Saat ini belum memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
  
- Solusi
  1. Melakukan prognosa
  2. Mengadakan pasar murah
  3. Melakukan operasi pasar
  4. Melakukan pemantapan harga
  5. Melakukan pemantauan harga
  6. Melakukan misi dagang, pameran, sosialisasi "Cinta Produk Indonesia"
  7. Melakukan perlindungan konsumen dengan pengawasan BDKT dan UTTP.

## II. RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, INSPEKTORAT DAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA).

### 1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### 1. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pagu Rp. 4.078.799.145,00 Realisasi Rp. 3. 667.881.532,00 dan Persentase (89,93%)
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik dengan Pagu anggaran Rp. 1.353.751.516,00 dari Target renja 48 Bulan telah terlaksana selama 48 Bulan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 1.274.922.892,00 atau 94,18%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan Pagu Anggaran Rp. 23.760.000,00 dari Target renja 41 Unit telah terlaksana sebanyak 41 Unit dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 13.581.500,00 atau 57,16%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
  - c. Penyediaan Jasa Administrasi keuangan dengan Pagu Anggaran Rp. 500.000.000,00 dari Target renja 47 OB Telah dilaksanakan sebanyak 47 OB dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 468.203.700,00 atau 93,64%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
  - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan Pagu Anggaran Rp. 307.918.474,00 dari Target renja 12 Bulan telah terlaksana selama 12 Bulan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 298.019.958,00 atau 96,79%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
  - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan Pagu Anggaran Rp. 171.525.279,00 Target renja 1500 Unit/buah telah terlaksana sebanyak 1500 Unit/buah dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 168.772.650,00 atau 98,40%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
  - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan Anggaran Rp. 173.053.193,00 dari Target renja 49234 lembar telah terlaksana sebanyak 49234 lembar dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 85.732.800,00 atau 49,54%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
  - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan Anggaran Rp. 36.752.125,00 dari Target renja 12 Bulan telah terlaksana selama 12 Bulan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 36.066.125,00 atau 98,13%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
  - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan Anggaran Rp. 150.000.000,00 dari Target renja 3000 Eksemplar telah terlaksana sebanyak 3000 Eksemplar dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 105.000.000,00 atau 70,00 %. dengan realisasi fisik telah dil-aksanakan 100%.
  - i. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan Anggaran Rp. 300.000.000,- dari Target renja 11700 porsi telah terlaksana sebanyak 11700 Porsi Makanan dan Minuman dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 257.775.000,00 atau 85,93% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

- j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dengan Anggaran Rp. 823.038.558,00 dari Target renja 150 OK telah terlaksana sebanyak 150 OK dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 768.870.347,00 atau 93,42%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
  - k. Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran dengan Anggaran Rp. 239.000.000,00 dari Target renja 216 OB telah terlaksana sebanyak 216 OB dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 190.936.560,00 atau 79,89%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pagu Rp. 729.659.138,00 Realisasi Rp 647.181.555,00 dan Persentase (88,70%)
- a. Pengadaan peralatan gedung kantor dengan Anggaran Rp. 61.905.650,00 dari Target renja 3 Unit telah terlaksana sebanyak 2 Unit dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 14.595.600,00 atau 23,58%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 66,67%.
  - b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan Anggaran Rp. 261.405.175,00 dari Target renja 3 Jenis telah terlaksana sebanyak 3 Jenis anggaran yang terealisasi sebesar Rp 257.294.538,00 atau 98,43% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100,00%.
  - c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan Anggaran Rp. 134.586.763 telah terlaksana sebanyak 9 unit pemeliharaan dari 9 unit yang ditargetkan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 127.432.617,00 atau 94,68% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100,00%.
  - d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan Anggaran Rp. 271.761.550,00 dari Target renja 7 Unit telah terlaksana sebanyak 7 Unit dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 247.858.800,00 atau 91,20% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pagu Rp. 688.591.731,00 Realisasi Rp. 205.145.200,00 dan Persentase (29,79%)
- a. Penyusunan Final Revisi dokumen Renstra dengan Pagu Anggaran Rp 125.000.000,- dari Target renja sebanyak 1 Dokumen telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 112.085.200,00 atau 89,67%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
  - b. Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada pihak ketiga dengan Pagu Anggaran Rp. 563.591.731,00 telah terlaksana sebanyak 1 kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 93.060.000,00 atau 16,51%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
- 4) Program Pengembangan Data / Informasi Pagu Rp. 600.000.000,00 Realisasi Rp. 318.823.524,00 dan Persentase (53,14%)
- a. Penyusunan profile daerah, dengan Anggaran Rp. 600.000.000,00 dari Target renja sebanyak 1 Dokumen telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 318.823.524,00 atau 53,14%.



- dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
- b. Pengelolaan Studio Data dan Pemeliharaan Sistem Informasi Teknologi, dengan Anggaran Rp. 200.000.000,- kegiatan tidak dilaksanakan karena anggaran dialihkan untuk mendukung kegiatan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk penguatan Simral (Sistem Informasi Manajemen Rencana dan Pelaporan) melalui kegiatan Koordinasi pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pagu Rp. 5.121.044687,00 Realisasi Rp. 4.102.696.003,00 dan Per-sentase (80,11%)
- a. Revisi RPJMD, dengan Pagu Anggaran Rp. 800.000.000,00 dari Target renja sebanyak 1 Perda telah terlaksana sebanyak 1 Perda dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 534.006.571,00 atau 66,75%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
  - b. Penyusunan dan Penetapan Perubahan RKPD 2018 dan RKPD 2019 , dengan Pagu Anggaran Rp. 950.000.000,00 dari Target renja sebanyak 2 Perpub telah terlaksana sebanyak 2 Perpub dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 602.657.056,00 atau 63,44%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
  - c. Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Lintas Bidang, dengan Anggaran Rp. 950.000.000,00 dari Target renja 13 Kali telah terlaksana sebanyak 13 Kali dan anggaran yang terealisasi sebanyak Rp. 825.209.973,00 dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 86,86%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
  - d. Koordinasi pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Anggaran Rp. 420.000.000,00 dari Target renja 4 Dokumen telah terlaksana sebanyak 4 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebanyak Rp. 415.099.300,00 dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 98,83%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
- 6) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Pagu Rp. 1.250.000.000,00 Realisasi Rp. 1.072.049.784,00 dan Persentase (85,76%)
- a. Fasilitasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender, dengan Pa-gu Anggaran Rp. 300.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 dokumen Koordinasi dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 236.702.704,00 atau 78,90%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
  - b. Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah, dengan Pagu Anggaran Rp. 250.000.000,00 telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 184.406.000,00 atau 73,76%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
  - c. Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif, dengan Pagu Anggaran Rp. 200.000.000,00 telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 176.097.558,00 atau 88,05%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
  - d. Koordinasi & Fasilitasi Perencanaan Pertanian dan Sumber Daya Alam,

- dengan Pagu Anggaran Rp. 250.000.000,00 telah terlaksana sebanyak 5 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 249.925.000,00 atau 99,97%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
- e. Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, dengan Pagu Anggaran Rp. 250.000.000,00 telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 224.918.522,00 atau 89,97%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
- 7) Program Perencanaan Sosial dan Budaya Pagu Rp. 850.000.000,00 Realisasi Rp. 447.311.150,00 dan Persentase (52,62%)
    - a. Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Perencanaan Sosial Kemasyarakatan Kesejahteraan Rakyat, dengan Pagu Anggaran Rp 350.000.000,00 telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen , dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 164.220.000,00 atau 65,69%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
    - b. Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur, dengan Anggaran Rp. 250.000.000,00 dari Target renja di 11 OPD dan 12 Bagian Setkab telah terlaksana di 11 OPD dan 12 Bagian Setkab dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 164.220.000,00 atau 48,32% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
    - c. Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, dengan Anggaran Rp. 250.000.000,00 telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 120.800.800,00 atau 48,32% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
  - 8) Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam Pagu Rp. 850.000.000,00 Realisasi Rp. 708.513.123,00 dan Persentase (83,35%)
    - a. Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman, dengan Anggaran Rp 350.000.000,00 telah terlaksana sebanyak 25 Kali, dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 305.671.500,00 atau 87,33% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
    - b. Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah, dengan Anggaran Rp 250.000.000,- dari Target renja 25 Kali telah terlaksana 35 Kali dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 163.511.923,00 atau 65,40%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
    - c. Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Kecamatan, dengan Anggaran Rp 250.000.000,- dari Target renja 21 Kali telah terlaksana 21 Kali dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 239.329.700,00 atau 95,73%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
  - 9) Program Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pagu Rp. 1.550.000.000,00 Realisasi Rp. 1.156.224.361,00 dan Persentase (74,60%)
    - a. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Akhir Tahun, dengan Anggaran Rp 400.000.000,00 dari Target renja 2 Dokumen telah terlaksana 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 299.216.211,00 atau 74,80%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

- b. Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, dengan Anggaran Rp 600.000.000,00 dari Target renja 3 Dokumen telah terlaksana 3 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 556.369.338,00 atau 92,73%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.
- c. Fasilitasi Dewan Riset Daerah, dengan Anggaran Rp 550.000.000,00 dari Target renja 3 Dokumen telah terlaksana 3 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 300.638.812,00 atau 54,66%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

## 2. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

➤ Indikator kinerja utama (iku) bappeda

pada RENSTRA BAPPEDA Tahun 2016-2021 baru memasuki Tahun pertama yang sedang berjalan yaitu yang telah ditetapkan 5 Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan 5 indikator utama yaitu:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pembiayaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan indicator Indek Partisipasi Masyarakat.
2. Meningkatkan Kerjasama perencanaan antar daerah, dengan indicator cakupan Fasilitasi Kerjasama Perencanaan Pembangunan antar Daerah(%)
3. Meningkatkan capaian kinerja pembangunan daerah, persentase Rata-rata tingkat capaian kinerja pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kinerja lembaga dan aparatur, dengan indicator Rata-rata nilai SKP.
5. Meningkatkan penyediaan data dan informasi pembangunan yang mutakhir dan akurat, dengan indicator Tingkat keserasian Data Pembangunan ( %).

Penilaian kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam menentukan penilaian pencapaian kinerja terdapat dua indikator kinerja yang diukur yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Pendukung (IKP). Untuk penilaian Indikator kinerja utama (IKU) target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel berikut ini:

**Tabel Capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Sasaran : Meningkatkan kualitas perencanaan, pembiayaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TAHUN 2018			TARGET AKHIR RENSTRA (2021)	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (2021)	KET
			2016	2017	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN			
1.	Meningkatnya capaian kinerja pembangunan	Rata-rata tingkat capaian kinerja	78.32 %	82.12 %	81 %	89.21	110.14%	88 %	101.38%	IKU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TAHUN 2018			TARGET AKHIR RENSTRA (2021)	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (2021)	KET
			2016	2017	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN			
	an daerah	pembangunan daerah								
2.	Meningkatnya penyediaan data dan informasi pembangunan yang mutakhir dan akurat	Tingkat keterisian Data Pembangunan	40%	45%	60%	50%	75%	80%	56,25%	IKU
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pembiayaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	Indeks Partisipasi Masyarakat	n/a	5	4	5	125%	6	83%	IKU

1. Rata-rata tingkat capaian kinerja pembangunan daerah

Capaian sasaran Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah pada tahun 2018 adalah sebesar 110.14%, dari target tahun 2018 sebesar 81% dengan realisasi capaian 89,21%, dan capaian terhadap akhir periode renstra 101,38% dari target akhir renstra sebesar 88%. Kinerja Bappeda dalam pencapaian IKU ini terus mengalami peningkatan, hal ini dapat dibuktikan dengan perbandingan capaian kinerja pada tahun sebelumnya yaitu 78.32% (2016), 82.12% (2017).

Dengan menerapkan Pendekatan perencanaan Money Follow Program dengan Konsep "THIS" | Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, maka Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai lembaga THINK TANK" di daerah, menjalankan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah perencanaan sekaligus Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan terhadap Perencanaan di wilayahnya. Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara telah berhasil mengawal dan mengarahkan Prioritas pembangunan daerah sehingga target capaian kinerja pembangunan daerah yang telah tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dapat tercapai.

2. Tingkat keterisian Data Pembangunan

Capaian sasaran Meningkatnya penyediaan data dan informasi pembangunan yang mutakhir dan akurat sebesar 75% dari target tahun 2018 sebesar 60%

dengan realisasi capaian sebesar 50% dan capaian terhadap akhir periode renstra sebesar 56,25% dari target akhir renstra sebesar 80%. Walaupun belum mencapai target yang ditetapkan dalam Rensta Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, kinerja Bappeda dalam hal pencapaian indikator sasaran ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 40% (2016) dan 45% (2017).

Berdasarkan Undang-Undang, Pasal 274 UU 23/2014, sebuah perencanaan pembangunan daerah didasarkan atas data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Namun data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan haruslah data yang sudah diinput ke dalam SIPD. Data/informasi merupakan salah satu bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta bahan penentu/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, karena pada saat ini data-data pembangunan dipandang belum lengkap sehingga diperlukan suatu upaya untuk melengkapi dan senantiasa untuk memperbaharuinya dengan pengumpulan data secara bertahap dengan mekanisme merubah dari pola secara manual ke pola elektronik. Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2018 untuk indikator ini belum mencapai target, tetapi untuk capaian tahun 2018 meningkat daripada tahun 2016 dan 2017.

### 3. Indikator kinerja Indeks Partisipasi Masyarakat

Capaian sasaran Meningkatkan kualitas perencanaan, pembiayaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebesar 125% dari target tahun 2018 indeks partisipasi masyarakat pada level 4 dengan realisasi capaian indeks partisipasi masyarakat pada level 5 dan capaian terhadap akhir periode renstra sebesar 83% dari target akhir renstra indeks partisipasi masyarakat pada level 6, kinerja Bappeda dalam hal pencapaian indikator sasaran ini masih sama dari tahun sebelumnya yaitu indeks partisipasi masyarakat pada level 4 (2017), sedangkan untuk tahun 2016 tidak ada, karena kegiatan penghitungan Indeks Partisipasi masyarakat baru dilaksanakan mulai tahun 2017.

Perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan bermanfaat hasilnya jika dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pentingnya keterlibatan masyarakat di dalam penyusunan perencanaan pembangunan sangat ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem dan Peraturan Menteri dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sistem perencanaan yang diatur dalam dasar hukum diatas pelaksanaannya menerapkan kombinasi pendekatan antara top-down (atas-bawah) dan bottom-up (bawah-atas), yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif. Dengan adanya program-program partisipatif memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan mereka dan secara langsung juga melaksanakan sendiri serta memetik hasil dari program tersebut.

### 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya sumber daya aparatur yang merupakan motor penggerak jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut terdapat sejumlah aparatur maupun tenaga pendukung di BAPPEDA.

Adapun jumlah pegawai di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 sebanyak 162 orang.

### 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara T.A 2018 sebesar Rp. 28.907.233.381,97, Lalu Realisasi Anggaran sebesar Rp. 24.133.540.853,00 (83,49%).

Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Dana	(%)
1	2	3	4	5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	799.145,00	881.532,00	7.613,00	89,93
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	751.516,00	922.892,00	6.624,00	94,18
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0.000,00	1.500,00	1.500,00	57,16
Penyediaan jasa administrasi keuangan	00.000,00	03.700,00	3.300,00	93,64
Penyediaan jasa kebersihan kantor	18.474,00	19.958,00	1.516,00	96,79
Penyediaan alat tulis kantor	25.279,00	27.650,00	2.529,00	98,40
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.125,00	5.125,00	0,00	98,13
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	00.000,00	00.000,00	0.000,00	70,00
Penyediaan makanan dan minuman	00.000,00	75.000,00	0.000,00	85,93
Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	00.000,00	36.560,00	4.440,00	79,89
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	53.193,00	2.800,00	1.393,00	49,54

Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Dana	(%)
1	2	3	4	5
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	8.558,00	0.347,00	8.211,00	93,42
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9.138,00	8.155,00	9.583,00	88,70
Pengadaan peralatan gedung kantor	6.650,00	6.600,00	9.050,00	23,58
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	05.175,00	04.538,00	5.637,00	98,43
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	6.763	6.2617,00	6.146,00	94,68
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	61.550,00	68.800,00	61.750,00	91,20
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	01.731,00	045.200,00	06.531,00	29,79
Penyusunan Final Revisi dokumen Renstra	00.000,00	085.200,00	08.800,00	89,67
Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada pihak ketiga	01.731,00	00.000,00	01.731,00	16,51
Program pengembangan data/informasi	00.000,00	023.524,00	06.476,00	53,14
Pengelolaan Studio Data dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pembangunan				-
Penyusunan Profil Daerah (Sistem Informasi Pembangunan) Kabupaten Kutai Kartanegara	00.000,00	023.524,00	06.476,00	53,14
Program perencanaan pembangunan daerah	000.000,00	0972.900,00	07.100,00	76,19
Revisi RPJMD	00.000,00	06.571,00	03.429,00	66,75
Penyusunan dan Penetapan Perubahan RKPD 2018 dan RKPD 2019	00.000,00	07.056,00	02.944,00	63,44
Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Lintas Bidang	00.000,00	09.973,00	00.027,00	86,86
Koordinasi pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	00.000,00	09.300,00	0700,00	98,83
Program perencanaan pembangunan ekonomi	000.000,00	049.784,00	00.216,00	85,76
Evaluasi dan Perubahan Rencana Induk (Grand	00.000,00	02.704,00	02.296,00	78,90

Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Dana	(%)
1	2	3	4	5
Desain) Pembangunan Pertanian				
Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah	00.000,00	06.000,00	0.000,00	73,76
Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif	00.000,00	07.558,00	0.442,00	88,05
Koordinasi & Fasilitas Perencanaan Pertanian dan Sumber Daya Alam	00.000,00	05.000,00	0,00	99,97
Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	00.000,00	08.522,00	0.478,00	89,97
Program perencanaan sosial dan budaya	00.000,00	01.150,00	08.850,00	52,62
Koordinasi dan Fasilitas Bidang Perencanaan Sosial Kemasyarakatan Kesejahteraan Rakyat	00.000,00	00.350,00	09.650,00	46,37
Koordinasi dan Fasilitas Bidang Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur	00.000,00	02.000,00	0.000,00	65,69
Koordinasi dan Fasilitas Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	00.000,00	00.800,00	09.200,00	48,32
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	00.000,00	03.123,00	06.877,00	83,35
Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman	00.000,00	01.500,00	0.500,00	87,33
Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan Infrastruktur Wilayah	00.000,00	01.923,00	0.077,00	65,40
Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan Pengembangan Wilayah Kecamatan	00.000,00	09.700,00	0.300,00	95,73
Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	000.000,00	0224.361,00	05.639,00	74,60
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Akhir Tahun	00.000,00	06.211,00	03.789,00	74,80
Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018	00.000,00	059.338,00	0.662,00	92,73



Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Dana	(%)
1	2	3	4	5
Fasilitasi Dewan Riset Daerah	00.000,00	8.812,00	1.188,00	54,66
<b>Total</b>	7.050.014,00	0.103.129,00	946.885,00	77,28

## 5. Permasalahan dan Solusi

### a) Permasalahan

Pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA selain menghadapi tantangan dan peluang sebagaimana telah diuraikan diatas, juga menghadapi permasalahan mendasar yang memerlukan penanganan secara optimal, antara lain:

- 1) Belum terpenuhinya kebutuhan data dan informasi pembangunan yang akurat dan mutakhir untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi.
- 2) Belum optimalnya implementasi regulasi sistem perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Belum optimalnya koordinasi kerjasama perencanaan pem-bangunan antar daerah.
- 4) Belum optimalnya pengintegrasian sistem pembiayaan yang bersumber dari pemerintah dan non Pemerintah.
- 5) Lemahnya informasi terkait potensi pembiayaan yang ber-sumber dari APBN, APBD Provinsi dan sumber pembiayaan lainnya.
- 6) Sistem pengendalian dan evaluasi serta penggunaan terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan.
- 7) 7. Terbatasnya dokumen pendukung/kajian sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah.
- 8) Belum optimalnya tingkat capaian kinerja pembangunan dae-rah.
- 9) Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik secara berkualitas dalam rang-ka mewujudkan tata kelola pemerintahan (Good Governance).
- 10) Rendahnya kualitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan pelayanan secara berkualitas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan (Good Governance).

### b) Solusi

- 1) Peningkatan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran.
- 2) Optimalisasi kerjasama pembangunan.
- 3) Peningkatan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan secara periodik.
- 4) Optimalisasi dukungan data dan informasi perencanaan pem-bangunan dae-rah.
- 5) Penguatan manajemen kinerja organisasi.
- 6) Penerapan perencanaan yang inovatif.
- 7) Peningkatan koordinasi antar SKPD dan stakeh older lain.
- 8) Penerapan perencanaan yang partisipatif.

- 9) Penyusunan perencanaan pembangunan yang tepat waktu.
- 10) Pengembangan sistem informasi perencanaan yang mendukung kinerja organisasi.
- 11) Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai.
- 12) Peninjauan dan penyesuaian peraturan terkait perencanaan pembangunan.

## 6. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam proses perencanaan pembangunan, dikarenakan dampaknya bagi perangkat daerah dimasa yang akan datang.

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan, maka ada beberapa hal yang menjadi isu strategis yang dihadapi oleh Bappeda, yang apabila tidak segera diatasi maka akan menjadi masalah di kemudian hari, isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kinerja kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Peningkatan konsistensi antar dokumen perencanaan, serta dokumen perencanaan dan penganggaran.
- 4) Penyajian data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan mutakhir.
- 5) Peningkatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

## 2. BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SDA

### 1. Program dan Kegiatan

Dalam hal pencapaian program dan kegiatan tahun anggaran 2018 dengan rincian realisasi kinerja sebesar 89,25 % dan realisasi keuangan sebesar 96,25 %, untuk selengkapnya terlampir dalam laporan ini.

Secara keseluruhan pencapaian renja dan renstra masih ada yang belum memenuhi target dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran dan capaian target program dan kegiatan secara keseluruhan sebagai berikut :

**Tabel 3.**

Capaian Program / Kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pengem SDA Tahun 2018

No	Program/Uraian Kegiatan	Target	Realisasi	%
<b>A</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1.075</b>	<b>995</b>	<b>92,56</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	3	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69	68	98,55
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	16	9	56,25
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	272	206	75,74
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	86	73	84,88

No	Program/Uraian Kegiatan	Target	Realisasi	%
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1	1	100
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	3.241	2.880	88,86
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	2	2	100
9	Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	276	276	100
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3	2	100
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	206	205	99,51
12	Fasilitasi kegiatan hari besar / Nasional dan Pameran	1	1	100
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100</b>
13	Revisi RENSTRA	1	1	100
14	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	1	1	100
	<b>Program Layanan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>4.813</b>	<b>8,920</b>	<b>8.893</b>
15	Proses Penyelenggaraan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	3.300	3.300	100
16	Proses Penyelenggaraan Administrasi Pensiun	420	393	93,57
17	Proses Layanan KARPEG, KARIS, dan TASPEN bagi PNS di Lingkungan Pemkab Kutai	200	200	100
18	Rekonsiliasi Peremajaan Data ASN Kab. Kutai kartaengara	5.000	5.000	100
	<b>Program Penyediaan Informasi Kepegawaian</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
19	Analisis Kebutuhan pegawai	1	1	100
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kabupaten)</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>100</b>
20	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	44	44	100
21	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	36	36	100
22	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	15	15	100
23	Peningkatan Komptensi SDM Aparatur	0	0	0
	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>1.120</b>	<b>712</b>	<b>88,64</b>
24	Penilaian Kompetensi PNS/Pejabat Struktural	88	78	88.64
25	Proses Penanganan kasus dan Pelanggaran Kode Etik ASN	30	24	80
26	Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural dan Fungsional	1.000	608	60.80
27	Penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur Administrasi	1	1	100
28	Penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur Fungsional	1	1	100

## 2. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Kepegawaian Pendidikan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kutai Kartanegara per Desember 2018 berjumlah 101 orang PNS yang terdiri dari 21 Pejabat Struktural dan 85 Non Struktural.

Untuk jumlah jabatan struktural pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 21 jabatan, dan per Desember 2018 jabatan yang terisi berjumlah 21 jabatan. Dan pada

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 9 (sembilan) Jabatan Fungsional.

### 3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2018 Total Anggaran belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp. 17.042.467.397,80 yang meliputi anggaran Biaya Tidak Langsung, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal (APBD-P). Dengan realisasi atau serapan tahun ini adalah Rp. 15.149.051.878,00 (88,89%) pada tahun ini mengalami peburunan penyerapan anggaran dari tahun 2018 sebesar (93,45%). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan rincian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Keuangan			
		Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1.663.105.970,00</b>	<b>1.600.770.641,00</b>	<b>62.335.329,00</b>	<b>96,25</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.954.284,00	7.490.000,00	8.464.284,00	46,95
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.550.000,00	92.730.967,00	13.819.033,00	87,03
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9.000.000,00	8.680.300,00	319.700,00	96,45
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	182.125.400,00	178.378.600,00	3.746.800,00	97,94
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	55.610.240,00	52.024.770,00	3.585.470,00	93,55
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	126.661.900,00	125.607.000,00	1.054.900,00	99,17
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	12.000.000,00	11.630.790,00	369.210,00	96,92
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	104.691.000,00	103.223.500,00	1.467.500,00	98,60
9	Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	257.790.720,00	257.790.720,00	0	100
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	102.722.426,00	101.769.850,00	952.576,00	66,67
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar	640.000.000,00	613.696.344,00	26.303.626,00	99,51

No.	Indikator Kinerja	Keuangan			
		Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	2	3	4	5	6
	Daerah				
12	Fasilitasi kegiatan hari besar / Nasional dan Pameran	50.000.000,00	47.747.800,00	2.252.200,00	100
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>151.142.400,00</b>	<b>150.002.600</b>	<b>1.139.800,00</b>	<b>99,25</b>
13	Revisi RENSTRA	100.000.000,00	98.860.200,00	1.139.800,00	98,86
14	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	51.142.400,00	51.142.400,00	0	100
	<b>Program Layanan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>735.000.000,00</b>	<b>620.268.777,00</b>	<b>114.731.223,00</b>	<b>84,39</b>
15	Proses Penyelenggaraan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	350.000.000,00	292.635.410,00	57.364.590,00	83,61
16	Proses Penyelenggaraan Administrasi Pensiun	85.000.000,00	84.781.501,00	218.499.00,00	99,74
17	Proses Layanan KARPEG, KARIS, dan TASPEN bagi PNS di Lingkungan Pemkab Kutai	50.000.000,00	47.872.762,00	2.127.238,00	95,75
18	Rekonsiliasi Peremajaan Data ASN Kab. Kutai kartaengara	250.000.000,00	194.979.104,00	55.020.896,00	77,99
	<b>Program Penyediaan Informasi Kepegawaian</b>	<b>340.000.000,00</b>	<b>257.400.545,00</b>	<b>82.599.455,00</b>	<b>75,71</b>
19	Analisis Kebutuhan pegawai	340.000.000,00	257.400.545,00	82.599.455,00	75,71
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kabupaten)</b>	<b>2.035.000.000,00</b>	<b>1.880.159.371,00</b>	<b>9.800.144,00</b>	<b>92,39</b>

No.	Indikator Kinerja	Keuangan			
		Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	2	3	4	5	6
20	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	435.000.000,00	385.363.000,00	49.637.000,00	88,59
21	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	800.000.000,00	795.478.000,00	4.522.000,00	99,43
22	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	800.000.000,00	699.318.371,00	100.681.629,00	87,41
23	Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur	0	0	0	0
	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>1.754.704.000,00</b>	<b>1.428.356.865,00</b>	<b>2.174.700,00</b>	<b>81,40</b>
24	Penilaian Kompetensi PNS/Pejabat Struktural	800.000.000,00	630.215.370,00	169.784.629,00	78,78
25	Proses Penanganan kasus dan Pelanggaran Kode Etik ASN	100.000.000,00	93.978.319,00	6.021.681,00	93,98
26	Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural dan Fungsional	324.704.000,00	300.203.366,00	24.500.634,00	92,45
27	Penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur Administrasi	430.000.000,00	303.984.809,00	126.015.191,00	100
28	Penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur Fungsional	100.000.000,00	99.975.000,00	25.000,00	99,98
	<b>Jumlah</b>	<b>6.678.952.370,00</b>	<b>5.936.958.799,00</b>	<b>741.993.571,00</b>	<b>88,89</b>

#### 4. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Secara umum sarana dan prasana yang dimiliki oleh OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara, cukup memadai dalam seluruh kegiatan operasional selama ini. Namun dipandang perlu untuk menambah sarana dan prasarana pendukung lainnya untuk memperbaiki tingkat pelayanan.

#### 5. Permasalahan dan Solusi

Perlunya peningkatan kapasitas aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kedepan dikarenakan tuntutan profesionalitas dalam pelayanan, sehingga diperlukan diklat, workshop, bimtek untuk menunjang kinerja

aparatur yang akan dianggarkan pada tahun 2019.

## 6. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Isu-isu Strategis kedepan yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

1. Penempatan pegawai yang belum ideal, dimana kesulitan menempatkan pegawai di kecamatan yang jauh dari ibu kota Kabupaten. Hal ini juga terkait dengan belum optimalnya penerapan sistem reward and punishment.
2. Penanganan penegakan disiplin pegawai belum potimal karena membutuhkan komitmen dari seluruh OPD dalam melaporkan pelanggaran disiplin ditempat kerja masing-masing.

## 3. BAPENDA

### 1. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, program dan kegiatan merupakan tindakan atau aksi (action steps).

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2018 sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis mengalami revisi guna menyesuaikan dengan kondisi kontemporer di daerah, terutama terkait dengan daya dukung pendanaan bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicantumkan dalam Rencana Strategis. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Tujuan kesatu dengan satu sasaran akan dicapai melalui program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
- b) Tujuan kedua dengan dua sasaran akan dicapai melalui empat program yaitu:
  1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
  2. Pelayanan administrasi perkantoran;
  3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4
<b>Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>1,650,000,000.00</b>	<b>1,392,957,133.00</b>	<b>84.42</b>
Evaluasi dan Monitoring Penerimaan/Penyetoran Benda Berharga	60,000,000.00	59,670,000.00	99.45
Monitoring dan Evaluasi Pembukuan Penerimaan Pendapatan Daerah	100,000,000.00	99,304,800.00	99.30

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4
Pemutakhiran Data WP Daerah di Wilayah UPT Kota Bangun	50,000,000.00	49,963,800.00	99.93
Pendataan WP Daerah di Wilayah UPT Muara Jawa	50,000,000.00	49,973,800.00	99.95
Pemutakhiran Data WP Daerah di Wilayah UPT Tenggaraong	50,000,000.00	47,338,800.00	94.68
Pemutakhiran Data WP Daerah di Wilayah UPT Loa Janan	50,000,000.00	49,838,800.00	99.68
Pemutakhiran Data WP Daerah di Wilayah UPT Muara Badak	50,000,000.00	49,993,800.00	99.99
Pendataan WP Daerah di Wilayah UPT Sebulu	50,000,000.00	48,433,800.00	96.87
Pendataan WP Daerah di Wilayah UPT Sangasanga	50,000,000.00	49,328,800.00	98.66
Pendataan WP Daerah di Wilayah UPT Kembang Janggut	50,000,000.00	49,963,800.00	99.93
Pendataan WP Daerah di Wilayah UPT Muara Muntai	50,000,000.00	49,124,000.00	98.25
Rekonsiliasi Penerimaan dan Piutang Pendapatan Daerah	140,000,000.00	135,357,233.00	96.68
Monitoring dan Evaluasi Data Penagihan Non Pajak/Retribusi	75,000,000.00	74,620,000.00	99.49
Penagihan Tunggal Pajak Serta Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pajak	150,000,000.00	147,786,700.00	98.52
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Potensi Pajak Daerah	300,000,000.00	91,862,500.00	30.62
Koordinasi dan Konsultasi Mengenai Keberatan dan Restitusi Serta Penghapusan Pajak	75,000,000.00	74,584,600.00	99.45
Pendampingan Peningkatan PAD	0	0	0.00
Intensifikasi Wajib Pajak Daerah	100,000,000.00	80,408,600.00	80.41
Verifikasi, Evaluasi dan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah	70,000,000.00	69,859,200.00	99.80
Koordinasi dan Konfirmasi Dana Perimbangan/Bukti Setor	80,000,000.00	66,294,100.00	82.87
Pemutakhiran Data ZNT dan Harga Bahan Bangunan	50,000,000.00	49,250,000.00	98.50
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>3,837,241,780.00</b>	<b>3,188,802,775.00</b>	<b>83.10</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,000,000.00	4,254,500.00	28.36
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	800,000,000.00	548,343,355.00	68.54
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	354,333,400.00	354,331,800.00	100.00



Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4
Penyediaan Alat Tulis Kantor	150,000,000.00	149,815,000.00	99.88
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0.00
Penyediaan Makanan dan Minuman	60,000,000.00	34,834,050.00	58.06
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1,455,567,260.00	1,264,847,676.00	86.90
Penyediaan Jasa Admin istrasi Tekhnis Perkantoran	802,341,120.00	732,931,394.00	91.35
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200,000,000.00	99,445,000.00	49.72
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>2,234,103,900.00</b>	<b>1,086,246,657.00</b>	<b>48.62</b>
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	375,000,000.00	313,730,500.00	83.66
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	140,641,100.00	121,360,200.00	86.29
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	270,000,000.00	157,939,292.00	58.50
Penyediaan Gedung Tempat Kerja	50,000,000.00	38,102,125.00	76.20
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500,000,000.00	193,502,040.00	38.70
Pengembangan Sistem PAD Online Untuk Semua Layanan PAD Yang Terintegrasi	498,462,800.00	261,612,500.00	52.48
Penyediaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah	400,000,000.00	0	0.00
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>1,379,401,444.00</b>	<b>1,042,700,400.00</b>	<b>75.59</b>
Review Rencana Strategis (RENSTRA) dan IKU	110,558,400.00	103,937,200.00	94.01
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA), RKA-DPA dan RKAP-DPPA	121,380,344.00	89,259,400.00	73.54
Penyusunan Perjanjian Kinerja dan LPPD	46,769,400.00	44,144,400.00	94.39
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	111,697,800.00	107,347,800.00	96.11
Validasi dan Konfirmasi Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Bendahara Penerima	100,000,000.00	83,300,600.00	83.30
Validasi Data dan Informasi Kepegawaian	100,000,000.00	66,795,600.00	66.80
Peningkatan Manajemen Asset Barang	150,000,000.00	130,225,600.00	86.82
Penyusunan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	0	0	0.00
Penyusunan Prognosis dan Laporan Keuangan	50,000,000.00	34,845,600.00	69.69

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4
Perubahan Perbup Pajak Daerah Menyesuaikan Nomenklatur Dispenda Menjadi Bapenda	250,000,000.00	111,723,700.00	44.69
Penyusunan Masterplan Pendapatan Daerah	150,000,000.00	82,125,000.00	54.75
Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	188,995,500.00	188,995,500.00	100.00
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>290,000,000.00</b>	<b>253,737,300.00</b>	<b>87.50</b>
Pameran dan Promosi	40,000,000.00	39,338,800.00	98.35
Fasilitasi Inovasi Perangkat Daerah	100,000,000.00	71,147,800.00	71.15
Diklat Perencanaan Optimalisasi PAD	150,000,000.00	143,250,700.00	95.50

## 2. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran yang dirumuskan berdasarkan intermediate outcomes dari masing-masing kegiatan. Pengukuran Capaian Kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan yang telah diprogramkan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran-sasaran yang telah dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Sasaran Pertama: ***"Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah"***.

Indikator kinerja sasaran yang menggambarkan tingkat capaian kinerja sasaran tersebut terdiri dari 3 (tiga) indikator sasaran pada 1 (satu) program, Indikator pertama yaitu Pertumbuhan kontribusi PAD terhadap APBD, indikator kedua yaitu pertumbuhan pajak daerah dan indikator ketiga yaitu pertumbuhan retribusi daerah yang dicapai melalui program "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah" meliputi 21 kegiatan.

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Indikator sasaran ini adalah Pertumbuhan kontribusi PAD terhadap APBD dan Pertumbuhan pajak daerah dan Pertumbuhan retribusi daerah.
2. Pada Pertumbuhan kontribusi PAD terhadap APBD pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 7.81 persen, dan yang dapat direalisasikan 7.77 persen sehingga tingkat capaian kinerja mencapai target sasaran 99.49 persen, untuk Pertumbuhan pajak daerah pada tahun 2018 ditargetkan 12.94 persen yang berhasil direalisasikan sebesar -34.87 persen, sehingga capaian kinerja belum mencapai target yang ditetapkan -269.47 persen. Untuk Pertumbuhan Retribusi daerah tahun 2018 sebesar (8.47) persen yang berhasil direalisasikan sebesar 0.87 persen, sehingga capaian kinerja mencapai target yang ditetapkan 10.27 persen.

Dari 11 (sebelas) Pajak Daerah, sebanyak 10 (sepuluh) jenis Pajak Daerah mengalami pertumbuhan positif, sedangkan hanya 1 (satu) jenis Pajak Daerah

yang mengalami kontraksi, yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Hal ini cukup menarik, mengingat jumlah jenis pajak yang mengalami pertumbuhan positif meningkat drastis, yaitu hanya 7 jenis di tahun 2017 meningkat menjadi 10 jenis di tahun 2018. Namun demikian, dari sisi realisasi total pajak daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2018. Ternyata hal ini dipengaruhi oleh signifikannya penurunan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan/ BPHTB, dari Rp.45.617.816.017 di tahun 2017 menurun menjadi Rp.3.391.815.122 atau mengalami kontraksi sebesar -92,56%. Adapun 10 (sepuluh) jenis Pajak Daerah yang mengalami pertumbuhan positif tertinggi berturut-turut adalah:

- 1) Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet
- 2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Parkir
- 5) Pajak Reklame
- 6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 7) Pajak Restoran
- 8) Pajak Penerangan Jalan
- 9) Pajak Air Tanah
- 10) Pajak Hotel

Sedangkan jenis Pajak Daerah yang mengalami kontraksi yaitu:

- 1) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Menarik untuk dicermati bahwa Pajak Air Tanah; Pajak Hotel; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 2017 merupakan kelompok yang mengalami kontraksi, sedangkan pada tahun 2018 beralih menjadi kelompok yang mengalami pertumbuhan yang positif. Namun sebaliknya, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada tahun 2017 meningkat secara signifikan, namun mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2018, dan sebagai penyebab utama menurunnya pencapaian kinerja pertumbuhan pajak daerah. Pada tahun 2018 tidak terdapat transaksi oleh perusahaan, yang ada hanya transaksi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan program pemerintah yang nilainya cukup kecil, sehingga realisasi BPHTB sangat menurun secara drastis sebesar (-92,59%).

Untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu Bagian Laba dari Bank Kaltimara terjadi penurunan pada tahun 2018 hal ini disebabkan tingkat keuntungan Bank Kaltimara yang menurun, penurunannya sebesar (-10,02%).

Sedangkan untuk hal lain lain PAD yang sah terdapat penurunan realisasi pada tahun 2018 untuk BLUD RSUD Batara Agung Samboja.

Target JKN dan Bosnas yang tahun sebelumnya diklasifikasikan pada kelompok PAD, pada tahun ini direklasifikasi pada Penerimaan Hibah dari Pemerintah.

Sasaran kedua : ***“Meningkatnya layanan PAD berbasis IT”***

Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam mencapai sasaran

ini dilakukan melalui kegiatan: Penyediaan sistem informasi Tata Usaha, dan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam mencapai sasaran ini dilakukan melalui kegiatan: Pengembangan Sistem PAD online untuk semua layanan PAD yang terintegrasi dan Penyediaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah.

Sasaran ketiga : ***“Meningkatnya kompetensi SDM aparatur”***

Untuk mencapai sasaran ini ditetapkan Persentase SDM perpajakan yang telah mengikuti Bimtek/Pelatihan (%). Penetapan indikator ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Badan Pendapatan Daerah, sehingga mampu meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan PAD. Capaian indikator ini ditargetkan dapat terealisasi pada tahun 2018 sebesar 70%. Sedangkan formula perhitungannya sebagai berikut:

SDM perpajakan yang telah mengikuti Bimtek/Pelatihan sampai tahun 2018 sebanyak 280 orang, sedangkan jumlah Total jumlah pegawai yang seharusnya mengikuti Diklat Teknis Fungsional yaitu sebanyak 338 orang. Dari data ini maka Persentase SDM perpajakan yang telah mengikuti Bimtek/Pelatihan (%) sampai tahun 2018 yaitu sebanyak 84,31%, sedangkan target yang ditetapkan pada tahun 2018 yaitu 70%, maka capaian kinerja pada tahun 2018 yaitu 120,44% (sangat tinggi)

### **Pendapatan Daerah**

Kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai institusi dibidang keuangan daerah bertanggungjawab atas pengelolaan pendapatan, tentu juga terkait dengan PD lain sebagai pengendali kebijakan dan ketugasan pendukung yang memberi kontribusi bagi pendapatan daerah.

Total PAD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 sebesar Rp. 308.046.162.905,40 Pendapatan Asli Daerah tersebut didominasi perolehan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pada komposisi pajak daerah dibandingkan dengan total PAD adalah yang berhasil direalisasikan 19.79 persen. Secara faktual, dari target pajak daerah Rp 56.052.496.526,00; berhasil direalisasikan Rp 60.991.506.674.70 (108.81 persen). Sementara untuk komposisi Retribusi daerah dibandingkan dengan total PAD adalah yang berhasil direalisasikan 2.01 persen, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 2.01 persen. Secara faktual, dari target retribusi daerah Rp 12.389.014.006,42 ; berhasil direalisasikan Rp 6.219.679.404,16 (50.20).

### **Pengelolaan Belanja**

Dari pagu anggaran Belanja Langsung Badan Pendapatan Daerah tahun 2018 setelah perubahan sebesar Rp. 9.390747.124,00 penyerapan/realisasi anggaran mencapai Rp. 6.964.444.265,00 (74.16%). Berikut ini adalah rincian pagu dan realisasi anggaran dari masing-masing program :

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.837.241.780,00	3.188.802.775,00	83,10
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.234.103.900,00	1.086.246.657,00	48,62
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	290.000.000,00	253.737.300,00	87,50
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.379.401.444,00	1.042.700.400,00	75,59
5	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1.650.000.000,00	1.392.957.133,00	84,42
<b>Total</b>		<b>9.390.747.124,00</b>	<b>6.964.444.265,00</b>	<b>74,16</b>

Meskipun anggaran tidak terserap sepenuhnya, namun ternyata rata-rata pencapaian lima program berikut sembilan indikator sasaran, kinerjanya mencapai 100 persen. Hal ini mencerminkan adanya upaya efisiensi penggunaan anggaran sebagai wujud komitmen pimpinan Badan Pendapatan Daerah untuk secara optimal mendayagunakan sumber daya keuangan guna memaksimalkan upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

### 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Badan Pendapatan Daerah memiliki jumlah pegawai sebanyak 338 orang. Terdiri dari 36 Pejabat Esselon dan 302 Non Esselon atau pegawai fungsional umum. Untuk lebih jelasnya bias dilihat pada table berikut :

ESELON	GENDER		
	PRIA	WANITA	JUMLAH
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I</b>	0	0	0
<b>II</b>	1	0	1
<b>III</b>	4	0	4
<b>IV</b>	22	9	31
<b>V</b>	0	0	0
<b>ESELON</b>	27	9	36
<b>NON ESELON</b>	172	130	302
<b>JUMLAH</b>	<b>199</b>	<b>139</b>	<b>338</b>

### 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 adalah sebesar Rp. 9.390.747.124, lalu Realisasi Anggaran sebesar Rp.6.964.444.265 atau persentase realisasi keuangan sebesar 74.16%.

## 5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kondisi mencukupi.

## 6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah serta solusi yang ditempuh adalah :

- 1) Regulasi yang mengatur pemungutan pajak daerah tidak memiliki kekuatan memaksa wajib pajak daerah untuk harus memenuhi kewajibannya membayar pajak.
- 2) Wajib pajak yang terkait langsung dengan perizinan pusat sering mengabaikan kewajiban perpajakan di daerah.
- 3) Luas wilayah menyebabkan biaya operasional pemungutan pajak daerah menjadi lebih besar
- 4) Perubahan jumlah objek pajak dan retribusi daerah yang begitu cepat sehingga akan menyulitkan untuk melakukan pendataan wajib pajak.
- 5) Belum optimalnya kerjasama dengan pihak terkait, dan koordinasi antarinstansi dan antardaerah yang terkait dengan pengelolaan dan peningkatan sumber PAD

Adapun solusi yang ditawarkan untuk lebih mengoptimalkan dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

- 1) Perlu diusulkan regulasi dengan sanksi yang lebih berat, bukan hanya berupa denda.
- 2) Mengusulkan revisi UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah agar jelas memisahkan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/kota.
- 3) Mengusulkan regulasi yang mengatur pemungutan pajak harus memperhatikan efisiensi, jika biaya operasional pemungutan pajak daerah lebih besar dari nilai pajak yang dipungut maka pajak tersebut agar dapat di abaikan.
- 4) Meningkatkan pendataan WP secara intensif dan perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah secara berkala
- 5) Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait, diantaranya dengan KPP Pratama dan meningkatkan koordinasi antarinstansi dan antardaerah yang terkait dengan pengelolaan dan peningkatan sumber PAD

Hal tersebut mustahil terwujud tanpa adanya kerjasama baik pihak, untuk itu diperlukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai unsur, baik instansi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Laporan kinerja ini dapat dijadikan titik pijak perbaikan kinerja di masa mendatang, sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang inovatif yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Daerah demi pembangunan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara.

#### 4. BALITBANGDA

##### 1. Program dan Kegiatan

Program kegiatan Balitbangda tahun anggaran 2018 disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) terdiri dari 6 (Enam) program Belanja Langsung yang terdiri dari kegiatan Urusan dan Non Urusan.

Untuk kegiatan Urusan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Indeks Kunci Utama (IKU) Balitbangda yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam Program Penelitian Umum yang disusun berdasarkan dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang teknis yang ada di Balitbangda.

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terdiri dari sepuluh kegiatan dilaksanakan sesuai rencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 976.957.000,- terealisasi sebesar Rp. 914.363.422,- tercapai realisasi fisik sebesar 97.85 % dan realisasi keuangan sebesar 93,59%.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terdiri dari tujuh kegiatan dilaksanakan sesuai rencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 255.688.000,- terealisasi sebesar Rp. 245.678.945,- tercapai realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,29 %,

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terdiri dari dua kegiatan dilaksanakan sesuai rencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 97.259.000,- terealisasi sebesar Rp. 70.679.000,- tercapai realisasi fisik sebesar 90 % dan realisasi keuangan sebesar 71.53 %,

d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terdiri dari tiga kegiatan dilaksanakan sesuai rencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 197.505.400,- terealisasi sebesar Rp. 135.739.600,- tercapai realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 72.06 %,

e) Program Penelitian Umum

Terdiri dari lima kegiatan dilaksanakan sesuai rencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.025.508.548,- terealisasi sebesar Rp. 1.739.805.467,- tercapai realisasi fisik sebesar 90 % dan realisasi keuangan sebesar 71.53 %,

Pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2018 dapat dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.037.676.203,- dari jumlah pagu dana sebesar Rp. 3.552.917.948,-(57.35%) dan realisasi fisik sebesar 64.66%.

Rendahnya realisasi keuangan yang hanya 57.35% dan realisasi fisik sebesar 64.66% disebabkan karena ada beberapa kegiatan dalam program Penelitian Umum yang tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan karena terlambatnya ketersediaan anggaran yang baru tersedia pada akhir triwulan IV tahun anggaran 2018.

Adapun kegiatan – kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan diantaranya adalah kegiatan riset cepat tentang isu strategis dan isu aktual yang hanya dapat melaksanakan 2 (dua) FGD dari 3 (tiga) FGD yang direncanakan. Selain itu ada 3 kegiatan kajian rencana pembentukan kawasan taman hutan raya (TAHURA) Muara Siran Kecamatan Muara Kaman (Kajian Teknis Tahura, Kajian Ekonomi Tahura dan Kajian Sosbud Tahura) yang hanya menghasilkan Kajian awal rencana pembentukan

Kawasan Tahura tersebut sehingga tidak dapat menghasilkan rekomendasi rencana pembentukan Kawasan Tahura secara komplit.

## 2. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk ditetapkan sebagai prioritas usulan kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya diusulkan ke BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendapatkan alokasi anggaran. Uraian Target dan Capaian Kinerja OPD (SPM/IKU):

- a) Jumlah Penelitian dan Pengembangan serta Kajian pada tahun 2018 sebanyak 7 kegiatan namun realisasi pelaksanaan sebanyak 3 kegiatan jadi indikator Kinerja sebesar 42,86%.
- b) Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Kajian yang dimanfaatkan oleh Stakeholder sebanyak 7 rekomendasi yang telah dimanfaatkan oleh OPD sebanyak 3 Rekomendasi jadi indikator Kinerja sebesar 42,86 %.
- c) Jumlah Publikasi Mandiri dan Berkala yang diberikan atau publikasikan kepada Stakeholder sebanyak 200 Eks yang telah dipublikasikan sebanyak 200 Eks Rekomendasi jadi indikator capaian kinerja sebesar 100%.

Maka Capaian Kinerja SKPD (SPM/IKU) yang dilaksanakan pada urusan Balitbangda seperti pada tabel berikut:

**Tabel 3.58**  
Matrik Indikator Kinerja Utama Balitbangda

NO	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA BALITBANGDA	Kondisi Kinerja pada akhir periode (2018)
1.	Jumlah Penelitian dan Pengembangan serta Kajian yang dilaksanakan	42,86%
2.	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Kajian yang dimanfaatkan oleh Stakeholder	42,86 %
3.	Jumlah Publikasi Mandiri dan Berkala yang diberikan atau publikasikan kepada Stakeholder	100%

## 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam menangani program dan kegiatan prioritas Sampai dengan akhir Desember 2018, didukung oleh 74 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 32 Tenaga Harian Lepas (THL).



#### 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2018 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk urusan wajib mendapat Alokasi Anggaran Rp. 11.738.009.298,88,- (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Delapan Puluh Delapan Sen) dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 9.072.892.087,- (Sembilan Miliar Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah). Secara garis besar dapat dilihat pada tabel 10.

**Tabel 3.59**

Anggaran dan realisasi anggaran urusan wajib tahun 2018

NO	ANGGARAN BELANJA	JUMLAH ANGGARAN		
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASI (%)
1	Belanja Tidak Langsung	8.185.091.350,88	7.035.215.884,00	85.95
2	Belanja Langsung	3.552.917.948	2.037.676.203,00	57.35
	<b>Total Anggaran dan Realisasi Belanja</b>	<b>11.738.009.298,88</b>	<b>9.072.892.087,00</b>	<b>77.29</b>

#### 5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu penunjang utama dalam upaya meningkatkan kinerja Balitbangda. Sarana dan prasarana ini digunakan antara lain untuk:

- Menunjang kegiatan ketatausahaan/administrasi perkantoran
- Menunjang peningkatan kualitas SDM aparatur
- Menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan
- Menunjang kegiatan diseminasi hasil litbang
- Dan lain-lain

#### 6. Permasalahan dan Solusi

##### a. Permasalahan

Adapun permasalahan yang ada pada pelaksanaan kegiatan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya ASN balitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikarenakan pendidikan dan pelatihan formal dalam postur anggaran belum memadai.
- 2) Belum Optimalnya jejaring atau kerjasama kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi / Perangkat Daerah lainnya dikarenakan masih lemahnya kinerja promosi dan humas.
- 3) Hasil kajian dan penelitian yang telah dilakukan oleh Balitbangda belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dan stakeholder lainnya.
- 4) Belum memiliki bangunan kantor yang representative yang dapat menampung seluruh karyawan / pegawai dengan segala aktivitasnya.

##### b. Solusi

- 1) Pelaksanaan program dan kegiatan yang mendatang perlu ditingkatkan koordinasi dengan pihak lain yang mengelola keuangan daerah.
- 2) Perlu dilakukan koordinasi dengan pihak terkait secara intens tentang pembuatan regulasi daerah yang mengatur tentang kelitbangan.
- 3) Perlu menambah jumlah Tenaga Peneliti, Perekayasa di bidang kelitbangan dan mengusulkannya ke BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 4) Perlu meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian baik tenaga peneliti fungsional maupun tenaga peneliti non fungsional serta Aparatur Sipil Negara lainnya.
- 5) Perlu meningkatkan sarana dan prasarana termasuk laboratorium penelitian untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Kelitbangan.
- 6) Perlu komitmen PD lainnya untuk mendukung agar semua kegiatan kelitbangan yang dilakukan oleh Balitbangda dengan tetap melibatkan PD terkait.
- 7) Perlu mengoptimalkan jejaring (networking) kelitbangan dengan PD dan Stakeholder lainnya baik melalui Sistem Inovasi Daerah (SIDa) serta koordinasi pemanfaatan hasil kajian dan penelitian kelitbangan.
- 8) Perlu merealisasikan minimal anggaran 1 % dari APBD Kutai Kartanegara untuk mendukung pelaksanaan program serta kegiatan kajian dan penelitian terkait kelitbangan di daerah.

## **5. INSPEKTORAT KABUPATEN**

### **1. Program dan Kegiatan**

Penyusunan program dan kegiatan ditujukan untuk menyusun akuntabilitas kinerja organisasi. Namun perlu disadari juga bahwa program dan kegiatan merupakan bagian dari pencapaian suatu tujuan perencanaan kebijakan (policy planning) pada tingkat Kabupaten. Berdasarkan hal ini, kerangka pikir penyusunan program dan kegiatan harus didasarkan dalam rangka pencapaian kinerja dampak (impact) dari tingkat perencanaan yang lebih tinggi, yaitu pencapaian prioritas guna pencapaian visi, misi dan sasaran strategis pada tingkat organisasi. Kerangka pikir penyusunan program dan kegiatan diturunkan berdasarkan Logic Model Theory Pengembangan kerangka pikir akan menjadi arah dalam penyusunan program dan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah. Secara garis besar, penyusunan program dan kegiatan dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

#### **1. Pencapaian Program dan Kegiatan (Realisasi Kinerja/Fisik/Output) tahun Anggaran 2018**

Pencapaian Program dan Kegiatan Inspektorat Dalam tahun anggaran 2018 dalam mengelola anggaran sebesar Rp. 9.204.455.093,00,- yang terbagi atas 6 Program Kegiatan, dengan Realisasi Kinerja/Fisik kegiatan mencapai 84,88 %.

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		PAGU DANA SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	%	SISA DANA
			( RP. )		
1	2	3	4	5	6
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.735.476.160</b>	<b>1.723.876.037</b>		<b>11.600.123</b>
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	200.000.000	195.807.237	97,90	4.192.763
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	250.000.000	236.628.000	94,65	13.372.000
3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100.000.000	99.986.760	99,99	13.240
4	Penyediaan alat tulis kantor	100.000.000	99.999.400	100,00	600
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	10.000.000	100,00	-
6	Penyediaan bahan logistik kantor	10.000.000	10.000.000	100,00	-
7	Penyediaan makanan dan minuman	75.000.000	74.960.000	99,95	40.000
8	Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	390.476.160	386.216.240	98,91	4.259.920
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.000.000	49.900.000	99,80	100.000
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	550.000.000	560.378.400	101,89	(10.378.400)
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>475.000.000</b>	<b>470.979.178</b>		<b>4.020.822</b>
11	Pengadaan peralatan gedung kantor	100.000.000	98.480.600	98,48	1.519.400
12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	25.000.000	24.999.700	100,00	300
13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	-	-
14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100.000.000	97.499.478	97,50	2.500.522

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		PAGU DANA SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN ( RP. )	%	SISA DANA
1	2	3	4	5	6
15	Rehabilitasi sedang Gedung Kantor	250.000.000	249.999.400	100,00	600
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>182.842.700</b>			<b>28.836.233</b>
16	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev	100.000.000	82.842.700	82,84	17.157.300
17	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	111.678.933	100.000.000	89,54	11.678.933
	Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	6.132.300.000	4.668.842.596		1.463.457.404
18	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	1.000.000.000	932.241.000	93,22	67.759.000
19	Pengawasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB	50.000.000	36.889.700	73,78	13.110.300
20	Evaluasi Zona integritas	50.000.000	33.763.800	67,53	16.236.200
21	Penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu	2.630.300.000	1.344.440.400	51,11	1.285.859.600
22	Reviu Laporan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pendampingan BPK RI	1.327.000.000	1.257.452.486	94,76	69.547.514
23	Evaluasi SAKIP SKPD dan Pemerintah Daerah	250.000.000	244.094.610	97,64	5.905.390
24	Pendampingan/Monitoring LPPD dan Pemda	100.000.000	98.070.600	98,07	1.929.400
25	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI	200.000.000	200.000.000	100,00	-
26	Inventarisasi Temuan Pengawasan dan Distribusi LHP	75.000.000	75.000.000	100,00	-

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		PAGU DANA SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN ( RP. )	%	SISA DANA
1	2	3	4	5	6
27	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	200.000.000	200.000.000	100,00	-
28	Penanganan Kasus TP-TGR	100.000.000	99.990.000	99,99	10.000
29	Implementasi SPIP	150.000.000	146.900.000	97,93	3.100.000
	<b>Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>250.000.000</b>	<b>220.925.738</b>		<b>29.074.262</b>
30	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	150.000.000	142.794.668	95,20	7.205.332
31	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Bidang Pengembangan Keahlian Pengawasan	100.000.000	78.131.070	78,13	21.868.930
	Program Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	400.000.000	310.810.386		89.189.614
32	Penyusunan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Kutai Kartanegara	100.000.000	59.330.100	59,33	40.669.900
33	Penanganan Sapu Bersih (Saber Pungli)	300.000.000	251.480.286	83,83	48.519.714

## 2. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Perangkat Daerah Inspektorat sampai dengan saat ini belum ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum, namun dalam penetapan IKU pada laporan LKJiP Inspektorat memiliki 5 IKU yang dapat dirumuskan untuk mengukur kinerja serta mengevaluasi hasil indikator utama sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.

Dari indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai pada setiap tahunnya sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Utama	Alasan	Cara Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan SKPD sesuai SAP	Opini BPK RI terhadap LKPD	Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD yang didasarkan pada kesesuaian SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan, SPI yang memadai.	1. Kesuaian dengan SAP. 2. Kecukupan pengungkapan. 3. SPI yang Memadai. 4. Ketaatan terhadap Peraturan Peraturan perundang-undangan.	Opini BPK RI terhadap LKPD Kabupaten.
		Persentase Laporan keuangan SKPD sesuai SAP	Persentase Penyelesaian Laporan keuangan SKPD tepat waktu dan yang tereviu	Jumlah Laporan Keuangan SKPD ----- --- x 100 Jumlah SKPD	Hasil Pemeriksaan APIP
2.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK di rekon per semester oleh BPK	Kuantitatif : Jumlah Rekomendasi yang ditindak lanjuti ----- -- x 100 Jumlah Rekomendasi	Hasil Pemeriksaan BPK RI
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD/Pemda	Skor rata-rata Sakip SKPD	SAKIP merupakan wujud pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten atas pelaksanaan target-target kinerja, yang menyampaikan keberhasilan program yang diukur dari indikator hasil	Kualitatif : Kategori SAKIP <b>D, C, CC, B, A, AA</b>	Hasil Evaluasi SAKIP SKPD yang dilakukan oleh Inspektorat
4.	Meningkatnya kualitas Sistem	Persentase Implementasi	Memberikan Keyakinan yang	Jumlah SKPD yang	Hasil Pemetaan

No	Sasaran	Indikator Utama	Alasan	Cara Perhitungan	Sumber Data
	Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	SPIP SKPD	memadai bagi terciptanya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan terhadap aset, dan menjamin ketaatan terhadap pertauran perundang-undangan	Menerapkan SPIP. ----- -- x 100 Jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.	APIP
5.	Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase penyelesaian kasus KKN dan pengaduan masyarakat yang ditangani	Keterlibatan stakeholder /masyarakat diperlukan karena letak geografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang tersebar dalam 18 Kecamatan.	Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti ----- -- x 100 Jumlah pengaduan yang dilaporkan masyarakat.	Hasil pemeriksaan APIP

### 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Untuk dapat melaksanakan tugas pada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara sangat diperlukan dukungan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang menjadi tugas pokoknya. Pada tahun 2018 jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 92 orang.

### 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2018 Alokasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp.9.204.455.093,- terbagi pada 6 Program Kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2018 mencapai 82,33 % dari pagu anggaran APBD-P 2018 seperti tergambar pada tabel berikut :

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	PAGU DANA SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	
				( RP. )	%
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>4.02 . 4.02.01 . 01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.735.476.160</b>	<b>1.723.876.037</b>	<b>99,33</b>
1	4.02 . 4.02.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	200.000.000	195.807.237	97,90
2	4.02 . 4.02.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	250.000.000	236.628.000	94,65
3	4.02 . 4.02.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100.000.000	99.986.760	99,99
4	4.02 . 4.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	100.000.000	99.999.400	100,00
5	4.02 . 4.02.01 . 01 . 11	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	10.000.000	100,00
6	4.02 . 4.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan logistik kantor	10.000.000	10.000.000	100,00
7	4.02 . 4.02.01 . 01 . 16	Penyediaan makanan dan minuman	75.000.000	74.960.000	99,95
8	4.02 . 4.02.01 . 01 . 18	Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	390.476.160	386.216.240	98,91
9	4.02 . 4.02.01 . 01 . 19	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.000.000	49.900.000	99,80
10	4.02 . 4.02.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	550.000.000	560.378.400	101,89
<b>II</b>	<b>4.02 . 4.02.01 . 02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>475.000.000</b>	<b>470.979.178</b>	<b>99,15</b>
11	4.02 . 4.02.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	100.000.000	98.480.600	98,48
12	4.02 . 4.02.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	25.000.000	24.999.700	100,00
13	4.02 . 4.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	-
14	4.02 . 4.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100.000.000	97.499.478	97,50
15	4.02 . 4.02.01 . 02 . 45	Rehabilitasi sedang Gedung Kantor	250.000.000	249.999.400	100,00
<b>III</b>	<b>4.02 . 4.02.01 . 06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>211.678.933</b>	<b>182.842.700</b>	<b>86,38</b>
16	4.02 . 4.02.01 . 06 . 05	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev	100.000.000	82.842.700	82,84
17	4.02 . 4.02.01 . 06 . 134	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	111.678.933	100.000.000	89,54
<b>IV</b>	<b>4.02 . 4.02.01 . 15</b>	<b>Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>6.132.300.000</b>	<b>4.668.842.596</b>	<b>76,14</b>



NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	PAGU DANA SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	
				( RP. )	%
1	2	3	4	5	6
18	4.02 . 4.02.01 . 15 . 01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	1.000.000.000	932.241.000	93,22
19	4.02 . 4.02.01 . 15 . 05	Pengawasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB	50.000.000	36.889.700	73,78
20	4.02 . 4.02.01 . 15 . 06	Evaluasi Zona integritas	50.000.000	33.763.800	67,53
21	4.02 . 4.02.01 . 15 . 07	Penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu	2.630.300.000	1.344.440.400	51,11
22	4.02 . 4.02.01 . 15 . 08	Reviu Laporan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pendampingan BPK RI	1.327.000.000	1.257.452.486	94,76
23	4.02 . 4.02.01 . 15 . 09	Evaluasi SAKIP SKPD dan Pemerintah Daerah	250.000.000	244.094.610	97,64
24	4.02 . 4.02.01 . 15 . 10	Pendampingan/Monitoring LPPD dan Pemda	100.000.000	98.070.600	98,07
25	4.02 . 4.02.01 . 15 . 11	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI	200.000.000	200.000.000	100,00
26	4.02 . 4.02.01 . 15 . 12	Inventarisasi Temuan Pengawasan dan Distribusi LHP	75.000.000	75.000.000	100,00
27	4.02 . 4.02.01 . 15 . 13	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	200.000.000	200.000.000	100,00
28	4.02 . 4.02.01 . 15 . 14	Penanganan Kasus TP-TGR	100.000.000	99.990.000	99,99
29	4.02 . 4.02.01 . 15 . 15	Implementasi SPIP	150.000.000	146.900.000	97,93
<b>V</b>	<b>4.02 . 4.02.01 . 16</b>	<b>Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>250.000.000</b>	<b>220.925.738</b>	<b>88,37</b>
30	4.02 . 4.02.01 . 16 . 01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	150.000.000	142.794.668	95,20
31	4.02 . 4.02.01 . 16 . 02	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Bidang Pengembangan Keahlian Pengawasan	100.000.000	78.131.070	78,13
<b>VI</b>	<b>4.02 . 4.02.01 . 17</b>	<b>Program Koordinasi Montoring dan Evaluasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</b>	<b>400.000.000</b>	<b>310.810.386</b>	<b>77,70</b>
32	4.02 . 4.02.01 . 17 . 01	Penyusunan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Kutai Kartanegara	100.000.000	59.330.100	59,33
33	4.02 . 4.02.01 . 17 . 02	Penanganan Sapu Bersih (Saber Pungli)	300.000.000	251.480.286	83,83
<b>JUMLAH</b>			<b>9.204.455.093</b>	<b>7.578.276.635</b>	<b>82,33</b>

## 5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi sarana dan prasarana yang ada masih dapat digunakan dalam mendukung pelaksanaan pengawasan maupun kesekretariatan walaupun dalam kondisi terbatas. Namun kedepan diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pengawasan seiring dengan meningkatnya tugas dan tanggung jawab Inspektorat sebagai Pengawas Internal Pemerintah, antara lain perlunya pengadaan alat uji atau alat ukur yang digunakan sebagai penunjang pemeriksaan di lapangan.

## 6. Permasalahan dan Solusi

### 1) Permasalahan

Dengan Luasan wilayah Pengawasan dan jumlah Auditan yang terdiri dari 40 Perangkat Daerah, 18 Kecamatan serta 193 Desa yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu permasalahan tersendiri bagi kegiatan Pengawasan / pembinaan yang dilaksanakan Inspektorat dalam rangka mengemban amanat pengawasan yang dituangkan dalam Kebijakan Pengawasan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri pada point Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah.

Selain itu adanya permasalahan yang semakin kompleks dan beragam serta perubahan peraturan yang berlaku, mewajibkan Inspektorat mempersiapkan Sumber Daya Aparatur pengawas yang profesional dan handal dalam melaksanakan kegiatan pengawasan/pembinaan.

### 2) Solusi

Diperlukan adanya koordinasi yang intensif dan kerjasama yang baik dengan perangkat daerah (auditan) dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, serta mengoptimalkan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Pengawas dengan pelaksanaan diklat, baik diklat penjenjangan pengawas maupun diklat teknis pengawasan, serta memperdalam pengetahuan pengawasan melalui Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), sehingga tugas pengawasan / pembinaan dapat diselesaikan dengan lebih baik serta ditunjang anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pengawasan lebih optimal.

## 7. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Sebagaimana Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2012 tentang uraian Tugas Pejabat Struktural pada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana Inspektorat merupakan unsur pengawas Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kerja keras dan kerjasama dari seluruh Perangkat Daerah dan secara khusus peran Inspektorat sangatlah penting dalam penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam hal evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) telah melakukan evaluasi SAKIP terhadap

Perangkat Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari Hasil evaluasi tersebut score rata-rata SAKIP Perangkat Daerah adalah "B". Tindak lanjut dari Evaluasi SAKIP tersebut adanya perbaikan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hal ini sangat berpengaruh pada peningkatan score nilai rata-rata Laporan Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Diharapkan untuk tahun-tahun mendatang "Nilai Akuntabilitas Pemerintah Akan Berbanding Lurus Dengan Tingkat Kepercayaan Publik, semakin tinggi nilainya, semakin tinggi pula nilai kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintah.

Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2018 telah melakukan evaluasi/monitoring/pendampingan LPPD tahun 2018 pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka untuk mengetahui keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh Daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang direncanakan dan menilai kelengkapan data pendukung/data sekunder dalam proses penyusunan LPPD Perangkat Daerah serta memberikan saran perbaikan untuk kelengkapan data pendukung dalam penyusunan LPPD pada setiap Perangkat Daerah agar sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ada dan membantu Inspektorat Provinsi dan BPKP juga Instansi lainnya dalam proses Evaluasi LPPD pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

## 6. SEKRETARIAT DAERAH

### 1. Program dan Kegiatan

PROGRAM DAN KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		128.412.100,00	101.652.100,00	79,16	26.760.000,00
	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional Dan Daerah	128.412.100,00	101.652.100,00	79,16	26.760.000,00
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		125.000.000,00	92.400.001,00	73,92	32.599.999,00
	Fasilitasi Rapat Koordinasi/ Bimtek/ Konsultasi Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum		92.400.001,00	73,92	32.599.999,00
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		259.063.800,00	127.798.800,00	49,33	131.265.000,00
	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan di Kecamatan dan Kelurahan		58.694.400,00	43,12	77.440.000,00
	Penyusunan LPPD Sekretariat Kabupaten Kutai kartanegara	122.929.400,00	69.104.400,00	56,21	53.825.000,00
<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>		405.670.550,00	331.177.401,00	81,64	74.493.149,00
	Penataan Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	405.670.550,00	331.177.401,00	81,64	74.493.149,00
<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>		200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00

PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA
Fasilitasi Penanganan Permasalahan/ Kasus-kasus di bidang Pemerintahan Umum		200.000.000,00	100,00	0,00
<b>Peningkatan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah</b>	152.477.063,00	117.331.550,00	76,95	35.145.513,00
Konsultasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan ke Propinsi dan Pusat	152.477.063,00	117.331.550,00	76,95	35.145.513,00
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	115.000.000,00	113.792.646,00	98,95	1.207.354,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah		113.792.646,00	98,95	1.207.354,00
<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	800.000.000,00	727.794.500,00	90,97	72.205.500,00
Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kutai Kartanegara	800.000.000,00	727.794.500,00	90,97	72.205.500,00
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		189.856.239,00	92,37	15.691.900,00
Penyusunan Perjanjian Kinerja dan LAKIP Sekretariat Daerah dan Kabupaten		84.308.100,00	84,31	15.691.900,00
Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga	105.548.139,00	105.548.139,00	100,00	0,00
<b>Program Pemantapan Reformasi Birokrasi</b>	150.000.000,00	145.370.600,00	96,91	4.629.400,00
Fasilitasi Penyusunan SP Kabupaten	150.000.000,00	145.370.600,00	96,91	4.629.400,00
<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	150.000.000,00	142.263.800,00	94,84	7.736.200,00
Evaluasi Kelembagaan dan Tata Kerja Dinas dan Badan	150.000.000,00	142.263.800,00	94,84	7.736.200,00
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	200.000.000,00	173.968.955,00	86,98	26.031.045,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah		173.968.955,00	86,98	26.031.045,00
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		13.136.935,00	100,00	0,00
Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga	13.136.935,00	13.136.935,00	100,00	0,00
<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	950.000.000,00	742.480.121,00	78,16	207.519.879,00
Pendampingan Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa	150.000.000,00	83.736.600,00	55,82	66.263.400,00
Pengembangan WEBSITE JDIIH Bagian Hukum	200.000.000,00	194.889.900,00	97,44	5.110.100,00
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000,00	140.920.721,00	56,37	109.079.279,00
Penanganan Perkara Perdata, TUN dan Pidana	275.000.000,00	256.493.900,00	93,27	18.506.100,00
Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM)	75.000.000,00	66.439.000,00	88,59	8.561.000,00
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	250.000.000,00	172.556.600,00	69,02	77.443.400,00
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	250.000.000,00	172.556.600,00	69,02	77.443.400,00
<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	100.000.000,00	67.535.600,00	67,54	32.464.400,00
Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati / Peraturan Daerah Hibah Dan Bansos		67.535.600,00	67,54	32.464.400,00
<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat</b>	6.647.029.883,00	5.882.454.056,00	88,50	764.575.827,00
Fasilitasi Kegiatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara		180.977.800,00	90,49	19.022.200,00

PROGRAM DAN KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	%	SISA
	Fasilitasi Kegiatan MUI Kabupaten Kutai Kartanegara	200.000.000,00	163.875.732,00	81,94	36.124.268,00
	Fasilitasi Pendampingan Kegiatan Merah Putih di Sanga - Sanga	50.000.000,00	49.995.000,00	99,99	5.000,00
	Fasilitasi Data Bantuan Korban Penanggulangan Bencana di Kab. Kukar	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
	Monitoring Korban Penanggulangan Bencana Alam di Kab. Kukar	75.000.000,00	39.310.600,00	52,41	35.689.400,00
	Fasilitasi Manasik, Pemberangkatan dan Pemulangan Haji	650.000.000,00	640.534.140,00	98,54	9.465.860,00
	Fasilitasi Hari - Hari Besar Keagamaan	427.373.000,00	392.755.000,00	91,90	34.618.000,00
	Fasilitasi MTQ Kabupaten Kutai Kartanegara	1.625.825.000,00	1.543.607.250,00	94,94	82.217.750,00
	Fasilitasi LPTQ Kabupaten Kutai Kartanegara	1.516.081.883,00	1.387.862.325,00	91,54	128.219.558,00
	Fasilitasi Program Beasiswa Gerbang Raja Kab. Kutai Kartanegara	877.750.000,00	647.112.709,00	73,72	230.637.291,00
	Fasilitasi Asrama Mahasiswa dan Pelajar Kab. Kutai Kartanegara	650.000.000,00	545.174.700,00	83,87	104.825.300,00
	Fasilitasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	350.000.000,00	266.248.800,00	76,07	83.751.200,00
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		150.000.000,00	139.563.164,00	93,04	10.436.836,00
	Pendampingan Regulasi Bidang Ekonomi	150.000.000,00	139.563.164,00	93,04	10.436.836,00
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati		0,00	0,00	100.000.000,00
<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>		22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00
	Penyusunan Regulasi Tentang Good Corporate Governance	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00
<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>			233.488.800,00	91,56	21.511.200,00
	Koordinasi Fasilitasi dan Evaluasi Peningkatan Pengelolaan Koperasi	125.000.000,00	115.844.400,00	92,68	9.155.600,00
	Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Penyelesaian KUKP 2001,2002	130.000.000,00	117.644.400,00	90,50	12.355.600,00
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		300.000.000,00	265.360.200,00	88,45	34.639.800,00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah		265.360.200,00	88,45	34.639.800,00
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>			124.235.880,00	75,36	40.610.000,00
	Penghimpunan Laporan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah	50.000.000,00	9.390.000,00	18,78	40.610.000,00
	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga	114.845.880,00	114.845.880,00	100,00	0,00
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		97.000.000,00	51.067.700,00	52,65	45.932.300,00
	Rapat koordinasi/ konsultasi dalam/ luar daerah bidang Sumber Daya Alam		51.067.700,00	52,65	45.932.300,00
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>			78.665.000,00	100,00	0,00
	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga	78.665.000,00	78.665.000,00	100,00	0,00
<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>		332.000.000,00	131.768.100,00	39,69	200.231.900,00
	Fasilitasi penyusunan peraturan Bupati Sektor Perikanan	86.000.000,00	0,00	0,00	86.000.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	%	SISA
	Fasilitasi penyusunan dan perumusan rancangan peraturan Bupati Sektor Perternakan		0,00	0,00	60.000.000,00
	Fasilitasi Penyusunan dan Perumusan Rancangan Peraturan Bupati Sektor Perkebunan		63.625.300,00	63,63	36.374.700,00
	Fasilitasi Penyusunan dan Perumusan Rancangan Peraturan Bupati Sektor Ketahanan Pangan		68.142.800,00	79,24	17.857.200,00
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		460.935.000,00	286.426.872,00	62,14	174.508.128,00
	Penunjang Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara		286.426.872,00	62,14	174.508.128,00
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		208.872.000,00	203.072.800,00	97,22	5.799.200,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Mengikuti Bimbingan Teknis pada Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		203.072.800,00	97,22	5.799.200,00
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>			183.245.000,00	96,92	5.820.000,00
	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga	189.065.000,00	183.245.000,00	96,92	5.820.000,00
<b>Program Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</b>		130.193.000,00	72.343.500,00	55,57	57.849.500,00
	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	130.193.000,00	72.343.500,00	55,57	57.849.500,00
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		16.537.684.000,00	11.665.087.311,00	70,54	4.872.596.689,00
	Penyediaan jasa surat menyurat	25.000.000,00	24.032.000,00	96,13	968.000,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.546.000.000,00	5.543.455.705,00	84,68	1.002.544.295,00
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	500.000.000,00	428.078.000,00	85,62	71.922.000,00
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		116.116.800,00	64,51	63.883.200,00
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.146.684.000,00	1.893.913.994,00	88,23	252.770.006,00
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	340.000.000,00	335.960.400,00	98,81	4.039.600,00
	Penyediaan makanan dan minuman	2.200.000.000,00	1.523.146.970,00	69,23	676.853.030,00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah		1.800.383.442,00	39,14	2.799.616.558,00
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		5.606.916.873,00	5.364.257.653,00	95,67	242.659.220,00
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	1.277.743.225,00	1.241.308.110,00	97,15	36.435.115,00
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.878.321.100,00	1.795.041.894,00	95,57	83.279.206,00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.469.066.873,00	1.355.243.264,00	92,25	113.823.609,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman, Taman, dan Tempat Parkir Gedung Kantor dan Rumah Jabatan		775.188.185,00	99,16	6.597.490,00
	Pemeliharaan Dan Penggantian Jaringan Fingerprint Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		98.983.400,00	98,98	1.016.600,00
	Penyediaan Kartu Nama Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		98.492.800,00	98,49	1.507.200,00
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>			7.568.125.992,00	99,41	44.954.220,00

PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA
Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga	7.613.080.212,00	7.568.125.992,00	99,41	44.954.220,00
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.676.544.100,00	1.659.810.311,00	99,00	16.733.789,00
Penyediaan alat tulis kantor	1.396.544.100,00	1.380.844.084,00	98,88	15.700.016,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	280.000.000,00	278.966.227,00	99,63	1.033.773,00
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	2.788.540.450,00	121.187.100,00	4,35	2.667.353.350,00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1.908.284.550,00	0,00	0,00	1.908.284.550,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	145.000.000,00	68.921.700,00	47,53	76.078.300,00
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor	380.793.000,00	0,00	0,00	380.793.000,00
Labelisasi hasil pengadaan BMD Aset Setkab Kukar	70.000.000,00	52.265.400,00	74,66	17.734.600,00
Pengadaan souvenir/plakat	204.462.900,00	0,00	0,00	204.462.900,00
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	150.000.000,00	41.473.800,00	27,65	108.526.200,00
Sosialisasi Analisa Standar Belanja (ASB) & Standar Biaya dan Standar Harga Barang dan Jasa dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran		41.473.800,00	27,65	108.526.200,00
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		1.204.570.800,00	98,36	20.040.100,00
Penyusunan Laporan Pencapaian dan Penyusunan Suplemen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Perlengkapan.		23.096.300,00	57,74	16.903.700,00
Penataan dan Pengelolaan Barang-barang yang ada didalam Gudang Pemkab Kukar		64.079.900,00	98,58	920.100,00
Penelusuran Data serta Fisik Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Lingkup Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara		69.550.000,00	99,36	450.000,00
Penataan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) lingkup Setkab Kutai Kartanegara (12 Bagian)		64.783.700,00	99,67	216.300,00
Identifikasi Data serta Fisik Tanah milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Kecamatan pembebasan Tahun 2006 – 2008		69.350.000,00	99,07	650.000,00
Mutasi Barang Milik Daerah (BMD) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara		59.550.000,00	99,25	450.000,00
Pengangkutan barang inventaris hasil pengadaan Bagian Perlengkapan yang berada pada Gudang Setkab Kutai Kartanegara		69.550.000,00	99,36	450.000,00
Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga		784.610.900,00	100,00	0,00
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	5.440.846.020,00	5.063.988.516,00	93,07	376.857.504,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.202.364.000,00	1.071.443.075,00	89,11	130.920.925,00
Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	3.938.482.020,00	3.729.907.241,00	94,70	208.574.779,00
Management Tata Kearsipan dan Persuratan Bagian Administrasi Penatausahaan Keuangan		46.309.400,00	92,62	3.690.600,00
Rekapitulasi Berkas Posting Jurnal Persetujuan Sebelum dilakukan Posting Belanja 12 Bendahara Pengeluaran Pembntu		48.728.800,00	97,46	1.271.200,00



PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA
Setkab. Kukar				
Pengelolaan Arsip Gaji, Tunjangan, Rapel, Gaji 13, SPT Setda Kab. Kukar		50.000.000,00	100,0 0	0,00
Pengumpulan pendataan dan penataan Dokumen /Arsip Sekretariat Daerah Kab. Kukar		50.000.000,00	100,0 0	0,00
Monitoring Evaluasi Pelaporan Kondisi situasi Dokumen arsip Bagian Penatausahaan Keuangan		50.000.000,00	100,0 0	0,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Anggaran 12 Bagian Sekretariat Daerah TA.2018		17.600.000,00	35,20	32.400.000,00
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	175.000.000,00	88.845.600,00	50,77	86.154.400,00
Fasilitas Rapat Koordinasi Singkronisasi dan Konsultasi Serta Peningkatan SDM dalam Rangka tindak lanjut Instruksi Bupati, Wakil Bupati, Setda dan Assisten		15.645.600,00	15,65	84.354.400,00
Penghimpunan dan Fasilitasi usulan kegiatan 12 Bagian Sekretariat Daerah TA. 2018		73.200.000,00	97,60	1.800.000,00
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		475.826.200,00	88,94	59.173.800,00
Rekonsiliasi kas bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu		75.000.000,00	100,0 0	0,00
Pengelolaan dan Validasi data Pembayaran Gaji, Tunjangan, Rapelan dan Gaji 13 PNSD dilingkungan Setda. Kab. Kukar		47.765.300,00	95,53	2.234.700,00
Penyusunan Laporan Bulanan Kinerja Keuangan pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Penatausahaan Keuangan TA. 2018		64.913.200,00	86,55	10.086.800,00
Penunjang Kelancaran Kegiatan Bendahara Pengeluaran Bupati / Wakil Bupati		54.998.800,00	64,70	30.001.200,00
Fasilitasi Peningkatan Kinerja 12 Bagian Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam rangka pemahaman peraturan di bidang penatausahaan keuangan di lingkungan SKPD Setda. kab. Kukar		45.867.500,00	91,74	4.132.500,00
Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan 12 bagian setda. Kab. Kukar	50.000.000,00	49.898.800,00	99,80	101.200,00
Identifikasi Realisasi Belanja 12 bagian Sekretarai Daerah Kab. Kutai Kartanegara		62.382.600,00	83,18	12.617.400,00
Penunjang Penyusunan Laporan Bulanan Kinerja Keuangan pada Bendaharan Pengeluaran Setda. Kab. Kukar		75.000.000,00	100,0 0	0,00
<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>		72.750.000,00	97,00	2.250.000,00
Monitoring dan Evaluasi Penganggaran di Sekretariat Daerah Kab. Kukar		72.750.000,00	97,00	2.250.000,00
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100.000.000,00	95.955.600,00	95,96	4.044.400,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		95.955.600,00	95,96	4.044.400,00
<b>Program peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>		2.443.302.904,00	87,37	353.246.996,00
Rapat Koordinasi Unsur Muspida/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kutai		144.661.500,00	74,79	48.750.000,00



PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA
Kartanegara				
Pendampingan dan Pelayan Tugas - Tugas KDH dan Wakil KDH atau Pejabat Lain Yang Mewakili		705.782.013,00	96,49	25.669.587,00
Fasilitasi Rangkaian Kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan RI	807.257.400,00	805.758.864,00	99,81	1.498.536,00
Kunjungan Kerja / Inspeksi Serta Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Oleh Kepala Daerah Atau Pejabat Lain Yang Mewakili		787.100.527,00	73,95	277.328.873,00
<b>Program Keprotokolanan Daerah</b>	1.936.850.900,00	1.396.037.824,00	72,08	540.813.076,00
Penunjang Kegiatan Acara Pemerintah Kabupaten	421.263.900,00	412.000.400,00	97,80	9.263.500,00
Persiapan Prosesi Acara Pemerintah Kabupaten	281.471.700,00	280.822.200,00	99,77	649.500,00
Fasilitasi Tamu dan Prosesi Acara Pemerintah Kabupaten	892.263.900,00	436.781.211,00	48,95	455.482.689,00
Fasilitasi Paduan Suara Pemerintah Daerah		266.434.013,00	77,94	75.417.387,00
<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	2.337.207.025,00	2.011.428.671,00	86,06	325.778.354,00
Publikasi Event daerah melalui media cetak dan online	335.000.000,00	334.999.500,00	100,00	500,00
Pendampingan dalam rangka pembuatan bahan dokumentasi dan publikasi kegiatan pemkab		804.786.221,00	94,46	47.213.779,00
Publikasi Program dan Event daerah melalui media elektronik	185.000.000,00	163.750.000,00	88,51	21.250.000,00
PPID Pembantu Sekretariat Daerah	75.000.000,00	68.964.000,00	91,95	6.036.000,00
Pengelolaan Data dan Informasi Daerah	100.000.000,00	90.900.000,00	90,90	9.100.000,00
Pengelolaan informasi melalui media cetak dan media display informasi	164.360.100,00	154.838.400,00	94,21	9.521.700,00
Pameran Pembangunan Merah Putih Sangsanga dan Pawai Pembangunan		118.190.550,00	98,49	1.809.450,00
Pengoperasian TV Kabel protokol dan komunikasi publik	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
Pengelolaan Halaman Website Protokol dan komunikasi publik	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00	0,00
Press Gathering dan Kunjungan Kerja Media		0,00	0,00	230.846.925,00
<b>Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>		341.516.000,00	54,64	283.484.000,00
Koordinasi dan Fasilitasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
Rapat Koordinasi Peningkatan UMKM	125.000.000,00	32.442.000,00	25,95	92.558.000,00
Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Tim Kualitas Air Baku dan Air Produksi PDAM Tirta Mahakam Kutai Kartanegara		107.034.400,00	71,36	42.965.600,00
Koordinasi Pengawasan dan Penindakan Peredaran Pangan dan Barang Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kab. Kukar		76.679.600,00	76,68	23.320.400,00
Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Kutai Kartanegara		43.010.000,00	57,35	31.990.000,00
Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)		82.350.000,00	82,35	17.650.000,00
<b>Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan</b>		371.527.810,00	61,41	233.472.190,00

PROGRAM DAN KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	%	SISA
<b>Kebijakan KDH</b>					
	Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		176.967.710,00	58,02	128.032.290,00
	Fasilitasi Koordinasi Infrastruktur Swasta	45.000.000,00	23.665.200,00	52,59	21.334.800,00
	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kab Kukar		135.065.500,00	67,53	64.934.500,00
	Review Renstra SKPD Sekretariat (12 Bagian)	55.000.000,00	35.829.400,00	65,14	19.170.600,00
<b>Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>			283.534.100,00	77,26	83.465.900,00
	Evaluasi Implementasi Regulasi (Perda/Perbup) bidang Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan		58.582.000,00	96,04	2.418.000,00
	Fasilitasi Koordinasi Penanganan Permasalahan Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup		90.908.400,00	86,58	14.091.600,00
	Koordinasi Implementasi Regulasi (Peraturan Daerah / Peraturan Bupati) Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan		72.885.700,00	99,84	114.300,00
	Pengawasan Dan Pemantauan Pengelolaan Program CSR (Corporate Social Responsibility)		61.158.000,00	47,78	66.842.000,00
<b>Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah</b>			106.394.800,00	96,72	3.605.200,00
	Manajemen Tata Kearsipan Dokumen Perjalanan Dinas	30.000.000,00	26.394.900,00	87,98	3.605.100,00
	Fasilitasi Pengelolaan Administarsi Hibah Bansos 18 Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara		25.000.000,00	100,00	0,00
	Pengelolaan Dan Validasi Data Kehadiran PNS Pada 12 Bagian Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		30.000.000,00	100,00	0,00
	Manajemen Tata Kearsipan Dokumen PNS Pada 12 Bagian Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		24.999.900,00	100,00	100,00
<b>Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah</b>			1.036.164.641,00	82,03	227.035.359,00
	Upgrade Analisa Standar Belanja (ASB)	250.000.000,00	227.864.900,00	91,15	22.135.100,00
	Penyusunan Standar Biaya dan Standarisasi Satuan Harga Barang Dan Jasa		234.751.050,00	67,07	115.248.950,00
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan DKPBMD		100.469.000,00	54,84	82.731.000,00
	Fasilitasi Pendampingan Penyusunan Regulasi	150.000.000,00	145.195.291,00	96,80	4.804.709,00
	Fasilitasi Penghapusan Barang Milik Daerah	65.000.000,00	64.550.000,00	99,31	450.000,00
	Fasilitasi Penataan dan Pengelolaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 milik Setkab Kutai Kartanegara		124.234.400,00	99,39	765.600,00
	Pengembangan Sistem Aplikasi Manajemen Barang Inventaris Milik Daerah Setkab Kutai Kartanegara		69.550.000,00	99,36	450.000,00
	Pengembangan Sistem Aplikasi Manajemen Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4 milik Setkab		69.550.000,00	99,36	450.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	%	SISA
Kutai Kartanegara					
<b>JUMLAH</b>		65.304.444.730,0 0	52.522.592.553,0 0	80,43	12.781.852.177,0 0

## 2. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memegang peranan penting dalam pemberian pelayanan publik dan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan dan pengambilan kebijakan daerah, berperan sebagai pemimpin dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik sejalan dengan prinsip-prinsip good governance serta membangun kompetensi Sumber Daya Aparatur untuk menciptakan kinerja yang tinggi. Adapun kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tergambar didalam LAKIP Tahun 2015 menyebutkan bahwa secara keseluruhan kinerjanya memperoleh predikat cukup baik.

### Capaian Kinerja Tahun 2011 – 2015

No.	Sasaran	Indikator Kinerja utama	Satuan	Realisasi				
				2011	2012	2013	2014	2015
1.	Terlaksananya penataan daerah otonomi dan penegasan Batas Kab/Kota/Kec	Pelimpahan Kewenangan dari bupati kepada Camat	bidang	7	9	12	14	13
		Penegasan batas antar Kab/Kota/Kec di Kekar :						
		1. Antar Kab/Kota/Kec						
		- Pelacakan	km	100	125	150	220,95	2
		- Pemasangan Pilar	PBHU	10	15	20	26	20
		- Tapal Batas	Desa/ Kel  Kecamatan	10	15	20	26	142  5
2.	Terwujudnya administrasi di bidang Pemerintahan	Prosentase kecamatan yang menerapkan Paten (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)	%	50	75	85	100	100
		Prosentase Proses Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, PAW, Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Yang memenuhi standar ketentuan yang berlaku	%	100	100	100	100	100
		Jumlah MoU kerjasama antar Pemerintah Kab/Kec dengan pihak III	MoU	5	10	15	28	36
		3.	Terwujudnya inventarisasi pertanahan secara optimal	Prosentase tanah milik Kabupaten yang diinventarisir	%	25	30	70
Prosentase penurunan sengketa lahan	%			10	20	50	75	85

No.	Sasaran	Indikator Kinerja utama	Satuan	Realisasi				
				2011	2012	2013	2014	2015
4.	Terciptanya dokumentasi dan informasi hukum yang cepat dan tepat dengan menggunakan teknologi informasi	Prosentase produk hukum yang didokumentasikan	%	50	60	75	80	100
		Prosentase produk hukum daerah yang dipublikasikan	%	25	50	50	65	100
5.	Meningkatkan kualitas koordinasi dalam bidang Sumber Daya Alam	Prosentase regulasi yang dilaksanakan oleh SKPD	%	50	60	70	75	100
6.	Meningkatkan Kualitas Koordinasi Bidang Ekonomi	Prosentase regulasi yang dilaksanakan oleh SKPD	%	75	80	90	100	100
7.	Terlaksananya pengendalian Pembangunan Daerah secara terencana, terkoordinasi dan komprehensif	Prosentase Program/Kegiatan dalam Renstra Setda terhadap Renja Bagian	%	75	75	80	90	100
8.	Terwujudnya sistem dan fasilitasi pengelolaan keuangan	Prosentase penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu	%	75	80	85	90	100
		Prosentase penyerapan anggaran	%	80	90	90	90	80
9.	Terwujudnya pelayanan prima di bidang administrasi umum	Prosentase layanan dan unit kerja yang terlayani	%	75	80	90	96,95	97
10	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah secara optimal	Prosentase Asset Sekretariat yang diinventarisir melalui SIMBADA	%	80	85	90	100	100
11	Terwujudnya pelayanan kehumasan	Prosentase jumpa pers/peliputan dengan wartawan	%	100	100	100	100	100
		jumlah kontrak halaman dengan media	%	100	100	100	100	100
12	Terlaksananya pelayanan keprotokolan	Prosentase pengaturan acara/upacara dan tamu Kabupaten Kukar	%	100	100	100	100	100
13	Meningkatkan Kualitas Koordinasi Bidang Kesra	Prosentase regulasi yang dilaksanakan oleh SKPD	%	50	60	60	65	80
		Jumlah individu / keluarga / masyarakat / lembaga / organisasi masyarakat yang menerima BANSOS	%	100	100	100	100	100
			%	90	100	100	-	-
		Prosentase Penerima Beasiswa	%	100	100	100	-	100
14	Terlaksananya Penataan Organisasi, ketatalaksanaan dan peningkatan kinerja organisasi	Prosentase Indikator SPM yang diterapkan oleh SKPD	%	50	70	75	85	95
		Prosentase SKPD Kabupaten yang menyusun SOP	%	35	50	60	80	95
		Prosentase SKPD Kabupaten yang telah dievaluasi SOTK	%	50	60	70	75	100
		Prosentase SKPD yang melakukan analisis beban kerja dalam rangka menyusun formasi jabatan	%	25	50	75	85	100

No.	Sasaran	Indikator Kinerja utama	Satuan	Realisasi				
				2011	2012	2013	2014	2015
		Prosentase Laporan Akuntabilitas kinerja yang sesuai aturan	%	25	50	75	80	90

Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diukur melalui 14 sasaran dan 30 Indikator Kinerja Utama yang rata-rata hasil capainnya adalah 99,59% dengan kriteria Sangat Berhasil. Keberhasilan capaian kinerja adalah merupakan hasil kerjasama semua aparatur dilingkup Sekretariat Daerah dan secara umum semua SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Upaya pembenahan dan perbaikan oleh Sekretariat daerah dalam meningkatkan hasil capaian kinerja salah satunya adalah dengan melakukan sertifikasi ISO 9001:2008 pada semua indikator kinerja di semua bagian administrasi.

Untuk pelaksanaan dan pencapaian kinerja tahun 2021 akan terus dilakukan upaya evaluasi dan monitoring terhadap semua capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, serta akan melakukan review terhadap semua indikator dalam rangka mempersiapkan perencanaan untuk Renstra tahun yang akan datang seiring dengan mulainya RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016- 2021.

### 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 berjumlah 710 orang yang tersebar di 3 (tiga) Asisten, 12 (dua belas) Bagian, dan 36 (tiga puluh enam) Sub Bagian dengan rincian terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.56**

Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Uraian	Jumlah PNS
1	Sekretaris Daerah	0
2	Asisten Sekretariat Daerah	3
3	Staf Ahli	3
4	Bagian Pemerintahan	42
5	Bagian Hukum	39
6	Bagian Pembangunan	34
7	Bagian Perekonomian	36
8	Bagian Sumber Daya Alam	37
9	Bagian Umum	160
10	Bagian Perlengkapan	74
11	Bagian Penatausahaan Keuangan	70
12	Bagian Kesejahteraan Rakyat	54
13	Bagian Protokol dan Komunikasi Publik	61
14	Bagian Organisasi	27
15	Bagian Layanan Pengadaan	70
	<b>Jumlah</b>	<b>710</b>

Ditinjau dari sisi pendidikannya, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar masih berpendidikan SLTA yaitu sebanyak 395 orang kemudian diikuti dengan pendidikan S1 (sarjana) sebanyak 202 orang. Kondisi ini tentunya perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah, mengingat globalisasi sangat menuntut produktivitas dan daya saing yang tinggi sehingga diperlukan upaya peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur yang dimiliki, salahsatunya dapat melalui pengiriman PNS untuk mengikuti pendidikan lanjutan. Dengan demikian, diharapkan aparatur pemerintah di lingkungan Sekretariat Daerah berpendidikan minimal S1 (sarjana) yang memiliki keahlian substantif, teknis, dan administratif, serta kemampuan manajerial yang unggul. Sumberdaya manusia dalam organisasi perlu dikembangkan sampai pada taraf tertentu sesuai dengan pengembangan organisasi itu, sebab apabila organisasi ingin berkembang seharusnya diikuti oleh pengembangan sumber daya manusianya.

Sumberdaya aparatur dengan kompetensi yang tinggi akan memudahkan pelaksanaan tugas organisasi, dan akan memacu kinerja organisasi ke arah pencapaian tujuan organisasi. Oleh karenanya, pengembangan sumberdaya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan merupakan bentuk investasi organisasi (human investment).

#### **4. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 65.304.444.730,00, Lalu Realisasi Anggaran sebesar Rp. 52.522.592.553,00 atau persentase realisasi keuangan 80,43% Kemudian Sisa Dana Anggaran sebesar Rp. 12.781.852.177,00,-.

#### **5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Berdasarkan Renstra Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, ditetapkan 23 Program yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Namun, dalam perkembangannya untuk tahun 2018, Setkab. Kutai Kartanegara hanya melaksanakan 18 Program Pembangunan yang ditetapkan dalam Renja Tahun Anggaran 2018. Terdiri dari 16 program yang sesuai dengan Renstra 2016-2021 dan 2 program baru diluar Renstra 2016-2021. Sementara 7 program lain tidak dilaksanakan di tahun 2018. Hal ini terkait antara lain, karena adanya perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana Bagian Pertanahan tidak lagi berada dalam struktur OPD Setkab, namun sudah berdiri sendiri sebagai OPD yaitu Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, dan, adanya Bagian yang baru terbentuk, yaitu Bagian Layanan Pengadaan, serta kondisi defisit keuangan juga turut menjadi salah satu sebab tidak terlaksananya beberapa program dan kegiatan. (Daftar Kesesuaian Perencanaan Pembangunan terlampir).

Untuk mengatasi ketidaksesuaian perencanaan pembangunan tersebut, di tahun 2018 Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah koordinasi Bagian Pembangunan telah melaksanakan revisi Renstra Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 yang akan terbit di tahun 2019.

## 6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu penunjang utama dalam upaya meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sarana dan prasarana ini digunakan antara lain untuk :

- a) Menunjang kegiatan ketata usahaan/administrasi perkantoran;
- b) Menunjang peningkatan kualitas SDM Aparat;
- c) Menunjang kegiatan Rapat/Konsultasi/Fasilitasi/Sosialisasi;
- d) Dan lain-lain.

Secara rinci, sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang fungsi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Gedung perkantoran Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berada di Pusat Kota Tenggarong, tepatnya di Kelurahan Timbau dengan 3 (tiga) buah bangunan besar, dimana gedung utama berada di tengah-tengah dengan 4 (empat) lantai dan diapit 2 (dua) gedung di sebelah kiri dan kanan gedung utama masing-masing 3 (tiga) lantai. Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara juga dilengkapi dengan gedung lelang dan gudang dengan satu lantai, klinik kesehatan 2 (dua) lantai, ruang dapur, pos Satpol PP, serta masjid.
2. Ruang kerja, yang terdiri dari ruang kerja Bupati, ruang kerja Wakil Bupati, ruang kerja Sekretaris Daerah, ruang kerja Asisten, serta ruang kerja Bagian-Bagian.
3. Ruang Rapat di tiap-tiap gedung.
4. Ruang Tamu, untuk menerima kunjungan tamu baik dari dalam daerah maupun luar daerah.
5. Aula, untuk mengadakan berbagai pertemuan atau rapat koordinasi.
6. Sarana mobilitas untuk menunjang kegiatan operasional di lapangan dalam rangka koordinasi, fasilitasi, dan sosialisasi baik berupa kendaraan roda 4 (empat) dan maupun kendaraan roda 2 (dua).
7. Lahan parkir yang cukup luas di sayap kiri dan kanan serta belakang gedung.
8. Perlengkapan dan peralatan kantor dalam rangka kemudahan pelaksanaan tugas.

Dengan kondisi tercukupinya sarana dan prasarana yang tersedia dirasakan cukup memadai dan mampu menunjang pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah sebagai streamlining/supporting unit sudah seharusnya dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap, modern, dan memadai. Meskipun demikian, seiring dengan perkembangan IPTEK dan modernisasi zaman, maka penambahan, penggantian, dan penyesuaian sarana dan prasarana tetap saja diperlukan demi menunjang pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah.

## 7. Permasalahan dan Solusi

Struktur Organisasi Sekretariat kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari 12 (dua belas) bagian-bagian dengan kondisi bangunan kantor yang ada, dimana sesuai dengan tata kelola ruangan masing-masing Asisten membawahi 3 (tiga) bagian dan keberadaannya menjadi satu gedung, namun karena faktor jumlah pegawai dan juga ruangan kerja yang terbatas, maka ada satu bagian yaitu Bagian Administrasi Perlengkapan keberadaannya berada diluar gedung utama yaitu bersebelahan dengan gedung/ruang lelang, hal inipun tidak efektif dalam



melakukan koordinasi internal dilingkungan Sekretariat.

Oleh sebab itu guna menyatukan bagian dalam satu gedung, maka solusinya perlu dibangun atau penataan ruangan dengan memberlakukan hasil analisa kebutuhan pegawai bagi semua bagian dilingkungan Sekretariat kabupaten Kutai Kartanegara sehingga jumlah pegawai dengan ketersediaan ruang kerja ideal.

## 7. SEKRETARIAT DPRD

### 1. Program dan Kegiatan

No	Program dan Kegiatan	Target	Fisik	Keuangan	Perse ntase
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
1	Penyediaan jasa surat menyurat	800 Surat Keluar	800 Surat Keluar	Rp 10.441.000	100%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48 Rekening	48 Rekening	Rp 1.712.337.600	100%
7	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	72 Orang	72 Orang	Rp 782.535.200	100%
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	11643	11643	Rp 856.719.375	100%
10	Penyediaan alat tulis kantor	4028 Buah	4028 Buah	Rp 702.277.000	100%
14	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	39202 exemplar	39202 exemplar	Rp 206.563.400	100%
16	Penyediaan makan dan minum	9504Kalen g/ Kemasan/K otak/Botol	9504Kaleng/ Kemasan/Kot ak/Botol	Rp 925.423.000	100%
18	Penyediaan jasa Administrasi Teknis Perkantoran	179 Orang/Bula n	179 Orang/Bulan	Rp 2.499.099.840	100%
19	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	3182 Jenis	3182 Jenis	Rp 435.730.800	100%
20	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	218 Orang/hari	218 Orang/hari	Rp 840.995.400	100%
37	Penyediaan Jasa Pamdal Sekretariat DPRD	10 Orang	10 Orang	Rp 405.048.460	100%
39	Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	4 Orang	4 Orang	Rp 99.517.300	100%
40	Penyediaan Perlengkapan Kegiatan Hari-hari tertentu	2 Even	2 Even	Rp 601.095.700	100%
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1196 Item	1196 Item	Rp 519.312.500	100%
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	268 Paket/Jenis	268 Paket/Jenis	Rp 1.241.267.881	100%
24	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	4 Unit	4 Unit	Rp 644.732.200	100%
29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	10 Unit	10 Unit	Rp 168.910.000,00	100%
51	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	13 Unit	13 Unit	Rp 930.514.000,00	100%
52	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas dan gedung kantor	200 Unit	200 Unit	Rp 852.275.000,00	100%
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan disiplin aparatur</b>				
8	Penyediaan pakaian dinas anggota DPRD dan pengadaan pakai hari-hari tertentu	168 Stel	168 Stel	Rp 123.430.000,00	100%



No	Program dan Kegiatan	Target	Fisik	Keuangan	Perse ntase
<b>4.</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>				
	Penyusunan pelaporan keuangan	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 101.578.800,00	100%
	Penyusunan pelaporan TAPKIN, LAKP/LKPJ	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 149.358.300,00	100%
	Revisi Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 174.358.300,00	100%
	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga	7 Kontrak	7 Kontrak	Rp 2.258.624.500,00	100%
<b>5.</b>	<b>Program pengembangan data /informasi</b>				
	Website DPRD Kutai Kartanegara	1 System Website	1 System Website	Rp 100.000.000,00	100%
	Penyebarluasan informasi kegiatan DPRD Pada Media Massa	8 Media Massa dan Elektronik	8 Media Massa dan Elektronik	Rp 4.500.000.000,00	100%
	Pembuatan Aplikasi informasi produk DPRD	1 Software	1 Software	Rp 168.140.000,00	100%
	Press Gathering	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Rp 71.766.427,00	100%
	Peliputan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Rp 50.000.000,00	100%
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</b>				
	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	180 Kali	180 Kali	Rp 1.220.950.000,00	100%
	Rapat - rapat alat kelengkapan dewan	240 Kali	240 Kali	Rp 1.270.200.000,00	100%
	Rapat - rapat paripurna	73 Kali	73 Kali	Rp 1.608.784.000,00	100%
	Reses Anggota Dewan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Rp 4.500.000.000,00	100%
	Rapat-rapat Kerja Alat Kelengkapan Komisi I	38 Kali	38 Kali	Rp 3.250.000.000,00	100%
	Rapat-rapat Kerja Alat Kelengkapan Komisi II	42 Kali	42 Kali	Rp 3.450.000.000,00	100%
	Rapat-rapat Kerja Alat Kelengkapan Komisi III	38 Kali	38 Kali	Rp 3.400.000.000,00	
	Rapat-rapat Kerja Alat Kelengkapan Komisi IV	19 Kali	19 Kali	Rp 3.250.000.000,00	100%
	Desiminasi, Sosialisasi, Uji Publik Raperda dan Non Raperda	1 Raperda/N on Raperda	1 Raperda/No n Raperda	Rp 217.493.400,00	100%
	Penyusunan Raperda Prakasa dan Non Raperda	2 Raperda	2 Raperda	Rp 1.500.000.000,00	100%
	Study Komperatif Pansus Raperda, Inisiatif dan Non Raperda	4 Kali	4 Kali	Rp 5.818.206.200,00	100%
	Rapat-rapat Koordinasi bagi Pimpinan	37 Kegiatan	37 Kegiatan	Rp 4.550.000.000,00	100%
	Semina, Workshop dan Lokakarya	90 Orang	90 Orang	Rp 1.479.998.500,00	100%
	Fasilitas Pelayanan Keprotokoleran Pimpinan dan Anggota DPRD	32 Kali	32 Kali	Rp 371.550.000,00	100%
	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 325.000.000,00	100%
	KONSULTASI DAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN	117 Orang/Hari	117 Orang/Hari	Rp 603.432.000,00	100%

## 2. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI 2017	% PENCAPAIAN	KESIMPULAN
<b>Meningkatnya Pelayanan Pelaksanaan Rapat-Rapat Anggota DPRD Kab. Kukar.</b>	Prosentase Penyelenggara Rapat-Rapat yang Sesuai dengan Jadwal	100%	100%	100%	-Jumlah Rapat-rapat tahun 2017. 463 kali
	Jumlah Peraturan Perundangan yang disahkan	100%	100%	100%	-Peraturan daerah yang disahkan 2017 12 Perda

Dari data tabel Pencapaian kinerja diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

### ➤ Uraian Capaian Kinerja Tahunan

Prosentase Rapat-rapat yang Sesuai dengan jadwal tahun 2017. dapat direalisasikan sejumlah 463 rapat, yang terbagi atas jumlah, rapat-rapat alat kelengkapan dewan sejumlah 200 rapat, Rapat-rapat Hearing dan koordinasi ( Rapat Dengar Pendapat ) sejumlah 153, Rapat/Acara Menerima Tamu sejumlah 31 kali, Demo sejumlah 12 kali dan Rapat Paripurna Sejumlah 67 kali.

Jumlah Peraturan perundangan-undangan yang disahkan 12 Perda dan target tahun 2017. Sebanyak 24 Raperda.

## 3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

### ➤ Anggaran dan Realisasi

Anggaran Belanja Sekretariat DPRD tahun 2017, dapat dijelaskan sebagai berikut;

- 1) Pagu Belanja tidak langsung sejumlah Rp.19.543.131.247,51 dan Pagu anggaran belanja pegawai 2.360.445.925 dari pagu tersebut sudah direalisasikan Rp. 2.019.459.200
- 2) Pagu Belanja Barang dan jasa, Pagu anggaran Rp. 64.415.504.523 dan sudah direalisasikan Rp.57.545.518.777
- 3) Pagu Belanja Modal Rp.1.902.368.081 sudah direalisasi sebesar Rp 1.812.865.375.
- 4) totalnya belanja anggarannya Rp.68.678.318.529. yang sudah realisasi belanja sebesar Rp.61.352.843.352.

#### 4. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Jumlah sarana dan prasarana terdiri dari 201 Item dihitung berdasarkan pembelian sejak tahun 2011 sampai 2017. Keseluruhan sarana dan prasarana dalam keadaan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya, rincian inventarisasi barang terdapat dalam lampiran 3.

Sarana DPRD Kutai kartanegara yang berupa gedung diuraikan secara singkat sebagai berikut :

- a) Ruang Ketua DPRD dan Masing-masing wakil ketua telah memadai;
- b) Ruang Fraksi DPRD dalam kondisi telah membaik dan memadai, dalam tahun ke tahun ruang rapat kegiatan prasarana telah mencukupi untuk kegiatan Rapat-rapat.
- c) Masing-masing komisi telah memiliki ruangan yang dapat digunakan untuk rapat dan pertemuan komisi sekaligus sebagai ruang kerja, kondisi sudah baik ruang sudah memadai, memulai kegiatan rapat-rapat;
- d) Ruang alat kelengkapan DPRD lainnya sudah tercukupi diantaranya : ruang banmus, ruang banleg, ruang banggar dan ruang badan kehormatan tersebut sudah ditempati terselesaikan pengerjaannya pada Tahun Anggaran 2013 lalu, dan digunakan untuk kegiatan Rapat-rapat seperti biasanya.
- e) Ruang Sekwan dan kepala bagian yang terdiri atas :
  1. Ruang Kabag Umum
  2. Ruang Kabag TU
  3. Ruang Kabag keuangan
  4. Ruang Kabag Persidangan
  5. Ruang Kasubbag Kasubbag
  6. Ruang Bendahara Pengeluaran

Secara garis besar semua ruangan Pejabat Struktural dan Fungsional sudah tersedia namun hanya fasilitas ruangan saja yang masih belum memadai, terutama ruangan para Kasubbag-Kasubbag.

#### 5. Permasalahan dan Solusi

- a) Terjadinya perubahan anggaran berdasarkan Rasionalisasi Anggaran pada APBD sehingga sangat berpengaruh terhadap perencanaan kerja dan penetapan anggaran kinerja SKPD;
- b) Masih terbatasnya data dan informasi pendukung dalam proses kinerja organisasi, sehingga mempengaruhi penyusunan perencanaan kerja dalam memberikan pelayanan terhadap DPRD dan Sekretariat DPRD;
- c) Masih lemahnya kemampuan dan kurangnya pengetahuan para pengelola kegiatan, sehingga berpengaruh terhadap keterlambatan penyampaian SPJ kegiatan maupun penyampaian laporan-laporan yang lainnya ;
- d) Tidak tersediannya Anggaran yang cukup untuk menunjang Sumber Daya Manusia yang Profesional dalam penyusunan LPPD Set. DPRD;
- e) Kurangnya perhatian terhadap penyusunan LPPD SKPD, sehingga menyulitkan sekali bagi Tim Penyusun dalam membuat/ menyusun LPPD SKPD,
- f) Tidak tersediannya sarana dan prasarana ruangan kearsipan yang memadai,

khususnya untuk sub bagian Anggaran dan program sehingga berkas-berkas arsip menumpuk tidak tertata dengan baik dan rapi, sehingga sangat menghambat pekerjaan sewaktu membutuhkan arsip-arsip yang diperlukan,

- g) Tidak tersedianya tempat parkir kendaraan yang memadai, sehingga tidak tertata dengan baik beberapa kendaraan yang parkir dilingkungan kantor Set. DPRD Kab. Kutai Kartanegara.

Untuk memecahkan masalah tersebut ada beberapa solusi yang perlu ditindaklanjuti :

- Membangun komunikasi dan koordinasi dengan SKPD teknis yang memiliki kewenangan dan kompetensi dibidangnya.
- Melakukan peningkatan disiplin kerja pegawai dilingkungan Set. DPRD serta pengawasan internal dan evaluasi kegiatan secara berkala dan berjenjang sesuai struktur organisasi dan Tupoksi masing-masing Bagian dan Sub Bagian.
- Meningkatkan kinerja pegawai Set. DPRD dengan mengikutsertakan para pegawai untuk mengikuti berbagai kegiatan pelatihan teknis yang sesuai dengan bidang dan keahliannya,
- Mengkoordinasikan dengan bagian yang terkait serta mengkomunikasikan dengan kepala SKPD maupun unsur pimpinan DPRD,
- Mengkoordinasikan dengan bagian maupun sub bagian yang berkaitan dengan data maupun dokumen yang diperlukan dalam penyusunan LPPD Set. DPRD,
- Mengkoordinasikan dengan bagian maupun kepala SKPD, agar tempat tempat penyimpanan arsip maupun dokumen dapat tertata dengan baik dan rapi,
- Mengkoordinasikan dengan bagian maupun kepala SKPD, agar tempat parkir kendaraan dapat tertata dengan baik dan rapi,

## 8. SEKRETARIAT KOPRI

### 1. Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi			
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan	
					Rp	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	20,000,000.00	26,000,000.00	100.00%	2.17%	19,029,398.00	73.19%
<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	112,108,960.00	112,108,960.00	100.00%	9.37%	112,031,660.00	99.93%
<b>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</b>	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%	1.25%	15,000,000.00	100.00%
<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	120,867,326.00	120,867,326.00	100.00%	10.10%	120,114,600.00	99.38%
<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	50,000,000.00	35,000,000.00	100.00%	2.92%	34,955,000.00	99.87%
<b>Penyediaan Jasa Administrasi</b>	365,642,640.00	365,642,640.00	100.00%	30.55%	358,885,140.00	98.15%

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi			
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan	
					Rp	%
Tekhnis Perkantoran						
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16,614,605.00	25,614,605.00	100.00%	2.14%	25,614,605.00	100.00%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	141,046,640.00	141,046,640.00	100.00%	11.78%	140,920,000.00	99.91%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	0.84%	8,971,900.00	89.72%
Pengadaan Obat-Obat dan Perbekalan Kesehatan	64,818,800.00	64,818,800.00	100.00%	5.42%	64,808,855.00	99.98%
Pengadaan Travo dan Jaringan untuk Perumahan KORPRI	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00%	16.71%	196,041,200.00	98.02%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
Fasilitasi Safari Keagamaan	80,805,690.00	80,805,690.00	100.00%	6.75%	80,426,400.00	99.53%
	<b>1,196,904,661.00</b>	<b>1,196,904,661.00</b>		<b>100.00%</b>	<b>1,176,798,758.00</b>	<b>98.32%</b>

## 2. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun Sekretariat Korpri Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai jumlah PNS sebanyak 25 orang yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup memadai.

- Golongan IV : 3 orang
- Golongan III : 7 orang
- Golongan II : 15 orang
- T. Kontrak : 22 orang

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kutai Kartanegara adalah jumlah keseluruhan karyawan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS (Tenaga Harian Lepas),

### 3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Uraian	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
		Rp	%	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	26,000,000.00	19,029,398.00	73.19%	6,970,602.00
<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	112,108,960.00	112,031,660.00	99.93%	77,300.00
<b>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</b>	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%	0.00
<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	120,867,326.00	120,114,600.00	99.38%	752,726.00
<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	35,000,000.00	34,955,000.00	99.87%	45,000.00
<b>Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran</b>	365,642,640.00	358,885,140.00	98.15%	6,757,500.00
<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	25,614,605.00	25,614,605.00	100.00%	0.00
<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah</b>	141,046,640.00	140,920,000.00	99.91%	126,640.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	10,000,000.00	8,971,900.00	89.72%	1,028,100.00
<b>Pengadaan Obat-Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	64,818,800.00	64,808,855.00	99.98%	9,945.00
<b>Pengadaan Travo dan Jaringan untuk Perumahan KORPRI</b>	200,000,000.00	196,041,200.00	98.02%	3,958,800.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
<b>Fasilitasi Safari Keagamaan</b>	80,805,690.00	80,426,400.00	99.53%	379,290.00
	<b>1,196,904,661.00</b>	<b>1,176,798,758.00</b>	<b>98.32%</b>	20,105,903.00

### 4. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Ketersediaan sarana dan prasarana kelengkapan kantor sangat menentukan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Korpri Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki sangatlah minim sehingga sangatlah memungkinkan untuk dilakukan penambahan sarana dan prasarana kelengkapan kantor Sekretariat Korpri Kabupaten Kutai Kartanegara.

### 5. Permasalahan dan Solusi

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Korpri Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan program yang telah ditetapkan oleh dewan pengurus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada, namun di dalam melaksanakan kewenangan tersebut melalui kegiatan-kegiatan tersebut dirasakan adanya permasalahan sebagai berikut :

1. Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhannya.
2. Penempatan SDM belum sesuai kompetensinya.
3. Belum optimalnya pelaporan kinerja secara periodik.
4. Sarana dan Prasarana kurang memadai

Pada pelaksanaannya di lapangan solusi yang diambil Sekretariat Dewan Pengurus Korpri pada permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penerapan budaya kerja.
2. Peningkatan dan penerapan standar pelayanan
3. manajemen kinerja yang mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi

aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima dari kinerja organisasi publik.

### III. RINGKASAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

#### 1. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

##### 1. Program dan Kegiatan

Dalam hal pencapaian program dan kegiatan tahun anggaran 2018 dengan rincian realisasi kinerja sebesar 97,99 % dan realisasi keuangan sebesar 96,08 %, untuk selengkapnya terlampir dalam laporan ini. Secara keseluruhan pencapaian renja dan renstra masih ada yang belum memenuhi target dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pada kegiatan generik terdapat penyesuaian belanja, kegiatan yang ditunda dan adanya THL yang mengundurkan diri
- b) Pada kegiatan non generik terdapat jumlah peserta yang tidak mencapai target dan berkurangnya jumlah ormas yang difasilitasi

Capaian target program dan kegiatan akan ditingkatkan lagi pada tahun 2019 mendatang, secara keseluruhan capaian kinerja tahun 2018 dapat disampaikan sebagai berikut :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan target renja 100% dan capaian 98,37%, dengan kegiatan :
  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, target renja 500 lembar capaian renja 406 rekening (81,20%)
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, target renja 146 rekening capaian renja 144 rekening (98,63%)
  3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional, target renja 42 unit capaian renja 35 unit (83,33%)
  4. Penyediaan jasa administrasi keuangan, target renja 180 o/b capaian renja 180 o/b (100%)
  5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, target renja 25 unit capaian renja 20 rekening (80,00%)
  6. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran, target renja 264 orang/bulan capaian renja 258 orang/bulan (97,73%)
  7. Penyediaan alat tulis Kantor, target renja 27 item capaian renja 27 item (100%)
  8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, target renja 5 cetakan capaian renja 5 cetakan (100%)
  9. Penyediaan makanan dan minuman, target renja 127 paket capaian renja 127 paket (100%)
  10. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah, target renja 99 o/h capaian renja 99 o/h (100%)
- b) Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur, dengan target renja 100% dan capaian renja 100%, dengan kegiatan :
  1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, target renja 34 unit capaian renja 34 unit (100%)

- c) Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan, dengan target renja 100% dan capaian renja 100%, dengan kegiatan :
  1. Penyusunan Laporan Keuangan, target renja 5 dokumen capaian renja 5 dokumen (100%)
  2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev, target renja 6 dokumen capaian renja 6 dokumen (100%)
- d) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan target renja 100% dan capaian renja 100%, dengan kegiatan :
  1. Fasilitasi Kewaspadaan di Daerah, target renja 7 dokumen capaian renja 7 dokumen (100%)
  2. Pemantauan Dampak Kenaikan/Kelangkaan Harga dan Barang Pasar, target renja 15 kecamatan capaian renja 15 kecamatan (100%)
- e) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan target renja 100% dan capaian renja 100%, dengan kegiatan :
  1. Pembinaan Pembauran dan Kewarganegaraan, target renja 350 orang capaian renja 350 orang (100%)
- f) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) , dengan target renja 100% dan capaian renja 100%, dgn kegiatan :
  1. Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat di Bidang Sosial Budaya, target renja 50 orang capaian renja 50 orang (100%)
- g) Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan target renja 100% dan capaian renja 97,45%, dengan kegiatan :
  1. Fasilitasi, Verifikasi dan Monev Hibah dan Bantuan Sosial Ormas, target renja 15 ormas capaian renja 8 ormas (53,33%)
  2. Fasilitasi, Verifikasi dan Monev Bantuan Keuangan dan Kegiatan Partai Poltik, target renja 8 dokumen bankeu capaian renja 8 dokumen bankeu (100%)
  3. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Umum, target renja 1.000 orang capaian renja 980 orang (98,00%)
  4. Desk Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur (Bankeu Provinsi), target renja 3.585 orang capaian renja 3.513 orang (97,99%)

## 2. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengukuran pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI 2018	% PENCA PAIAN	KESIMPULAN
<b>Berkurangnya Potensi Konflik di Masyarakat</b>	Cakupan Penanganan Konflik	100 %	100%	100%	Data dasar Jumlah Konflik dan kejadian konflik pada tahun 2018 dapat diatasi, hal ini bisa diartikan bahwa keadaan sutuasi di Kutai Kartanegara



SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI 2018	% PENCAPAIAN	KESIMPULAN
					kondusif
	Cakupan Penanganan Gejolak Masyarakat	100 %	100%	100%	Gejolak masyarakat pada tahun 2018 mendapatkan penanganan dari Pemerintah
<b>Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila</b>	Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Wawasan Kebangsaan	40%	40%	100%	kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan aparatur telah dilaksanakan
	Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Ketahanan Ekosobud	40%	0%	0%	Kegiatan tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran
	Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat	210 kasus	359 kasus	0%	Data tersebut menunjukkan tidak tercapainya target penurunan kasus, namun data dasar tahun 2017 menunjukkan data menurun dari sebelumnya 469 kasus sehingga menurun 110 kasus, namun masih mencapai target yang ditetapkan.
<b>Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat</b>	Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	67 %	60,44%	90,21%	Data Dasar partisipasi Pilkada Gubernur kaltim Serentak tahun 2018 : 60,44%
	Persentase Ormas Yang Tertib Administrasi	75%	53,33%	71,11%	Dari target 15 ormas telah terpenuhinya 8 ormas yang telah tertib administrasi dalam perpanjangan dan pendaftaran serta pelaporan SKT

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI 2018	% PENCAPAIAN	KESIMPULAN
	Persentase Parpol Yang Tertib Administrasi	100%	100%	100%	Semua partai politik melengkapi berkas adm. Bantuan keuangan

Dari data tabel pencapaian kinerja diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Data Gangguan dan Konflik

Dengan keadaan perkembangan ekonomi cenderung melambat sehingga mengakibatkan beberapa perusahaan harus mengadakan rasionalisasi jumlah karyawan sebagai langkah efisiensi operasional perusahaan. Terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sedikit banyak menjadi beban sosial bagi daerah yang bisa berakibat meningkatnya angka kriminalitas ataupun penyakit masyarakat lainnya. Secara umum kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun 2018 dalam kondisi yang sangat kondusif. Walaupun berdasarkan catatan bahan pengkajian permasalahan aktual daerah terdapat peningkatan jumlah aksi unjukrasa dibanding dengan tahun 2017.

Pada tahun 2017 terdapat aksi unjukrasa sebanyak 39 kali aksi, sedangkan pada tahun 2018 aksi unjukrasa sebanyak 44 kali aksi. Dengan permasalahan yang dominan adalah berlatar Sosial dan Budaya, kemudian masalah lahan masyarakat dengan perusahaan dan masalah kebijakan pemerintah dalam kaitan penyediaan dan penyalangan masyarakat.

### 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara per Desember 2018 berjumlah 81 orang PNS yang terdiri dari 13 Pejabat Struktural dan 68 Non Struktural.

Untuk jumlah jabatan struktural berjumlah pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 14 jabatan, dan per Desember 2018 jabatan yang terisi berjumlah 13 jabatan, 1 jabatan kosong karena pensiun dan sampai sekarang belum terisi. Dan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terdapat Jabatan Fungsional

### 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2018 Total Anggaran belanja Badan Kebangpol Rp. 11.171.203.418,82 yang meliputi anggaran Biaya Tidak Langsung, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal (APBD-P). Dengan realisasi atau serapan tahun ini adalah Rp. 10.185.117.310,00 (91,17%) pada tahun ini mengalami peningkatan penyerapan anggaran dari tahun 2017 sebesar (90,98%). Sedangkan untuk belanja langsung juga mengalami

peningkatan menjadi 96,08% dari tahun 2017 sebesar 91,90%, walaupun ada pembatasan dari Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam penggunaan anggaran pada triwulan IV.

#### **5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

Pada perencanaan tahun 2018 terdapat beberapa perencanaan program dan kegiatan yang mengalami perubahan pada Perubahan APBD (P-APBD) tahun anggaran 2018, namun perubahan tersebut telah dilakukan penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Perubahan Badan Kesbangpol tahun 2018, sehingga seluruh program dan kegiatan yang mengalami perubahan yang dituangkan dalam RKA telah sesuai dengan dokumen Renja.

#### **6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)**

Secara umum sarana dan prasana yang dimiliki oleh Badan Kesbangpol Kab. Kutai Kartanegara, cukup memadai dalam seluruh kegiatan operasional selama ini. Namun dipandang perlu untuk menambah sarana dan prasarana pendukung lainnya untuk memperbaiki tingkat pelayanan ke masyarakat dan akuntabilitas publik.

Adapun sarana dan prasarana pendukung yang di pandang perlu untuk memperbaiki tingkat pelayanan ke masyarakat dan akuntabilitas publik, adalah sebagai berikut :

1. Perlu membangun system/aplikasi berbasis komputer dalam pengelolaan database yang terintegrasi, yang dapat mengelola data parpol, ormas dan potensi konflik ipoleksosbud yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.
2. Kendaraan Operasional untuk pelaksanaan tugas ke wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

#### **7. Permasalahan dan Solusi**

a) Permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018, sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman aparaturnya terhadap peraturan yang ada.
2. Pihak kecamatan dan desa/kelurahan tidak memiliki data tentang nama-nama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh adat, dimana kesemuanya merupakan sasaran utama sosialisasi, dengan harapan dari tokoh-tokoh ini bisa menyebarkan kemasyarakatan tentang pesan/materi/aturan yang disampaikan.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan aparaturnya terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila
5. Terbatasnya persediaan dana yang diberikan

b) Dari permasalahan tersebut di atas, dapat kami sampaikan solusi sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi peraturan terhadap aparaturnya melalui penyuluhan

dari OPD teknis yang terkait

2. Perlu membuat surat himbauan yang ditujukan kepada pihak Kecamatan dan Kelurahan/Desa agar melakukan pendataan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh adat.
3. Perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif dalam rangkaian peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya
4. Perlunya sosialisasi kepada aparatur dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila
5. Meningkatkan koordinasi seluruh pelaksana kegiatan dan penatausahaan keuangan terkait perencanaan pelaksanaan dan tanggung jawab belanja

## 8. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Isu-isu Strategis kedepan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah masalah keamanan dan kenyamanan serta ketertiban masyarakat yang meliputi :

1. Derasnya Aspirasi atau keinginan masyarakat untuk memisahkan diri dari Kabupaten Kutai Kartanegara dengan membentuk kabupaten-kabupaten baru berdasarkan pantauan dan data intelijen, pada tahun 2016 terdapat 2 Gerakan kelompok-kelompok yang mencari dukungan untuk menggalang aspirasi pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) yakni :
  - a) Keinginan kelompok masyarakat untuk bergabung dengan rencana pembentukan Kabupaten Samarinda. Adapun kelompok ini mencari dukungan masyarakat Kecamatan Muara Jawa dan Kecamatan Sangasanga.
  - b) Adapun rencana Kecamatan yang akan bergabung dalam pembentukan Kabupaten Samarinda adalah Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Palaran, Kecamatan Sangasanga dan Kecamatan Muara Jawa.
  - c) Perjuangan pembentukan Kabupaten Kutai Pesisir kembali dihembuskan, dan mendapat dukungan dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.
  - d) Ini terbukti dengan dilaksanakannya pengukuhan Lembaga Adat Muara Jawa oleh Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dengan aspirasi yang ingin diperjuangkan adalah melanjutkan Perjuangan Pemekaran Kabupaten Kutai Pesisir.
2. Seringnya muncul permasalahan yang berkaitan dengan lahan masyarakat terhadap perusahaan tambang dan perkebunan yang sulit diselesaikan karena belum semua kecamatan mempunyai tapal batas yang valid.
3. Dengan luasnya wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang juga banyak terdapat pulau-pulau kecil di pesisir pantai, sehingga bisa dimanfaatkan oleh teroris sebagai tempat persembunyian.
4. Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi dapat menimbulkan eksekadensi moral yang bisa mengarah pada perubahan sosial budaya masyarakat yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Munculnya berbagai Isu aliran kepercayaan dan faham-faham keagamaan yang mengatasnamakan agama yang berdampak pada SARA.

6. Sering terjadinya sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan, kepemilikan lahan tumpang tindih, dan tidak terserapnya tenaga kerja lokal yang bisa menimbulkan konflik sehingga mengganggu iklim investasi.
7. Semakin meningkatnya permasalahan penyakit masyarakat seperti perjudian, prostitusi, peredaran uang palsu, pornografi, peredaran dan penyalahgunaan Obat-obatan terlarang (Narkoba).
8. Peningkatan pemahaman masyarakat dalam cara penyampaian aspirasi, sehingga diperlukan peningkatan pendidikan politik masyarakat, dan dapat memanfaatkan saluran aspirasi.
9. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum, dengan tolok ukur tingkat partisipasi pemilih dan menurunnya Golput.
10. Peningkatan pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sebagai wadah kegiatan sehingga terjalin pola kemitraan dengan pemerintah dalam percepatan pembangunan.
11. Penciptaan iklim demokratis dalam pelaksanaan Pemilu.

#### **IV. INDIKATOR KINERJA KUNCI**

---

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan atas penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintah. Fungsi IKK adalah sebagai variable penilai setiap hal yang di ukur. IKK terdiri dari :

- a. IKK Pengambil Kebijakan
- b. IKK Pelaksana Kebijakan
- c. IKK Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan

IKK disusun berdasarkan usulan yang diterima dari Kementerian/LPNK dengan mempertimbangkan kesesuaian kebijakan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi serta kepentingan umum, yang digunakan dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun IKK Pengambil Kebijakan, IKK Pelaksana Kebijakan, IKK Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan (terlampir).

# BAB IV

**REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)****TAHUN 2018**

**D**alam upaya menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan antar jenjang pemerintahan, maka tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2018, disusun berdasarkan atas isu strategis dan tema pembangunan nasional, adapun secara nasional tema Rencana Kerja Pemerintah 2018 adalah "Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan". Dengan arah kebijakan pembangunan pada peningkatan kualitas Money Follow Program dengan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial. Selanjutnya pencapaian pembangunan tahun 2018 tidak terlepas dari 5 (lima) mainstreaming RPJMN 2015-2019 yakni : Revolusi Mental, Kesetaraan Gender, Perubahan Iklim, Pemerataan dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Komitmen pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, disusun dalam semangat Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (Gerbang Raja II), secara umum menetapkan dua arah pembangunan jangka menengah yakni :

1. Percepatan transformasi struktur ekonomi dari sektor pertambangan dan penggalian menuju optimalisasi sektor pertanian dalam arti luas dan pariwisata sebagai leading sector perekonomian daerah pada masa yang akan datang.
2. Memperkuat pembangunan daerah dengan pendekatan potensi kewilayahan dalam perspektif wilayah administratif kecamatan, dengan mendorong setiap kecamatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi ekonomi dan karakteristik wilayah secara sinergi dan terpadu.

**4.1. TEMA PEMBANGUNAN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018**

Dalam upaya menjaga konsistensi pelaksanaan arah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, telah ditetapkan tahapan pembangunan Kutai Kartanegara dalam jangka menengah yang diterjemahkan dalam tema pembangunan tahunan sebagai arahan dalam penetapan program-program prioritas pembangunan daerah.

Dengan demikian tema RKPD Kutai Kartanegara Tahun 2018 Kutai Kartanegara adalah ***"Pengembangan Ekonomi Produktif dan Ekonomi Kreatif dengan Daya Dukung Pemerataan Infrastruktur dan Pemanfaatan Potensi Daerah secara Terpadu"***.

Tahap ini memperkuat landasan bagi percepatan (akselerasi) dan pembaharuan (transformasi) pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kebijakan umum sebagai berikut:

1. Pengembangan potensi unggulan daerah lintas sektor dan dari hulu-hilir;
2. Penguatan peran usaha kecil dalam mendukung perekonomian daerah;
3. Penguatan pembangunan pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata sebagai sumber utama peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan pendapatan masyarakat.
4. Pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya yang mendukung sentra produksi, daerah potensi unggulan daerah, dan infrastruktur pendukung perekonomian daerah;
5. Mengembangkan interkoneksi antar wilayah khususnya antar desa antar kecamatan.

## 4.2. TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021, disusun berdasarkan atas semangat GERBANG RAJA II, Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016- 2021, maka ditetapkan Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah;
5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah;
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.

Adapun keterkaitan visi dan misi dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 4.1.**  
Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

VISI	POKOK- POKOK VISI	MISI
<b>Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan</b>	Maju	Misi 1 : Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat
	Mandiri	Misi 3 : Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah
		Misi 4 : Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah
		Misi 5 : Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju
		Misi 6 : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
	Sejahtera	Misi 2 : Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten
	Berkeadilan	Misi 7 : Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan

Berdasarkan atas penelaahan terhadap visi dan misi tersebut maka disusun sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang terbagi atas :

- 1) Sasaran Makro RPJMD, yakni gambaran keberhasilan pembangunan daerah dengan menggunakan indikator makro pembangunan daerah, yang diasumsikan tidak bisa dicapai melalui satu misi namun memerlukan keterpaduan pembangunan yang saling terkait. Target sasaran makro Kutai Kartanegara sebagaimana tabel berikut :



**Tabel 4.2.**  
Sasaran makro Kabupaten Kutai Kartanegara

SASARAN MAKRO	2018		2021
	RPJMD	RKPD	RPJMD
Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,28	1,42	4,27
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas	5,08	2,15	5,65
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas & Batubara	6,03	4,38	7,04
Laju Inflasi	7,06	3,5	6,94
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) :	74,64	74,64	77,21
1. Angka Harapan Hidup (AHH)	71,68	71,68	71,79
2. Angka Harapan Lama Sekolah (EYS)	14,62	14,62	15,74
3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (MYS)	9,10	9,10	9,56
4. Nilai Pengeluaran Perkapita	11,062.5	11,062.5	11,805.07
Gini Rasio	0,28	0,28	0,27
Persentase tingkat Kemiskinan	6,22	6,59	4,23
Tingkat Pengangguran Terbuka	8,93	8,93	8,86
Indeks Kesenjangan Wilayah/Indeks Williamson (Non Migas)	0,51	0,51	0,45

- 2) Sasaran RPJMD, yakni penjabaran dari misi dan tujuan RPJMD, sasaran disini dijadikan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian misi RPJMD yang telah menjadi komitmen pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara hingga tahun 2021, target sasaran mempedomani RPJMD dengan melakukan pemutahiran atas data realisasi capaian terakhir, berikut hubungan misi, tujuan, sasaran dan target tahun 2018.

**Tabel 4.3.**  
Misi, Tujuan dan Sasaran tahun 2018

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	2018		2021
				RPJMD	RKPD	RPJMD
Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah	Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sangat Tinggi (3,33)	Sangat Tinggi (3,33)	Sangat Tinggi (3,48)
			Indeks Kepuasan Masyarakat	80 (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	87 (Sangat Baik)
			Indeks Partisipasi Masyarakat	80 (Sangat Baik)	80 (Sangat Baik)	87 (Sangat Baik)
		Optimalnya akuntabilitas dan pengawasan daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
			Indek Persepsi Korupsi	6,0	6,0	6,9
			Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	AA
		Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat	Cakupan e-KTP	93%	93%	100%

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	2018		2021	
				RPJMD	RKPD	RPJMD	
		Optimalnya pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana	Peserta KB Aktif	73.90%	73.90%	73,93%	
		Optimalnya kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Rasio Penduduk Terkena Tindak Pidana (Crime Rate) per 100.000 penduduk	149	149	145	
			Indeks Risiko Bencana	123	123	102	
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten	Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, sehat, berpendidikan terampil, berakhlak dan berperilaku mulia	Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	14,62	14,62	15,74	
			Rata-Rata Lama Sekolah	9,10	9,10	9,56	
		Meningkatnya budaya baca masyarakat	Pertumbuhan Kunjungan masyarakat ke perpustakaan	3,89%	3,89%	4,35%	
		Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	71,68	71,68	71,79	
			Angka Kematian Ibu Melahirkan	26	26	23	
			Angka Kematian Bayi	179	179	146	
		Meningkatnya daya saing tenaga kerja serta kesempatan dan perluasan kesempatan kerja	Rasio Kesempatan Kerja	0,95	0,95	0,99	
		Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga	Persentase Pemuda yang menjadi Wirausaha Mandiri.	4%	4%	5,5%	
			Indeks Pembangunan Olah Raga ( <i>Sport Development Index</i> )	55%	55%	75%	
		Meningkatnya kapasitas masyarakat menuju desa berketahanan sosial	Jumlah Desa Berketahanan Sosial	100 Desa/ kel	100 Desa/ kel	237 Desa/ kel	
			Persentase Pusat Kesejahteraan Sosial yang berfungsi optimal	41%	41%	100%	
			Indeks Kemandirian Desa	0.65	0.65	0.87	
				Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	40%	40%
Meningkatnya keterpaduan pengentasan kemiskinan antar sektor antar wilayah	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)				0,42	0,42	0,35
	Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)				0,04	0,04	0,01
	Cakupan Rumah Layak Huni				91.47	91.47	93.53
Meningkatkan pembiayaan	Meningkatkan kemandirian	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	5,05%	5,05%	6,46%	

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	2018		2021
				RPJMD	RKPD	RPJMD
pembangunan daerah	fiskal daerah dan kerjasama pembangunan daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan PAD (tahun dasar 2015)	7.81%	7.81%	11.29%
		Meningkatnya Kerjasama Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pembangunan daerah	Cakupan Fasilitas CSR (Perusahaan Wajib CSR Bermitra Dengan Pemkab)	7%	7%	17%
Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah	Mewujudkan percepatan kedaulatan pangan dan revolusi pembangunan pertanian dalam arti luas sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya produktivitas, tata kelola, dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan sektor pertanian	8,72%	8,72%	11,12%
		Meningkatnya potensi dan daya dukung pariwisata daerah serta kunjungan wisata di Kutai Kartanegara	Pertumbuhan sektor pariwisata	7,61%	7,61%	9,44%
	Meningkatnya pengembangan seni dan budaya lokal dalam rangka mendukung destinasi wisata dan kelestarian tradisi kehidupan masyarakat	Pertumbuhan Grup Seni dan Budaya	6%	6%	5%	
		Meningkatnya ekonomi kerakyatan berbasis industri kreatif dan potensi daerah	Persentase koperasi aktif	81.13%	81.13%	81.43%
	Pertumbuhan Tingkat Kelas UMKM		2.84%	2.84%	3.78%	
yang didukung industri dan perdagangan potensial daerah berbasis keterkaitan dan keterpaduan potensi antar wilayah ( <i>Integrated Territorial Development</i> )	Meningkatnya akses, tata niaga, dan infrastruktur perdagangan antar wilayah dan antar daerah	Meningkatnya pengembangan industri pengolahan pangan, peternakan, perikanan, pengolahan pakan, dan potensi daerah yang berdaya saing	Pertumbuhan Ekspor Bersih Non Migas dan Batu Bara	12%	12%	7%
			Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	6,48%	6,48%	8,13%
Meningkatkan keterpaduan	Menurunkan kesenjangan	Meningkatnya interkoneksi antar wilayah	Persentase jalan dengan kondisi baik	80,2%	80,2%	100%

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	2018		2021
				RPJMD	RKPD	RPJMD
pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah	pembangunan antar wilayah	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	75%	75%	87.5%
		Terwujudnya konektivitas jaringan komunikasi, internet, dan pengembangan kawasan smart city.	Cakupan koneksi internet Kecamatan/Desa/Kel	65%	65%	100%
			Jumlah Kawasan Berbasis Teknologi Informasi	1 Kawasan	1 Kawasan	2 Kawasan
		Meningkatnya layanan kebutuhan dasar perumahan dan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan	Cakupan Lingkungan Permukiman Kumuh	32.37%	32.37%	0%
		Persentase cakupan layanan air minum Rumah Tangga	90.20%	90.20%	100.00%	
Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Meningkatnya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta pengendalian pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71.50	71.50	73.00
		Meningkatnya ketersediaan sumber energi baru dan terbarukan	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan.	3.33%	3.33%	5.00%
Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak	Meningkatnya peran serta perempuan segala bidang pembangunan dan perlindungan anak	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, kualitas kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan dan anak	IPG	84.00%	84.00%	90.00%
			IDG	54.21%	54.21%	59.17%
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100%	100%	100%
			Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.	160 (-19%)	160 (-19%)	90 - 3%

### 4.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan untuk menjawab isu strategis, dan permasalahan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan arah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan RPJMD Kutai Kartanegara 2016-2021. Adapun penetapan prioritas Pembangunan Kutai Kartanegara tahun 2018 sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi;
2. Daya Saing Sumber Daya Manusia;
3. Investasi dan Kerjasama Pembiayaan Pembangunan Daerah;
4. Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata;
5. Pemerataan Infrastruktur;
6. Pengelolaan Sumber Daya Alama dan Lingkungan Hidup; dan
7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas pembangunan Kutai Kartanegara 2018, secara prinsip tidak terlepas dari prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, berikut keterkaitan Prioritas Pembangunan Kutai Kartanegara, Nawacita, Prioritas Nasional 2018 dan Prioritas Provinsi Kalimantan Timur 2018.

**Tabel 4.4.**

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kutai Kartanegara, Nawacita, Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Kalimantan Timur 2018

No	Nawacita	Prioritas Kutai Kartanegara	Prioritas Nasional	Prioritas Kalimantan Timur
1	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh	1. Reformasi Birokrasi	Politik, Hukum, Pertanahan & Keamanan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
2	Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya			
3	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya			
4	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	2. Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pendidikan	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan
5	Melakukan revolusi karakter bangsa	7. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kesehatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan kesehatan

No	Nawacita	Prioritas Kutai Kartanegara	Prioritas Nasional	Prioritas Kalimantan Timur
6	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia		Penanggulangan kemiskinan	Percepatan Pengentasan Kemiskinan
7	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya			Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
8	8 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	3. Investasi dan Kerjasama Pembiayaan Pembangunan Daerah	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata (Perbaikan Iklim Investasi dan Lapangan Kerja)	Pengendalian inflasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
		4. Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Ketahanan pangan	Peningkatan Skala Produksi Pertanian
				Percepatan Transformasi Ekonomi
				Peningkatan Produksi Pangan
9	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kesatuan kerangka negara	5. Pemerataan Infrastruktur	Infrastruktur, Konektivitas, Dan Kemaritiman  Pembangunan wilayah	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar
		6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan  Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam program prioritas, sebagai berikut :

**Tabel 4.5.**

Program Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018

1. Prioritas Kutai Kartanegara : Reformasi Birokrasi  
 Prioritas Kalimantan Timur : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Prioritas Nasional  
 Nasional : Politik, Hukum, Pertahanan & Keamanan

Sasaran	Arah Kebijakan 2018	Urusan	Program/ Pembangunan	PD
<b>Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah</b>	Penguatan koordinasi kebijakan antar SKPD	Pendukung Urusan Pemerintahan: Sekretariat Daerah	Program Pemantapan Reformasi Birokrasi	<b>Sekretariat Daerah</b>
	Pengukuran IKM di setiap SKPD Pelayanan		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	
			Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	
			Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	
			Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
			Program Keprotokolan Daerah	
			Program Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	

Sasaran	Arah Kebijakan 2018	Urusan	Program/ Pembangunan	PD
			Program Peningkatan Pelayanan Publik	
	Penerapan standarisasi keamanan informasi daerah yang bersifat rahasia negara	Urusan Wajib Persandian	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	<b>Diskominfo</b>
	Penerapan tertib administrasi pertanahan	Urusan Wajib Pertanahan	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	<b>Dinas Pertanahan &amp; Tata Ruang</b>
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan				
	Penguatan kapasitas eksekutif dan legislatif	Pendukung Urusan Pemerintahan: Sekretariat DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	<b>Sekretariat DPRD</b>
	Penerapan pengelolaan arsip secara baik di seluruh perangkat daerah	Urusan Wajib Kearsipan	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	<b>Sekretariat KORPRI</b>
			Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	<b>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</b>
	Penerapan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; Penyusunan Kelas Jabatan (Evakuasi Jabatan); dan Penyusunan Pola Karier Pegawai	Pendukung Urusan Pemerintahan Kepegawaian	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kabupaten)	<b>Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah</b>
			Program Layanan Administrasi Kepegawaian	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	



Sasaran	Arah Kebijakan 2018	Urusan	Program/ Pembangunan	PD
	Perbaikan IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Urusan Wajib Penanaman Modal	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengembangan Sistem Pelayanan	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>
	Peningkatan kualitas pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban melalui buku panduan pengelolaan dana desa serta peningkatan keterampilan aparat desa dalam penyusunan dokumen perencanaan desa	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>
	Penguatan penelitian dan pengembangan bagi proses pembangunan terpadu antar sektor antar wilayah	Pendukung Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan	Program Sistem Inovasi Daerah Program Penelitian Umum	<b>Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>
	Peningkatan partisipasi dan peran masyarakat dalam pembangunan daerah	Pendukung Urusan Pemerintahan dan Perencanaan	Program pengembangan data/informasi	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>
	Peningkatan kapasitas SDM perencana di tiap perangkat daerah		Program perencanaan pembangunan daerah	
	Pengembangan system Perencanaan terpadu berbasis IT		Program Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah	
	Pembangunan baseline data dari tingkat kecamatan sampai kabupaten untuk perencanaan,		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	

Sasaran	Arah Kebijakan 2018	Urusan	Program/ Pembangunan	PD
	<p>penganggaran, monitoring evaluasi dan pelaporan, dan LKjIP dengan predikat B</p> <p>Pengembangan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan daerah</p>		<p>Program perencanaan bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</p> <p>Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur</p>	
	<p>Pemanfaatan data dan informasi, serta analisis statistik daerah dalam memperkuat perencanaan, prioritas penganggaran, dan evaluasi pembangunan</p>	Urusan Wajib Statistik	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian</b>
	<p>Penguatan kewenangan kecamatan dalam pelayanan dan peran pembangunan kewilayahan</p>	Kecamatan	<p>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat</p> <p>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan</p> <p>Program Peningkatan Pelayanan Publik</p>	<b>Seluruh Kecamatan</b>
	<p>Penerapan SAP berbasis Akrual di seluruh perangkat daerah secara online</p>	<p>Pendukung Urusan Pemerintahan Keuangan</p> <p>Pendukung Urusan Pemerintahan: Sekretariat Daerah</p>	<p>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala Daerah</p> <p>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Program Peningkatan Pelayanan</p>	<p><b>Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</b></p> <p><b>Sekretariat Daerah</b></p>

Sasaran	Arah Kebijakan 2018	Urusan	Program/ Pembangunan	PD
			Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan pengendalian	
	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah, dan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Inspektorat	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	<b>Inspektorat</b>
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				
Program Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi				
<b>Optimalnya akuntabilitas dan pengawasan daerah</b>	Penguatan SDM pengelola keuangan daerah	Seluruh Urusan/ Penunjang	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<b>Seluruh PD</b>
<b>Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat</b>	Pengembangan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat RT Sosialisasi dan pendataan berkala	Urusan Wajib Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>
	Pemberdayaan pemerintah desa terkait tertib administrasi kependudukan masyarakat			
<b>Optimalnya kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana</b>	Peningkatan koordinasi antar stakeholder sampai dengan tingkat desa Pengadaan sarana prasana komunikasi terpadu Penguatan kapasitas keamanan lingkungan	Urusan Wajib Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	<b>Badan Kesbangpol dan Linmas</b>
			Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	

Sasaran	Arah Kebijakan 2018	Urusan	Program/ Pembangunan	PD
	berbasis masyarakat Penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana di tiap kecamatan		Program Pendidikan Politik Masyarakat	
			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	
			Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	<b>Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggula ngan Bencana</b>
			Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	
			Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	
			Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	
			Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
			<b>Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial</b>	

2. Prioritas Kutai Kartanegara : Daya Saing Sumber Daya Manusia  
 Prioritas Kalimantan Timur : - Peningkatan Kualitas Sistem Penyelenggaraan Pendidikan  
 : - Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan  
 : - Percepatan Pengentasan kemiskinan  
 : - Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja  
 Prioritas Nasional : - Pendidikan  
 : - Kesehatan  
 : - Penanggulangan Kemiskinan

Sasaran	Arah Kebijakan 2018	Urusan	Program/ Pembangunan	OPD
Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan	Pendirian sekolah baru	Urusan Wajib Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Melakukan pemenuhan target rehabilitasi sekolah, pengadaan mebeluair, penataan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
	Pemantapan kurikulum sesuai dengan tingkat satuan pendidikan, penguatan Tim pengembang kurikulum, penguatan KKG dan MGMP berbasis teknologi informasi		Program Pendidikan Non Formal	
	Peningkatan kualitas guru kepala sekolah, pengawas sekolah dan PTK PAUDNI		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
	Pemantapan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal lintas SKPD		Program Manajemen Layanan Pendidikan	

Sasaran	Arah Kebijakan 2018	Urusan	Program/ Pembangunan	OPD
Meningkatnya budaya baca masyarakat	Pengembangan Rumah Baca tiap Desa/Kelurahan sesuai dengan potensi wilayah. Pembangunan Taman Bacaan (Taman Pintar) Optimalisasi pelayanan Perpustakaan Keliling Pengembangan Perpustakaan Digital	Urusan Wajib Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Optimalisasi peran desa siaga untuk mendorong percepatan pelayanan kesehatan terutama ibu hamil Pengembangan sistem transportasi setempat untuk mempermudah akses terhadap layanan kesehatan  Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan Peningkatan ketersediaan obat-obatan  Peningkatan ketersediaan peralatan kesehatan Peningkatan kebutuhan nakes dan pendistribusian secara	Urusan Wajib Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengendalian Penyakit dan Surveilans Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Laringannya Program obat dan perbekalan Kesehatan Program Pengawasan Obat dan makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan

Sasaran	Arah Kebijakan 2018	Urusan	Program/ Pembangunan	OPD
	<p>proporsional sesuai kebutuhan wilayah</p> <p>Peningkatan kompetensi dukun sebagai mitra bidan</p> <p>Meningkatkan akses ibu hamil pada layanan puskesmas</p> <p>Pengembangan basis data dan informasi ibu hamil berbasis desa</p> <p>Peningkatan layanan puskesmas pada daerah permukiman terpencil</p> <p>Peningkatan peran posyandu menjadi RUMAH SEHAT DESA</p> <p>Penerapan standar norma dan standar pelayanan unit layanan kesehatan</p> <p>Penerapan mekanisme penanganan keluhan pada unit layanan kesehatan</p> <p>Penerapan standar pelayanan publik</p>		<p>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</p> <p>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</p> <p>Program pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular</p> <p>Program Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana/Wabah</p> <p>Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi</p> <p>Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak</p> <p>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia</p> <p>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</p> <p>Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan</p>	
Meningkatnya daya saing tenaga kerja serta kesempatan dan perluasan kesempatan kerja	<p>Peningkatan kompetensi angkatan kerja potensial</p> <p>Penempatan Angkatan Kerja</p> <p>Penciptaan lapangan usaha dan</p>	Urusan Wajib Ketenagakerjaan	<p>Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktifitas</p> <p>Program Penempatan Pemberdayaan Tenaga Kerja</p>	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Sasaran	Arah Kebijakan 2018	Urusan	Program/ Pembangunan	OPD
	lapangan kerja yang berbasis potensi kecamatan Fasilitasi Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan		Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga	Pembinaan kepemudaan melalui sekolah dan kelompok masyarakat Pemberdayaan karang taruna di tiap desa Pemberian bantuan sarana dan prasarana olahraga Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan olahraga di masing-masing wilayah kecamatan Optimalisasi Insentif Berbasis Prestasi bagi atlet Fasilitasi kegiatan olahraga melalui even-even lokal, regional, nasional, dan	Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga	<i>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</i>	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			<i>Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</i>	
			<i>Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda</i>	
			<i>Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba</i>	
			<i>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga</i>	
			<i>Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga</i>	
Meningkatnya kapasitas masyarakat menuju desa berketahanan sosial	Replikasi Pembangunan Desa Berketahanan Sosial Pemantapan pembinaan keluarga miskin Pemantapan sinergitas kebijakan	Urusan Wajib Sosial Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Bena Kampung Etam (Desa Berketahanan Sosial)	Dinas Sosial
			<i>Program Pengembangan Lembaga-Lembaga Desa</i>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat



Sasaran	Arah Kebijakan 2018	Urusan	Program/ Pembangunan	OPD
	TASKIN yang ada di tiap SKPD terkait		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	at dan Desa
kesejahteraan sosial	perusahaan dalam pembangunan kesejahteraan social Pemantapan sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pembangunan kesejahteraan social Pemantapan penyelenggaraan standar pelayanan kesejahteraan sosial		panti asuhan/ panti jompo Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	
Meningkatnya keterpaduan pengentasan kemiskinan antar sektor antar wilayah	Sinkronisasi program lintas SKPD di daerah dengan fungsionalisasi TKPKD Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Optimalisasi APBD yang Pro Job, Pro Poor, Pro Growth, dan Pro Environment	Urusan Pilihan Kelautan dan perikanan Urusan Wajib Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Program Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Program Bedah Rumah	Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

3. Prioritas Kutai Kartanegara : Investasi dan Kerjasama Pembiayaan Pembangunan Daerah
- Prioritas Kalimantan Timur : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
- Prioritas Nasional : Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata (Perbaikan Iklim Investasi dan Lapangan Kerja)

Sasaran	Arah Kebijakan 2018	Urusan	Program/Pembangunan	OPD
<b>Meningkatnya daya saing investasi daerah</b>	Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan mempercepat peningkatan penanaman modal Penerapan regulasi terkait kebijakan membuka	Urusan Wajib Penanaman Modal	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	
<b>Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah</b>	Penyediaan data dan informasi potensi pendapatan daerah	Pendukung Urusan Pemerintahan Keuangan	Program Peningkatan PAD	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>
	Pengembangan sistem PAD online untuk semua layanan PAD			
	Penyediaan sarana prasarana pendukung pungutan PAD yang merata di Seluruh Kecamatan			
	Peningkatan SDM aparatur pemungut PAD			
	Pemberian insentif bagi aparatur khususnya pemungut PAD di daerah terpencil			
	Pemetaan potensi baru bagi Pendapatan Asli Daerah			
	Kerjasama antar daerah yang berkaitan dengan upaya peningkatan sumber PAD			
<b>Meningkatnya Kerjasama</b>	Pembentukan Forum CSR	Pendukung Urusan	Program Kerjasama Pembiayaan	<b>Badan Perencanaan</b>

Sasaran	Arah Kebijakan 2018	Urusan	Program/Pembangunan	OPD
<b>Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pembangunan daerah</b>	Pelaksanaan komunikasi melalui "Gala Dinner" atau Silaturahmi berkala dengan pelaku usaha	Pemerintah an Perencanaan	Pembangunan Daerah	<b>Pembangunan Daerah</b>
	Pembangunan sistem aplikasi CSR			
	Pelibatan pelaku usaha dalam usulan pembangunan melalui musrenbang			
	Pendataan program kegiatan CSR dari pelaku usaha			
	Memfasilitasi data informasi kondisi daerah untuk dipergunakan oleh pelaku usaha melalui CSR			

4. Prioritas Kutai Kartanegara : Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata  
 Prioritas Kalimantan Timur : - Pengembangan Ekonomi Kerakyatan  
 - Pengembangan Agribisnis  
 Prioritas Nasional : - Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata  
 - Ketahanan Pangan

Sasaran	Arah Kebijakan 2018	Urusan	Program/ Pembangunan	PD
<b>Meningkatnya produktivitas, tata kelola, dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas</b>	Peningkatan kapasitas dan produktivitas SDM pertanian (pelatihan, fasilitasi, penyuluhan, pendampingan asistensi manajerial usaha, dll) Penetapan PERDA pemanfaatan lahan bekas tambang untuk produksi agro dan PERDA kawasan Pertanian/Perkebunan yang masuk dalam	Urusan Wajib Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)  Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	<b>Dinas Ketahanan Pangan</b>

Sasaran	Arah Kebijakan 2018	Urusan	Program/ Pembangunan	PD
	<p>KBK</p> <p>Distribusi pupuk tepat waktu bekerjasama dengan mitra strategis (koperasi petani, kios dan agen saprodi lokal, kelompok usaha bersama, Gapoktan)</p> <p>Perbaikan infrastruktur produksi (pengadaan dan perbaikan jalan usaha tani, pasar, rantai jemur dan gudang pertanian)</p> <p>Optimalisasi RPU dengan perbaikan manajemen dan SDM</p> <p>Promosi penanaman modal pada pengusaha lokal, regional dan nasional untuk sektor agro</p> <p>Pengelolaan sumber daya air untuk irigasi pertanian yang dapat melayani lahan sepanjang tahun melalui pembangunan waduk, jaringan irigasi, jalan usahatani</p>		<p>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian</p> <p>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</p> <p>Program Peningkatan Produksi Pertanian</p> <p>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Penyuluhan</p> <p>Program Pengembangan Komoditas Spesifik Lokasi/Tanaman Lokal</p>	
	<p>Penyediaan dan pengembangan sistem dan jaringan informasi perikanan, termasuk informasi cuaca</p> <p>Penetapan dan pengembangan program konservasi</p> <p>Penambahan secara gradual jumlah armada kapal ikan yang lebih besar (terutama 5 s/d &gt; 10 GT)</p> <p>Penetapan sentra pengembangan</p>	Urusan Pilihan Kelautan dan perikanan	<p>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</p> <p>Program Pengembangan Perikanan Budidaya</p> <p>Program Pengembangan Ikan Spesifik Lokal</p>	<b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b>

Sasaran	Arah Kebijakan 2018	Urusan	Program/ Pembangunan	PD
	<p>perikanan tangkap Pengadaan alat bantu penangkapan ikan seperti GPS, ecosounder, fishfinder. Penetapan potensi daerah tangkapan bagi nelayan</p> <p>Penyiapan SDM dengan pendididkan dan pelatihan untuk menjadi nelayan lepas pantai Penetapan dan pengembangan kawasan minapolitan perikana tangkap di perairan umum dan laut Penetapan kawasan pengembangan untuk perikanan, baik tawar, payau maupun laut. Penetapan dan pengembangan komoditas unggulan yang akan dikembangkan . Pendidikan, pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan usaha, teknis, dan permodalan Fasilitasi sarana prasarana perikanan (BBI, Irigasi perikanan, saprokan) Peningkapan jumlah dan kapasitas penyuluh lapang pada kawasan pengembangan secara bertahap Penyusunan rencana detail dan pembangunan kawasan pengembangan pengolahan ikan baik untuk perikanan</p>		<p>Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</p> <p>Program Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</p> <p>Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan dan Budidaya</p> <p>Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut</p> <p>Program Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Konservasi</p>	

Sasaran	Arah Kebijakan 2018	Urusan	Program/ Pembangunan	PD
	<p>tawar, laut maupun payau, yang sinergi dengan kawasan produksi (minapolitan) Pengembangan Pasar dan pemasaran produk melalui promosi, sehingga tidak hanya mengandalkan pasar lokal dan pasar regional, tetapi juga antar pulau dan ekspor. Pendampingan dan fasilitasi permodalan, teknis dan manajerial usaha dan Pengembangan program inovasi produk Mengkoleksi calon indukan spesifikasi lokal Monitoring rutin kawasan sumberdaya perikanan yang terkena dampak aktivitas perusahaan</p>			
	<p>Membuka lahan perkebunan baru Membangun demplot- demplot sebagai model pengembangan usaha pertanian produktif Meningkatkan akses layanan permodalan usaha bagi pelaku usaha pertanian</p> <p>Mengembangkan breeding center ternak (sapi, kerbau dan unggas unggulan); Menintroduksi teknologi budidaya ternak;</p>	Urusan Pilihan Pertanian	<p>Program Peningkatan Kesejahteraan Pekebun</p> <p>Program Peningkatan Produksi Perkebunan</p> <p>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan</p> <p>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan</p> <p>Program Perluasan Komoditas Perkebunan</p>	<b>Dinas Perkebunan</b>

Sasaran	Arah Kebijakan 2018	Urusan	Program/ Pembangunan	PD
	Mengintensifkan pelayanan kesehatan ternak Meningkatkan populasi ternak unggulan (sapi, kerbau dan unggas) dengan pendanaan pemerintah dan CSR, Mengembangkan SDM peternakan (penyuluhan, pendampingan, magang, dll)	Urusan Pilihan Pertanian	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan	
			Program Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan	
			Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	
	Pembangunan sistim irigasi untuk lahan-lahan baru dan perawatan sistim irigasi yang telah ada secara kontinyu.	Urusan Wajib Pekerjaan umum dan penataan ruang	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Dinas Pertanian dan Peternakan
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	
	Urusan Pilihan Ketransmigrasian	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Dinas Pekerjaan Umum	
		Program Peningkatan Sistem Jaringan Irigasi Pertanian		
			Program Pengembangan Kawasan/ Desa/ Kimtrans	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Sasaran	Arah Kebijakan 2018	Urusan	Program/ Pembangunan	PD
<b>Meningkatnya potensi dan daya dukung pariwisata daerah serta kunjungan wisata di Kutai Kartanegara</b>	Menetapkan peraturan daerah perencanaan pariwisata Kukar Kajian potensi eks lokasi tambang sebagai destinasi wisata Pelaksanaan studi multiplier effect pariwisata Kukar melaksanakan kajian pemasaran dan kerjasama antar daerah bagi pengembangan kluster pariwisata Pengembangan paket wisata MICE dengan memanfaatkan sarana pada ODTW terpilih Bekerjasama dengan SKPD Pendidikan mengembangkan kurikulum muatan lokal bagi pendidikan dasar untuk pengenalan budaya dan sejarah Bekerjasama dengan SKPD Pendidikan mengembangkan paket wisata pendidikan bagi murid SD dan SMP se Kabupaten Kukar koordinasi pembangunan sarana dan prasarana ODTW kepada SKPD terkait pengembangan market place untuk pilot project kegiatan ekonomi kreatif digitalization, Communication and Vizualitation Development, art design and creativity product Promosi kegiatan ekonomi kreatif pada berbagai event-event	Urusan Pilihan Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Wisata	<b>Dinas Pariwisata</b>
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
			Program Pengembangan Kemitraan	



Sasaran	Arah Kebijakan 2018	Urusan	Program/ Pembangunan	PD
	daerah maupun regional			
<b>Meningkatnya pengembangan seni dan budaya lokal dalam rangka mendukung destinasi wisata dan kelestarian tradisi kehidupan masyarakat</b>	Pelatihan dan dukungan peralatan dan kelengkapan seni dan budaya secara regular bagi remaja dan pemuda Pemberian dukungan hardware dan software bagi pusat kebudayaan	Urusan Wajib Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya	
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	
<b>Meningkatnya ekonomi kerakyatan berbasis industri kreatif dan potensi daerah</b>	Pelatihan teknis produksi dan manajerial bagi UMKM terkait agro  Pendataan, pembinaan, dan fasilitasi kegiatan Koperasi dan UKM setiap tahun  Peningkatan SDM pengurus koperasi dan UKM aktif	Urusan Wajib Koperasi, usaha kecil, dan menengah	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	<b>Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan	

Sasaran	Arah Kebijakan 2018	Urusan	Program/ Pembangunan	PD
			Kompetitif Usaha Kecil Menengah	
<b>Meningkatnya akses, tata niaga, dan infrastruktur perdagangan antar wilayah dan antar daerah</b>	Pembangunan dan rehabilitasi pasar daerah Penyediaan sarana dan prasarana outlet perdagangan Penguatan sisten pengelolaan pasar yang terintegrasi dengan pusat atau sentra produk unggulan Penyusunan kajian, kebijakan, dan regulasi kerjasama perdagangan antar daerah Mapping potensi produk unggulan daerah untuk kegiatan perdagangan lintas daerah Pengendalian, pengawasan, dan monitoring kegiatan keluar masuk produk di sektor perdagangan	Urusan Pilihan Perdagangan	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>
			Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	
			Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	
			Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	
		Urusan Wajib Pekerjaan umum dan penataan ruang	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	<b>Dinas Pekerjaan Umum</b>
<b>Meningkatnya pengembangan industri pengolahan pangan, peternakan, perikanan, pengolahan pakan, dan potensi daerah yang berdaya saing</b>	Pengembangan industri pengolah sebagai support system di sektor pertanian dalam arti luas Pengembangan industri pasca panen produksi pertanian Dukungan kebijakan bagi pengembangan industri potensial yang akan menyerap tenaga kerja skala besar Fasilitasi kegiatan industri dengan informasi ketersediaan bahan baku dan pelaku usaha masyarakat	Urusan Pilihan Perindustrian	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>
			<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b> <b>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b>	

5. Prioritas Kutai Kartanegara : Pemerataan Infrastruktur  
 Prioritas Kalimantan Timur : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar  
 Prioritas Nasional : - Infrastruktur, Konektivitas, Dan Kemaritiman  
 - Pembangunan Wilayah

Sasaran	Arah Kebijakan 2018	Urusan	Program/ Pembangunan	PD
<b>Meningkatnya interkoneksi antar wilayah</b>	Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan Interkoneksi jalan tembus desa	Urusan Wajib Pekerjaan umum dan penataan ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	<b>Dinas Pekerjaan Umum</b>
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	
			Program peningkatan Jalan dan Jembatan	
			Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	
			Program Pengendalian Banjir	
			Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	
			Program pembangunan turap/talud/bronjong	
			Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan	
			Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	
			Program peningkatan Jalan dan Jembatan	
			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
			Program Perencanaan Tata Ruang	<b>Dinas Pertanahan</b>

Sasaran	Arah Kebijakan 2018	Urusan	Program/ Pembangunan	PD
			Program Pemanfaatan Ruang	<b>dan Penataan Ruang</b>
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
			Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	<b>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>
			Program pembangunan turap/talud/ bronjong	
			Program pengelolaan areal pemakaman	
			Program pengelolaan ruang terbuka hijau	
			Program Pembangunan / Peningkatan Bangunan Negara	<b>Dinas Pekerjaan Umum</b>
			Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/Kelurahan	<b>Seluruh Kecamatan</b>
			Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/ Kelurahan	
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	
			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	
<b>Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan</b>	Pengembangan jasa layamam transportasi kota (dermaga) Pengembangan layanan transportasi kota Pembangunan	Urusan Wajib Perhubungan	Program peningkatan pelayanan angkutan	<b>Dinas Perhubungan</b>
			Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ	

Sasaran	Arah Kebijakan 2018	Urusan	Program/ Pembangunan	PD
	sarana dan prasarana perhubungan yang berhubungan dengan transportasi public		Program pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan kelayakan pengoprasian kendaraan bermotor	
<b>Terwujudnya koneksitas jaringan komunikasi, internet, dan pengembangan kawasan smart city.</b>	Memperluas jaringan internet untuk public Pembangunan Tower Pintar Penyiapan kebijakan dan payung hukum pembangunan smart city	Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika Program Penguatan Kelembagaan Komunikasi	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian</b>
<b>Meningkatnya layanan kebutuhan dasar perumahan dan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan</b>	Pembangunan dan peningkatan ketersediaan air bersih Peningkatan pengelolaan persampahan yang dapat melayani seluruh penduduk Pembangunan dan peningkatan pengelolaan limbah rumah tangga Peningkatan pengelolaan drainase	Urusan Wajib Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah <b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	<b>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>

6. Prioritas Kutai Kartanegara : Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup  
 Prioritas Kalimantan Timur : - Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan  
 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup  
 Prioritas Nasional : - Ketahanan Energi

Sasaran	Arah Kebijakan 2018	Urusan	Program/ Pembangunan	PD
<b>Meningkatnya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta pengendalian pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan</b>	Penetapan kawasan khusus  Penetapan kawasan strategis kabupaten  Pengendalian Pencemaran  Konservasi lahan bekas tambang  Pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup	Urusan Wajib Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	
			Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
			Program Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan				
<b>Meningkatnya ketersediaan sumber energi baru dan terbarukan</b>	Pengembangan Energi bagi wilayah yang belum terjangkau listrik  Pembangunan	Urusan Pilihan Energi dan sumber daya mineral	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Program Pemanfaatan Sumber Air	

Sasaran	Arah Kebijakan 2018	Urusan	Program/ Pembangunan	PD
	sarana dan prasarana kelistrikan Pengembangan sumber energi alternatif berbasis potensi lokal.		Bawah Tanah	
			Program Pengembangan Data/Informasi Pertambangan	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Panas Bumi	
			Program Penyediaan Data & Informasi BBM Tertentu & LPG	
			Program Pemeliharaan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan	

7. Prioritas Kutai Kartanegara : Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  
 Prioritas Kalimantan Timur : - Peningkatan Kualitas Sistem Penyelenggaraan Pendidikan  
 : - Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan  
 : - Percepatan Pengentasan kemiskinan  
 : - Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja  
 Prioritas Nasional : - Pendidikan  
 : - Kesehatan  
 : - Penanggulangan Kemiskinan

Sasaran	Arah Kebijakan 2018	Urusan	Program/ Pembangunan	PD
<b>Meningkatnya partisipasi perempuan dalam membangun, kualitas kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan dan</b>	Pembinaan kelompok-kelompok perempuan Optimalisasi kesempatan usaha produktif bagi	Urusan Wajib Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	

Sasaran	Arah Kebijakan 2018	Urusan	Program/ Pembangunan	PD
<b>anak</b>	<p>perempuan berbasis kelompok Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dan pelecehan</p> <p>Peningkatan arus komunikasi kelompok perempuan melalui forum kelompok perempuan</p> <p>Dukungan kebijakan terkait gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah</p> <p>Optimalisasi Kinerja tim terpadu terkait perlindungan anak</p> <p>Pemantauan dan pengawasan kegiatan di masyarakat yang berpotensi terjadi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak</p>		<p>Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan</p> <hr/> <p>Program Pemenuhan hak - hak anak</p> <hr/> <p>Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan</p>	



# BAB V

## **BAB V**

### **TUGAS PEMBANTUAN**

**D**alam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa penyelenggaraan tugas pembantuan, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Tugas Pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut, di samping melaksanakan tugas-tugas desentralisasi, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga melaksanakan tugas-tugas pembantuan.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 2001, dimana azas tugas pembantuan merupakan sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah Bawahan, penugasan dari Propinsi kepada Kabupaten/Kota ke Kecamatan dan ke Desa/Kelurahan, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya kepada pemberi tugas.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, bahwa yang dimaksud Tugas Pembantuan adalah "Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu"

Dalam hal pengelolaan dana, pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan dan penyampaian laporan, Pembinaan dan Pengawasan serta Pemeriksaan dan Sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pemerintah dapat memberikan sebagian urusan pemerintahannya kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau Desa melalui Tugas Pembantuan. Hal ini bertujuan untuk membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Tugas pembantuan yang diberikan merupakan tugas-tugas pemerintahan yang apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau Desa akan lebih efisien dan efektif.

## A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Selama tahun 2018, penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerima penugasan dari Pemerintah Pusat melalui dana tugas pembantuan yang diterima meliputi bidang Pertanian.

### 1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LKPJ, AMJ dan ILPPD;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Petunjuk Teknis Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Pertanian No. 60/Permentan/KU.410/12/ 2009 Tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota

### 2. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN

Pada Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan dana tugas pembantuan dari APBN dari 1 Departemen teknis melalui Dinas Pertanian dan Peternakan, yaitu :

- ❖ Kementrian Pertanian Republik Indonesia;

### 3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.  
Dimana ruang lingkup pekerjaan dalam program ini meliputi :
  - a) Pengelolaan air Irigasi untuk Pertanian.
  - b) Perluasan dan perlindungan lahan pertanian.
  - c) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan alat mesin pertanian.
  - d) Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen prasarana dan sarana pertanian.
  - e) Fasilitasi pupuk dan pestisida.
  - f) Fasilitasi pembiayaan pertanian
2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu dan Hasil Tanaman Pangan  
Dimana ruang lingkup pekerjaan dalam program ini meliputi :
  - a) Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal.
  - b) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada ditjen Tanaman Pangan.

### 4. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun realisasi Program dan Kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagaimana berikut :

- 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian  
Dari kegiatan tersebut dana alokasi kegiatan PSP APBN-TP tahun anggaran 2018 tersedia pagu dana sebesar Rp. 5.649.690.000,- dengan penyerapan dana yang terealisasi sebesar Rp.5.531.890.000 atau 97,9 % dari pagu dana yang tersedia.
- 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu dan Hasil Tanaman Pangan  
Dari kegiatan tersebut dana alokasi Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu dan Hasil Tanaman Pangan APBN-TP tahun anggaran 2018 tersedia pagu dana sebesar Rp. 5.070.772.000,-

### 5. SUMBER DANA DAN JUMLAH ANGGARAN

Sumber dana dan jumlah anggaran yang digunakan dalam tugas pembantuan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan bersumber dari APBN Tahun 2018 (dalam bentuk rupiah murni) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.070.772.000,-
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian bersumber dari APBN Tahun 2018 (dalam bentuk rupiah murni) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.649.690.000,-

### 6. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN

Dana tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara.

## 7. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### 1) Permasalahan

Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan terdapat beberapa kendala antara lain :

- ✓ Terjadinya wacana penghematan anggaran atau pengurangan anggaran sehingga berdampak pada waktu perencanaan pelaksanaan sehingga terjadi pergeseran perubahan jadwal waktu pelaksanaan pada akhir tahun.

### 2) Solusi

Solusi yang dapat dilakukan untuk menyikapi permasalahan tersebut antara lain :

- ✓ Pemantapan Perencanaan Anggaran dari kementerian

## **B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN**

---

Tidak ada Tugas Pembantuan yang diberikan

# BAB VI

## **BAB VI**

### **TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

**P**enyelenggaraan tugas umum Pemerintahan sebagaimana diuraikan pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 bahwa penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan meliputi kerjasama Daerah yang terdiri dari Kerjasama Antar Daerah dan Kerjasama Antar Daerah dengan Pihak Ke Tiga, koordinasi dengan instansi vertikal di Daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan Daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan tugas-tugas umum Pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh Daerah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dengan asas desentralisasi, kewenangan Pemerintah diserahkan kepada daerah otonom dan daerah otonom diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

Kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyeraskan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

Melalui kerjasama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam bekerjasama antar daerah maupun kerjasama dengan pihak ketiga Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah membentuk Tim Koordinasi berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 804/SK-BUP/HK/2013 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### **A. KERJASAMA ANTAR DAERAH**

---

##### **A.1. Daerah Yang Diajak Kerjasama**

Kerjasama antar daerah dimaksudkan untuk memanfaatkan potensi pada masing-masing daerah untuk bekerjasama dengan daerah lain yang memiliki kesamaan potensi. Implementasi kerjasamayang dilaksanakan oleh dua daerah agar mendasari dan memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi dan saling menguntungkan, kebijakan kerjasama antar daerahsebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Antar Daerah. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam bekerjasama antar daerah.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan kerjasama antar daerah dengan 4 Pemerintah Kab/Kota yaitu :

1. Pemerintah Kota Balikpapan
2. Pemerintah Kota Samarinda
3. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
4. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

## A.2. DASAR HUKUM

Guna mensinergikan potensi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan daerah lain, hingga saat ini peluang-peluang yang ada masih belum dimanfaatkan dengan baik, sehingga sampai berakhir Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bekerjasama dengan daerah lain, untuk mengelola potensi melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait sebagai berikut :

1. MoU Nomor : 180/MoU-7/HK/2018 Tanggal 8 Mei 2018 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tentang Pengembangan e-Government.
2. MoU Nomor : 180/MoU-10/HK/2018 Tanggal 22 Mei 2018 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tentang Kerjasama Pembangunan Antar Daerah.
3. MoU Nomor : 180/MoU-27/HK/2018 Tanggal 29 Oktober 2018 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Kota Samarinda tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan Bertetangga.
4. MoU Nomor : 180/MoU-32/hk/2018 tanggal 26 November 2018 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Kota Balikpapan tentang Pembangunan Antar Daerah.

## A.3. BIDANG KERJASAMA

Melalui kerjasama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal. Bidang kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Daerah lain adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.1**

Bidang Kerjasama dengan Pemerintah Daerah

No	Nama Pemerintah Daerah	Bidang Kerjasama
1	Pemerintah Kota Balikpapan	Kerjasama Bidang Pembangunan Antar Daerah
2	Pemerintah Kota Samarinda	Kerjasama Pembangunan Perkotaan Bertetangga
3	Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	Kerjasama Bidang Pembangunan Antar Daerah
4	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Kerjasama Pengembangan e-Government

## A.4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan yang dihadapi adalah bahwa selama ini kerjasama antar daerah setelah dilakukan penandatanganan Naskah Kerjasama, namun beberapa obyek yang dikerjasamakan belum diimplementasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah kedua belah pihak, sedangkan solusi yang dapat ditempuh adalah mendorong Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan.

## B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

### B.1. MITRA YANG DIAJAK KERJASAMA

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara membutuhkan keikutsertaan pihak ketiga untuk turut memacu pertumbuhan dan perkembangan daerah dalam berbagai bidang.



Bidang-bidang kerja sama yang dilakukan dengan pihak ketiga merupakan lapangan kegiatan yang dilakukan atas dasar prinsip-prinsip transparansi efisiensi dan efektifitas, dimana diharapkan hal ini akan menguntungkan kedua pihak, baik pihak ketiga maupun Daerah.

Berikut adalah daftar nama pihak ketiga yang diajak kerjasama :

- 1) Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara
- 2) BPJS Kesehatan Devisi Regional VIII
- 3) PT. PLN unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian
- 4) Yayasan Prakarsa Borneo
- 5) Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
- 6) PT Multi Harapan Utama
- 7) Universitas Mulawarman
- 8) Universitas Lambung Mangkurat
- 9) Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makasar
- 10) TNI Angkatan Laut
- 11) Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 12) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian
- 13) Kepolisian Resort Kutai Kartanegara
- 14) Kementerian Sosial RI
- 15) Kantor Pelayanan Kantor Kekayaan Daerah, Penjualan dan Pengurusan Piutang dan Pengurusan Piutang Daerah, Penjualan Barang Milik Daerah dan Pengurusan Piutang Daerah Kabupaten kutai Kartanegara

## **B.2. DASAR HUKUM**

Pada tahun 2018, Pemkab Kutai Kartanegara melakukan kerjasama dengan beberapa pihak ketiga. Kerjasama tersebut diikat dalam bentuk MoU. Adapun MoU yang dilaksanakan dengan pihak ketiga sebagai berikut :

- 1) MoU Nomor : 180/MoU-1/HK/2018 Tanggal 8 Januari 2018 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan BPJS Kesehatan Cabang Utama Samarinda tentang Perluasan Cakupan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS\_ menuju Universal Health Coverage (UHC) Kab. Kukar.
- 2) MoU Nomor : 180/MoU-2/HK/2018 Tanggal 5 Februari 2018 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan PT. PLN (Persero) unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur tentang Penggunaan Lahan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUUT)
- 3) MoU Nomor : 180/MoU-3/HK/2018 Tanggal 5 Februari 2018 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Yayasan Prakarsa Borneo tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 4) MoU Nomor : 180/MoU-4/HK/2018 Tanggal 8 Maret 2018 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi dengan PT Multi Harapan Utama tentang Kementerian Produk Unggulan Kawasan Pedesaan Agrowisata Bahari di Kecamatan Loa Kulu.
- 5) MoU Nomor : 180/MoU-5/HK/2018 Tanggal 21 Maret 2018 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Kaltim tentang Program Resolusi Jagung.
- 6) MoU Nomor : 180/MoU-6/HK/2018 Tanggal 5 April 2018 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Sekolah Transportasi Darat tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Tri Darma Perguruan Tinggi Transportasi.

- 7) MoU Nomor : 180/MoU-11/HK/2018 Tanggal 24 Mei 2018 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Universitas Mulawarman tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- 8) MoU Nomor 180/MoU-12/HK/2018 Tanggal 5 Juni 2018 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Universitas Kutai Kartanegara tentang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian.
- 9) MoU Nomor : 180/SKB-13/HK/2018 Tanggal 7 Juli 2018 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makasar.
- 10) PKS Nomor : 180/PKS-17/HK/2018 Tanggal 10 Juli 2018 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat tentang Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Tri Darma Perguruan Tinggi STTD.
- 11) MoU Nomor : 180/MoU-18/HK/2018 Tanggal 12 September 2018 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pangkalan TNI AL Balikpapan tentang Pengenalan dan Pembinaan Siswa/i dalam Penerimaan Calon Prajurit TNI-AL.
- 12) MoU Nomor : 180/MoU-19/HK/2018 Tanggal 12 September 2018 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pangkalan TNI AL Balikpapan tentang Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Maritim di wilayah Pesisir Kutai Kartanegara.
- 13) MoU Nomor : 180/SKB-20/HK/2018 Tanggal 8 Agustus 2018 SKB Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 14) MoU Nomor : 180/MoU-21/HK/2018 Tanggal 12 September 2018 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Yayasan Konservasi Rare Aquatic Species of Indonesia tentang Identifikasi dan Inventarisasi Claon Kawasan Konservasi Perairan.
- 15) SKB Nomor : 180/SKB-22/HK/2018 Tanggal 21 September 2018 SKB Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- 16) SKB Nomor : 180/SKB-23/HK/2018 Tanggal 21 September 2018 SKB Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
- 17) SKB Nomor : 180/SKB-24/HK/2018 Tanggal 24 September 2018 SKB Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- 18) MoU Nomor 180/MoU-26/HK/2018 Tanggal 27 September 2018 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Persatuan Ahli Gizi DPC Kukar. tentang Perjanjian Kerjasama mengenai Kab. Kukar Go Zero Malnutrition.
- 19) MoU Nomor 180/MoU-28/HK/2018 Tanggal 29 Oktober 2018 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Badan
- 20) MoU Nomor 180/MoU-11/HK/2018 Tanggal 24 Mei 2018 MoU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Universitas Mulawarman tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas SDM.
- 21) MoU Nomor 180/MoU-21/HK/2018 Tanggal 30 Oktober 2018 Pemkab Kukar dengan Yayasan Konservasi Rare Aquatic Species of Indonesia tentang Identifikasi dan Inventarisasi Calon Kawasan Konservasi Perairan.

- 22) MoU Nomor 180/MoU-39/HK/2018 Tanggal 10 Desember 2018 MoU Pemerintah Kukar dengan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) tentang Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan di Wilayah Kab. Kukar Provinsi Kalimantan Timur.
- 23) MoU Nomor 180/MoU-47/HK/2018 Tanggal 3 Desember 2018 MoU Pemkab Kukar dengan Kepolisian Resort Kutai Kartanegara tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Pelatihan Calon Anggota Polri bagi Putra/Putri Daerah Kab. Kutai Kartanegara.
- 24) MoU Nomor 180/MoU-28/HK/2018 MoU Pemkab Kukar dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan tentang Pengembangan Manajemen Pemerintahan.
- 25) MoU Nomor 180/MoU-38/HK/2018 Tanggal 18 Desember 2018 MoU Pemkab Kukar dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim tentang Kerja Sama Pengembangan Ekonomi Lokal Komoditas Ulap Doyo di Kab. Kukar.
- 26) MoU Nomor 180/MoU-1/HK/2018 tanggal 10 Januari 2018 dengan PT. Indomarco Prisma tentang Prelaksanaan Program Inovasi Dagang Kemitraan.
- 27) MoU Nomor 180/MoU-18/HK/2018 tanggal 12 September 2018 dengan Pangkalan TNI AL Balikpapan tentang Pengenalan dan Pembinaan Siswa/i dalam penerimaan Calon Prajurit TNI AL.
- 28) MoU Nomor 180/MoU-19/HK/2018 tanggal 12 September 2018 dengan Pangkalan TNI AL Balikpapan tentang Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Maritim di wilayah Pesisir Kutai Kartanegara.

### B.3. BIDANG KERJASAMA

Obyek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum. Pelaksanaan kerjasama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Obyek kerjasama merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerjasama untuk selanjutnya menentukan pilihan bentuk kerjasama yang akan dilaksanakan.

**Tabel 6.2**

Bidang Kerjasama dengan pihak ketiga

No	Nama Instansi / Pihak Ketiga	Bidang Kerjasama
1	PT. PLN (Persero) unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur	Kerjasama tentang Penggunaan Lahan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUUT)
2	BPJS Kesehatan Devisi Regional VIII	Kerjasama tentang Perluasan Cakupan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS_ menuju Universal Health Coverage (UHC) Kab. Kukar
3	Yayasan Prakarsa Borneo	Kerjasama tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Nama Instansi / Pihak Ketiga	Bidang Kerjasama
4	Balai Pengkajian Teknologu Pertanian Prov. Kaltim	Kerjasama tentang Program Resolusi Jagung
5	Universitas Mulawarman	Kerjasama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
6	Universitas Kutai Kartanegara	Kerjasama Tentang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian
7	Pangkalan TNI AL Balikpapan	Kerjasama tentang Pengenalan dan Pembinaan Siswa/i dalam Penerimaan Calon Prajurit TNI-AL
8	Pangkalan TNI AL Balikpapan	Kerjasama tentang Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Maritim di wilayah Pesisir Kutai Kartanegara
9	Yayasan Konservasi Rare Aquatic Species of Indonesia	Kerjasama tentang Identifikasi dan Inventarisasi Claon Kawasan Konservasi Perairan.
10	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Kerjasama Tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
11	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Kerjasama Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018
12	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Kerjasama tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
13	Persatuan Ahli Gizi DPC Kukar	Kerjasama tentang Perjanjian Kerjasama mengenai Kab. Kukar Go Zero Malnutrition
14	Universitas Mulawarman	Kerjasama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas SDM
15	Kepolisian Resort Kutai Kartanegara	Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pelatihan Calon Anggota Polri bagi Putra/Putri Daerah Kab. Kutai Kartanegara
16	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Kerjasama tentang Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan di Wilayah Kab. Kukar Provinsi Kalimantan Timur.
17	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	Kerjasama tentang Pengembangan Manajemen Pemerintahan.
18	PT. Indomarco Prismatama	Kerjasama tentang Prelaksanaan Program Inovasi Dagang Kemitraan.
19	Pangkalan TNI AL Balikpapan	Kerjasama tentang Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Maritim di wilayah Pesisir Kutai Kartanegara

#### **B.4. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN**

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara membutuhkan keikutsertaan pihak ketiga untuk turut memacu pertumbuhan dan perkembangan daerah dalam berbagai bidang.

Bidang-bidang kerja sama yang dilakukan dengan pihak ketiga merupakan lapangan kegiatan yang dilakukan atas dasar prinsip-prinsip transparansi efisiensi dan efektifitas, dimana diharapkan hal ini akan menguntungkan kedua pihak, baik pihak ketiga maupun Daerah.

Obyek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum. Pelaksanaan kerjasama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Obyek kerjasama merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerjasama untuk selanjutnya menentukan pilihan bentuk kerjasama yang akan dilaksanakan.

Untuk memaksimalkan penggalan dan pemanfaatan potensi SDA dan SDM didaerah perlu dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama dimaksud dapat berupa fisik maupun juga non fisik dan khusus dibidang non fisik dimaksudkan untuk menyerap ilmuserita keahlian khusus dari pihak ketiga selaku nara sumber juga sebagai pendamping dalam hal pelaksanaan kegiatan/proyek baik itu dari Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen dan perusahaan swasta yang berbadan hukum baik itu berupa yayasan, BUMN dan lembaga lainnya.

### **C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH**

#### **C.1 FORUM KOORDINASI**

Sebagaimana Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1986 bahwa dalam rangka melancarkan pelaksanaan urusan pemerintahan umum pembangunan dan membina kestabilan politik serta kesatuan Bangsa, perlu mewujudkan kerja sama antara aparatur- aparatur pemerintah di Daerah serta untuk lebih menjamin terselenggaranya tugas-tugas Bupati/Walikota madya di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan masyarakat, keberadaan Musyawarah Pimpinan Daerah, selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 istilah MUSPIDA dirubah menjadi FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (Forkopimda), dimana peran forum tersebut bertujuan untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan tugas pemerintahan didaerah secara berdaya guna dan berhasil guna serta melakukan penilaian atas intensitas dan eksensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat guna menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya dalam rangka pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan guna mewujudkan stabilitas nasional mensukseskan pembangunan didaerah.

#### **C.2 MATERI KOORDINASI**

- 1) Pada hari Rabu, Tanggal 10 Januari Tahun 2018, bertempat di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kutai Kartanegara telah dilaksanakan Rapat

Koordinasi Unsur Musyawarah Pimpinan Daerah / Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang membahas :

- a) Tindak Lanjut Putusan MA terkait Pencabutan Ijin Lokasi PT. Tunas Prima Sejahtera. Menyikapi hal tersebut, disarankan Pemerintah Kabupaten segera menindaklanjutinya dengan melakukan sosialisasi kepada unsur Pemerintah terbawah, dalam hal ini kecamatan dan desa serta masyarakat mengenai putusan dimaksud. Dan melakukan langkah-langkah preventif di lapangan dengan melibatkan instansi terkait untuk mencegah gejolak sosial yang bisa ditimbulkan dari proses eksekusi putusan MA dimaksud.
  - b) Pemetaan Potensi Masalah Pengusulan DOB (Daerah Otonomi Baru) dalam wilayah Kutai Kartanegara. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten agar tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan RPP Desain Besar Penataan daerah yang belum ditetapkan. Hal ini berlaku juga untuk pengelolaan usulan DOB Kutai Tengah.
- 2) Pada Hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018, bertempat di Ruang Kantor Kejaksaan Kutai Kartanegara telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Unsur Musyawarah Pimpinan Daerah / Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang membahas :
- a) Perkebunan Besar Swasta dan Ketenagakerjaan, yaitu konflik antara PT. Mahakam Sawit Plantation Group dengan karyawannya. Dengan langkah yang diambil yaitu :
    - ✓ Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Perkebunan Kutai Kartanegara bersama instansi vertikal terkait untuk melakukan identifikasi dan penelitian indikasi tanah terlantar pada HGU PT. Mahakam Group sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar serta Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.
    - ✓ Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus mendorong penyelesaian PT. Mahakam Sawit Plantation Group melalui mediasi dan mendesak komitmen pemilik (owner), namun apabila sudah tidak ada lagi komitmen pemilik (owner) maka penyelesaian akan ditempuh melalui jalur hukum (legal)
  - b) Konflik dualisme kepengurusan pada Koperasi tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Buah Bumi Kutai Kartanegara. Dengan langkah yang diambil sebagai berikut :
    - ✓ Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara, segera menyampaikan ke Koperasi TKBM Buah Bumi Kartanegara agar penyelesaian masalah Koperasi TKBM Buah Bumi Kartanegara dilakukan intern koperasi, dengan melalui mekanisme Rapat Anggota Luar Biasa.
    - ✓ Jika dalam beberapa cara tersebut tidak menemukan kesepakatan/islah, para pihak dapat melakukan upaya hukum (legal) untuk penetapan kepengurusan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Buah Bumi Kartanegara.
- 3) Pada Hari Rabu, tanggal 17 Mei 2018, bertempat di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kutai Kartanegara telah dilaksanakan Rapat Unsur

Musyawarah Pimpinan Daerah / Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang membahas :  
Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok selama Bulan Suci Ramadhan 1439 H dan Operasi Ketupat Tahun 2018 dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Menjamin ketersediaan tabung gas LPG 3 kg dan sembako (beras, gula dan minyak goreng) selama Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 H, dan mengharapkan para pedagang dapat mengendalikan harga dengan sewajarnya.
- b) Operasi ketupat Tahun 2018, melakukan koordinasi dan komunikasi semua pihak agar dapat terjalin dengan baik, aman dan lancar.
- c) Terkait infrastruktur yang mengalami kerusakan terutama di jalur Loa Janan, Samarinda, Balikpapan dan Zona Hulu, akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait sehingga penanganannya bisa segera dilakukan pemecahannya tanpa harus menunggu anggaran.
- d) Operasi Pasar yang dilakukan OPD terkait diusahakan berjalan tanpa harus menunggu anggaran yang ada.

## **D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH**

---

### **D.1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN**

Permasalahan batas wilayah merupakan permasalahan krusial, yang dialami juga oleh daerah-daerah se-Indonesia. Permasalahan tersebut timbul dilatarbelakangi beberapa faktor, salah satunya potensi ekonomis yang berada disekitar lokasi titik perbatasan kedua wilayah, baik itu batas antar provinsi, kabupaten, kecamatan hingga wilayah kelurahan/desa. Kebijakan penataan batas wilayah antar kabupaten/kota mengacu kepada Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 dan untuk penataan batas antar kecamatan berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996.

Untuk meminimalisir permasalahan tapal batas, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Bagian Administrasi Pemerintahan setiap tahunnya mengalokasikan anggaran guna menetapkan dan menyelesaikan masalah batas baik itu wilayah antar Kabupaten/Kota yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan penataan batas antar kecamatan dalam Wilayah Kutai Kartanegara, serta batas desa/kelurahan.

Pengalokasian Anggaran Tahun 2018 dalam hal pembinaan batas wilayah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setkab Kutai Kartanegara diperuntukan kegiatan :

- 1) Pelacakan dan Penegasan Batas Kabupaten Kutai Kartanegara
- 2) Penataan dan Penetapan Batas Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
- 3) Penataan dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
- 4) Pembakuan Nama Rupa Bumi di Kab. Kutai Kartanegara
- 5) Penataan (Pemekaran) Kecamatan dan Kelurahan.

Adapun sasaran kegiatan diarahkan pada keseluruhan segment batas antar Kabupaten/Kota, kecamatan dengan kecamatan serta desa/kelurahan yang berada dalam Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana dilakukan secara bertahap sesuai dengan perencanaan tahunan yang memperhitungkan

kemampuan tenaga dan ketersediaan waktu yang ada, Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Penataan Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 171/SK-BUOP/HK/2017 tanggal 16 Mei 2017, dengan unsur Tim Tehnis dari SKPD/Instansi terkait, yakni sebagai berikut :

- 1) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara
- 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kutai Kartanegara
- 3) BPN Kabupaten Kutai Kartanegara
- 4) Dinas Pertanahan dan P Kabupaten Kutai Kartanegara
- 5) Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara
- 6) Inspektorat Kab. Kutai Kartanegara
- 7) Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara
- 8) Bagian Pemerintahan Setkab. Kutai Kartanegara
- 9) Camat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

## **D.2. SENGKETA BATAS WILAYAH**

Adapun hasil realisasi Kegiatan pelacakan dan penetapan batas yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018 sebagai berikut :

### **A. BATAS WILAYAH ANTAR KABUPATEN**

Tahun 2018 Pelacakan dan Penegasan Batas antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan memperjelas batas wilayah administrasi dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan.

Mengenai sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan penataan batas antar kabupaten yaitu :

- a) Tertata batas Administrasi yang Definitif antara Kabupaten/Kota yang berbatasan.
- b) Meminimalisir konflik/sengketa batas yang berkepanjangan.
- c) Memudahkan dalam mengelola sumber daya alam.

Rapat Koordinasi antar Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 3 kali, yaitu pembahasan terhadap segmen :

1. Batas Kab. Kutai Kartanegara – Kab. Panajam Paser Utara, sebanyak 2 kali
2. Batas Kab. Kutai Kartanegara – Kab. Samarinda, sekali pembahasan.

Untuk pelacakan batas di lapangan hanya dilakukan pada segmen batas Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Barat.

Rapat Pembahasan draft Permendagri dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan Tim Penegasaan Batas Daerah (PBD) Provinsi Kalimantan Timur, Tim PBD Prov Kalimantan Utara, Tim PBD Kabupaten Kutai Kartanegara, Tim PBD Kabupaten Malinau dan Tim PBD Kabupaten Mahakam Ulu pada segmen :

1. Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov. Kaltim – Kabupaten Malinau, Prov. Kaltara
2. Kabupaten Kutai Kartanegara – Kabupaten Mahakam Ulu.

Selama 2018 juga dilakukan Rapat Klarifikasi Peta antara Pusat dan Daerah, dilakukan pada segmen batas :

1. Batas Kab. Kutai Kartanegara – Kab. Panajam Paser Utara
2. Batas Kab. Kutai Kartanegara – Kab. Samarinda.



## **B. BATAS WILAYAH ANTAR KECAMATAN**

Pelaksanaan Kegiatan Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Dalam proses penegasan batas antar Kecamatan yaitu melakukan tahapan berupa pelacakan dilapangan guna penataan dan penegasan batas wilayah administrasi antara kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Di sini yang dimaksud adalah batas terluar desa di dalam wilayah Kecamatan tersebut.

Tahun 2018 untuk dilakukan pelacakan pada segmen :

1. Kecamatan Tenggarong – Kecamatan Loa Kulu
2. Kecamatan Muara Badak – Kecamatan Marang Kayu
3. Kecamatan Tenggarong Seberang – Kecamatan Marang Kayu

Sedangkan fasilitasi Rapat Mediasi dilakukan pada :

1. Kecamatan Muara kaman – Kecamatan Sebulu (segmen Desa Lebaho Ulaq dengan Desa Selerong)
2. Kecamatan Muara Badak – Kecamatan Marang Kayu (segmen Desa Sallo Cela dengan Desa Perangat Selatan dan Sambera Baru)

## **C. BATAS WILAYAH DESA/KELURAHAN**

Pada tahun 2018 Fasilitasi Kegiatan Penataan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan oleh Tim Penataan Wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara hanya dilakukan Rapat Mediasi permasalahan batas Desa Senoni – Desa Selerong (permohonan revisi SK Batas)

Tim Penataan Wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara juga melakukan pembahasan draft Perbup Penetapan Batas Desa/Kelurahan :

1. Draft Perbup Penetapan Batas Kelurahan Amborawang Laut
2. Draft Perbup Penetapan Batas Kelurahan Sallo Api Laut
3. Draft Perbup Penetapan Batas Kelurahan Kampung Lama
4. Draft Perbup Penetapan Batas Kelurahan Tanjung Harapan
5. Draft Perbup Penetapan Batas Desa Beringin Agung
6. Draft Perbup Penetapan Batas Desa Bukit Raya.

## **D. PENATAAN (PEMEKARAN ) KECAMATAN DAN KELURAHAN**

Pada tahun 2018, dilakukan penelitian dokumen terkait proposal yang disampaikan oleh Kecamatan dan Kelurahan terkait Pemekaran atau Pembentukan wilayah baru :

1. Pemekaran Kecamatan Samboja
2. Pemekaran Kelurahan Sanga-Sanga Dalam
3. Pemekaran Kelurahan Karya Merdeka.

## **E. PEMBAKUAN NAMA RUPA BUMI**

Pada tahun 2018, dilakukan pengambilan data unsur Rupa Bumi buatan yang dilakukan pada Kecamatan Kota Bangun, kemudian hasilnya disampaikan kepada Provinsi Kalimantan Timur.

## **F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

Penataan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/kota, antar Kecamatan dan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, masih ditemui kendala-kendala yang merupakan masalah yang

dihadapi Tim Penataan Wilayah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

- 1) Masih adanya keinginan desa untuk melakukan perubahan batas yang telah ditetapkan oleh Bupati
- 2) Tidak adanya kesepakatan letak batas wilayah Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- 3) Lokasi batas dan medan antar wilayah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang sulit dilalui, sehingga terkendala untuk menetapkan batas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006.
- 4) Kurangnya dukungan para tokoh masyarakat terhadap batas wilayah yang telah disepakati oleh Camat, Kepala Desa dan Lurah, hal demikian dilatar belakangi faktor ekonomis pada lokasi yang dipermasalahkan dan kurangnya pemahaman terhadap kepemilikan tanah yang lokasinya berada diantar dua wilayah.

Adapun langkah-langkah yang diambil untuk memecahkan masalah yaitu :

1. Memberikan pemahaman terhadap aparat kecamatan, Kelurahan dan Desa serta masyarakat mengenai masalah batas wilayah.
2. Dukungan semua pihak baik itu pemerintah provinsi, kabupaten/kota
3. Diambil alih pihak yang memfasilitasi penetapan batas wilayah yaitu Gubernur untuk batas wilayah Kabupaten/Kota, Bupati untuk Wilayah Kecamatan antar kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

## **E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**

### **E.1. BENCANA YANG TERJADI DAN PENANGGULANGANNYA**

Kawasan rawan bencana merupakan wilayah dengan kondisi fisik (terutama geologis dan topografis) yang sangat memungkinkan terjadinya bencana alam. Bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berupa bencana alam yang meliputi: bencana tanah longsor termasuk di dalamnya tanah retak, bencana banjir, bencana angin ribut dan kekeringan. Selain bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam, di Kabupaten Kutai Kartanegara juga terjadi bencana non alam yakni bencana kebakaran.

Adapun langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka upaya pencegahan bencana tersebut adalah:

- a) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang penanggulangan bencana kepada masyarakat serta;
- b) Penyerahan alat pemadam kebakaran berupa Tabung Apar isi 6 Kg dan Bola Pemadam Api (Elide Fire) secara simbolis kepada SKPD se Kabupaten Kutai Kartanegara dan disertai demo Pemadaman Api dengan peralatan tersebut.
- c) Dalam upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk menghadapi tantangan tugas yang sudah barang tentu tidak mudah, dimana setiap personil dituntut bekerja secara profesional. Untuk bekerja secara profesional maka dibutuhkan pengetahuan yang cukup agar penanganan peristiwa bencana dilapangan terutama peristiwa kebakaran bisa diatasi dengan cepat, tepat, serta efektif sehingga bisa meminimalkan kerugian harta benda dan mencegah terjadinya korban jiwa.
- d) Inspeksi Proteksi Kebakaran Gedung Berguna untuk meningkatkan pelayanan dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran. Bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kehandalan bangunan gedung jika terjadi ancaman kebakaran, sehingga gedung tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran.

- e) Melakukan koordinasi dengan sektor terkait (SKPD) teknis dalam mengupayakan pencegahan bencana serta upaya-upaya dalam penanganan bencana;
- f) Melaksanakan monitoring daerah potensi bencana terutama pada daerah daerah yang sering terkena bencana;
- g) Melakukan pendataan hasil dari laporan masyarakat yang terkena bencana sebagai rujukan upaya pencegahan selanjutnya.
- h) Menyalurkan bantuan kepada korban bencana;
- i) Melakukan Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan diseluruh Kota/Kecamatan/Desa;
- j) Melaporkan kejadian bencana ke tingkat Provinsi (BPBD Provinsi Kalimantan Timur) dan ke BNPB di Jakarta

## E.2. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN

Sumber anggaran berasal dari APBD Tahun 2018. Jumlah anggaran yang dilaksanakan sebesar Rp 12.875.484.371,- (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

- 1) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial Rp 300.000.000,-
  - a. Verifikasi Dan Pendataan Pasca Bencana Rp 200.000.000,- Terealisasi Rp 199.889.000,- atau 99,94%.
  - b. Monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan belanja bantuan social tidak terencana Rp 70.000.000,- Terealisasi Rp 69.990.600,- atau 99,99%.
  - c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat Rp 30.000.000,- Terealisasi Rp 29.934.700,- atau 99,78%.
- 2) Program Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Rp 415.000.000,-
  - a. Pemenuhan Sarana Damkar Rp 365.000.000,- Terealisasi Rp 0,- atau \0%.
  - b. Sekolah Siaga Bencana Rp 50.000.000,- Terealisasi Rp 25.000.000,- atau 50%.
- 3) Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Rp 215.574.000,-
  - a. Fasilitasi Persiapan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Rp 104.000.000,- Terealisasi Rp 0,- atau 0%.
  - b. Pelatihan Siaga Bencana desa/kelurahan Rp 111.574.000,- Terealisasi Rp 96.333.500,- atau 86,34%.
- 4) Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Rp 2.070.000.000,-
  - a. Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Rp 950.000.000,- Terealisasi Rp 943.763.000,- atau 99,34 %.
  - b. Tanggap Darurat Bencana Alam/non alam Rp 650.000.000,- Terealisasi Rp 647.766.800,- atau 99,66 %.
  - c. Pengerahan peralatan/logistik dan pemenuhan kebutuhan dasar Rp 470.000.000,- Terealisasi Rp 435.277.730,- atau 92,61%.
- 5) Program Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Rp 9.874.910.371,-
  - a. Pembentukan Dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) Rp 417.972.200,- Terealisasi Rp 339.876.200,- atau 81,32 %

- b. Pembuatan, Pemasangan Dan Sosialisasi Rambu-rambu dan Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Rp 360.182.800,- Terealisasi Rp 278.443.400,- atau 77,31 %
- c. Patroli, Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Rp 1.200.000.000,- Terealisasi Rp 211.890.100,- atau 17,66%
- d. Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja Dan Lain-lain Rp 528.525.400,- Terealisasi Rp 422.057.800,- atau 79,86 %
- e. Pemadaman Kebakaran Hutan Dan Lahan Rp 700.000.000,- Terealisasi Rp 0,- atau 0%
- f. Pengolahan Data, Groundcheck dan Penyebarluasan Data Rp 257.940.750,- Terealisasi Rp 11.940.750,- atau 4,63%
- g. Pengadaan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Rp 6.410.289.221,- Terealisasi Rp 3.829.164.100,- atau 59,73 %

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kebijakan dengan memberikan santunan bagi korban Kebakaran, Angin Puting Beliung Dan Tanah Longsor yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 539/SK-BUP/HK/2012 Tentang Penetapan Besaran Santunan Korban Kebakaran, Angin Puting Beliung Dan Tanah Longsor Dalam Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga memberikan bantuan untuk Perbaikan Lingkungan, Sarana dan Prasarana Umum Pasca Bencana berupa bahan-bahan material bangunan.

### **E.3. ANTISIPASI DAERAH DALAM MENGHADAPI KEMUNGKINAN BENCANA**

Antisipasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah lewat SKPD yang menangani bencana adalah :

- a) Melakukan survey didaerah padat penduduk, untuk mengetahui titik rawan terhadap bencana-bencana lainnya.
- b) Membuat hydrant umum di daerah-daerah yang dianggap rawan terhadap bencana baik itu perkantoran maupun pemukiman penduduk.
- c) Membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB) di tiap Kecamatan.
- d) Melakukan siaran keliling dengan menggunakan mobil patroli lewat pengeras suara pada jam-jam tertentu.
- e) Mengadakan tabung Alat Pemadam Api Ringan (APAR) disetiap instansi perkantoran pemerintahan maupun swasta termasuk SPBU, rumah makan perhotelan dan rumah penduduk.
- f) Memasang sepanduk, baliho yang bertuliskan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana maupun bencana lainnya.
- g) Melakukan pelebaran jalan, gang-gang agar mobil pemadam bisa masuk apabila terjadi Bencana.
- h) Melaporkan kejadian bencana ke tingkat Provinsi (BPBD Provinsi Kalimantan Timur) dan ke BNPB di Jakarta

### **E.4. SATUAN KERJA DAERAH YANG MENANGANI BENCANA**

Beberapa SKPD atau badan atau dinas teknis yang terkait didalam Penanggulangan Bencana antara lain Dinas Kesehatan, Dinas sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Korem, Polda, Rumah Sakit, PMI, ORARI, Lembaga Non Pemerintah (LSM) dan lain-lain.

### **E.5. KELEMBAGAAN YANG KHUSUS DIBENTUK MENANGANI BENCANA**

Kelembagaan yang dibentuk adalah Satuan Tugas (Satgas) Pemadam Kebakaran, Satuan Tugas (Satgas) SAR serta Dapur Umum. Kelembagaan yg dibentuk di luar

Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana (DPKPB) seperti Balakarcana dan Tim Reaksi Cepat (TRC).

#### E.6. POTENSI BENCANA YANG DIPERKIRAKAN TERJADI

Sementara ancaman bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah : Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, Gagal Teknologi, Kebakaran Hutan Dan Lahan dan sampai saat ini kebakaran perumahan dan pemukiman sebagai bentuk bencana namun kejadian kebakaran perumahan dan pemukiman menempati urutan tertinggi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesuai data yang dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara, bahwa potensi bencana khususnya bahaya kebakaran yang diperkirakan dalam waktu 1 tahun (Tahun 2018) rata-rata Kebakaran Hutan mencapai 5 Kali (6,5 Ha) Kejadian Kebakaran Pemukiman mencapai 27 Kali Kejadian.

Ancaman bencana lainnya yang mungkin saja terjadi adalah Tsunami di Selat Makassar yang berdampak di empat kecamatan (Samboja, Muara Jawa, Marangkayu dan Muara Badak), Wabah Penyakit, Kerusakan Sosial mengingat di Kabupaten Kutai Kartanegara bermukim berbagai macam suku, dan agama yang ada di Indonesia, juga banyaknya perusahaan-perusahaan pertambangan dan perkebunan yang beroperasi.

### F. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

#### F.1. GANGGUAN YANG TERJADI (KONFLIK BERBASIS SARA, ANARKISME, SEPARATISME, ATAU LAINNYA)

Berdasarkan pantauan, Kominda Kutai Kartanegara telah menginventarisir pemasalahan aktual pada tahun 2017, diantaranya tumpang tindih kepemilikan lahan, demontrasi tenaga kerja, aliran semapalan keagamaan, konflik sosial bernuansa SARA, keinginan sekelompok masyarakat yang berkeinginan membentuk Daerah Otonomi Baru, dan pemasalahan lainnya sebagai berikut :

**Tabel 6.3**

Kejadian konflik yang berlatarbelakang SARA pada tahun 2018

NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada 17 Februari 2018</li> <li>pukul 07.00 wita</li> </ul>	Panitia Pembangunan Gereja dan Masyarakat RT.14 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong	<p>Berdasarkan informasi dari ketua pembangunan Gereja bahwa, gereja didatangi 2 orang warga menggunakan sepeda motor (yang tidak diketahui identitasnya) berteriak dengan kata-kata :</p> <p><i>"Oh... Pembangunan Gereja tetap dilanjutkan ya...?"</i> Oleh Drs. Ubang Hardiyanto (ketua panitia pembangunan) yang mendengarnya dan emosi, namun tidak sempat ketemu karena warga tersebut langsung pergi.</p> <p>Sekitar pukul 14.30 wita Drs. Ubang Herdiyanto beserta 3 anggotanya Warga Dayak</p>	<p><b>Langkah Penanganan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pihak keamanan (intelijen daerah) segera mengadakan pengumpulan informasi terkait kejadian tersebut dan mengadakan koordinasi dengan pihak terkait untuk menghindari kejadian konflik yang lebih besar.</li> <li>mendorong kepada pihak FKUB dan Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan</li> </ol>

NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
			<p>mendatangi Ketua Rt. 14 untuk konfirmasi terkait warga tersebut. Setelah mendapat penjelasan dari Rt. bahwa Ketua Rt. Tidak mengenal apalagi menyuruh warga tersebut, Drs. Ubang dan rekan-rekan kembali ke lokasi pembangunan gereja. Namun tidak terima dengan pernyataan Warga tersebut, sehingga menyatakan apabila ada warga yang mengganggu pembangunan Gereja tersebut akan dihadapi dengan kekerasan.</p> <p><b>Rapat Pembahasan Konflik Pembangunan Gereja GKII</b></p> <p><b>1. Pada Hari Senin 30 Juli 2018</b> berlokasi di Ruang Rapat Asisten 1 Setkab Kukar dengan Pimpinan Rapat Rinda Desianti (Plt. Kaban Kesbangpol Kukar), dengan Kesimpulan Rapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan GKII tidak memenuhi syarat sebagaimana amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan 8 Tahun 2006 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Jemaat minimal 90 orang berdasarkan KTP yang disahkan oleh pejabat setempat.</li> <li>• Dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang pejabat setempat.</li> <li>• Rekomendasi kakan Depag.</li> <li>• Rekomendasi FKUB</li> </ul> </li> <li>b. Mediasi lanjutan akan untuk meminta penjelasan panitia pembangunan Gereja.</li> <li>c. Perlu teguran tertulis oleh Pemerintah Kabupaten kepada Panitia Pembangunan GKII</li> <li>d. Jika Teguran Tertulis pemerintah tidak diindahkan, maka penyelesaian</li> </ol>	<p>konflik penolakan pembangunan gereja Jamaah GKII di keluarahan Panji Kecamatan Tenggarong.</p>

NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
			<p>permasalahan akan dilakukan melalui jalur Pengadilan.</p> <p><b>2. Pada Hari Rabu 26 September 2018</b> berlokasi di Ruang Rapat Asisten 1 Setkab Kukar dengan Pimpinan Rapat Rinda Desianti (Plt. Kaban Kesbangpol Kukar) dengan Kesimpulan Rapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan GKII harus memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 terkait persyaratan Pendirian Rumah Ibadah.</li> <li>b. Selama memenuhi persyaratan tsb, pembangunan wajib dihentikan untuk sementara waktu sambil melengkapi persyaratan pembangunan rumah ibadat.</li> <li>c. Dan apabila tidak ada titik temu sebagaimana yang difasilitasi oleh Pemkab Kutai kartanegara segera disarankan untuk menempuh jalur hukum.</li> <li>d. Terhadap surat teguran dari Kelurahan Panji dan Kecamatan Tenggarong yang tidak ditanggapi pihak panitia pembangunan gereja. Pemkab Kutai Kartanegara akan memanggil Panitia GKII pada pertemuan selanjutnya.</li> </ol> <p><b>3. Pada Hari Selasa 16 Oktober 2018</b> berlokasi di Ruang Rapat Sekretaris Daerah dengan Pimpinan Rapat Pj. Sekda Kukar Ir. Sukhrawardy. S. yang menghadirkan panitia pembangunan Gereja GKII, dengan Kesimpulan Rapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Panitia pembangunan/pengurus GKII diharapkan agar mengurus terlebih</li> </ol>	

NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
			<p>dahulu ijin pembangunan Gereja dan menghentikan sementara waktu pembangunannya sampai perizinan lengkap.</p> <p>b. Dalam melengkapi perizinan, agar berkoordinasi dengan Dinas/Instansi, Kecamatan dan Kelurahan setempat untuk pendekatan komunikasi ke masyarakat sekitar.</p> <p>c. Pemkab Kukar memberi Jangka Waktu pengurusan ijin pembangunan Gereja selama 1 (satu) bulan berdasarkan kesepakatan dengan Ketua Panitia Pembangunan Gereja (Drs. Ubang hardiyanto) terhitung mulai 16 Oktober 2018.</p> <p>d. Pemkab Kukar meminta semua pihak untuk tetap selalu menjaga kondusifitas.</p>	
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senin Tanggal 29Okt 2018 Pukul 11.00 – 15.00 Wita</li> <li>• Di Sekertariat Yayasan ABU DZAR AL-GHIFARI KUKAR JL.AM.Sangaji RT 04 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.</li> </ul>	Kelompok Penganut Faham Syiah	<p>Bertempat Sekretariat Yayasan Abu Dzar Al-Ghifari (Syiah) Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, berlangsung peringatan 40 hari Arbain Al - Imam Husain AS, Cucunda Rasullullah SAW yang diselenggarakan oleh DPD Ahlul Bait Indonesia (ABI)/Syiah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Penceramah Ust. Habib Abdul Rahman Musawa dgn tema "Dengan Pengorbanan Al - Husain AS Kita Pertahankan NKRI".</p> <p>Rangkaian kegiatan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya</li> <li>2. Menyanyikan lagu hymne Ahlul Bait Indonesia (ABI)</li> <li>3. Sambutan - sambutan :</li> </ol>	<p><b>Langkah Penanganan</b> :</p> <p>Pada tahun 2018 DPD Ahlul Bait Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara berencana melaksanakan Kegiatan Haul sebagaimana agenda organisasi. Namun berkaca dengan kegiatan-kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, bahwa kegiatan tersebut tidak pernah memperoleh izin dari aparat keamanan dan pemerintah daerah.</p> <p>Untuk hal tersebut Pengurus DPD Ahlul Bait Indonesia melayangkan surat No.</p>



NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
			<p>a. Sambutan dari Pembina Yayasan Abu Dzar Al - Ghifari (Habib Toriq).</p> <p>b. Sambutan DPW Ahlul Bait Indonesia (ABI) Kalimantan Timur. Ishoma</p> <p>5. Syair - syair duka dengan cara memukul - mukul dada dikarenakan kecintaannya dengan Al - Imam Husain AS (Cucu Nabi Muhammad SAW).</p> <p>6. Hikmah haul Imam Husain yang disampaikan oleh Ust. Habib Abdul Rahman Musawa.</p> <p>7. Doa ziarah (Mendoakan Al Husain dalam kubur).</p>	<p>006/E/Sek/X/2018 tanggal 7 Oktober 2018 kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kutai Kartanegara untuk Hearing mengenai tidak diizinkannya pelaksanaan kegiatan Haul mulai tahun 2015-2018.</p>
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Agustus 2018</li> </ul>	<p>pengasuh pondok Pesantrenkelompok Khilafatul Muslimin dengan warga RT.12 Kelurahan Jahab</p>	<p>Berdasarkan Informasi Sekretaris Lurah Kelurahan Jahab (Hafizd, S.STP) yang disampaikan via telpon (2 Agustus 2018 Pukul 14:49 wita) menyampaikan bahwa kelompok Khilafatul Muslimin mempunyai rencana membangun Pesantren dengan lokasi Jl. Silasbel Rt.12 km.7 Kelurahan Jahab kecamatan Tenggarong (disekitarLanggar).</p> <p>Pihak Kelurahan Jahab telah bertemu dengan pengurus dari kelompok tersebut untuk meminta untuk menunjukan dokumen perizinan tentang pendirian pesantren. Namun pengurus tidak bisa menunjukkan dan berdalih bahwa mereka tidak perlu meminta izin ke pemerintah, menurut mereka untuk membuka pesantren cukup izin dari Pesantrean mereka yang berada di Bogor.</p> <p>Berdasarkan informasi dari kelurahan, jumlah jamaah/santri sekitar 21 orang dengan 4 orang ustadz yang berasal dari luar penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun pihak kelurahan tidak pernah menerima laporan surat pindah dari santri tersebut (pihak khilafatul muslimin tidak melaporkan kepada</p>	<p>Pada 20 Agustus 2018, pukul 11.00 s.d 12.20 Wita dirumah Ustasz Kauzan (pengasuh pondok Pesantren) JL. Silas Bell Km 7 RT 12 Kel. Jahab Kec. Tenggarong telah dilaksanakan penggalangan terbatas (Galtas) terhadap Ustad Kauzan Muslimin diperoleh infomasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Khilafatul Muslimin Pondok Pesaantren Al – Ukhuwah Islamiyah Wilayah Borneo beralamat di JL Silas Bell Km7 RT 12 Kel Jahap Kec Tenggarong Kab Kutai Kartanegara.</li> <li>2. Khilafatul Muslimin Pondok Pesantren Al – Ukhuwah Islamiyah dengan Pimpinan Ustad Kusnadi.</li> <li>3. Pondok pesantren saat ini mempunyai 12 santri dengan rincian dari 2 santri TK dan 10 santri tingkat SD serta didukung 3 pengasuh/pengajar.</li> <li>4. Adapun kegiatan</li> </ol>

NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
			pemerintahan setempat).	<p>santri pondok pesantren setiap malam jumat melaksanakan kegiatan diantaranya nonton bareng film film islami salah satunya film Umar Bin Khatab. Kemudian santri juga melaksanakan kegiatan diluar jam pelajaran melakukan kegiatan latihan bela diri (pencak silat) dilapangan sepakbola Kel Jahab RT 14 Kec Tenggaraong.</p> <p>5. Aktivitas Khilafatul Muslimin sudah terbuka kepada warga sekitar yang mayoritas berpenduduk Dayak beragama Nasrani, hal ini dibuktikan saat memasang plang dibantu oleh ketua RT setempat.</p> <p>6. Warga Muslim disekitar Masjid Khilafatul Muslimin Tenggaraong, 5 Kepala Keluarga.</p> <p>7. Saat ini sedang membangun ruang belajar Pondok Pesantren, sehingga setiap minggu berkumpul sekitar 20 orang dewasa gabungan dari Balikpapan dan Penajam untuk kerja bakti membangun gedung belajar tersebut.</p>

Tabel 6.4

Kejadian konflik yang berbasis Lahan / SDA pada tahun 2018

NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumat</li> <li>• 5 Januari 2018</li> <li>• Pukul 10.00 Wita</li> <li>• Berakhir pukul 11.05 Wita</li> </ul>	ahli waris Aji Ahmad Maulana Bin Aji Bambang Siranudin Bin Aji Hasiah Binti Aji Panggeran Mangkunegoro Bin Sultan Aji Muhammad Sulaiman.	<p>DPRD Kutai Kartanegara melaksanakan pembahasan konflik lahan dengan lokasi di desa Jongkang yang diklaim milik ahli waris Aji Ahmad Maulana Bin Aji Bambang Siranudin Bin Aji Hasiah Binti Aji Panggeran Mangkunegoro Bin Sultan Aji Muhammad Sulaiman.</p> <p>Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara Supriyadi,S.Pd.I, MPd, dihadiri Letda Inf Eko Edi (mewakili Dandim) Irhamsyah (Perwakilan BPN Kutai Kartanegara), Toto Sunarto (Kabag Sengketa Lahan - Dinas Pertanahan), M Ridha F (Kabid Trantib Satpol PP), Erwin (Kepala Desa Jongkang), Bapak Suriansyah (Ketua RT Jongkang) Alimudin (Masyarakat Pemilik Lahan). Sertu Musrifudin (Babinsa Jongkang Koramil Loa Kulu), Bripka Budi Santoso (Babinkamtibmas Jongkang Polsek Loa Kulu) dan beberapa Perwakilan pemilik lahan. Berdasarkan daftar hadir, rapat diikuti sebanyak 30 orang.</p> <p>Berdasarkan salah satu pemilik Tanah yang menjadi sengketa yang teletak di desa Jongkang RT.5, masyarakat Jongkang membuka perkampungan semenjak tahun 1973. Dan telah membuat surat-surat tanah (PPAT) pada tahun 2009 dan tidak ada permasalahan atau adanya klaim dari kesultanan.</p> <p>Setelah tahun 2013 adanya rencana pembangunan Pusat Grosir "Niaga Benua" munculah klaim atas kepemilikan tanah dari oknum yang mengatasnama ahli waris Aji Ahmad Maulana Bin Aji Bambang Siranudin Bin Aji Hasiah Binti Aji Panggeran Mangkunegoro Bin Sultan Aji Muhammad Sulaiman.</p> <p>Pihak pengembang PT. Bangun Benua Pratama langsung menggarap lahan tersebut dan tidak mau membayar ganti rugi atas tanah kepada masyarakat, karena perusahaan tersebut berpegang surat tanah yang dikeluarkan tahun 1993 yang dimiliki oknum yang mengatasnamakan milik ahli waris Aji Ahmad Maulana Bin Aji</p>	<p>Hasil dari rapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak Kecamatan untuk membantu proses Validasi Tanah.</li> <li>2. Secara teknis pihak DPRD bersedia turun secara bersama dengan OPD yang terkait dan pemerintah setempat.</li> <li>3. Meminta dari pihak Pemerintah, Satpol PP dan aparat keamanan untuk mengatur agenda penegasan/ pembongkaran bangunan semi permanen yang di buat oleh oknum Kesultanan.</li> <li>4. Melakukan sesuai dengan langkah Undang Undang Dan Peraturan Yang Berlaku</li> <li>5. Pimpinan rapat minta pertemuan khusus ke Pemerintah Daerah/OPD untuk menyusun langkah Ini.</li> </ol>

NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
			Bambang Siranudin Bin Aji Hasiah Binti Aji Panggeran Mangkunegoro Bin Sultan Aji Muh. Sulaiman	
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamis</li> <li>• tanggal 22 Februari 2018</li> <li>• pukul 10.00 wita</li> <li>• Pukul 17.00 wita kegiatan AUR selesai</li> </ul>	PT Khaleda,Desa dengan warga desa Puan cepak Kec. Muara Kaman	<p>Terjadi aksi rasa unjuk di jalan poros PT. CAP (Cahaya Anugrah Plantation/PT. Khaleda) warga desa Puan Cepak sebanyak ± 100 orang warga</p> <p>Dengan Korlap sdr. Asdar, SH, (umur 53 tahun, Islam, Kutai, Pengacara, alamat Jalan Al- jawahir, Kel. Mangkurawang, Kec. Tenggarong).</p> <p>Warga menuntut agar PT. CAP (Cahaya Anugrah Plantation) yang beroperasi di Wilayah Desa Puan cepak agar mengembalikan lahan plasma kepada masyarakat Desa Puan cepak seluas, 600 Ha. Sesuai Perbup No. 1 tahun 2016 bahwa perusahaan wajib membangun kebun plasma masyarakat 20 % dari luas kebun inti kebun PT. CAP seluas ± 8000 Ha.</p> <p>Catatan : Mediasi penyelesaian masalah ini sudah sering dilakukan tetapi dari pihak PT. CAP, namun setiap dilaksanakan mediasi mereka selalu menghadirkan perwakilan yang tidak bisa mengambil keputusan.</p>	<p>Tuntutan :</p> <p>PT. CAP (Cahaya Anugrah Plantation) yang beroperasi di wilayah Desa Puan cepak agar mengembalikan lahan plasma kepada masyarakat Desa Puan cepak seluas 600 Ha. (Sesuai Perbup No. 1 tahun 2016,bahwa perusahaan wajib membangun kebun plasma masyarakat 20 % dari luas kebun inti PT. CAP + 8000 Ha.</p> <p>Langkah Penanganan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aparat Pemerintah dan Aparat Polsek Muara Kaman mengupayakan mediasi dengan pihak manajemen.</li> <li>2. Rencana mediasi antara warga dan manajemen akan dilaksanakan di Polsek Muara Kaman pukul 09.00 wita 23 Februari 2018.</li> </ol>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamis 22 Pebruari 2018</li> <li>• Pukul 10.30 Wita</li> </ul>	FORLTAL (Forum Rakyat Lawan Tambang Liar)	<p>Bertempat di halaman kantor Camat Kec.Tenggarong Seberang terjadi aksi Demo Damai oleh warga Tenggarong Seberang yang mengatas namakan FORLTAL (FORUM RAKYAT LAWAN TAMBANG LIAR) sebanyak 25 Orang dengan korlap Sdr.Aditya Sinaga (081347462233).</p> <p>Aksi unjukrasa terkait adanya permasalahan kerusakan jalan umum yang diduga akibat kegiatan houlding batu bara dan dugaan Tambang ilegal. Warga membawa pengeras suara dan banner bertuliskan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- STOP TAMBANG LIAR TANGKAP DAN ADILI MAFIA TAMBANG.</li> <li>- JANGAN AMBIL HAK KAMI.</li> <li>- PT. BBE DAN PT. GDM HARUS BERTANGGUNG JAWAB.</li> <li>- KAMI RINDU HIJAUNYA</li> </ul>	<p>Tuntutan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. meminta pemerintah untuk segera menutup maraknya kegiatan tambang liar.</li> <li>2. meminta pemerintah untuk melarang houlding batubara tambang ilegal yang menggunakan jalan umum sehingga jalan banyak yang rusak.</li> </ol> <p>Langkah Penanganan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengamanan jalannya AUR dilaksanakan oleh Polsek Tenggarong Seberang dibantu</li> </ol>

NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
			<p>YENGGARONG SEBRANG.</p> <p>- INI JALAN KAMI BUKAN JALAN TAMBANG.</p> <p>Setelah melakukan orasinya perwakilan masa/pendemo sebanyak 5 orang masuk keruang camat untuk menyampaikan tututan para pendemo tersebut yang diterima oleh Camat, Kapolsek dan Danramil Tenggarong Seberang.</p> <p>Tuntutan tersebut ditulis tangan oleh korlap aksi, kemudian ditanda tangani oleh muspika. Meminta kepada muspika menindaklanjuti tuntutan tersebut disampaikan kepada pemerintah kabupaten dan provinsi.</p>	<p>anggota Koramil.</p> <p>2. Aksi ditemui oleh Camat, Kapolsek dan Danramil Tenggarong Seberang.</p>
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rabu</li> <li>• 04 April 2018</li> <li>• Pukul 14.00 Wita</li> </ul>	<p>Warga dusun Sari Mulya Desa Purwa jaya, Kec Loa Janan dengan PT. Polindo yang dikerjakan subkon Berkat Bara Rejeki (BBR).</p>	<p>Warga Rt. 11 dan 12 dusun Sari Mulya Desa Purwa jaya, Kec Loa Janan melakukan penutupan tambang milik PT. Polindo yang dikerjakan subkon Berkat Bara Rejeki (BBR).</p> <p>Penutupan aktivitas tambang dikarena warga merasa kesal dengan adanya aktivitas dari pihak perusahaan yang mendekati pemukiman warga.</p> <p>Koorlap penutupan tambang bapak Heri Dwi Saputra, Ketua Rt 11, Jawa, Islam, 45 thn.</p> <p>Mediasi membahas tentang masalah penutupan tambang yang mana warga resah dengan adanya aktifitas tambang yang terlalu dekat dengan pemukiman dan sawah masyarakat. Dan belum ada sosialisasi atau penyampaian dari pihak perusahaan kepada masyarakat. Dari hasil mediasi belum ada kesepakatan dari kedua pihak baik perusahaan maupun warga. Mediasi berakhir pada pukul 18.00 Wita</p>	<p>Tuntutan :</p> <p>warga hanya meminta kepada pihak perusahaan agar tidak beraktifitas di sekitar pemukiman dan persawahan masyarakat.</p> <p>Langkah Penanganan :</p> <p>Pada Pukul 16.30 Wita, telah di laksanakan mediasi di Balai Pertemuan Umum (BPU) Jl Pelita Dusun Sarimulya Desa Purwajaya yang di ikuti oleh 50 orang warga Dusun Sari Mulya.</p> <p>Adapun yang hadir dalam mediasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kades Sari Mulya, Kurniawan</li> <li>2. Rt 11, bapak Heri Dwi.Saputra.</li> <li>3. Rt 12, bapak Muhadi</li> <li>4. Wakil BPD ,bapak Jurianto</li> <li>5. Babinsa Purwajaya, Serka Risman</li> <li>6. Dari pihak Pt Polindo bagian Humas, Bapak Sasongko.</li> <li>7. Masyarakat 50 orang.</li> </ol> <p>Mediasi membahas tentang masalah penutupan tambang, yang dikarenakan warga resah dengan adanya aktifitas tambang yang</p>

NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
				terlalu dekat dengan pemukiman dan sawah masyarakat. Dan belum ada sosialisasi atau penyampaian dari pihak perusahaan kepada masyarakat. Dari hasil mediasi belum ada kesepakatan dari kedua pihak baik perusahaan maupun warga.
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Minggu</li> <li>•12 Mei 2018</li> <li>•Pukul 14.00 - wita</li> <li>•2 juni 2018</li> </ul>	PT. Vico dengan ahli waris Sdr. H. Nohong (Sdr. Sahril dan Sdr. Dani)	<p>Terjadi aksi premanisme dengan menghentikan secara paksa kendaraan milik PT. Vico oleh ahli waris Sdr. H. Nohong (Sdr. Sahril dan Sdr. Dani) dengan cara mengancam dengan menggunakan senjata tajam.</p> <p>Kejadian bermula pada pukul 09.30 wita Operator Well Sumur Vico Indonesi An. Hesen Noro mengecek sumur Vico yang berlokasi di sumur Nilam 16 Nilam Facility, setelah selesai pengecekan Oprator Well dengan Drever Mobil LV kembali ke jalan Nilam Facility di tahan oleh ahli waris Sdr. H. Nohong (Sdr. Sahril dan Sdr. Dani) namun karena Driver tetap menjalankan mobilya makan Sdr. Sahril melempar senjata tajam/Parang kedepan mobil tersebut, sehingga driver menghentikan kendaran dan menelpon menejemen yang kemudian melaporkan Polsek Muara Badak.</p> <p>Kejadian tersebut merupakan lanjutan konflik lahan antara PT. Vico oleh ahli waris Sdr. H. Nohong yang belum menemui titik temu. Pihak dari ahli waris menyatakan bahwa lahan seluas 44 hektar panjang 550 x 800 M belum di bebaskan oleh PT. Vico indonesia.</p>	<p>Pada pukul 13.30 wita Petugas Polsek Muara Badak yang dipimpin oleh Kapolsek Muara Badak Iptu Yusuf. SH. MH. dan 22 personel Polsek Muara Badak dilaksanakan Penegakan hukum atas dasar Laporan Pengaduan dari menejemen Vico Indonesia Terkait Penyetopan Unit LV Jenis Triton KT 1215 CO disertai pengecaman dengan alat Senjata Tajam/Parang.</p> <p>Adapun terduga pelaku pengacaman :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sahril bin H. Nohong, Lakis, Islam, Bugis, Swasta, Alamat Ds. Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kukar.</li> <li>2. Dani, Lakis, Islam, Bugis, Swasta, Alamat Ds. Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kukar.</li> </ol> <p>Adapun langkah kepolisian setempat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendatangi TKP</li> <li>2. mengamankan terduka pelaku pengacaman.</li> <li>3. mengamankan Saksi dan barang bukti.</li> <li>4. menghimbau untuk di lakukan pembakaran tenda yang ada dilokasi.</li> </ol>
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senin</li> <li>• 30 Juli 2018</li> <li>• Pukul</li> </ul>	CV. SSP (Sanga - Sanga Perkasa)	Terjadi penghentian pekerjaan alat berat milik CV. Sanga Sanga Perkasa (SSP) oleh warga RT. 24 Kelurahan Sanga Sanga Dalam.	Pada pukul 14.35 wita Wakapolsek Sanga - Sanga Iptu. Sudarwanto. S. Sos dan anggota

NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
	14.30 Wita		<p>Dalam aksi tersebut dipimpin oleh ketua RT 24 Kelurahan Sanga - Sanga Dalam M. Zaenuri beserta warga yang terdiri dari ibu - ibu dan anak - anak yang berjumlah ± 25 orang.</p> <p>Masyarakat menuntut kepada perusahaan agar menghentikan penambangan yang dekat dengan rumah penduduk, karena dikhawatirkan terjadinya erosi serta pencemaran di lingkungan pemukiman mereka.</p>	<p>mendatangi TKP dilokasi tambang CV. SSP (Sanga - Sanga Perkasa) untuk melakukan pengamanan agar tidak terjadi benturan dilapangan antara warga dengan pihak CV SSP.</p> <p>Pemerintah Kecamatan Sanga Sanga akan berkordinasi dengan Pemkab Kutai Kartanegara agar menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar mengevaluasi perijinan tambang yang dekat pemukiman masyarakat.</p>
7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senin</li> <li>• 27 Agustus 2018</li> <li>• Pukul 10.00-13.00 wita</li> </ul>	PT. Sumber Bara Abadi (PT. SBA) dengan Forum Komunikasi Masyarakat Desa Cipari Makmur Kecamatan Muara Kaman	<p>Terjadi aksi penutupan jalan hauling PT. Sumber Bara Abadi (PT. SBA) yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Desa Cipari Makmur Kecamatan Muara Kaman.</p> <p>Aksi dilakukan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Desa Cipari Makmur dengan cara memportal jalan hauling menggunakan batang kayu pohon.</p> <p>Aksi penutupan akses jalan hauling PT. Sumber Bara Abadi (PT. SBA) dilakukan oleh Forum Komunikasi masyarakat Desa Cipari Makmur untuk menuntut pembayaran ganti rugi atas penggusuran lahan akibat pembangunan badan jalan hauling PT. Sumber Bara Abadi (PT. SBA)</p> <p>Aksi penutupan dipimpin oleh Abdullah Sani (Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Desa Cipari Makmur) yang dihadiri oleh pemilik lahan antara lain : Budi Wardoyo, Heru, Haini, Ujang Hariyanto, Sutaman, Sonto Sukarjan, Heru Hartono, Rustam, Sujani, Tegar, Suyanto.</p> <p>Terhadap aksi tersebut dari pihak manajemen PT. Sumber Bara Abadi (PT. SBA) setelah dikonfirmasi pihak manajemen belum bisa memberikan tanggapan terkait aksi masyarakat Desa Cipari Makmur karena diarea tersebut belum ada aktivitas operasional.</p>	<p>Untuk menyelesaikan tuntutan masyarakat, pihak keamanan yang dipimpin Kapolsek Muara Kaman AKP TM. Panjaitan mengadakan mediasi dengan kesepakatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah Desa Cipari Makmur khususnya Kepala Desa harus merespon permasalahan ini bersama pihak kepolisian mencari solusi penyelesaian masalah ini.</li> <li>- Polse akan melakukan pemanggilan terhadap PT. Sumber Bara Abadi (PT. SBA) untuk dilakukan pertemuan dengan pihak masyarakat yang memiliki lahan.</li> <li>- pihak masyarakat yang sudah membantu mengklarifikasi bahwa lahan yang dibeli oleh PT. Sumber Bara Abadi (PT. SBA) dari Sucipto bukan berada dilokasi yang dibangun jalan hauling.</li> <li>- Agar masyarakat tidak terprovokasi dengan</li> </ul>



NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
				situasional, mari kita selesaikan masalah sesuai aturan yang berlaku.

Tabel 6.5

Penanganan/Mediasi konflik yang berlatarbelakang Ekonomi pada tahun 2018

NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamis</li> <li>• 4 Januari 2018</li> <li>• pukul 09.10 wita</li> <li>• berakhir pukul 12.22 wita</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mengatasnamakan LSM Pergerakan Rakyat Anti Korupsi (LSM - PERAK)</li> </ul>	<p>Massa yang mengatasnamakan LSM Pergerakan Rakyat Anti Korupsi (LSM - PERAK) mengadakan aksi unjukrasa dengan jumlah masa + 25 orang dengan koordinator lapangan Witomo Saputro, SH.</p> <p>Dalam aksinya LSM Pergerakan Rakyat anti korupsi menggunakan alatpraga :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mobil kijang berwarna hitam dengan nomor polisi KT 8047 CY</li> <li>b. Sound system</li> <li>c. 2 (dua) Michrophone</li> </ol> <p>pelaksanaan aksi unjuk rasa tersebut bertujuan untuk menayakan tentang pembayaran kontraktor yang telah memperoleh Surat Perintah Pembayaran Daerah (SP2D) namun hingga saat ini belum ada kejelasan.</p> <p>Sdr. Witomo (orator) juga menyampaikan permohonan agar DPRD memperjuangkan hak hak kontraktor yang belum terealisasikan.</p> <p>Dalam aksi unras tersebut Lsm Perak menyampaikan mendesak DPRD untuk memperjuangkan hak hak para kontraktor yang mana pemerintah daerah telah mengeluarkan surat perintah pembayaran daerah tetapi sampai sekarang kami.para kontraktor hanya.mendapat janji-janji manis</p>	<p>Langkah Penanganan : Pada pukul 10.24 wita masa dari LSM Perak ditemui oleh aksi Supriadi S.Pd, M.Pd.I (Wakil ketua DPRD Kukar), Sugianto (Sekertaris Komisi III), H. Ahkmad (Kasubag HAL DPRD), Witomo Saputro (Koordinator LSM Perak) dengan peserta rapat 20 orang. Dengan hasil notulen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPRD dan Forum Kontraktor Local yang di fasilitasi LSM Perak sepakat meminta kepada BPKAD untuk melakukan pembayaran kepada kontraktor lokal yang pekerjaanya sudah selesai 100% yang telah lengkap dokumen pekerjaannya.</li> <li>2. Meminta kepada pemerintah daerah untuk tidak melakukan pelelangan pekerjaan baru (khusus proyek besar diluar proyek DAK dan bankeu) sebelum hutang kontraktor yang pekerjaanya sudah diselesaikan pada tahun 2016 dan 2017</li> </ol>



NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
				selesai di bayarkan.
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senin</li> <li>• 14 Januari 2018</li> <li>• Pukul 09.10 Wita</li> <li>• Berakhir pukul 12.00 Wita</li> </ul>	LSM Pergerakan Rakyat Anti Korupsi (LSM PERAK)	<p>Massa Dari LSM Pergerakan Rakyat Anti Korupsi (LSM PERAK) melakukan aksi unjukrasa Kantor Bupati Kutai Kartanegara dengan Korlap Sdr. Witomo Saputro SH. dan Sdr.Sigit.</p> <p>Aksi Unjuk Rasa bertujuan untuk menayakan tentang pembayaran kontraktor yang telah memperoleh Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) namun hingga saat ini belum ada kejelasan pencairannya.</p> <p>Dalam Aksinya LSM Pergerakan Rakyat Anti Korupsi menggunakan alat praga :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mobil Truck berwarna kuning dengan Nomor Polisi KT 8757 CK</li> <li>2. Sound System</li> <li>3. 2 (dua) Michrophone.</li> <li>4. Karton yang bertulisan Pemerintah Harus Mengutamakan Pengusaha Lokal.</li> </ol> <p>Pada Pukul 09.15 Wita perwakilan pendemo diterima oleh Ir. H.Marli, M.Si (Sektretaris Daerah), didampingi Ir. Ahyani Fahdianur (Kepala BPKAD), Hamli, SE (Kabag Pembangunan), Hairun (BPKAD), pertemuan dilaksanakan di ruang Rapat Sekda. Dalam pertemuan tersebut bertujuan untuk menjelaskan bagaimana aturan pembayaran pekerjaan pasca tutup buku anggaran (Desember) serta menjelaskan posisi keuangan daerah yang memiliki kendala karena terbatasnya jumlah transferan dana dari pusat.</p> <p>Kemudian pendemo melanjutkan aksi di Halaman Gedung DPRD Kab. Kutai Kartanegara, dan Pada Pukul 10.24 Wita masa dari LSM Perak ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Kukar Supriadi S.Pd M.PdI, didampingi Sugianto (Sekertaris Komisi III), H.Ahkmad (Kasubag Hal DPRD), perwakilan diterima diruang Rapat Komisi III. Dalam pertemuan tersebut disepakati :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.DPRD Dan Forum Kontraktor Kocal yang di fasilitasi LSM Perak Sepakat meminta kepada BPKAD untuk melakukan pembayaran kepada</li> </ol>	<p><b>Tuntutan :</b> Mendesak pemerintah daerah untuk memperhatikan Hak-hak Para kontraktor yang telah menerima Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) tetapi sampai sekarang kontraktor belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang sudah selesai.</p> <p><b>Langkah penanganan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak keamanan mengamankan jalan unras dan membuka ruang untuk diadakan mediasi dengan pihak pemda</li> <li>2. Untuk menyampaikan aspirasi dari kontraktor lokal, telah dibuka ruang untuk mediasi melalui pertemuan dengan pemerintah daerah dan kemudian pertemuan dengan wakil rakyat (DPRD).</li> </ol>

NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
			<p>kontraktor local yang pekerjaannya sudah selesai 100% yang telah lengkap dokumen pekerjaannya.</p> <p>2. Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk tidak melakukan pelelangan pekerjaan baru (Khusus Proyek Besar diluar Proyek DAK dan Bantuan Keuangan) sebelum hutang kontraktor yang pekerjaannya sudah diselesaikan pada tahun 2016 dan 2017 selesai dibayarkan.</p>	
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 Januari 2018</li> <li>• Pukul 12.15 wita</li> <li>• Pukul 14.07 wita</li> </ul> <p>kegiatan AUR dan Pertemuan berakhir</p>	Dualisme kepengurusan Koperasi TKBM Tuah Bumi Kartanegara	<p>Aksi unjukrasa karyawan Koperasi TKBM Tuah Bumi Kartanegara versi Zaki di Kantor DPRD Kutai Kartanegara dengan koordinator lapangan sdr. Zakiyudin Mair.</p> <p>Aksi ini merupakan akibat dari persetujuan dualisme kepengurusan Koperasi TKBM Tuah Bumi Kartanegara antar kepengurusan yang pimpinan Abrianto dan Zakiyudin Mair.</p> <p>Dalam aksi ini para pengunjukrasa meminta dukungan DPRD Kutai Kartanegara untuk membekukan kepengurusan Abrianto.</p> <p><b>Pengunjukrasa diterima anggota DPRD Kukar</b></p> <p>Pukul 13 .06 wita diterima oleh ketua Komisi I Hamdan A.Md didampingi Kasubag Kelembagaan DPRD Ahmad dan dilaksanakan pertemuan di ruang Rapat Komisi I. Pertemuan tersebut dihadiri - Ketua Komisi I DPRD Hamdan A.Md. , Salehuddin (anggota Komisi I), - Kasubag Kelembagaan Ahmad, KBO Intelkam Polres Ipptu M Afnan.S.sos., Ipptu Sidarsono (Kasubag Dal Ops Polres Kukar), Zaki Yudin Mair.Sp. (Ketua TKBM Koperasi Tuah Bumi Kartanegara), Yunus Ruru ( pengurus Pekerja TKBM), Zainuddin M.Pd (Wakil Ketua TKBM), Julian Petrus Djiu(Ketua APBMI), Dominiku Tekwan (Pengurus TKBM), Ibrahim (Pengurus SPTI ), Roby Sp(Wakil Ketua Bendahara TKBM).</p>	<p><b>Tuntutan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Pengurus TKBM meminta Kepada DPRD secara tertulis Agar TKBM kubu Ambrianto di cabut kemudian dilakukan Rapat Anggota untuk membentuk kepengurusan baru.</li> <li>2. meminta DPRD Kutai Kartanegara untuk memfasilitasi penyelesaian dualisme kepengurusan, agar tidak berimbas pada kegiatan koperasi dilapangan.</li> </ol> <p><b>Langkah penanganan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polres dan satuan pengamanan internal DPRD Kukar mengamankan aksi unjukrasa.</li> <li>2. membantu untuk mempertemukan pengunjukrasa dengan anggota DPRD untuk menyampaikan aspirasi.</li> </ol> <p><b>Rekomendasi Pertemuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi 1 DPRD akan menjadwalkan pertemuan dan akan memanggil pihak yang berkepentingan dan tidak boleh</li> </ol>

NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
				<p>diwakilkan untuk membahas permasalahan TKBM.</p> <p>2. Permasalahan TKBM tetap akan diusahakan dengan penyelesaian secara musyawarah.</p> <p>3. Dalam Kondisi Transisi menunggu penyelesaian TKBM agar kedua belah pihak dapat menahan diri</p>

**Tabel 6.6 :**

Penanganan/Mediasi konflik Sosial yang berlatarbelakang Politik (Pembentukan DOB) pada tahun 2018

NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
1.	• 13 Februari 2018	Kabupaten Pesisir	<p>Tokoh masyarakat dari kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Sangasanga, Kecamatan Anggana, Kecamatan Loa Janan dan Tim Sukses Pembentukan Kabupaten Kutai Pesisir bertemu dengan Gubernur Kalimantan Timur H. Awang Faroek Ishak di Ruang Serbaguna Lamin Etam Kantor Gubernur Kaltim.</p> <p>Tokoh masyarakat dari 5 kecamatan tersebut meminta kepada Gubernur untuk membantu mendorong percepatan pembentukan Kabupaten Kutai Pesisir.</p> <p>Gubernur Kalimantan Timur H. Awang Faroek Ishak mendukung penuh tentang pembentukan Kutai Pesisir, karena merupakan salah satu upaya untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Menurut Gubernur Kalimantan Timur H. Awang Faroek Ishak tidak pernah menghalang-halangi tentang munculnya aspirasi pembentukan DOB, hal ini terbukti dengan banyak pembentukan DOB di provinsi Kalimantan Timur berjalan dengan baik dan maju, seperti pembentukan Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Malinau dan Kabupaten</p>	<p>Tuntutan :</p> <p>1. meminta kepada Gubernur untuk membantu mendorong percepatan pembentukan Kabupaten Kutai Pesisir.</p> <p>2. meminta kepada Gubernur untuk memfasilitasi timses pembentukan kabupaten Kutai Pesisir untuk bertemu dengan Plt. Bupati Kutai Kartanegara dan DPRD Kutai Kartanegara untuk percepatan pembentukan DOB.</p>

NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
			Tana Tidung.	
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senin</li> <li>• 12 Nopember 2018</li> <li>• Pukul 09.30 – 11.15 WITA</li> </ul>	Aliansi Kukar Menggugat	<p>Aksi unjuk rasa dalam Rangka menuntut agar pembagian porsi participating interest ( PI ) Blok Mahakam 50% untuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Peserta Unjuk Rasa Berjumlah ± 150 Orang.</p> <p>Koordinator kegiatan unjuk rasa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jali dari Apdesi</li> <li>2. Hasyim Saad dari GP Ansor</li> <li>3. Halimatu dan Andika dari HMI</li> <li>4. Jemy Wijaya dari PMII</li> <li>5. Eko W dan Surya Hirpani dari KNPI</li> </ol> <p>Adapun Tuntutan Mereka Antara Lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pemilik wilayah Blok Mahakam, bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan kesempatan untuk melakukan Participating Interest sebesar 10% di Blok Mahakam.</li> <li>2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016, karena seluruh pelamparan reservoir cadangan minyak dan gas bumi di Blok Mahakam berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka persentase keikutsertaan saham Provinsi dan Kabupaten Kutai Kartanegara pada suatu Badan Usaha Milik Daerah adalah masing - masing sebesar 50% ( Lima Puluh Persen ).</li> <li>3. Bahwa keputusan pembagian Participating Interest Blok Mahakam sebesar 66,5% untuk Pemerintah Provinsi dan 33,5% Kabupaten Kutai Kartanegara tidak adil dan berkeadilan karena Gubernur Kalimantan Timur dalam hal memutuskan Persentase Participating Interest Blok Mahakam sebagaimana dimaksud tidak pernah melibatkan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pemilik wilayah.</li> <li>4. Bahwa Gubernur Kalimantan Timur mengabaikan hak Kabupaten Kutai Kartanegara karena memutuskan secara sepihak lembaga independent yang bertugas untuk menghitung pelemparan Reservoir di Blok Mahakam, oleh karena hasil</li> </ol>	<p>Massa aksi unjuk rasa melakukan orasi selama ± 2,5 jam ditemui oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drs. Edi Damansyah, M.Si (Plt. Bupati Kutai Kartanegara)</li> <li>• Ir. Sukhrawardy, S,MM (Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara)</li> <li>• H. Heldiansyah, SH, M.Hum (Plt. Assisten III)</li> <li>• Salehuddin, S. Sos, S. Fill (Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara)</li> <li>• Rudiansyah, SH (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara)</li> <li>• Abdul Rasyid, SE (anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara)</li> <li>• Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara</li> </ul>

NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
			<p>Kajian lembaga independent tersebut harus diabaikan karena cacat hukum dan cacat prosedural karena melanggar Pasal 6 KEPMEN ESDM Nomor 37 Tahun 2016.</p> <p>5. Bahwa kegiatan Hulu Migas di Blok Mahakam akan berdampak pada lingkungan baik langsung maupun tidak langsung, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pemilik wilayah akan menerima dampak terbesar dari kegiatan Hulu Migas di Blok Mahakam tersebut.</p> <p>6. Bahwa Gubernur Kalimantan Timur dalam hal pembagian Participating Interest Blok Mahakam mengabaikan kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana diatur dalam lampiran huruf K Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa upaya untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup dalam suatu Kabupaten sebagai akibat dari pengelolaan Blok Mahakam merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.</p> <p>7. Bahwa Participating Interest Blok Mahakam merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). Sehingga menuntut porsi 50% PI Blok Mahakam merupakan hak sekaligus kewajiban karena daerah ditekankan untuk senantiasa berinovasi, kreatif dan bekerja keras untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).</p> <p>8. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Kongres rakyat Kutai Kartanegara menggugat menyatakan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertama penentuan saham 66,5 % untuk Provinsi dan 33,5 % untuk Kabupaten Kutai Kartanegara tidak adil dan berkeadilan serta cacat hukum dan cacat prosedural sehingga harus dicabut.</li> <li>- Kedua meminta kepada Gubernur Kalimantan Timur agar mencabut keputusan pembagian</li> </ul>	

NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
			Participating Interest ( PI ) Blok Mahakam.	
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senin</li> <li>• 19 November 2019</li> <li>• Pukul 10.00 – 11.15 Wita</li> </ul>	Satgas Mahasiswa dan Pemuda Kutai Tengah	<p>Aksi unjuk rasa (AUR) terkait surat permohonan audiensi dan silaturahmi sebelumnya tanggal 13 Agustus 2018 dan 19 September 2018 yang belum terealisasi. Bertindak sebagai koordinator lapangan Dr. Asnan Hefni M.Si dan Awang Ahmadi Ketua Satgas Mahasiswa dan Pemuda Kutai Tengah diikuti ± 50 Orang.</p> <p>Pengunjuk rasa membawa Spanduk Bertuliskan Pemda Jangan Tutup Mata dan Tanggapi Surat Permohonan Kami.</p> <p>Tuntutan Aksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan audiensi dan silaturahmi sebelumnya tanggal 13 Agustus 2018 dan 19 September 2018 yang belum terealisasi.</li> <li>2. Rencana Pembentukan Daerah Otonomi Baru ( DOB ) Kabupaten Kutai Tengah telah lama diwacanakan tahun 2003 oleh masyarakat berasal dari wilayah tengah Kabupaten Kutai Kartanegara yang meliputi Kecamatan Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang. Bahkan telah mendapat SK Persetujuan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara 2004-2009 dan SK Nomor 170/SK-8/III/2018 tentang dukungan atas Pemekaran Daerah persiapan Kabupaten Kutai Tengah melalui Daerah Pemekaran Kabupaten Kutai Kartanegara namun setelah itu belum mendapatkan persetujuan dari Bupati Kutai Kartanegara sebagai Kabupaten Induk.</li> <li>3. Pada saat ini proses yang telah berjalan diantaranya adalah sosialisasi, studi kelayakan, dukungan Pemerintah Desa di wilayah rencana pemekaran dan telah mendapatkan SK persetujuan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara oleh karena itu dalam rangka menindak lanjuti kembali dari rencana tersebut kami ingin menyampaikan aspirasi sekaligus Silaturahmi dengan Plt. Bupati</li> </ol>	Langkah Penanganan : Pada Pukul 10.15 WITA Kasubag Pemerintahan Wardana Menemui pengunjukrasa dan melakukan rapat dengar pendapat dengan perwakilan massa, dengan kesepakatan yaitu meminta waktu kepada Perwakilan massa aksi unjuk rasa untuk datang Kembali pada minggu ke empat pada Bulan November 2018.

NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
			Kutai Kartanegara.	

**Tabel 6.7**

Penanganan/Mediasi konflik Sosial yang berlatarbelakang Hubungan Industrial (ketenagakerjaan) pada tahun 2018

NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senin, 5 Pebruari 2018</li> <li>• pukul 09.30 wita di Kantor DPRD Kukar</li> <li>• Pukul 10.45 wita di Kantor Bupati Kukar</li> </ul>	Karyawan PT. Mahakam Sawit Plantation Group (Kalpataru).	<p><b>Aksi di Kantor DPRD Kutai Kartanegara</b></p> <p>Aksi Unjuk Rasa (AUR) Karyawan PT. Mahakam Sawit Plantation Group (Kalpataru). berjumlah sekitar 300 orang dengan koorlap sdr Rakhjib Martapianur.</p> <p>Dalam Aksi tersebut para pendemo melakukan orasi dan membentangkan spanduk yang bertuliskan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bayar gaji kami, Kami lapar sudah 10 bulan belum di gaji.</li> <li>2 Kami sudah muak dengan negosiasi, Bupati tolong sita aset PT. MSGP Kalpataru.</li> <li>3. Kami minta gaji bukan mediasi dan negoisasi.</li> <li>4. KPK usut tuntas perolehan izin HGU Kalpataru</li> <li>5. KPK Save &amp; Help Me usut izin Kalpataru jangan anggap remeh etam wahai orang Dzolim, cabut dan usut pemberi izin perusahaan pembawa sengsara ini</li> <li>6. UU Tenaga Kerja Mandul di Kukar</li> <li>7. Nego lagi Bacok</li> </ol> <p>Aksi di depan kantor DPRD Kukar di temui Radiansyah Anggota DPRD Kukar.</p> <p><b>Aksi di Kantor Bupati Kutai Kartanegara</b></p> <p>Pukul 10.30 wita Aksi melakukan long march ke dari Kantor DPRD Kukar menuju Kantor Bupati Kukar yang jaraknya sekitar 500 meter, didampingi Radiansyah anggota DPRD Kukar.</p> <p>Pada Pukul 10.45 wita, aksi tiba di</p>	<p><b>Tuntutan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karyawan mendesak pemerintah untuk memerintahkan pemilik perusahaan untuk membayar sisa hutang gaji kepada karyawan dengan segera beserta denda sampai bulan januari 2018.</li> <li>2. meminta Disnaker untuk memberi sanksi kepada perusahaan karena PHK tidak sesuai PHK Sesuai dengan amanat UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 169.</li> <li>3. mendesak Pemkab untuk menghentikan izin dan segera menjual aset PT. MSGP karena dinilai tidak menjalankan kegiatan sesuai peraturan perkebunan dan peraturan ketenagakerjaan.</li> </ol> <p><b>Langkah Penanganan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aparat keamanan dari Polres Kutai Kartanegara dibackup Satpol PP dan intel Kodim menjaga para peserta AUR agar</li> </ol>



NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
			<p>Kantor Bupati, melakukan orasi dan meminta Plt. Bupati menemui massa aksi.</p> <p>Pukul 11.30 wita diadakan pertemuan yang dipimpin Sekda Ir. H. Marli, M.Si didampingi At Taufiq Hidayat S.Ip. Kadisbun, Purnomo Kabag Hukum, Wagianto Kabid Disnaker, perwakilan massa AUR Rakhjhib Martapianur, SP, Ferdy Irawan, SE. SP. Dan beberapa karyawan lainnya.</p> <p>Dalam pertemuan tersebut pemerintah kabupaten berjanji akan membuat surat peringatan ke-3 kepada PT. MSGP dan apabila tidak diindahkan maka akan diserahkan kepada insatansi yang berwenang untuk mencabut perizinannya.</p>	<p>tidak melakukan tindakan anarkis.</p> <p>2. mengkoordinasikan dengan pihak terkait untuk menyediakan waktu menemui dan mengadakan dengar pendapat hearing dengan perwakilan AUR, untuk memperoleh informasi yang jelas sebagai bahan kebijakan selanjutnya.</p>
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senin</li> <li>• 24 September 2018</li> </ul>	Karyawan PT. KRS (Kaliraya Sari)	<p>Aksi Unjuk Rasa Karyawan PT. KRS (Kaliraya Sari) Badak 58 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara ± 24 orang.</p> <p>24 orang karyawan mewakili 80 orang karyawan harian yang menginginkan kepastian atau menjadi karyawan tetap.</p>	<p>Langkah Penanganan :</p> <p>Pihak keamanan berusaha menghadirkan manajemen PT. KRS (Kaliraya Sari) untuk mendengarkan tuntutan para pengunjuk rasa.</p> <p>Manager PT. KRS (Kaliraya Sari) Sdr. Sahabuddin menanggapi tuntutan diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuntutan Para Karyawan diterima dan ditampung serta akan disampaikan kepada Pemilik Perusahaan dan akan dirapatkan kepada Pemegang Saham Perusahaan.</li> <li>2. Manager PT. KRS (Kaliraya Sari) menyampaikan bahwa pekerjaan PT.KRS adalah maintenance sehingga pekerjaan berdasar tender dari Perusahaan Induk PERTAMINA (PT. PHSS) dibidang Perbaikan itupun saat ini sangat sedikit</li> </ol>



NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
				yang dapat dikerjakan oleh PT. KRS (Kaliraya Sari) sehingga pekerjaan diberikan secara bergantian, kru sehingga pembagian dapat adil dan sebagian karyawan dapat pekerjaan.

Tabel 6.8

Aksi Unjuk Rasa Berlatar belakang Sosial pada tahun 2018

NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
1.	• 29 April 2018	masyarakat Desa Jembayan Dalam, Desa Sungai Payang, dan Desa Lung Anai	<p>Terdapat gerakan masyarakat yang mengatasnamakan 3 desa yakni desa Jembayan Dalam, Desa Sungai Payang, dan Desa Lung Anai untuk aksi golput pada pilgub 2018.</p> <p>Berdasarkan penelusuran, diperoleh informasi dari Kades Sungai Payang Kec. Loa Kulu bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat 3 desa yakni Desa Jembayan Dalam, Desa Sungai Payang dan Lung Anai Kec. Loa Kulu yang dikoordinir oleh Tikong, Ardiansyah dan Memet, menyampaikan staetment melalui spanduk bahwa masyarakat tidak akan memilih atau Golput pada Pilgub Kaltim 2018.</li> <li>2. Jumlah Penduduk Desa Jembayan Dalam sekitar 2.000 orang, Desa Lung Anai 400 orang dan Desa Sungai Payang sekitar 2.900 orang penduduk.</li> <li>4. Diperkirakan hampir sebagian masyarakat masih konsisten dengan rencana Golput yang dipengaruhi oleh Tikong, Ardiansyah dan Memet.</li> </ol>	<p>Tuntutan :</p> <p>Alasan Golput, karena pembangunan infrastruktur jalan hingga saat ini tidak terlaksana. Masyarakat di 3 Desa tidak akan memilih apabila jalan menuju 3 Desa tidak di Cor atau di semenisasi.</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelumnya pada 29 Januari 2018 masyarakat 3 Desa tersebut telah melakukan aksi di DPRD Kukar, menuntut pembangunan infrastruktur jalan menuju 3 Desa tersebut, namun hingga kini pembangunan infrastruktur jalan belum terlaksana karena keterbatasan anggaran APBD Kukar.</li> <li>2. Menjelang tahapan Pilgub Kaltim, masyarakat 3 Desa tersebut yang dikoordinir oleh</li> </ol>

NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
				<p>Tikong, Ardiansyah dan Memet, mengeluarkan Staetment bahwa Masyarakat di 3 Desa tersebut tidak akan memilih apabila jalan menuju 3 Desa tersebut tidak di Cor atau disemenisasi. Dibuat dalam spanduk dan dipasang di depan rumah warga.</p>
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minggu</li> <li>• 12 Mei 2018</li> <li>• Pukul 14.00 - wita</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koalisi petani dan nelayan anti mafia tambang.</li> <li>2. Walhi dan Jatam</li> </ol>	<p>Sejumlah nelayan dari Kecamatan Muara Badak menggelar aksi unjuk rasa di laut dengan menghentikan kegiatan operasional bongkar muat. Mereka menuntut pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap aktivitas bongkar muat batu bara di kawasan perairan Muara Berau.</p> <p>Berdasarkan keterangan resmi dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) sekitar 28 kapal pengangkut batu bara di Muara Berau menghentikan aktivitas loading-nya.</p> <p>Kelompok nelayan tersebut menuntut adanya kompensasi dari perusahaan batu bara terkait kerugian nelayan yang dialami akibat proses bongkar muat di Muara Berau. Kegiatan tersebut diklaim mengganggu kegiatan nelayan secara langsung.</p> <p>Nelayan Muara Badak berjumlah sekitar 50 orang dipimpin Sudirman dan Nurung sebagai Koordinator, mendatangi Stasion Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB) di perairan Muara Berau dengan menggunakan sekitar 23 Unit Kapal Perahu Dompok.</p> <p>Rencana pada pukul 17.30 wita dilakukan aplusan dari kelompok nelayan Gondrong/jaring udang dan Belat ke kelompok nelayan bagang sebanyak 30 orang dengan menggunakan kapal dan jenis dompok sebanyak 14 unit hingga jam 06.00 wita.</p> <p>Koalisi petani dan nelayan anti mafia tambang dan sawit Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), melakukan aksi blokade Sungai Dondang, tepat di bawah</p>	<p>Tuntutan :</p> <p>Mereka menuntut pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap aktivitas bongkar muat batu bara di kawasan perairan Muara Berau. Penurunan hasil tangkapan pun diklaim sebagai pemicu nelayan melakukan aksi tersebut.</p> <p>Langkah Penanganan :</p> <p>Pengamanan unjukrasa dilakukan oleh KSOP, Polairud, TNI AL. telah dilaksanakan mediasi agar masyarakat nelayan untuk membuka kegiatan operasional STS Muara Berau.</p>

NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
			<p>Jembatan Dondang.</p> <p>Bersama sejumlah aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, mereka membentangkan spanduk raksasa bertuliskan Tambang Tunggangi Pilkada Serentak.</p> <p>Dalam aksi tersebut, 5 orang aktivis memasang spanduk berukuran 25x10 meter di bawah jembatan saat membentangkan spanduk raksasa bertuliskan "Tambang Tunggangi Pilkada Serentak".</p> <p>Menurut Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang, aksi blokade Sungai Dondang ini merupakan simbol perlawanan rakyat terhadap kegiatan tambang yang membuat warga Muara Jawa Kukar menderita.</p> <p>Berdasarkan data Jatam, saat ini ada 22 izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan dan saat ini tumpang tindih dengan izin perkebunan sawit. Setidaknya, Jatam mencatat da 2000 hektar lahan perkebunan yang dirampas oleh pengusaha tambang</p> <p>Aksi blokade ini sebagai bentuk perlawanan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang terus bergantung pada sumber energi kotor batubara dan sawit. aktivitas tambang merampas dan merusak lahan pertanian produktif milik warga.</p>	
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selasa</li> <li>• 10 Juli 2018</li> <li>• Pukul 9.20 wita</li> </ul>	Aliansi Masyarakat Muara Badak	<p>Masyarakat Muara Badak yang bergabung dalam Aliansi Masyarakat Muara Badak melakukan Aksi Unjuk Rasa dengan jumlah masa sebanyak 40 orang dengan lokasi aksi pada pintu Gate 2 PT. Vico Indonesia.</p> <p>Dalam melakukan aksi di depan Gate 2 PT Vico dan jln Simpang Sidodadi massa membentangkan spanduk yg bertuliskan menolak pertamina dan transisi Vico ke pertamina hulu Sanga Sanga serta teatrikal menggambarkan aktifitas PT. Vico selama 50 tahun di Muara badak.</p> <p>Dalam orasi massa yg melalui koodinator lapangan sdr. Taufik menyampaikan mengenai bahwa dengan akan adanya transisi PT Vico</p>	<p>Dengan akan berakhirnya kontrak karya PT. Vico Indonesia pada akhir tahun 2018 yang adakan dialih kelola oleh Pertamina. Masyakat Muara Badak khususnya para pekerja berkeinginan untuk dapat kembali bekerja pada operator baru yakni Pertamina. Namun keinginan ini belum bisa dijawab oleh Vico maupun Pertamina, sehingga menimbulkan keresahan di masyakat.</p> <p>Pemerintah Kabupaten</p>

NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
			<p>Indonesia ke PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga maka para pengunjung rasa menghimbau agar pemerintah harus bersikap adil dan wajar serta transparan.</p> <p>Kelompok pengunjung rasa AMMB meminta agar pemerintah jangan bersikap sembunyi-sembunyi atau kucingan-kucingan akan permasalahan ini dan pemerintah melalui PT Vico dan PT Pertamina harus bersikap adil dan kooperatif dlm menyikapi permasalahan peralihan atau transisi ini karena Masyarakat Muara Badak terus mengawasi masalah ini.</p> <p>Karena apabila masalah ini tidak ditangani dengan serius maka sudah tentu akan menimbulkan permasalahan dan keributan dimasyarakat khususnya warga masyarakat Muara Badak.</p> <p>PAPDESI bersama SKK MIGAS, PHI, PHSS dan Vico Indonesia melaksanakan rapat lanjutan audiensi terkait transisi/peralihan PT. Vico Indonesia ke PT. Pertamina yang dimediasi oleh Pemerintah Kab. Kukar dan dihadiri ± 150 orang di Balai Pertemuan Desa Muara Badak Ilir Jln. AMD No 01 RT 01 Kec. Muara Badak Kab. Kukar Prov. Kaltim.</p> <p>Kegiatan rapat lanjutan audiensi PAPDESI Muara Badak bersama SKK MIGAS, PHI, PHSS dan Vico Indonesia tersebut dilaksanakan dikarenakan belum adanya keputusan dari pihak Pertamina atas keinginan masyarakat Kec. Muara Badak hanya meminta transparansi terkait perekrutan tenaga kerja dan meminta agar warga Muara Badak bisa menjadi prioritas ketika pengelolaan beralih kepada Pertamina.</p>	<p>Kutai Kartanegara melalui tim terpadu mencoba menjabatani permasalahan ini dan mempertemukan antara PT. Vico, Pertamina Hulu Sangasanga dan Masyarakat Muara Badak.</p> <p>Kesimpulan dari hasil pertemuan tersebut sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Distransnaker Kabupaten Kukar akan mengawal proses recruitment oleh PHI dan PHSS sampai tuntas.</li> <li>- Pihak PHI dan PHSS dilarang membuat rekrutmen tenaga kerja di luar sepengetahuan Distransnaker Kabupaten Kutai Kartanegara.</li> <li>- SKK Migas berkomitmen untuk menghadirkan serta mendorong PHI dan PHSS mempersiapkan tanggapan dalam pertemuan lanjutan pada tanggal 26 Juli 2018 di Kecamatan Muara Badak dalam rangka membahas 3 permohonan yang disampaikan oleh PAPDESI.</li> </ul>
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senin</li> <li>• 15 Oktober 2018</li> <li>• Pukul 10.00-12.00 Wita</li> </ul>	Gabungan Forum Ormas Desa Semangko, Sebuntal dan Kersik (GAFOS2K)	<p>Dengan berakhirnya Kontrak Karya PT. Chevron kemudian akan alih operasi kepada PT. Pertamina, hal ini menjadi kegelisahan para pekerja apakah tetap dikerjakan oleh PT. Pertamina sebagai pengelola baru.</p> <p>Hal inilah yang membuat Gabungan</p>	<p>Kesimpulan rapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam rangka memenuhi tuntutan terkait tranparansi rekrutmen tenaga kerja semua pihak sepakat bahwa selama</li> </ol>

NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
			<p>Forum Ormas Desa Semangko, Sebuntal dan Kersik (GAFOS2K) memperjuangkan kegelisahan selain kontribusi perusahaan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sekitar.</p> <p>Hadir Dalam Acara Tersebut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairil Anwar SH.M.Hum, Assisten Pemerintahan dan Kesra (Pimpinan Rapat).</li> <li>2. Buhera, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara.</li> <li>3. Samsudin.T, DPRD Kutai Kartanegara</li> <li>4. Boyke Pardede, PHI/PHKT.</li> <li>5. Farah Dewi, PHI.</li> <li>6. Pulungan M, PHI/HC.</li> <li>7. Damar Setiawan, Humas SKK Migas.</li> <li>8. Margaretha DM, Humas SK Migas.</li> <li>9. Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja,Rekson Simanjuntak.</li> <li>10. Drs. Zulkipli, M.Si., Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara.</li> <li>11. Ety Erma S, Plt.Kabag Pemerintahan</li> <li>12. Y.Wardhana, Bagian Pemerintahan.</li> <li>13. Hamzah, Camat Marangkayu.</li> <li>14. Sugiharto, Kapolsek Marangkayu.</li> <li>15. Heri Agus S., Danpos Ramil Marangkayu.</li> <li>16. Ansar K, Kades Semangko.</li> <li>17. Aminuddin, Kades Sebuntal.</li> <li>18. Toni Amril, Ketua GAFOS2K.</li> <li>19. Jumadi, Sekretaris GAFOS2K.</li> <li>20. M. Arsyad, Pembina GAFOS2K.</li> <li>21. Ibrahim, KNPI Marangkayu.</li> <li>22. Hendra, Wakil Ketua KNPI Marangkayu.</li> <li>23. Kamaruddin, Anggota GAFOS2K Ketua LBD Marangkayu</li> <li>24. Hadir dalam rapat ± 29 Orang.</li> </ol>	<p>proses transisi operasi tidak ada rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan oleh PHI/PHKT dan untuk menghindari penurunan produksi selama proses transisi operasi, maka dilakukan tranfer tenaga kerja dari Chevron ke Pertamina Hulu Kalimantan Timur dengan status karyawan waktu tertentu (Sementara Selama 1 Tahun) dan akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh dengan melihat perkembangan dan kebutuhan operasional Pertamina Hulu Kalimantan Timur.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pertamina Hulu Indonesia/Pertamina Hulu Kalimantan Timur akan mengevaluasi usulan GAFOS2K tentang kebutuhan kantor dan perumahan di Kecamatan Marangkayu mengingat produksi lapangan sudah mengalami penurunan produksi.</li> <li>3. Pertamina Hulu Indonesia/Pertamina Hulu Kalimantan Timur berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan program peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan pengusaha lokal Kecamatan Marangkayu serta siap</li> </ol>

NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
				<p>mengembangkan sumber daya lokal melalui program CSR/Condev dan akan di koordinasikan dengan program pemerintah yang penyusunanya dimulai pada tingkat desa (Musrenbangdes).</p> <p>4. Akan dibentuk tim kecil untuk membahas teknis tuntutan GAFOS2K yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, SKK Migas, PHI/PHKT Perwakilan GAFOS2K, Muspika Marangkayu dibawah koordinasi Kepala Humas Kepala Operasi SKK Migas Wilayah Kolsul dan Kadisnaker Kabupaten Kutai Kartanegara pertemuan dengan PHI/PHKT dilaksanakan pada tanggal 1 Nopember 2018.</p>

**Tabel.6.9**  
Penanganan Aksi Terorisme

NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sabtu</li> <li>• 18 Agustus 2018</li> <li>• pukul 16.30</li> </ul>	Terduga Terorisme	<p>Dilaksanakan penangkapan terhadap 2 (Dua) orang warga masyarakat Kecamatan Loa Janan terduga Teroris oleh anggota Densus 88 Mabes Polri.</p> <p>Adapun data 2 (Dua) orang tersebut :</p> <p>1. Nama : Galang Hendarwan (anak dari Sudarto)</p> <p>Tempat tanggal lahir : Kediri 22-03-1997</p> <p>Agama : Islam</p> <p>Suku : Jawa</p> <p>Pekerjaan : Buruh Bangunan.</p> <p>Alamat : RT. 24 Gang. Sukun Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan</p> <p>Barang Bukti : 1 Unit motor yamaha jupiter nopol: KT. 5872 CH.</p> <p>2. Nama : Odi Setiawan (anak dari Sugiman)</p> <p>Tempat tanggal lahir : Samarinda, 26 Mei 1988.</p> <p>Agama : Islam</p> <p>Suku : Jawa.</p> <p>Pekerjaan : Wiraswasta.</p> <p>Alamat : RT. 8 Gang. Satya Dusun Gunung Pagat desa Loa janan Ulu Kecamatan Loa Janan.</p> <p>Kedua orang ini merupakan terduga teroris yang merupakan jaringan JAD</p>	<p>Langkah Penanganan :</p> <p>Melakukan koordinasi kepada pihak keamanan dan kemudian diteruskan kepada Camat-camat agar meningkatkan kewaspadaan di wilayah masing-masing untuk memperkecil ruang gerak jaringan terorisme.</p>

**F.2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani**

Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman Dan Ketertiban Umum adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara bekerjasama dengan Kantor Satpol PP dan instansi terkait lainnya.

Disetiap terjadinya bencana baik skala kecil maupaun besar personil Satuan Polisi Pamong Praja selalu ikut serta dan proaktif dalam membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi serta selalu berkoordinasi dengan pihak- pihak yang terkait.

**F.3. Sumber dan Jumlah Anggaran**

## a) Badan Kesbangpol dan Masyarakat

Sumber anggaran untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam hal penanganan gangguan dan konflik terdiri 1 (satu) kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

## ➤ Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1. Fasilitasi Kewaspadaan di Daerah dengan Anggaran sebesar Rp. 140.000.000,00 realisasi Rp. 132.259.500,00 (94,47%)

## b) Satpol PP

Dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja mengalokasi anggaran yang bisa mengkoordinir seluruh tugas Satuan Polisi Pamong Praja untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum, alokasi anggaran tersebut bersumber dari anggaran Satuan Polisi Pamong Praja melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan judul Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah, Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Program Peningkatan Pembeantasan Penyakit Masyarakat.



# BAB VII

## BAB VII

### PENUTUP

**B**erbagai prestasi dan kekurangan selama tahun 2018 yang telah dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2018 ini diharapkan akan menjadi awal kesepahaman untuk mengarahkan cara pandang perbaikan-perbaikan ke depan, karena dalam siklus manajemen strategik, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dipisahkan dengan penetapan perencanaan dan sebaliknya. Dengan demikian apabila semua pihak dapat memahami siklus manajemen strategik tersebut, maka laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini dipandang bukan hanya sekedar sebagai pemenuhan formalitas belaka.

Tantangan terbesar adalah menyiapkan Kabupaten Kutai Kartanegara agar tidak terpinggirkan dan dapat memperoleh manfaat dari proses globalisasi serta dapat berkembang secara berkelanjutan menuju ke Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 ***“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan”*** yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Kabupaten telah mencoba memenuhi komitmen bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang kokoh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara di masa mendatang. Pemerintah Kabupaten dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang luar biasa sehingga harus segera menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis tersebut agar tidak tertinggal oleh arus perubahan yang sangat tinggi.

Kendala dan permasalahan yang juga dirasakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah masih adanya ketidakjelasan pengelolaan urusan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat. Disamping itu terdapat pula peraturan perundang-undangan yang ambivalen, kontradiktif, dan tidak jelas serta sering berubah-ubah. Namun demikian pada masa mendatang diupayakan untuk terus memantapkan fundamen yang telah diletakkan pada masa sebelumnya, menggali potensipotensi yang ada, memanfaatkan peluang dan tantangan serta mengurangi kemungkinan ancaman yang muncul.

Adapun prestasi yang diterima Pemkab. Kutai kartanegara sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperingati HUT Kaltim ke-61 Tahun di Stadion Sempaja Samarinda pada 9 Januari 2019, Pemerintah Kabupaten Kukar menerima 9 panji keberhasilan pembangunan dari Gubernur Kalimantan Timur H Awang Faroek Ishak, yaitu :
  - a) Bidang Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kategori Kabupaten,
  - b) Bidang Prestasi Penyelenggaraan Diklat Aparatur,
  - c) Bidang Keberhasilan Pengelolaan E-Government,
  - d) Bidang Kebudayaan Kabupaten,
  - e) Bidang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN),
  - f) Bidang Kepemudaan,
  - g) Bidang Gerakan Pramuka,
  - h) Bidang Penanggulangan Kemiskinan,
  - i) dan Bidang Kondusifitas Daerah.
2. RSUD AM. Parikesit menerima penghargaan Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima" oleh Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji pada 24 Januari 2018.

3. Kabupaten Kutai Kartanegara menerima penghargaan Kabupaten Berprestasi dengan predikat nilai B (baik) Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2017 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur pada 31 Januari 2018.
4. Dinas PMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara menerima penghargaan Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori B (baik) Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2017 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur pada 31 Januari 2018.
5. RSUD AM Parikesit Tenggarong menerima penghargaan Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik kategori Pelayanan Prima Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2017 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur pada 31 Januari 2018.
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara menerima penghargaan Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori B (baik) Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2017 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur pada 31 Januari 2018.
7. Pemkab. Kutai Kartanegara menerima penghargaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) terhadap Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2017 katagori penilaian Sangat Tinggi, dengan predikat bintang 3 oleh Menteri Dalam Dalam Negeri (Mendagri) Cahyo Kumolo pada 25 April 2018.
8. Bupati Kutai Kartanegara menerima penghargaan Inovator Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) Top 99 tahun 2018 oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang diserahkan langsung oleh MenPAN\_RB Syafrudin pada 19 September 2019.
9. RSUD AM Parikesit Kabupaten Kukar mendapatkan predikat A kategori Pelayanan Prima tahun 2018 oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang diserahkan langsung oleh MenPAN\_RB Syafrudin pada 27 Nopember 2018.
10. Bupati Kukar Pembina pelayanan publik kategori Sangat Baik tahun 2018 oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang diserahkan langsung oleh MenPAN\_RB Syafrudin pada 27 Nopember 2018.
11. Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menjadi salah satu desa di Indonesia yang menerima penghargaan sebagai desa terbaik dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) oleh Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo pada 29 Nopember 2018.
12. Kutai Kartanegara menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya 2018 oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Yohana Yambise pada 19 Desember 2018
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kukar predikat A kategori Pelayanan Prima tahun 2018 oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang diserahkan langsung oleh MenPAN\_RB Syafrudin pada 27 Nopember 2018.
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kukar predikat A-kategori Sangat Baik tahun 2018 oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang diserahkan langsung oleh MenPAN\_RB Syafrudin pada 27 Nopember 2018.
15. Sekolah MAN 2 Kutai Kartanegara memperoleh Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional 2018 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI pada 17 Desember 2018.

Pada akhirnya, penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 ini disampaikan sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

**TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	Keberadaan PERDA IMB	Ada/tidak ada PERDA	Apabila ADA : Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : 19 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu	ada	ada	Sumber data dari Dinas PMPTSP
			2	Rasio Rumah ber IMB	Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah <u>rumah</u> 1 seluruhnya	Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2018, sebanyak ----- unit. Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2018, sebanyak ----- Unit.	9,280 185,436	5.00	Sumber data dari Dinas PMTSP dan Dinas Perkim/ Pertanahan & Tata Ruang
			3	Keberadaan PERDA RTRW	Ada/tidak ada PERDA RTRW	Apabila ADA : Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : 9 Tahun 2013 tentang RTRW	ada	ada	Sumber data dari Dinas Pertanahan dan PR
		Peraturan ttg kependudukan	4	Pengurusan E-KTP	Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP dibagi Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP	- Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP - Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP	457,025 476,331	95.95	Sumber data dari Kependudukan dan Catatan sipil.
			5	Biaya KTP	Biaya KTP dalam PERDA	Dasar hukum : PERDA Nomor : 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Adm. Kependudukan Kab. Kutai Kartanegara	0.00	100.00	Bilamana Perda tidak mengatur biaya, dapat diperkuat dengan SOP.
		Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)	6	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2018 dibagi 10.000 penduduk x 100 %	Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2018, sebanyak = 169 orang Penduduk pada akhir tahun 2018, berjumlah = 677.755 orang	169 677,755	2.49	Sumber data dari Satpol PP dan BKD

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS.	7	Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS	Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL	Apabila ADA : Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : 14 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV Aids dan Infeksi Menular Seksual dan PERDA Nomor : 5 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	Ada	ada	Sumber data dari Dinas Sosial
		Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten	8	Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten	Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kabupaten	Apabila ADA : Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.	ada	ada	Sumber data dari DLHK/Dinas Perkim
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Penyampaian laporan kepada pemerintah	9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2018,	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2018 disampaikan pada tanggal 26 Maret 2019 sesuai surat pengantar Nomor---- tanggal ----- 2019.	tepat	tepat	Sumber data dari Bappeda
Penyampaian laporan keuangan dan kinerja		10	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman : Laporan Keuangan 2018, disampaikan pada tanggal ----- 2019 sesuai surat pengantar Nomor ----- tanggal ----- 2019	tepat	tepat	Sumber data dari BPKAD	
		11	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian Laporan Kinerja sesuai jadwal yg telah ditetapkan oleh peraturan	Bukti Pengiriman : Laporan Kinerja tahun 2018 disampaikan pada tanggal ----- 2019 sesuai surat pengantar Nomor----- tanggal ----- 2019	tepat		Normalisasi	
Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)		12	Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.	Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/ Pimpinan LPND.	Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak ----- urusan, yang terdiri dari: 1) Urusan Pendidikan 2) Urusan Kesehatan 3) Urusan PU dan Penataan Ruang 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5) Urusan Trantibum dan Linmas 6) Urusan Sosial	6	6	SPM yang ditetapkan Pemerintah sampai dengan Tahun 2018, sebanyak 6 urusan.	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Hubungan antar daerah	13	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2016	<p>Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2018, sebanyak ----- MOU yang terdiri dari:</p> <p>1) MOU dengan Pemkab. Banyuwangi tentang kerjasama Pengembangan e-Government. (No.180/MoU-7-Hk/2018 tanggal 8 Mei 2018)</p> <p>2) MOU dengan Pemkab. Kutim tentang kerjasama Pembangunan Antar Daerah. (No. 180/MoU-10/Hk/VII/2018 tanggal 22 Mei 2018)</p> <p>3) MoU dengan Pemkot. Balikpapan tentang kerjasama Pembangunan Antar Daerah (No. 180/MoU-32/HK/2018 tanggal 26 November 2018)</p> <p>4) MoU dengan Pemkot. Samarinda tentang kerjasama Pembangunan Antar Daerah (No. 180/MoU-27/HK/2018 tanggal 29 Oktober 2018)</p> <p>5) MoU dengan Pemkab. Kutai Barat tentang kerjasama Pembangunan Antar Daerah (No. 180/MoU-9/HK/2017 tanggal 12 April 2017)</p> <p>6) PKS Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemkab. Banyuwangi tentang Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Anggaran dan Pelaporan (No. 180/PKS-8/HK/2018 tanggal 8 Mei 2018)</p> <p>7) MoU dengan Pemkot Bontang tentang Kerjasama Pembangunan Antar Daerah (No. 180/MoU-7/HK/2017)</p>	7	7	Sumber data dari Bagian Pemerintahan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	14	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional	Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak ---- - prioritas Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 5 rogram/agenda prioritas.	5  5	100.00	Sumber data dari BAPPEDA/Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Kewenangan	15	Urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 24 (Jumlah urusan wajib di UU 23/2014) X 100 %	Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2018 (APBD) = 22 urusan.	22	92%	Sumber data : sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2017.
		Keuangan	16	Waktu penetapan PERDA APBD 2018	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2018	Apabila TEPAT : Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : 14 Tahun 2017 tentang APBD 2018 tanggal 28 Desember 2017. (Paling lambat tanggal 31 Desember 2018).	tepat	tepat	Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD
			17	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah	Apabila ADA : Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Kukar	ada	ada	Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD
			18	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100 %	Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2018. 1) Urusan Pendidikan Rp. ---- 2) Urusan Kesehatan Rp. ----- 3) Urusan PU dan PR Rp. 4) Urusan Perkim RP..... 5) Urusan Trantibum & Linmas Rp. -- 6) Urusan Sosial Rp..... Total Belanja APBD 2018, sebesar Rp.	Rp 2,141,763,683,358.74 Rp 934,230,200,996.00 Rp 581,823,569,830.33 Rp 504,576,644,620.41 Rp 57,929,606,646.00 Rp 47,240,683,631.00 Rp 15,962,977,635.00 Rp 3,574,459,710,071.24	59.92	Sumber data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data yang diambil merupakan realisasi belanja perurusan
			19	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2018. 1) Urusan Pendidikan Rp. ----- 2) Urusan Kesehatan Rp. -----	Rp 1,516,053,770,826 Rp 934,230,200,996 Rp 581,823,569,830	42.41	Sumber data dari BPKAD. Data diambil dari : - Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Pelayanan Publik	20	Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik <sup>3</sup> sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik	Apabila ADA : Sebutkan hukumnya, PERDA Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara (standar pelayanan publik)	ada	ada	Sumber data dari Bagian Hukum
		Kepegawaian	21	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS kabupaten dibagi jumlah penduduk	Jumlah PNS kabupaten tahun 2018 sebanyak 14,494 orang. Jumlah penduduk kabupaten tahun 2018 sebanyak 677,775 orang.	14,494 677,755	2.14	Pembilang : Sumber data dari BKD Penyebut : Sumber data dari Disdukcapil
			22	Sistem Informasi Kepegawaian	Ada atau tidak adanya data base kepegawaian	Apabila ADA, sebutkan nama lengkap dari Sistem database: SIMPEG - SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (tentang kepegawaian)	ADA	ada	Sumber data dari BKD
		Kelembagaan	23	Penataan Perangkat Daerah	Jumlah pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan PP 18 Tahun 2016	Jumlah Perangkat Daerah, sbb:: 1) Bagian (Setda) = 1 unit 2) Sekretariat DPRD = 1 unit 3) Dinas = 27 unit 4) Badan = 5 unit 5) Inspektorat = 1 unit 6) Rumah Sakit = 3 unit 7) Kecamatan/Distrik = 18 unit	67 12 1 27 5 1 3 18	67	Sumber data dari Bagian Ortal  1) Perda No. 9 Tahun 2016 2) Perda No. 12 Tahun 2011 tentang Tata Kerja RSUD AM. Parikesit 3) Perda No. 7 Tahun 2008 tentang RSUD Aji Batara Agung Dewasakti Samboia 4) Perbup No. 27 Tahun 2013 tentang RSUD Dayaku Raja Kota Ranau
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	24	PERDA yang ditetapkan	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2018	PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2018, sebanyak 16 Perda ( Daftar terlampir)	16	16	Sumber data dari Bagian Hukum
		RAPERDA yang diajukan tahun berjalan	25	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2018	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2018 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2018	RAPERDA yang disetujui tahun 2018, sebanyak 16 RAPERDA. RAPERDA yang diusulkan DPRD tahun 2018, sebanyak 23 PERDA.	16 23	69.57	Sumber data dari Bagian Hukum



NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	26	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti .	Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2018 x 100%	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2018, sebanyak 57 keputusan.  Keputusan DPRD dalam tahun 2018, sebanyak 57 keputusan.	57  57	100.00	Sumber data dari Set DPRD
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH	Tindaklanjuti keputusan Bupati	27	Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2018 x 100%	Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti tahun 2018, sebanyak 471 Keputusan Bupati tahun 2018 , sebanyak 471 keputusan.	471  471	100.00	Sumber data dari Bagian Hukum
		Tindaklanjuti Peraturan Bupati	28	Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah Peraturan Bupati yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah Peraturan Kabupaten dalam tahun 2018 x 100%	Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti, sebanyak 47 Perbup.  Peraturan Bupati dalam tahun 2018, sebanyak 47 Perbup.	47  47	100.00	Sumber data dari Bagian Hukum
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERDA yang dibatalkan	29	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%	Perda yang dibatalkan, sebanyak ----, yang terdiri dari: 1) Perda Nomor ----- Tahun 2018 tentang - 2) Perda Nomor ----- Tahun 2018 tentang - 3) Dst. Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak -----	0  0	0.00	Sumber data dari Bagian Hukum
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	PERDA tentang konsultasi publik	30	Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik	Ada/tidak PERDA/PerBup	Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya. 1) Perbup Nomor 117 Tahun 2012 tentang Pengaduan Keramahan Lingkungan . 2) Perbup No. 67 Tahun 2013 tentang Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat (konsultasi publik)	ada	ada	Sumber data dari Bagian Hukum/ Bappeda
		Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik	31	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/ biro humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerBup	Apabila ADA, Sebutkan Nama Mediana : Website Kabupaten Kutai Kartanegara Sebutkan Perbup nomor 44 tahun 2009 tentang Pengembang E-Government	ada	ada	Sumber data dari Dinas Kominfo

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	32	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%	Dana perimbangan yang terserap Tahun 2018 sebesar Rp. -----  Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2018 sebesar Rp. -	Rp 3,136,734,843,169  Rp 3,169,285,704,474.46	98.97	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).
		Alokasi Belanja pada APBD dari DAU	33	Belanja Publik terhadap DAU	Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%	Belanja langsung APBD tahun 2018, sebesar Rp-----  DAU Tahun 2018, sebesar Rp. -----	Rp 1,619,284,748,926.13  Rp 249,562,937,000.00	6.49	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
		Alokasi Belanja pada APBD	34	Belanja Langsung terhadap total APBD	Total belanja Langsung dibagi APBD x 100%	Total Belanja langsung APBD tahun 2018, sebesar Rp----- Total Belanja APBD Tahun 2018, sebesar Rp.	Rp 1,619,284,748,926.13 Rp 3,574,459,710,071.24	45.30	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD (realisasi) X 100%	PAD APBD (Realisasi) Tahun 2018, sebesar Rp -----	Rp 272,231,728,278.84	6.92	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (Bapenda)
						Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2018, sebesar Rp. ---	Rp 3,933,173,518,353.84		
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	36	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah untuk 2 tahun terakhir	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2017, dengan opini: -----  Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2018, dengan opini: -----	WDP  WDP	2 WDP	Opini : 1) WTP/ <i>unqualified opinion</i> ); 2) WDP/ <i>qualified opinion</i> ); 3) TMP/ <i>disclaimer opinion</i> ), atau 4) TIDAK WAJAR (TW/ <i>adverse opinion</i> ).  Opini LHP Tahun 2018, diberikan kepada Evaluator Timda pada waktu kunjungan lapangan Timda
		Besaran SILPA	37	Rasio SILPA thdp total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%	SILPA Tahun 2018, sebesar Rp ----- Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2018, sebesar Rp. ---	Rp 353,881,865,595.60 Rp 3,933,173,518,353.84	9.00	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).
		Realisasi belanja	38	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100%	Realisasi Belanja Tahun 2018, sebesar Rp --	Rp 3,574,459,710,071.24	81.25	Pembilang : Sumber data berasal dari Laporan Realisasi Belanja /LRA

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			38			Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2018, sebesar Rp. -----	Rp 4,399,322,942,854.37		Penyebut : sumber data berasal dari total anggaran APBD
		Pengawasan Inspektorat Kabupaten	39	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2018	Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2018, sebanyak 1249 temuan.  Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2018 sebanyak 1297 temuan.	1249  1297	96.30	Sumber data dari Inspektorat. Data merupakan rekomendasi dari jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti.
12	PENGLOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	40	Rasio realisasi PAD 2018 terhadap <u>potensi PAD</u> <sup>4</sup>	Jumlah realisasi PAD 2018 dibagi dengan potensi PAD X 100%	Realisasi PAD Tahun 2018, sebesar Rp. -----  Potensi PAD pada APBD Tahun 2018 APBD	Rp 272,231,728,278.84  Rp 351,773,706,477.11	79%	Sumber data dari BPKAD , angka pembagi menggunakan potensi PAD dalam target tahunan dalam
		Peningkatan PAD	41	Peningkatan PAD	Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100 % (PAD 2018 - PAD 2017) : PAD 2016 X 100%	Total PAD pada Tahun 2018 sebesar Rp. ----  Total PAD pada Tahun 2017 sebesar Rp.----	Rp 272,231,728,278.84  Rp 435,513,161,873.75	36,19%	Sumber data dari BPKAD
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM	Penghargaan	42	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2018	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2018	Penghargaan yang diterima, sebanyak ----- yang terdiri dari 1) Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima" kepada Rumah Sakit Umum (RSU) AM. Parikesit  2) Kabupaten Berprestasi dengan predikat nilai B (baik) Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2017  3) Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Kategori B (baik) pada Dinas PMPTSP Kukar Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2017.	14	14	Sumber data dari Bagian Humas dan Perangkat Daerah yang menerima penghargaan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						<p>4) Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Kategori Pelayanan Prima kepada RSUD AM Parikesit Tenggarong Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2017</p> <p>5) Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Kategori B (baik) pada Disdukcapil Kukar Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2017.</p> <p>6) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) terhadap Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2017 kategori penilaian Sangat Tinggi, dengan predikat bintang 2</p> <p>7) Inovator Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) Top 99 Tahun 2018</p> <p>8) RSUD AM Parikesit Kabupaten Kukar menerima predikat A kategori Pelayanan Prima tahun 2018</p> <p>9) Bupati Kukar Pembina Pelayanan Publik pada Kategori Sangat Baik tahun 2018</p> <p>10) Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu desa terbaik dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</p> <p>11) Penghargaan Anugerah Parahita Ekarava 2018</p> <p>12) DPMPTSP Kab. Kukar predikat A Pelayanan Prima Tahun 2018.</p>			

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						13) Disdukcapil Kab. Kukar predikat A- Kategori Sangat Baik Tahun 2018 14) Sekolah MAN 2 Kutai Kartanegara memperoleh Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional 2008			
		Pengadaan barang dan jasa	43	Keberadaan E-procurement	Ada/Tidak	Apabila ADA Sebutkan Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan Juli tahun 2011.	ada	ada	Sumber data dari ULP. Data berupa proses E-procurement
		Daya saing daerah	44	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah ijin investasi dalam tahun 2018	Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2018, sebanyak 637 ijin	339	339	Sumber data dari Kantor PTSP (nilai masing-masing izin investasi >= 200 juta)-(PMDN)

**LAMPIRAN III.2 : FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA

NAMA SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kebudayaan

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
							URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 1	URUSAN 2	
2	3	4	5	6	7	8	9	9	9		
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak ----- program Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program.	4	3	80	75	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 9 yang terdiri dari: 1. SOP ttg NUPTK 2. SOP ttg Insentif Guru 3. SOP ttg Lagalisir Ijazah 4. SOP ttg Penilaian Kenaikan Pangkat Guru 5. SOP ttg Sertifikasi Guru 6. SOP ttg Penilaian Kinerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah 7. SOP ttg PPDB Online 8. SOP ttg Izin Mutasi Siswa 9. SOP ttg Perijinan Pendirian Sekolah Dasar 10. SOP ttg Proses Pembuatan Nomor Induk Kesenian ( NIK )	9	1	9	1	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak -----  PERDA yang seharusnya, sebanyak -----					Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang ada sebanyak -----	55	3	87.30	75.00	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
						Jabatan yang harus ada, sebanyak -----	63	4			

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
							URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 1	URUSAN 2	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, ----  1. Pengawas / Penilik 2. Pamong Belajar 3. Guru	ADA	0	ada	tidak	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak ----. personil  Total PNS Kabupaten, sebanyak ---- personil	6405  14494	39  14494	44.19	0.27	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/ BKD
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak ---- org.  Pejabat yang ada, sebanyak ---- org.	26  55	3  3	47.27	100.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ---- org.  Jabatan yang ada, sebanyak ---- jbt.	55  55	3  3	100.00	100.00	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak ---- jenis, yg terdiri dari:  - RENSTRA PD  - RENJA PD - RKA PD	3  Ada  Ada Ada	3  Ada  Ada Ada	3	3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan  Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
			10	Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 12 program.  Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 12	9  9	3  3	100.00	100.00

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
							URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 1	URUSAN 2	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RPKD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RPKD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA RPKD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 12 program.  Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 12 program.	9  9	3  3	100.00  100.00	100.00  100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2017 dan Renja- Perangkat Daerah ybs
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 12 program.  Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 12 program.	9  9	3  3	100.00  100.00	100.00  100.00	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2018.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesarRp, ---- Total Belanja APBD, sebesar Rp----	1,168,206,648,878  4,399,322,942,854.37	5,400,388,801.00  4,399,322,942,854.37	26.55	0.12	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. -----  Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp.-----	84,253,197,875.55  234,996,199,039.55	0  0	35.85	alah tolong ce	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. ---	1,188,678,644  141,479,883,614	0  0	0.84	alah tolong ce	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. -- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.	1,188,678,644  234,996,199,039.55	0	0.51	tdi	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb:  1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	Ada Ada Ada Ada Ada	Ada Ada Ada Ada Ada	5	5	5
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. Ada 1. Kartu Inventarisasi Barang (KIB). 2. Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah	Ada	Ada	ada	ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
							URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 1	URUSAN 2	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. --- Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. -----.	75,617,750,738.00	0	3.65	0.00	Pembilang :  1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset)  2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya  1. Papan Pengumuman 2. Website 3. Kotak Saran 4. Surat Kabar	4	4	4	4	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Tidak	Tidak	tidak	tidak	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA

NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Urusan Wajib Bidang Kesehatan

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh PerangkatDaerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 10 program  Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 12 program.	10  12	83.33333	Lihat Program Nasional RKP 2017 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 83 yang terdiri dari : (Terlampir)  1. SOP Bidang Yankes  2. SOP Bidang P2PL  3. SOP Bidang SDK  4. SOP Bidang Kesmas	83  17  22  26  18	83	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan PerangkatDaerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak 6  PERDA yang seharusnya, sebanyak 6	6  6	100	Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang ada sebanyak 79  Jabatan yang harus ada, sebanyak 89	79  89	88.76	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----  1. Administrator Kesehatan 2. Apoteker 3. Asisten Apoteker 4. Bidan 5. Dokter 6. Dokter Gigi 7. Epidemilog 8. Nutrisionis 9. Penyuluh Kesehatan Masyarakat  10. Perawat 11. Perawat Gigi 12. Pranata Lab. Kesehatan 13. Sanitarian 14. Pengelola Pengadaan Barang Jasa Pertama	14  1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1	ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak 957 personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 14.494 personil	957  14,494	6.60	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017/ BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanvak 41 org. Pejabat yang ada, sebanyak 79 org.	41  79	51.90	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 77 org.	77	97.47	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
				kepengkatan	kepengkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Jabatan yang ada, sebanyak 76 jbt.	79		2017.
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	3	3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 21 program.  Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 23 program	21  23	91.30	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 21 program.  Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 21 program.	21  21	100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 21 program.  Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 21 program.	21  21	100.00	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2016 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2017.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp. 316.464.976.731,74 *)	316,464,976,731.74	7.19	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir.

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
						Total Belanja APBD, sebesar Rp. 4.399.322.942.854,37	4,399,322,942,854.57		(anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 59.564.421.920 Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 255.286.237.303,11	56,110,009,701.00 255,286,237,303.11	21.98	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. ---		tdi	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. -- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.		tdi	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	3	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb:  1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	5  1 1 1 1 1	5	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. Ada, dalam bentuk Buku Inventaris Barang, Kartu Inventaris Barang (KIB)	Ada	ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. -----.	0	tdi	Pembilang :  1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
									2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan  Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. WEBSITE 2. MADING/PAPAN PENGUMUMAN 3. BANNER 4. SPANDUK & BALEHO 5. LEAFLET 6. MEDIA SOSIAL (FACEBOOK) 7. POSTER 8. MEDIA ELEKTRONIK (RADIO)	8  1 1  1 1 1 1 1	8	8 Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Kepuasan Pelanggan di Puskesmas Rapak Mahang dan Loa Ipuh	Ada	ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA

NAMA SKPD : RSUD AM PARIKESIT

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: URUSAN WAJIB KESEHATAN

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanvak 1 program Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 12 program.	1  12	8.33	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak -- -- yang terdiri dari: 1. SPO Instalasi 2. SPO Unit 3. SPO Komite 4. SPO Kelompok Staf Medis	1177  720 181 142 134	1177	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak 1  PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	1  1		Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang ada sebanyak 22 Jabatan yang harus ada, sebanyak 24	22 24	91.67	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional  Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 170 orang	Ada	ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
4	PENGLOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak 304 personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 14494 personil	304 14494	2.10	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/ BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 9 org. Pejabat yang ada, sebanyak 22 org.	9 22	40.91	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 22 org. Jabatan yang ada, sebanyak 22 jbt.	22 22	100.00	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	3 Ada Ada Ada	3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
			10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 3 program.  Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 12	3 12	25.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPDP tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
			11	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	3	100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
					program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	3		2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.  Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	3  3	100.00	Sumber data dari dokumen RKA Perangkat Daerah tahun 2016 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2017.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesarRp, 271.658.410.164 (APBD+BLUD) Total Belanja APBD, sebesar Rp 4.399.322.942.854,37	2.71658E+11  4.40E+12	6.18	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 17.418.439.318  Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 207.176.913.844	17418439318  2.07177E+11	8.41	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. ---	6.50E+08  1.57397E+11	0.41	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. -- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 207.176.913.844	6.50E+08  2.07E+11	0.31	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb:  1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	5  Ada Ada Ada Ada Ada	5	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. Rekonsiliasi Data BMD dan Keuangan TA 2018	ada	ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp.393.459.552.197,84	0  3.93E+11	0.00	Pembilang :  1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan  Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Media Massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya  1. Papan Pengumuman 2. Unit Layanan Pengaduan 3. Leaflet dan Brosur 4. Poster 5. Kotak Saran 6. Media Online (Website, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) 7. Banner 8. Speak Up (Layanan Pengaduan secara Online) 9. Televisi/Monitor persediaan tempat tidur dan antrian pasien 10. SIPULAN (Pendaftaran Pasien Rawat Jalan secara Online)	10	10	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Korupsi	ADA	ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA

NAMA SKPD : RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: KESEHATAN

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanvak 1 program Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 12 program.	1  12	8.333333	Lihat Program Nasional RKP 2017 untuk masing-masing urusan, terlampir
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 1004 yang terdiri dari: 1. SOP ttg gawat darurat 2. SOP ttg pelayanan perawatan inap dan jalan 3. SOP ttg Pelayanan persalinan dan perinatologi 4. SOP ttg pelayanan intensive Care Unit (ICU) 5. SOP ttg pelayanan Operasi (bedah) 6. SOP ttg pelayanan Laboratorium dan UTD RS 7. SOP ttg pelayanan farmasi (Apotek) 8. SOP ttg pelayanan Radiologi 9. SOP ttg pelayanan Gizi 10. SOP ttg pelayanan Laundry 11. SOP ttg pelayanan PPI 12. SOP ttg pelayanan rekam medik 13. SOP ttg pelayanan pemulasaran Jenazah	1004  67 293 71 126 112 112 28 45 46 30 20 48 6	1004	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak 1  PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	1  1		Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang ada sebanyak 14 Jabatan yang harus ada, sebanyak 14	14 14	100.00	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional (dokter, dokter spesialis, perawat, bidan, Apoteker, Analis, Radiografer, Gizi, fisioterapi, kesmas, )--> 10 jenis jabatan fungsional	Ada	ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak 88 personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 14.494 personil	88 14494	0.61	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/ BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanvak 8 org. Pejabat yang ada, sebanyak 14 org.	8 14	57.14	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 org. Jabatan yang ada, sebanyak 14 jbt.	13 14	92.86	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak -- 3 jenis, yg terdiri dari:  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	3  Ada Ada Ada	3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 10 Program.  Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10	10  10	100.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPDP tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program.  Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program.	9  9	100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program.  Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program.	9  9	100.00	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2018.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesarRp, 80.698.726.581,84  Total Belanja APBD, sebesar Rp. 4.399.322.942.854,37-	80,698,726,582  4,399,322,942,854	1.83	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 12.801.745.398  Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp.73.562.888.491	12,801,745,398  73,562,888,491	17.40	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.253.746.574	1,253,746,574	2.47	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan			x 100%	Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp.50.841.322.355	50,841,322,355		terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.253.746.574	1,253,746,574	1.70	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
						Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 73.562.888.491	73,562,888,491		
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	5  Ada Ada Ada Ada	5	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis Hasil Rekonsiliasi Aset dan keuangan, Berita acara rekonsiliasi dan nerca BMD	Ada	ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 172.074.962.851	0  172,074,962,851	0.00	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan  Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatka n
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Unit Pengaduan 3. Leaflet	8  Ada Ada Ada	8	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
				4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media		4. Webside 5. Papan petunjuk 6. Benner 7. Baliho 8. Spanduk	Ada Ada Ada Ada		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang kepuasan pelanggan dengan hasil 78,86%	Ada	ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA

NAMA SKPD : RSUD DAYAKU RAJA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: KESEHATAN

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh PerangkatDaerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanvak ----- program Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program.	1  12	8.333333333	Lihat Program Nasional RKP 2017 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak -- -- yang terdiri dari:  1. SOP ttg Instalasi Gawat Darurat  2. SOP ttg Intensive Care Unit (ICU)  3. SOP ttg Instalasi Kamar Operasi  4. SPO ttg Unit Rawat Inap Dewasa  5. SPO ttg Unit Rawat Inap Anak  6. SOP ttg Instalasi Laboratorium  7. SPO ttg Instalasi Bank Darah  8. SOP ttg Instalasi Radiologi  9. SOP ttg Instalasi Farmasi  10. SOP ttg Instalasi Kesehatan Lingkungan  11. SOP ttg Instalasi Gizi	576  98  43  71  86  92  75  28  39  34	576	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						12. SOP ttg Pelayanan Rekam 13. SOP ttg Instalasi Laundry	10		
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak ----  PERDA yang seharusnya, sebanyak ---	1  1		Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang ada sebanyak --- Jabatan yang harus ada, sebanyak ---	10 14	71.43	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,	ada	ada	Sumber data BKD/Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak ---- - . personil Total PNS Kabupaten, sebanyak ---- personil	24 14994	0.16	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/ BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak ---- org.  Pejabat yang ada, sebanyak ---- org.	4  10	40.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah	Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak ---- org.	10	71.43	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
					total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Jabatan yang ada, sebanyak ----- jbt.	14		2017.
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari:  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	3  Ada Ada Ada	3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.  Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak -----	9  9	100.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPDP tahun 2016 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.  Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	9  9	100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.  Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	9  9	100.00	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2019.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesarRp, -----	51,541,115,513	1.08	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
					total APBD x 100%	Total Belanja APBD, sebesar Rp----	4,792,728,362,083		(anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp.-----	4,946,042,404 43,130,494,667	11.47	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. ---	4,576,916,715 37,761,667,963	12.12	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. -- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.	4,576,916,715 43,130,494,667	10.61	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	5 Ada Ada Ada Ada Ada	5	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	<b>PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah		Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. KIB (A,B,C,D) dan KIR	Ada	ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun )
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. ---- Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. -----.	0 54,300,796,904	0.00	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
									Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Kotak Saran/ Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Web Site : <a href="http://www.rsudayakuraja.com">http://www.rsudayakuraja.com</a> 5. Baliho	5  Ada Ada Ada Ada Ada	5	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat	Ada	ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018.**

KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA.  
NAMA SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM.  
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PEKERJAAN UMUM.

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6			8	9
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh PerangkatDaerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program.  Jumlah program nasional yang dilaksanakan PerangkatDaerah, sebanyak ----- program	4  8	50	Lihat Program Nasional RKP 2017 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 2 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Bina Marga 2. SOP ttg Sumber Daya Air	2	2	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan PerangkatDaerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak 1, Perda No. 18 tahun 2011, Retrebusi Jasa Usaha. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	1	100%	Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang ada sebanyak 31 Jabatan yang harus ada, sebanyak 33	31.00 33.00	93.94	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi PerangkatDaerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi PerangkatDaerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, tidak ada	-	tidak	Sumber data BKD/ PerangkatDaerah. Mengacu kondisi PerangkatDaerah terakhir/updated Tahun 2017
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak 409. personil Total PNS Kabupaten, sebanyak -- 14.915 personil	398.00 14,494.00	2.75	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017/ BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanvak 17 org. Pejabat yang ada, sebanyak 31 org.	17.00 31.00	54.84	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepegangatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepegangatan dibagi Jumlah total pejabat	Pejabat yang memenuhi kepegangatan, sebanyak 31 org. Jabatan yang ada, sebanyak 33 jbt.	31.00 33.00	93.94	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	3.00 Ada Ada Ada	3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.  Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6	6.00 6.00	100.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPDP tahun 2016 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.  Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 12 program.	6.00 12.00	50.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 12 program.  Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 12 program.	12.00 12.00	100.00	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2016 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2018.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesarRp, ----- Total Belanja APBD, sebesar Rp----	401,687,736,768.99 4,399,322,942,854.37	9.13	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp,-----	376,955,731,557.99 433,418,962,247.23	86.97	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. ---	144,361,833.00 20,686,791,608.00	0.70	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
		Besaran belanja pemeliharaan	16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. -- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.	144,361,833.00 433,418,962,247.23	0.03	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	5.00 Ada Ada Ada Ada	5	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada	ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Peranekat	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. -----.	1,518,704,891,798.16	0.00	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan  Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas /prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman. 2. Websaite DPU. 3. Leaflet 4. Koran Kaltim. 5. ....	ada ada ada ada	4.00	4.00	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Tidak	tidak	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.	

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**KABUPATEN** : KUTAI KARTANEGARA

**NAMA SKPD** : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

**URUSAN YANG DILAKSANAKAN**: Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 1 program  Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	1  3	33.33	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 15 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pembuatan HPS Fisik 2. SOP ttg Pembuatan HPS Pengawasan  3. SOP ttg Pembuatan HPS Perencanaan 4. SOP ttg Draft Penetapan Lahan Kawasan Siap Bangun untuk Rumah Murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 5. SOP ttg Penyusunan Draft Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman 6. SOP ttg Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan 7. SOP ttg Usulan Pembangunan PSU (Sarana Prasarana Utilitas Umum)  8. SOP ttg Pendataan Pemukiman dan Perumahan	Ada 15 SOP	Ada 15 SOP	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
						9. SOP ttg Taksasi Bangunan 10. SOP ttg Sosialisasi Infrastruktur 11. SOP ttg Perencanaan Bangunan Rumah Layak Huni 12. SOP ttg Perencanaan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) 13. SOP ttg Perencanaan Pembangunan Sanitasi Pemukiman 14. SOP ttg Penyusunan Pembangunan Infrastruktur 15. Penyusunan Pelaporan Progres			
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak -----  PERDA yang seharusnya, sebanyak ---	1  1		Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang ada sebanyak 20  Jabatan yang harus ada, sebanyak 20	19  20	95.00	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----	0	tidak	Sumber data BKD/Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak 242 personil  Total PNS Kabupaten, sebanyak 14494 personil	242  14494	1.67	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 16 org.	16	80.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
				kepemimpinan	dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang ada, sebanyak 20 org.	20		2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi persyaratan, sebanyak 20 org. Jabatan yang ada, sebanyak 20 jbt.	20 20	100.00	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	3  Ada Ada Ada	3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 9 program.  Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 9	9  9	100.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program.  Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program.	9  9	100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
2	3	4	5	6	7	8	9		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program.	9 9	100.00	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2018.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp. 84.912.353.133,29 Total Belanja APBD, sebesar Rp. 4.399.322.942.854,37	8.491E+10 4.399E+12	1.93	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
Besaran belanja modal		14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 13.674.190.718,83 Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 78.481.302.535,31	1.367E+10 7.848E+10	17.42	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018	
Besaran belanja pemeliharaan		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.428.198.050,00 Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 45.543.208.612,48	2.428E+09 4.554E+10	5.33	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.	
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.428.198.050,00 Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 78.481.302.535,31	2.428E+09 7.848E+10	3.09	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.	
Laporan keuangan Perangkat Daerah		17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	5 Ada Ada Ada	5	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)	

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
						4. LO 5. LPE	Ada Ada		
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah		Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. (Rekon Aset)	Ada	ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 1.353.684.571.422,75		tdi	Pembilang :  1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan  Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya  1. Papan Pengumuman 2. Website 3. .... 4. .... 5. ....	2	2	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	tidak	tidak	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

NAMA SKPD : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: **KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak --- program  Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak --- program.	1  2	50	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ---- yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pengajuan rekomendasi bantuan/santunan pasca bencana 2. SOP ttg Pelaksanaan sosialisasi kebencanaan 3. SOP ttg Penyerahaan bantuan berdasarkan status bencana darurat 4. SOP ttg Penanganan Bencana (Banjir, Laongsor, Angin Putting Beliung Dll) 5. SOP ttg Pelaksanaan penanggulangan kebakaran	5  Ada  Ada  Ada  Ada	5	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak ----  PERDA yang seharusnya, sebanyak ----	1  1	1	Perda No. 10 Tahun 2017  Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah	Jabatan yang ada sebanyak ---	17	100.00	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
	DAERAH			eselonering yang terisi	jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang harus ada, sebanyak -----	17		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----	0	tidak	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak ----- personil Total PNS Kabupaten, sebanyak ----- personil	100 14494	0.69	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/ BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak ----- org. Pejabat yang ada, sebanyak ----- org.	15 17	88.24	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ----- org. Jabatan yang ada, sebanyak ----- jbt.	17 17	100.00	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari:	3 Ada Ada Ada	3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	10	90.91	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPDP tahun 2018 dan Renja-

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7			8	9
					Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak ----	11			Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ---- program.  Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ---- program.	10  10		100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ---- program.  Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ---- program.	10  10		100.00	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2018.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesarRp, ----  Total Belanja APBD, sebesar Rp----	20175840792  4.39932E+12	20,175,840,792.00  4,399,322,942,854.37	0.46	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----  Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp.----	4186030800  22459800871	4,186,030,800.00  22,459,800,871.00	18.64	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. ---	1022774397 9119894710	1,022,774,397.00 9,119,894,710.00	11.21	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. -- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.	1022774397 22459800871	1,022,774,397.00 22,459,800,871.00	4.55	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ---- jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	5 Ada Ada Ada Ada Ada		5	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7			8	9
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	ada	Berita acara rekonsiliasi data barang milik daerah dan keuangan tahun 2018	ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. -----  Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. -----.	0  68433677325	0  68,433,677,324.98	0.00	Pembilang :  1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset)
										2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan  Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya  1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Mobil Dapur Umum 6. Mobil Ambulance 7. Website	7  Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada		7	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Ada	Survey Indek Kepuasan Masyarakat Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kutai Kartanegara	ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.



**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA

NAMA SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYA

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh PerangkatDaerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanvak ... progeram Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak .... program.	0  2	0	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak --- -- yang terdiri dari:  SOP Patroli Pengawasan, SOP Pengamanan Pada Acara Penting Daerah dan Nasional, SOP Pencegahan Dini, SOP Pelaksanaan Pengamanan Dengan Sepeda Motor, SOP Pelaksanaan Pengamanan Dengan Roda 4, SOP Pelaksanaan Penertiban, SOP Pengamanan Rumah Dinas Jabatan, SOPPenjagaan Gedung dan Aset Daerah, SOP Pengamanan Tempat-Tempat Penting,.  SOP Pembentukan Regu-Regu Kesiapsiagaan Dini,Pengumpulan Data Linmas, SOP Penugasan Anggota Linmas, SOP Pemantauan Wilayah Bencana, SOP Penanggulangan Bencana, SOP Penyelamatan Korban Bencana	17  9          6	17	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						SOP Penanganan/ Penindakan Preventif Non Yustisi dan Yustisi, SOP Penindakan Yustisi	2		
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda (Perda No. 05 Th. 2013 ttg Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat)  PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda (Perda No. 05 Th. 2013 ttg Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat)	1  1		Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang ada sebanyak 17 Jabatan yang harus ada, sebanyak .....	17  17	100.00	Sumber data BKD/ DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----		tidak	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak 169 personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 14494 personil	169  14494	1.17	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/ BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanvak 13 org. Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.	13  17	76.47	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ----- org. Jabatan yang ada, sebanyak ----- jbt.	15  17	88.24	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari: - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	3  Ada Ada Ada	3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak ----- program. Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak ----- program.	3 3	100.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPDP tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program. Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak -----	3 3	100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	3 3	100.00	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2016 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2018.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesarRp, ----- Total Belanja APBD, sebesar Rp----	2.09008E+12 4.39932E+14	0.48	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp.-----	0 20,013,952,100	0.00	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. ---	234,527,280 6,948,296,026	3.38	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. -- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.	234,527,280 20,013,952,100	1.17	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	5 Ada Ada Ada Ada	5	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. (Berita Acara Rekonsiliasi BMD)	Ada	ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun )
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. ---- Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 208025742210	0  2.08026E+11	0.00	Pembilang :  1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya  1 Papan Pengumuman 2 Pos Pengaduan 3 Mobil Ambulance 4 Call Center (0541 6669018) 5 Media Sosial (Facebook, Twitter, Instagram, Email dan Whatsapp)	5	5	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	tidak	tidak	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA

NAMA SKPD : Dinas Sosial

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Urusan Sosial

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak ----- program  Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program.	5  5	100	Lihat Program Nasional RKP 2017 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak -- -- yang terdiri dari: 1. SOP ttg ----- 2. SOP ttg ----- 3. SOP ttg ----- 4. Dst -----	16	16	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak -----  PERDA yang seharusnya, sebanyak -- --	2		Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang ada sebanyak --- Jabatan yang harus ada, sebanyak -- --	20 24	83.33	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----	1	ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak ---- - personil Total PNS Kabupaten, sebanyak ----- personil	75  14494	0.52	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017/ BKD.
7			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada $\times 100\%$	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanvak ----- org. Pejabat yang ada, sebanyak ---- org.	15  20	75.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.	
8			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada $\times 100\%$	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ----- org. Jabatan yang ada, sebanyak ----- jbt.	20  20	100.00	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.	
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak ---- jenis, yg terdiri dari:  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	3  Ada Ada Ada	3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
			10	Jumlah Program RKPJ yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPJ yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD $\times 100\%$	Jumlah Program RKPJ yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.  Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak -----	10  10	100.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPJ tahun 2016 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
			11	Jumlah Program RENJA RKPJ yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPJ yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah	Jumlah Program RENJA RKPJ yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ---- program.	10	100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
					Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	10		Daerah tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program. Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	10 10	100.00	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2016 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2017.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesarRp, ----- Total Belanja APBD, sebesar Rp----	1.805E+10 4.399E+12	0.41	Sumber data dari APBD tahun 2017 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp.-----	26852125 1.596E+10	0.17	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. ---	205987685 1.043E+10	1.98	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. -- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.	205987685 1.596E+10	1.29	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO	5 Ada Ada Ada Ada	5	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
						5. LPE	Ada		
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah		Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada	ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. ---- Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. -----.	0 3.313E+10	0.00	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan  Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....	4	4	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Ada	ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.



**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA

NAMA SKPD : DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Urusan Wajib Ketenagakerjaan

2. Urusan Pilihan Ketransmigrasian

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
							URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 1	URUSAN 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND ) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 3 (tiga) program	3	1	100	100	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing- masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 11 yang terdiri dari:  Pelayanan Pembuatan Kartu Pencari Kerja ( AK.1 )  Pelayanan Perpanjangan IMTA  Perizinan Dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja  Pencatatan SP/SB  Pengesahaan Peraturan Perusahaan  Proses PHI  Pendaftaran PKB	9  1  1  1  1  1  1	2	9	2	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
							URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 1	URUSAN 2	
						Pengesahaan Wajib Laport Ketenagakerjaan. Pelayanan Penerbitan AK/1 Secara manual Tindak lanjut kegiatan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi Program penjaringan siswa berprestasi daerah transmigrasi	1 1	1 1			tugas dan fungsinya.
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak 6  PERDA yang seharusnya, sebanyak 6	5	1			Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang terisi sebanyak 18 orang  Jabatan yang ada, sebanyak 18 orang	10  10	8  8	100.00	100.00	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	1. Bidang Pembinaan Penempatan TK dan Perluasan Kesempatan Kerja  Jabatan Fungsional Penghantar Kerja sebanyak 3 orang  2. Bidang Pembinaan Hubungan	6  3	0	ada	tidak	Sumber data BKD/Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
							URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 1	URUSAN 2	
						Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial sebanyak 3 orang	3				
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah yang menangani , sebanyak 92 Total PNS Kabupaten, sebanyak 14.494 personil	64	28	0.44	0.19	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/ BKD.
							14,494	14,494			
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 18 org.  Pejabat yang ada, sebanyak 18 org.	10	8	100.00	100.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
								10			
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 18 org. Jabatan yang ada, sebanyak 18 jbt.	10	8	100.00	100.00	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
							10	8			

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
							URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 1	URUSAN 2	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tahun 2018 ada, yaitu sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	3  1 1 1	3  1 1 1	3	3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.  Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6	5	1  1	ah tolong c	100.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPDP tahun 2016 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.  Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.	5  5	1  1	100.00	100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
							URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 1	URUSAN 2	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.  Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.	5  5	1  1	100.00  100.00	100.00  100.00	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2016 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2018.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp. 11.380.865.174,80  Total Belanja APBD, sebesar Rp. 4.399.322.942.854,37	11,030,865,174.80  4,399,322,942,854.37	350,000,000.00  4,399,322,942,854.37	0.25  0.01	0.01  0.01	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0  Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 10.488.098.954,00	-  524,049,477.00	-  524,049,477.00	0.00  0.00	0.00  0.00	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan perangkat daerah, sebesar Rp. 80.657.475,00  Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.159.746.138,00	40,328,737.50  1,079,873,069.00	40,328,737.50  1,079,873,069.00	3.73  3.73	3.73  3.73	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
							URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 1	URUSAN 2	
		Besaran belanja pemeliharaan	16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 80.657.475,00  Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 10.488.098.954,00	40,328,737.50  5,279,583,886.00	40,328,737.50  5,279,583,886.00	0.76  0.76	0.76  0.76	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb:  1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	5  1 1 1 1 1	5  1 1 1 1 1	5  5 5 5 5	5  5 5 5 5	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Rekonsiliasi Keuangan dan BMD tahun 2018	1	1	0.00	tdi	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 1.806.850.450  Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 26,214,967,497,78	1,806,850,450.00  ##### #####	-  13,107,483,748.89	13.78	0.00	Pembilang :  1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
							URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 1	URUSAN 2	
											2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Oprasional 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Oprasional 5. Pengumuman di Mass Media	5	5	5	5	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang kecepatan pelayanan dan kedisiplinan petugas pelayanan	1	1	tdi	tdi	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA

NAMA SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh PerangkatDaerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak ----- program  Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program.	3  3	100	Lihat Program Nasional RKP 2010 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak --- -- yang terdiri dari:  1. SOP ttg Pengaduan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan  2. SOP ttg Prosedur Pemenuhan Hak Anak dalam pemulihan korban kekerasan terhadap anak  3. SOP Pelayanan penanganan pengaduan secara tidak langsung  4. SOP Bidang Pemenuhan Hak Anak	4  1  1  1  1	4	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan PerangkatDaerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak -----  PERDA yang seharusnya, sebanyak -- --	1  1		Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada	Jabatan yang ada sebanyak --- Jabatan yang harus ada, sebanyak --- --	17  18	94.44	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah



1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, :  1. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1	ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak ---- . personil Total PNS Kabupaten, sebanyak ---- personil	62  14,494	0.43	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/ BKD.
7			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanvak ---- org. Pejabat yang ada, sebanyak ---- org.	11  17	64.71	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018	
8			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ---- org. Jabatan yang ada, sebanyak ---- jbt.	16  17	94.12	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018	
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak ---- jenis, yg terdiri dari:  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	3  Ada Ada Ada	3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENIA Perangkat	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	11	100.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPDP tahun 2016 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
					Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak -----	11		
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program. Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	9 9	100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program. Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	9 9	100.00	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2016 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2018.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp, ----- Total Belanja APBD, sebesar Rp----	9,036,043,560.67 4,399,322,942,354.36	0.21	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp.-----	54,093,000 8,568,511,768	0.63	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. ---	31,460,000 2,596,911,916	1.21	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
		Besaran belanja pemeliharaan	16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. -- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.	31,460,000 8,568,511,768	0.37	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
2	3	4	5	6	7	8	9		
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	5  Ada Ada Ada Ada Ada	5	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada	ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. ---- Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. -----.	0  6,049,707,166	0.00	Pembilang :  1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset)  2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan  Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya  1. Papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Pusat Pengaduan P2TP2A 4. Mobil Keliling	4  Ada Ada Ada Ada	4	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----  Indeks partisipasi masyarakat	Tidak	Tidak	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA

NAMA SKPD : DINAS KETAHANAN PANGAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: URUSAN WAJIB

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh PerangkatDaerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 1 (satu) program	1	100	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak -- -- yang terdiri dari: 1. SOP Analisis Pola Pangan Harapan 2. SOP Penentuan kelompok penerima manfaat pengembangan model Kawasan Rumah Pangan Lestari 3. SOP Survey PPH dan AKG 4.SOP Promosi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 5. SOP Pengembangan Pangan Lokal 6. SOP Pendampingan Kelembagaan Keamanan Pangan 7. SOP kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan 8. SOP Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	20	20	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						9. SOP Analisis Keamanan Pangan Masyarakat 10. SOP Fasilitas Sertifikat dan Pelabelan Prima 11. SOP Uji Test Kit Keamanan Pangan 12. SOP Ketersediaan Pangan 13. SOP Sumber Daya Pangan 14. SOP Pemantauan dan Penangan Daerah Rawan Pangan 15. SOP Penumbuhan Toko Tani Indonesia 16. SOP Pemantauan Pola Distribusi Pangan 17. SOP Penumbuhan Lembaga Distribusi Pangan 18. SOP Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan 19. SOP Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Harga Pangan 20. SOP Pengembangan Lumbung Masyarakat	1 1		
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak 1 (satu) perda  PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 (satu) perda	1  1		Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang ada sebanyak 16 jabatan Jabatan yang harus ada, sebanyak 21 Jabatan	16  21	76.19	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, Tidak Ada	0	tidak	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak 53. personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 14.494 personil	53 14494	0.37	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/ BKD.
7			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklat/pim sesuai penjurangan, sebanyak 16 org. Pejabat yang ada, sebanyak 16 org.	16 16	100.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.	
8			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16 org. Jabatan yang ada, sebanyak 16 jbt.	16 16	100.00	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	3  Ada Ada Ada	3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 8 program.  Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8	8 8	100.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program.	4 4	100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program.	4 4	100.00	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2016 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2018.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp 1.274.400.593,00 Total Belanja APBD, sebesar Rp 4.399.322.942.854,37	1274400593 4.39932E+12	0.03	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp 0 Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp 1.274.400.593,00	0 1274400593	0.00	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp 34.928.000.00 Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp 1.170.100.093.00	34928000 1170100093	2.99	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp 34.928.000.00 Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp 1.274.400.593,00	34928000 1274400593	2.74	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	5  Ada Ada Ada Ada Ada	5	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah		Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. Berita Acara, Rekonsiliasi BMD dan Keuangan, Kertas Kerja Rekonsiliasi Asset dan Belanja Modal.	Ada	ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp 0 Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp 8.793.657.175,04	0  8793657175	0.00	Pembilang :  1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset)  2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan  Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di Mass Media	2	2	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan.	Ada	ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA

NAMA SKPD : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Urusan Pertanahan
2. Urusan Penataan Ruang

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (satu) urusan

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
							Pertanahan	Penataan Ruang	Pertanahan	Penataan Ruang	
1	2	3	4	5	6	7		8		9	
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh PerangkatDaerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanvak 0 proeram Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program. <b><i>(Tidak ada program Nasional yang dilaksanakan)</i></b>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	tdi	tdi	Lihat Program Nasional RKP 2017 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada	<b>23 SOP</b> yang terdiri dari : 1. Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (Luas 0 sd 2 Ha) 2. Pencatatan Ulang SKPT yang beralih Penguasaannya (Luas 0 sd 2 Ha) 3. Pencatatan Ulang SKPT untuk keperluan pihak kedua (Pemerintah OPD/SKPD,BUMN dan BUMD) 4. Rekomendasi SKPT Luas Batas Maksimum 5. Penerbitan Surat Rekomendasi penguasaan tanah dan bangunan dalam rangka peningkatan hak atas tanah 6. Pembinaan dan pengendalian administrasi penguasaan tanah atas tanah negara 7. survey Pendahuluan 8. Pertimbangan teknis pertanahan untuk izin lokasi/pertek	19.00	4.00	19	4	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
							Pertanahan	Penataan Ruang	Pertanahan	Penataan Ruang	
						9. Persetujuan penggunaan tanah/PPT	1	-	100%		
						10. Penetapan Lokasi	1	-	100%		
						11. Rekomendasi pengajuan Hak (HGU/HGB/Hak Pakai)	1	-	100%		
						12. Fasilitas Sertifikasi Tanah Aset Pemda	1	-	100%		
						13. Fasilitas Sertifikasi Tanah Masyarakat/Pertanian	1	-	100%		
						14. Klarifikasi Lahan		-			
						15. Peta dan Telaahan Pertimbangan teknis izin lokasi dan persetujuan penggunaan lahan	1	-	100%		
						16. Pengkajian dan penanganan sengketa pertanahan	1	-	100%		
						17. Penyampaian pengaduan masyarakat	1	-	100%		
						18. Telaah dan analisis penyampaian pengaduan masyarakat	1	-	100%		
						19. Pengumpulan data fisik dan yuridis	1	-	100%		
						20. Survey Lapangan	-	1		100%	
						21. Penerbitan Surat Rekomendasi teknis untuk izin pemanfaatan ruang	-	1		100%	
						22. Pengenaan Sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang	-	1		100%	
						23. Pelaksanaan sosialisasi penataan ruang	-	1		100%	
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda (RTRW)  PERDA yang seharusnya, sebanyak 2	-  -	1  2			Normalisasi

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
							Pertanahan	Penataan Ruang	Pertanahan	Penataan Ruang	
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang ada sebanyak <b>18</b> Jabatan Jabatan yang harus ada, sebanyak <b>21</b> Jabatan	14 17	4 4	82.35	100.00	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	1 Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	tidak	tidak	Sumber data BKD/Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak <b>78</b> personil Total PNS Kabupaten, sebanyak <b>14494</b> personil	63 14494	15 14494	0.43	0.10	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017/ BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanvak <b>12</b> org. Pejabat yang ada, sebanyak <b>18</b> org.	9 14	3 4	64.29	75.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak <b>18</b> org. Jabatan yang ada, sebanyak <b>18</b> jbt.	14 14	4 4	100.00	100.00	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut iumlahnya - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak <b>3</b> jenis, yg terdiri dari: - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	3	3	3	3	Sumber data BAPPEDA/Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak <b>7</b> program.  Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak <b>7</b>	6 6	1 1	100.00	100.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
							Pertanahan	Penataan Ruang	Pertanahan	Penataan Ruang	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.  Jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.	6  6	1  1	100.00	100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.  Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.	6  6	1  1	100.00	100.00	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2016 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2017.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar <b>Rp.15.653.177.782,00</b>  Total Belanja APBD, sebesar Rp <b>4.399.322.942.854.37</b>	13,892,673,693.16  4,399,322,942,854.37	1,760,504,088.84  4,399,322,942,854.37	0.32	0.04	Sumber data dari APBD tahun 2017 terakhir. (anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. <b>28.425.000,00</b>  Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp. <b>3.474.828.048,00</b>	28,425,000.00  3,474,828,048.00		0.82	tdi	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp.0 Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0	-  3,474,828,048.00	-  3,474,828,048.00	0.00	0.00	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. -- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.	-  3,474,828,048.00	-  3,474,828,048.00	0.00	0.00	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb:  1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	5	5	5	5	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
							Pertanahan	Penataan Ruang	Pertanahan	Penataan Ruang	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset Perangkat Daerah		Keberadaan inventarisasi barang atau aset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset Perangkat Daerah	<i>ada inventarisasi barang 2018</i>	ada	ada	ada	ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 0 ( <i>Tidak ada aset yang tidak dikuasai</i> )	Tidak ada	Tidak Ada			Pembilang : 1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	2 1 1 - -	4 1 1 1 1	2	4	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ( <i>ada, survey tentang Pelayanan Administrasi Pertanahn</i> )	ada	Tidak Ada	ada	alah tolong ce	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA

NAMA SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Lingkungan Hidup

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh PerangkatDaerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak -..... program.  Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak ----- program	6  11	54.54545455	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak --- yang terdiri dari:  1. SOP ttg Kegiatan Bidang PDLKE  2. SOP ttg Kegiatan Bidang Pengendalian LH  3. SOP ttg Kegiatan Bidang Penegakan dan Advokasi Hukum Lingkungan  4. SOP ttg Kegiatan Bidang Konservasi LH	16  5  3  5  3	16	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan PerangkatDaerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak -----  PERDA yang seharusnya, sebanyak - ----	1  1		Normalisasi



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang ada sebanyak --- Jabatan yang harus ada, sebanyak -- ---	21 23	91.30	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----	10	ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak --- --. personil Total PNS Kabupaten, sebanyak ---- personil	91 14494	0.63	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/ BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanvak ----- org. Pejabat yang ada, sebanyak ---- org.	12 21	57.14	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ----- org. Jabatan yang ada, sebanyak ---- jbt.	12 21	57.14	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak ---- jenis, yg terdiri dari:  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	3  Ada Ada Ada	3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.  Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak -----	9 9	100.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.  Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	9  9	100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2017 dan Renja- Perangkat Daerah ybs
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak --- -- program.  Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	9  9	100.00	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2016 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2017.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesarRp, ----- Total Belanja APBD, sebesar Rp----	16,582,964,925.27  4,399,322,942,854.37	0.38	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
Besaran belanja modal		14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. -----  Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp.-----	816,182,749.00  7,923,158,764.00	10.30	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.	
Besaran belanja pemeliharaan		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. ---	79,942,000.00  6,588,687,417.00	1.21	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.	
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. -- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.	79,942,000.00  16,582,964,925.27	0.48	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir	
Laporan keuangan Perangkat Daerah		17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb:  1. LRA 2. LO 3. Neraca 4. LPE	5  Ada Ada Ada Ada	5	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						5. CALK	Ada		
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah		Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	ada	ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. ---- Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. -----.	617,431,271.00  18,441,103,719.95	3.35	Pembilang :  1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan  Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Banner 2. Pos Pengaduan 3. Pengumuman media massa (koran) 4. Papan pengumuman 5. Mobil Laboratorium Lingkungan	5  1 1 1 1 1	5	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Tidak	tidak	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA

NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh PerangkatDaerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 2 program	2  2	100	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 18 yang terdiri dari: 1. SOP Penyusunan Laporan Pendaftaran Penduduk 2. SOP Pelayanan Pindah Penduduk Antar Kabupaten/ Kota dan Provinsi 3. SOP Pelayanan Pindah Datang Penduduk Antar Kabupaten/ Kota dan Provinsi 4. SOP Penerbitan KTP-el 5. SOP Pelayanan Akta Kelahiran, Pengangkatan dan Pengesahan Anak 6. SOP Pelayanan Akta Perkawinan, Perceraian dan Kematian 7. SOP Penyusunan Laporan Pencatatan Sipil 8. SOP Permohonan Informasi Publikasi Berdasarkan Permintaan	18  1  1  1  1  1  1	18	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						9. SOP Penyajian dan Desiminasi Administrasi Kependudukan 10. SOP Penyajian Data Statistik Kependudukan 11. SOP Perbaikan dan Pemeliharaan Perangkat IT 12. SOP Perlindungan Database Biodata Penduduk 13. SOP Pemutakhiran Database Kependudukan 14. SOP Penyusunan Profil Kependudukan 15. SOP Penyusunan Proyeksi Kependudukan 16. SOP Penyusunan Rancangan Peraturan dan Kebijakan Kependudukan 17. SOP Rapat Koordinasi Penyerasian Kebijakan Kependudukan 18. SOP Sosialisasi Penyerasian Kebijakan Kependudukan	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak 2  PERDA yang seharusnya, sebanyak 2	2  2	100.00	Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang ada sebanyak 17  Jabatan yang harus ada, sebanyak 21	17  21	80.95	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----	0	tidak	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak - 87. personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 14.494 personil	88 14,494	0.61	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/ BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanvak 14 org. Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.	14 17	82.35	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 org. Jabatan yang ada, sebanyak 17 jbt.	17 17	100.00	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	3  Ada Ada Ada	3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.  Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 program.	6 6	100.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.	6 6	100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.	6 6	100.00	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2016 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2018.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp. .... Total Belanja APBD, sebesar Rp. ....	17,794,133,670.55 4,399,322,942,854.37	0.40	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
Besaran belanja modal		14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. .... Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp. ....	2,409,164,250.00 15,796,820,515.00	15.25	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018	
Besaran belanja pemeliharaan		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. .... Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. ....	104,489,600.00 5,153,168,402.00	2.03	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.	
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. .... Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp. ....	104,489,600.00 15,796,820,515.00	0.66	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	5  Ada Ada Ada Ada Ada	5	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - Berita Acara Rekonsiliasi - Kertas Kerja Rekonsiliasi - Kartu Inventaris Barang (KIB) B	Ada	ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 27.805.724.409,00	-  27,805,724,409.00	0.00	Pembilang :  1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan  Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas /prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya  1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	5  Ada Ada Ada Ada Ada	5	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Ada	ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**KABUPATEN** : KUTAI KARTANEGARA

**NAMA SKPD** : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

**URUSAN YANG DILAKSANAKAN**: PEMBERDAYAAN MASY. DAN DESA

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.  Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 2 program	2  2	100	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 5 yang terdiri dari: 1. SOP tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.SOP tentang Tata cara Pemilihan dan pelantikan BPD 3. SOP tentang fasilitasi pembinaan dan penguatan Pokjnal Posyandu Kab/Kec 4. SOP tentang pelatihan, monitoring dan evaluasi kegiatan PKK Ke, Kel/Desa 5. Sop tentang fasilitasi pembinaan dan penguatan posyandu  Dst	25  1  1  1  1  20	25	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak 8  PERDA yang seharusnya, sebanyak 8	8  8		Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang ada sebanyak 17 Jabatan yang harus ada, sebanyak 21	17 21	80.95	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, Jabatan Fungsional Tertentu Pengelolaan Barang dan jasa, Arsiparis dan Pengurus Barang	2	ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017
4	<b>PENGLOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak 108 personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 14.494 personil	108  14,494	0.75	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/ BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanvak 16 org. Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.	17 17	100.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 org. Jabatan yang ada, sebanyak 21 jbt.	17 21	80.95	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah  - RENSTRA PD - RENJA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:  - RENSTRA PD - RENJA PD	3  Ada Ada	3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
				- RKA PD		- RKA PD	Ada		
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 15 program.  Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 15	15  15	100.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.  Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.	7  7	100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.  Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.	7  7	100.00	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2016 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2018
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesarRp, 16.971.680.959,-  Total Belanja APBD, sebesar Rp. 4.399.322.942.854,-	16,971,680,959  4,399,322,942,854	0.39	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0,-  Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp 13.137.138.042,-	-  13,137,138,042	0.00	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 9.800.000.-	9,800,000	0.37	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan			x 100%	Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.618.836.413,-	2,618,836,413		terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 9.800.000,- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 13.137.138.042,-	9,800,000 13,137,138,042	0.07	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	5 Ada Ada Ada Ada	5	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah		Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. Dokumen Sensus Milik daerah	Ada	ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 7.304.232.624,-	0 7,304,232,624	0.00	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan  Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya	3	3	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	PARTISIPASI MASYARAKAT	masyarakat		1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media		1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Website 4. .... 5. ....	1 1 1		informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	tidak	tidak	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**KABUPATEN** : KUTAI KARTANEGARA

**NAMA SKPD** : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**URUSAN YANG DILAKSANAKAN** : Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh PerangkatDaerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 2 program  Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program.	2  4	50	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 11 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Keluarga Berencana 2. SOP ttg Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 3. SOP ttg Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Pergerakan	11  3 4 4	11	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan PerangkatDaerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak 1 (satu)  PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 (satu)	1  1		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang ada sebanyak 16 Jabatan yang harus ada, sebanyak 16	14 16	87.50	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada, Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Pergerakan / Jabatan Penyuluh Lapangan	Ada	ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak 67 personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 14.915 personil	67 14,915	0.45	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/ BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 14 org. Pejabat yang ada, sebanyak 16 org.	14 16	87.50	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16 org. Jabatan yang ada, sebanyak 16 jbt.	16 16	100.00	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari:  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	4  Ada Ada Ada	4	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan



ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			- DPA PD		- DPA PD	Ada		
	Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8	7 8	87.50	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPDP tahun 2016 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
	Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program.	7 8	87.50	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program.	7 8	87.50	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2016 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2018.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>							
	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp. 8.748.696.895.00- Total Belanja APBD, sebesar Rp.	8,748,696,895.00	tdi	Sumber data dari APBD tahun 2017 terakhir. (anggaran)
	Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2,115,343,850.00 Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 8,748,696,895.00	2,115,343,850.00 8,748,696,895.00	24.18	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 303,000,000.00  Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 4,954,840,106.00	303,000,000.00  4,954,840,106.00	6.12	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 303,000,000.00  Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 8,748,696,895.00	303,000,000.00  8,748,696,895.00	3.46	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
			Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	5  Ada Ada Ada Ada Ada	5
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah		Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada	Ada	ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.	-	0.00	Pembilang :

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
				Daerah	Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp.	10,655,363,587.00		1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset)  2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan  Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling  5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media 6. Piagam Penghargaan	5 Ada Ada Ada Ada Tidak	5	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak	Tidak	tidak	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA

NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Perhubungan

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh PerangkatDaerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak ... program Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ... program.	6  6	100	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 23 yang terdiri dari: 1. SOP ttg. Rekomendasi ijin pemakaian jalan selain untuk kepentingan lalu lintas 2. SOP ttg. Penerbitan kartu Pegawai ijin usaha 3. SOP ttg. Ijin Sekolah Mengemudi 4. SOP ttg. Surat Keterangan Perubahan Sifat Kendaraan Bermotor 5. SOP ttg Penyuluhan / Sosialisasi 6. SOP ttg. Penyetoran Dan Permintaan Karcis Retribusi Parkir 7. SOP ttg. Pengelolaan parkir 8. SOP ttg. Surat Ijin pemungutan parkir di tepi jalan umum ,khusus dan pemungutan fasilitas parkir	23  1 1 1 1 1 1 1	23	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						9. SOP ttg. Penerbitan Surat keterangan pengoperasian kapal penveberangan sungai	1		
						10. SOP ttg. Surat registrasi kapal < 7 GT	1		
						11. SOP ttg. Rekomendasi ijin dermaga bongkar muat (TUKS)	1		
						12. SOP ttg. Persetujuan pengelolaan (TUKS)	1		
						13. SOP ttg. Rekomendasi ijin pembangunan dermaga penveberangan	1		
						14. SOP ttg. Rekomendasi ijin industri galangan kapal	1		
						15. SOP ttg. Rekomendasi ijin logpon	1		
						16. SOP ttg. Rekomendasi ijin dermaga bongkar muat BBM	1		
						17. SOP ttg. Layanan pengujian kendaraan bermotor	1		
						18. SOP ttg. Surat Keterangan Kecakapan Nautika Kapal Sungai dan Danau.	1		
						19. SOP ttg. Penerbitan Kartu Pengawasan.	1		
						20. SOP ttg. Pengawasan dan Perawatan Traffic Light.	1		
						21. SOP ttg. Pemindahan Kendaraan (Derek) untuk Ketingan Sendiri.	1		
						22. SOP ttg. Pemindahan Kendaraan Derek.	1		
						23. SOP ttg. Pengendalian dan Pengawasan Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada hari-hari Biasa	1		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak ....  PERDA yang seharusnya, sebanyak ...	2  2		Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang ada sebanyak ... Jabatan yang harus ada, sebanyak ...	21  23	91.30	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, 0	0	tidak	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak ... personil Total PNS Kabupaten, sebanyak... personil	138  14,494	0.95	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/ BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanvak ... org. Pejabat yang ada, sebanyak ... org.	14  21	66.67	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ... org. Jabatan yang ada, sebanyak ... jbt.	21  23	91.30	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah  - RENSTRA PD - RENJA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:  - RENSTRA PD - RENJA PD	3  1  1	3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
				- RKA PD		- RKA PD	1		
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak ... program.  Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak ...	10  10	100.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPDP tahun 2016 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ... program.  Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ... program.	7  7	100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ... program.  Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ... program.	7  7	100.00	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2016 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2018.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesarRp, Total Belanja APBD, sebesar Rp----	27,431,648,764.37  4,399,322,942,854.37	0.62	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp.  Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp	6,538,352,950.00  26,398,896,409.00	24.77	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
			15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp.	614,571,440.00  7,824,942,099.00	7.85	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.	614,571,440.00 26,398,896,409.00	2.33	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	5 1 1 1 1	5	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	<b>PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah	0	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	tidak	tidak	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.--- Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp.700.043.840.689,94	0 700,043,840,689.94	0.00	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan  Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Mobil Keliling	5 1 1	5	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
				3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media		3. Pos Pengaduan (SMS No. 0811 596 600) 4. Kotak Saran dan Pengaduan 5. <a href="http://dishubkutaikartanegara.go.id">http://dishubkutaikartanegara.go.id</a>	1 1 1		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	tidak	tidak	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**KABUPATEN** : KUTAI KARTANEGARA

**NAMA SKPD** : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**URUSAN YANG DILAKSANAKAN:**

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

2. Urusan Statistik

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (satu) urusan

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
							URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 1	URUSAN 2	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh PerangkatDaerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanvak ----- program Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program.	2	1	100	100	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak --- yang terdiri dari:  1. SOP Perubahan Email Penyedia 2. SOP Perubahan Password dan Pemberian Informasi User ID Auditor 3. SOP Perubahan Password dan Pemberian Informasi User ID PPK 4. dll (terlampir)	48	0	48	0	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan PerangkatDaerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Dokumen  PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Dokumen	1				Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang ada sebanyak ---	20	4	95.24	100.00	Sumber data BKD/DUK
						Jabatan yang harus ada, sebanyak ---	21	4		Perangkat Daerah	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
							URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 1	URUSAN 2	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak --- - personil Total PNS Kabupaten, sebanyak ---- personil	77 14494	9 14494	0.53	0.06	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017/ BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjurangan, sebanvak ---- org. Pejabat yang ada, sebanyak ---- org.	18 20	4 4	90.00	100.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ---- org. Jabatan yang ada, sebanyak ---- jbt.	20 20	4 4	100.00	100.00	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak ---- jenis, yg terdiri dari:  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	3 1 1 1	3 1 1 1	3	3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
			10	Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPDP	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.  Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak -----	5 10	1 1	50.00	100.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPDP tahun 2016 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
			11	Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ---- program.  Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ---- program.	4 4	1 1	100.00	100.00

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
							URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 1	URUSAN 2	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak --- -- program.  Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	4  4	1  1	100.00  100.00		Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2016 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2017.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesarRp. ----- Total Belanja APBD, sebesar Rp----	18,598,071,958.25 4,399,322,942,853.37	1 1	0.42 100.00	100.00	Sumber data dari APBD tahun 2017 terakhir. (anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. -----	609,733,684.00	1	3.94	100.00	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017
						Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp.-----	15,474,501,896.00	1			
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. -	330,208,834.00	1	4.87	100.00	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
						Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. ---	6,776,314,667.00	1			
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	5	5	5	5	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
1	1						1	1	1		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada	Ada	ada	ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. ----	-	0	0.00	0.00	Pembilang :

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
							URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 1	URUSAN 2	
				Daerah	Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. -----.	263,460,353,799.50	1			1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan  Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya  1. Papan Pengumuman 2. Mobil Keliling 3. Pengumuman di Media Massa	3  ada ada ada	0	3	0	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	tidak	tidak	tidak	tidak	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**KABUPATEN :** KUTAI KARTANEGARA  
**NAMA SKPD :** Dinas Koperasi dan UKM  
**URUSAN YANG DILAKSANAKAN:** KOPERASI dan UKM

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanvak ----- program Jumlah program Nasional (RKP), sebanvak ----- program.	3  3	100	Lihat Program Nasional RKP 2017 untuk masing-masing urusan, terlampir
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak -- -- yang terdiri dari: 1. SOP ttg ----- 2. SOP ttg ----- 3. SOP ttg ----- 4. Dst -----	29  16 9 4	29	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanvak -----  PERDA yang seharusnya, sebanvak -- ---	1  1		Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang ada sebanvak --- Jabatan yang harus ada, sebanvak --- --	16  16	100.00	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----	0	tidak	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak ---- - personil Total PNS Kabupaten, sebanyak ----- personil	83  14494	0.57	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017/ BKD.	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanvak ----- org. Pejabat yang ada, sebanyak ---- org.	10  12	83.33	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ----- org. Jabatan yang ada, sebanyak ----- jbt.	12  16	75.00	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari:  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	3  Ada Ada Ada	3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan	
			10	Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.  Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak -----	4  4	100.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
			11	Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	4	100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
					program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	4		Daerah tahun 2017 dan Renja- Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.  Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	4  4	100.00	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2016 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2017.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesarRp, ----- Total Belanja APBD, sebesar Rp----	10,145,799,216.23  4.39932E+12	0.23	Sumber data dari APBD tahun 2017 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. -----  Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp.-----	109,225,400  9,081,679,200	1.20	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. ---	65,162,000  1,757,195,223	3.71	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. -- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.	65,162,000  9,081,679,200	0.72	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb:  1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	5  Ada Ada Ada Ada Ada	5	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada	ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. ---- Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. -----.	0  10,968,815,390	0.00	Pembilang :  1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan  Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya  1. White board 2. .... 3. .... 4. .... 5. <a href="https://diskopukm.kukarkab.go.id">https://diskopukm.kukarkab.go.id</a> (Website)	2  Ada  Ada	2	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	tidak	tidak	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**KABUPATEN** : KUTAI KARTANEGARA

**NAMA SKPD** : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**URUSAN YANG DILAKSANAKAN**: WAJIB PENANAMAN MODAL

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh PerangkatDaerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak ----- program  Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program.	3  3	100	Lihat Program Nasional RKP 2017 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak -- -- yang terdiri dari:  1. SOP ttg -----  2. SOP ttg -----  3. SOP ttg -----  4. Dst -----	79	79	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan PerangkatDaerah	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus	PERDA pelaksanaan sebanyak -----	16		Normalisasi

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		menurut Peraturan Menteri (PERMEN)		menurut PERMEN	dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA yang seharusnya, sebanyak ---	16		
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang ada sebanyak --- Jabatan yang harus ada, sebanyak ---	21 21	100.00	Sumber data BKD/ DUK Perangkat Daerah
5			Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----	ada	ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018	
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak ---- - personil Total PNS Kabupaten, sebanyak ---- personil	98 14,494	0.68	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017/ BKD.
7			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklat/pim sesuai penjenjangan, sebanvak ----- org. Pejabat yang ada, sebanyak ---- org.	13 19	68.42	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.	
8			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ----- org. Jabatan yang ada, sebanyak ----- jbt.	19 19	100.00	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.	
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari:  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	3	3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.  Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak -----	8  9	88.89	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPDP tahun 2016 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.  Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	8  8	100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.  Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	8  8	100.00	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2016 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2018.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesarRp, -----  Total Belanja APBD, sebesar Rp----	13,403,188,519  4,399,322,942,854.37	0.30	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
Besaran belanja modal		14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. -----  Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp.-----	113,750,000  13,403,188,519	0.85	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018	
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. -	248,000,000	6.07	Sumber data dari realisasi APBD	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
				dan jasa	dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. ---	4,087,723,080		tahun 2018 terakhir.
		Besaran belanja pemeliharaan	16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. -- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.	248,000,000 13,403,188,519	1.85	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	Ada	Ada	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen aset Perangkat Daerah		Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada	ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. ---- Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. -----.	0 3,413,486,116	0.00	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan  Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman	7	7	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	PARTISIPASI MASYARAKAT			2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media		2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Website 5. Front Office (FO) 6. Mobil Layanan 7. Kotak Pengaduan			(di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ----	Ada	ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan DPMPSTSP dgn Unikarta skor 86,61

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**KABUPATEN** : KUTAI KARTANEGARA

**NAMA SKPD** : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

**URUSAN YANG DILAKSANAKAN:** KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh PerangkatDaerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 5 program	4	100	Lihat Program Nasional RKP 2017 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 6 yang terdiri dari:	4	6	
					1. SOP ttg Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda	1			
					2. SOP ttg Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Pemuda	1			
					3. SOP ttg Seleksi dan Diklat Paskibraka	1			
					4. SOP ttg Pembudayaan Olahraga	1			
					5. SOP ttg Kegiatan Kejuaraan POPPROV	1			
					6. SOP ttg Pelayanan Sarana dan Prasarana Olahraga	1			
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan PerangkatDaerah	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus	PERDA pelaksanaan sebanyak -----			Normalisasi

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		menurut Peraturan Menteri (PERMEN)		menurut PERMEN	dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA yang seharusnya, sebanyak ---			
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang ada sebanyak 21 Jabatan yang harus ada, sebanyak 25	21 25	84.00	Sumber data BKD/DAerah Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----		tidak	Sumber data BKD/Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak 104 personil Total PNS Kabupaten, sebanyak -- 14494 personil	104 14494	0.72	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017/ BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 15 org. Pejabat yang ada, sebanyak 19 org.	15 19	78.95	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 19 org. Jabatan yang ada, sebanyak 25 jbt.	19 25	76.00	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari:	3	3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
						- RENSTRA PD	1		
						- RENJA PD	1		
						- RKA PD	1		



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 12 program.  Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 14	12  14	85.71	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPDP tahun 2016 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 12 program.  Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 12 program.	12  12	100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 12 program.  Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 12 program.	12  12	100.00	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2016 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2017.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesarRp, 53,415,069,483,39  Total Belanja APBD, sebesar Rp 4.399.322.942.854.37	5.34151E+12  4.39932E+14	1.21	Sumber data dari APBD tahun 2017 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.197.037.600,00  Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp.46.146.683.760,00	2.19704E+11  4.67467E+12	4.70	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017
			15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.017.434.000	2017434000	0.06	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan			x 100%	Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 35.182.069.363,00	3.51821E+12		terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2,017,434,000 Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 46.146.683.760,00	2017434000 46146683760	4.37	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	5	5	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah		Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.		tdi	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 1.150.538.694.211,00	0 1.15054E+14	0.00	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan  Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya	4	4	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	PARTISIPASI MASYARAKAT	masyarakat		1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media		1. Papan Pengumuman 2. Website 3. Papan Struktur 4. Exbanner 5. ....			informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	tidak	tidak	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**KABUPATEN** : KUTAI KARTANEGARA

**NAMA SKPD** : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

**URUSAN YANG DILAKSANAKAN:**

1. Urusan Kearsipan
2. Urusan Perpustakaan

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (satu) urusan

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
							URUSAN 1 KEARSIPAN	URUSAN 2 PERPUSTAKAAN	URUSAN 1 KEARSIPAN	URUSAN 2 PERPUSTAKAAN	
2	3	4	5	6	7	8	9			9	
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementerian / LPND) yang harus dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh PerangkatDaerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanvak ----- program Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program.	0	1	0	50	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: 1. SOP ttg Peminjaman arsip in aktif 2. SOP ttg Penataan arsip in aktif 3. SOP ttg peminjaman arsip in aktif 4. SOP ttg penyerahan arsip statis 5. SOP ttg bimbingan teknis kearsipan 6. SOP ttg penyusunan peraturan daerah system kearsipan 7. SOP ttg peraturan bupati system kearsipan 8. SOP ttg pembuatan kartu anggota perpustakaan 9. SOP ttg pengunjung/pembaca perpustakaan 10. SOP ttg peminjaman buku 11. SOP ttg pengembalian buku 12. SOP ttg perpustakaan keliling 13. SOP ttg layanan pembinaan perpustakaan 14. SOP ttg pelatihan pengelolaan perpustakaan 15. SOP ttg penjiilidan surat kabar 16. SOP ttg seleksi bahan pustaka 17. SOP ttg pengadaan bahan pustaka	7	12	7	12	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
							URUSAN 1 KEARSIPAN	URUSAN 2 PERPUSTAKAAN	URUSAN 1 KEARSIPAN	URUSAN 2 PERPUSTAKAAN	
						18. SOP ttg processing bahan pustaka 19. SOP ttg hibah sarana dan prasarana perpustakaan		1 1			
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak ----  PERDA yang seharusnya, sebanyak ----					Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang ada sebanyak --- Jabatan yang harus ada, sebanyak ---	13 13	6 8	100.00	75.00	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----  Arsiparis Pustakawan	1 1	1 1	ada	ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018
4	<b>PENGLOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak --- ---, personil Total PNS Kabupaten, sebanyak ---- personil	63 14,494	36 14,494	0.43	0.25	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/ BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak ---- org. Pejabat yang ada, sebanyak ---- org.	12 13	4 6	92.31	66.67	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ---- org. Jabatan yang ada, sebanyak ---- jbt.	12 12	6 6	100.00	100.00	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA PD - RENJA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya  Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak ---- jenis, yg terdiri dari:  - RENSTRA PD - RENJA PD	3  Ada Ada	3  Ada Ada	3	3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
							URUSAN 1 KEARSIPAN	URUSAN 2 PERPUSTAKAAN	URUSAN 1 KEARSIPAN	URUSAN 2 PERPUSTAKAAN	
				- RKA PD		- RKA PD	Ada	Ada			
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.  Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak -----	3  3	1  1	100.00	100.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPDP tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.  Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	3  3	1  1	100.00	100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan Renja Perangkat
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.  Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	3  3	1  1	100.00	100.00	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2016 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2018.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesarRp,12,962,354,847,85  Total Belanja APBD, sebesar Rp----	6,481,177,423.93  4.39932E+12	6,481,177,423.93  4.39932E+12	0.15	0.15	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir.(anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1,084,153,000  Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp.11.985.209.608,-	542,076,500.00  5,992,604,804.00	542,076,500.00  5,992,604,804.00	9.05	9.05	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 99.642.000.- Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.968.765.268.-	49,821,000.00  984,382,634.00	49,821,000.00  984,382,634.00	5.06	5.06	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
		Besaran belanja pemeliharaan	16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja	total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. --	49,821,000	49,821,000	0.83	0.83	Sumber data dari realisasi APBD

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
							URUSAN 1 KEARSIPAN	URUSAN 2 PERPUSTAKAAN	URUSAN 1 KEARSIPAN	URUSAN 2 PERPUSTAKAAN	
				Daerah	Perangkat Daerah x 100 %	Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.	5,992,604,804	5,992,604,804			tahun 2018 terakhir
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	5  Ada Ada Ada Ada Ada	5  Ada Ada Ada Ada Ada	5	5	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. (Berita Acara sensus, Kir Barang dan Kir ruangan)	Ada	Ada	ada	ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 12.178,412,501,-	0  6,089,206,251	0  6,089,206,251	0.00	0.00	Pembilang :  1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	2  ADA TIDAK ADA ADA TIDAK ADA TIDAK ADA	4  ADA ADA ADA ADA TIDAK ADA	2	4	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	TIDAK	ADA	tidak	ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA

NAMA SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Urusan Pilihan (KELAUTAN DAN PERIKANAN)

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh PerangkatDaerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 2 program  Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.	2  2	100	Lihat Program Nasional RKP 2017 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 3 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Hibah Bansos 2. SOP ttg Pembuatan IUP / TPKP 3. SOP ttg Pengumpulan Data 4. Dst -----	3 1 1 1	3	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan PerangkatDaerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak 10  PERDA yang seharusnya, sebanyak 10	10  10		Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang ada sebanyak 29  Jabatan yang harus ada, sebanyak 33	29  33	87.88	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional : 4 ( Tenaga Penyuluh )	4	ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak 115. personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 14,494 personil	115 14,494	0.79	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/ BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 24 org. Pejabat yang ada, sebanyak 29 org.	24 29	82.76	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 29 org. Jabatan yang ada, sebanyak 30 jbt.	29 30	96.67	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	3 Ada Ada Ada	3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 14 program.	7	50.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
					RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 14	14		2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.  Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.	7  7	100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.  Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.	7  7	100.00	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2018.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp. 22.303.562.170,68  Total Belanja APBD, sebesar Rp. 4.399.322.942.854	22,303,562,170.68  4,399,322,942,854	0.51	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 159.803.565  Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 22.323.562.170,68	159,803,565  22,323,562,171	0.72	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 538.144.525  Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 10.088.831.705	538,144,525  10,088,831,705	5.33	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 538.144.525 Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 22.323.562.170,68	538,144,525 22,323,562,170.68	2.41	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	5 Ada Ada Ada Ada	5	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	KIB.B	ada	ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 46.837.953.426.	0 46,837,953,426	0.00	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan  Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman	3 1	3	Sebutkan jenis fasilitas / prasarana

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	MASYARAKAT			2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media		2. Kotak Pengaduan 3. Brosur 4. .... 5. ....	1 1		fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ----		tdi	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**KABUPATEN** : KUTAI KARTANEGARA

**NAMA SKPD** : Dinas Pertanian dan Peternakan

**URUSAN YANG DILAKSANAKAN**: Pertanian dan Peternakan

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh PerangkatDaerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 3 program  Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	2  2	100	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 28 yang terdiri dari:  1. SOP ttg Bidang Teknis Peternakan  2. SOP ttg Pengawasan Pupuk dan pestisida  3. SOP ttg Penilaian P3A  4. Dst -----	28	28	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan PerangkatDaerah	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah	PERDA pelaksanaan sebanyak -----	3		Normalisasi

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		menurut Peraturan Menteri (PERMEN)		menurut PERMEN	PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA yang seharusnya, sebanyak ---	3		
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang ada sebanyak --- Jabatan yang harus ada, sebanyak ---	72 75	96.00	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
4	<b>PENGLOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, : 1. Penyuluh dan 2. Pengadaan Barang dan Jasa	ada	ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
			6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak ---- - personil Total PNS Kabupaten, sebanyak ---- personil	530 14494	3.66	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/ BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak ----- org. Pejabat yang ada, sebanyak ---- org.	42 72	58.33	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ----- org. Jabatan yang ada, sebanyak ---- jbt.	68 72	94.44	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak ---- jenis, yg terdiri dari:  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	ada	ada	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPd	10	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.  Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak -----	13  20	65.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPd tahun 2016 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.  Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	8  8	100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2017 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.  Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	8  8	100.00	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2016 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah tahun 2017.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesarRp, ----- Total Belanja APBD, sebesar Rp----	14,285,951,336.00  4,399,322,942,854.37	0.32	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. -----  Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp.-----	3,558,140,000  14,285,951,336.00	24.91	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang	total belanja pemeliharaan dari total	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. -	286,359,029.00	2.85	Sumber data dari realisasi APBD tahun

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Besaran belanja pemeliharaan		dan jasa	belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. ---	10,055,444,436.00		2018 terakhir.
	16		Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. -- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.	286,359,029.00 14,285,951,336.00	2.00	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.	
			Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	ada	ada
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah		Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. : Rekapitulasi Barang Keneraca dan Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan dan Barang Milik Daerah Tahun 2018	ada	ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. ---- Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. -----.	0 146,094,241,424.40	0.00	Pembilang :  1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset)  2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan



No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
									Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Mobil keliling 4. Website 5. Pengumuman di Mass Media	ada	ada	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	tidak	tidak	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA  
NAMA SKPD : DINAS PERKEBUNAN  
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: PERTANIAN

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
2	3	4	5	6	7	8	9		
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh PerangkatDaerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sehanvak ----- program Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program.	1 2	50	Lihat Program Nasional RKP 2017 untuk masing-masing urusan, terdapat
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: 1. SOP ttg ----- 2. SOP ttg ----- 3. SOP ttg ----- 4. Dst -----	40 1 1 1 37	40	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan PerangkatDaerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak -----	1	1	Normalisasi
						PERDA yang seharusnya, sebanyak -----	1	1	
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang ada sebanyak --- Jabatan yang harus ada, sebanyak -----	57 63	90.48	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi PerangkatDaerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi PerangkatDaerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----	ada	ada	Sumber data BKD/ PerangkatDaerah. Mengacu kondisi PerangkatDaerah terakhir/updated Tahun 2017
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak -----. personil Total PNS Kabupaten, sebanyak ----- personil	196 14,494	1.35	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017/2018
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak ----- org. Pejabat yang ada, sebanyak ---- org.	29 57	50.88	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ----- org. Jabatan yang ada, sebanyak ----- jbt.	53 57	92.98	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari:  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	3	3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPd	10	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanvak ----- program. Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanvak -----	14 14	100.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPd tahun 2016 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah. sebanvak ----- program. Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	8 8	100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program. Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	8 8	100.00	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2016 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2017.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesarRp. ----- Total Belanja APBD, sebesar Rp-----	25,017,218,715 4,399,322,942,854	0.57	Sumber data dari APBD tahun 2017 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.-----	491,938,037 22,527,062,029	2.18	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. ---	210,539,500 4,098,744,521	5.14	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. -- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. -----	210,539,500 22,527,062,029	0.93	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	5	5	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
						4. LO 5. LPE			
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah		Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	ada	ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. ---- Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. -----.	0  43,626,103,821	0.00	Pembilang :  1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan  Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	5	5	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ----	ada	ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**KABUPATEN** : KUTAI KARTANEGARA

**NAMA SKPD** : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

**URUSAN YANG DILAKSANAKAN**: ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh PerangkatDaerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak ----- program  Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program.	1  3	33.33333	Lihat Program Nasional RKP 2017 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak -- -- yang terdiri dari: 1. SOP : Kegiatan Inventarisasi potensi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi 2. SOP : kegiatan kajian dan Pengembangan Potensi Panas Bumi  3. SOP : Penugasan Survey pendahuluan Potensi Panas Bumi  4. SOP :Surat Keterangan / Rekomendasi seismik 5. SOP : Pemberian surat keterangan /Rekomendasi atau perpanjangan Izin SPBU dan APMS 6. SOP : Pemberian Rekomendasi untuk perusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua	21	21	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
						7. SOP : Undangan Prognosa, Workshop, Rekonsiliasi dan Lifting Migas 8. SOP : Pemberian Izin untuk Pengusahaan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi 9. SOP : Kegiatan Pembuatan Sumur Bor bagi Masyarakat yang mengalami Krisis Air Bersih 10. SOP : Pendataan dan Pengarsipan data PNPB Batubara 11. SOP : Kegiatan Identifikasi Potensi Air Tanah 12. SOP : Surat Rencana Penyelenggara Sosialisasi Penghemat Energi 13. SOP : Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan LPJU di Kabupaten Kutai Kartanegara 14. SOP : Lelang Pemeliharaan LPJU di Kabupaten Kutai Kartanegara 15. SOP : Penyelenggaraan Sosialisasi Penghemat Energi 16. SOP : Prosedur Permohonan Bantuan Terkait Bidang Energi 17. SOP : Pelaksanaan PLTMH 18. SOP : Pelaksanaan Biogas 19. SOP : Pelaksanaan PLTS Tersebar 20. SOP : PLTS Terpusat			

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
						21. SOP : Pelaksanaan LPJU Tenaga Surya			
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak ----  PERDA yang seharusnya, sebanyak ----	1  1		Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang ada sebanyak --- Jabatan yang harus ada, sebanyak ---	15  16	93.75	Sumber data BKD/ DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa	ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak ---- -. personil Total PNS Kabupaten, sebanyak ----- personil	74  14494	0.51	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/ BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak ----- org. Pejabat yang ada, sebanyak ---- org.	15  15	100.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ----- org. Jabatan yang ada, sebanyak ----- jbt.	15  15	100.00	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari:	3	3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
		Daerah		- RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD		- RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada Ada Ada		
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.  Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak -----	12  12	100.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.  Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	7  7	100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.  Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	7  7	100.00	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2018.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesarRp, ----- Total Belanja APBD, sebesar Rp----	21,458,587,949.71  4,399,322,942,854.37	0.49	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. -----	64,840,000.00	0.31	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
						Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp.-----	20,654,205,277.00		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. ---	114,604,266.00 14,058,621,993.00	0.82	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. -- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.	114,604,266.00 20,654,205,277.00	0.55	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	5 Ada Ada Ada Ada Ada	5	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Berita Acara Rekonsiliasi Data barang Milik Daerah dan Keuangan		Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. ----  Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. -----.	0  11,372,915,812.94	0.00	Pembilang :  1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
									2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan  Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Website	3	3	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	tidak	tidak	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA  
NAMA SKPD : Dinas Pariwisata  
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Pariwisata

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 3 program Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	3  3	100.00	Lihat Program Nasional RKP 2017 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak <b>18</b> yang terdiri dari: 1. SOP " Monitoring Pelaku Usaha Jasa Pariwisata" 2. SOP " Pemutahiran Usaha Jasa Pariwisata. 3. SOP " Pengurusan Tanda Daftar Usaha Jasa Pariwisata" 4. SOP " Pelaksanaan Kebersihan Destinasi Pariwisata. 5. SOP " Pelaksanaan Pengamanan Destinasi Wisata" 6. SOP " Pemberian Informasi Destinasi Wisata. 7. SOP " peminjaman Objek Wisata" 8. SOP "Pengelolaan Karcis" 9. SOP " Pengelolaan Ruang Pertunjukan" 10. SOP " Penetapan Desa Wisata" 11. SOP " Laporan Pengadministrasi Data Agendaris" 12. SOP " Mendokumentasikan Laporan Bidang Kepariwisataaan" 13. SOP " Pelayanan Informasi Kepariwisataaan " 14. SOP " Pemilihan Duta Wisata" 15. SOP " Pembentukan Pokdarwis" 16. SOP " Pelaksanaan Fasilitas Even Budaya" 17. SOP " Pelaksanaan Fasilitas Even Pariwisata" 18. SOP " Pelaksanaan Pameran"	18	18	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah	PERDA pelaksanaan sebanyak 3	3		Normalisasi

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
		menurut Peraturan Menteri (PERMEN)		menurut PERMEN	PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA yang seharusnya, sebanyak 3	3		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang ada sebanyak 18 Jabatan yang harus ada, sebanyak 21	18 21	85.71	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
5			Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, ----- -	tidak	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017		
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak 148 Personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 14.494 personil	148 14,494	1.02	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/ BKD.
7			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 18 org. Pejabat yang ada, sebanyak 21 org.	18 21	85.71	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.	
8			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 18 org. Jabatan yang ada, sebanyak 21 jbt.	18 21	85.71	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut iumlahnva	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	3 Ada Ada Ada	3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.  Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6	6  6	100.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPDP tahun 2016 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.  Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.	6  6	100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.  Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.	6  6	100.00	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2017 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2018.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar <b>Rp.23,799,841,274,31</b> Total Belanja APBD, sebesar <b>Rp. 4,399,322,942,854,37</b>	<b>Rp 23,799,841,274.31</b> <b>Rp 4,399,322,942,854.37</b>	0.54	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar <b>Rp.1,069,417,700,-</b> Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar <b>Rp. 22,054,288,415,-</b>	<b>Rp 1,069,417,700.00</b> <b>Rp 22,054,288,415.00</b>	4.85	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar <b>Rp. 338,007,880,-</b> Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar <b>Rp. 8,371,057,700,-</b>	<b>Rp 338,007,880.00</b> <b>Rp 8,371,057,700.00</b>	4.04	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar <b>Rp. 338,007,880,-</b> Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar <b>Rp. 22,054,288,415,-</b>	<b>Rp 338,007,880.00</b> <b>Rp 22,054,288,415.00</b>	1.53	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO	ada  Ada Ada Ada Ada	ada	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
						5. LPE	Ada		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. Kartu Inventaris Barang/KIB 2. Kartu Inventaris Ruangan/KIR 3. SIMDA KIB 4. Buku Inventaris Barang 5. Surat Perintah Pengeluaran Barang 6. Berita Acara Pemeriksa Barang 7. Berita Pengeluaran Barang, Rekapitulasi Buku Inventaris/Sensus 8. Laporan Status Barang 9. Daftar Pengadaan Barang	ada	ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. -  Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. <b>836,025,142,989,17,-</b>	Rp -  Rp <b>836,025,142,989.17</b>	0.00	Pembilang :  1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset)  2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan  Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Website 3. Baliho 4. Leaflet 5. Pos Pengaduan	5  1 1 1 1	5	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang		tdi	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA

NAMA SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Urusan Perindustrian
2. Urusan Perdagangan

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
							URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 1	URUSAN 2	
1	2	3	4	5	6	7		8		9	
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak ----- program  Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program.	3	3	100	75	Lihat Program Nasional RKP 2017 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak .... yang terdiri dari: 1. SOP ttg TDI 2. SOP ttg Fasilitasi teknis penerbitan sertifikat P-IRT dan halal bagi Industri Pangan 3. SOP ttg Prosedur Penerbitan Angka Pengenal Import (API) 4. SOP ttg Perdagangan kayu antar pulau terpadu	2  1 1	2	2  1 1	2	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak -----  PERDA yang seharusnya, sebanyak -----	Belum ada	Belum ada			Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah	Jabatan yang ada sebanyak ---	13	8	100.00	100.00	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
							URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 1	URUSAN 2	
1	2	3	4	5	6	7		8		9	
	DAERAH			eselonering yang terisi	jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang harus ada, sebanyak -----	13	8			
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----		2	tidak	ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak ----. personil  Total PNS Kabupaten, sebanyak -- -- personil	65  14494	66  14494	0.45	0.46	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017/ BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak ----- org.  Pejabat yang ada, sebanyak ---- org.	12  13	7  8	92.31	87.50	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ----- org.  Jabatan yang ada, sebanyak ----- jbt.	13  13	8  8	100.00	100.00	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak -- -- jenis, yg terdiri dari:  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	3  Ada Ada Ada	3  Ada Ada Ada	3	3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan



NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
							URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 1	URUSAN 2	
1	2	3	4	5	6	7		8		9	
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak ----- - program.	4	4	100.00	100.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPDP tahun 2016 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
						Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak -----	4	4			
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	2	4	100.00	100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2017 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
						Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	2	4			
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program. Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	2	4	100.00	100.00	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2016 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2017.
						Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	2	4			
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesarRp, -----  Total Belanja APBD, sebesar Rp----	13870721578	12000000000	0.32	0.27	Sumber data dari APBD tahun 2017 terakhir. (anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp.-----	1381865728	3000000000	9.96	25.00	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017
			15	Total Belanja pemeliharaan dari	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. -	139973120	139973120	3.65	4.00	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
							URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 1	URUSAN 2	
1	2	3	4	5	6	7		8		9	
		Besaran belanja pemeliharaan		total belanja barang dan jasa	Jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. ---	3834654653	3500000000			terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. -- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.	139973120 13870721578	139973120 12000000000	1.01	1.17	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
			17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	5 Ada Ada Ada Ada Ada	5 Ada Ada Ada Ada Ada	5	5	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah		Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada	Ada	ada	ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. -----.	- 78925569151	- 60000000000	0.00	0.00	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. .... 3. ....	1	1	1	1	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
							URUSAN 1	URUSAN 2	URUSAN 1	URUSAN 2	
1	2	3	4	5	6	7		8		9	
				4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media		4. .... 5. ....					
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Tidak	Tidak	tidak	tidak	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA

NAMA SKPD : BAPPEDA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: PERENCANAAN

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh PerangkatDaerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak ----- program  Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program.	0  0	0	Lihat Program Nasional RKP 2017 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 126 yang terdiri dari: 1. SOP Penyusunan RPJPD 2. SOP Penyusunan RPJMD 3. SOP Penyusunan RKP dan Renja SKPD 4. SOP Murenbang  5. SOP Musrenbang Kecamatan 6. SOP Musrenbang Kabupaten 7. SOP Musrenbang Provinsi  8. SOP Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 9. SOP Penyusunan LKPJ 10. SOP Penyusunan LPPD 11. SOP Koordinasi Penyusunan KUA PPAS 12. SOP Koordinasi Penyusunan Renja Sub Bidang SDA dan Pertanian	126	126	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						13. SOP Koordinasi Penyusunan Renja Sub Bidang Pengemb. Dunia Usaha, Pariwisata dan 14. SOP Koordinasi Penyusunan RKPD Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat 14. SOP Koordinasi Penyusunan RKPD Sub Bidang Aparatur  14. SOP Koordinasi Penyusunan RKPD Sub Bidang Pemerintahan 17. SOP Koordinasi Penyusunan RKPD Sub Bidang Sarana & Prasarana Wilayah 17. SOP Koordinasi Penyusunan RKPD Sub Bidang Pengembangan Wilayah 16. Penyusunan / Rewiew RTRW Kabupaten			
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak -----  PERDA yang seharusnya, sebanyak -----	0  0		Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jabatan yang ada sebanyak 20  Jabatan yang harus ada, sebanyak 21	20  21	95.24	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional Fungsional Perencana dan Fungsional Barang dan Jasa	ada	ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017
4	<b>PENGLOLAAN KEPAGAWAIAN</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total	PNS Perangkat Daerah, sebanyak 159 personil	159	1.10	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	DAERAH	menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait			PNS Kabupaten	Total PNS Kabupaten, sebanyak 14494 personil	14494		terakhir/updated tahun 2017/ BKD.
7			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 14 org.  Pejabat yang ada, sebanyak 20 org.	14  20	70.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.	
8			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 20 org.  Jabatan yang ada, sebanyak 20 jbt.	20  20	100.00	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak --- -- jenis, yg terdiri dari:  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	3  Ada Ada Ada	3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak -----  - program. Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak -----	10  10	100.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPDP tahun 2016 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat	11	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah	Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak -----  program.	9  9	100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	9	100.00	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2016 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah vbs tahun 2017.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
					jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	9		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13		Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp. 28.907.233.381.97 Total Belanja APBD, sebesar Rp 4.399.322.942.854,37	28,907,233,381.97 4,399,322,942,854.37	0.66	Sumber data dari APBD tahun 2017 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 103.560.000,00 Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp.24.133.540.853,00	103,560,000.00 24,133,540,853.00	0.43	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 632.585.955.00 Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 10.496.543.129,00	632,585,955.00 10,496,543,129.00	6.03	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 632585955 Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 24133540853	632,585,955.00 24,133,540,853.00	2.62	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	5 Ada Ada Ada Ada Ada	5	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18		Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. Kertas kerja Rekonsiliasi Keuangan dan BMD Tahun 2018	ada	ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp.30.260.577.242,50	0  30,260,577,242.50	0.00	Pembilang :  1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset)  2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan  Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Webside 3. sosial Media (Facebook) 4. Pengumuman di Mass Media (Advertorial)	4	4	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Pelayanan Publik Indeks Partisipasi Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara 2017	ada	ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.



**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**KABUPATEN** : KUTAI KARTANEGARA

**NAMA OPD** : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**URUSAN YANG DILAKSANAKAN**: URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH PERANGKAT DAERAH KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh PerangkatDaerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 1 program Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. 1/3 X 100 %	1  3	33.33333	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 32 yang terdiri dari:  SOP#1 Bimtek Mandiri SOP#2 Diklat Teknis Fungsional SOP#3 Diklat PIM SOP#4 Diklat Prajabatan / Latihan Dasar SOP#5 Ijin Belajar  SOP#6 Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama SOP#7 Pengurusan Ujian Penyusunan Ijasah SOP#8 Ujian Dinas SOP#9 Penilaian Kinerja Aparatur Fungsional SOP#10 Pelayanan ijin Perceraian SOP#11 Penyelesaian Kasus Disiplin PNS SOP#12 Pengusulan / Penganugerahan Satya Lencana Karya Satya SOP#13 Sumpah / Janji Pegawai Negeri Sipil SOP#14 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil SOP#15 Layanan Cuti di Lingkungan Kecamatan  SOP#16 Layanan Cuti di luar Tanggungan Negara bagi PNS	23	23	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
						<p>SOP#17 Layanan Cuti bagi PNS, Jabatan Esselin II A</p> <p>SOP#18 Layanan Cuti bagi PNS, Jabatan Esselin II B</p> <p>SOP#19 Layanan Cuti bagi PNS, Jabatan Staf s/d Pejabatata Ess III di atas 14 hari dikelola oleh perangkat Daerah</p> <p>SOP#20 Layanan Cuti bagi PNS, Jabatan Staf s/d Pejabatata Ess III di bawah 14 hari dikelola oleh perangkat Daerah</p> <p>SOP#21 Layanan Usul Kartu Istri atau Kartu Suami</p> <p>SOP#22 Layanan Usul Kartu Pegawai</p> <p>SOP#23 Layanan Usul Kartu Peserta Taspen</p>			
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	<p>PERDA pelaksanaan sebanyak 4 (1. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 34 Tahun 2013 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil, 3. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kode etik Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara , 5. Peraturan Bupati Kutai kartanegara Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>PERDA yang seharusnya, sebanyak 5</p>	5	ada	Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang ada sebanyak 21 Jabatan yang harus ada, sebanyak 21	21	100.00	Sumber data BKPSDM/ DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, 2 - Jabatan Fungsional # Analisis Kepegawaian orang # Widyaswara orang #	21		ada

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak 101 personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 14494 personil	101 14494	0.70	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/ BKPSDM.
7			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 14 org. Pejabat yang ada, sebanyak 21 org.	14 21	66.67	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.	
8			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 20 org. Jabatan yang ada, sebanyak 21 jbt.	20 21	95.24	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.	
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	3 Ada Ada Ada	3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
10			Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 9 program.  Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 9	9 9	100.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPDP tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program.	9	ah tolong d	Sumber data Perangkat Daerah.

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7	8	8	9
		dengan Program RENJA Perangkat Daerah		dalam RKA Perangkat Daerah	dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program.	8		Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program.	8 8	100.00	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2018.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp. 17.042.467.391,00 Total Belanja APBD, sebesar Rp. 4.399.322.942.854,37	17,042,467,391.00 4,399,322,942,854.37	0.39	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0 Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp.15.149.051.878,00	- 15,149,051,878.00	0.00	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 64.610.240,- Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 6.678.953.370,00	64,610,240.00 6,678,953,370.00	0.97	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
m		Besaran belanja pemeliharaan	16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp.60.705.070,- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 15.149.051.878,00	60,705,070.00 15,149,051,878.00	0.40	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	5 Ada Ada Ada Ada	5	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
-	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah		Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. Buku Inventaris	Ada Ada	ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
2	3	4	5	6	7	8	9		
7									
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0  Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 2.377.648.597,59	0  2,377,648,598	0.00	1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan  Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya  1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Website	3	3	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang mutu pelayanan pelanggan	ada	ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA

NAMA PD : BADAN PENDAPATAN DAERAH

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Keuangan

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh PerangkatDaerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanvak ----- program Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program.	0  0	0	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 1 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain	1	1	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan PerangkatDaerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak 1  PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	1		Perda Pajak Daerah No. 02 Tahun 2011
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang ada sebanyak 36 Jabatan yang harus ada, sebanyak 39	36  39	92.31	Sumber data BKD/DUK BAPENDA

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----		tidak	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak 338 personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 14494 personil	338  14494	2.33	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/ BKD.
7			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 23 org. Pejabat yang ada, sebanyak 36 org.	23  36	63.89	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.	
8			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 36 org. Jabatan yang ada, sebanyak 36 jbt.	36  36	100.00	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.	
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari:  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	3  Ada Ada Ada	3	Sumber data BAPENDA
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.	5	100.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
2	3	4	5	6	7	8	9		
					RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak	5		
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.	5 5	100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.	5 5	100.00	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2016 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2018.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp. 36,990,385,418.48 Total Belanja APBD, sebesar Rp. 4,399,322,942,854.37	3.699E+10 4.399E+12	0.84	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 398.350.540 Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 33,499,275,068.00	398350540 3.35E+10	1.19	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 702.002.292 Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 6.566.093.725	702002292 6.566E+09	10.69	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.



1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
		Besaran belanja pemeliharaan	16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 702,002,292 Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 33,499,275,068.00	702002292  3.35E+10	2.10	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	5  Ada Ada Ada Ada	5	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah		Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada	ada	Sensus Barang
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 47,805,017,902.00	0  4.781E+10	0.00	Pembilang :  1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan  Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Leaflet 2. Banner 3. Pos Pengaduan	4	4	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
				4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media		4. Website			
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	tidak	tidak	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA

NAMA SKPD : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh PerangkatDaerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanvak ----- program Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program.	0  1	0	Lihat Program Nasional RKP 2017 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak -- -- yang terdiri dari: 1. SOP ttg Penyusunan TOR Penelitian 2. SOP ttg Pembentukan TIM Peneliti 3. SOP ttg Penyusunan Research Design (RD) 4. SOP ttg Penggalian data/pelaksanaan lapangan 5. SOP ttg Penyusunan laporan penelitian 6. SOP ttg Pembuatan buku hasil Penelitian 7. SOP ttg Pendistribusian hasil penelitian/kajian 8. SOP ttg Penyusunan agenda kajian/penelitian	8  1 1 1 1 1 1 1 1	8	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan PerangkatDaerah	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus	PERDA pelaksanaan sebanyak -----	1	1	Normalisasi

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	menurut Peraturan Menteri (PERMEN)		menurut PERMEN	dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA yang seharusnya, sebanyak ---	1	71.43	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
3		Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang ada sebanyak --- Jabatan yang harus ada, sebanyak ---	15 21		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi PerangkatDaerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi PerangkatDaerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----	5		
4	<b>PENGLOLAAN KEPAGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak ---- -. personil Total PNS Kabupaten, sebanyak ----- personil	74 14494	0.51	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/ BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanvak ----- org. Pejabat yang ada, sebanyak ---- org.	12 15	80.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ----- org. Jabatan yang ada, sebanyak ----- jbt.	15 15	100.00	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah  - RENSTRA PD - RENJA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari:  - RENSTRA PD - RENJA PD	4  1 1	4	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
				- RKA PD		- DPA PD - RKA PD	1 1		
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.  Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak -----	5  6	83.33	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.  Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	5  5	100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.  Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program	5  5	100.00	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2018.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesarRp, ----- Total Belanja APBD, sebesar Rp----	11,738,009,298.88 4,399,322,942,854.37	0.27	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp.-----	155,906,000.00 9,072,892,087.00	1.72	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. ---	136,697,311.00 1,881,770,203.00	7.26	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
	16		Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. -- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.	136,697,311.00 9,072,892,087.00	1.51	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.	
	17		Laporan keuangan Perangkat Daerah	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	5 1 1 1 1	5	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.....Buku/Daftar Inventarisasi KIB (Kartu Inventaris Barang), BI (Buku Inventaris)	ada	ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)BA Rekon
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. ---- Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. -----.	0 5,520,139,477.40	0.00	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
									Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Jurnal Litbang 3. Website	3  1 1 1	3	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	ada	ada	Penyusunan dokumen indeks kepuasan masyarakat tahun 2017

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**KABUPATEN :** KUTAI KARTANEGARA

**NAMA SKPD :** BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**URUSAN YANG DILAKSANAKAN :** FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh PerangkatDaerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak ----- program  Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program.	1  1	100	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: 1. SOP Bidang Belanja Tidak Langsung 2. SOP Bidang Belanja Langsung 3. SOP Bidang Perbendaharaan 4. SOP Bidang Pembiayaan dan Permodalan 5. SOP Bendahara Umum Daerah 6. SOP Bidang Penerimaan dan Belanja 7. SOP Bidang Laporan keuangan 8. SOP Bidang Inventarisasi dan dokumen aset 9. SOP Bidang Pemeliharaan Aset 10. SOP Bidang Pemanfaatan Aset	56  3  3  6  3  1  3  4  10  10  6	56	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.



1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
						11. SOP Bidang Penghapusan Aset 12. SOP Barang/Jasa	5 2		
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak ----  PERDA yang seharusnya, sebanyak ----	1  1		Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang ada sebanyak ---  Jabatan yang harus ada, sebanyak ----	21  21	100.00	Sumber data BKD/ DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----		tidak	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak --- ---. personil Total PNS Kabupaten, sebanyak --- - personil	194  14494	1.34	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/ BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak ---- org.  Pejabat yang ada, sebanyak ---- org.	12  21	57.14	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ---- org.  Jabatan yang ada, sebanyak ---- jbt.	21  21	100.00	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak ---- - jenis, yg terdiri dari:  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	3  ada ada ada	3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKP	10	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak -----  Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak -----	6  7	85.71	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKP tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.  Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	7  7	100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ---- program.  Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	7  7	100.00	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2016 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2018.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesarRp, ---- Total Belanja APBD, sebesar Rp----	21,168,736,000  3,540,837,777,690.24	0.60	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp.-----	399,819,325 16,371,148,780	2.44	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. ---	573,723,204 9121196755	6.29	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. -- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.	573,723,204 16,371,148,780	3.50	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	5 ada ada ada ada	5	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah		Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	ada	ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. ---- Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. -----.	0 25,003,016,304.00	0.00	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
									2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan  Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....	3  ada ada  ada	3	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	ada	ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA

NAMA SKPD : INSPEKTORAT DAERAH

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanvak ----- program Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program.	1  4	25	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: 1. SOP Standar Audit 2. SOP Penyusunan Kertas Kerja dan Ke 3. SOP Pelaksanaan Monitoring dan Eva 4. SOP Penentuan Sampling 5. SOP Penilaian Kinerja 6. SOP Pelayanan Publik 7. SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 8. SOP Pelaksanaan Penyusunan LPPD 9. SOP Pendampingan LPPD 10. SOP Penyusunan SAKIP 11. SOP Pendampingan SAKIP 12. SOP Penanganan Pengaduan Tindak 13. SOP Pengendalian Gratifikasi 14. SOP Pelayanan Administrasi Pemer 15. SOP Laporan Hasil Audit 16. SOP Pelaksanaan Monitoring dan Ev 17. SOP Penyusunan Kertas Kerja Audit 18. SOP Penyusunan Kertas Kerja Reviu	25  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	25	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
						19. SOP Penentuan Sampel Audit 20. SOP Penyelesaian TP-TGR 21. SOP Pemeriksaan Reguler 22. SOP Pemeriksaan dengan Tujuan Te	1 1 1 1		
						23. SOP Penanganan Pengaduan Masya 24. SOP Koordinasi Pengawas 25. SOP Pemeriksaan Rutin.	1 1 1		
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak -----  PERDA yang seharusnya, sebanyak -----	1  1		Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang ada sebanyak ---  Jabatan yang harus ada, sebanyak -----	8  9	88.89	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----	Ada	ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak -----. personil Total PNS Kabupaten, sebanyak ----- personil	92  14494	0.63	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/ BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak ----- org.	7	87.50	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
				kepemimpinan	dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang ada, sebanyak ---- org.	8		terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ----- org. Jabatan yang ada, sebanyak ----- jbt.	8 8	100.00	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari: - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	3 Ada Ada Ada	3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak ----- program. Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak -----	6 6	100.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPDP tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah. sebanvak ----- program. Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	6 6	100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program	6	100.00	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs.

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
2	3	4	5	6	7	8	9		
					jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	6		Perangkat Daerah yang tahun 2018.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesarRp, ----- Total Belanja APBD, sebesar Rp----	21,255,350,751.73 4,399,322,942,854.37	0.48	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp.-----	335,788,800.00 17,633,764,204.00	1.90	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. ---	115,568,878.00 7,242,487,835.00	1.60	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. -- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.	115,568,878.00 17,633,764,204.00	0.66	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	5 Ada Ada Ada Ada	5	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah		Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada	ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. ---	0	0.00	Pembilang :



	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Daerah	Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. -----.	12,941,437,637.96		1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan  Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet/Banner 3. Website Inspektorat 4. .... 5. ....	3	3	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Ada	ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**KABUPATEN** : KUTAI KARTANEGARA

**NAMA SKPD** : SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**URUSAN YANG DILAKSANAKAN** : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanvak ----- program Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program.	2  3	66.66667	Lihat Program Nasional RKP 2017 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak -- -- yang terdiri dari: 1. SOP ttg Penegasan Batas Daerah Kab. Kukar 2. SOP ttg Penegasan Batas Wilayah Kecamatan di Kukar 3. SOP ttg Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan 4. SOP ttg Penanganan Kerja Sama Daerah 5. SOP ttg Pengajuan Rekomendasi Perjalanan Luar Negeri bagi Pejabat dan PNS di Kab. Kukar. 6. SOP ttg Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) 7. SOP ttg Penanganan Masalah Perdata dan PTUN 8. SOP ttg Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 9. SOP ttg e-Lelang Sederhana Pra Kualifikasi 10. SOP ttg E-Lelang Umum Pasca Kualifikasi 11. SOP ttg E-Lelang Umum Sederhana	22  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	22	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
						12. SOP ttg Pengadaan Barang/Jasa secara E-Purchasing 13. SOP ttg Analisis Standar Belanja 14. SOP ttg Pengadaan Barang / Jasa 15. SOP ttg Penanganan Keprotokolan pada Acara Resmi dan Fasilitas Tamu 16. SOP ttg Penyediaan Media publikasi bagi Pemkab. Kukar. 17. SOP ttg Penyediaan Informasi Publikasi Non Tentatif Pemkab. Kukar 18. SOP ttg Peliputan Kegiatan di lingkungan Pemkab. Kukar. 19. SOP ttg Pengelolaan Website Informasi Pemkab. Kukar. 20. SOP ttg Pemberitaan melalui Media Massa di lingkungan Pemkab. Kukar. 21. SOP ttg Penuampaian Informasi melalui media display informasi 22. SOP ttg Penanganan Back up Data	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak -----  PERDA yang seharusnya, sebanyak ---	1  1		Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang ada sebanyak --- Jabatan yang harus ada, sebanyak ---	52 55	94.55	Sumber data BKD/ DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----	0	tidak	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
	2	3	4	5	6	7		8	9	
4	<b>PENGLOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak ---- - personil Total PNS Kabupaten, sebanyak ---- personil	710  14494	4.90	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017/ BKD.	
7			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanvak ---- org. Pejabat yang ada, sebanyak ---- org.	45  52	86.54	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.		
8			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ---- org. Jabatan yang ada, sebanyak ---- jbt.	52  52	100.00	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.		
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak ---- jenis, yg terdiri dari:  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	3	3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan	
			10	Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPDP	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.  Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak -----	18  23	78.26	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPDP tahun 2016 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
			11	Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi iumlah	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ---- program.	18	100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
					Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	18		Daerah tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program. Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	18 18	100.00	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2016 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2017.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesarRp, 123.852.109.901,44 Total Belanja APBD, sebesar Rp. 3.574.459.710.071,24	1.23852E+11 3.57446E+12	3.46	Sumber data dari APBD tahun 2017 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.049.582.600 Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp.109.580.464.943	1049582600 1.0958E+11	0.96	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 5.364.257.653 Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 51.473.009.953	5364257653 51473009953	10.42	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 5.364.257.653 Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp.109.580.464.943	5364257653 1.0958E+11	4.90	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA	5	5	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, Calk)

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						3. CALK 4. LO 5. LPE			(INERACA, LRA, CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya : kertas Kerja Rekonsiliasi Keuangan dan BMD Tahun 2018	ada	ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. ---- Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 885.134.396.855,92	0  4.96751E+11	0.00	Pembilang :  1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan  Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	<b>PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya  1. papan pengumuman 2. leaflet 3. web site 4. call center 5. ....	4	4	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Tidak	tidak	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA

NAMA SKPD : SEKRETARIAT DPRD

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh PerangkatDaerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak ----- program  Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program.	0  0	0	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak -- -- yang terdiri dari: 1.Penyelenggaraan Keprotokolan Rapatdan Kegiatan 2.Kegiatan administrasi Tatanaskah Produk Perundang-Udang DPRD 3.Pengelolaan Perpustakaan Humas dan Dokumentasi 4.Penyusunan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD.	4	4	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan PerangkatDaerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak ---  PERDA yang seharusnya, sebanyak ---			Normalisasi
3	<b>PENATAAN</b>	Pengisian struktur	4	Rasio struktur jabatan dan	Jumlah jabatan yang ada	Jabatan yang ada sebanyak 17	17	100.00	Sumber data

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
	KELEMBAGAAN DAERAH	jabatan		eselonering yang terisi	(yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang harus ada, sebanyak 17	17		BKD/DUK Perangkat Daerah
5			Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----		tidak	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak 201 personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 14915 personil	201 14915	1.35	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/ BKD.
7			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak ----- org. Pejabat yang ada, sebanyak ---- org.	16 17	94.12	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.	
8			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ----- org. Jabatan yang ada, sebanyak ----- jbt.	16 17	94.12	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD - TAPKIN LAKP/LKPJ	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari:  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD - TAPKIN LAKP/LKPJ	4	4  ADA ADA ADA ADA	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan



1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.  Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6	6  6	100.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPDP tahun 2016 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.  Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.	6  6	100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.  Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.	6  6	100.00	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2016 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2018.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesarRp, 68.678.318.529,00  Total Belanja APBD, sebesar Rp----	68,678,318,529	tdi	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. -----  Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp.-----	1,812,865,375  61,377,843,352	2.95	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. -	3,637,032,318	6.32	Sumber data dari realisasi APBD

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
		Besaran belanja pemeliharaan	16	dan jasa Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	dan jasa Perangkat Daerah x 100% total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. --- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. -- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.	57,545,518,777 2,019,459,200 61,377,843,352		tahun 2018 terakhir. Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	5 ADA ADA ADA ADA ADA	5	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	<b>PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah		Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.		tdi	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. ---- Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. -----.		tdi	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan  Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya	3	3	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
	PARTISIPASI MASYARAKAT	masyarakat		1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media		1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. .... 4. .... 5. Pengumuman di Mass Media			informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ----		tdi	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA

NAMA SKPD : Sekretariat DP. KORPRI

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 0 program  Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program.		tdi	Lihat Program Nasional RKP 2017 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 3 yang terdiri dari:  1. SOP ttg SOP ttg Pendampingan Perkara LKBH KORPRI  2. SOP ttg Penetapan Penghuni Perumahan KORPRI  3. SOP ttg Penggantian Kepemilikan Perumahan KORPRI	3  1  1  1	3  1  1  1	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak 1  PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	1  1		Normalisasi

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang ada sebanyak 4 Jabatan yang harus ada, sebanyak 4	4 4	100.00	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional 0	0	tidak	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak 25 personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 14.494 personil	25 14494	0.17	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017/ BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 2 org. Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	2 4	50.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.	4 4	100.00	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	3  Ada Ada Ada	3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPd	10	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.  Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak -----	3  3	100.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPd tahun 2016 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.  Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program.	3  3	100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program.  Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program.	3  3	100.00	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2016 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2017.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp,3.427.928.974,65  Total Belanja APBD, sebesar Rp 4.399.322.942.854,37	3.42793E+11  4.79273E+12	13.98	Sumber data dari APBD tahun 2017 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp.187.030.800  Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp.3.155.899.085	187030800  3155899085	5.93	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 23.971.900 Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.009.704.661	23971900  1009704661	2.37	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
	16		Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 23.971.900 Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 3.155.899.085	23971900  3155899085	0.76	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.	
	17		Laporan keuangan Perangkat Daerah	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	5  Ada Ada Ada Ada Ada	5	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah		Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya : KIB a-d, Berita acara Rekon, Kertas Kerja Final, Rekap barang ke Neraca, Buku Inventarisasi, Rincian barang ke Neraca	ada	ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 4.810.512.750	0  4810512750	0.00	Pembilang :  1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7		8	9
									Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....	1	1	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	tidak	tidak	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.



**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN  
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
 NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN KESBANGPOL  
 URUSAN YG DILAKSANAKAN : PEMERINTAHAN UMUM

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 2 program	2  2	100	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada sebanyak 4 yang terdiri dari:  1. SOP ttg Bantuan Keuangan Partai Politik  2. SOP ttg Pendaftaran Ormas  3. SOP ttg Bantuan Sosial/Hibah Bagi Ormas  4. SOP ttg Surat Ijin Penelitian	4	4	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak 0  PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0  0		Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah	Jabatan yang ada sebanyak 13	13	92.86	Sumber data BKD/DUK

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
	DAERAH				jabatan yang ada x 100 %	Jabatan yang harus ada, sebanyak 14	14		Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----	0	tidak	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS Perangkat Daerah, sebanyak 81 personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 14.494 personil	81 14,494	0.56	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/ BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 10 org. Pejabat yang ada, sebanyak 13 org.	10 13	76.92	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 org. Jabatan yang ada, sebanyak 13 jbt.	13 13	100.00	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:  - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	3  Ada Ada Ada	3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 4 program.  Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program	7  7	100.00	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPDP tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program.  Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program.	7  7	100.00	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program.  Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program.	7  7	100.00	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2018.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp. 11.171.203.418,82  Total Belanja APBD, sebesar Rp. 4.399.322.942.854,37,-	11,171,203,418.82  4,399,322,942,854.37	0.25	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0,-  Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 10.185.117.310,-	-  10,185,117,310.00	0.00	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah	Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 42.367.000,-	42,367,000.00	1.49	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
		Besaran belanja pemeliharaan			x 100%	Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.848.631.374,-	2,848,631,374.00		terakhir.
	16		Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 42.367.000,- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 10.185.117.310,-	42,367,000.00 10,185,117,310.00	0.42	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.	
	17		Laporan keuangan Perangkat Daerah	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb:  1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. LPE	5  Ada Ada Ada Ada	5	Sumber data dari Lap. Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Lap Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah		Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. A. BA Rekon BMD dan Keuangan 2018	ada	ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0,- Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 12.653.132.024,31	0 12,653,132,024.31	0.00	Pembilang :  1. Sumber data berasal dari BPKAD (BA. Inventarisasi Rekon Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan  Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan

1	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7		8	9
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	5	5	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Pelayanan Surat Keterangan Terdaftar Bagi Ormas	tidak	tidak	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN**  
**ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN**  
**DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA

NO	URUSAN	NO.	IKK	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
1	2	3	4	5		6	7
<b>URUSAN WAJIB</b>							
1	Pendidikan	1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak Jumlah anak usia 4 – 6 tahun	31,467 40,419	77.85	Pembilang berasal dari Dinas Dikbud, Penyebut berasal dari Dinas Dukcapil
		2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis Jumlah penduduk usia 15th ke atas	480,350 480,638	99.94	Pembilang berasal dari Dinas Dikbud, Penyebut berasal dari Dinas Dukcapil
		3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn	88,482 88,605	99.86	Pembilang berasal dari Dinas Dikbud, Penyebut berasal dari Dinas Dukcapil
		4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn	38,550 40,948	94.14	Pembilang berasal dari Dinas Dikbud, Penyebut berasal dari Dinas Dukcapil
		5	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya	31 88,482	0.035	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Dikbud
		6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs	13 38,550	0.034	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Dikbud
		7	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya	14,006 14,128	99.14	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Dikbud

NO	URUSAN	NO.	IKK	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
		8	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	12,185 12,191	99.95	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Dikbud
		9	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya	14,003 14,006	99.98	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Dikbud
		10	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs	5,683 5,942	95.64	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Dikbud
2	Kesehatan	11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama	3,111 3,622	85.89	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurn waktu yg sama	13,448 17,287	77.79	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah Desa / Kelurahan UCI Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan	186 237	78.48	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama	73 73	100.00	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalamkurun wkt yang sama	1,200 1,286	93.31	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan

NO	URUSAN	NO.	IKK	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
		16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama	794 794	100.00	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		17	Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin	Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1 Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota	123,911 123,911	100.00	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		18	Cakupan kunjungan bayi	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pd kurun waktu yang sama	12,526 15,182	82.51	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
3	Lingkungan Hidup	19	Penanganan sampah	Volume sampah yang ditangani (m3) Volume produksi sampah (m3)	258,220.68 436,498.12	59.16	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas LHK dan Dinas Perkim
		20	Kebersihan	Jumlah pasar tradisional yang tergolong baik Jumlah seluruh pasar tradisional	15 15	100.00	Pembilang dan Penyebut berasal dari DLHK dan Dinas Perindag. Tergolong baik sesuai kriteria Adipura
		21	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Jumlah daya tampung TPS (m3) Jumlah penduduk	2,877.00 677,755	0.42	Pembilang berasal dari DLHK & Dinas Perkim dan Penyebut berasal dari Dinas Dukcapil
		22	Penegakan hukum lingkungan	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda Jumlah kasus lingkungan yang ada	28 30	93.33	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas LHK
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang) Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut	1,876.44 2,193.02	85.56	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum (klasifikasi kondisi seluruh panjang jalan)
		24	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	16,905.94	73.01	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum



NO	URUSAN	NO.	IKK	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
				Luas irigasi kabupaten	23,154.16		
		25	Rumah Tangga ber-sanitasi	Jumlah rumah tangga ber sanitasi	181,318	86.49	Pembilang (satuan KK yaitu jumlah KK yang tinggal dirumah bersanitasi) dan Penyebut (jumlah seluruh KK yang tinggal di Kab/Kota) sumber data berasal dari Dins Perkim dan Disdukcapil
				Jumlah seluruh rumah tangga	209,643		
		26	Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh	172.67	0.01	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
				Luas Wilayah	2,726,310.00		
		27	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Luas ruang terbuka hijau	745,018.08	27.33	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
				Luas wilayah	2,726,310.00		
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	28	Rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	177,935	84.88	Pembilang (satuan KK yaitu jumlah KK yang tinggal dirumah bersanitasi) dan Penyebut (jumlah seluruh KK yang tinggal di Kab/Kota) berasal dari Dinas Perkim
				Jumlah seluruh rumah tangga	209,643		
		29	Lingkungan pemukiman kumuh	Luas lingkungan permukiman kumuh	1.73	0.006	Pembilang dan penyebut berasal dari DLHK dan Dinas Perkim
				Luas wilayah	27,263.10		
		30	Rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni	168,589	90.91	Sumber data dari Dinas Perkim
				Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.	185,436		
6	Kepemudaan & Olahraga	31	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten	187	0.28	Pembilang Sumber data dari Dispora Penyebut sumber data dari
				Jumlah penduduk	677,755		
		32	Lapangan olahraga .	Jumlah lapangan olahraga di kabupaten	1,031	1.52	Jumlah sarana Olah Raga yg dikelola pemerintah termasuk yg dikelola oleh Sekolah Negeri
				Jumlah penduduk	677,755		
				Lapangan olah raga adalah: 1. lap sepakbola, = ----- lap	244		

NO	URUSAN	NO.	IKK	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
				2. lap basket, = ---- lap 3. lap volley, , = ---- lap 4. lap. bulu tangkis, = ---- lap 5. kolam renang. , = ---- lap 6. Lap Tenis = ... lap 7. Lap tenis Meja = ... lap 8. Lap Sepak Takraw = ... lap 9. Lap Futsal. , = ---- lap	32 433 309 1 11 1 - -		
7	Penanaman Modal	33	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Realisasi PMDN thn 2018 – Realisasi PMDN 2017 Realisasi PMDN 2017	1,425,233,351,186 1,176,197,313,841	1.21	Sumber data dari Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)
8	Koperasi & UKM	34	Koperasi aktif	Jumlah Koperasi aktif	487	81.30	Sumber data Dinas Kop & UKM
				Jumlah seluruh koperasi	599		
		35	Usaha Mikro Aktif	Jumlah usaha mikro aktif	52,470	94.14	Sumber data dari Dinas Kop & UKM dan PATEN dengan melampirkan rekap SIUP kecil
				Jumlah seluruh Usaha Mikro	55,737		
9	Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil	36	Kepemilikan KTP	Jumlah Penduduk yang memiliki KTP	457,025	95.95	Sumber data Dinas Dukcapil
				Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah)	476,331		
		37	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran Jumah penduduk	619,301 677,755	91.38	Sumber data Dinas Dukcapil
		38	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/belum	Sudah	sudah	Sumber data Dinas Dukcapil
10	Tenaga Kerja	39	Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh	Jumlah pekerja/buruh peserta pogram Jamsostek aktif	152,567	100.00	Sumber data dari Dinas Trans Naker
				Jumlah pekerja/buruh	152,567		
		40	Pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	12,238	65.82	Sumber data dari Dinas Trans Naker (melampirkan rekap Surat Pengantar Rekrut)
				Jumlah pencari kerja yang mendaftar	18,592		

NO	URUSAN	NO.	IKK	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
11	Pangan	41	Regulasi ketahanan pangan	Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb. (Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Pertanian Berkelanjutan, dan Perda no 12 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi	ada	ada	Sumber data dari Dinas Ketahanan Pangan
		42	Ketersediaan pangan utama	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) Jumlah penduduk	175,218.88 677,755	258.53	Jenis pangan utama : padi, jagung, Sagu, Umbi
12	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	43	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah Jumlah pekerja perempuan	10,664 20,877	51.08	Melampirkan rekap data pekerja perempuan
		44	Angka melek huruf perempuan usia 15 th keatas	Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun	236,532 239,394	98.80	Sumber data dari Dinas P3A/Dinas Pendidikan
		45	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan Jumlah angkatan kerja perempuan	20,877 24,755	84.33	Sumber data dari Dinas P3A/Dinas Dukcapil/Distransnaker
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	46	Prevalensi peserta KB aktif	Jumlah peserta program KB aktif Jumlah pasangan usia subur	104.201 142.169	73.29	Sumber Data : Dinas P2KB
		47	Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan	PLKB/PKB Jumlah desa/kelurahan	87 237	36.71	Sumber Data : Dinas P2KB
14	Perhubungan	48	Angkutan darat	Jumlah angkutan darat Jumlah penumpang angkutan darat	26,325 43,674	60.28	Sumber data dari dinas perhubungan
15	Komunikasi & Informatika	49	Web site milik pemerintah daerah	Ada / tidak	ada	ada	Dinas Kominfo
		50	Pameran/expo	Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahun	2	2	Sumber (Penyelenggara Kegiatan) Bag Humas/ Dinas Kominfo

NO	URUSAN	NO.	IKK	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
16	Pertanahan	51	Luas lahan bersertifikat	Luas lahan bersertifikat di suatu daerah	3,096,308.10	12.37	Sumber Data dari Dinas Pertanahan (dengan melampirkan rekap Sertifikat)
				Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah	25,030,514.98		
		52	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Jumlah kasus yang diselesaikan	23	95.83	Sumber : Dinas Pertanahan (rekap surat permasalahan)
Jumlah kasus yang terdaftar	24						
53	Penyelesaian Ijin Lokasi	Jumlah Ijin Lokasi	18	100.00	Sumber data dari Dinas Pertanahan		
			Permohonan Ijin Lokasi			18	
17	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	54	PKK aktif	Jumlah PKK aktif	256	100.00	Sumber data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Jumlah PKK	256		
		55	Posyandu	Jumlah Posyandu Aktif	760	100.00	Sumber data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Total Posyandu	760						
18	Sosial	56	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi yang terdapat di suatu daerah	18.00	18.00	Sumber data dari Dinas Sosial
				57	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		
		Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan social dalam satu tahun	2,906				
58	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan	46,772	97.13	Sumber data dari Dinas Sosial		
		Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan	48,154				
19	Kebudayaan	59	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	53	53.00	
				60	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya		

NO	URUSAN	NO.	IKK	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
		61	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	32 34	94.12	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata / instansi yang
20	Statistik	62	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada atau tidak	tidak	tidak	Sumber data dari Diskominfo
		63	Buku "PDRB kabupaten"	Ada atau tidak	tidak	tidak	
21	Kearsipan	64	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku Jumlah Perangkat Daerah	45 58	77.59	Sumber data pembilang dari Dinas Arpus / instansi yang menangani arsip. Data penyebut dari Bagian Organisasi
		65	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	6	6.00	
22	Perpustakaan	66	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah	29,034 70,536	41.16	Sumber data dari Dinas Arpus
		67	Pengunjung perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani (10-58 thn)	199,166 500,379	39.80	Sumber data pembilang dari Dinas Arpus. Sumber data penyebut dari Dukcapil
<b>URUSAN PILIHAN</b>							
1	Kelautan dan Perikanan	1	Produksi perikanan	Jumlah Produksi Ikan (Ton)	177,305.9	97.87	Sumber data dari Dinas Kelautan dan Perikanan
				Target Daerah (Ton)	181,170.0		
		2	Konsumsi ikan	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)	74.8	100.13	Sumber data dari Dinas Kelautan dan Perikanan
				Target Daerah (Kg)	74.7		
2	Pertanian	3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)	177,982.00	5.08	Sumber data dari Dinas Pertanian dan Peternakan
				Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)	35,033.10		
		4	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2017	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian	17,013,118.59	11.47	Sumber data dari Dinas Pertanian atau buku PDRB Sektor pertanian

NO	URUSAN	NO.	IKK	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
				Jumlah total PDRB	148,326,251.25		(harga berlaku)
3	Pariwisata	5	Kunjungan wisata	Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun	1,720,217	1720217	Sumber data dari Dinas Pariwisata
		6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2017	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata Jumlah total PDRB	1,832,668.40 148,336,959.50	1.24	Dinas Pariwisata atau PDRB sub sektor Perdagangan (jasa, hotel, restoran)
4	Perindustrian	7	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2017	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri Jumlah total PDRB	6,009,353.05 148,326,251.00	4.05	Dinas Perindag atau PDRB sektor Industri Pengolahan
		8	Pertumbuhan Industri	Jumlah Industri tahun 2017 - Jumlah Industri tahun 2018 Jumlah Industri s/d tahun 2018	8,656 9,075	95.38	Sumber data dari Dinas Perindag
5	Perdagangan	9	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2017	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan Jumlah total PDRB	5,787,474.87 148,326,251.00	3.90	Dinas Perindag atau buku PDRB sub sector Perdagangan
		10	Ekspor Bersih Perdagangan	Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor	71,238,057,729,600	71,238,057,729,576	Dinas Perindag
6	Transmigrasi	11	Transmigran swakarsa	Jumlah transmigran swakarsa	24.492	38.50	Sumber data Dinas Transnaker
				Jumlah transmigran	63.616		

#### FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

		1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada/ Perda No. 17 Tahun 2010	ada	ada	Sumber data dari BAPPEDA
		2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/ Perda No. 7 Tahun 2016	ada	ada	Sumber data dari BAPPEDA
		3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/ Perbup No. 27 tahun 2016	ada	ada	Sumber data dari BAPPEDA
		4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Jumlah program RKPD tahun berkenaan	533	86.11	Sumber data dari BAPPEDA

NO	URUSAN	NO.	IKK	JENIS DATA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
				Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	619		
		5	Sistem Informasi Manajemen Pemda	Menunjukkan Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda vbs	75	75.00	Sumber data dari Dinas Kominfo
		6	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda	ada	ada	Sumber Data : Dins PM-PTSP / RSUD / Disdukcapil
<b>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>							
		1	Kegiatan pembinaan politik di daerah	Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik di daerah	76	76.00	Kesbangpol (kegiatan pembinaan politik yang didanai dari APBD)
		2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	8	8.00	Kesbangpol (kegiatan pembinaan politik yang didanai dari APBD)